BAGIAN ANGGARAN 010

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI *AUDITED*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 3450038
WEBSITE : HTTP://KEMENDAGRI.GO.ID

BAGIAN ANGGARAN 010

LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 13 Mei 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	xv
Pernyataan Telah Direviu	xvi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	92
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	153
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	189
F. Pengungkapan Penting Lainnya	199
G. Penutup	203
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel 1	:	Pagu dan Realisasi Belanja untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 31 Desember 2023	11
Tabel 2	:	Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I	16
Tabel 3	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel 4	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel 5	:	Kriteria Kualitas Piutang	26
Tabel 6	:	Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2023	27
Tabel 7	:	Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	27
Tabel 8	:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 per MAP	28
Tabel 9	:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 per Eselon I	28
Tabel 10	:	Perbandingan Realisasi PNBP Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Eselon I	29
Tabel 11	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2023	30
Tabel 12	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 31 Desember 2023	31
Tabel 13	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Unit Eselon I	32
Tabel 14	:	Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	32
Tabel 15	:	Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 16	:	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 17	:	Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	34

Tabel 18	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	35
Tabel 19	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	35
Tabel 20	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	36
Tabel 21	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	36
Tabel 22	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 23	:	Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 24	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	38
Tabel 25	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan per Eselon I s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	38
Tabel 26	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Percepatan Penurunan Stunting pada Ditjen Bina Bangda s.d. 31 Desember 2023	80
Tabel 27	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting pada Ditjen Dukcapil s.d. 31 Desember 2023	81
Tabel 28	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2023	85
Tabel 29	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional I	86
Tabel 30	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional II	86
Tabel 31	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional III	87
Tabel 32	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional IV	87
Tabel 33	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional V	87

Tabel 34	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional VI	88
Tabel 35	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional VII	88
Tabel 36	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 s.d. 31 Desember 2023	88
Tabel 37	:	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	92
Tabel 38	:	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	93
Tabel 39	:	Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan	93
Tabel 40	:	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	95
Tabel 41	:	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	99
Tabel 42	:	Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap	100
Tabel 43	:	Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	100
Tabel 44	:	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I	102
Tabel 45	:	Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima	103
Tabel 46	:	Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I	105
Tabel 47	:	Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi	105
Tabel 48	:	Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	106
Tabel 49	:	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	107
Tabel 50	:	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	108
Tabel 51	:	Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2023	108
Tabel 52	:	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	109
Tabel 53	:	Rincian Persediaan	110
Tabel 54	:	Rincian Persediaan per Unit Eselon I	111
Tabel 55	:	Mutasi Persediaan	111
Tabel 56	:	Rincian Tanah per Unit Eselon I	114
Tabel 57	:	Rincian Mutasi Tanah Tahun 2023	114

Tabel 58	:	Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I	116
Tabel 59	:	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	116
Tabel 60	:	Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I	123
Tabel 61	:	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	124
Tabel 62	:	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I	129
Tabel 63	:	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	129
Tabel 64	:	Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I	131
Tabel 65	:	Mutasi Aset Tetap Lainnya	132
Tabel 66	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I	134
Tabel 67	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	134
Tabel 68	:	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	135
Tabel 69	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	138
Tabel 70	:	Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	139
Tabel 71	:	Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2023	139
Tabel 72	:	Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I	143
Tabel 73	:	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	143
Tabel 74	:	Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	144
Tabel 75	:	Mutasi Aset Tak Berwujud	144
Tabel 76	:	Rincian Aset Lain-lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2023	146
Tabel 77	:	Rincian Aset Lain-lain per Eselon I	147
Tabel 78	:	Mutasi Aset Lain-lain	147
Tabel 79	:	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	149
Tabel 80	:	Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I	150
Tabel 81	:	Pendapatan Diterima di Muka	151
Tabel 82	:	Utang Jangka Pendek Lainnya	152
Tabel 83	:	Perbandingan Rincian PNBP Tahun 2023 dengan Tahun 2022	153

Tabel 84	:	Selisiih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual	154
Tabel 85	:	Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2023 dengan Tahun 2022	158
Tabel 86	:	Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual	159
Tabel 87	:	Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2023 dengan Tahun 2022	162
Tabel 88	:	Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2023	163
Tabel 89	:	Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan Dengan Beban Persediaan	164
Tabel 90	:	Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dengan Tahun 2022	165
Tabel 91	:	Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrual	166
Tabel 92	:	Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel	171
Tabel 93	:	Selisih Beban Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara Basis Kas dan Basis Akrual	172
Tabel 94	:	Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dengan Tahun 2022	172
Tabel 95	:	Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual	173
Tabel 96	:	Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	175
Tabel 97	:	Penyajian Beban Pemeliharaan	175
Tabel 98	:	Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan	176
Tabel 99	:	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dengan Tahun 2022	177
Tabel 100	:	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual	177
Tabel 101	:	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2022	179
Tabel 102	:	Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	179
Tabel 103	:	Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	180

Tabel 104	:	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022	181
Tabel 105	:	Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	181
Tabel 106	:	Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	182
Tabel 107	:	Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	182
Tabel 108	:	Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	183
Tabel 109	:	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dengan Tahun 2022	183
Tabel 110	:	Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	183
Tabel 111	:	Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	184
Tabel 112	:	Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Opersional Tahun 2023 dengan Tahun 2022	184
Tabel 113	:	Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Opersional antara Basis Kas dan Basis Akrual	185
Tabel 114	:	Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Opersional antara Basis Kas dan Basis Akrual	187
Tabel 115	:	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2023	190
Tabel 116	:	Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2023	194
Tabel 117		Rincian Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023	195
Tabel 118	:	Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2023	196
Tabel 119	:	Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya pada Tahun 2022	201

Tabel 120 : Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama pada Tahun 2023 202

DAFTAR GRAFIK

			Hal
Grafik 1	:	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto T.A. 2023 dan T.A 2022	31

DAFTAR LAMPIRAN

A. DAFTAR LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Lampiran II	:	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran III	:	Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Lampiran IV	:	Rincian Pagu Anggaran, Relaisasi Anggaran, Kegiatan, Program, Output dan Target dari masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi
Lampiran V	:	Rincian Pagu Anggaran, Relaisasi Anggaran, Kegiatan, Program, Output dan Target dari Masing-masing yang Menjadi Prioritas Nasional
Lampiran VI	:	Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2023
Lampiran VII	:	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara Penerimaan, Serta Kas Lainnya Dan Setara Kas Per Satker Per 31 Desember 2023
Lampiran VIII	:	Rincian Penyetoran Kas Setelah Tanggal Neraca
Lampiran IX	:	Rincian Belanja Dibayar Dimuka
Lampiran X	:	Rekapitulasi Persediaan Per Satker Menurut Akun
Lampiran XI	:	Rincian Mutasi Persediaan Per Eselon I
Lampiran XII	:	Rincian Mutasi Persediaan Per Akun
Lampiran XIII	:	Daftar Persediaan Tidak Dikuasai
Lampiran XIV	:	Rekapitulasi Aset Tetap Per Satker Per 31 Desember 2023
Lampiran XV	:	Rincian Mutasi Tanah Per Unit Eselon I
Lampiran XVI	:	Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin Per Unit Eselon I

Lampiran XVII	:	Rincian Pembelian (101) Peralatan Dan Mesin Per Satker
Lampiran XVIII	:	Rincian Mutasi Gedung Dan Bangunan Per Unit Eselon I
Lampiran XIX	:	Rincian Mutasi Jalan Irigasi Dan Jaringan Per Unit Eselon I
Lampiran XX	:	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Lampiran XXI	:	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I
Lampiran XXII	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker
Lampiran XXIII	:	Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Serta Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Per Satuan Kerja Per 31 Desember 2023
Lampiran XXIV	:	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I
Lampiran XXV	:	Rekapitulasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran XXVI	:	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
Lampiran XXVII	:	Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga
Lampiran XXVIII	:	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Per Satker
Lampiran XXIX	:	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Lampiran XXX	:	Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
Lampiran XXXI	:	Rincian Koreksi Lain-lain
Lampiran XXXII	:	Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Lampiran XXXIII	:	Rekapitulasi Satker Inaktif yang Saldonya Dialihkan ke Satker Pusat

Lampiran XXXIV	:	Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode Persediaan Untuk Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2023
Lampiran XXXV	:	Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN Kementerian Dalam Negeri Untuk Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2023
Lampiran XXXVI	:	Daftar Rekening Kementerian Dalam Negeri

B. DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

Lampiran Neraca Percobaan Akrual Tingkat Kemendagri Per 1 Januari 2023

Lampiran Neraca Percobaan Akrual Tingkat Kemendagri Per 31 Desember 2023

Lampiran Neraca Percobaan Kas Tingkat Kemendagri Per 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19 Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 *audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sepanjang sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan selaku Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 Mei 2024
MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat Entitas Pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 Februari 2024
Inspektur Jenderal,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Drs. Tomsi Tohir, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp881.280.249.636,00 atau mencapai 188,42% dari estimasi pendapatan sebesar Rp467.710.176.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.265.153.052.424,00 atau mencapai 97,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.385.969.126.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.811.143.128.463,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp449.128.636.810,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.216.057.646.956,00, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang) sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya) sebesar Rp145.956.844.697,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp211.421.835.519,00 dan Rp16.599.721.292.944,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp747.377.561.641,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.369.419.873.095,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.622.042.311.454,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp8.516.711.793,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp3.613.525.599.661,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp15.835.604.107.918,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp3.613.525.599.661,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar (Rp19.241.506.205,00) dan transaksi antar entitas sebesar Rp4.396.884.290.892,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp16.599.721.292.944,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Perpajakan		**0**	**0**	**0,00**	**0**
Pajak Dalam Negeri		0	0	0,00	0
Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.1**	**467.710.176.000**	**881.280.249.636**	**188,42**	**88.029.401.089**
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0,00	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0,00	0
Pendapatan BLU		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		467.710.176.000	881.280.249.636	188,42	88.029.401.089
Pendapatan Hibah		**0**	**0**	**0,00**	**0**
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		**467.710.176.000**	**881.280.249.636**	**188,42**	**88.029.401.089**
BELANJA NEGARA	**B.2.**				
Belanja Pemerintah Pusat		**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**97,25**	**3.200.796.124.766**
Belanja Pegawai	B.3	828.044.726.000	825.439.024.218	99,69	821.065.217.234
Belanja Barang	B.4	3.312.510.979.000	3.194.834.083.702	96,45	2.194.007.150.142
Belanja Modal	B.5	245.413.421.000	244.879.944.504	99,78	185.723.757.390
Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0
Belanja Subsidi		0	0	0,00	0
Belanja Hibah		0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0	0	0,00	0
Transfer ke Daerah		0	0	0,00	0
Dana Perimbangan		0	0	0,00	0
Dana Transfer Umum		0	0	0,00	0
Dana Bagi Hasil		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Umum		0	0	0,00	0
Dana Transfer Khusus		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0,00	0
Dana Insentif Daerah		0	0	0,00	0
Dana Keistimewaan DIY		0	0	0,00	0
Dana Otonomi Khusus		0	0	0,00	0
Dana Desa		0	0	0,00	0
Hibah Kepada Daerah		0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**97,25**	**3.200.796.124.766**
PEMBIAYAAN		0	0	0,00	0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	467.710.176.000	881.280.249.636	**413.570.073.636**	**188,42**	**68.686.980.000**	**88.029.401.089**	**19.342.421.089**	**128,16**
	1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Pendapatan BLU	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	467.710.176.000	881.280.249.636	413.570.073.636	188,42	68.686.980.000	88.029.401.089	19.342.421.089	128,16
	III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	0,00
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**467.710.176.000**	**881.280.249.636**	**413.570.073.636**	**188,42**	**68.686.980.000**	**88.029.401.089**	**19.342.421.089**	**128,16**
	B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	I. Belanja Pemerintah Pusat	4.385.969.126.000	4.265.153.052.424	**(120.816.073.576)**	**97,25**	**3.229.423.335.000**	**3.200.796.124.766**	**(28.627.210.234)**	**99,11**
	1. Belanja Pegawai	828.044.726.000	825.439.024.218	(2.605.701.782)	99,69	826.454.421.000	821.065.217.234	(5.389.203.766)	99,35
	2. Belanja Barang	3.312.510.979.000	3.194.834.083.702	(117.676.895.298)	96,45	2.216.614.686.000	2.194.007.150.142	(22.607.535.858)	98,98
	3. Belanja Modal	245.413.421.000	244.879.944.504	(533.476.496)	99,78	186.354.228.000	185.723.757.390	(630.470.610)	99,66
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Belanja Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Belanja Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Dana Transfer Khusus	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	b. Dana Insentif Daerah	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	c. Dana Keistimewaan DIY	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	d. Dana Otonomi Khusus	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	2. Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	3. Hibah Kepada Daerah	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Jumlah Belanja Negara	**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**(120.816.073.576)**	**97,25**	**3.229.423.335.000**	**3.200.796.124.766**	**(28.627.210.234)**	**99,11**
	C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta 13 Mei 2024

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

NERACA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	56.709.120	6.878.962
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	2.343.805.012	2.128.986.750
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	231.660.949.224	189.741.607
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	7.050.534.000	325.108.829
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	888.543
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	124.718.757	1.540.933.512
Piutang Bukan Pajak	C.7	13.536.525.594	14.466.367.294
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(9.844.326.180)	(8.795.745.479)
Bagian Lancar TP/TGR	C.9	78.000.000	19.592.241.337
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.10	-	(18.349.000.883)
Persediaan	C.11	204.121.721.283	228.154.540.826
JUMLAH ASET LANCAR		**449.128.636.810**	**239.260.941.298**
ASET TETAP			
Tanah	C.12	13.166.366.737.522	12.474.680.756.512
Peralatan dan Mesin	C.13	3.663.742.657.834	3.508.767.385.762
Gedung dan Bangunan	C.14	2.904.113.214.212	2.867.573.800.289
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.15	293.820.847.621	288.798.425.915
Aset Tetap Lainnya	C.16	160.744.484.125	142.514.310.840
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.17	29.571.282.509	41.946.345.532
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(4.002.301.576.867)	(3.756.554.085.442)
JUMLAH ASET TETAP		**16.216.057.646.956**	**15.567.726.939.408**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.19	17.850.089.235	135.500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.20	(17.850.089.235)	(452.500)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**-**	**135.047.500**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	744.115.321.306	710.313.792.390
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	54.982.239.721	-
Aset Lain-Lain	C.23	211.955.882.101	195.636.562.479
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(865.096.598.431)	(841.657.321.909)
JUMLAH ASET LAINNYA		**145.956.844.697**	**64.293.032.960**
JUMLAH ASET		**16.811.143.128.463**	**15.871.415.961.166**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	83.654.061.625	29.292.974.202
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	127.686.367.506	6.509.135.334
Uang Muka dari KPPN	C.27	56.709.120	6.878.962
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	24.697.268	2.864.750
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**211.421.835.519**	**35.811.853.248**
JUMLAH KEWAJIBAN		**211.421.835.519**	**35.811.853.248**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	16.599.721.292.944	15.835.604.107.918
JUMLAH EKUITAS		**16.599.721.292.944**	**15.835.604.107.918**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**16.811.143.128.463**	**15.871.415.961.166**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2022	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	56.709.120	6.878.962	49.830.158	724,38
Kas di Bendahara Penerimaan	2.343.805.012	2.128.986.750	214.818.262	10,09
Kas Lainnya dan Setara Kas	231.660.949.224	189.741.607	231.471.207.617	121.992,86
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	7.050.534.000	325.108.829	6.725.425.171	2.068,67
Uang Muka Belanja (Prepayment)	0	888.543	(888.543)	(100,00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	124.718.757	1.540.933.512	(1.416.214.755)	(91,91)
Piutang Bukan Pajak	13.536.525.594	14.466.367.294	(929.841.700)	(6,43)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(9.844.326.180)	(8.795.745.479)	(1.048.580.701)	11,92
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	3.692.199.414	5.670.621.815	(1.978.422.401)	(34,89)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	78.000.000	19.592.241.337	(19.514.241.337)	(99,60)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(18.349.000.883)	18.349.000.883	(100,00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	78.000.000	1.243.240.454	(1.165.240.454)	(93,73)
Persediaan	204.121.721.283	228.154.540.826	(24.032.819.543)	(10,53)
JUMLAH ASET LANCAR	**449.128.636.810**	**239.260.941.298**	**209.867.695.512**	**87,71**
ASET TETAP				
Tanah	13.166.366.737.522	12.474.680.756.512	691.685.981.010	5,54
Peralatan dan Mesin	3.663.742.657.834	3.508.767.385.762	154.975.272.072	4,42
Gedung dan Bangunan	2.904.113.214.212	2.867.573.800.289	36.539.413.923	1,27
Jalan Irigasi dan Jaringan	293.820.847.621	288.798.425.915	5.022.421.706	1,74
Aset Tetap Lainnya	160.744.484.125	142.514.310.840	18.230.173.285	12,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.571.282.509	41.946.345.532	(12.375.063.023)	(29,50)
Akumulasi Penyusutan	(4.002.301.576.867)	(3.756.554.085.442)	(245.747.491.425)	6,54
JUMLAH ASET TETAP	**16.216.057.646.956**	**15.567.726.939.408**	**648.330.707.548**	**4,16**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17.850.089.235	135.500.000	17.714.589.235	13.073,50
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	(17.850.089.235)	(452.500)	(17.849.636.735)	3.944.671,10
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	135.047.500	(135.047.500)	(100,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**0**	**135.047.500**	**(135.047.500)**	**(100,00)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2022	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	744.115.321.306	710.313.792.390	33.801.528.916	4,76
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	54.982.239.721	0	54.982.239.721	0,00
Aset Lain-lain	211.955.882.101	195.636.562.479	16.319.319.622	8,34
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(865.096.598.431)	(841.657.321.909)	(23.439.276.522)	2,78
JUMLAH ASET LAINNYA	**145.956.844.697**	**64.293.032.960**	**81.663.811.737**	**127,02**
JUMLAH ASET	**16.811.143.128.463**	**15.871.415.961.166**	**939.727.167.297**	**5,92**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Kepada Pihak Ketiga	83.654.061.625	29.292.974.202	54.361.087.423	185,58
Pendapatan Diterima Dimuka	127.686.367.506	6.509.135.334	121.177.232.172	1.861,65
Uang Muka dari KPPN	56.709.120	6.878.962	49.830.158	724,38
Utang Jangka Pendek Lainnya	24.697.268	2.864.750	21.832.518	762,11
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**211.421.835.519**	**35.811.853.248**	**175.609.982.271**	**490,37**
JUMLAH KEWAJIBAN	**211.421.835.519**	**35.811.853.248**	**175.609.982.271**	**490,37**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16.599.721.292.944	15.835.604.107.918	764.117.185.026	4,83
JUMLAH EKUITAS	**16.599.721.292.944**	**15.835.604.107.918**	**764.117.185.026**	**4,83**
JUMLAH EKUITAS	**16.599.721.292.944**	**15.835.604.107.918**	**764.117.185.026**	**4,83**
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	**16.811.143.128.463**	**15.871.415.961.166**	**939.727.167.297**	**5,92**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta 13 Mei 2024
Menteri Dalam Negeri

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Tito Karnavian

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	747.377.561.641	74.295.704.529
JUMLAH PENDAPATAN		**747.377.561.641**	**74.295.704.529**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	826.005.414.719	819.017.793.905
Beban Persediaan	D.3	21.794.582.829	27.527.465.057
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.196.254.071.643	1.374.882.409.490
Beban Pemeliharaan	D.5	125.554.899.637	131.339.721.393
Beban Perjalanan Dinas	D.6	581.055.989.412	481.609.316.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	319.337.106.602	233.020.009.151
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	298.246.135.111	282.561.223.819
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	1.171.673.142	2.588.804.950
JUMLAH BEBAN		**4.369.419.873.095**	**3.352.546.743.765**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(3.622.042.311.454)**	**(3.278.251.039.236)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.218.013.487	921.087.121
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		304.297.318	122.838.376
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.769.867.037	19.744.316.278
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		166.871.413	8.826.807.983
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**8.516.711.793**	**11.715.757.040**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(3.613.525.599.661)**	**(3.266.535.282.196)**
POS LUAR BIASA	D.11		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**(3.613.525.599.661)**	**(3.266.535.282.196)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2022	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
PENDAPATAN OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	747.377.561.641	74.295.704.529	673.081.857.112	905,95
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**747.377.561.641**	**74.295.704.529**	**673.081.857.112**	**905,95**
PENDAPATAN HIBAH	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**747.377.561.641**	**74.295.704.529**	**673.081.857.112**	**905,95**
BEBAN OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
Beban Pegawai	826.005.414.719	819.017.793.905	6.987.620.814	0,85
Beban Persediaan	21.794.582.829	27.527.465.057	(5.732.882.228)	(20,83)
Beban Barang dan Jasa	2.196.254.071.643	1.374.882.409.490	821.371.662.153	59,74
Beban Pemeliharaan	125.554.899.637	131.339.721.393	(5.784.821.756)	(4,40)
Beban Perjalanan Dinas	581.055.989.412	481.609.316.000	99.446.673.412	20,65
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	319.337.106.602	233.020.009.151	86.317.097.451	37,04
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	298.246.135.111	282.561.223.819	15.684.911.292	5,55
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.171.673.142	2.588.804.950	(1.417.131.808)	(54,74)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**4.369.419.873.095**	**3.352.546.743.765**	**1.016.873.129.330**	**30,33**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(3.622.042.311.454)**	**(3.278.251.039.236)**	**(343.791.272.218)**	**10,49**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2022	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	**1.913.716.169**	**798.248.745**	**1.115.467.424**	**139,74**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.218.013.487	921.087.121	1.296.926.366	140,80
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	304.297.318	122.838.376	181.458.942	147,72
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**6.602.995.624**	**10.917.508.295**	**(4.314.512.671)**	**(39,52)**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.769.867.037	19.744.316.278	(12.974.449.241)	(65,71)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	166.871.413	8.826.807.983	(8.659.936.570)	(98,11)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**8.516.711.793**	**11.715.757.040**	**(3.199.045.247)**	**(27,31)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	**(3.613.525.599.661)**	**(3.266.535.282.196)**	**(346.990.317.465)**	**10,62**
POS LUAR BIASA	**0**	**0**	**0**	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	**0**	**0**	**0**	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(3.613.525.599.661)**	**(3.266.535.282.196)**	**(346.990.317.465)**	**10,62**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 13 Mei 2024
Menteri Dalam Negeri,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Tito Karnavian

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	15.835.604.107.918	15.362.241.991.047
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.613.525.599.661)	(3.266.535.282.196)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(19.241.506.205)	(543.245.496)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	10.079.107
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	(19.005.933.912)	(749.685.789)
Koreksi Lain-lain	E.3.5	(235.572.293)	196.361.186
JUMLAH		**(19.241.506.205)**	**(543.245.496)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.396.884.290.892	3.740.440.644.563
EKUITAS AKHIR	E.5	**16.599.721.292.944**	**15.835.604.107.918**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2022	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	**15.835.604.107.918**	**15.362.241.991.047**	**473.362.116.871**	**3,08**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(3.613.525.599.661)**	**(3.266.535.282.196)**	**(346.990.317.465)**	**10,62**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**(19.241.506.205)**	**(543.245.496)**	**(18.698.260.709)**	**3.441,95**
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0	10.079.107	(10.079.107)	(100,00)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(19.005.933.912)	(749.685.789)	(18.256.248.123)	2.435,19
Lain-lain	(235.572.293)	196.361.186	(431.933.479)	(219,97)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**4.396.884.290.892**	**3.740.440.644.563**	**656.443.646.329**	**17,55**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**764.117.185.026**	**473.362.116.871**	**290.755.068.155**	**61,42**
EKUITAS AKHIR	**16.599.721.292.944**	**15.835.604.107.918**	**764.117.185.026**	**4,83**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 13 Mei 2024

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Dalam Negeri

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri mengatur tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan

Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Visi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu *"**Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".***

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, yaitu:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Indeks Demokrasi Indonesia.
      2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
      3) Indeks Kinerja Ormas.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
      2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8) Jumlah kelembagaan penelititan dan pengembangan di derah dengan kategori “utama”.
9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
   1) Indeks Pengawasan Internal.
   2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Capaian output strategis dari beberapa sasaran strategis diatas dijelaskan dalam Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk melaksanakan tujuh Prioritas Nasional. Rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja bruto sampai dengan 31 Desember 2023 dari tujuh Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1

Pagu dan Realisasi Belanja Bruto untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 31 Desember 2023

Kode PN	Uraian PN	Pagu Belanja Rupiah	Realisasi Belanja Bruto Rupiah	%
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.784.358.000	3.781.343.783	99,92
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	171.811.185.000	169.758.151.274	98,81
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	13.169.799.000	13.086.319.268	99,37
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.155.575.000	5.154.350.628	99,98
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13.677.244.000	13.650.900.992	99,81
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1.252.800.000	1.239.784.472	98,96
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	150.980.557.000	150.976.279.054	100,00
JUMLAH		**359.831.518.000**	**357.647.129.471**	**99,39**

Rincian pagu belanja dan realisasi belanja s.d 31 Desember 2023 untuk masing-masing Prioritas Nasional berdasarkan penanggung jawab Unit Eselon I disajikan pada Catatan Penting Lainnya bagian Laporan Realisasi Anggaran.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 disusun untuk tujuan umum dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan entitas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat ketentuan yang mengatur bahwa SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya. Pemrosesan transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI diterbitkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi, yaitu Sistem SAKTI.

SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI diterapkan dalam sembilan modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan (GLP). Data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan SAKTI didukung oleh Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk monitoring data dan transaksi SAKTI.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri yang meliputi eselon I, dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 11 Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

   Pada Eselon I Setjen terdapat satuan kerja IPDN yang merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22.701 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, IPDN Kampus Jakarta tidak berdiri sendiri sebagai satuan kerja. IPDN Kampus Jakarta melebur menjadi bagian dari struktur organisasi satuan kerja IPDN Jatinangor yang berada dibawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Peleburan IPDN Kampus Jakarta tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Program studi diselenggarakan di IPDN

Kampus Jatinangor dan Kampus Daerah. Terdapat enam IPDN Kampus di Daerah yang berdiri sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran sendiri, yaitu IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah, dan IPDN Kampus Papua di Kota Jayapura.

Pada Eselon I Setjen juga terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023, Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebanyak 135 satker yang tersebar di 34 provinsi.

4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon I Ditjen Bina Pemerintahan Desa membawahi tiga satker daerah, yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Balai

Pemerintahan Desa Yogyakarta, dan Balai Pemerintahan Desa Lampung.

7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Inspektorat Jenderal
   Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
    Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi lima satker daerah, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit tinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Jumlah satuan kerja dengan status aktif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebanyak 163 satker. Rincian jumlah satker dengan status aktif pada masing-masing Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I

NO	KODE ES1	UNIT ESELON I	KP	KD	DK	TP	JUMLAH
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	3	7	-	-	10
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	-	-	-	1
3	03	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	-	-	-	1
4	04	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	-	132	3	136
5	05	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	-	-	4
6	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	-	-	-	1
7	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	1	-	-	-	1
8	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	-	-	1
9	09	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1	-	-	-	1
10	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	-	-	-	1
11	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	5	-	-	6
JUMLAH			**13**	**15**	**132**	**3**	**163**

Jumlah satker inaktif bersaldo untuk periode pelaporan Tahun 2023 sebanyak tiga satker yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan (kode satker 160552) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka (kode satker 433309) pada Unit Eselon I Ditjen BAK serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (kode satker 352588) pada Unit Eselon I BPSDM.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Dalam Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Dalam hal terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka kas disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas yang dikelola Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dan Setara Kas.
- Piutang Bukan Pajak dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang berdasarkan pungutan diakui dengan memperhatikan terpenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu membentuk penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

  Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang

mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
    - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berdasarkan keputusan pertimbangan entitas bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus disajikan pada pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun Aset Tetap ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas ke pengelola barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugas kewajibannya.

- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi *software*, hak paten dan hak cipta, *lisensi* dan waralaba (*franchise*), hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan ATB lainnya.
- ATB diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa di masa depan, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengeluaran untuk memperoleh ATB melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas, harus dapat dibedakan antara tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap penelitian atau riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap pengembangan, apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan. Dalam hal terdapat tahapan setelah implementasi/ operasionalisasi, umumnya dalam pengembangan *software*

komputer, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

- Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Terhadap kondisi tersebut maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun ATB ke akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar saldo di rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) atas

pengeluaran belanja yang belum diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran atau terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain tersebut terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113).
- Aset Lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dan ATB dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- Aset Tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap/ATB menjadi objek penyusutan dan amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan Aplikasi Monsakti. Kemendagri melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, salah satunya penerimaan Pinjaman dan Hibah Tahun 2023.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja tersaji pada tabel 6.

Tabel 6

Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan (Rp)
Estimasi Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	50.888.142.000	467.710.176.000	416.822.034.000
Total Estimasi Pendapatan	**50.888.142.000**	**467.710.176.000**	416.822.034.000
Pagu Belanja			
Belanja Pegawai	860.730.818.000	828.044.726.000	(32.686.092.000)
Belanja Barang	2.029.832.831.000	3.312.510.979.000	1.282.678.148.000
Belanja Modal	96.239.341.000	245.413.421.000	149.174.080.000
Jumlah Pagu Belanja	**2.986.802.990.000**	**4.385.969.126.000**	**1.399.166.136.000**

Perubahan pagu belanja berdasarkan program Kemendagri tersaji pada tabel 7.

Tabel 7

Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Kode	Program	Anggaran TA 2023	
		Awal	Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	1.903.299.706.000	1.961.839.223.000
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	362.980.121.000	1.474.298.785.000
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	523.515.457.000	752.847.470.000
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	197.007.706.000	196.983.648.000
	Total Pagu Belanja	**2.986.802.990.000**	**4.385.969.126.000**

Perubahan pagu belanja terjadi karena adanya penambahan pagu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri serta PNBP pada Ditjen Dukcapil.

Realisasi Pendapatan Rp881.280.249.636,00

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp881.280.249.636,00 atau 188,42% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp467.710.176.000,00. Keseluruhan pendapatan Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan

Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 per MAP

Kode Map	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	181.100.000	1.605.149.886	886,33
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	612.863.601	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.557.898.000	3.874.512.506	248,70
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	1.665.000	0,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24.227.000	30.080.000	124,16
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	314.000.000	220.997.100	70,38
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	13.955.050.000	17.440.051.500	124,97
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	746.850.000	462.953.000	61,99
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	50.587.858.000	50.243.378.000	99,32
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.808.927.000	2.286.950.000	126,43
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	398.534.266.000	793.818.491.500	199,18
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.298.950	0,00
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.101.328	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	1.334.461.763	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	59.538.792	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	388.498.703	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.450.974.618	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.454.579.148	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	775.011.684	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	217.692.557	0,00
Total Pendapatan		**467.710.176.000**	**881.280.249.636**	**188,42**

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 9.

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 per Eselon I

No	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1	Setjen	16.151.782.000	23.384.601.170	144,78
2	Itjen	-	198.676.486	0,00
3	Ditjen Polpum	-	977.039.243	0,00
4	Ditjen Bina Adwil	-	1.102.502.114	0,00
5	Ditjen Bina Pemdes	114.704.000	1.769.527.376	1542,69
6	Ditjen Bina Bangda	400.000.000	2.147.576.462	536,89
7	Ditjen Otda	-	133.988.741	0,00
8	Ditjen Dukcapil	398.534.266.000	795.078.317.795	199,50
9	Ditjen Keuda	-	10.025.240	0,00
10	BSKDN	-	552.472.128	0,00
11	BPSDM	52.509.424.000	55.925.522.881	106,51
Jumlah		**467.710.176.000**	**881.280.249.636**	**188,42**

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per satker disajikan pada **Lampiran I** (Rekap Laporan PNBP).

Rincian realisasi pendapatan per tanggal pelaporan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi PNBP
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Eselon I

No	Eselon I	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Naik (Turun) %
1	Setjen	23.384.601.170	28.270.326.773	(17,28)
2	Itjen	198.676.486	487.881.199	(59,28)
3	Ditjen Polpum	977.039.243	69.923.500	1.297,30
4	Ditjen Bina Adwil	1.102.502.114	1.503.839.997	(26,69)
5	Ditjen Bina Pemdes	1.769.527.376	2.702.220.930	(34,52)
6	Ditjen Bina Bangda	2.147.576.462	1.393.373.299	54,13
7	Ditjen Otda	133.988.741	762.056.161	(82,42)
8	Ditjen Dukcapil	795.078.317.795	4.816.073.386	16.408,85
9	Ditjen Keuda	10.025.240	89.023.048	(88,74)
10	BSKDN	552.472.128	140.772.817	292,46
11	BPSDM	55.925.522.881	47.793.909.979	17,01
Jumlah		**881.280.249.636**	**88.029.401.089**	**901,12**

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp881.280.249.636,00 mengalami kenaikan sebesar 901,12% dibandingkan realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.029.401.089,00. Kenaikan pendapatan ini karena bertambahnya nilai PNBP fungsional berupa Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang merupakan pendapatan dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) huruf f, yaitu pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil.

Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp217.692.347,00 berasal dari satker BPSDM sebesar Rp217.692.347,00, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp180,00, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat sebesar Rp30,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penerimaan atas adanya kelebihan setor pada satker Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp180,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat sebesar Rp30,00.

b. Penerimaan atas adanya kelebihan setor ke rekening Bank Mandiri milik Bendahara Penerimaan BPSDM yang dilakukan beberapa calon peserta diklat sebesar Rp94.804,00.

c. Beban penggunaan Listrik atas Sewa Penempatan Infrastuktur Telekomunikasi di Gedung F BPSDM Kemendagri oleh PT Mac Sarana

Djaya Tahun 2015 s.d. 2022 sebesar Rp217.597.543,00.

Selama periode pelaporan Tahun 2023 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp212.505.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pada satker PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp169.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Realisasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) sebesar Rp3.665.000,00 telah diajukan permohonan pengembalian disebabkan kesalahan penentuan tarif PNBP dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
   2) Realisasi Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (425429) sebesar Rp166.320.000,00 telah diajukan permohonan pengembalian dikarenakan terdapat kesalahan penggunaan akun pendapatan saat penyetoran.

b. Pada satker PPSDM Regional Makassar sebesar Rp42.520.000,00 merupakan pengajuan permohonan pengembalian atas realisasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) yang disebabkan adanya pembatalan kegiatan dan para peserta telah menyetor biaya pendidikan dan pelatihan ke kas negara.

Selama periode TA 2023 Ditjen Dukcapil memperoleh Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (425692) sebesar Rp793.818.491.500,00. Atas pendapatan tersebut sebesar Rp119.943.814.000,00 merupakan sisa voucher Jasa Layanan Kependudukan yang belum dipakai Pengguna per 31 Desember 2023 sehingga dicatat sebagai pendapatan diterima di muka pada Neraca per 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja
Rp4.265.153.052.424,00

B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.265.153.052.424,00 atau 97,25% dari anggaran belanja sebesar Rp4.385.969.126.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,25% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.200.796.124.766,00. Rincian anggaran belanja dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 menurut jenis belanja disajikan pada tabel 11.

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
s.d. 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bruto			
Belanja Pegawai	828.044.726.000	825.664.657.615	99,71
Belanja Barang	3.312.510.979.000	3.200.335.088.613	96,61
Belanja Modal	245.413.421.000	244.887.226.204	99,79
Total Belanja Bruto	**4.385.969.126.000**	**4.270.886.972.432**	**97,38**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengembalian Belanja			
Belanja Pegawai	-	225.633.397	0,00
Belanja Barang	-	5.501.004.911	0,00
Belanja Modal	-	7.281.700	0,00
Total Belanja Bruto	**-**	**5.733.920.008**	**0,00**
Belanja Neto	**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**97,25**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker disajikan pada **Lampiran II** (Rekap Laporan Belanja).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto T.A 2023 dan T.A 2022

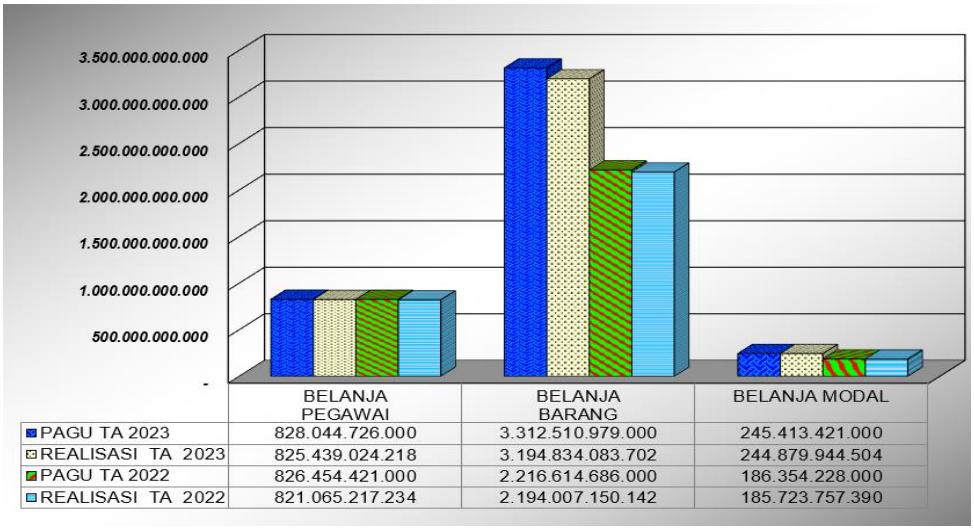

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 12.

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 31 Desember 2023

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	1.961.839.223.000	1.948.451.590.534	99,32
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	1.474.298.785.000	1.368.412.713.911	92,82
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	752.847.470.000	751.367.667.443	99,80
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	196.983.648.000	196.921.080.536	99,97
Jumlah		**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**97,25**

Rincian anggaran dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2023 dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 13.

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Unit Eselon I

No	Eselon I	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp) 2023	%	Realisasi Belanja Bruto (Rp) 2022
1	Setjen	1.150.817.224.000	1.141.714.627.370	99,21	1.123.481.475.037
2	Itjen	76.271.846.000	76.327.570.032	100,07	81.093.764.521
3	Ditjen Polpum	262.470.077.000	262.426.990.383	99,98	218.633.342.837
4	Ditjen Bina Adwil	217.487.568.000	216.002.195.003	99,32	207.492.485.738
5	Ditjen Bina Pemdes	1.096.807.956.000	995.603.694.324	90,77	185.638.277.610
6	Ditjen Bina Bangda	278.801.747.000	278.275.924.659	99,81	333.681.647.567
7	Ditjen Otda	97.509.565.000	97.292.315.659	99,78	106.626.770.752
8	Ditjen Dukcapil	852.401.004.000	851.178.841.610	99,86	602.304.389.019
9	Ditjen Keuda	81.275.352.000	80.883.517.783	99,52	84.791.625.585
10	BSKDN	52.149.718.000	51.948.036.955	99,61	58.418.581.539
11	BPSDM	219.977.069.000	219.233.258.654	99,66	204.474.774.426
Jumlah Keseluruhan		**4.385.969.126.000**	**4.270.886.972.432**	**97,38**	**3.206.637.134.631**

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja transaksi kas yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Pengembalian belanja atas belanja yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.733.920.008,00.

Rincian realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Eselon I disajikan pada tabel 14.

Tabel 14
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Eselon I	Pengembalian Belanja 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian Belanja 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Setjen	1.117.365.148	1.970.318.932	(43,29)
2	Itjen	84.047.128	51.507.818	63,17
3	Ditjen Polpum	60.596.542	41.176.469	47,16
4	Ditjen Bina Adwil	260.894.118	267.692.007	(2,54)
5	Ditjen Bina Pemdes	2.261.368.034	1.078.437.611	109,69
6	Ditjen Bina Bangda	273.915.462	1.411.976.103	(80,60)
7	Ditjen Otda	120.778.475	258.515.945	(53,28)
8	Ditjen Dukcapil	1.304.686.127	247.783.736	426,54
9	Ditjen Keuda	95.704.872	174.106.140	(45,03)
10	BSKDN	89.620.413	209.816.528	(57,29)
11	BPSDM	64.943.689	129.678.576	(49,92)
Jumlah Pengembalian		**5.733.920.008**	**5.841.009.865**	**(1,83)**

Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp107.089.857,00 atau sebesar 1,83% dibandingkan dengan pengembalian realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Neto sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d.
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	825.439.024.218	821.065.217.234	0,53
Belanja Barang	3.194.834.083.702	2.194.007.150.142	45,62
Belanja Modal	244.879.944.504	185.723.757.390	31,85
Jumlah Belanja	**4.265.153.052.424**	**3.200.796.124.766**	**33,25**

Realisasi Belanja Pegawai Rp825.439.024.218,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp825.439.024.218,00 atau 99,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp828.044.726.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,53% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp821.065.217.234,00. Kenaikan belanja pegawai ini disebabkan adanya pengangkatan CPNS menjadi PNS yang berasal dari Purna Praja IPDN Angkatan XXIX dan XXX. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 16.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Urian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	441.628.889.919	441.344.220.097	0,06
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.689.301.400	1.677.501.400	0,70
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	146.688.200	55.322.100	62,29
Belanja Lembur	11.751.979.000	8.518.332.000	37,96
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	370.447.799.096	372.063.876.410	(0,43)
Jumlah Belanja Bruto	825.664.657.615	823.659.252.007	**0,24**
Pengembalian Belanja Pegawai	225.633.397	2.594.034.773	(91,30)
Jumlah Belanja Neto	**825.439.024.218**	**821.065.217.234**	**0,53**

Belanja Barang Rp3.194.834.083.702,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.194.834.083.702,00 atau 96,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.312.510.979.000,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 45,62% dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.826.933.560,00. Kenaikan

belanja ini terjadi karena realisasi belanja untuk pengadaan KTP-*el* pada Ditjen Dukcapil yang berasal dari PNBP dan hibah langsung dalam bentuk uang serta terdapat tambahan realisasi belanja yang bersumber dari PHLN pada Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Bina Bangda. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel 17.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bruto			
Belanja Barang Operasional	307.250.165.190	311.982.648.671	(1,52)
Belanja Barang Non Operasional	294.734.942.059	284.212.833.845	3,70
Belanja Barang Persediaan	35.843.755.648	32.805.660.024	9,26
Belanja Jasa	1.567.780.150.546	776.776.533.438	101,83
Belanja Pemeliharaan	130.114.777.061	132.980.502.037	(2,15)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	574.988.026.140	480.169.790.182	19,75
Belanja Perjalanan Luar Negeri	10.402.294.573	4.980.447.355	108,86
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.472.959.988	836.458.500	76,09
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas	4.308.172.630	2.200.549.572	95,78
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	273.439.844.778	170.308.701.610	60,56
Jumlah Belanja Bruto	**3.200.335.088.613**	**2.197.254.125.234**	**45,65**
Pengembalian Belanja			
Belanja Barang Operasional	39.476.666	69.221.417	(42,97)
Belanja Barang Non Operasional	18.398.525	20.578.000	(10,59)
Belanja Barang Persediaan	35.600	-	0,00
Belanja Jasa	1.316.364.871	184.202.177	614,63
Belanja Pemeliharaan	36.697.069	4.800.000	664,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.704.556.002	2.690.204.498	37,71
Belanja Perjalanan Luar Negeri	385.476.178	277.969.000	38,68
Jumlah Pengembalian Belanja	**5.501.004.911**	**3.246.975.092**	**69,42**
Jumlah Belanja Neto	**3.194.834.083.702**	**2.194.007.150.142**	**45,62**

Belanja Modal
Rp244.879.944.504,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp244.879.944.504,00 atau 99,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp245.413.421.000,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,85% dibandingkan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp185.723.757.390,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per akun sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdapat pada tabel 18.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

MAK	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.300.461.505	97.704.801.620	58,95
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.003.885.722	66.195.851.873	(57,70)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.235.178.750	198.396.000	1026,62
5361	Belanja Modal Lainnya	59.347.700.227	21.624.707.897	174,44
Jumlah Belanja Bruto		**244.887.226.204**	**185.723.757.390**	**31,86**
Pengembalian Belanja Modal		**7.281.700**	**-**	**0,00**
Jumlah Belanja Neto		**244.879.944.504**	**185.723.757.390**	**31,85**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp155.296.661.473,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp155.296.661.473,00 dan Rp97.704.801.620,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 58,94% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdapat pada Tabel 19.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.249.129.342	94.892.877.364	61,50
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.051.332.163	2.811.924.256	(27,05)
Pengembalian			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.800.032	-	0,00
Jumlah Belanja Neto	**155.296.661.473**	**97.704.801.620**	**58,94**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp28.002.177.054,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp28.002.177.054,00 dan Rp66.195.851.873,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 57,70% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdapat pada tabel 20.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.636.723.519	56.637.720.546	(88,28)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	21.990.000	-	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	68.792.200	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	21.276.380.003	9.558.131.327	122,60
Jumlah Belanja Bruto	**28.003.885.722**	**66.195.851.873**	**(57,70)**
Pengembalian	**1.708.668**	**-**	0,00
Jumlah Belanja Neto	**28.002.177.054**	**66.195.851.873**	**(57,70)**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp2.235.178.750,00

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.235.178.750,00 dan Rp198.396.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.026,62% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022. Perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember dan 31 Desember 2022 terdapat pada tabel 21.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	395.448.000	198.396.000	99,32
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	1.839.730.750	-	0,00
Jumlah Belanja	**2.235.178.750**	**198.396.000**	**1.026,62**

Belanja Modal Lainnya Rp59.345.927.227,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp59.345.927.227,00 dan Rp21.624.707.897,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 174,44% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	57.970.302.595	21.022.575.045	175,75
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.377.397.632	602.132.852	128,75
Jumlah Belanja Bruto	**59.347.700.227**	**21.624.707.897**	**174,44**
Pengembalian	**1.773.000**	**-**	0,00
Jumlah Belanja Neto	**59.345.927.227**	**21.624.707.897**	**174,44**

B.6 Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Pada TA 2023 Kemendagri menerima alokasi anggaran sebesar Rp4.385.969.126.000,00 dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.265.153.052.424,00 atau 97,25% dari anggarannya dengan rincian menurut jenis satker pada tabel 23.

Tabel 23
Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Kerja Pusat dan Daerah	4.326.146.271.000	4.211.992.651.059	3.170.977.895.000	3.151.806.750.552
Realisasi Pengembalian Belanja	-	5.700.270.086	-	5.811.632.751
Satker Pusat & Daerah Setelah Pengembalian	**4.326.146.271.000**	**4.206.292.380.973**	**3.170.977.895.000**	**3.145.995.117.801**
Dekonsentrasi	55.250.152.000	54.335.771.883	55.269.430.000	51.661.778.207
Realisasi Pengembalian Belanja	-	33.649.922	-	29.377.114
Dekonsentrasi Setelah Pengembalian	**55.250.152.000**	**54.302.121.961**	**55.269.430.000**	**51.632.401.093**
Tugas Pembantuan	4.572.703.000	4.558.549.490	3.176.010.000	3.168.605.872
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Tugas Pembantuan Setelah Pengembalian	**4.572.703.000**	**4.558.549.490**	**3.176.010.000**	**3.168.605.872**
Jumlah Belanja	**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**3.229.423.335.000**	**3.200.796.124.766**

Belanja Dana Dekonsentrasi Rp54.302.121.961,00

1) Dana Dekonsentrasi

Pada TA 2023 Kemendagri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang terdapat pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp54.335.771.883,00 dengan realisasi bruto sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp54.335.771.883,00 atau 100%. dengan pengembalian belanja sebesar Rp33.649.922,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp54.302.121.961,00 atau 99,94%.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp55.269.430.000,00 dengan realisasi bruto sampai

dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp51.661.778.207,00 atau 93,47% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp29.377.114,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp51.632.401.093,00 atau 93,42%dari anggarannhya. Rincian realisasi Dana Dekonsentrasi disajikan pada tabel 24.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I
s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen BAK	54.335.771.883	51.661.778.207	5,18
Pengembalian		33.649.922	29.377.114	0,00
Belanja Neto		**54.302.121.961**	**51.632.401.093**	**5,17**

Belanja Dana Tugas Pembantuan Rp4.558.549.490,00

2) Dana Tugas Pembantuan

Pada TA 2023 Kemendagri mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah kabupaten/kota melalui program kegiatan sebesar Rp4.572.703.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.558.549.490,00 atau 99,69% setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Sebagai perbandingan, sampai dengan 31 Desember 2022 Kemendagri mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp3.176.010.000,00, dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.168.605.872,00 atau 99,77% setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Dana Tugas Pembantuan disajikan pada tabel 25.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan
per Eselon I s.d. 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen BAK	4.558.549.490	3.168.605.872	43,87
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah		**4.558.549.490**	**3.168.605.872**	43,87

B.7 Pengungkapan Lainnya

A. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.

Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa kas, barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagai dokumen sumber pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Satker di Kementerian Negara/Lembaga membukukan dokumen sumber berupa Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) yang diterbitkan KPPN atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dan membukukan dokumen sumber berupa Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga atas belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa Barang/Jasa.

Dalam Bab II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan penatausahaan pendapatan hibah berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Realisasi Anggaran Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LRA dan Laporan Operasional Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LO.

Atas pengeluaran yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, Kemendagri mencatat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN, dan mencatat beban pada Laporan Operasional pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan. Kemendagri mencatat kas atas penerimaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Neraca.

Atas hibah dalam bentuk barang, Kemendagri mencatat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Kemendagri sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Atas hibah dalam bentuk jasa, Kemendagri mencatat beban jasa dari hibah tersebut pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh

Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada tahun 2023 Kemendagri melakukan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang/jasa sebesar Rp332.267.195.069,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp184.448.737,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp332.082.746.332,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal menerima hibah langsung dalam bentuk barang sebesar Rp25.048.828.347,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. BUMD Academy Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa gedung dan bangunan labolatorium, *furniture*, dan komputer sebesar Rp2.508.761.331,00 dengan Nomor Register 2XVWGBCA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 02/BUMD-Academy/I/2023 dan 100.4.7.1/366/SJ tanggal 20 Januari 2023 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 01/BUMD-Academy/I/2023 dan 100.4.7.1/369/SJ tanggal 20 Januari 2023.
   b. USAID memberikan hibah langsung dalam bentuk jasa berupa *USAID Bilateral Development Cooperation Framework* (BDCF) 497-Aa-040 (*Local Governance Portfolio*) sebesar Rp22.540.067.016,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 497-AA-040 LGP tanggal 6 April 2021 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 84/USAID-INA/BAST-SERVICE/DRG/2023 tanggal 7 November 2023.
2. IPDN Kampus Kalbar menerima hibah langsung dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk uang untuk pembuatan pagar pembatas, *drainase*, dan pembangunan masjid sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan Nomor Register 2HKT38AA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Nomor 972/2462/RO-KESRA DAN 01/IPDN.28/NPHD/2023 tanggal 30 Mei 2023. Atas penerimaan hibah ini terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp6.482,00 dan telah dikembalikan ke donor sehingga belanja dari hibah langsung sebesar Rp5.999.993.518,00.
3. IPDN Jatinangor menerima hibah langsung dalam bentuk barang sebesar Rp6.045.945.524,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Tulang Bawang memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa 75 buah tempat tidur atau kasur busa sebesar Rp99.750.000,00 dengan Nomor Register 2UAU2U8A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 11/DPK/IKPTK-TUBA/III/2023 dan 100.4.7.1/92/IPDN.6 tanggal 29 Maret 2023 serta 11/DPK/IKPTK-TUBA/III/2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 100.4.7.1/92/ IPDN.6 tanggal 29 Maret 2023.
   b. Pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa 1 set alat musik tradisional/daerah sebesar Rp37.800.000,00 dengan Nomor Register 2L88PKHA. Hibah tersebut

dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.10.028/7983/SET/ BKPSDM tanggal 29 Mei 2023 serta Berita Acara Serah Terima Nomor B.10.028/7983/SET/BKPSDM tanggal 29 Mei 2023.

c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa 47 barang peralatan kantor sebesar Rp684.415.524,00 dengan Nomor Register 2W38ALZA. Nilai hibah tersebut. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.3.3.2/181/IPDN.6 tanggal 15 Februari 2023 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/181/IPDN.6 tanggal 15 Februari 2023.

d. IKAPTK Kabupaten Malang memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa 100 buah tempat tidur sebesar Rp170.000.000,00 dengan Nomor Register 2917F8TA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/274/IPDN.6 tanggal 21 September 2023.

e. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 165 buah, PC sebanyak 2 buah, dan laptop sebanyak 1 buah sebesar Rp316.800.000,00 dengan Nomor Register 2JB7F8XA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/309/IPDN.6 tanggal 27 Oktober 2023.

f. IKAPTK Kabupaten Raja Ampat memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 100 buah sebesar Rp160.000.000,00 dengan Nomor Register 2EQSPQGA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/275/IPDN.6 tanggal 29 September 2023.

g. IKAPTK Kabupaten Barru memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 100 buah sebesar Rp170.000.000,00 dengan Nomor Register 278GFKDA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 01/BAST/IKAPTK-BARRU/2023 dan 000.3.3.2/273/IPDN.6 tanggal 23 September 2023.

h. Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa kursi susun sebanyak 300 buah, meja kantin sebanyak 60 buah sebesar Rp299.760.000,00 dengan Nomor Register 2RTFY9LA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 02/BAST-KESRA/KSM/II-2023 dan 000.3.3.2/65IPDN.6 tanggal 22 Februari 2023.

i. IKAPTK Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 150 buah, PC sebanyak 2 buah, laptop sebanyak 1 buah, sofa 1 buah, dan lemari arsip 2 buah dengan sebesar Rp309.000.000,00 Nomor Register 2N8FSVDA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/280/IPDN.6 tanggal 21 September

2023.

j. IKAPTK Kabupaten Kepulauan Sula memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 100 buah sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor Register 24MQYSZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/362/IPDN.6 tanggal 23 November 2023.

k. Penjabat Bupati Buleleng memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 100 buah sebesar Rp85.000.000,00 dengan Nomor Register 2SR9PXGA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/281/IPDN.6 tanggal 30 Agustus 2023.

l. PT Rumah Makan Jawa Tengah memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa kursi makan sebanyak 40 buah sebesar Rp21.840.000,00 dengan Nomor Register 22X28SZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 001/BAST/RMJT/IV/2023 dan 000.3.3.2/375/IPDN.6 tanggal 21 Maret 2023.

m. IKAPTK Palembang memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 100 buah sebesar Rp235.000.000,00 dengan Nomor Register 2V7AYEBA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/364/IPDN.6 tanggal 23 November 2023.

n. DPN IKAPTK memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa meja kantin sebanyak 430 buah dan kursi susun sebanyak 3143 buah dengan sebesar Rp2.574.358.000,00 Nomor Register 2FTWM3TA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/374/IPDN.6 tanggal 27 November 2023.

o. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa meja makan sebanyak 132 buah sebesar Rp263.472.000,00 dengan Nomor Register 2R9PYKXA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 041/SJA/BAST/I/2023 dan 000.3.3.2/399/IPDN.6 tanggal 30 Januari 2023.

p. IKAPTK Halmahera Selatan memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 100 buah sebesar Rp160.000.000,00 dengan Nomor Register 22ERC4GA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 000.3.3.2/363/IPDN.6 tanggal 23 November 2023.

q. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa AC sebanyak 10 buah sebesar Rp58.750.000,00 dengan Nomor Register 2EK9WFPA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 094/SJA/BAST/III/2023 dan 000.3.3.2/421/IPDN.6 tanggal 16

Maret 2023.

r. IKAPTK Deli Serdang memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tempat tidur sebanyak 200 buah dan kursi sebanyak 100 buah dengan sebesar Rp250.000.000,00 Nomor Register 2QXF4JWA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 01/IKAPTK/DS/VII/2023 dan 000.3.3.2/260/IPDN.6 tanggal 18 September 2023.

4. Ditjen Bina Adwil menerima hibah langsung dalam bentuk barang sebesar Rp588.787.223,00 dengan rincian sebagai berikut.

   a. *Gyeonggi Provincial Fire and Disaster Headquarters Korea* memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 4 unit mobil ambulans pemadam kebakaran sebesar Rp98.434.350,00 dengan Nomor Register 2JQEL2DA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 300.1.7/226/BAK tanggal 12 Januari 2023 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 300.1.7.2/1342/BAK tanggal 24 Februari 2023.

   b. *Japan Firefighters Assosiation* memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa hibah penyediaan fasilitas pelayanan umum berupa 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 6 unit ambulance pemadam kebakaran sebesar Rp411.861.240,00 dengan Nomor Register 2SETR5HA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 900.1.4/8051/BAK tanggal 23 Desember 2022. Serta Berita Acara Serah Terima Nomor 900.1.4/793/BAK tanggal 8 Februari 2023.

   c. *Ehime Toyota Motor Corp. and Kochi Toyota Motor Corp.* memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa Hibah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Umum Berupa 17 unit Mobil Pemadam Kebakaran dan 5 unit Mobil Ambulans Pemadam Kebakaran sebesar Rp78.491.633,00 dengan Nomor Register 2TNJBC8A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 024/6180/BAK tanggal 18 Oktober 2022 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 900.1.4/1714/BAK tanggal 16 Maret 2023.

5. Ditjen Bina Bangda menerima hibah langsung dalam bentuk uang dan jasa sebesar Rp266.278.865.849,00 dengan rincian sebagai berikut.

   a. *Government of The United Kingdom of Great Britain and North. Ireland* memberikan hibah langsung dalam bentuk jasa berupa Dukungan Implementasi Penataan Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua dan Papua Barat *(Support The Implementation of Spatial Planning and Low Carbon Development in Papua and West Papua Province/Climate Change)* sebesar Rp25.582.641.104,00 dengan Nomor Register 2BZ3FFRA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor SA29182018 tanggal 29 November 2018 serta Berita Acara Serah Terima Nomor DMU/23/08 tanggal 15 Maret 2023.

   b. *United Arab Emirates* (UAE) memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa program *Financing The Regional Development*

sebesar Rp235.500.000.000,00 dengan Nomor Register 27YDNA6A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor GA.10.04.2023 tanggal 10 April 2023. Pada tahun 2023 belanja yang terealisasi dari hibah langsung tersebut sebesar Rp4.167.300.475,00 sehingga sisa hibah yang belum terealisasikan sebesar Rp231.332.699.525,00 menjadi saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.

c. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dengan sebesar Rp4.529.264.800,00 Nomor Register 2C7EJQHA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor CP-20.08.2021 tanggal 20 Agustus 2021. Pada tahun 2023 terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp184.442.255,00 dan telah dikembalikan ke donor sehingga belanja yang terealisasi dari hibah langsung tersebut sebesar Rp4.344.822.545,00.

d. *United Nations Population Fund* (UNFPA) memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa *Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating to The 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia* sebesar Rp851.402.200,00 dengan Nomor Register 2TCK92FA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor *IP-Agreement* 17.02.2021 tanggal 17 Februari 2021.

6. Ditjen Dukcapil menerima hibah langsung dalam bentuk uang dan barang sebesar Rp28.120.325.871,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. PT Bank BTPN Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa perangkat server sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp1.096.680.000,00 dengan Nomor Register 2U1FM11A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor S.100/DIR/DBBP/II/2023 dan 000.3.3.2/2271/SES tanggal 21 Februari 2023 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor S.123/DIR/DBBP/III/2023 dan 000.3.3.2/2816/SES tanggal 3 Maret 2023.

b. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa perangkat server sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp370.185.000,00 dengan Nomor Register 2KTTQC4A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.129/e-channel/1222 dan 028/18439/Ses tanggal 29 November 2022 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor B.007/e-channel/0123 dan 000.3.3.2/396/Ses tanggal 10 Januari 2023.

c. PT Bank Permata Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa Perangkat server sebanyak 4 (empat) unit, *chasis* 1 (satu) unit dan *fibre channel* 6 (enam) unit sebesar Rp10.805.796.871,00 dengan Nomor Register 2YN6J46A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 239/BP/DIR/X/2022 dan 028/16805/SES tanggal 3 November 2022 serta Berita Acara Serah

Terima Hibah Nomor 020/BP/DIR/II/2023 dan 000.3.3.2/1215/SES tanggal 31 Januari 2023.

d. PT KB Finansial Multi Finance memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa *HPE Synergy* sebanyak 18 (delapan belas) unit sebesar Rp5.350.574.000,00 dengan Nomor Register 2HYMEGWA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 01/PERJANJIAN/KBFMF-DUKCAPIL/I/2023 dan 000.3.3.2/1450 /SES tanggal 17 Februari 2023 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 001/BAST-KBFMF/III/2023 dan 000.3.3.2/4177/SES tanggal 28 Maret 2023.

e. Pemerintah Kabupaten Kutai memberikan hibah langsung dalam bentuk uang untuk penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 201.500 keping sebesar Rp2.051.673.000,00 dengan Nomor Register 2XSQTC1A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.179/Capil/Set.2/471.13/12023 dan 000.3.3.2/1112/SES tanggal 30 Maret 2023.

f. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan hibah langsung dalam bentuk uang untuk penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 86.000 keping sebesar Rp875.652.000,00 dengan Nomor Register 2ULS6MNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 470/281/Disdukcapil dan 000.3.3.2/1430/SES tanggal 6 Februari 2023.

g. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan hibah langsung dalam bentuk uang untuk penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 73.500 keping sebesar Rp748.377.000,00 dengan Nomor Register 2KL3PPFA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 470/46/D.a.VI.12/I/2023 dan 000.3.3.2/1021/SES tanggal 26 Januari 2023.

h. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan hibah langsung dalam bentuk uang untuk penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 92.500 keping sebesar Rp941.835.000,00 dengan Nomor Register 2R7NPWCA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 477/171.1/DUKCAPIL/II/2023 dan 000.3.3.2/2598/SES tanggal 27 Februari 2023.

i. Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 100.000 keping sebesar Rp1.018.200.000,00 dengan Nomor Register 2LPPZ48A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 800/637/418.23/2023 dan 000.3.3.2/5350/SES tanggal 02 Mei 2023.

j. Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 19.500 keping sebesar Rp198.549.000,00 dengan Nomor Register 2GFSGBQA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 400.12.2.1/3167/Setda dan 000.3.3.2/5180/Ses tanggal 26

April 2023.

k. Pemerintah Kabupaten Malang memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan Blangko KTP-*el* sebanyak 39.000 keping sebesar Rp397.098.000,00 dengan Nomor Register 2BD8RG3A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 400.12.3/5590/35.07.107/2023 dan 000.3.3.2/13643/SES tanggal 25 Oktober 2023.

l. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan Blangko KTP-*el* sebanyak 98.000 keping sebesar Rp997.836.000,00 dengan Nomor Register 2ME2LPAA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 400.12/1262/disdukcapil dan 000.3.3.2/13803/SES tanggal 30 Oktober 2023.

m. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan Blangko KTP-*el* sebanyak 100.000 keping sebesar Rp1.018.200.000,00 dengan Nomor Register 2N3CV82A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor P.PK.02.01/Dukcapil/1182/2023 dan 000.3.3.2/13794/SES tanggal 30 Oktober 2023.

n. Pemerintah Kota Samarinda memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan Blangko KTP-*el* sebanyak 50.000 keping sebesar Rp509.100.000,00 dengan Nomor Register 2Q8DSW6A. Nilai hibah tersebut Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.3.3.2/20/100.13 dan 000.3.3.2/12780/SES tanggal 09 September 2023.

o. Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan Blangko KTP-*el* sebanyak 38.000 keping sebesar Rp386.916.000,00 dengan Nomor Register 22FP5BLA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 470/6349 dan 000.3.3.2/12781/SES tanggal 9 Oktober 2023.

p. UNICEF memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa program UNICEF 2021-2025 (Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Kemendagri) sebesar Rp854.736.000,00 dengan Nomor Register 2FWTYN9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor CP-10.05.2022 tanggal 10 Mei 2022.

q. Pemerintah Kota Manado memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan Blangko KTP-*el* sebanyak 49.000 keping sebesar Rp498.918.000,00 dengan Nomor Register 2N5BA8ZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 00.7.7.1/d.08/dukcapil/450/2023 dan 000.3.3.2/13299/SES tanggal 18 Oktober 2023.

B. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI.

Kemendagri Tahun 2023 mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri untuk kegiatan pada satker dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Adwil mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp13.069.878.000,00 untuk program **Proyek *Improvement Village Service Delivery* atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).** Ditjen Bina Adwil salah satu tugas dan fungsinya melakukan penguatan pada pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini Kecamatan sebagai OPD, sesuai Kepmendagri 137 tahun 2022 tentang SOTK Kemendagri. Melalui *Frontline Service Delivery* untuk mendukung capaian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) khususnya pada Komponen 1, belanja desa berkualitas. Dalam rangka mengimplementasikan program P3PD PIU Sub Komponen 1D *Frontline Service Delivery* dibutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah di lokasi sasaran. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan program P3PD Sub Komponen 1D, Penguatan Kecamatan dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Frontline Service Delivery*.

   a. Tujuan Program.

      Program *Frontline Service Delivery* (FSD) dalam rangka Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa, bertujuan untuk mensinergikan konsepsi perencanaan pembangunan berdasarkan prakarsa dari masyarakat (*bottom-up*) dengan program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah (*top-down*) sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan *supply* pembangunan di masyarakat desa melalui kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

      Hal ini akan mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan dalam layanan dasar dan meningkatkan pemanfaatan dana desa baik dalam sisi kualitas dan kuantitas, dengan meningkatkan koordinasi kelembagaan antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini memperkuat instrumen kerja pemerintahan yang ada dan melembagakan pendekatan untuk mekanisme akuntabilitas antara desa, penyedia layanan, dan pemerintah.

   b. Deskripsi Proyek (Komponen).

      Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa, melalui *Frontline Service Delivery* menegaskan posisi Kecamatan sebagai hub (penghubung) antara desa dengan pemerintah daerah. Adapun mekanisme kerja program ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

      1) Dukungan Manajemen. Dukungan manajemen kepada PIU Sub Komponen 1D, berupa:

         a) Sekretariat Pengendalian. Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, PIU Sub Komponen 1D merekrut tenaga sekretariat

pengendalian.

b) *Kick Off Meeting.* Sosialisasi kepada Gubernur di 10 Provinsi dan Bupati di 60 Kabupaten lokasi Pilot. Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola.

c) Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk penyamaan persepsi dan dukungan lintas K/L. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola.

d) *Workshop* Penyusunan Modul (1 dan 2). *Workshop* dilaksanakan dalam rangka penyusunan Modul dan Finalisasi Modul. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola.

e) Monitoring dan Supervisi. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian program di 10 Provinsi lokasi pilot. Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola.

2) Pelatihan.

Tahap pelatihan meliputi 3 agenda, yaitu:

a) *Training for Master of Trainer* (TMoT). Kegiatan ini untuk menyiapkan tenaga pelatih tingkat Pusat dan Provinsi, diselenggarakan di Jakarta melalui oleh Pihak ketiga. *Training* ini untuk membentuk Pelatih untuk Calon Pelatih di tingkat Provinsi. *Master of Trainer* terdiri atas unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi, Inspektorat Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi, Biro Pemerintahan Setda Provinsi di 10 Provinsi lokasi Pilot.

b) *Training for Trainer* (ToT). Kegiatan ini untuk menyiapkan Tenaga Pelatih di tingkat Kabupaten terdiri atas unsur BAPPEDA Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Dinas Dukcapil Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten di 60 Kabupaten lokasi Pilot yang akan melatih Aparatur Kecamatan di 1007 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan Pihak Ketiga.

c) Pelatihan Aparatur Kecamatan. Kegiatan ini untuk mempersiapkan Aparatur Kecamatan yang akan difungsikan sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sanitasi. Jumlah peserta dari Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Camat dan perangkatnya, UPT Kesehatan, UPT Pendidikan, UPT Sanitasi, Pendamping Desa dan Penyuluh. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Pihak Ketiga. Paket *Training for Trainer* dan Pelatihan Aparatur Kecamatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket kegiatan untuk 10 Provinsi lokasi pilot.

3) Penjaminan Mutu Pelaksanaan Program. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan program, PIU Sub Komponen 1D dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, melalui jasa konsultan dengan tujuan:

a) Dukungan pendampingan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, implementasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

b) Pengendalian program untuk menjamin kualitas mutu program;

c) Pengendalian kegiatan administrasi keprograman dalam pencapaian *Key Performance lndicator* (KPI) Program P3PD;

d) Meningkatkan fungsi koordinasi antar pengelola program di pusat sehingga terjadi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan PIU Sub Komponen 1D dengan komponen lainnya dalam program P3PD;

e) Membantu dalam penyusunan desain implementasi program PIU Sub Komponen 1D;

f) Melaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kegiatan; dan

g) Dukungan teknis dan kebijakan lainnya sesuai arahan Kepala PIU.

4) Instrumen Kerja Kecamatan/ *Dashboard*. Instrumen Kerja Kecamatan berupa Aplikasi Sistem Informasi untuk Kecamatan berupa sistem Analisis untuk mendukung pengumpulan data perencanaan pembangunan dalam rangka menjawab kebutuhan layanan masyarakat desa. Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui jasa konsultan. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh PIU Sub Komponen 1D dengan melibatkan Pihak Ketiga, melalui jasa lainnya.

c. Pelaksana Proyek. Penyelenggara Program Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ *Frontline Service Delivery*, melibatkan, antara lain:

1) Pelaksana.

a) CPMU Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Komponen 1;

b) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, selaku PIU Sub Komponen 1D;

c) Sekretariat P3PD PIU Sub Komponen 1D;

d) Jasa Konsultan.

2) Koordinasi Pemerintah dengan Donor.

a) Kemenko PMK.

b) BAPPENAS.

c) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

d) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

e) Task Team Leader World Bank.

d. Visibilitas Tingkat Proyek.

1) Bahan.

a) Panduan Teknis P3PD PIU Sub Komponen 1D;

b) Aplikasi Instrumen *Frontline Service Delivery*;

c) Modul Pelatihan Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa;

d) Instrumen Monitoring Pelaksanaan *Frontline Service Delivery*.

2) *Workshop* Uji Coba Modul;

3) Sosialisasi Program/*Kick Off Meeting;*
4) *Master of Trainer;*
5) *Training of Trainer;*
6) Pelatihan Penguatan Aparatur Kecamatan; dan
7) Monitoring dan Evaluasi;

e. Rincian Pinjaman. Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

Nomor ID Pinjaman	:	IBRD 8941-ID
Pemberi Pinjaman	:	*World Bank*
Tanggal Perjanjian	:	30 Januari 2020
Nomor Register	:	1CZ6CF2A
Effective Date	:	19 Februari 2020
Jumlah Pinjaman	:	USD6.000.000,00
Nomor Reksus	:	601306411980
Closing date	:	31 Desember 2024
Executing Agency	:	Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program.

Pelaksanaan Kegiatan dari Program Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ *Frontline Service Delivery* antara lain:

1) *Executing Agency* : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
2) *Central Project Management Unit* (CPMU) : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
3) *Central Project Implementation Unit* (CPIU) : Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
4) *Project Implementation Unit* (PIU) : Direktur Dekonsenterasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.

Realisasi belanja Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ *Frontline Service Delivery* sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.759.773.235,00 atau 97,63% dari anggarannya sebesar Rp13.069.878.000,00.

2. Ditjen Bina Pemdes mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp959.080.189.000,00 untuk program ***Proyek Improvement Village Service Delivery*** **atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).**

a. Tujuan Program.

Program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi proyek Program, melalui:

1) Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan

sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.

2) Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif.

3) Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (*performance-based grant*, PBG) untuk menguji model dukungan melalui insentif untuk perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten.

4) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Dengan adanya Proyek P3PD ini pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi terhadap perbaikan layanan dan dukungan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.

b. Lokasi Sasaran.

Sesuai tujuan P3PD, maka kriteria pertama pemilihan kabupaten adalah kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Desa. Selanjutnya, kabupaten/kota dinilai berdasarkan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten yang diukur dari indikator sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang mempengaruhi status pembangunan di desa dan kabupaten. Indikator status pembangunan desa dan kapasitas pemerintah desa diproksi dari variabel berikut ini:

   a) Akses ke sarana prasarana dasar berdasarkan data PODES 2018.

   b) Kapasitas pemerintah desa (latar belakang Pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan kelengkapan komposisi aparat inti desa) – data PODES 2018.

   c) Kemampuan penganggaran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas desa (dari alokasi desa untuk peningkatan kapasitas) – data SIPEDE 2018.

2) Kapasitas pemerintah desa dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemerintahan desa. Dalam hal ini proksi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada alokasi ADD per desa – data Siskeudes.

c. Kelompok Sasaran.

Aparat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan maupun dukungan pembinaan teknis yang akan dilaksanakan antara lain melalui platform digital (*e-learning*), forum belajar desa di tingkat kecamatan, kegiatan pelatihan tatap-muka, serta fasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Masyarakat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain melalui pembukaan akses terhadap platform Akademi Desa 4.0, akses terhadap pendampingan dan Forum Belajar Desa. Masyarakat

juga akan mendapatkan akses kepada sistem penanganan keluhan dan pengawasan pembangunan desa berbasis digital.

Selain aparat dan masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapat dukungan melalui penguatan koordinasi pembangunan desa serta pembuatan sistem informasi desa terintegrasi yang akan menggabungkan data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta belanja desa dari kementerian/lembaga terkait. Sistem informasi terintegrasi ini akan menjadi sumber data untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan belanja desa serta kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data dan analisis dari sistem informasi ini juga diharapkan akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan terkait pemerintahan dan pembangunan desa ke depannya.

d. Pendanaan.

Selain dari dana pinjaman IBRD, pencapaian target sasaran P3PD memerlukan Dana Rupiah Murni (RM) yang bersumberkan dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) dan APBDesa serta kontribusi masyarakat. Bentuk dana RM ini adalah salah satu wujud operasional atau pelaksanaan dari platform nasional pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa, yang mana dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pencapaian tujuan P3PD.

Selain dana RM, Kementerian dan Lembaga mengalokasikan dana paralel dari Pemerintah Pusat (APBN RM), untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri, seperti biaya operasional dan gaji/tunjangan bagai pegawai negeri dalam pengelolaan P3PD atau porsi pembiayaan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.

Dana Rupiah Murni lainnya dapat dicatat dalam bentuk program atau kegiatan (bukan dalam bentuk *in cash* yang langsung disalurkan melalui P3PD), namun memberikan kontribusi atau dukungan terhadap pelaksanaan P3PD baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa.

Porsi Rupiah Murni yang dapat dihitung ke dalam kontribusi pendanaan P3PD adalah sebagai berikut:

1) APBN/APBD yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam P3PD untuk operasional PMU/PIU dan Sekretariat terkait PNS, misalnya biaya pertemuan, honorarium narasumber, perdiem, biaya pemantauan dan supervisi.
2) APBN/APBD yang digunakan untuk membiayai sebagian kegiatan P3PD, seperti rapat koordinasi, lokakarya, pelatihan, bantuan teknis dan fasilitator, dan lainnya.
3) APBDesa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.

e. Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

Nomor ID Pinjaman : IBRD 8941-ID

Pemberi Pinjaman	:	*World Bank*
Tanggal Perjanjian	:	30 Januari 2020
Nomor Register	:	1CZ6CF2A
Effective Date	:	19 Februari 2020
Jumlah Pinjaman	:	USD153.020.000,00
Nomor Reksus	:	601306411980
Closing date	:	31 Desember 2024
Executing Agency	:	Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sebesar Rp856.874.791.500,00 atau 89,34% dari anggarannya sebesar Rp959.080.189.000,00.

Dalam program P3PD tersebut terdapat kegiatan *Success Story* Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Penguatan Kelembagaan dan Kualitas Belanja Desa dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.033.517.938,00 atau 95,62% dari anggaran belanja sebesar Rp13.630.783.000,00. Kegiatan tersebut menghasilkan film dokumenter *Success Story* dan video konten kreatif untuk disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat luas dengan tujuan untuk mengedukasi dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Surat dari *Task Team Leader* - P3PD *World Bank* tanggal 11 Januari 2024 perihal evaluasi kegiatan *Success Story* Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Penguatan Kelembagaan dan Kualitas Belanja Desa menyatakan bahwa substansi dari film dokumenter *Success Story* dan video konten kreatif belum sesuai dengan *Term of Reference* (TOR) yang telah disepakati antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan Bank Dunia sebagai dasar diterbitkannya NOL (*No Objection Letter*). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, realisasi belanja sebesar Rp13.033.517.938,00 atau ekuivalen US$ 837.531,52 tidak dapat dibebankan pada proyek P3PD karena dianggap sebagai pengeluaran yang tidak memenuhi syarat dan pihak *World Bank* meminta untuk mengembalikan ke rekening khusus yang ditunjuk.

Berdasarkan kondisi tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa selaku Kepala *Central Project Management Unit* (*CPMU*) menyampaikan surat yang ditujukan kepada pihak *World Bank* pada tanggal 2 Februari 2024 sebagai klarifikasi agar pihak *World Bank* dapat melakukan evaluasi kembali secara menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut dan memberikan saran perbaikan jika terdapat perbedaan antara hasil pekerjaan tersebut dengan TOR yang telah disepakati. Selanjutnya, pihak *World Bank* menyampaikan surat tanggapan pada tanggal 22 Maret 2024 bahwa tujuan proyek P3PD tidak tercermin dalam film dokumenter *Success Story* dan video konten kreatif tersebut sehingga perlu disesuaikan untuk memenuhi TOR tanpa biaya tambahan. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk periode pelaporan Tahun 2023 *Audited* ini, Ditjen Bina Pemerintahan Desa masih terus berkomunikasi dan melakukan klarifikasi dengan pihak *World Bank* atas hasil dari kegiatan tersebut agar dapat diterima dalam proyek P3PD.

3. Ditjen Bina Bangda mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp140.188.112.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp140.079.132.796,00 atau 99,97% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. *Flood Management in Selected River Basis* (FMSRB).

1) Latar Belakang.

Banjir, yang terjadi setiap tahun di sebagian besar negara, telah meningkat frekuensinya, menyebabkan kerugian ekonomi setiap tahun. Indonesia salah satu negara yang sangat rentan terhadap banjir karena iklim dan topografinya. Banjir sungai Ciujung pada tahun 2013 berdampak pada 19.674 rumah tangga, menyebabkan 50.527 orang mengungsi dan mengganggu lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta-Merak yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pada tahun 2013 juga di Ambon terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 59 rumah rusak, 10 orang meninggal dunia, lima orang hilang, dan 7.212 orang mengungsi. Melihat kondisi ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) menyusun sebuah program yang disebut dengan *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 3440-INO pada tanggal 2 November 2016.

Program *Flood Management In Selected River Basin* (FSMRB) yang didanai oleh pinjaman dari *Asean Development Bank* (ADB) akan mendanai Pemerintah sebanyak USD108,7 juta yang akan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian risiko banjir pada wilayah Daerah Aliran Sungai yang ditargetkan. Banjir yang melanda daerah-daerah rawan pada dasarnya disebabkan beberapa hal, yaitu kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam serta curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan air laut, badai, dan sebagainya.

2) Tujuan Program.

Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam mengelola dan mengurangi risiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai. Program FMSRB memiliki 4 komponen *output* yaitu;

a) Meningkatnya perencanaan pengelolaan risiko banjir.

b) Meningkatnya pengelolaan lahan dan infrastruktur banjir.

c) Meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat.

d) Meningkatnya kebijakan, koordinasi dan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat nasional.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) adalah sebagai berikut :

Pemberi PHLN	:	*Asian Development Bank* (ADB)
Besaran PHLN	:	USD108.700.000,00
Nomor Pinjaman PHLN	:	3440-INO
Tanggal Efektif PHLN	:	9 Desember 2016
Nomor Register PHLN	:	1RUX78CA
Closing Date PHLN	:	30 September 2024

4) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dari Program *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) antara lain:

a) Bappenas selaku *National Steering Committee on Water Resource* (NSCWR).

b) Kementerian PUPR selaku *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Executing Agency* kegiatan ini adalah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

c) Kemendagri selaku *Central Project Implementation Unit* (CPIU).

d) Kementerian Pertanian selaku *Central Project Implementation Unit* (CPIU).

Lingkup kegiatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri selaku CPIU yaitu:

a) Sub-Komponen 1B berupa Penguatan kelembagaan, perencanaan dan koordinasi pelaksanaan rencana Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT) di WS Program (WS 3 Ci dan WS Ambon-Seram).

b) Sub-Komponen 2B berupa Peningkatan pengendalian air buangan (*run-off*) dan erosi di DAS Program.

c) Sub-Komponen 3A berupa Meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat (PRBBM) di lokasi program.

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai *output* Program Kegiatan FSMRB adalah dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Asistensi dan Supervisi Program Pengelolaan Risiko Banjir pada kawasan pertanian dan pangan di daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir. Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir adalah agar terwujudnya koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan outputnya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksana program pengelolaan risiko banjir. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan. Peserta rapat terdiri dari

Kemendagri/CPIU Ditjen Bina Bangda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat CPIU PUPR, CPIU Pertanian serta Bappenas dan daerah yaitu Provinsi Banten dan Maluku serta kabupaten yang terlibat program FSMRB.

b) Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Pengelolaan Risiko Banjir. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan Outputnya yaitu terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program manajemen Banjir. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari rapat persiapan dan kemudian dilanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi program FSMRB. Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Pengelolaan Risiko Bajir yaitu beberapa instansi dilingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.

c) Pengadaan Jasa *Technical Assistant Institutional Development for Community-Based Flood Risk Management (ID-CBFRM)*. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan *output* berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda.

d) Operasional dan Sarana Penunjang Program Operasional dan sarana penunjang program meliputi fasilitasi operasional kantor dalam rangka pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir, fasilitasi dan operasional staf pendukung, serta pengadaan sarana penunjang kantor pada Program *Flood Management ini Selected River basin* (FMSRB). Dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tahun 2020, terdapat penyesuaian kegiatan. Penyesuaian kegiatan berupa dilakukan perubahan kegiatan yang sebelumnya bersifat pertemuan secara langsung menjadi secara tidak langsung *(online)* serta perubahan penyesuaian anggaran dan kegiatan dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.531.429.500,00 atau 99,99% dari anggarannya sebesar Rp6.532.000.000,00.

b. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP).

1) Latar Belakang.

Program IPDMIP merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk mendukung RPJMN Indonesia tahun 2015 – 2019 yang memprioritaskan peningkatan produktivitas tanaman pangan, melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih, perbaikan irigasi melalui pembangunan 65 waduk dan tiga

juta ha jaringan irigasi, perbaikan pengelolaan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif pada proses perencanaan provinsi dan kabupaten/kota. Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *ASEAN Infrastructure Fund Limited* (AIF) yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 3529-INO dan *Loan Agreement* Nomor 8327-INO (AIF) pada tanggal 31 Juli 2017.

Program Kegiatan IPDMIP Loan-INO dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari *Asean Development Bank* (ADB) sebanyak USD600 juta. Program tersebut dilaksanakan untuk pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia: (i) Kelembagaan petani, air dan irigasi lemah; (ii) Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharaannya; (iii) Kurangnya tenaga dan penyuluh pertanian; (iv) Prasarana kurang dan buruk pemeliharaannya; (v) Akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi; (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan.

2) Tujuan Program.

Tujuan dari program kegiatan IPDMIP adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia serta meningkatkan nilai dan keberlanjutan pertanian beririgasi. Program kegiatan IPDMIP mengelompokan *output* programnya ke dalam 4 komponen sebagai berikut:

a) Komponen 1 : Penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan pertanian beririgasi.
b) Komponen 2 : Peningkatan pengelolaan sistem irigasi.
c) Komponen 3 : Peningkatan infrastruktur sistem irigasi.
d) Komponen 4 : Peningkatan pendapatan pertanian beririgasi.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) adalah sebagai berikut:

Pemberi PHLN	:	*Asian Development Bank* (ADB) dan dan *ASEAN Infrastructure Fund Limited (*AIF).
Besaran PHLN	:	USD500.000.000,00 (ADB) dan USD100.000.000,00 (AIF)
Nomor Pinjaman PHLN	:	3529-INO dan 8327-INO (AIF)
Tanggal Efektif PHLN	:	8 September 2017
Nomor Register PHLN	:	1Z83YQPA (ADB) dan 11DDKS1A (AIF)
Closing Date PHLN	:	30 Juni 2024.

4) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dari Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) antara lain :

a) Bappenas selaku *National Steering Committee* (NSC).

b) Kementerian PUPR selaku *National Project Management Unit* (NPMU) dan *Executing Agency* kegiatan ini adalah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

c) Kemendagri selaku *National Project Implementation Unit* (NPIU).

d) Kementerian Pertanian selaku *National Project Implementation Unit* (NPIU).

Lingkup kegiatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri selaku NPIU yaitu:

a) Komponen I berupa penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem irigasi pertanian yang berkelanjutan serta reorganisasi dan penguatan Komisi Irigasi (KOMIR) dan pendampingan masyarakat (TPM).

b) Komponen 2 berupa peningkatan pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi serta Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) dan Rencana Pengelolaan Pertanian Beririgasi (RP2I).

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai *output* Program Kegiatan IPDMIP adalah dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Beririgrasi secara Partisipatif dilaksanakan melalui:

a) Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR).

Tujuan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR) untuk memastikan KOMIR berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pastisipatif. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemantauan di lapangan, penilaian dari hasil pemantauan dan pelaporan hasil kinerja KOMIR. Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Pusat yaitu Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian serta Bappenas dan unsur daerah peserta program IPDMIP (14 Provinsi).

b) Dukungan Tenaga Sekretariat NPIU Bangda.

Dukungan Tenaga Sekretariat NPIU Bangda bertujuan mendukung tugas kesekretariatan NPIU Ditjen Bina Bangda

dalam mendukung pelaksanaan program IPDMIP. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan rapat persiapan dan penentuan proses pengadaan. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

c) Supervisi dan Monitoring.

Tujuan dari Supervisi dan Monitoring adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program IPDMIP dan terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan rapat persiapan dan kemudian dilanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi program. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

d) Fasilitasi Operasional NPIU Bangda.

Fasilitasi Operasional NPIU Bangda bertujuan meningkatkan kinerja, fungsi, dan kordinasi pelaksanaan kegiatan bagi para pengelola program dan menghasilkan *output* kegiatan berupa meningkatnya kinerja Program IPDMIP. Kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pelaporan.

e) Pengadaan Jasa Konsultan Pusat dan Regional.

Pengadaan Jasa Konsultan Pusat dan Regional bertujuan memfasilitasi pengadaan konsutan (*Technical Assistant*) guna mendukung pelaksanaan program kegiatan di NPIU Ditjen Bina Bangda. Kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pelaporan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.311.929.787,00 atau 99,83% dari anggarannya sebesar Rp18.343.646.000,00.

c. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP).

1) Latar Belakang.

Project Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan *project* yang diselenggarakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Sumber Daya Air. *Project* ini merupakan wujud dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan daya saing daerah. Realisasi dari RPJMN tahun 2020 – 2024 ini dilakukan dengan konsep Modernisasi Irigasi. Modernisasi irigasi yang akan diimplementasikan di Indonesia dalam *Project* SIMURP ini menggunakan konsep kerangka 5 (lima) pilar modernisasi irigasi yang terdiri dari :

a) *Irrigation Water Availability;*

b) *Irrigation Infrastructure;*

c) *Irrigation Management;*

d) *Organization and Institution; dan*

e) *Human Resources.*

Pelaksanaan lima pilar ini harus bergerak bersama-sama karena kegiatan Program SIMURP ini merupakan kegiatan yang *sequence* dan saling mendukung antara Kemendagri dengan kementerian lain yang terkait.

Project SIMURP dilaksanakan untuk meningkatkan layanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan skema irigasi di daerah-daerah terpilih, khususnya pada daerah irigasi kewenangan pusat yang berada di atas 3.000 ha dan sistem irigasi strategis nasional. Dalam pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di tingkat daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi pada Program SIMURP akan diperkenalkan satu instrumen yaitu *Irrigation Service* Agreement (ISA). *Irrigation Service Agreement* (ISA) merupakan kesepakatan bersama/perjanjian antara pengelola irigasi dengan petani pemakai air dan/atau pengguna air lainnya dalam pelayanan air irigasi.

2) Tujuan program.

Tujuan dari *Project* SIMURP dalam *Loan Agreement* telah disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan irigasi di daerah yang dipilih. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi. penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen, operasi dan pemeliharaan. Namun dengan keterbatasan dana APBN, maka untuk mendukung tujuan dari Program SIMURP Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengupayakan pendanaan dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Pelaksanaan Kegiatan *Project* SIMURP pada NPIU Ditjen Bina Bangda terdiri dari tiga komponen besar yaitu Komponen A merupakan kegiatan Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak, Komponen B merupakan kegiatan Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis dan Komponen C merupakan kegiatan Pengelolaan Proyek.

Kegiatan Proyek *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) dilaksanakan di delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, melibatkan empat kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian Pertanian. Selain berada di delapan provinsi tersebut, kegiatan ini juga dilaksanakan di 17 Kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten

Musi Banyuasin, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jember, Kabupaten Katingan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan *Project* SIMURP akan dilaksanakan di 12 Daerah Irigasi dan dua daerah irigasi rawa yang menjadi kewenangan pusat yaitu Daerah Irigasi Sei Ular, Daerah Irigasi Cipancuh, Daerah Irigasi Cikeusik, Daerah Irigasi Banjarcahyana, Daerah Irigasi Kedung Putri, Daerah Irigasi Talang, Daerah Irigasi Pondok Waluh, Daerah Irigasi Jurang Batu, Daerah Irigasi Jurang Sate, Daerah Irigasi Pamukkulu, Daerah Irigasi Tabo-tabo, Daerah Irigasi Sanrego, dan dua daerah irigasi rawa yaitu Daerah Irigasi Karang Agung Hilir dan Daerah Irigasi Katingan. Selain itu *Project* SIMURP juga dilaksanakan di Daerah Irigasi Jatiluhur. Tujuan dari *Project* SIMURP sebagaimana yang tercantum dalam *Loan Agreement* adalah untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan irigasi di daerah yang dipilih. Hal ini dicapai melalui rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi, penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen, operasi dan pemeliharaan. Namun karena keterbatasan dana APBN, maka untuk mendukung tujuan ini Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengupayakan pendanaan dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Dengan adanya modernisasi irigasi di Indonesia dalam *Project* SIMURP maka *outcome*/hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas produksi pangan dan mengurangi impor pangan.

b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

c) Mengendalikan harga pangan yang selalu bergejolak pada musim tertentu.

d) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga meminimalisir kasus-kasus kekurangan gizi khususnya pada anak.

Project modernisasi irigasi harus dapat mendukung berbagai tujuan pembangunan tidak hanya produksi tanaman pangan dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) adalah sebagai berikut:

Pemberi PHLN	:	IBRD dan AIIB
Besaran PHLN	:	USD250.000.000,00 dan USD250.000.000,00

Tanggal Penandatanganan	:	25 Juli 2018 (IBRD) dan 11 Juli 2018 (AIIB)
Nomor Pinjaman PHLN	:	IBRD No. 8891-ID dan AIIB No. L0060A
Tanggal Efektif PHLN	:	23 Agustus 2018 (IBRD) dan 23 Agustus 2018 (AIIB)
Nomor Register PHLN	:	1NF3PM6A dan 1HS4NF9A
Closing Date PHLN	:	30 Juni 2024

4) Pelaksana Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Project SIMURP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

a) Bappenas selaku *National Steering Committee for Water Resources* (NSCWR).

b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku *Executing Agency Project* SIMURP.

c) Kemendagri selaku *National Project Implementing Unit* (NPIU) yang pelaksanaan kegiatan *project* berada pada Subdirektorat Pekerjaan Umum (PU) dan Subdirektorat Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (KISP).

d) Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Kegiatan *Project* SIMURP pada NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu

a) Komponen A merupakan kegiatan Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak;

b) Komponen B merupakan kegiatan Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis; dan

c) Komponen C merupakan kegiatan Pengelolaan Proyek.

Realisasi belanja untuk Program Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp41.783.053.168,00 atau 99,97% dari anggarannya sebesar Rp41.796.150.000,00.

d. ***National Urban Supply Water Project* (NUSWP)**.

1) Latar Belakang.

PJMN 2020-2024 sadar bahwa permasalahan di sektor akses air minum layak masih sangat besar, maka dalam periode perencanaan tersebut pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses air minum layak menjadi 75,34%, termasuk di antaranya 30,35% akses perpipaan. Untuk memenuhi target tersebut, RPJMN 2020-2024 menyusun salah satu proyek prioritas nasional berupa pembangunan sepuluh juta sambungan rumah. Sementara untuk mendukung pencapaiannya, ditargetkan 100% PDAM meningkat kinerjanya menjadi sehat di akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pemenuhan target 10 juta sambungan rumah dalam rangka

memperluas dan memenuhi layanan dasar di sektor air minum tentu menjadi tanggung jawab dan diharapkan dikontribusi oleh banyak pihak dan program. *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) yang didukung oleh dana pinjaman Bank Dunia diharapkan menjadi salah satu kontributor pencapaian target tersebut. Kemendagri, selaku pembina pemerintah daerah dan menjadi salah satu CPIU dari NUWSP, diharapkan mampu berkontribusi dalam rangka memastikan pemerintah daerah sebagai pelaksana SPM bersama PDAM-nya untuk menjangkau seluas mungkin akses masyarakat terhadap air minum.

Permasalahannya, pekerjaan rumah untuk perluasan akses air minum masih sangat besar. Di luar persoalan teknis terkait pembangunan dan penyediaan prasarana fisik layanan air minum, permasalahan akses terhadap air minum juga terjadi mulai dari sisi kelembagaan dan penyusunan dokumen perencanaan. Poin krusial pada fase ini antara lain adalah masih minimnya kapasitas Pemda dan PDAM untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur dan tepat sasaran. Permasalahan kelembagaan dan kapasitas aparatur ini akhirnya juga merembet ke permasalahan kurangnya sinkronisasi kebijakan/program/ kegiatan antara target dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Di samping masih kerap terjadi masalah dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di daerah, juga ketika mengintegrasikan program/kegiatan baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran.

2) Peranan Kemendagri.

Salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri cq. Ditjen Bina Bangda dalam rangka memastikan dukungan pemerintah dalam pencapaian target nasional peningkatan akses masyarakat terhadap air minum adalah bagaimana meningkatkan kapasitas Pemda dalam meningkatkan layanan penyediaan air minum. Fungsi ini semestinya perlu dilaksanakan terutama dalam rangka melakukan pembinaan umum penerapan SPM yang menjadi kewajiban Pemda, sekaligus dalam rangka menjalankan tugas CPIU dalam proyek NUWS.

Pekerjaan rumah di sektor penguatan kapasitas Pemda dalam program penyediaan air minum, melihat kondisi *existing* di atas, tentu bukan hal yang mudah dan oleh karenanya penting untuk terus dilakukan. Untuk itu, Kemendagri cq. Ditjen Bina Bangda selaku pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu CPIU NUWSP memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Program Penyediaan Air Minum Perkotaan di Kawasan Permukiman – NUWSP

3) Tujuan Program.

Tujuan NUWSP adalah untuk untuk meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan (MBR dan non-MBR) dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemda dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Melalui pelaksanaan NUWSP diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian target universal akses air minum perkotaan melalui penambahan 1,2 juta Sambungan Rumah (SR) baru di beberapa kota terpilih.

4) Lingkup Program.

Lingkup Program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) merupakan program kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendagri, dan *World Bank* untuk penyediaan Air minum yang layak di daerah Perkotaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:

a) Komponen 1 : Dukungan Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan.
b) Komponen 2 : Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan PDAM.
c) Komponen 3 : Dukungan Penasihat dan Pengembangan Kebijakan untuk Pemerintah Pusat.
d) Komponen 4 : Implementasi Program dan Dukungan Manajemen.

5) Target Kegiatan/Program.

a) Bertambahnya 1,2 juta Sambungan Rumah baru sebagai hasil intervensi proyek, sedikitnya 20% diantaranya merupakan sambungan rumah untuk MBR;
b) Setidaknya 40 Pemda mendapatkan bantuan program peningkatan infrastruktur SPAM sebagai insentif pendamping, bantuan berbasis kinerja, ataupun stimulan;
c) Hingga 200 Pemda dan/atau PDAM berpartisipasi aktif dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas;
d) Minimal 20 PDAM mengalami peningkatan kinerja dan berhasil naik ke kelompok kinerja di atasnya; dan
e) Setidaknya 20 PDAM menyiapkan proposal proyek yang *bankable*

6) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri program *National Urban Supply Water Project* (NUSWP).

Nomor Perjanjian	: IBRD 8872-ID
Nomor Register	: 1CPUK3GA
Tanggal Penandatanganan	: 20 Agustus 2018
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 20 Agustus 2018

Closing Date	: 31 Desember 2022
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD100.000.000,00
Jumlah *Intial Deposit*	: USD1.000.000,00
Nomor Rekening Khusus	: 601333411980

7) Pelaksana Kegiatan.

a) *Executing Agency* : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) CPMU Dirjen Cipta Karya, Direktorat Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c) CPIU :

i. Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.

ii. Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.387.214.072,00 atau 99,99% dari anggarannya sebesar Rp20.388.432.000,00.

e. *National Urban Development Project* (NUDP).

1) Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan *National Urban Development Project* (NUDP) atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu:

a) Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan.

b) Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien.

c) Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

d) Pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.

2) Tujuan Program.

National Urban Development Project (NUDP) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). *National Urban Development Project (*NUDP) akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dengan biaya sebesar IDR 32,4 milyar berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan USD 49,6 juta dari pinjaman Bank Dunia. Pembiayaan proyek

seluruhnya digunakan untuk kegiatan bantuan teknis (*Technical Assistance*), tidak mencakup pembiayaan untuk investasi infrastruktur.

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali diidentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien yang disebabkan oleh:

a) Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan

b) Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. NUDP melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.

NUDP terdiri dari empat komponen program, yaitu:

a) Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan;

b) Komponen 2: Keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan;

c) Komponen 3: Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan

d) Komponen 4: Dukungan pelaksanaan proyek.

3) Target NUDP.

Output Target dari NUDP ini adalah agar perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (*capital investment*) dapat ditingkatkan. Pencapaian target NUDP diukur dengan tiga indikator utama, sebagai berikut:

a) Tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan.

b) Tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu.

c) Keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Indikator utama di atas digunakan untuk memantau pencapaian program secara reguler (tahunan).

4) Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman dalam rangka *National Urban Development Project* (NUDP)

Nomor Pinjaman PHLN	: IBRD 8967-ID
Nomor Registrasi	: 1PF7SCLA
Tanggal Penandatanganan	: 15 November 2019
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 25 November 2019
Closing Date	: 31 Desember 2024
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD49.600.000,00
Jumlah *Intial Deposit*	: USD2.562.500,00
Nomor Rekening Khusus	: 601.342411980

5) Pelaksanaan Kegiatan.

NUDP akan dilaksanakan maksimal di 15 (lima belas) kota pilot *project* di Indonesia. Kegiatan ini dikembangkan sebagai platform nasional pembangunan kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh kota-kota di Indonesia. NUDP dilaksanakan secara bersama oleh:

a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai *Executing Agency* (EA) proyek NUDP dan *Central Project Management Unit* (CPMU) dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu;

b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional, yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional;

c) Kemendagri (Kemendagri) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu, yang terdiri dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (SUPD II) dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi dan Pembangunan Daerah (PEIPD) pada Ditjen Bina Bangda.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp37.833.658.413,00 atau 99,95% dari anggarannya sebesar Rp37.850.992.000,00.

f. *Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).*

1) Latar Belakang.

Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP*)* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung gerakan Citarum Harum. Terdapat empat komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan

dalam pengelolaan sampah, dukungan dalam perencanaan yang terpadu dan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan dukungan dalam pelaksanaan program dan bantuan teknis.

Pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti lingkungan, estetika, kesehatan manusia, serta dapat memberikan dampak lanjutan yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Umumnya, sampah yang tidak tertangani akan berakhir dengan cara dibakar secara terbuka, dikubur, ataupun dibuang bebas ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal tersebut menjadikan sampah yang tidak tertangani berpotensi menjadi sumber pencemaran yang signifikan, menurunkan produktifitas, dan mengganggu kesehatan serta memicu timbulnya penyakit, merusak estetika, hingga tingginya pengeluaran untuk biaya kesehatan. Sampah yang tidak tertangani yang masuk ke badan sungai pun akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Tujuan Program.

Program Kegiatan *Improvement Of Solid Waste Management To Support Regional And Metropolitan Cities Project* (ISWMP), merupakan program yang di desain untuk dapat membantu pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang layak dengan peningkatan keseluruhan aspek terkait dalam sektor pengelolaan sampah untuk mendukung upaya pencapaian target akses universal persampahan, khususnya di wilayah perkotaan.

Tujuan utama dari pengembangan program ISWMP adalah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah bagi penduduk perkotaan pada 8 (delapan) kota terpilih di wilayah Indonesia diantaranya: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung barat, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang.

3) Dalam rangka mencapai tujuan utama di atas, maka program ini akan dilaksanakan melalui 4 komponen sebagai berikut:

a) Komponen 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sampah

b) Komponen 2. Perencanaan Terpadu dan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

c) Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

d) Komponen 4. Dukungan Pelaksanaan Program, Bantuan

Teknis, dan Monitoring dan Evaluasi.

4) Target Program.

Penerima manfaat Program Kegiatan *Improvement Of Solid Waste Management To Support Regional And Metropolitan Cities Project* (ISWMP) antara lain:

a) Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab diberbagai aspek, baik teknis maupun administratif, dalam pengelolaan sampah.

b) Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.

c) Pemerintah Kabupaten/Kota prioritas.

5) Rincian Pinjaman.

Nomor Perjanjian : IBRD 9021-ID

Nomor Register : 1HFQ7GNA

Tanggal Penandatanganan : 6 Januari 2020

Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : 3 April 2020

Closing Date : 30 November 2025

Jumlah Pinjaman Luar Negeri : USD100.000.000,00

Executing Agency : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

6) Pelaksanaan Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Program ISWMP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

a) *Executing Agency*: Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b) *Steering Committee*: Bappenas, Kemenko Maritim, KemenPUPR, KemenKeu, Kemendagri.

c) CPMU: Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.

d) CPIU terdiri dari:

i. Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

ii. Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri

iii. Ditjen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 – Kementerian LHK.

Peran CPIU Ditjen Bina Bangda dalam ISWMP, adalah:

a) Membina Pemda dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan sektor persampahan;

b) Mendorong penyusunan kebijakan dan panduan tingkat daerah dalam rangka pencapaian target pengelolaan persampahan;

c) Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan;

d) Memfasilitasi Pemda kab/kota pilot dalam menetapkan target Proyek SWM sesuai kinerja kab/kota masing-masing.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.601.609.644,00 atau 99,70% dari anggarannya sebesar Rp14.645.786.000,00.

g. *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP)

Tujuan NUFReP adalah mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan kota serta investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan terpadu. Ketercapaian tujuan dari NUFReP diukur dengan Indikator Utama dan Indikator Antara yang meliputi tujuan NUFReP adalah mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan kota serta investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan terpadu. Ketercapaian tujuan dari NUFReP diukur dengan Indikator Utama dan Indikator Antara yang meliputi:

Indikator Utama *(Project Development Objective/PDO Indicators)*, yaitu:

1) Jumlah penduduk yang mendapat manfaat dari upaya ketangguhan banjir perkotaan terpadu di bawah proyek;
2) Program nasional ketangguhan banjir perkotaan terbentuk yang panduannya diadopsi untuk pembiayaan investasi, penguatan kelembagaan, dan pertukaran pengetahuan;
3) Tim koordinasi antar lembaga tingkat kota terkait ketangguhan banjir perkotaan terbentuk dan berfungsi; dan
4) Peraturan perundangan dan/atau kebijakan mengenai ketangguhan banjir perkotaan terpadu yang diadopsi oleh pemerintah kota.

Indikator Antara *(Intermediate Results Indicators)*, yaitu:

1) Kota-kota dengan model dan pemetaan risiko banjir yang diperbarui untuk mengatasi dampak urbanisasi dan perubahan iklim;
2) Kota-kota dengan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak yang dikembangkan dengan langkah-langkah terpadu dan pertimbangan risiko iklim;
3) Peningkatan atau perbaikan tepi sungai atau *drainase*;
4) Kegiatan subproyek dengan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan desain perkotaan yang ramah air (*water sensitive urban design*);
5) Kota-kota dengan sistem peringatan dini banjir yang ditingkatkan dan berfungsi;
6) Subproyek yang selesai (*completed*) memiliki rencana operasional dan pemeliharaan yang biayanya telah dimasukkan ke dalam anggaran tahunan;
7) Individu yang mendapat pelatihan tentang topik-topik pengelolaan risiko banjir yang relevan;

8) Keterwakilan perempuan dengan posisi pengambil keputusan dalam tim koordinasi ketangguhan banjir perkotaan di tingkat kota;
9) Penerima manfaat (perempuan) yang melaporkan bahwa mereka telah meningkat pengetahuannya untuk mengambil keputusan perihal banjir perkotaan setelah mengikuti pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan;
10) Jumlah kota yang mendapatkan dukungan teknis dari platform pengetahuan digital tingkat nasional;
11) Jumlah kota yang telah mengadopsi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program nasional; dan
12) Penerima manfaat yang melaporkan bahwa kegiatan proyek telah mencerminkan kebutuhan mereka (dipilah berdasarkan gender).

Hasil pencapaian indikator akan dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apabila relevan, dan sub-indikator akan dikuantifikasi jika memungkinkan untuk memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi proyek. Uraian deskripsi dari masing-masing Indikator Utama dan Indikator Antara yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi Proyek dapat dilihat pada POM Buku 2 Kerangka Kerja dan Monitoring Pencapaian Tujuan Proyek.

Ruang lingkup kegiatan NUFReP yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2028, antara lain:

1) Analisis dan perencanaan risiko banjir perkotaan di 6 (enam) dan kajian teknis di IKN;
2) Penanganan banjir perkotaan melalui tindakan struktural dan non-struktural untuk jangka pendek dan menengah yang mencakup integrasi infrastruktur abu-abu (*grey*) dengan biru-hijau (*blue-green*), solusi berbasis alam (*nature-based solutions*), perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan ramah air (*water-sensitive urban design*);
3) Pembentukan program nasional untuk memperkuat ketangguhan kota-kota di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi;
4) Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan risiko banjir termasuk meningkatkan kemitraan lokal dan partisipasi masyarakat yang keberlanjutan; dan
5) Kegiatan pendukung proyek.

NUFReP terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1) Komponen 1: Perencanaan Penanganan dan Analisis Risiko Banjir.

Kegiatan pada komponen ini mencakup pemetaan yang terperinci guna menunjukkan kedalaman genangan serta periode ulang (probabilitas) dengan menggunakan model permukaan digital

resolusi tinggi/DTM, model hidrologi, dan model hidrodinamika, termasuk pemetaan probabilitas risiko banjir yang mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim (termasuk kenaikan muka air laut dan perubahan intensitas curah hujan) sehingga dapat disusun rencana penanganan risiko banjir perkotaan jangka pendek dan menengah dengan mengintegrasikan kegiatan prioritas struktural maupun non-struktural. Adapun lingkup kegiatan komponen yang dilakukan pada masing-masing kota, kecuali Ibu Kota Negara (IKN), antara lain:

a) Penyusunan studi rencana pengelolaan risiko banjir (*Flood Risk Management Plan*/FRMP);
b) Dukungan desain, supervisi dan manajemen proyek;
c) Penyusunan studi sistem peringatan dini banjir (*Flood Early Warning System*/FEWS);
d) Penyusunan studi terkait ketangguhan banjir terpadu; dan
e) Dukungan pengelolaan proyek.

Untuk IKN, lingkup kegiatan komponen ini meliputi:

a) Penyusunan kajian teknis; dan
b) Tinjauan desain konsep "kota *spons/sponge city*".

2) Komponen 2: Peningkatan Ketangguhan Banjir Perkotaan.

Kegiatan pada komponen ini mencakup kegiatan fisik (konstruksi) tindakan struktural dan non-struktural termasuk subproyek prioritas yang menunjukkan dampak langsung pada pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim (*no-regret measures*). Komponen ini mengedepankan integrasi *grey infrastructure* (infrastruktur abu-abu) dengan *blue-green infrastructure* (infrastruktur biru-hijau) guna meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan secara keseluruhan. Adapun lingkup kegiatan komponen ini dilakukan pada masing-masing kota, antara lain:

a) Sub-komponen 2.1: Tindakan Struktural Ketangguhan Banjir.
   i. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi *drainase* utama perkotaan, sistem polder, dan bangunan pelengkapnya;
   ii. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi pengendalian banjir sungai terintegrasi;
   iii. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi kolam retensi/ tampungan lainnya;
   iv. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi pengendali sedimen;
   v. Pembangunan *blue-green infrastructure* (infrastruktur biru-hijau), termasuk *Nature-based Solutions* (solusi berbasis alam);
b) Sub-komponen 2.2: Tindakan Non-Struktural Ketangguhan

Banjir.

i. Pengembangan dan pengelolaan sistem peringatan dini banjir;
ii. Fasilitasi penyusunan dan/atau pemutakhiran perencanaan tata ruang;
iii. Perencanaan kegiatan kesiapsiagaan darurat;
iv. Peningkatan kesadaran publik;
v. Persiapan operasi dan pemeliharaan;
vi. Perencanaan pengelolaan aset bangunan pengendali banjir terpadu; dan
vii. Fasilitasi koordinasi keterpaduan infrastruktur layanan dasar dalam pengurangan risiko banjir perkotaan.

3) **Komponen 3: Manajemen Program dan Dukungan Pelaksanaan Proyek.**

Kegiatan pada komponen ini mencakup dukungan pelaksanaan NUFReP yang meliputi pembentukan dan operasionalisasi Program Nasional, pengelolaan proyek, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Adapun sub-komponen dan lingkup kegiatan di bawah komponen ini, antara lain:

a) Sub-komponen 3.1: Manajemen Program
   i. Penyusunan dan Pengelolaan Program Nasional;
   ii. Pengawasan dan Evaluasi Program Nasional; dan
   iii. Dukungan Pelaksanaan Proyek.
b) Sub-komponen 3.2: Dukungan Pelaksanaan Program
   i. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
   ii. Fasilitasi koordinasi pemerintah daerah; dan
   iii. Dukungan pelaksanaan proyek.
c) Sub-komponen 3.3: Manajemen Proyek
   i. Pengelolaan proyek;
   ii. Pelaporan proyek; dan
   iii. Dukungan pelaksanaan proyek.
d) Sub-komponen 3.4: Dukungan Pelaksanaan Proyek Direktorat Sungai dan Pantai:
   i. Pelaksanaan manajemen proyek;
   ii. Bantuan teknis/technical assistance kegiatan perencanaan banjir perkotaan terpadu; dan
   iii. Dukungan pelaksanaan proyek.

Direktorat Bina Teknik:

a) Bantuan teknis/*Technical assistance* kegiatan pembinaan teknik pengelolaan banjir perkotaan terpadu;

b) Dukungan pelaksanaan proyek.

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan:

a) Bantuan teknis/technical *assistance*;

b) Dukungan pelaksanaan proyek.

Spesifikasi Pinjaman Luar Negeri Program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) adalah sebagai berikut:

Nomor Register	:	1739NSEA
Tanggal Penandatanganan	:	11 Januari 2023
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	:	27 Maret 2023
Closing Date	:	31 Januari 2028
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	:	USD2.000.000,00
Executing Agency	:	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerima Manfaat Proyek.

NUFReP akan memberikan manfaat kepada masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi sasaran sebagai berikut:

1) Masyarakat yang berpotensi terdampak risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, dan Semarang.

2) Pemerintah pusat dan pemerintah kota yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, dan Semarang.

Di bawah Komponen 1 dan Komponen 2, pemerintah kota, masyarakat dan pemangku kepetingan lainnya akan mendapatkan manfaat langsung dari dukungan kegiatan perencanaan ketangguhan banjir yang komprehensif serta pembangunan infrastruktur banjir perkotaan yang terpadu.

Lokasi Kegiatan Proyek

Lokasi kegiatan NUFReP tersebar di 7 (tujuh) kota, di wilayah sungai kewenangan pusat, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, ketersediaan anggaran pembebasan lahan, dan dukungan pemerintah daerah. Adapun lokasi kegiatan NUFReP adalah sebagai berikut:

1) Kota Bima meliputi DAS Rontu.

2) Kota Manado meliputi DAS Tondano, DAS Sario, DAS Bailang, dan DAS Malalayang.

3) Kota Medan meliputi DAS Belawan, DAS Deli, DAS Percut.
4) Kota Banjarmasin meliputi DAS Martapura dan DAS Barito.
5) Kota Semarang meliputi Sistem drainase Semarang Timur, Sistem drainase Semarang Tengah, Sistem drainase Semarang Barat dan Sistem drainase Mangkang.
6) Kota Gorontalo meliputi DAS Limboto dan DAS Bolango-Bone.
7) Ibu Kota Negara (IKN).

Rincian lokasi dan nama paket kegiatan ditetapkan dalam dokumen *Overall Work Plan* dan *Annual Work Plan*. Kegiatan di luar daftar DAS/sungai/kota yang telah disebutkan di atas, dapat diusulkan oleh Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk disetujui oleh Bank Dunia.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp630.238.212,00 atau 99,86% dari anggarannya sebesar Rp631.106.000,00.

4. Ditjen Dukcapil mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp300.920.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp300.625.518,00 atau 99,90% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan ***ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital).**

   Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD250.000.000,00 (sekitar Rp3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan penggunaan identifikasi digital. Tujuannya, guna memperkuat pelayanan serta kepercayaan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Pinjaman ini akan mendukung proyek *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital). Proyek tersebut akan mendukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri meningkatkan sistem kependudukan dan catatan sipil di Indonesia saat ini terutama memperluas cakupannya di 12 provinsi prioritas dan di kalangan penduduk rentan di seluruh Indonesia.

   Proyek ini akan mendukung pengembangan infrastruktur publik digital prioritas. Termasuk platform verifikasi identitas dan *electronic-Know Your Customer* (*e*-KYC), aplikasi identifikasi digital, serta platform pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antar lembaga pemerintah yang mudah dan aman. Proyek ini akan memodernisasi infrastruktur data pada Ditjen Dukcapil. Selain juga meningkatkan kemampuannya dalam menjamin keamanan di dunia maya maupun perlindungan terhadap data pribadi serta kerangka privasi. Proyek ini dapat mendukung peningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia dengan memastikan bahwa setiap orang

memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Sehingga mereka dapat menggunakan NIK dengan mudah untuk melakukan transaksi dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, baik secara fisik maupun dalam jaringan (daring/*online*).

Proyek ini dapat membantu Indonesia terus menjaga keselamatan dan keamanan data kependudukan. Sistem identifikasi diketahui sebagai faktor kunci dalam pembangunan, kemampuan untuk memverifikasi identitas legal dapat meningkatkan akses kepada layanan dari pemerintah maupun swasta, seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan serta niaga elektronik (*e-commerce*). Selain itu, juga meningkatkan berbagai peluang ekonomi, misalnya, akses terhadap pekerjaan formal.

a. Tujuan dan Sasaran Program:
   1) Memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan penggunaan identifikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyampaian layanan sektor publik dan swasta prioritas untuk seluruh masyarakat Indonesia jumlah penduduk Indonesia di 11 provinsi prioritas yang telah memiliki NIK.
   2) Proporsi anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran.
   3) Jumlah penduduk Indonesia yang telah memasang aplikasi ID digital dan melakukan autentikasi minimal satu kali.
   4) Jumlah orang yang telah menggunakan platform *e*-KYC untuk mengaktifkan layanan terpilih termasuk layanan keuangan
   5) Selisih proporsi pria dan wanita Indonesia yang memiliki rekening bank.
   6) Jumlah pengguna institusional yang menggunakan verifikasi identitas baru dan platform *e*-KYC untuk autentikasi.

b. Spesifikasi Proyek (Data Proyek) adalah:
   1) Nomor Pinjaman (*Loan Number*) : IBRD Loan No.9520-ID
   2) Nomor Register (*Registration Number*) : 1F2V2KKA
   3) Pelaksana Proyek (*Executing Agency*) : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   4) Tanggal Penandatangan (*Loan Signing*) : 30 Mei 2023
   5) Tanggal efektif (*Effective Date*) : 3 Agustus 2023
   6) Tanggal penutupan (*Closing Date*) : 31 Desember 2027
   7) Rekening Khusus (*Special Account Number*) : 601.354.411.980
   8) Jumlah Pinjaman (*Total Loan*) : USD250.000.000,00 (IBRD 100%)

   Penarikan Kumulatif per Desember 2023 (*Cummulative Disbursed*) : USD83.930,00 (0,03%). Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp300.625.518,00 atau 99,90% dari anggarannya sebesar Rp300.920.000,00.

5. Pada Tahun 2023 Ditjen Bina Bangda mengelola anggaran yang bersumber

dari Hibah Luar Negeri dengan program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari Bank Dunia (*World Bank*) sebesar Rp15.418.327.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Latar Belakang.

Kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) merupakan hibah terencana yang berasal dari Bank Dunia (*World Bank*).

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang diluncurkan Wakil Presiden pada tanggal 12 Juli 2017 ditujukan untuk mengonsolidasikan dukungan politis dan kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah, memperkuat penyelenggaraan kerangka kerja kebijakan multi-sektor, serta mendorong konvergensi program-program nasional, daerah, dan masyarakat. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terdiri dari lima pilar yaitu:

1) Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara.
2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan, perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas.
3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat.
4) Mendorong kebijakan gizi dan ketahanan pangan.
5) Pemantauan dan evaluasi.

Strategi nasional ini memprioritaskan sejumlah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan kelompok sasaran prioritas adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau anak berusia 0-24 bulan (selanjutnya disebut dengan Rumah Tangga 1000 HPK). Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* menetapkan 100 kabupaten lokasi prioritas penanganan pada tahun 2018, dan merencanakan perluasan penanganan secara bertahap sampai dengan seluruh kabupaten/kota dapat tertangani pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen P*for*R Bank Dunia agar berbagai program yang termasuk dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat dilaksanakan secara konvergen dan efektif mendukung strategi percepatan penurunan *stunting*. Program P*for*R *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) selama tahun 2018-2021 akan mendorong konvergensi program yang termasuk dalam intervensi nutrisi prioritas. Program P*for*R INEY bertujuan untuk meningkatkan penggunaan intervensi nutrisi spesifik dan sensitif secara simultan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) rumah tangga sasaran di Kabupaten/Kota prioritas.

Pelaksanaan Program P*for*R INEY didukung dengan komponen IPF. Komponen IPF dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas

pelaksanaan yang berkelanjutan.

b. Peranan Kemendagri.

Sejumlah program yang tergolong dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif telah ditetapkan sebagai bagian dari paket program prioritas untuk percepatan penurunan *stunting* dalam strategi nasional. Kemendagri berperan melakukan koordinasi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam implementasi pilar 3 yang melibatkan kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pendekatan Pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu melakukan konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan strategi nasional dimaksud mengupayakan agar semua *stakeholders* bersama-sama berkolaborasi untuk menurunkan prevalensi *stunting* yang diukur dengan *Key Performance Indikator* atau yang disebut dengan *Disbursement Link Indicator* (DLI). Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda melaksanakan DLI ke-7, yaitu *Increased Predictability and Result-Orientation of Fiscal Transfers that Support Convergence* atau Konsep Penilaian Kinerja Daerah dalam melaksanakan konvergensi program penurunan *stunting*.

c. Tujuan Program.

Tujuan pengembangan proyek dari komponen IPF adalah sama dengan program P*for*R, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan intervensi gizi secara bersamaan pada rumah tangga 1.000 HPK di kabupaten prioritas. Komponen IPF akan dibiayai oleh GFF yang memungkinkan adanya peningkatan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. lnvestasi tersebut akan meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui dukungan kepada mitra pemerintah utama dalam melaksanakan program pengurangan *stunting* konvergensi di tingkat nasional dan lokal.

Kegiatan Percepatan Pencegahan *Stunting* mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui dukungan kepada mitra pemerintah utama dalam melaksanakan program pengurangan *stunting* konvergensi di tingkat nasional dan lokal, dan secara khusus mempunyai sasaran sebagai berikut:

1) Menyediakan dukungan pengembangan kapasitas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan Aksi Konvergensi.
2) Melalui Pemerintah Provinsi secara periodik melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan pencegahan *stunting*.
3) Pengembangan sistem daring dan pertemuan-pertemuan untuk mempercepat proses pembelajaran dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan Aksi Konvergensi.

Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, konsolidasi serta sinkronisasi program pusat dan daerah sesuai dengan tugas Kemendagri dalam

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (Pilar ke-3) diwujudkan dalam bentuk:

1) Penerbitan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi penurunan *stunting* dan mensosialisasikan petunjuk teknis dimaksud kepada 34 Provinsi, 260 Kabupaten/Kota lokus tahun 2020 dan 100 Kabupaten/Kota lokus tahun 2021.
2) Penyelenggaraan *Workshop* Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, *Benchmarking* dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi pada bulan November 2020 di 4 (empat) Regional, yaitu Yogyakarta, Denpasar, Ambon, dan Batam. Hasil *workshop* berupa praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam penanganan *stunting* dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan direplikasikan bagi pemerintah daerah lainnya. *Workshop* dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
3) Melakukan analisis terhadap instrumen monitoring dan evaluasi berupa kuesioner yang dikirimkan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi. Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
   a) Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi.
   b) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap perencanaan dan penganggaran daerah guna mendorong efektifitas percepatan penurunan prevalensi *stunting*.
   c) Masih terbatasnya kabupaten/kota dan desa yang ditetapkan menjadi lokus s*tunting*, sementara masih terdapat lokasi lain yang memiliki potensi angka *stunting* relatif tinggi.

d. Publikasi.

Hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 dipublikasikan melalui website www.aksi.bangda.kemendagri.go.id pada tanggal 1 November 2021. Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lokus dalam upaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota non lokus dapat menggunakan hasil penilaian kinerja tersebut sebagai bahan pembelajaran 8 (delapan) aksi konvergensi untuk direplikasi dalam upaya percepatan.

e. Rincian Hibah.

International Bank for Recostruction and Development (IBRD) atau *World Bank* memberikan hibah sebesar USD20.000.000,00 untuk mendukung Program Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* P*for*R *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dengan Naskah

Perjanjian Hibah Nomor TF-A7565 dengan Nomor Register 278EATNA yang mulai efektif pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditjen Bina Bangda Kemendagri memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp15.418.327.000,00 untuk melaksanakan program *stunting* melalui mekanisme pembayaran rekening khusus nomor 602190411980.

Ditjen Bina Bangda telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan untuk periode Tahun Anggaran 2023 yang sudah diajukan oleh *Executing Agency* (Setwapres) dan sudah disetujui oleh Bank Dunia. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.320.371.880,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp15.418.327.000,00. Ditjen Bina Bangda memiliki kegiatan berupa Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan *output* daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan *stunting*. Kegiatan tersebut merupakan program percepatan penurunan *stunting* yang realisasinya berasal dari rupiah murni sebesar Rp457.889.450,00 atau 99,00% dari anggarannya sebesar Rp462.500.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program/kegiatan/*output* untuk program percepatan penurunan *stunting* pada Ditjen Bina Bangda sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel 26.

Tabel 26

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Bina Bangda s.d. 31 Desember 2023

No	Program/Kegiatan/*Output*				Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
A.	**Jenis Intervensi (3) : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis**							
	06	Bina Pembangunan Daerah			9.338.196.000	15.880.827.000	15.778.261.330	99,35
		6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		9.338.196.000	15.880.827.000	15.778.261.330	99,35
			6139.FBA.032	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)	8.538.196.000	15.418.327.000	15.320.371.880	99,36
			6139.UBA.011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	800.000.000	462.500.000	457.889.450	99,00
B.	**Jenis Intervensi (4) : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis**							
TOTAL					**9.338.196.000**	**15.880.827.000**	**15.778.261.330**	**99,35**

Kemendagri memiliki program tata kelola kependudukan yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil. Salah satu *output* dalam program tersebut adalah akta kelahiran yang diterbitkan. Serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut pada tahun 2023, yaitu FGD implementasi kebijakan pencatatan kelahiran,

asistensi, supervisi dan pendampingan pencatatan kelahiran secara online yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pencatatan kelahiran, serta asistensi, supervisi dan pendampingan pencatatan kelahiran yang belum mencapai target nasional di daerah dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dalam meningkatkan cakupan Akta Kelahiran dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran.

Sumber dana pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari rupiah murni dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.229.717.593,00 atau 97,72% dari anggaran belanja sebesar Rp1.258.433.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program/kegiatan/*output* untuk mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* pada Ditjen Dukcapil sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Dukcapil s.d. 31 Desember 2023

No	Program/Kegiatan/Output			Anggaran Semula	Pagu Revisi	Realisasi	%
A	**Jenis Intervensi : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau**						
	Koordinasi dan Dukungan Teknis						
			Program Tata Kelola Kependudukan	600.000.000	1.258.433.000	1.229.717.593	97,72
	010.08.CP		**Akta Kelahiran Yang Diterbitkan**	**600.000.000**	**1.258.433.000**	**1.229.717.593**	**97,72**
		1269.QAA.004	400.000 Akta				
		051	FGD Implementasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran	219.760.000	134.943.000	124.048.129	91,93
		052	Asistensi dan Supervisi Pencatatan Kelahiran Yang Belum Mencapai Target Nasional	150.000.000	903.904.000	902.766.143	99,87
		053	Pendampingan Layanan Pencatatan Sipil di perwakilan RI	230.240.000	219.586.000	202.903.321	92,40
	TOTAL			**600.000.000**	**1.258.433.000**	**1.229.717.593**	**97,72**

Dengan demikian anggaran belanja Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan program penurunan *stunting*, baik yang berasal dari hibah terencana maupun yang berasal dari rupiah murni sebesar Rp17.139.260.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.007.978.923,00 atau 99,23% dari anggarannya.

6. Pada Tahun 2023 Ditjen Bina Keuda mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan program *Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project* dari Bank Dunia (*World Bank*) sebesar Rp1.044.105.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

   a. Pada Tahun 2023 Ditjen Bina Keuangan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan program P*ublic Finance Management III Support to Government of Indonesia Project* dari Bank Dunia (*World Bank*). Dana Hibah Luar Negeri pada Ditjen Bina Keuangan Daerah digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan, yaitu:

1) **Studi Banding Pelaksanaan SIPD Bidang Keuangan Negara.**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp436.166.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp433.556.225,00 atau 99,40%.

2) **Uji Coba Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Daerah.**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp55.940.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp55.940.000,00 atau 100%.

3) **Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Daerah.**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp96.520.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp96.513.217,00 atau 99,40%.

4) **Lokakarya terkait Pajak Daerah dan KPDBU Penyediaan Infrastruktur Publik.**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp388.712.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp384.716.026,00 atau 98,97%.

5) **Supervisi Reformasi Administrasi Pajak Daerah.**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp66.767.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.758.880,00 atau 99,99%.

b. Rincian Hibah Luar Negeri Program *Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project* adalah sebagai berikut.

Nomor Perjanjian PHLN	:	TF0B5420
Nomor Register	:	2FPJR4SA
Tanggal Penandatanganan	:	18 Mei 2021
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	:	18 Mei 2021
Closing Date	:	30 Juni 2025
Jumlah Hibah Luar Negeri	:	USD3.259.000,00
Jumlah *Initial Deposit*	:	Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan
Nomor Rekening Khusus	:	602199411980
Executing Agency	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.037.484.348,00 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp1.044.105.000,00.

Rincian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri disajikan pada **Lampiran III** (Ikhtisar PHLN).

C. PRESTASI KERJA KEMENDAGRI.

Pada Tahun 2023 Kemendagri menerima sebanyak 63 Penghargaan dan Prestasi yang terdiri dari 20 Penghargaan/Prestasi tingkat Kementerian Dalam Negeri dan 43 Penghargaan/Prestasi tingkat Unit Kerja Eselon I. Adapun beberapa Penghargaan dan Prestasi dimaksud, antara lain:

1. Prestasi Peringkat 1 Nilai Kinerja Anggaran Kategori Pagu Sedang (merupakan prestasi tahun berturut-turut Tahun 2020 s.d 2022), diterima dari Kementerian Keuangan.
2. Kemendagri meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 (9 kali secara berturut-turut) dari BPK RI kepada Kemendagri dan BNPP.
3. Penghargaan Kemendagri atas Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat sebagai Badan Publik kategori "INFORMATIF" pada acara Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden Rl.
4. Penghargaan kepada Kemendagri atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat "Sangat Baik" dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 18 Desember 2023.
5. Prestasi Kemendagri atas Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 90,47 (Zona Hijau) terhadap 3 Produk Layanan Administrasi (TOP 4 Kementerian) dari Ombudsman RI.
6. Penghargaan kepada Kemendagri atas Anugerah Reksa Bandha kategori Pemohon Lelang Noneksekusi Wajib dari Kementerian Keuangan.
7. Penghargaan kepada Kemendagri atas keaktifannya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam kategori Penerbit Kementerian/Lembaga dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
8. Prestasi Kemendagri atas Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 sebesar 90,04 dengan predikat "Sangat Memuaskan (AA)" dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
9. Prestasi Kemendagri atas Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2023 sebesar 91,04 dengan predikat "Sangat Baik".
10. Penghargaan kepada Kemendagri sebagai Instansi Terbaik Kedua dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat Kementerian/ Lembaga Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
11. Penghargaan kepada Kemendagri atas Dukungannya dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Penghargaan Badan Pusat Statistik Awards Kategori Kementerian/Lembaga kepada Kemendagri dari Badan Pusat Statistik.
13. Penghargaan kepada Kemendagri atas Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
14. Penghargaan kepada Kemendagri sebagai penerima Anugerah Merdeka

Belajar kategori Mitra Program Merdeka Belajar, Subkategori "Kementerian" dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

15. Penghargaan kepada Kemendagri sebagai Inisiator Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) untuk Kementerian/Lembaga dengan Kriteria Lembaga yang Menginisiasi Pelaksanaan RAN PE ditingkat Pusat dan Daerah dari Sekretariat Bersama RAN PE.
16. Penghargaan kepada Kemendagri atas Jasa dan Partisipasi dalam Mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
17. Penghargaan kepada Kemendagri atas Komitmen dan Jasanya dalam melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional.
18. Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2023 kepada Kemendagri atas Kinerjanya Melaksanakan Prinsip Persaingan Usaha Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kategori Persaingan Usaha Pusat dari KPPU.
19. Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas Peran Aktif terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Khusus Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disalahgunakan dalam Pendanaan Terorisme sebagai Rencana Aksi Nasional Indonesia sebagai Anggota Penuh Financial Action Task Force (FATF) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
20. Prestasi Kemendagri atas Tingkat Maturitas SPIP Kemendagri dengan capaian level 3 atau kategori "Terdefinisi", berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP.

D. CAPAIAN *OUTPUT* PER FUNGSI APBN.

Pelaksanaan APBN pada Kemendagri dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi yaitu pelayanan umum. Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2023.

Tabel 28

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2023

KODE ES 1	ESELON I	FUNGSI_SUBFUNGSI	PAGU	REALISASI	%
01	Setjen	0101 (Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri)	567.563.841.000	558.833.195.387	98,46
01	Setjen	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	583.253.383.000	582.881.431.983	99,94
02	Itjen	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	76.271.846.000	76.327.570.032	100,07
03	Polpum	0101 (Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri)	196.983.648.000	196.970.261.935	99,99
03	Polpum	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	65.486.429.000	65.456.728.448	99,95
04	Adwil	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	64.255.909.000	64.141.553.186	99,82
04	Adwil	0106 (Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah)	119.351.436.000	118.048.031.490	98,91
04	Adwil	0190 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum Lainnya)	33.880.223.000	33.812.610.327	99,80
05	Pemdes	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	109.374.440.000	108.726.532.215	99,41
05	Pemdes	0106 (Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah)	987.433.516.000	886.877.162.109	89,82
06	Bangda	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	81.542.224.000	81.189.975.609	99,57
06	Bangda	0106 (Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah)	197.259.523.000	197.085.949.050	99,91
07	Otda	0101 (Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri)	37.571.173.000	37.487.535.816	99,78
07	Otda	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	59.938.392.000	59.804.779.843	99,78
08	Dukcapil	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	852.401.004.000	851.178.841.610	99,86
09	Keuda	0101 (Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri)	24.341.730.000	24.132.351.868	99,14
09	Keuda	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	56.933.622.000	56.751.165.915	99,68
11	BSKDN	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	43.930.339.000	43.696.132.759	99,47
11	BSKDN	0106 (Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah)	8.219.379.000	8.251.904.196	100,40
12	BPSDM	0103 (Pelayanan Umum_Pelayanan Umum)	157.750.383.000	157.589.375.330	99,90
12	BPSDM	0106 (Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah)	62.226.686.000	61.643.883.324	99,06
TOTAL			**4.385.969.126.000**	**4.270.886.972.432**	**97,38**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, *Output* dan Target dari Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi disajikan pada **Lampiran IV** (Rincian Fungsi dan Sub Fungsi APBN).

E. PRIORITAS NASIONAL (PN).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kemendagri terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN I, II, III, IV, V,VI, dan VII dari tujuh PN yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran Bruto dan Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas yang tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp3.784.358.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.781.343.783,00.

Tabel 29

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional I

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN BINA BANGDA	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	2.836.977.000	2.833.963.359	99,89
	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	947.381.000	947.380.424	100,00
TOTAL		**3.784.358.000**	**3.781.343.783**	**99,92**

2. PN II Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 4 (empat) program prioritas yang tersebar pada 7 (tujuh) Eselon I dengan pagu mencapai Rp171.811.185.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.758.151.274,00.

Tabel 30

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional II

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN BINA ADWIL	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	105.026.635.000	104.021.576.694	99,04
DITJEN BINA PEMDES	Pembangunan Wilayah Sulawesi	10.405.796.000	10.388.871.065	99,84
	Pembangunan Wilayah Sumatera	13.904.875.000	13.021.715.033	93,65
DITJEN BINA BANGDA	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	6.558.492.000	6.538.320.526	99,69
DITJEN OTDA	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	17.774.345.000	17.727.901.722	99,74
	Pembangunan Wilayah Papua	2.120.000.000	2.115.252.583	99,78
	Pembangunan Wilayah Sumatera	480.000.000	479.340.220	99,86
DITJEN BINA KEUDA	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	8.709.309.000	8.656.521.130	99,39
BSKDN	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	3.448.288.000	3.481.805.696	100,97
BPSDM	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	3.131.525.000	3.074.926.605	98,19
	Pembangunan Wilayah Sumatera	251.920.000	251.920.000	100,00
TOTAL		**171.811.185.000**	**169.758.151.274**	**98,81**

3. PN III Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaannya di antaranya melalui 5 (lima) program prioritas yang tersebar di 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp13.169.799.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.086.319.268,00.

Tabel 31

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional III

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN BINA BANGDA	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.038.500.000	1.021.104.451	98,32
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	2.272.964.000	2.259.801.674	99,42
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	473.947.000	472.646.111	99,73
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	495.972.000	495.812.808	99,97
DITJEN DUKCAPIL	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	8.888.416.000	8.836.954.224	99,42
TOTAL		**13.169.799.000**	**13.086.319.268**	**99,37**

4. PN IV Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 3 (tiga) program prioritas yang tersebar di 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp5.155.575.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.154.350.628,00.

Tabel 32

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional IV

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN POLPUM	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan	1.400.000.000	1.399.997.128	100,00
	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	3.500.000.000	3.499.349.282	99,98
DITJEN BINA BANGDA	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	255.575.000	255.004.218	99,78
TOTAL		**5.155.575.000**	**5.154.350.628**	**99,98**

5. PN V Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas, 6 (enam) kegiatan prioritas, yang tersebar di 4 (empat) Eselon I dengan pagu mencapai Rp13.677.244.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.650.900.992,00.

Tabel 33

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional V

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN BINA ADWIL	Transformasi Digital	1.857.531.000	1.857.142.648	99,98
DITJEN BINA BANGDA	Infrastruktur Pelayanan Dasar	7.221.061.000	7.208.166.616	99,82
	Transformasi Digital	796.932.000	796.931.382	100,00
DITJEN DUKCAPIL	Transformasi Digital	2.461.940.000	2.457.974.668	99,84
DITJEN BINA KEUDA	Transformasi Digital	1.339.780.000	1.330.685.678	99,32
TOTAL		**13.677.244.000**	**13.650.900.992**	**99,81**

6. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program

prioritas yang tersebar di 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.252.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.239.784.472,00.

Tabel 34

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN BINA ADWIL	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1.252.800.000	1.239.784.472	98,96
TOTAL		**1.252.800.000**	**1.239.784.472**	**98,96**

7. PN VII Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya di antaranya melalui 3 (tiga) program prioritas, yang tersebar di 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp150.980.557.000,00 dan realisasi sebesar Rp150.976.279.054,00.

Tabel 35

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%
DITJEN POLPUM	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	9.565.410.000	9.564.767.073	99,99
	Konsolidasi Demokrasi	135.278.718.000	135.278.538.854	100,00
DITJEN BINA ADWIL	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	3.736.429.000	3.734.103.127	99,94
DITJEN OTDA	Konsolidasi Demokrasi	2.400.000.000	2.398.870.000	99,95
TOTAL		**150.980.557.000**	**150.976.279.054**	**100,00**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, *Output* dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran V** (Rincian Prioritas Nasional).

F. BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19.

Pada Tahun 2023 Kemendagri memiliki anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp396.403.000,00 terelisasi sebesar Rp372.469.049,00 atau 93,96% dari anggarannya. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 disajikan pada tabel 36.

Tabel 36

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 s.d. 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	157.645.000	149.973.615	95,13
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	238.750.000	222.495.434	93,19
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.000	-	0,00
Total Belanja Bruto	**396.403.000**	**372.469.049**	**93,96**
Pengembalian	-	-	0,00
Belanja Neto	**396.403.000**	**372.469.049**	**93,96**

Realisasi belanja Penanganan Pandemi COVID-19 diperuntukkan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) untuk masker, *hand sanitizer*, vitamin, pembelian lisensi aplikasi *zoom meeting.*
2. Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) untuk pembelian masker dan *hand sanitizer*.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19 serta telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.3/4575/SJ tanggal 28 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19 yang mana seluruh belanja yang menggunakan akun khusus COVID-19 setelah periode 30 Juni 2023 berakhir agar dilakukan revisi DIPA bagi yang belum melakukan belanja dan melakukan ralat SPM untuk belanja yang masih menggunakan akun khusus COVID-19 setelah periode tersebut. Adapun satker yang tidak melakukan revisi DIPA serta ralat SPM agar mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian pagu, realisasi, keterangan penggunaan dan keterangan alasan tidak melakukan revisi disajikan pada **Lampiran VI** (Rincian Belanja Akun Khusus COVID-19)

G. KESALAHAN PENGANGGARAN.

Pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023 terdapat kesalahan penganggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang menjadi aset sebesar Rp19.548.931.227,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Melalui transaksi Pembelian (101) dengan rincian:
      1) Setjen (403200) Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp20.979.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
      2) IPDN (448302) Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp42.130.900,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
      3) Balai Pemdes Yogyakarta (028449) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp111.529.950,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
   b. Melalui transaksi Perolehan Lainnya (112) dengan rincian:
      1) IPDN Kampus Sulsel (677024) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) menjadi Gedung dan Bangunan (133111) sebesar Rp207.849.000,00 dan menjadi Peralatan dan Mesin (132111) sebesar Rp30.100.000,00.
      2) IPDN Kampus Papua (683091) Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp128.506.000,00 menjadi

Peralatan dan Mesin (132111).

3) PPSDM Regional Makassar (027177) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp198.663.000,00 menjadi Jalan dan Jembatan (134111) .
4) IPDN Kampus Sumatera Barat (677045) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp280.453.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111) sebesar Rp263.803.000,00 dan Aset Tetap Lainnya (135121) sebesar Rp16.650.000,00.
5) IPDN Kampus Sumatera Barat (677045) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp84.319.000,00 menjadi Gedung dan Bangunan (133111).
6) DKPP (483005) Belanja Jasa Lainnya (522191) sebesar Rp1.683.892.800,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
7) DKPP (483005) Belanja Jasa Lainnya (522191) sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi Software (162151).
8) DKPP (483005) Belanja Operasional Lainnya (521119) sebesar Rp21.293.100,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
9) DKPP (483005) Belanja Sewa (522141) sebesar Rp396.292.200,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
10) Ditjen Bina Pemdes (027753) Belanja Jasa Lainnya (522191) sebesar Rp13.033.517.938,00 menjadi Aset Tetap Lainnya (135121).
11) Ditjen Bina Pemdes (027753) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp53.280.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
12) PPSDM Regional Bukit Tinggi (506137) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp124.097.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
13) BPSDM (403231) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp319.236.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).
14) BPSDM (403231) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp319.236.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).

c. Melalui transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada PPSDM Regional Bukit Tinggi (506137) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp994.806.000,00 menjadi Gedung dan Bangunan (133111).

d. Melalui transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (204) dengan rincian:
   1) IPDN (448302) Belanja Pemeliharaan Jaringan (523133) sebesar Rp430.940.800,00 menjadi Jalan dan Jembatan (134111).
   2) IPDN Kampus Sulawesi Utara (677010) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp199.136.969,00 menjadi Gedung dan Bangunan (133111).
   3) BSKDN (403222) Belanja Keperluan Perkantoran (521111) sebesar

Rp9.435.000,00 menjadi Peralatan dan Mesin (132111).

4) Balai Damkar (506138) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp178.473.570,00 menjadi Jalan dan Jembatan (134111).

2. Belanja Modal menjadi Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp105.293.882,00 melalui transaksi Pembelian (101) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Setjen (403200) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp15.894.000,00.
   b. IPDN (448302) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp8.460.000,00.
   c. DKPP (483005) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp979.882,00.
   d. Polpum (027210) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp2.340.000,00.
   e. Balai Pemdes Yogjakarta (028449) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar 29.232.000,00.
   f. Ditjen Bina Bangda (039729) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp300.000,00.
   g. Ditjen Dukcapil (634082) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp 48.088.000,00.
3. Belanja Barang menjadi Beban Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp169.481.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Setjen (403200) Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) sebesar Rp81.500.000,00 menjadi Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya (595115) melalui transaksi Perolehan Lainnya (112).
   b. Setjen (403200) Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) sebesar Rp3.000.000,00 menjadi Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (595112) melalui transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan (115).
   c. PPSDM Regional Bukit Tinggi (506137) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp84.981.600,00 menjadi Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (595113) melalui transaksi Pembelian (101).
4. Belanja modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp2.157.866.490,00 melalui Koreksi Pencatatan (305) dengan rincian sebagai berikut.
   a. Ditjen Dukcapil (634082) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp72.000.000,00 menjadi Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat (593128).
   b. Ditjen Dukcapil (634082) Belanja Modal Lainnya (536111) sebesar Rp2.085.866.490,00 menjadi Beban Jasa Lainnya (522191).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp56.709.120

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp56.709.120,00 dan Rp6.878.962,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang rupiah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 37.

Tabel 37

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	4.634.820	4.522.600	112.220
2	Ditjen BAK	52.074.300	2.356.362	49.717.938
JUMLAH		56.709.120	6.878.962	49.830.158

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.709.120,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp52.074.300,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp4.634.820,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.709.120,00 terdapat pada satu satker Kantor Daerah (KD) dan tiga satker Dekonsentrasi (DK) dan telah disetorkan ke Kas Negara setelah tanggal neraca. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca terdapat pada **Lampiran VIII.**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp2.343.805.012

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.343.805.012,00 dan Rp2.128.986.750,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal Neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada Tabel 38.

Tabel 38

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	2.343.805.012	2.128.986.750	214.818.262
Jumlah		**2.343.805.012**	**2.128.986.750**	**214.818.262**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker disajikan pada **Lampiran VII**. Kas di Bendahara Penerimaan telah disetorkan setelah tanggal Neraca. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan Setelah Tanggal Neraca terdapat pada **Lampiran VIII.**

Tabel 39

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022	**2.128.986.750**
Mutasi Tambah:	**46.432.141.666**
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Biaya Pendidikan, dan Pendapatan Pendidikan Lainnya pada Satker IPDN Jatinangor	18.333.616.862
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya pada Satker PPSDM Makassar	7.415.427.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain pada Satker BPSDM	14.498.729.804
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya pada Satker PPSDM Yogyakarta	6.184.368.000
Mutasi Kurang:	**(46.217.323.404)**
Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan tahun 2023	(44.088.336.654)
Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan tahun 2022	(2.128.986.750)
Saldo Per 31 Desember 2023	**2.343.805.012**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

a) Penambahan sebesar Rp18.333.616.862,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 pada satker IPDN Jatinangor yang terdiri dari Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan sebesar Rp225.747.100,00, Pendapatan Pendidikan Lainnya sebesar Rp424.500.000,00, dan Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp17.683.369.762,00;

b) Penambahan sebesar Rp7.415.427.000,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 satker PPSDM Makassar yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp7.128.802.000,00 dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp286.625.000,00;

c) Penambahan sebesar Rp14.498.729.804,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 satker BPSDM yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp13.151.235.000,00, Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp94.804,00 dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp1.347.400.000,00;

d) Penambahan sebesar Rp6.184.368.000,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 satker PPSDM Yogyakarta yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp6.018.048.000,00 dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp166.320.000,00;

e) Pengurangan sebesar Rp44.088.336.654,00 berasal dari Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan Tahun 2023 pada Satker IPDN Jatinangor sebesar Rp15.989.811.850,00, PPSDM Makassar sebesar Rp7.415.427.000,00, BPSDM sebesar Rp14.498.729.804,00, dan PPSDM Yogyakarta sebesar Rp6.184.368.000,00; dan

f) Pengurangan sebesar Rp2.128.986.750,00 berasal dari Penyetoran ke Kas Negara atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 yang telah disetorkan pada tanggal 11 Januari 2023.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp231.660.949.224

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp231.660.949.224,00 dan Rp189.741.607,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 40.

Tabel 40

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	118.439.343	145.180.217	(26.740.874)
2	Ditjen BAK	193.508.923	23.012.205	170.496.718
3	Ditjen Bina Pemdes	-	1.800.000	(1.800.000)
4	Ditjen Bina Bangda	231.332.984.360	19.647.857	231.313.336.503
5	Ditjen Dukcapil	-	101.328	(101.328)
6	BPSDM	16.016.598	-	16.016.598
JUMLAH		**231.660.949.224**	**189.741.607**	**231.471.207.617**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp231.660.949.224,00 adalah sebagai berikut:

a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar pada Eselon I Setjen sebesar Rp118.439.343,00 terdiri dari:

   i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.828.222,00 yang terdapat pada Satker Setjen Pusat. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;

   ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 sebesar Rp34.050.850,00 dan Belanja Honor Output Kegiatan Tahun 2023 di lingkungan Program Kepamongprajaan sebesar Rp3.186.750,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang terdapat pada Satker IPDN Jatinangor. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;

   iii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp19.813.253,00 yang terdapat pada Satker IPDN Kampus Sulawesi Utara. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;

   iv. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Pajak Honor Jasa Profesi Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.490.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Utara. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;

   v. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas realisasi

pembayaran belanja air yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp27.573.000,00 pada IPDN Kampus Sulut;

vi. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp290.000,00 yang terdapat pada Satker IPDN Kampus Jakarta. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024; dan

vii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa Pungutan Pajak atas Transaksi Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas Negara pada IPDN Kampus Papua sebesar Rp22.207.268,00, Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024.

b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp193.508.923,00 pada Eselon I Ditjen BAK terdiri dari:

i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp165.015.363,00, Belanja Jasa Profesi sebesar Rp13.760.500,00, dan Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp63.000,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;

ii. Kas yang belum diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.670.000,00 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;

iii. Sisa saldo Dana Titipan pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp60,00 pada Satker Bappeda Provinsi Papua;

c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp231.332.984.360,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari:

i. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah berupa hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari United Arab Emirates (UAE) atas Program Financing The Regional Development sebesar Rp235.500.000.000,00 pada Satker Ditjen Bina Bangda. Sampai dengan 31 Desember 2023 belanja yang terealisasi dari hibah langsung tersebut adalah sebesar Rp4.167.300.475,00 sehingga sisa hibah yang belum

terealisasikan adalah sebesar Rp231.332.699.525,00; dan

ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa saldo kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Ditjen Bangda yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp284.835,00 atas Belanja Perjalanan Dinas. Sisa Saldo Kas Lainnya di Rekening Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024.

d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp16.016.598,00 pada Eselon I BPSDM merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat pada BPSDM Kantor Pusat. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp189.741.607,00 telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp182.144.607,00 dan diserahkan kepada penerima hak sebesar Rp7.597.000,00 pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp145.180.217,00 pada Eselon I Setjen yang terdiri dari:

i. Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp141.522.467,00 yang terdapat pada Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp39.319.385,00 dan IPDN Jatinangor sebesar Rp102.203.082,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022. Sisa saldo kas atas kelebihan Belanja Perjalanan Dinas ini telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023;

ii. Sisa pajak sebesar Rp2.864.750,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdapat pada Satker IPDN Kampus Sulawesi Utara atas lembur pegawai sebesar Rp594.400,00 dan uang makan Bulan Desember 2022 sebesar Rp2.270.350,00. Saldo kas atas sisa pajak ini telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023;

iii. Kas yang berada pada rekening BPP yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu pada Satker Setjen Pusat sebesar Rp793.000,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022. Sisa saldo kas ini telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023;

b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp23.012.205,00 pada Eselon I Ditjen BAK terdiri dari:

i. Honorarium pengelola keuangan yang belum diserahkan ke

penerima hak sebesar Rp7.597.000,00 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sampai dengan 31 Desember 2022. Sisa saldo kas ini telah diserahkan ke penerima hak pada Tahun Anggaran 2023;

ii. Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp14.415.205,00 yang terdapat pada Satker Setda Provinsi NTT. Sisa saldo kas atas kelebihan Belanja Perjalanan Dinas ini telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023;

iii. Sisa saldo kas pada rekening BPG 049 BPPD Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp1.000.000,00. Sisa saldo kas pada rekening BPG ini telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023;

c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.800.000,00 pada Eselon I Ditjen Bina Pemdes merupakan kas yang berada pada penguasaan Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022 atas PNBP yang berasal dari sewa aula dan kamar pada Balai Pemdes Yogyakarta. Sisa saldo kas ini telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023.

d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp19.647.857,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari kas yang berada pada penguasaan Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022 atas PNBP yang berasal dari sewa kantin sebesar Rp19.550.000,00 dan kas yang tersisa pada saat penutupan rekening bank atas Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp97.857,00. Saldo kas yang tersisa dari penutupan rekening bank telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023; serta

e) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp101.328,00 pada Eselon I Ditjen Dukcapil merupakan sisa saldo kas dari penutupan rekening bank yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo kas telah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian Penyetoran Sisa Saldo Kas Lainnya dan Setara Setelah Tanggal Neraca terdapat pada **Lampiran VIII.**

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp7.050.534.000

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.050.534.000,00 dan Rp325.108.829,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I terdapat pada Tabel 41.

Tabel 41

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	25.108.829	(25.108.829)
2	Ditjen BAK	6.800.534.000	-	6.800.534.000
3	Ditjen Bina Pemdes	250.000.000	300.000.000	(50.000.000)
JUMLAH		**7.050.534.000**	**325.108.829**	**6.725.425.171**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.050.534.000,00 terdapat pada:

a) Unit Eselon I Ditjen BAK sebesar Rp6.800.534.000,00 yang merupakan pembayaran uang muka atas pekerjaan *Training of Trainer* (ToT) dan pelatihan aparatur kecamatan program penguatan kecamatan dalam mendukung kualitas tata kelola penyelenggaraan desa/*frontline service delivery* yang telah dibayarkan pada Tahun 2023, namun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang terdapat pada Satker Ditjen BAK; dan

b) Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp250.000.000,00 yang merupakan Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2023 bukti pertanggungjawabannya belum lengkap pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes dengan rincian nomor SK sebagai berikut:

   i. SK PPK No. 140-257-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2019;

   ii. SK PPK No. 140-619-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019;

   iii. SK PPK No. 410-788-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019;

   iv. SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2019; dan

   v. SK PPK No.140-1108-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap V.

Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang

Pertanggungjawabannya Belum Lengkap terdapat pada Tabel 42.

Tabel 42

Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai Bantuan
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000
3	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000
4	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Kuler	50.000.000
5	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Tomer	50.000.000
Jumlah					250.000.000

Tabel 43

Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	**325.108.829**
Mutasi Tambah:	**7.050.534.000**
Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun 2023 atas Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka pada Ditjen BAK	6.800.534.000
Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun 2023 atas Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka pada Ditjen Bina Pemdes	250.000.000
Mutasi Kurang:	**(325.108.829)**
Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2022 pada Ditjen Bina Pemdes	(300.000.000)
Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2022 pada IPDN Jatinangor	(17.250.000)
Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2022 pada DKPP	(3.074.744)
Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2022 pada Setjen	(4.784.085)
Saldo per 31 Desember 2023	**7.050.534.000**

Penjelasan Mutasi Belanja Dibayar Dimuka:

a) Transaksi Penambahan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp6.800.534.000,00 merupakan Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun 2023 atas pembayaran uang muka atas pekerjaan *Training of Trainer* (ToT) dan pelatihan aparatur kecamatan program penguatan kecamatan dalam mendukung kualitas tata kelola penyelenggaraan desa/*frontline service delivery* yang telah dibayarkan pada Tahun 2023 namun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang terdapat pada Satker Ditjen BAK;

b) Transaksi Penambahan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp250.000.000,00 merupakan Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun 2023 atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2023 bukti pertanggungjawabannya belum lengkap. Rincian desa dengan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap terdapat pada **Lampiran IX**;

c) Transaksi Pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp300.000.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes

merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang bukti pertanggungjawabannya belum lengkap.

d) Transaksi Pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp17.250.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas bagian dari Belanja Sewa atas kendaraan yang melewati Tahun Anggaran 2022;

e) Transaksi Pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp3.074.744,00 terdapat pada DKPP merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas bagian dari Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 atas pembayaran langganan Aplikasi Zoom yang melewati Tahun Anggaran 2022; dan

f) Transaksi Pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp4.784.085,00 terdapat pada Setjen Pusat merupakan jurnal balik atas sisa sewa SMS Masking sebanyak 7.779 token dengan nilai per unit sebesar Rp615,00 sehingga terdapat Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp4.784.085,00 pada Setjen Pusat.

Uang Muka Belanja Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Saldo Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp888.543,00. Uang Muka Belanja (*prepayment*) adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Uang Muka Belanja pada Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2022 sebesar Rp888.543,00 terbentuk dari kesalahan pemilihan akun potongan SPM atas kelebihan pembayaran belanja pegawai yang seharusnya menggunakan akun potongan SPM Penerimaan Kembali Belanja Pegawai (Kode Akun 425912) namun akun potongan SPM yang digunakan adalah Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (Kode Akun 425991) pada Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Dukcapil telah melakukan koreksi kurang saldo awal Uang Muka Belanja (*prepayment*) karena saldo akun tersebut seharusnya tidak disajikan.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp124.718.757

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp124.718.757,00 dan Rp1.540.933.512,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diterima tagihannya.

Tabel 44

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	95.534.123	118.300.915	(22.766.792)
2	Ditjen BAK	21.364.634	410.461.667	(389.097.033)
3	Ditjen Bina Bangda	7.820.000	-	7.820.000
4	Ditjen Dukcapil	-	890.908.430	(890.908.430)
5	BPSDM	-	121.262.500	(121.262.500)
	JUMLAH	**124.718.757**	**1.540.933.512**	**(1.416.214.755)**

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp124.718.757,00 terdiri dari:

a) Kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp42.575.757,00 yang terdapat pada Satker IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp3.582.673,00, IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar Rp34.616.450,00, dan Ditjen BAK sebesar Rp4.376.634,00. Kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja pada IPDN Sulawesi Utara sebesar Rp34.616.450,00 terjadi pada Tahun 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2023 masih belum terdapat setoran pengembalian sehingga belum dilakukan pengurangan saldo;

b) Kelebihan pembayaran Belanja Uang Makan yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.988.000,00 pada Satker Ditjen BAK;

c) Kegiatan Sewa Gedung Serbaguna pada Tahun 2023 yang pembayarannya dilakukan pada Tahun 2024 sebesar Rp7.820.000,00 pada Satker Ditjen Bina Bangda; dan

d) Sewa ATM periode 2019 sampai dengan 2021 yang pembayarannya masih belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp57.335.000,00 pada IPDN Kampus Jakarta.

Tabel 45

Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	**1.540.933.512**
Mutasi tambah:	**90.102.307**
Jurnal Penyesuaian atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada IPDN Jakarta	3.582.673
Jurnal Koreksi atas Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada IPDN Jakarta	57.335.000
Jurnal Penyesuaian atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen BAK	21.364.634
Jurnal Penyesuaian atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Bina Bangda	7.820.000
Mutasi kurang:	**(1.506.317.062)**
Jurnal Balik atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang dibentuk pada akhir Tahun 2022 oleh IPDN Jatinangor	(11.998.700)
Jurnal Balik atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang dibentuk pada akhir Tahun 2022 oleh IPDN Jakarta	(71.032.165)
Jurnal Balik atas pengakuanPendapatan yang Masih Harus Diterima yang dibentuk pada akhir Tahun 2022 oleh Setjen	(653.600)
Jurnal Balik atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang dibentuk pada akhir Tahun 2022 oleh Ditjen BAK	(410.461.667)
Jurnal Balik atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang dibentuk pada akhir Tahun 2022 oleh Ditjen Dukcapil	(890.908.430)
Jurnal Balik atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang dibentuk pada akhir Tahun 2022 oleh BPSDM	(121.262.500)
Saldo per 31 Desember 2023	**124.718.757**

Penjelasan Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima:

a) Penambahan sebesar Rp3.582.673,00 berasal dari pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2023 atas Kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023 yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada Satker IPDN Kampus Jakarta;

b) Penambahan sebesar Rp57.335.000,00 berasal dari Jurnal Koreksi atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Sewa ATM pada IPDN Kampus Jakarta yang telah dilakukan penginputan Jurnal Balik namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 masih belum dibayarkan sehingga seharusnya masih disajikan sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima;

c) Penambahan sebesar Rp21.364.634,00 berasal dari pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023 sebesar Rp4.376.634,00 dan Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan Bulan Desember 2023 sebesar Rp16.988.000,00 yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada Satker Ditjen BAK;

d) Penambahan sebesar Rp7.820.000,00 berasal dari pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Kegiatan Sewa Gedung Serbaguna pada Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024 pada Ditjen Bina Bangda;

e) Pengurangan sebesar Rp11.998.700,00 berasal dari Jurnal Balik

atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2022 pada IPDN Jatinangor berupa:

i. Setoran pendapatan sewa ATM BJB tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp113.000.000,00 untuk periode perpanjangan sewa 19 September 2022 sampai dengan 18 September 2027 sehingga sewa Bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 harus diakui sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp5.650.000,00, dan

ii. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.348.700,00;

f) Pengurangan sebesar Rp71.032.165,00 berasal dari Jurnal Balik pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2022 atas Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2022 yang baru diperhitungkan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2023 dan pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir tahun 2022 atas Sewa ATM pada IPDN Kampus Jakarta;

g) Pengurangan sebesar Rp653.600,00 berasal dari Jurnal Balik pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2022 atas kelebihan pembayaran uang lembur pada Setjen Pusat;

h) Pengurangan sebesar Rp410.461.667,00 berasal dari Jurnal Balik pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2022 atas kelebihan Belanja Perjalanan Dinas yang sampai dengan 31 Desember 2022 masih berada di pelaksana perjalanan dinas dan belum dikembalikan pada Ditjen BAK;

i) Pengurangan sebesar Rp890.908.430,00 berasal dari Jurnal Balik pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2022 untuk mencatat kewajiban restitusi atas Pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Periode Oktober s.d. Desember 2022 pada Ditjen Dukcapil atas *availability link* jaringan komunikasi data yang tidak memenuhi ketentuan SLA pada Ditjen Dukcapil;

j) Pengurangan sebesar Rp121.262.500,00 berasal dari Jurnal Balik pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima akhir tahun 2022 sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk keperluan penempatan mesin ATM dan Kantor Kas dengan nilai kontrak sebesar Rp242.525.000,00 dan jangka waktu 2 tahun terhitung mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2024 pada BPSDM Kantor Pusat.

Piutang Bukan Pajak Rp13.536.525.594

C.7 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.536.525.594,00 dan Rp14.466.367.294,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel 46.

Tabel 46

Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Setjen	13.536.525.594	14.466.367.294	(929.841.700)
Jumlah		**13.536.525.594**	**14.466.367.294**	**(929.841.700)**

Piutang Bukan Pajak pada Eselon I Setjen sebesar Rp13.536.525.594,00 merupakan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana sebesar Rp12.638.693.000,00 yang terdiri dari Piutang Mahasiswa Program Magister sebesar Rp7.967.025.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp4.671.668.000,00 serta Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp897.832.594,00 pada IPDN Jatinangor.

Tabel 47

Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi

No	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
PIUTANG PNBP					
1	Pendapatan Pendidikan	14.466.367.294	289.500.000	(1.219.341.700)	13.536.525.594
TOTAL PIUTANG PNBP		**14.466.367.294**	**289.500.000**	**(1.219.341.700)**	**13.536.525.594**

Penjelasan Mutasi Piutang adalah sebagai berikut:

a) Penambahan sebesar Rp289.500.000,00 pada jenis piutang Pendapatan Pendidikan merupakan pengakuan piutang tahun berjalan dari tagihan atas Piutang Pascasarjana Program Magister sebesar Rp234.250.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp55.250.000,00 pada IPDN Jatinangor; dan

b) Pengurangan sebesar Rp1.219.341.700,00 pada IPDN Jatinangor untuk jenis piutang Pendapatan Pendidikan terdiri terdiri dari pelunasan tahun berjalan sebesar Rp865.591.700,00 dan koreksi piutang sebesar Rp353.750.000,00. Koreksi piutang tersebut terdiri dari:

   i. koreksi kurang piutang Program Magister Angkatan 36 dan 37 atas pelunasan piutang yang telah dibayarkan pada tahun-

tahun sebelum 2023 namun debiturnya baru teridentifikasi pada tahun 2023 sebesar Rp15.750.000,00;

ii. koreksi kurang piutang atas kurang catat pembayaran SPP dan registrasi atas debitur Angkatan 37 sebesar Rp6.500.000,00 yang telah dibayarkan pada Tahun 2022;

iii. koreksi kurang piutang atas debitur Angkatan 7 yang telah meninggal dunia sebesar Rp39.750.000,00; dan

iv. koreksi kurang piutang Angkatan 30, 33 dan 38 atas mahasiswa dengan status tidak aktif sebesar Rp291.750.000,00.

Tabel 48

Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

No	ANGKATAN	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi+/- karena tagihan dan pembayaran tahun ini		Koreksi (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)		
1. IPDN JATINANGOR						
1	XVII	242.650.000	-	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XIX	168.150.000	-	-	-	168.150.000
4	XX	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	887.225.000	-	-	-	887.225.000
6	XXII	448.275.000	-	-	-	448.275.000
7	XXIII	862.650.000	-	-	-	862.650.000
8	XXIV	277.375.000	-	-	-	277.375.000
9	XXV	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	680.500.000	-	(39.750.000)	-	640.750.000
11	XXVII	320.750.000	-	-	-	320.750.000
12	XXVIII	469.500.000	-	(19.750.000)	-	449.750.000
13	XXIX	265.000.000	-	-	-	265.000.000
14	XXX	639.250.000	-	(41.000.000)	(6.500.000)	591.750.000
15	XXXI (I)	165.500.000	-	(2.750.000)	-	162.750.000
16	XXXI (II)	418.000.000	-	(2.000.000)	-	416.000.000
17	XXXII	280.250.000	-	(65.500.000)	-	214.750.000
18	XXXIII (I)	167.500.000	-	(56.000.000)	-	111.500.000
19	XXXIII (II)	327.750.000	17.500.000	(37.000.000)	(278.750.000)	29.500.000
20	XXXIV	240.000.000	500.000	(29.000.000)	-	211.500.000
21	XXXV	294.250.000	-	-	-	294.250.000
22	XXXVI	99.750.000	-	(40.500.000)	(6.500.000)	52.750.000
23	XXXVII	87.000.000	120.250.000	(55.100.000)	(15.750.000)	136.400.000
24	XXXVIII	3.000.000	62.000.000	(9.250.000)	(6.500.000)	49.250.000
25	XXXIX	-	5.750.000	-	-	5.750.000
26	XXXX	-	28.250.000	-	-	28.250.000
JUMLAH S2		**8.444.375.000**	**234.250.000**	**(397.600.000)**	**(314.000.000)**	**7.967.025.000**
1	S3-I	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	424.000.000	-	(31.500.000)	-	392.500.000
3	S3-III	225.500.000	-	(14.750.000)	-	210.750.000
4	S3-IV	761.050.000	2.750.000	(125.000.000)	-	638.800.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	-	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	411.684.700	12.750.000	(20.941.700)	-	403.493.000
7	S3- V (II)	229.250.000	-	-	-	229.250.000
8	S3- VI	366.500.000	-	(71.250.000)	-	295.250.000
9	S3- VII (I)	151.000.000	-	-	(39.750.000)	111.250.000
10	S3- VII (II)	303.750.000	-	(13.750.000)	-	290.000.000
11	S3-VIII	596.000.000	-	(71.500.000)	-	524.500.000
12	S3-IX	782.750.000	-	(102.000.000)	-	680.750.000
13	S3-X	227.250.000	7.250.000	(10.250.000)	-	224.250.000
14	S3-XI	55.675.000	-	(7.050.000)	-	48.625.000
15	S3-XII	-	32.500.000	-	-	32.500.000
JUMLAH S3		**5.124.159.700**	**55.250.000**	**(467.991.700)**	**(39.750.000)**	**4.671.668.000**
TOTAL PIUTANG PASCASARJANA		**13.568.534.700**	**289.500.000**	**(865.591.700)**	**(353.750.000)**	**12.638.693.000**
Piutang Praja		**897.832.594**	**-**	**-**	**-**	**897.832.594**
TOTAL PIUTANG IPDN JATINANGOR		**14.466.367.294**	**289.500.000**	**(865.591.700)**	**(353.750.000)**	**13.536.525.594**
TOTAL PIUTANG		**14.466.367.294**	**289.500.000**	**(865.591.700)**	**(353.750.000)**	**13.536.525.594**

Status Penyelesaian Piutang PNBP Pascasarjana maupun Praja yang diberhentikan saat ini masih diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak Rp9.844.326.180

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9.844.326.180,00 dan Rp8.795.745.479,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih PNBP terdapat pada IPDN Jatinangor.

Tabel 49

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak

No	ANGKATAN	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Total Penyisihan (Rp)
			Macet	Ragu-Ragu	Kurang Lancar	Lancar	
1	XVII	242.650.000	242.650.000	-	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XIX	168.150.000	168.150.000	-	-	-	168.150.000
4	XX	276.950.000	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	887.225.000	887.225.000	-	-	-	887.225.000
6	XXII	448.275.000	448.275.000	-	-	-	448.275.000
7	XXIII	862.650.000	862.650.000	-	-	-	862.650.000
8	XXIV	277.375.000	277.375.000	-	-	-	277.375.000
9	XXV	436.250.000	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	640.750.000	-	-	-	640.750.000
11	XXVII	320.750.000	320.750.000	-	-	-	320.750.000
12	XXVIII	449.750.000	449.750.000	-	-	-	449.750.000
13	XXIX	265.000.000	264.500.000	250.000	-	-	264.750.000
14	XXX	598.250.000	483.750.000	45.625.000	1.675.000	-	531.050.000
15	XXXI	578.750.000	196.250.000	165.125.000	5.150.000	3.750	366.528.750
16	XXXII	214.750.000	138.750.000	7.500.000	-	305.000	146.555.000
17	XXXIII	141.000.000	78.500.000	16.000.000	1.300.000	87.500	95.887.500
18	XXXIV	211.500.000	6.500.000	50.750.000	6.425.000	196.250	63.871.250
19	XXXV	294.250.000	-	-	28.750.000	33.750	28.783.750
20	XXXVI	52.750.000	-	-	-	263.750	263.750
21	XXXVII	136.400.000	6.000.000	-	-	652.000	6.652.000
22	XXXVIII	49.250.000	-	-	2.075.000	142.500	2.217.500
23	XXXIX	5.750.000	-	-	-	28.750	28.750
24	XXXX	28.250.000	-	-	-	141.250	141.250
	JUMLAH S2	**7.973.525.000**	**6.571.875.000**	**285.250.000**	**45.375.000**	**1.854.500**	**6.904.354.500**
1	S3-I	571.000.000	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	392.500.000	392.500.000	-	-	-	392.500.000
3	S3-III	210.750.000	182.750.000	14.000.000	-	-	196.750.000
4	S3-IV	657.550.000	222.750.000	122.650.000	18.625.000	16.250	364.041.250
5	S3-V	632.743.000	91.750.000	116.746.500	6.550.000	1.210.000	216.256.500
6	S3- VI	295.250.000	-	43.250.000	20.875.000	-	64.125.000
7	S3- VII	401.250.000	-	38.875.000	32.350.000	-	71.225.000
8	S3-VIII	524.500.000	-	233.500.000	4.600.000	57.500	238.157.500
9	S3-IX	680.750.000	-	-	-	3.403.750	3.403.750
10	S3-X	224.250.000	-	-	-	1.121.250	1.121.250
11	S3-XI	48.625.000	-	-	-	243.125	243.125
12	S3-XII	32.500.000	-	-	-	162.500	162.500
	JUMLAH S3	**4.671.668.000**	**1.460.750.000**	**569.021.500**	**83.000.000**	**6.214.375**	**2.118.985.875**
JUMLAH TOTAL PASCASARJANA		**12.645.193.000**	**8.032.625.000**	**854.271.500**	**128.375.000**	**8.068.875**	**9.023.340.375**
Piutang Praja		**897.832.594**	**777.320.272**	**41.042.231**	**2.559.119**	**64.183**	**820.985.805**
TOTAL		**13.543.025.594**	**8.809.945.272**	**895.313.731**	**130.934.119**	**8.133.058**	**9.844.326.180**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp78.000.000

C.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp78.000.000,00 dan Rp19.592.241.337,00 . Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bagian Lancar TP	Itjen	-	492.890.339
2	Bagian Lancar TGR	Setjen	78.000.000	1.160.011.763
3	Bagian Lancar TGR	Ditjen Polpum	-	17.850.089.235
4	Bagian Lancar TGR	Ditjen Bina Pemdes	-	80.500.000
5	Bagian Lancar TGR	Ditjen Bina Keuda	-	8.750.000
Jumlah			**78.000.000**	**19.592.241.337**

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 51.

Tabel 51

Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	**19.592.241.337**
Mutasi Tambah (Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun):	**78.000.000**
Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	78.000.000
Mutasi Kurang (Jurnal Balik Awal Tahun):	**(19.592.241.337)**
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Setjen (DKPP)	(1.082.011.763)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	(78.000.000)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Itjen	(492.890.339)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Ditjen Polpum	(17.850.089.235)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR Ditjen Bina Pemdes	(80.500.000)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR Ditjen Bina Keuda	(8.750.000)
Saldo per 31 Desember 2023	**78.000.000**

Penjelasan mutasi Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan sebesar Rp78.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir atas kehilangan kendaraan roda empat pada IPDN Jatinangor;

b) Transaksi Pengurangan sebesar Rp1.082.011.763,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada DKPP;

c) Transaksi Pengurangan sebesar Rp78.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada IPDN Jatinangor;

d) Transaksi Pengurangan sebesar Rp492.890.339,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada Itjen;

e) Transaksi Pengurangan sebesar Rp17.850.089.235,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada Ditjen Polpum;

f) Transaksi Pengurangan sebesar Rp80.500.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada Ditjen Bina Pemdes; dan

g) Transaksi Pengurangan sebesar Rp8.750.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada Ditjen Bina Keuda.

C.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.349.000.883,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 52

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Eselon I	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2023 (Rp)	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Setjen	-	5.575.059
2	Itjen	-	492.890.339
3	Ditjen Polpum	-	17.850.089.235
4	Ditjen Bina Pemdes	-	402.500
5	Ditjen Bina Keuda	-	43.750
Total		**-**	**18.349.000.883**

Terdapat jaminan sebesar Rp90.000.000,00 atas Piutang TGR dengan kualitas lancar pada IPDN Jatinangor dengan nilai pengakuan sebesar Rp156.000.000,00 yang mengurangi nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR sebesar Rp450.000,00 menjadi

Rp330.000,00 pada saat penghitungan penyisihan piutang pada akhir Tahun 2022. Pada Tahun 2023 terdapat pembayaran atas Piutang TGR tersebut sebesar Rp78.000.000,00 dan mengurangi saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan TP/TGR sebesar Rp330.000,00 yang menyebabkan Saldo Penyisihan Piutang TP/TGR menjadi Rp0,00 sebelum dilakukan reklasifikasi ke Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR.

C.11 Persediaan

Persediaan

Rp204.121.721.283

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp204.121.721.283,00 dan Rp228.154.540.826,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel 53.

Tabel 53

Rincian Persediaan

Kode Perkiraan	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
I. Persediaan yang akan menjadi Beban Persediaan pada saat digunakan			
117111	Barang Konsumsi	4.844.481.786	4.565.341.209
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	15.418.250
117199	Persediaan Lainnya	1.195.972.582	1.189.584.274
Total		**6.040.454.368**	**5.770.343.733**
II. Persediaan yang akan menjadi Beban Pemeliharaan pada saat digunakan			
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	610.476.442	450.959.385
117114	Suku Cadang	113.491.222	88.933.749
Total		**723.967.664**	**539.893.134**
III. Persediaan yang akan menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.334.897.038	24.144.320.110
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	382.720.441	9.609.318.759
117125	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.095.980.150	5.095.980.150
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000	446.822.000
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	160.017.091.880	181.397.049.965
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	9.154.135.762	1.083.142.625
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	925.651.980	67.670.350
Total		**197.357.299.251**	**221.844.303.959**
TOTAL PERSEDIAAN		**204.121.721.283**	**228.154.540.826**

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 54.

Tabel 54

Rincian Persediaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	4.050.580.802	3.900.409.595	150.171.207
2	Itjen	140.303.120	78.669.925	61.633.195
3	Ditjen Polpum	13.480.000	134.088.500	(120.608.500)
4	Ditjen BAK	24.352.228.495	36.127.910.999	(11.775.682.504)
5	Ditjen Pemdes	14.224.246.284	14.757.649.109	(533.402.825)
6	Ditjen Bina Bangda	147.442.252.605	160.764.634.276	(13.322.381.671)
7	Ditjen Otda	3.488.704.430	3.542.110.919	(53.406.489)
8	Ditjen Dukcapil	10.008.174.546	8.378.080.523	1.630.094.023
9	Ditjen Keuda	4.763.171	5.409.400	(646.229)
10	BSKDN	115.410.471	158.898.228	(43.487.757)
11	BPSDM	281.577.359	306.679.352	(25.101.993)
Jumlah		**204.121.721.283**	**228.154.540.826**	**(24.032.819.543)**

Rincian Persediaan per Satker disajikan pada **Lampiran X**.

Tabel 55

Mutasi Persediaan

Akun Persediaan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Barang Konsumsi	4.565.341.209	21.106.077.897	20.826.937.320	4.844.481.786
Bahan untuk Pemeliharaan	450.959.385	2.950.564.743	2.791.047.686	610.476.442
Suku Cadang	88.933.749	424.211.414	399.653.941	113.491.222
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	5.681.600	5.681.600	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	24.144.320.110	3.450.191.000	6.259.614.072	21.334.897.038
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9.609.318.759	5.603.698.229	14.830.296.547	382.720.441
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.095.980.150	-	-	5.095.980.150
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000	7.042.031.000	7.042.031.000	446.822.000
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	181.397.049.965	14.717.944.775	36.097.902.860	160.017.091.880
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	1.083.142.625	272.861.934.028	264.790.940.891	9.154.135.762
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	67.670.350	2.737.262.630	1.879.281.000	925.651.980
Bahan Baku	-	2.281.694.227	2.281.694.227	-
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	-	89.878.232	89.878.232	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15.418.250	780.000	16.198.250	-
Persediaan Lainnya	1.189.584.274	3.043.613.178	3.037.224.870	1.195.972.582
TOTAL	**228.154.540.826**	**336.315.562.953**	**360.348.382.496**	**204.121.721.283**

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Eselon I disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Akun disajikan pada **Lampiran XII**.

Terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang tidak berada dalam penguasaan Kementerian Dalam Negeri per tanggal Neraca yang sampai dengan Tahun 2020 permohonan

pemindahtanganannya telah diajukan ke Pengelola BMN namun belum terbit SK Penghapusannya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.505.951.484,00 yang terdiri dari sebesar Rp4.078.965.484,00 pada Ditjen BAK berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.395.007.844,00 dan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.683.957.140,00, sebesar Rp419.258.500,00 pada Ditjen Bina Pemdes berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, serta sebesar Rp7.728.000,00 berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Otda dengan rincian terlampir pada **Lampiran XIII.**

Transaksi Barang Usang sebesar Rp166.840.345,00 merupakan transaksi dalam rangka mengeluarkan persediaan dengan kondisi usang dari neraca yang terdapat pada:

a) IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp760.600,00 berupa Obat-obatan;

b) IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp24.181.400,00 berupa ATK;

c) IPDN Kampus Sulut sebesar Rp4.567.152,00 berupa Obat-obatan;

d) IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp122.147.693,00 terdiri dari sebesar Rp16.547.693,00 berupa Obat-obatan dan sebesar Rp105.600.000,00 berupa Alat *Rapid Test*;

e) Ditjen Bina Bangda sebesar Rp7.012.500,00 berupa ATK; serta

f) PPSDM Bukittinggi sebesar Rp8.171.000,00 berupa Obat-obatan.

Transaksi Koreksi Saldo Awal sebesar Rp3.999.000,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan satu unit Peralatan dan Mesin perolehan TAYL seharusnya dicatat menjadi beberapa barang dengan kode barang yang berbeda yang diantaranya merupakan Persediaan pada IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Transaksi Perolehan Lainnya sebesar Rp4.185.982.900,00 terdiri dari:

a) sebesar Rp9.032.400,00 yang merupakan transaksi dalam rangka mencatat Persediaan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan yang semula dicatat sebagai Beban Pemeliharaan pada Setjen Pusat;

b) sebesar Rp117.500.000,00 yang merupakan transaksi dalam rangka mencatat Persediaan yang berasal dari Belanja Operasional Lainnya yang semula dicatat sebagai Beban Operasional Lainnya pada IPDN Kampus Sumatera Barat; dan

c) sebesar Rp59.450.500,00 yang merupakan transaksi dalam

rangka mencatat Persediaan yang berasal dari Belanja Keperluan Perkantoran yang semula dicatat sebagai Beban Keperluan Perkantoran pada Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp5.328.000,00 dan pada IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar Rp54.122.500,00;

d) Sebesar Rp4.000.000.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka mencatat Persediaan Barang Bantuan Lainnya yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat berupa Bantuan Renovasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berasal dari Dana Hibah Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PPEA) Tahun 2023 sebanyak 200 penerima masing-masing Rp20.000.000,00 namun belum ada Legal Formal berupa Berita Acara Serah Terima (BAST);

Transaksi Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp1.244.971.000,00 terdiri dari sebesar Rp1.066.800.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk atas kesalahan pencatatan Peralatan dan Mesin yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen BAK, serta sebesar Rp178.171.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk atas kesalahan pencatatan perolehan KDP yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses.

Transaksi Reklasifikasi ke Aset sebesar Rp3.000.000,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan Persediaan Suku Cadang berupa Suku Cadang Alat Komunikasi yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin berupa *Handy Talky* (HT) pada Setjen.

Transaksi Keluar Lainnya sebesar Rp128.529.600,00 terdiri dari sebesar Rp128.506.000,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kode barang persediaan yang semula dicatat sebagai Persediaan yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada IPDN Kampus Papua, dan sebesar Rp23.600,00 yang merupakan transaksi dalam rangka *Void* BAST atas penginputan BAST yang seharusnya tidak dilakukan namun telah dilakukan pendetailan Persediaan atas BAST tersebut sehingga diperlukan koreksi untuk mengeluarkan persediaan dari neraca pada Balai Pemdes Lampung.

Tanah
Rp13.166.366.737.522

C.12 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.166.366.737.522,00 dan Rp12.474.680.756.512,00.

Rincian Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per

Unit Eselon I tersaji pada Tabel 56.

Tabel 56

Rincian Tanah per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	10.183.450.813.077	10.196.512.429.000	(13.061.615.923)
2	Itjen	142.267.725.000	142.267.725.000	-
3	Ditjen Pemdes	613.234.134.493	613.234.134.493	-
4	Ditjen Bina Bangda	479.054.657.019	479.054.657.019	-
5	BSKDN	224.894.826.500	239.998.196.000	(15.103.369.500)
6	BPSDM	1.523.464.581.433	803.613.615.000	719.850.966.433
Jumlah		**13.166.366.737.522**	**12.474.680.756.512**	**691.685.981.010**

Rincian Tanah per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Tanah per Eselon I terdapat pada **Lampiran XV**.

Tabel 57

Rincian Mutasi Tanah Tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**12.474.680.756.512**
Mutasi tambah:	**1.753.266.835.943**
Transfer Masuk	1.426.640.316.943
Reklasifikasi Masuk	241.846.618.000
Perolehan Lainnya	84.779.901.000
Mutasi kurang:	**(1.061.580.854.933)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(15.103.369.500)
Transfer Keluar	(719.850.966.433)
Reklasifikasi Keluar	(241.846.618.000)
Koreksi Pencatatan	(84.779.901.000)
Saldo per 31 Desember 2023	**13.166.366.737.522**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Tanah sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp1.426.640.316.943,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp706.789.350.510,00 yang diterima dari Setjen Kementerian Keuangan untuk diserahkan kepada BPSDM, pada BPSDM sebesar Rp706.789.350.510,00 yang diterima dari Setjen Pusat, dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp13.061.615.923,00 yang diterima dari IPDN Jatinangor;

b) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp241.846.618.000,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp227.364.666.000,00 atas Reklasifikasi Masuk Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dan II dari Tanah Bangunan Rumah Tanpa Golongan, dan sebesar Rp14.481.952.000,00 atas Reklasifikasi Masuk Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan;

c) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp84.779.901.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan transaksi koreksi atas pemecahan NUP Tanah

Bangunan Pendidikan dan Latihan dalam rangka Transfer Keluar ke PPSDM Regional Bandung;

d) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp15.103.369.500,00 merupakan koreksi nilai tanah atas permasalahan sengketa tanah pada BSKDN Kemendagri yaitu terdapat batas tanah seluas 374 m2 pada BSKDN yang tercatat dalam dua sertifikat, dalam hal ini dikuasai oleh Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan pencatatan tanah tersebut ditindaklanjuti dengan Berita Acara Koreksi Tindak Lanjut Temuan Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah Kemendagri dan Kemenkumham Nomor 028/2309/SES tanggal 14 April 2022 dan sebelumnya telah dilakukan koreksi atas kuantitas tanah oleh BSKDN. Berdasarkan Berita Acara Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah BSKDN Kemendagri Nomor 000.3.3.2/6295/BSKDN, BSKDN mengoreksi Nilai Tanah karena seharusnya tanah tersebut tercatat pada Kemenkumham.

e) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp719.850.966.433,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp706.789.350.510,00 yang merupakan Transfer Keluar ke BPSDM atas Tanah yang diterima dari Kementerian Keuangan dan IPDN Jatinangor sebesar Rp13.061.615.923,00 yang merupakan Transfer Keluar ke PPSDM Regional Bandung;

f) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp241.846.618.000,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp227.364.666.000,00 untuk mereklasifikasi Tanah Bangunan Rumah Tanpa Golongan menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dan II, serta mereklasifikasi Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp14.481.952.000,00; dan

g) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp84.779.901.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan transaksi koreksi atas pemecahan NUP Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan dalam rangka Transfer Keluar ke PPSDM Regional Bandung.

Peralatan dan Mesin
Rp3.663.742.657.834

C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.663.742.657.834,00 dan Rp3.508.767.385.762,00.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 58.

Tabel 58

Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Setjen	788.987.558.413	767.357.069.904	21.630.488.509
2	Itjen	19.694.568.304	19.315.279.729	379.288.575
3	Ditjen Polpum	17.651.540.515	15.354.024.980	2.297.515.535
4	Ditjen BAK	131.256.615.123	128.841.882.782	2.414.732.341
5	Ditjen Bina Pemdes	99.524.006.723	98.365.982.780	1.158.023.943
6	Ditjen Bina Bangda	66.955.981.914	66.479.106.814	476.875.100
7	Ditjen Otda	53.354.583.543	52.952.629.703	401.953.840
8	Ditjen Dukcapil	2.293.725.365.948	2.170.198.648.741	123.526.717.207
9	Ditjen Keuda	18.984.460.832	19.602.213.537	(617.752.705)
10	Badan Litbang	26.040.568.538	25.212.311.538	828.257.000
11	Badan PSDM	147.567.407.981	145.088.235.254	2.479.172.727
Jumlah		**3.663.742.657.834**	**3.508.767.385.762**	**154.975.272.072**

Rincian Peralatan dan Mesin per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVI**.

Tabel 59

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**3.508.767.385.762**
Mutasi tambah:	**196.335.433.032**
Saldo Awal	3.395.965.277
Pembelian	148.153.980.990
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.147.499.451
Transfer Masuk	1.531.691.331
Hibah Masuk	21.920.864.450
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	5.496.000.000
Reklasifikasi Masuk	3.113.995.652
Perolehan Lainnya	9.646.859.927
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	46.905.882
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	881.670.072
Mutasi kurang:	**(41.360.160.960)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(4.220.376.539)
Transfer Keluar	(1.531.691.331)
Hibah Keluar	(109.927.832)
Reklasifikasi Keluar	(3.113.995.652)
Koreksi Pencatatan	(5.481.742.124)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1.066.800.000)
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	(25.835.627.482)
Saldo per 31 Desember 2023	**3.663.742.657.834**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.274.188.181.175)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**389.554.476.659**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp3.395.965.277,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp38.312.000,00 yang merupakan koreksi atas Peralatan dan

Mesin yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya tercatat sebagai 1 Unit *Video Conference* seharusnya dicatat sebagai beberapa Unit barang dengan kode barang dan NUP yang berbeda, dan pada IPDN Kampus Papua sebesar Rp3.357.653.277,00 diantaranya terdiri dari sebesar Rp3.152.753.277,00 yang merupakan koreksi dalam rangka pemecahan NUP barang dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2023 yang semula dicatat sebagai 1 Unit *Local Area Network* (LAN) dan 3 Unit Komputer Jaringan Lainnya menjadi 50 *P.C. Unit* dan 2 Peralatan Studio Audio Lainnya, serta sebesar Rp204.900.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka mencatat Peralatan dan Mesin berupa *Pick Up* yang diterima dari IPDN Jatinangor pada Tahun 2013 namun belum tercatat pada Neraca IPDN Papua;

b) Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp148.153.980.990,00 yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp1.220.460.850,00 dan Pembelian Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp146.933.520.140,00. Terdapat pendetailan Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp1.220.460.850,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp42.130.900,00, Ditjen BAK sebesar Rp1.066.800.000,00 yang merupakan kesalahan pemilihan kode barang pada saat pendetailan yang seharusnya merupakan Persediaan sehingga dilakukan reklasifikasi keluar ke Persediaan atas barang tersebut, dan pada Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp111.529.950,00.

   Terdapat pendetailan Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp146.933.520.140,00 diantaranya sebesar Rp51.419.000,00 dilakukan koreksi pencatatan karena pendetailan tersebut dilakukan atas kesalahan perekaman BAST dan SPBy pada Modul Komitmen yang seharusnya tidak diinput karena dokumen tersebut tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D, dan sebesar Rp3.800.032,00 dilakukan koreksi pengurangan nilai aset yang diperoleh atas Pengembalian Belanja Modal Tahun Berjalan, serta sebesar Rp20.979.000,00 dilakukan koreksi akun belanja menjadi Belanja Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin.

   Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satker terdapat pada **Lampiran XVII**;

c) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp2.147.499.451,00 terdapat pada Setjen yang diantaranya sebesar Rp113.890.380,00 dilakukan koreksi pengurangan nilai aset karena pendetailan Transaksi Pengembangan Nilai tersebut dilakukan atas kesalahan perekaman SPBy pada Modul Komitmen yang seharusnya tidak diinput karena dokumen

tersebut tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D sehingga Pengembangan Nilai Aset yang seharusnya hanya sebesar Rp2.033.609.071,00 yang seluruhnya berasal dari Belanja Modal;

d) Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp1.531.691.331,00 terdapat pada IPDN Jakarta sebesar Rp517.886.331,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp140.000.000,00, IPDN Kampus Sulut sebesar Rp95.475.000,00, IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp95.475.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp95.475.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp95.475.000,00, IPDN Kampus NTB sebesar Rp95.475.000,00, dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp396.430.000,00;

e) Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp21.920.864.450,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp358.761.331,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp3.938.867.248,00 dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp17.623.235.871,00;

f) Transaksi Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp5.496.000.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor atas perolehan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terbagi ke dalam beberapa termin sehingga semula dicatat sebagai KDP;

g) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.113.995.652,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.175.055.052,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp196.460.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp464.200.000,00, Ditjen Polpum sebesar Rp7.200.000,00, Ditjen Otda sebesar Rp42.957.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp63.712.000,00 dan BSKDN sebesar Rp164.411.600,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kode barang;

h) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp9.646.859.927,00 terdapat pada:

   i. Setjen Pusat sebesar Rp543.000.000,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kuantitas barang pada saat pendetailan;

   ii. DKPP sebesar Rp2.489.949.130,00 terdiri dari sebesar Rp2.101.478.100,00 untuk mencatat kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan sebesar Rp388.471.030,00 yang merupakan koreksi dalam rangka mencatat Peralatan dan Mesin berupa meja, kursi, papan informasi, dan logo DKPP yang semula dicatat sebagai ATR yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2023;

   iii. IPDN Jatinangor sebesar Rp167.277.000,00 untuk

mengoreksi kesalahan penginputan kode dan kuantitas barang pada saat pendetailan;

iv. IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar Rp283.366.750,00 terdiri dari kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp263.803.000,00 dan kesalahan penginputan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp19.563.750,00. Kesalahan tersebut telah dikoreksi dengan melakukan penginputan Koreksi Pencatatan untuk menghapus kesalahan penginputan dan menginput kembali perolehan lainnya dengan nilai yang seharusnya;

v. IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp87.790.405,00 untuk mengoreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang merupakan perolehan TAYL menjadi Peralatan dan Mesin karena pekerjaannya telah selesai;

vi. IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar Rp30.100.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang;

vii. IPDN Kampus Papua sebesar Rp128.506.000,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kode barang yang semula dicatat sebagai Persediaan;

viii. Ditjen BAK sebesar Rp935.000.000,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kode barang yang semula tercatat sebagai Mini Komputer menjadi P.C. Unit;

ix. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp53.280.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang;

x. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp8.450.000,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan kuantitas barang pada saat pendetailan, yang semula dicatat sebagai satu barang seharusnya dicatat menjadi dua barang yang berbeda;

xi. Ditjen Dukcapil sebesar Rp4.476.807.642,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan penginputan kode dan kuantitas barang pada saat pendetailan, yang semula dicatat sebagai satu barang seharusnya dicatat sebagai beberapa barang dengan kode barang yang berbeda; dan

xii. BPSDM sebesar Rp443.333.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang.

i) Transaksi Penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp46.905.882,00 terdapat pada:

i. DKPP sebesar Rp4.279.882,00 yang terdiri dari

Rp3.300.000,00 merupakan koreksi dalam rangka kesalahan penginputan kuantitas dan nilai barang pada saat pendetailan, yang semula didetailkan menjadi dua kode barang dengan NUP yang berbeda seharusnya dicatat menjadi satu barang yang sama dan sebesar Rp979.882,00 yang merupakan kesalahan penginputan transaksi pada Modul Aset Tetap yang seharusnya tidak dilakukan dan telah dilakukan koreksi nilai berkurang dalam rangka mengoreksi kesalahan penginputan tersebut;

ii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp33.191.000,00 yang terdiri dari sebesar Rp31.191.000,00 merupakan koreksi dalam rangka kesalahan penginputan kuantitas barang yang semula tercatat sebagai 4 unit barang baru pada saat perolehan yang seharusnya tercatat sebagai 3 unit Server yang telah tercatat sebagai Peralatan dan Mesin, dan sebesar Rp2.000.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kode barang;

iii. BSKDN sebesar Rp9.435.000,00 untuk mencatat Belanja Barang atas pembelian *Apple Pencil 2nd Gen* dan 1 Unit *Samsung Keybook* yang seharusnya menambah nilai Tablet PC

j) Transaksi Penambahan dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp881.670.072,00 terdapat pada IPDN Kampus NTB sebesar Rp4.792.422,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp147.700.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp451.800.000,00, DKPP sebesar Rp170.883.150,00, Balai Pemdes Malang sebesar Rp69.494.500,00, dan PPSDM Yogyakarta sebesar Rp37.000.000,00;

k) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp4.220.376.539,00 terdapat pada:

i. Setjen Pusat sebesar Rp140.884.480,00 yang terdiri dari sebesar Rp113.890.380,00 yang merupakan transaksi koreksi dalam rangka *Void* BAST atas kesalahan penginputan BAST yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D namun telah dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atas BAST tersebut sehingga dilakukan koreksi terhadap Peralatan dan Mesin yang sudah didetailkan tersebut, dan sebesar Rp26.994.100,00 yang merupakan koreksi nilai aset dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023;

ii. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp8.450.000,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan kuantitas barang pada saat pendetailan, yang semula dicatat sebagai satu barang seharusnya dicatat menjadi dua barang yang berbeda sehingga dilakukan

pengurangan nilai aset;

iii. DKPP sebesar Rp979.882,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan transaksi koreksi nilai bertambah pada Modul Aset Tetap yang seharusnya tidak dilakukan;

iv. Ditjen BAK sebesar Rp3.800.032,00 yang merupakan koreksi nilai aset dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023;

v. Ditjen Dukcapil sebesar Rp4.066.262.145,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kode barang;

l) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp1.531.691.331,00 terdapat pada IPDN Jakarta sebesar Rp140.000.000,00, Setjen Pusat sebesar Rp358.761.331,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp396.430.000,00 dan IPDN Jatinangor sebesar Rp636.500.000,00;

m) Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp109.927.832,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp29.665.000,00 dan Ditjen BAK sebesar Rp80.262.832,00;

n) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.113.995.652,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.175.055.052,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp196.460.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp464.200.000,00, Ditjen Polpum sebesar Rp7.200.000,00, Ditjen Otda sebesar Rp42.957.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp63.712.000,00 dan BSKDN sebesar Rp164.411.600,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kode barang;

o) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp5.481.742.124,00 terdapat pada:

i. Setjen Pusat sebesar Rp573.440.000,00 yang terdiri dari sebesar Rp543.000.000,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kuantitas barang pada saat pendetailan dan sebesar Rp30.440.000,00 yang merupakan transaksi koreksi dalam rangka *Void* BAST atas kesalahan penginputan BAST yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D namun telah dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atas BAST tersebut sehingga dilakukan koreksi terhadap Peralatan dan Mesin yang sudah didetailkan tersebut;

ii. IPDN Kampus Papua sebesar Rp3.152.753.277,00 yang merupakan koreksi dalam rangka pemecahan NUP barang dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2023 yang semula dicatat sebagai 1 Unit *Local Area Network* (LAN) dan 3 Unit Komputer Jaringan Lainnya menjadi 50 *P.C. Unit* dan 2 Peralatan Studio Audio Lainnya;

iii. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp19.563.750,00 merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan transaksi Perolehan Lainnya atas kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang. Koreksi pencatatan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan penginputan transaksi Perolehan Lainnya dengan nilai yang seharusnya;

iv. IPDN Sulut sebesar Rp47.531.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kode dan kuantitas barang yang diperoleh pada TAYL yang sebelumnya tercatat sebagai 1 Unit *Video Conference* seharusnya dicatat sebagai beberapa Unit Peralatan dan Mesin dengan NUP yang berbeda;

v. IPDN Jatinangor sebesar Rp167.277.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka kesalahan penginputan kode dan kuantitas barang pada saat pendetailan;

vi. Ditjen BAK sebesar Rp935.000.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kode barang yang semula tercatat sebagai Mini Komputer seharusnya dicatat sebagai P.C. Unit;

vii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp536.715.497,00 yang terdiri dari sebesar Rp31.191.000,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kuantitas barang yang semula tercatat sebagai 1 unit barang baru pada saat perolehan yang seharusnya tercatat sebagai penambahan nilai Server yang telah tercatat sebagai Peralatan dan Mesin, sebesar Rp412.545.497,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan penginputan kode dan kuantitas barang pada saat pendetailan, yang semula dicatat sebagai satu barang seharusnya dicatat sebagai beberapa barang dengan kode barang yang berbeda, sebesar Rp20.979.000,00 merupakan koreksi kesalahan penginputan BAST yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D namun telah dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atas BAST tersebut sehingga dilakukan koreksi terhadap Peralatan dan Mesin yang sudah didetailkan tersebut, serta sebesar Rp72.000.000,00 untuk mencatat koreksi atas pengadaan *Roll Banner* Elektrik yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin namun barang tersebut telah diserahkan kepada Pemda, sehingga dikoreksi menjadi Persediaan;

viii. BSKDN sebesar Rp49.461.600,00 merupakan kesalahan penginputan kode barang yang semula tercatat sebagai Peralatan dan Mesin seharusnya dicatat sebagai *Software* Komputer;

p) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp1.066.800.000,00 terdapat pada Ditjen BAK yang

merupakan kesalahan penginputan kode barang yang seharusnya tercatat sebagai Persediaan; dan

q) Transaksi Pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp25.835.627.482,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp9.600.589.292,00, IPDN Kampus Papua sebesar Rp367.096.000,00, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp129.042.400,00, DKPP sebesar Rp170.883.150,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp9.498.610.100,00, IPDN Sulut sebesar Rp981.650.000,00, IPDN Kalbar sebesar Rp1.406.912.400,00, Itjen sebesar Rp405.700.000,00, Balai Pemdes Malang sebesar Rp734.202.290,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp89.904.000,00, Balai Pemdes Lampung sebesar Rp200.900.000,00, Ditjen Otda sebesar Rp136.025.500,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp1.058.196.350,00, PPSDM Bandung sebesar Rp498.960.000,00, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp556.956.000,00.

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.663.742.657.834,00 tersebut diantaranya terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp31.412.042.896,00. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri mengungkap adanya peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu atas LHP LK Tahun 2022 pada tiga satker sebesar Rp2.525.519.691,00 dan Tahun 2023 pada 12 satker sebesar Rp28.886.523.205,00.

Gedung dan Bangunan Rp2.904.113.214.212

C.14 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.904.113.214.212,00 dan Rp2.867.573.800.289,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 60.

Tabel 60

Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	2.072.850.840.900	2.047.873.454.412	24.977.386.488
2	Itjen	45.459.818.486	45.000.125.017	459.693.469
3	Ditjen BAK	1.576.390.000	1.576.390.000	-
4	Ditjen Bina Pemdes	186.337.863.344	185.399.216.451	938.646.893
5	Ditjen Bina Bangda	103.281.574.926	102.966.095.904	315.479.022
6	Ditjen Dukcapil	36.357.571.783	36.357.571.783	-
7	BSKDN	32.481.509.071	32.115.438.520	366.070.551
8	BPSDM	425.767.645.702	416.285.508.202	9.482.137.500
Jumlah		**2.904.113.214.212**	**2.867.573.800.289**	**36.539.413.923**

Rincian Gedung dan Bangunan per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVIII**.

Tabel 61

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**2.867.573.800.289**
Mutasi tambah:	**57.212.361.949**
Pembelian	284.225.675
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	8.856.120.293
Transfer Masuk	2.261.761.450
Hibah Masuk	2.150.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.914.877.606
Reklasifikasi Masuk	16.267.791.176
Perolehan Lainnya	14.310.863.360
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	622.474.969
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	59.708.010
Pengembangan melalui KDP	9.731.552.410
Koreksi Manual	752.987.000
Mutasi kurang:	**(20.672.948.026)**
Koreksi Susulan	(149.607.217)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(756.200.224)
Transfer Keluar	(2.261.761.450)
Reklasifikasi Keluar	(16.267.791.176)
Koreksi Pencatatan	(1.059.416.959)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(178.171.000)
Saldo per 31 Desember 2023	**2.904.113.214.212**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(486.261.917.923)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**2.417.851.296.289**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp284.225.675,00 yang terdiri dari sebesar Rp118.511.000,00 yang berasal dari Belanja Modal, dan sebesar Rp165.714.675,00 pada IPDN Kampus Sumbar yang berasal dari Belanja Modal yang merupakan kesalahan penggunaan menu pada saat pendetailan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan Pengembangan Nilai dan tidak membentuk NUP baru;

b) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp8.856.120.293,00 terdapat pada:

   i. Setjen Pusat sebesar Rp1.641.040.193,00 yang berasal dari Belanja Modal. Terdapat Transaksi Pengembangan Nilai sebesar Rp75.060.642,00 yang dikoreksi melalui Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dalam rangka *Void* BAST atas kesalahan penginputan BAST yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D namun telah dilakukan

pendetailan pada Modul Aset Tetap atas BAST tersebut, dan sebesar Rp1.708.668,00 yang dikoreksi melalui Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Berjalan;

ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp1.413.758.000,00 yang berasal dari Belanja Modal. Terdapat Transaksi Pengembangan Nilai sebesar Rp281.598.000,00 yang seharusnya dicatat sebagai perolehan ATR sehingga dilakukan koreksi terhadap penambahan nilai Gedung dan Bangunan tersebut;

iii. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp149.607.217,00 yang berasal dari Belanja Modal yang seharusnya dicatat sebagai KDP dalam rangka pekerjaan pengembangan nilai Gedung dan Bangunan yang dibagi ke dalam beberapa termin. Pengembangan Melalui KDP telah dilakukan untuk mereklasifikasi KDP tersebut menjadi nilai Gedung dan Bangunan;

iv. Itjen sebesar Rp499.881.917,00 yang berasal dari Belanja Modal;

v. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp938.646.893,00 yang berasal dari Belanja Modal;

vi. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp315.479.022,00 yang berasal dari Belanja Modal;

vii. BSKDN sebesar Rp366.070.551,00 yang berasal dari Belanja Modal;

viii. Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar sebesar Rp2.397.850.500,00 yang berasal dari Belanja Modal;

ix. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp138.980.000,00 yang berasal dari Belanja Modal; dan

x. PPSDM Bukittinggi sebesar Rp994.806.000,00 yang berasal dari Belanja Barang;

c) Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp2.261.761.450,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta yang terdiri dari Rp2.150.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dalam rangka Hibah yang berasal dari Setjen dan sebesar Rp111.761.450,00 yang berasal dari IPDN Jatinangor;

d) Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk Bangunan Gedung Laboratorium Permanen sebesar Rp2.150.000.000,00 terdapat pada Setjen untuk diserahkan kepada IPDN Kampus Jakarta;

e) Transaksi Penyelesaian Pembangunan dari KDP sebesar Rp1.914.877.606,00 terdiri dari sebesar Rp111.761.450,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan paket pekerjaan

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang pekerjaannya telah selesai, sebesar Rp1.624.945.156,00 atas perolehan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terbagi ke dalam beberapa termin sehingga semula dicatat sebagai KDP yang pekerjaannya telah selesai, dan sebesar Rp178.171.000,00 terdapat pada Setda Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan kesalahan pencatatan barang yang sebelumnya tercatat melalui Perolehan KDP yang seharusnya merupakan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda;

f) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp16.267.791.176,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp249.245.976,00 untuk mereklasifikasi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen menjadi Gedung Pos Jaga Permanen, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp14.072.871.200,00 untuk mereklasifikasi Rumah Negara Golongan Tipe II menjadi Tipe I dan PPSDM Yogyakarta sebesar Rp1.945.674.000,00 untuk mereklasifikasi Asrama Permanen menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe A dan B Permanen;

g) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp14.310.863.360,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp14.018.695.360,00 yang terdiri dari sebesar Rp10.790.325.705,00 berupa transaksi koreksi dalam rangka mengoreksi KDP perolehan TAYL yang seharusnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan karena pekerjaannya telah selesai, yang diantaranya terdapat Gedung Garasi/*Pool* Semi Permanen senilai Rp140.715.284,00 yang dikoreksi kembali menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan serta sebesar Rp3.228.369.655,00 berupa transaksi untuk mencatat sebagian KDP menjadi Gedung dan Bangunan karena terdapat beberapa pekerjaan yang berbeda dicatat di dalam satu nomor KDP, pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp84.319.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang yang semula tercatat sebagai Beban Pemliharaan Gedung dan Bangunan, serta pada IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp207.849.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Gedung dan Bangunan yang yang berasal dari Belanja Barang yang semula tercatat sebagai Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

h) Transaksi Penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp622.474.969,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp423.338.000,00 atas pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh IPDN Jatinangor di IPDN Kampus Jakarta yang telah selesai dan ditransfer keluar ke IPDN Kampus Jakarta. Aset Tetap Renovasi tersebut kemudian dikoreksi dan menambah nilai Gedung dan Bangunan IPDN

Kampus Jakarta dan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp199.136.969,00 untuk mencatat Belanja Barang yang semula dicatat sebagai Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan;

i) Transaksi Penambahan dari Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp59.708.010,00 terdapat pada Setjen Pusat atas pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh Ditjen Otda;

j) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp9.731.552.410,00 terdapat pada IPDN Sumbar sebesar Rp3.781.051.410,00 dan Balai Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp5.950.501.000,00 berupa penyelesaian paket pekerjaan pengembangan nilai Gedung dan Bangunan yang terbagi ke dalam beberapa termin;

k) Transaksi Penambahan dari Koreksi Manual terdapat pada IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp752.987.000,00 dalam rangka koreksi 2 Unit Gedung dan Bangunan yang semula dicatat dalam NUP yang berbeda seharusnya hanya dicatat dalam 1 NUP yang terdiri dari penggabungan Bangunan Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen NUP 10 ke dalam NUP 8 serta Bangunan Mess/Wisma/*Bungalow*/Tempat Peristirahatan NUP 1 ke dalam Rumah Negara Golongan I Tipe A NUP 45;

l) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp149.607.217,00 terdapat pada IPDN Sumbar yang merupakan koreksi atas kesalahan pemilihan menu dalam pendetailan Pengembangan Nilai Aset yang terbagi ke dalam beberapa termin;

m) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp756.200.224,00 terdapat pada:

   i. Setjen Pusat sebesar Rp193.532.004,00 yang terdiri dari sebesar Rp118.471.362,00 berupa koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas pengembalian Belanja Modal TAYL dan sebesar Rp75.060.642,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan dalam rangka *Void* BAST atas kesalahan penginputan BAST yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D namun telah dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atas BAST tersebut;

   ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp522.479.772,00 yang terdiri dari sebesar Rp281.598.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pendetailan yang semula dicatat sebagai Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi, serta Rp240.881.772,00 yang merupakan Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;

   iii. Itjen sebesar Rp40.188.448,00 yang merupakan koreksi Nilai

Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;

n) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp2.261.761.450,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.150.000.000,00 ke IPDN Jakarta berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dalam rangka Hibah dan IPDN Jatinangor sebesar Rp111.761.450,00 kepada IPDN Jakarta;

o) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp16.267.791.176,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp249.245.976,00 untuk mereklasifikasi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen menjadi Gedung Pos Jaga Permanen, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp14.072.871.200,00 untuk mereklasifikasi Rumah Negara Golongan Tipe II menjadi Tipe I dan PPSDM Yogyakarta sebesar Rp1.945.674.000,00 untuk mereklasifikasi Asrama Permanen menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe A dan B Permanen;

p) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.059.416.959,00 terdapat pada IPDN Kalimantan Barat sebesar Rp140.715.284,00 untuk mengoreksi nilai Gedung dan Bangunan berupa Gedung Garasi/*Pool* Semi Permanen yang semula diinput melalui menu Perolehan Lainnya menjadi KDP, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp752.987.000,00 dalam rangka koreksi 2 Unit Gedung dan Bangunan yang semula dicatat dalam NUP yang berbeda seharusnya hanya dicatat dalam 1 NUP yang terdiri dari penggabungan Bangunan Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen NUP 10 ke dalam NUP 8 serta Bangunan Mess/Wisma/*Bungalow*/Tempat Peristirahatan NUP 1 ke dalam Rumah Negara Golongan I Tipe A NUP 45, dan IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp165.714.675,00 untuk mengoreksi kesalahan penggunaan menu pada saat pendetailan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan Pengembangan Nilai yang terbagi ke dalam beberapa termin dan tidak membentuk NUP baru; dan

q) Transaksi Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp178.171.000,00 terdapat pada Setda Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan kesalahan pencatatan barang yang sebelumnya tercatat melalui Perolehan KDP yang seharusnya merupakan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp293.820.847.621

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp293.820.847.621,00 dan Rp288.798.425.915,00.

Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 62.

Tabel 62

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	241.919.632.153	239.079.909.017	2.839.723.136
2	Ditjen BAK	11.245.442.670	11.245.442.670	-
3	Ditjen Pemdes	3.058.859.874	3.058.859.874	-
4	Ditjen Bina Bangda	3.707.596.890	3.707.596.890	-
5	Ditjen Otda	489.387.520	489.387.520	-
6	Ditjen Dukcapil	2.863.933.000	1.482.364.000	1.381.569.000
7	BSKDN	505.733.100	505.733.100	-
8	BPSDM	30.030.262.414	29.229.132.844	801.129.570
Jumlah		**293.820.847.621**	**288.798.425.915**	**5.022.421.706**

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XIX.**

Tabel 63

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**288.798.425.915**
Mutasi tambah:	**7.545.882.213**
Pembelian	1.195.000.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	771.987.350
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.371.361.707
Reklasifikasi masuk	2.500.584.257
Perolehan Lainnya	490.352.772
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.216.596.127
Mutasi kurang:	**(2.523.460.507)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(22.876.250)
Reklasifikasi Keluar	(2.500.584.257)
Saldo per 31 Desember 2023	**293.820.847.621**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(147.173.134.759)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**146.647.712.862**

Penjelasan transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

a) Transaksi Pembelian sebesar Rp1.195.000.000,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil atas perolehan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil yang berasal dari Belanja Modal;

b) Transaksi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp771.987.350,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp189.970.350,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp196.138.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar

Rp186.569.000,00, dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp199.310.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;

c) Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.371.361.707,00 terdapat pada Satker PPSDM Makassar sebesar Rp224.683.000,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) dan IPDN Kalbar sebesar Rp1.146.678.707,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Saluran *Drainage*;

d) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.500.584.257,00 terdapat pada Satker IPDN Kampus Kalbar berasal dari reklasifikasi barang yang semula tercatat sebagai Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil dan Sedang, Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang, dan Jaringan Listrik Lainnya menjadi Jaringan Distribusi Tegangan Di Atas 20 KVA;

e) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp490.352.772,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp291.689.772,00 untuk mengoreksi KDP perolehan TAYL yang seharusnya dicatat sebagai Jaringan karena pekerjaannya telah selesai dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp198.663.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Jalan dan Jembatan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan;

f) Transaksi Penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.216.596.127,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp430.940.800,00 untuk mencatat kapitalisasi Jalan dan Jembatan yang berasal dari Belanja Barang yang semula dicatat sebagai Beban Pemeliharaan Jaringan, pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp607.181.757,00 untuk mengoreksi KDP perolehan TAYL yang seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Irigasi dan Jaringan karena pekerjaannya telah selesai, dan pada Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar sebesar Rp178.473.570,00 untuk mencatat kapitalisasi Jalan dan Jembatan yang berasal dari Belanja Barang yang semula dicatat sebagai Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

g) Transaksi Pengurangan dari Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp22.876.250,00 pada Sekretariat Jenderal merupakan transaksi koreksi nilai aset atas Pengembalian Belanja Modal TAYL; dan

h) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.500.584.257,00 terdapat pada Satker IPDN Kampus Kalbar berasal dari reklasifikasi keluar barang yang semula tercatat sebagai Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil dan Sedang, Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang, dan Jaringan Listrik Lainnya menjadi Jaringan Distribusi Tegangan Di Atas 20 KVA.

Aset Tetap Lainnya Rp160.744.484.125

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp160.744.484.125,00 dan Rp142.514.310.840,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 64.

Tabel 64

Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	29.583.491.957	25.874.227.277	3.709.264.680
2	Ditjen BAK	17.686.224.808	17.686.224.808	-
3	Ditjen Pemdes	13.578.079.108	559.361.170	13.018.717.938
4	Ditjen Bina Bangda	4.951.568.889	4.951.568.889	-
5	Ditjen Otda	84.583.688.119	84.583.688.119	-
6	Ditjen Dukcapil	5.584.047.737	4.545.842.152	1.038.205.585
7	Ditjen Keuda	1.291.295.317	827.310.235	463.985.082
8	BSKDN	519.862.436	519.862.436	-
9	BPSDM	2.966.225.754	2.966.225.754	-
Jumlah		**160.744.484.125**	**142.514.310.840**	**18.230.173.285**

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XIV.**

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XX**.

Tabel 65

Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**142.514.310.840**
Mutasi tambah:	**20.218.521.138**
Pembelian	1.798.197.387
Transfer Masuk	423.338.000
Reklasifikasi Masuk	3.500.000
Perolehan Lainnya	17.955.685.751
Hibah Masuk	37.800.000
Mutasi kurang:	**(1.988.347.853)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(390.244.030)
Transfer Keluar	(483.046.010)
Koreksi Pencatatan	(1.100.257.813)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(14.800.000)
Saldo per 31 Desember 2023	**160.744.484.125**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(94.678.343.010)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**66.066.141.115**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp1.798.197.387,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp67.000.710,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp167.525.000,00, Ditjen Otda sebesar Rp59.708.010,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp1.038.205.585,00, dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp465.758.082,00 yang berasal dari Belanja Modal. Terdapat koreksi kurang nilai ATR yang diperoleh melalui Transaksi Pembeliam sebesar Rp1.773.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Berjalan;

b) Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp423.338.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta yang berasal dari IPDN Jatinangor berupa Gedung dan Bangunan;

c) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.500.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari reklasifikasi barang yang semula tercatat sebagai Bangunan Gedung Kantor menjadi Pahatan Batu. Reklasifikasi Masuk dilakukan untuk mengoreksi kesalahan penginputan kode barang pada saat perolehan aset tetap melalui transaksi pembelian pada Modul Komitmen Aplikasi SAKTI;

d) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp17.955.685.751,00 terdapat pada:

i. IPDN Jatinangor sebesar Rp281.598.000,00 atas koreksi pencatatan Nilai Gedung dan Bangunan Bangunan berupa Gedung Pendidikan Permanen menjadi Gedung dan Bangunan dalam Renovasi;

ii. DKPP sebesar Rp3.947.000.000,00 atas koreksi pencatatan yang sebelumnya tercatat melalui Perolehan KDP menjadi Gedung dan Bangunan dalam Renovasi karena kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetailan;

iii. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp16.650.000,00 yang merupakan kapitalisasi Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang;

iv. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp13.033.517.938,00 kapitalisasi Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang;

v. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp676.919.813,00, yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kode barang atas pendetailan aset tahun berjalan sebesar Rp45.930.000,00 dan TAYL sebesar Rp630.989.813,00;

e) Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp37.800.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan Hibah Masuk atas Alat Musik Tradisional/Daerah yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya;

f) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp390.244.030,00 terdapat pada DKPP sebesar Rp388.471.030,00 atas koreksi Aset Tetap Renovasi yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2023 seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin berupa meja, kursi, papan informasi, dan logo DKPP dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp1.773.000,00 atas Koreksi Nilai Barang berupa Pekerjaan Renovasi *Lobby* Tahun 2023 dalam rangka pengembalian belanja modal tahun anggaran berjalan;

g) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp483.046.010,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp423.338.000,00 dan Ditjen Otda sebesar Rp59.708.010,00;

h) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.100.257.813,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp423.338.000,00 atas kesalahan pencatatan Gedung dan Bangunan dalam Renovasi menjadi Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp676.919.813,00 atas kesalahan penginputan kode barang; dan

i) Transaksi Pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp14.800.000,00 terdapat pada Balai Besar PMD Malang berupa Alat Musik Modern/Band.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp29.571.282.509

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp29.571.282.509,00 dan Rp41.946.345.532,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 66.

Tabel 66

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	27.631.034.399	40.031.094.622	(12.400.060.223)
2	Ditjen Bina Pemdes	24.997.200	-	24.997.200
3	BPSDM	1.915.250.910	1.915.250.910	-
Jumlah		**29.571.282.509**	**41.946.345.532**	**(12.375.063.023)**

Rincian Mutasi KDP per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXI**.

Rincian KDP per Satker disajikan pada **Lampiran XXII**.

Tabel 67

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI (Rp)
Setjen	Setjen Pusat (403200)	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2.613.058.195
	IPDN Kalbar (683070)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	25.017.976.204
Jumlah Setjen			**27.631.034.399**
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.997.200
Jumlah Ditjen Bina Pemdes			**24.997.200**
BPSDM	BPSDM (403231)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	318.987.650
	PPSDM Makasar (027177)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.596.263.260
Jumlah BPSDM			**1.915.250.910**
JUMLAH KESELURUHAN			**29.571.282.509**

Tabel 68

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**41.946.345.532**
Mutasi tambah:	**30.373.189.583**
Perolehan Penambahan KDP	15.805.921.805
Pengembangan KDP	9.747.592.381
Koreksi Nilai KDP Bertambah	1.939.846.408
Perolehan Lainnya KDP	1.424.467.282
Reklasifikasi Masuk KDP	1.455.361.707
Mutasi kurang:	**(42.748.252.606)**
Penyelesaian Pembangunan KDP	(8.782.239.313)
Pengembangan melalui KDP	(9.731.552.410)
Reklasifikasi Keluar KDP	(1.455.361.707)
Koreksi Pencatatan KDP	(4.012.785.000)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(18.766.314.176)
Saldo per 31 Desember 2023	**29.571.282.509**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan KDP adalah sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp15.805.921.805,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp5.510.572.350,00, DKPP sebesar Rp3.947.000.000,00 yang seharusnya didetailkan sebagai Gedung dan Bangunan dalam Renovasi, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp69.508.755,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp24.997.200,00, Setda Kab. Pulau Morotai sebesar Rp178.171.000,00 yang seharusnya didetailkan sebagai Persediaan, Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp5.850.989.500,00, dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp224.683.000,00;

b) Transaksi Penambahan dari Pengembangan KDP sebesar Rp9.747.592.381,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp268.191.400,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp97.189.100,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp3.451.727.118,00, dan IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp5.930.484.763,00;

c) Transaksi Penambahan dari Koreksi Nilai KDP Bertambah sebesar Rp1.939.846.408,00 terdapat pada:

   i. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp1.733.346.124,00 yang terdiri dari Rp151.047.217,00 merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kode barang karena transaksi pengembangan nilai GB yang telah diinput seharusnya merupakan pekerjaan pengembangan yang dibagi dalam beberapa termin sehingga seharusnya tercatat sebagai KDP, serta sebesar Rp1.582.298.907,00 merupakan koreksi atas kesalahan pemilihan nomor KDP pada saat melakukan

penginputan transaksi pengembangan KDP;

ii. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp140.715.284,00 yang merupakan koreksi atas transaksi perolehan lainnya Gedung dan Bangunan dalam rangka mereklasifikasi KDP menjadi aset definitif karena belum seharusnya direklasifikasi menjadi aset definitif;

iii. PPSDM Regional Makassar sebesar Rp65.785.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan transaksi perolehan KDP yang semula dicatat sebagai 5 KDP seharusnya dicatat sebagai 1 KDP;

d) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya KDP sebesar Rp1.424.467.282,00 terdapat pada:

i. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp178.277.075,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kode barang atas pengembangan Gedung dan Bangunan per termin yang seharusnya tercatat sebagai KDP;

ii. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.146.678.707,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan pengembangan KDP yang semula tergabung ke dalam satu KDP yang seharusnya di dalamnya terdapat beberapa pekerjaan yang berbeda, sehingga dalam rangka melakukan reklasifikasi KDP ke aset tetap definitif harus dilakukan transaksi koreksi nilai berkurang dan perolehan lainnya KDP;

iii. Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp99.511.500,00 yang merupakan koreksi KDP untuk mencatat Jasa Konsultan yang semula disajikan sebagai Beban Jasa Konsultan yang telah dilakukan koreksi SPM menjadi Belanja Modal dalam rangka kapitalisasi aset tetap;

e) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk KDP sebesar Rp1.455.361.707,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.146.678.707,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan pengembangan KDP yang semula tergabung ke dalam satu KDP berupa Gedung dan Bangunan dalam Pekerjaan yang seharusnya di dalamnya terdapat beberapa pekerjaan yang berbeda, sehingga dalam rangka melakukan reklasifikasi KDP ke aset tetap definitif berupa Irigasi dilakukan transaksi koreksi nilai berkurang dan perolehan lainnya KDP untuk membentuk KDP baru, kemudian dilakukan reklasifikasi kode barang ke Irigasi Dalam Pengerjaan sebelum dilakukan Penyelesaian Pembangunan, serta PPSDM Regional Makassar sebesar Rp308.683.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan perolehan KDP dalam rangka penyelesaian KDP menjadi aset tetap definitif;

f) Transaksi Pengurangan dari Penyelesaian Pembangunan KDP sebesar Rp8.782.239.313,00 terdapat pada IPDN Jatinangor

sebesar Rp5.607.761.450,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp2.771.623.863,00, Setda Kab. Pulau Morotai sebesar Rp178.171.000,00 yang seharusnya merupakan Persediaan, dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp224.683.000,00;

g) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp11.779.491.807,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar untuk mereklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap Definitif ke dalam beberapa barang dengan NUP yang berbeda;

h) Transaksi Pengurangan dari Pengembangan KDP sebesar Rp9.731.552.410,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp3.781.051.410,00 dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp5.950.501.000,00;

i) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar KDP sebesar Rp1.455.361.707,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan pengembangan KDP yang semula tergabung ke dalam satu KDP berupa Gedung dan Bangunan dalam Pekerjaan yang seharusnya di dalamnya terdapat beberapa pekerjaan yang berbeda, sehingga dalam rangka melakukan reklasifikasi KDP ke aset tetap definitif berupa Irigasi dilakukan transaksi koreksi nilai berkurang dan perolehan lainnya KDP untuk membentuk KDP baru, kemudian dilakukan reklasifikasi kode barang ke Irigasi Dalam Pengerjaan dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp308.683.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan perolehan KDP dalam rangka penyelesaian KDP menjadi aset tetap definitif;

j) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp4.012.785.000,00 terdapat pada DKPP sebesar Rp3.947.000.000,00 atas koreksi pencatatan yang sebelumnya tercatat melalui Perolehan KDP menjadi Gedung dan Bangunan dalam Renovasi karena kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetailan, dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp65.785.000,00 yang merupakan kesalahan penginputan transaksi perolehan KDP yang semula dicatat sebagai 5 KDP seharusnya dicatat sebagai 1 KDP; dan

k) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp18.766.314.176,00 terdapat pada:

   i. Setjen Pusat sebesar Rp1.029.475.100,00 yang merupakan koreksi nilai KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran 2023 yang pengembalian belanja modalnya telah dilakukan pada tahun 2022;

   ii. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp1.582.298.907,00 merupakan koreksi atas kesalahan pemilihan nomor KDP pada saat melakukan penginputan transaksi pengembangan KDP; dan

   iii. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp16.154.540.169,00 yang terdiri dari sebesar Rp3.228.369.655,00 merupakan transaksi dalam rangka reklasifikasi sebagian KDP ke aset tetap

definitif berupa Gedung dan Bangunan, sebesar Rp1.146.678.707,00 merupakan transaksi dalam rangka reklasifikasi sebagian KDP ke aset tetap definitif berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebesar Rp11.779.491.807,00 merupakan transaksi dalam reklasifikasi satu KDP ke berbagai aset tetap definitif dengan kode barang yang berbeda.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp4.002.301.576.867

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.002.301.576.867,00 dan Rp3.756.554.085.442,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 69.

Tabel 69

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Peralatan dan Mesin	3.663.742.657.834	(3.274.188.181.175)	389.554.476.659
2	Gedung dan Bangunan	2.904.113.214.212	(486.261.917.923)	2.417.851.296.289
3	Jalan dan Jembatan	78.064.949.616	(51.619.327.489)	26.445.622.127
4	Irigasi	48.092.788.537	(28.558.348.182)	19.534.440.355
5	Jaringan	167.663.109.468	(66.995.459.088)	100.667.650.380
6	Aset Tetap Lainnya	160.744.484.125	(94.678.343.010)	66.066.141.115
Jumlah		**7.022.421.203.792**	**(4.002.301.576.867)**	**3.020.119.626.925**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp17.850.089.235

C.19 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.850.089.235,00 dan Rp135.500.000,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Rincian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel 70.

Tabel 70

Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	78.000.000	(78.000.000)
2	Ditjen Polpum	17.850.089.235	-	17.850.089.235
3	Ditjen Bina Pemdes	-	57.500.000	(57.500.000)
Jumlah		**17.850.089.235**	**135.500.000**	**17.714.589.235**

Mutasi tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 71.

Tabel 71

Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	**135.500.000**
Mutasi Tambah:	**37.962.920.911**
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	78.000.000
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Setjen (DKPP)	1.082.011.763
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Itjen	492.890.339
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Ditjen Polpum	17.850.089.235
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Ditjen Bina Pemdes	80.500.000
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Ditjen Bina Keuda	8.750.000
Pengakuan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	8.100.000
Pengakuan Piutang TGR pada Ditjen Bina Pemdes	13.400.000
Pengakuan Piutang TGR pada BPSDM	6.200.000
Koreksi tambah perbaikan data Piutang TGR pada Itjen	492.890.339
Koreksi tambah perbaikan data Piutang TGR pada Ditjen Polpum	17.850.089.235
Mutasi Kurang:	**(20.248.331.676)**
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	(86.100.000)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (DKPP)	(1.082.011.763)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Ditjen Bina Keuda	(8.750.000)
Reklasifikasi ke Bagian Lancar TP/TGR	(78.000.000)
Pelunasan Tagihan Piutang TGR pada Ditjen Bina Pemdes	(151.400.000)
Pelunasan Tagihan Piutang TGR pada BPSDM	(6.200.000)
Koreksi kurang perbaikan data Piutang TP/TGR pada Itjen	(492.890.339)
Koreksi kurang perbaikan data Piutang TP/TGR pada Ditjen Polpum	(17.850.089.235)
Hapus Buku Tagihan Piutang TGR pada Itjen	(492.890.339)
Saldo per 31 Desember 2023	**17.850.089.235**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan pada Setjen sebesar Rp78.000.000,00 berasal dari Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2022 pada IPDN Jatinangor;

b) Transaksi Penambahan pada Setjen sebesar Rp1.082.011.763,00 berasal dari Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2022 pada DKPP;

c) Transaksi Penambahan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 berasal dari Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2022;

d) Transaksi Penambahan pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp17.850.089.235,00 berasal dari Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2022;

e) Transaksi Penambahan pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp80.500.000,00 berasal dari Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2022;

f) Transaksi Penambahan pada Ditjen Bina Keuda sebesar Rp8.750.000,00 berasal Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2022;

g) Transaksi Penambahan pada IPDN Jatinangor sebesar Rp8.100.000,00 berasal dari pengakuan Piutang TGR atas kehilangan kendaraan dinas;

h) Transaksi Penambahan pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp13.400.000,00 berasal dari pengakuan Piutang TGR atas kehilangan kendaraan dinas;

i) Transaksi Penambahan pada BPSDM sebesar Rp6.200.000,00 berasal dari pengakuan Piutang TGR atas kehilangan kendaraan dinas;

j) Transaksi Penambahan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 berasal dari koreksi dalam rangka perbaikan data Piutang pada Modul Piutang berupa perbedaan akun piutang pada Modul Piutang yang disajikan sebagai Piutang TP/TGR Lainnya dan pada Neraca Kemendagri sebagai Piutang TP/TGR. Koreksi dilakukan untuk menyesuaikan akun Piutang pada Modul Piutang dengan yang disajikan di Neraca Kemendagri;

k) Transaksi Penambahan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 berasal dari koreksi dalam rangka perbaikan data Piutang pada Modul Piutang berupa perbedaan akun piutang pada Modul Piutang yang disajikan sebagai Piutang TP/TGR Lainnya dan pada Neraca Kemendagri sebagai Piutang TP/TGR. Koreksi dilakukan untuk menyesuaikan akun Piutang pada Modul Piutang dengan yang disajikan di Neraca Kemendagri;

l) Transaksi Pengurangan pada Setjen sebesar Rp86.100.000,00 terdiri dari pelunasan Piutang TGR yang diakui pada Tahun Anggaran Berjalan atas kehilangan kendaraan dinas sebesar Rp8.100.000,00 dan pelunasan sebagian Piutang TGR yang diakui pada TAYL pada IPDN Jatinangor;

m) Transaksi Pengurangan pada Setjen sebesar Rp1.082.011.763,00 berasal dari pelunasan Piutang TGR pada DKPP;

n) Transaksi Pengurangan pada Ditjen Bina Keuda sebesar Rp8.750.000,00 berasal dari pelunasan Piutang TGR atas kehilangan kendaraan dinas;

o) Transaksi pengurangan pada IPDN Jatinangor sebesar Rp78.000.000,00 merupakan reklasifikasi keluar piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir atas kehilangan kendaraan roda empat;

p) Transaksi Pengurangan pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp151.400.000,00 berasal dari pelunasan Piutang TGR atas kehilangan kendaraan dinas;

q) Transaksi Pengurangan pada BPSDM sebesar Rp6.200.000,00 berasal dari pelunasan piutang TGR atas kehilangan kendaraan dinas;

r) Transaksi Pengurangan sebesar Rp492.890.339,00 pada Itjen berasal dari koreksi dalam rangka perbaikan data Piutang pada Modul Piutang berupa perbedaan akun piutang pada Modul Piutang yang disajikan sebagai Piutang TP/TGR Lainnya dan pada Neraca Kemendagri sebagai Piutang TP/TGR. Koreksi dilakukan untuk menyesuaikan akun Piutang pada Modul Piutang dengan yang disajikan di Neraca Kemendagri;

s) Transaksi Pengurangan sebesar Rp17.850.089.235,00 pada Ditjen Polpum berasal dari koreksi dalam rangka perbaikan data Piutang pada Modul Piutang berupa perbedaan akun piutang pada Modul Piutang yang disajikan sebagai Piutang TP/TGR Lainnya dan pada Neraca Kemendagri sebagai Piutang TP/TGR. Koreksi dilakukan untuk menyesuaikan akun Piutang pada Modul Piutang dengan yang disajikan di Neraca Kemendagri; dan

t) Transaksi Pengurangan sebesar Rp492.890.339,00 berasal dari penghapusan secara bersyarat atas piutang pada Itjen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023.

Piutang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, maka kepengurusan piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI. Berdasarkan Surat Wakil Ketua BPK RI Nomor 46/S/II/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas Nama Sdri. EI, dinyatakan bahwa BPK RI telah menyetujui permohonan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. Menteri Keuangan telah menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. dengan menghapuskan piutang negara tersebut dari pembukuan Inspektorat Jenderal.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan Januari 2012 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 16 September 2020 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-21/PUPNC.10.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Penerimaan

Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.

Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp17.850.089.235

C.20 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.850.089.235,00 dan Rp452.500,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 72

Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Ditjen Polpum	Macet	1	17.850.089.235	17.850.089.235
Total			**1**	**17.850.089.235**	**17.850.089.235**

Aset Tak Berwujud Rp744.115.321.306

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp744.115.321.306,00 dan Rp710.313.792.390,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 73

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software	718.062.251.105
2	Lisensi	18.323.236.001
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600
4	ATB Lainnya	5.458.069.600
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		**744.115.321.306**
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2023		(667.442.299.426)
Jumlah Nilai Buku per 31 Desember 2023		**76.673.021.880**

Rincian Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 74.

Tabel 74

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	KENAIKAN (PENURUNAN) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	37.288.415.171	33.978.652.855	3.309.762.316
2	Itjen	789.614.320	789.614.320	-
3	Ditjen Polpum	139.050.000	432.535.500	(293.485.500)
4	Ditjen BAK	1.034.120.800	935.275.300	98.845.500
5	Ditjen Bina Pemdes	7.828.962.630	7.828.962.630	-
6	Ditjen Bina Bangda	16.636.280.140	20.656.632.232	(4.020.352.092)
7	Ditjen Otda	4.401.946.950	15.920.456.458	(11.518.509.508)
8	Ditjen Dukcapil	633.582.122.436	587.110.544.880	46.471.577.556
9	Ditjen Bina Keuda	35.522.380.435	35.522.380.435	-
10	BSKDN	6.601.555.981	6.403.450.381	198.105.600
11	Badan PSDM	290.872.443	735.287.399	(444.414.956)
	Jumlah	**744.115.321.306**	**710.313.792.390**	**33.801.528.916**

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker disajikan pada **Lampiran XXIII**.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXIV**.

Tabel 75

Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**710.313.792.390**
Mutasi tambah:	**63.521.191.323**
Saldo Awal	3.471.434.805
Pembelian	45.344.612.988
Perolehan Lainnya	1.000.000.000
Pengembangan Nilai Aset	13.141.366.974
Pengembangan melalui KDP	69.900.000
Koreksi Susulan	49.461.600
Penggunaan Kembali BMN yang sudah sudah dihentikan penggunaan aktif	444.414.956
Mutasi Kurang:	**(29.719.662.407)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(43.382.150)
Koreksi Pencatatan	(8.987.888.895)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(20.688.391.362)
Saldo per 31 Desember 2023	**744.115.321.306**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(667.442.299.426)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**76.673.021.880**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar

Rp3.471.434.805,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil atas transaksi dalam rangka koreksi pengembangan nilai *Software* Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya karena seharusnya tidak dikapitalisasi menjadi nilai *Software*. Koreksi dilakukan dengan melakukan penginputan transaksi Koreksi Pencatatan untuk mengoreksi *Software* yang telah tercatat, kemudian dilanjutkan dengan penginputan Koreksi Saldo Awal untuk membentuk *Software* dengan nilai yang seharusnya;

b) Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp45.344.612.988,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp1.319.084.207,00 dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp44.025.528.781,00 yang berasal dari Belanja Modal;

c) Transaksi Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp1.000.000.000,00 terdapat pada DKPP atas koreksi untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Sistem Aplikasi Perangkat dan *Monitoring Dashboard* yang berasal dari Belanja Barang;

d) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp13.141.366.974,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp4.168.400.659,00, Ditjen BAK sebesar Rp98.845.500,00, Ditjen Otda sebesar Rp832.873.950,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp7.962.502.865,00, dan BSKDN sebesar Rp78.744.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;

e) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp69.900.000,00 terdapat pada BSKDN atas *Software* Komputer;

f) Transaksi Penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp49.461.600,00 terdapat pada BSKDN berupa *Software* Komputer atas kesalahan penginputan kode barang yang semula tercatat sebagai Peralatan dan Mesin;

g) Transaksi Penambahan dari Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp444.414.956,00 terdapat pada BPSDM atas *Software* Komputer;

h) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp43.382.150,00 terdapat pada Setjen Pusat yang merupakan koreksi nilai Hasil Kajian/Penelitian atas pengembalian belanja modal TAYL;

i) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp8.987.888.895,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil atas koreksi pengembangan nilai *Software* Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi menjadi nilai *Software*. Koreksi dilakukan dengan melakukan penginputan transaksi Koreksi Pencatatan untuk mengoreksi *Software* yang telah tercatat, kemudian dilanjutkan dengan penginputan Koreksi Saldo Awal untuk membentuk *Software* dengan nilai

yang seharusnya; dan

j) Transaksi Pengurangan dari Penghentiaan Aset Dari Penggunaan sebesar Rp20.688.391.362,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp2.743.342.400,00, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp18.898.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp23.000.000,00, IPDN Kampus Papua sebesar Rp349.100.000,00, Ditjen Polpum sebesar Rp293.485.500,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp4.020.352.092,00, Ditjen Otda sebesar Rp12.351.383.458,00, dan BPSDM sebesar Rp888.829.912,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunannya Rp54.982.239.721

C.22 Dana Yang Dibatasi Penggunaannnya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp54.982.239.721,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunannya disajikan pada **Lampiran XXV.**

Aset Lain-Lain Rp211.955.882.101

C.23 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp211.955.882.101,00 dan Rp195.636.562.479,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 76

Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	83.389.652.699
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	128.566.229.402
Total		**211.955.882.101**

Rincian Aset Lain-Lain menurut Eselon I per 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 77.

Tabel 77

Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	KENAIKAN (PENURUNAN) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	37.528.625.868	24.425.977.439	13.102.648.429
2	Itjen	7.138.187.300	7.834.257.035	(696.069.735)
3	Ditjen Polpum	1.611.327.750	1.317.842.250	293.485.500
4	Ditjen BAK	8.217.658.578	12.243.518.578	(4.025.860.000)
5	Ditjen Pemdes	4.938.080.077	4.258.572.287	679.507.790
6	Ditjen Bina Bangda	33.883.173.281	31.445.180.174	2.437.993.107
7	Ditjen Otda	39.936.911.063	27.449.502.105	12.487.408.958
8	Ditjen Dukcapil	63.535.874.527	72.621.405.554	(9.085.531.027)
9	Ditjen Keuda	5.797.739.410	4.739.543.060	1.058.196.350
10	BSKDN	-	638.224.000	(638.224.000)
11	BPSDM	9.368.304.247	8.662.539.997	705.764.250
	Jumlah	**211.955.882.101**	**195.636.562.479**	**16.319.319.622**

Rincian Aset Lain-Lain per Satker disajikan pada **Lampiran XXIII**.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXVI**.

Tabel 78

Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**195.636.562.479**
Mutasi tambah:	**46.565.554.944**
Penghentian Aset dari Penggunaan	46.538.818.844
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	26.736.100
Mutasi kurang:	**(30.246.235.322)**
Penghapusan	(438.224.000)
Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan)	(1.582.358.985)
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	(1.326.085.028)
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	(26.899.567.309)
Saldo per 31 Desember 2023	**211.955.882.101**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(197.654.299.005)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**14.301.583.096**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp46.538.818.844,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp9.600.589.292,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp12.241.952.500,00, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp147.940.400,00, IPDN Kampus Sulut sebesar Rp981.650.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar

Rp23.000.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.406.912.400,00, IPDN Kampus Papua sebesar Rp716.196.000,00, DKPP sebesar Rp170.883.150,00, Itjen sebesar Rp405.700.000,00, Ditjen Polpum sebesar Rp293.485.500,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp89.904.000,00, Balai Besar PMD Malang sebesar Rp749.002.290,00, Balai Pemdes Lampung sebesar Rp200.900.000,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp4.020.352.092,00, Ditjen Otda sebesar Rp12.487.408.958,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp1.058.196.350,00, BPSDM sebesar Rp888.829.912,00, PPSDM Regional Bandung sebesar Rp498.960.000,00, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp556.956.000,00;

b) Transaksi Penambahan dari Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp26.736.100,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta berupa Karpet, Kursi Besi/Metal, Meja Rapat, dan *Portable Water Pump*;

c) Transaksi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp438.224.000,00 terdapat pada BSKDN berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.3.4-4117 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada BSKDN;

d) Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp1.582.358.985,00 terdapat pada Ditjen Bina Bangda;

e) Transaksi Pengurangan dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp1.326.085.028,00 terdapat pada DKPP sebesar Rp170.883.150,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp147.700.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp451.800.000,00, IPDN Kampus NTB sebesar Rp4.792.422,00, PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp37.000.000,00, Balai Besar PMD Malang sebesar Rp69.494.500,00, dan BPSDM sebesar Rp444.414.956,00; dan

f) Transaksi Pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp26.899.567.309,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp9.680.436.141,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp1.068.436.700,00, IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp330.808.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp358.355.000,00, Itjen sebesar Rp1.101.769.735,00, Ditjen BAK sebesar Rp4.025.860.000,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp89.904.000,00, Balai Besar PMD Malang sebesar Rp200.900.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp9.085.531.027,00, BSKDN sebesar Rp200.000.000,00,

BPSDM sebesar Rp444.414.956,00, PPSDM Yogyakarta sebesar Rp301.823.750,00, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp11.328.000,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp865.096.598.431

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp865.096.598.431,00 dan Rp841.657.321.909,00.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya tersaji pada tabel 79.

Tabel 79

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A	Aset Tak Berwujud			
1	*Software* Komputer	718.062.251.105	(664.419.698.032)	53.642.553.073
2	Lisensi	18.323.236.001	(3.022.601.394)	15.300.634.607
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	-	2.271.764.600
4	ATB Lainnya	5.458.069.600	-	5.458.069.600
Jumlah		**744.115.321.306**	**(667.442.299.426)**	**76.673.021.880**
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	83.389.652.699	(78.939.040.303)	4.450.612.396
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	128.566.229.402	(118.715.258.702)	9.850.970.700
Jumlah		**211.955.882.101**	**(197.654.299.005)**	**14.301.583.096**
Total		**956.071.203.407**	**(865.096.598.431)**	**90.974.604.976**

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XXIII**.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp83.654.061.625

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp83.654.061.625,00 dan Rp29.292.974.202,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp83.654.061.625,00 terdiri dari:

a) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp26.833.969.972,00;

b) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.795.608.876,00;

c) Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp55.024.482.777,00 yang terdiri dari:

i. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp54.982.239.717,00 sehubungan dengan adanya kewajiban Satker sampai dengan akhir periode pelaporan yang belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progress penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan dibayarkan pada tahun 2024;

ii. Kas yang belum diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp42.243.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp27.573.000,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sebesar Rp14.670.000,00; dan

iii. Sisa saldo Dana Titipan pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp60,00 pada Satker Bappeda Provinsi Papua.

Perbandingan rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 80

Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	17.730.722.028	12.838.246.297	4.892.475.731
2	Itjen	1.858.367.294	1.754.441.610	103.925.684
3	Ditjen Polpum	1.457.463.856	1.461.293.124	(3.829.268)
4	Ditjen BAK	30.219.180	489.007.658	(458.788.478)
5	Ditjen Pemdes	2.659.958.051	2.585.104.142	74.853.909
6	Ditjen Bangda	3.586.504.728	2.001.435.045	1.585.069.683
7	Ditjen Otda	1.394.721.341	1.620.490.883	(225.769.542)
8	Ditjen Dukcapil	49.929.456.780	1.606.333.140	48.323.123.640
9	Ditjen Keuda	1.403.503.090	1.569.173.465	(165.670.375)
10	BSKDN	939.916.474	933.937.495	5.978.979
11	BPSDM	2.663.228.803	2.433.511.343	229.717.460
Jumlah		**83.654.061.625**	**29.292.974.202**	**54.361.087.423**

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXVII**.

Pendapatan Diterima Di Muka Rp127.686.367.506

C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp127.686.367.506,00 dan Rp6.509.135.334,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Perbandingan rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Unit Eselon I tersaji pada tabel 81.

Tabel 81

Pendapatan Diterima di Muka

NO	ESELON I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	7.168.606.801	5.980.769.080	1.187.837.721
2	Itjen	18.570.611	34.488.278	(15.917.667)
3	Ditjen Bina Pemdes	90.797.195	144.929.861	(54.132.666)
4	Ditjen Bina Bangda	293.353.500	224.207.000	69.146.500
5	Ditjen Dukcapil	119.943.814.000	-	119.943.814.000
6	BPSDM	171.225.399	124.741.115	46.484.284
Jumlah		**127.686.367.506**	**6.509.135.334**	**121.177.232.172**

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker terdapat pada **Lampiran XXVIII**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, pengguna jasa layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali Instansi Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pengguna layanan terlebih dahulu memilih dan membayar jasa layanan yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna layanan diberikan *voucher* untuk digunakan dalam pemanfaatan jasa layanan kependudukan dan *voucher* akan berkurang pada saat digunakan. Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp119.943.814.000,00 pada Ditjen Dukcapil merupakan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang berasal dari *voucher* jasa layanan kependudukan yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Uang Muka dari KPPN Rp56.709.120

C.27 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp56.709.120,00 dan Rp6.878.962,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang

muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp24.697.268

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.697.268,00 dan Rp2.864.750,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke kas negara.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp24.697.268,00 merupakan utang pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Tahun 2023 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024 yang terdiri dari sebesar Rp2.490.000,00 pada IPDN Kampus Sulawesi Utara dan sebesar Rp22.207.268,00 pada IPDN Kampus Papua.

Tabel 82

Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	ESELON I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	24.697.268	2.864.750	21.832.518
Jumlah		**24.697.268**	**2.864.750**	**21.832.518**

Ekuitas Rp16.599.721.292.944

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.599.721.292.944,00 dan Rp15.835.604.107.918,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp747.377.561.641

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp747.377.561.641,00 dan Rp74.295.704.529,00. Pendapatan-LO terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari PNBP fungsional antara lain pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil, penyelenggaraan pendidikan pascasarjana IPDN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta PNBP umum yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 83

Perbandingan Rincian PNBP Tahun 2023 dengan Tahun 2022

KODE AKUN	URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK/TURUN (%)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.871.916.523	2.989.676.687	29,51
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	1.665.000	-	100,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	30.080.000	29.012.500	3,68
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	225.747.100	198.750.000	13,58
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	15.772.013.373	23.026.780.800	(31,51)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	404.203.000	482.026.700	(16,15)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	50.243.378.000	46.825.043.000	7,30
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	2.286.950.000	303.000.000	654,77
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	673.874.677.500	-	100,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.201.093	97.857	1.127,40
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.101.328	100,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	59.538.792	439.515.325	(86,45)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	388.498.703	-	100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	217.692.557	700.332	30.984,19
JUMLAH		**747.377.561.641**	**74.295.704.529**	**905,95**

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp747.377.561.641,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp881.280.249.636,00, diantaranya sebesar Rp869.047.208.936,00 berasal dari kegiatan operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis kas) sebesar Rp121.669.647.295,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 84

Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.874.512.506	3.871.916.523	(2.595.983)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	1.665.000	1.665.000	-
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	30.080.000	30.080.000	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	220.997.100	225.747.100	4.750.000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	17.440.051.500	15.772.013.373	(1.668.038.127)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	462.953.000	404.203.000	(58.750.000)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	50.243.378.000	50.243.378.000	-
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	2.286.950.000	2.286.950.000	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	793.818.491.500	673.874.677.500	(119.943.814.000)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.298.950	1.201.093	(97.857)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.101.328	-	(1.101.328)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	59.538.792	59.538.792	-
425839	Pendapatan Denda Lainnya	388.498.703	388.498.703	-
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	217.692.557	217.692.557	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		**869.047.208.936**	**747.377.561.641**	**(121.669.647.295)**

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi PNBP menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berbeda sebesar Rp2.595.983,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

   a. Pengakuan Pendapatan-LO sebesar Rp2.717.647.097,00 yang terdiri dari:

      1) Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2023 yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 namun pelunasannya dilakukan pada Tahun 2024 sebesar Rp7.820.000,00.

      2) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2022 atas bagian Tahun 2023 sebesar Rp2.699.327.097,00.

      3) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas Koreksi Lainnya

sebesar Rp10.500.000,00.

b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp2.720.243.080,00 yang terdiri dari:

1) Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun 2022 yang telah disetor Bendahara Penerimaan ke Kas Negara sebesar Rp21.350.000,00.

2) Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp126.912.500,00.

3) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp2.571.980.580,00.

2. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan berbeda sebesar Rp4.750.000,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

a. Pengakuan Pendapatan-LO sebesar Rp35.500.000,00 yang terdiri dari:

1) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Tahun 2023 yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara sebesar Rp34.750.000,00.

2) Pengakuan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp750.000,00.

b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp30.750.000,00 yang terdiri dari:

1) Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Tahun 2022 yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara pada Tahun 2023 sebesar Rp29.250.000,00.

2) Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp1.500.000,00.

3. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Biaya Pendidikan berbeda sebesar Rp1.668.038.127,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

a. Pengakuan Pendapatan-LO sebesar Rp6.365.585.707,00 yang terdiri dari:

1) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka Tahun 2022 atas bagian tahun 2023 sebesar Rp3.814.030.695,00.

2) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Biaya Pendidikan Tahun 2023 yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara sebesar Rp2.265.555.012,00.

3) Pengakuan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp286.000.000,00.

b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp8.033.623.834,00 yang terdiri dari:

1) Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 atas pengakuan Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka sebesar Rp5.174.795.384,00.

2) Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Biaya Pendidikan Tahun 2022 yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara pada Tahun 2023 sebesar Rp2.022.986.750,00.

3) Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp835.841.700,00.

4. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Pendidikan Lainnya berbeda sebesar Rp58.750.000,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

a. Pengakuan Pendapatan-LO sebesar Rp46.250.000,00 yang terdiri dari:

1) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Pendidikan Lainnya Tahun 2023 yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara pada Tahun 2023 sebesar Rp43.500.000,00.

2) Pengakuan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Pendidikan Lainnya yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp2.750.000,00.

b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp105.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Pendidikan Lainnya Tahun 2022 yang telah disetor oleh

Bendahara Penerimaan ke Kas Negara pada Tahun 2023 sebesar Rp76.750.000,00.

2) Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Pendidikan Lainnya yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp28.250.000,00.

5. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 atas pengakuan Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka sebesar Rp119.943.814.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari voucher Jasa Layanan Kependudukan yang belum dipakai Pengguna per 31 Desember 2023.
6. Pelunasan Pendapatan-LO atas akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Tahun 2022 yang telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp97.857,00.
7. Pelunasan pendapatan-LO atas akun Pendapatan dari Penutupan Rekening Tahun 2022 yang telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.101.328,00.

Beban Pegawai Rp826.005.414.719

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp826.005.414.719,00 dan Rp819.017.793.905,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 85

Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji Pokok PNS	319.093.323.670	315.460.800.746	1,15
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.407.657	5.354.970	0,98
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	15.030.664.766	15.416.678.145	(2,50)
Beban Tunjangan Anak PNS	4.110.323.446	4.182.817.327	(1,73)
Beban Tunjangan Struktural PNS	9.466.753.550	12.274.933.128	(22,88)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.427.656.078	20.059.134.252	16,79
Beban Tunjangan PPh PNS	1.433.774.802	1.545.154.717	(7,21)
Beban Tunjangan Beras PNS	14.320.204.065	14.435.141.240	(0,80)
Beban Uang Makan PNS	30.575.086.900	32.173.272.950	(4,97)
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	56.150.000	65.750.000	(14,60)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	205.800.000	238.065.000	(13,55)
Beban Tunjangan Umum PNS	13.265.491.183	12.652.158.590	4,85
Beban Tunjangan Profesi Dosen	8.448.335.305	8.451.026.840	(0,03)
Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.757.966.800	1.467.087.400	19,83
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	88.800.000	100.100.000	(11,29)
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.689.301.400	1.677.501.400	0,70
Beban Gaji Pokok PPPK	66.115.200	24.793.200	166,67
Beban Pembulatan Gaji PPPK	532	156	241,03
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.611.520	2.479.320	166,67
Beban Tunjangan Anak PPPK	991.728	495.864	100,00
Beban Tunjangan Struktural PPPK	70.000.000	26.250.000	166,67
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.969.220	1.303.560	127,78
Beban Uang Lembur	12.366.528.000	8.536.111.450	44,87
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	370.374.445.332	370.221.383.650	0,04
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	142.713.565	-	0,00
TOTAL	**826.005.414.719**	**819.017.793.905**	**0,85**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp826.005.414.719,00, sedangkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp825.439.024.218,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pegawai (basis akrual) dengan Belanja Pegawai (basis kas) sebesar

Rp566.390.501,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 86

Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
511111	Beban Gaji Pokok PNS	319.092.371.870	319.093.323.670	951.800
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.409.280	5.407.657	(1.623)
511121	Beban TunjanganSuami/Istri PNS	15.030.741.505	15.030.664.766	(76.739)
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	4.110.424.414	4.110.323.446	(100.968)
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	9.461.353.550	9.466.753.550	5.400.000
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.909.338.078	23.427.656.078	(481.682.000)
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	1.437.556.674	1.433.774.802	(3.781.872)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	14.320.204.065	14.320.204.065	-
511129	Beban Uang Makan PNS	30.312.999.500	30.575.086.900	262.087.400
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	56.150.000	56.150.000	-
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	205.800.000	205.800.000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13.265.301.183	13.265.491.183	190.000
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	8.448.335.305	8.448.335.305	-
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.757.966.800	1.757.966.800	-
511194	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	88.800.000	88.800.000	-
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.689.301.400	1.689.301.400	-
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	66.115.200	66.115.200	-
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	532	532	-
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.611.520	6.611.520	-
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	991.728	991.728	-
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	70.000.000	70.000.000	-
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.969.220	2.969.220	-
512211	Beban Uang Lembur	11.751.979.000	12.366.528.000	614.549.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	370.205.589.829	370.374.445.332	168.855.503
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	142.713.565	142.713.565	-
BEBAN PEGAWAI		**825.439.024.218**	**826.005.414.719**	**566.390.501**

Perbedaan pencatatan beban pegawai menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PNS berbeda sebesar Rp951.800,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023

sebesar Rp13.267.600,00.

b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp14.219.400,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PNS berbeda sebesar Rp1.623,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.206,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp1.583,00.

3. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PNS berbeda sebesar Rp76.739,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp969.890,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp893.151,00.

4. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PNS berbeda sebesar Rp100.968,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp303.218,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp202.250,00.

5. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PNS berbeda sebesar Rp5.400.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023.

6. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PNS berbeda sebesar Rp481.682.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp485.140.000,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp3.458.000,00.

7. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan PPh PNS berbeda sebesar Rp3.781.872,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022

yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.952.948,00.

b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp171.076,00.

8. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PNS berbeda sebesar Rp262.087.400,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp3.386.990.000,00 yang terdiri dari:

      1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 sebesar Rp3.370.002.000,00.

      2) Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp16.988.000,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp3.649.077.400,00.

9. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PNS berbeda sebesar Rp190.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023.

10. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur berbeda sebesar Rp614.549.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp19.929.000,00.

    b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp634.478.000,00.

11. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) berbeda sebesar Rp168.855.503,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp24.486.073.277,00 yang terdiri dari:

       1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp24.472.376.112,00.

       2) Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2022 sebesar Rp13.697.165,00.

    b. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp24.317.217.774,00 yang terdiri dari:

       1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 sebesar Rp24.309.258.467,00.

2) Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2023 Rp7.959.307,00.

Beban Persediaan Rp21.794.582.829

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.794.582.829,00 dan Rp27.527.465.057,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pemakaian/konsumsi atas persediaan dinilai menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini beban persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan yang terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 87

Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	18.080.607.583	20.936.599.714	(13,64)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	17.135.750	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	3.713.975.246	6.573.729.593	(43,50)
TOTAL	**21.794.582.829**	**27.527.465.057**	**(20,83)**

Penjelasan hubungan mutasi kurang persediaan dengan beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 88

Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2023

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	SALDO AKHIR	PEMAKAIAN	BEBAN PERSEDIAAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
117111	Barang Konsumsi	4.565.341.209		4.844.481.786	(279.140.577)	18.080.607.583	(18.359.748.160)
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15.418.250		-	15.418.250	-	15.418.250
117199	Persediaan Lainnya	1.189.584.274		1.195.972.582	(6.388.308)	3.713.975.246	(3.720.363.554)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		35.049.358.748		35.049.358.748		35.049.358.748
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		793.126.300		793.126.300		793.126.300
JUMLAH		**5.770.343.733**	**35.842.485.048**	**6.040.454.368**	**35.572.374.413**	**21.794.582.829**	**13.777.791.584**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 (saldo awal) sebesar Rp5.770.343.733,00 dan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 (saldo akhir) sebesar Rp6.040.454.368,00. Selama Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp35.842.485.048,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan sebesar Rp35.572.374.413,00. Perbedaan sebesar Rp13.777.791.584,00 antara pemakaian persediaan sebesar Rp35.572.374.413,00 dengan Beban Persediaan sebesar Rp21.794.582.829,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 89

Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN NAMUN MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN)	1.269.541.770
2	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN NAMUN MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)	14.936.639.825
3	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN NAMUN MENJADI PERSEDIAAN BANTUAN SOSIAL)	89.878.232
4	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PEMELIHARAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN NAMUN MENJADI PERSEDIAAN)	(2.906.442.018)
5	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN MENJADI PERSEDIAAN)	(900.599.000)
6	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI TRANSAKSI KELUAR LAINNYA	128.510.000
7	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA	(132.828.000)
8	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI KUANTITAS KURANG	10.775.900
9	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI KUANTITAS TAMBAH	(44.442.300)
10	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI NILAI KURANG	23.655.000
11	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI NILAI TAMBAH	(2.859.900)
12	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KELUAR	1.407.585.716
13	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI MASUK	(1.191.322.332)
14	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI SALDO AWAL	(3.999.000)
15	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG DISEBABKAN ADANYA PERSEDIAAN RUSAK/USANG	166.840.345
16	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN BANSOS UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG (573112) MENJADI BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111)	(4.920.000)
17	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES (593121) KE BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111)	(2.247.500)
18	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN SUKU CADANG (593114) KE BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111)	(92.969)
19	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111) KE BEBAN PERSEDIAAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (593113)	6.900.000
20	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU (593131) MENJADI BEBAN PERSEDIAAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (593113)	14.810.115
21	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111) MENJADI BEBAN BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT (593128)	899.560.000
22	JURNAL MANUAL DALAM RANGKA VOID BAST KARENA KESALAHAN PENGINPUTAN BAST YANG SEHARUSNYA TIDAK DICAIRKAN NAMUN PENDETAILAN BMN TELAH DILAKUKAN	(23.600)
23	JURNAL KOREKSI BEBAN PERSEDIAAN ATAS KESALAHAN INPUT PEMAKAIAN PERSEDIAAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN MENU REKLASIFIKASI KELUAR DAN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	84.000
24	JURNAL KOREKSI BEBAN PERSEDIAAN ATAS KESALAHAN PEMILIHAN MENU PADA MODUL PERSEDIAAN	1.970.200
25	JURNAL KOREKSI TAMBAH BEBAN PERSEDIAAN ATAS KOREKSI KELEBIHAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN YANG MENGGUNAKAN MENU KOREKSI KUANTITAS	6.409.000
26	JURNAL KOREKSI KURANG BEBAN PERSEDIAAN ATAS KOREKSI KEKURANGAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN YANG MENGGUNAKAN MENU KOREKSI KUANTITAS	(4.275.900)
27	JURNAL KOREKSI *AUDITED* UNTUK MENIHILKAN SALDO PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN YANG TERBENTUK DARI TRANSAKSI KOREKSI KUANTITAS DALAM RANGKA KOREKSI KELEBIHAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN	8.684.000
JUMLAH		**13.777.791.584**

Beban Barang Dan Jasa
Rp 2.196.254.071.643

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.196.254.071.643,00 dan Rp1.374.882.409.490,00. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.196.254.071.643,00 terdiri dari kegiatan operasional secara normal sebesar Rp2.195.878.527.850,00 dan kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp375.543.793,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 90

Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Keperluan Perkantoran	172.799.688.061	166.096.247.392	4,04
Beban Pengadaan Bahan Makanan	52.548.682.582	64.965.702.743	(19,11)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.310.178.542	2.743.619.808	(15,80)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	547.327.567	706.471.383	(22,53)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20.304.718.000	18.322.155.500	10,82
Beban Barang Operasional Lainnya	58.217.024.786	52.073.426.031	11,80
Beban Bahan	124.511.508.927	108.688.203.888	14,56
Beban Honor Output Kegiatan	18.175.751.750	25.269.639.500	(28,07)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	150.823.214.050	148.325.553.954	1,68
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	786.727.723	-	0,00
Beban Langganan Listrik	39.861.488.702	37.607.355.089	5,99
Beban Langganan Telepon	358.955.234	485.332.772	(26,04)
Beban Langganan Air	4.803.774.631	4.834.392.988	(0,63)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.000.144.083	2.075.183.889	(51,80)
Beban Jasa Konsultan	169.826.623.038	218.975.129.145	(22,44)
Beban Sewa	88.869.712.912	87.189.347.944	1,93
Beban Jasa Profesi	49.254.013.505	44.986.176.560	9,49
Beban Jasa Lainnya	1.238.619.921.599	377.940.856.801	227,73
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.177.572.158	483.588.940	350,29
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	81.500.000	-	0,00
Subtotal Akun Normal	**2.195.878.527.850**	**1.361.768.384.327**	**61,25**
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	153.048.359	6.527.581.219	(97,66)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	222.495.434	1.479.325.605	(84,96)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	5.107.118.339	(100,00)
Subtotal Akun Khusus COVID	**375.543.793**	**13.114.025.163**	(97,14)
TOTAL	**2.196.254.071.643**	**1.374.882.409.490**	**59,74**

D.4.1 Beban Barang dan Jasa untuk Kegiatan Operasional Secara Normal

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.195.878.527.850,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.168.018.548.684,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) untuk kegiatan operasional secara normal sebesar Rp27.859.979.166,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 91

Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
521111	Beban Keperluan Perkantoran	172.915.490.332	172.799.688.061	(115.802.271)
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	52.548.682.582	52.548.682.582	-
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.310.178.542	2.310.178.542	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	547.327.567	547.327.567	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20.304.718.000	20.304.718.000	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	58.434.317.886	58.217.024.786	(217.293.100)
521211	Beban Bahan	124.511.508.927	124.511.508.927	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	18.179.001.500	18.175.751.750	(3.249.750)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	150.823.214.050	150.823.214.050	-
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	980.323.623	786.727.723	(193.595.900)
522111	Beban Langganan Listrik	41.107.509.120	39.861.488.702	(1.246.020.418)
522112	Beban Langganan Telepon	398.482.087	358.955.234	(39.526.853)
522113	Beban Langganan Air	4.721.966.231	4.803.774.631	81.808.400
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.000.144.083	1.000.144.083	-
522131	Beban Jasa Konsultan	169.808.864.040	169.826.623.038	17.758.998
522141	Beban Sewa	89.243.971.027	88.869.712.912	(374.258.115)
522151	Beban Jasa Profesi	49.258.774.005	49.254.013.505	(4.760.500)
522191	Beban Jasa Lainnya	1.210.924.075.082	1.238.619.921.599	27.695.846.517
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	2.177.572.158	2.177.572.158
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	81.500.000	81.500.000
BEBAN BARANG DAN JASA		**2.168.018.548.684**	**2.195.878.527.850**	**27.859.979.166**

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa dalam kegiatan operasional secara normal menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Keperluan Perkantoran berbeda sebesar Rp155.802.271,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
   a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp218.954.800,00 yang terdiri dari:
      1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 sebesar Rp150.069.300,00.
      2) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp59.450.500,00.
      3) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp9.435.000,00.
   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp103.152.529,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp217.293.100,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
   a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp220.293.100,00 yang terdiri dari:
      1) Koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Aset Ekstrakomtabel berupa hewan piaraan lainnya Tahun 2023 sebesar Rp81.500.000,00.
      2) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp21.293.100,00.
      3) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp117.500.000,00.
   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Honor Output Kegiatan berbeda sebesar Rp3.249.750,00 dengan Belanja-LRA yang disebabkan karena Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran honor yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023.
4. Beban-LO untuk akun Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel berbeda sebesar Rp193.595.900,00 dengan

Belanja-LRA yang disebabkan karena:

a. Terdapat realisasi Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel yang menjadi Persediaan Barang Konsumsi (kode akun 117111) Rp128.506.000,00.

b. Terdapat realisasi Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel yang menjadi Bahan untuk Pemeliharaan (kode akun 117113) Rp1.980.000,00.

c. Terdapat realisasi Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel yang menjadi Peralatan dan Mesin (kode akun 117113) Rp42.130.900,00.

d. Koreksi SPM yang semula Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (kode akun 532121) sebesar Rp20.979.000,00.

5. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Listrik berbeda sebesar Rp1.246.020.418,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp2.832.719.219,00 yang terdiri dari:

      1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.832.709.219,00.

      2) Kelebihan pencatatan utang atas pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2023 yang dibayarkan dengan DIPA Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp10.000,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp1.586.698.801,00.

6. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Telepon berbeda sebesar Rp39.526.853,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp46.150.154,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp6.623.301,00.

7. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Air berbeda sebesar Rp81.808.400,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2022 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp119.200,00.

   b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih

Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp81.927.600,00.

8. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Konsultan berbeda sebesar Rp17.758.998,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena perbedaan kurs dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengakuan Beban-LO dari Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (kode akun 491111) sebesar Rp17.790.070,00.
   b. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp31.072.00 yang terdiri dari:
      1) Menjadi Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (kode akun 596211) sebesar Rp31.068,00.
      2) Dana di Rekening Penampungan KL (kode akun 163139) yang disetor ke Kas Negara tidak diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 dan diakui sebagai Pendapatan LRA di Tahun 2024 (SPM nihil) sebesar Rp4,00.
9. Beban-LO untuk akun Beban Sewa berbeda sebesar Rp374.258.115,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
   a. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (*prepaid*) Tahun 2022 sebesar Rp22.034.085,00.
   b. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp396.292.200,00.
10. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Profesi berbeda sebesar Rp4.760.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Terdapat SPM atas belanja jasa profesi ditolak dan dibayarkan di Tahun 2024 namun telah diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp9.000.000,00.
    b. Pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran jasa profesi Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp13.760.500,00
11. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp27.695.846.517,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Pengakuan Beban-LO sebear Rp50.213.791.255,00 yang terdiri dari:
       1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 sebesar Rp5.216.645,00.
       2) Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2023 sebesar Rp48.122.708.120,00.
       3) Pengakuan Beban-LO dari jurnal koreksi atas belanja

modal paket pekerjaan pengelolaan *key management system* dan belanja paket pekerjaan pengelolaan dan penerbitan kartu SAM sebesar Rp2.085.866.490,00.

b. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp22.517.944.738,00 yang terdiri dari:

1) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp13.033.517.938,00.

2) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp1.683.892.800,00.

3) Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai *Software* Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00.

4) Koreksi Belanja Dibayar Dimuka atas pembayaran uang muka di Tahun 2023 namun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp6.800.534.000,00.

12. Beban-LO untuk akun Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp2.177.572.158,00 dengan Belanja-LRA yang disebabkan karena:

a. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp2.229.974.040,00 yang terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532111) sebesar Rp112.093.882,00.

2) Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (kode akun 532121) sebesar Rp44.622.000,00.

3) Hibah Masuk sebesar Rp2.069.278.276,00.

4) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp3.000.000,00.

5) Perolehan Lainnya sebesar Rp979.882,00.

b. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp52.401.882,00 yang terdiri dari:

1) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp48.122.000,00.

2) Koreksi Pencatatan sebesar Rp4.279.882,00.

13. Beban-LO untuk akun Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya berbeda sebesar Rp81.500.000,00 dengan Belanja-LRA yang disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi Perolehan Lainnya.

Penjelasan hubungan mutasi aset ekstrakomtabel periode berjalan dengan beban aset ekstrakomtabel sebagai berikut:

Tabel 92

Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel

AKUN BEBAN			MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN					PERBEDAAN ANTARA BEBAN DENGAN MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL
BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN (595112)	BEBAN PERALATAN DAN MESIN - EKSTRAKOMTABEL (521252)	BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL ASET TETAP LAINNYA (595115)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		MUTASI NETO EKSTRAKOMPTABEL PADA LBMN	
			URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI		
148.936.000	742.105.723	-	Pembelian	898.821.605	Reklasifikasi Keluar	(3.500.000)	891.041.723	-
					Koreksi Pencatatan	(4.279.882)		
979.882	-	-	Perolehan Lainnya	979.882			979.882	-
2.069.278.276	-	-	Hibah Masuk	2.069.278.276			2.069.278.276	-
-	-	81.500.000	Perolehan Lainnya	81.500.000			81.500.000	-
-	-	-	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	155.000	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(155.000)	-	-
-	-	-	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	34.203.500	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(34.203.500)	-	-
3.000.000	-	-	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	3.000.000			3.000.000	-
-	-	-	Reklasifikasi Masuk	44.622.000	Reklasifikasi Keluar	(44.622.000)	-	-
(44.622.000)	44.622.000	-					-	-
2.177.572.158	**786.727.723**	**81.500.000**		**3.132.560.263**		**(86.760.382)**	**3.045.799.881**	**-**

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.132.560.263,00 dan Rp86.760.382,00 sehingga perhitungan mutasi neto aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.045.799.881,00. Beban aset ekstrakomtabel untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdiri dari Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.177.572.158,00, Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel sebesar Rp786.727.723,00 dan Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp81.500.000,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara mutasi aset ekstrakomtabel dengan beban aset ekstrakomtabel.

D.4.2 Beban Barang dan Jasa untuk Kegiatan Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp375.543.793,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp372.469.049,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja

Barang dan Jasa (basis kas) untuk kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp3.074.744,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 93

Selisih Beban Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	149.973.615	153.048.359	3.074.744
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	222.495.434	222.495.434	-
BEBAN BARANG DAN JASA		**372.469.049**	**375.543.793**	**3.074.744**

Perbedaan pencatatan Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena pengakuan Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 dari Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (*prepaid*) Tahun 2022 sebesar Rp3.074.744,00.

Beban Pemeliharaan Rp125.554.899.637

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp125.554.899.637,00 dan Rp131.339.721.393,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 94

Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.294.893.988	69.347.763.322	7,13
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.670.101.378	2.978.400.608	23,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.677.446.518	39.645.699.892	(7,49)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	-	8.565.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.846.250	30.883.500	(51,93)
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.991.620.081	4.244.889.030	41,15
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.638.001.100	12.320.067.221	(86,70)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.786.728.031	2.223.157.151	25,35
Beban Persediaan Suku Cadang	396.280.691	540.295.669	(26,65)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	84.981.600	-	0,00
TOTAL	**125.554.899.637**	**131.339.721.393**	**(4,40)**

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp125.554.899.637,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp130.078.079.992,00 sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pemeliharaan (basis akrual) dengan Belanja Pemeliharaan (basis kas) sebesar Rp4.523.180.355,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 95

Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.438.033.077	74.294.893.988	(2.143.139.089)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.904.458.917	-	(2.904.458.917)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.670.101.378	3.670.101.378	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.410.264.918	36.677.446.518	(732.818.400)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.579.813.471	-	(1.579.813.471)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.846.250	14.846.250	-
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	6.422.560.881	5.991.620.081	(430.940.800)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.638.001.100	1.638.001.100	-
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	2.786.728.031	2.786.728.031
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	-	396.280.691	396.280.691
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	84.981.600	84.981.600
BEBAN PEMELIHARAAN		**130.078.079.992**	**125.554.899.637**	**(4.523.180.355)**

Perbedaan pencatatan Beban Pemeliharaan menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berbeda sebesar Rp2.143.139.089,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Jurnal koreksi Beban-LO yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp 436.612.000,00.
    b. Jurnal koreksi antar Beban-LO untuk mereklasifikasi saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke akun Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp84.981.600,00.
    c. Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menjadi Gedung dan Bangunan (kode akun 133111) sebesar Rp994.806.000,00.
    d. Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menjadi Peralatan dan Mesin (kode akun 132111)

sebesar Rp111.529.950,00.

e. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp199.136.969,00.

f. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya menambah nilai Jalan dan Jembatan Tahun 2023 sebesar Rp178.473.570,00.

g. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp84.319.000,00.

h. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp53.280.000,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp732.818.400,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp9.032.400,00.

   b. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp707.136.000,00.

   c. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp16.650.000,00.

3. Beban –LO untuk akun Beban Pemeliharaan Jaringan berbeda sebesar Rp430.940.800,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Jalan dan Jembatan Tahun 2023.

4. Beban-LO untuk akun Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan berbeda sebesar Rp84.981.600,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena jurnal koreksi antar Beban-LO untuk mereklasifikasi saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke akun Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan.

Penjelasan hubungan mutasi aset ekstrakomtabel periode berjalan dengan beban aset ekstrakomtabel gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 96

Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan

AKUN BEBAN	MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN					PERBEDAAN ANTARA BEBAN DENGAN MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL
BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN (595113)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		MUTASI NETO EKSTRAKOMPTABEL PADA LBMN	
	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI		
84.981.600	Pembelian	84.981.600			84.981.600	-
	Perolehan Lainnya	84.981.600	Reklasifikasi Keluar	(84.981.600)	-	-
84.981.600		**169.963.200**		**(84.981.600)**	**84.981.600**	**-**

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp169.963.200,00 dan Rp84.981.600,00 sehingga perhitungan mutasi neto aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp84.981.600,00. Beban aset ekstrakomtabel untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdiri dari Beban Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp84.981.600,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara mutasi aset ekstrakomtabel dengan beban aset ekstrakomtabel.

Penjelasan Perbedaan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.904.458.917,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.579.813.471,00, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp2.786.728.031,00, dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp396.280.691,00 secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 97

Penyajian Beban Pemeliharaan

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	SALDO AKHIR	PEMAKAIAN	BEBAN PEMELIHARAAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	450.959.385	-	610.476.442	(159.517.057)	2.786.728.031	(2.946.245.088)
117114	Suku Cadang	88.933.749	-	113.491.222	(24.557.473)	396.280.691	(420.838.164)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2.904.458.917		2.904.458.917		2.904.458.917
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.579.813.471		1.579.813.471		1.579.813.471
JUMLAH		**539.893.134**	**4.484.272.388**	**723.967.664**	**4.300.197.858**	**3.183.008.722**	**1.117.189.136**

Saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2022 (saldo awal) sebesar Rp539.893.134,00 dan saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2023 (saldo akhir) sebesar Rp723.967.664,00. Selama Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Belanja Barang Pemeliharaan sebesar Rp4.484.272.388,00, sehingga perhitungan pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp4.300.197.858,00. Perbedaan sebesar Rp1.117.189.136,00 antara pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp4.300.197.858,00 dengan Beban Pemeliharaan dari pemakaian persediaan sebesar Rp3.183.008.722,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 98

Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PEMELIHARAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN NAMUN MENJADI PERSEDIAAN)	2.906.442.018
2	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PEMELIHARAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN NAMUN MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)	23.000
3	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN NAMUN MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN)	(1.269.541.770)
4	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 521252) YANG MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	(1.980.000)
5	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI INTERNAL TRANSFER KELUAR	3.000.000
6	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI INTERNAL TRANSFER MASUK	(3.000.000)
7	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KELUAR LAINNYA	19.600
8	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI KUANTITAS TAMBAH	(138.750)
9	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA	(53.154.900)
10	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KE ASET	3.000.000
11	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KELUAR	3.762.281
12	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI MASUK	(449.684.367)
13	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111) MENJADI BEBAN PERSEDIAAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (593113)	(6.900.000)
14	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU (593131) MENJADI BEBAN PERSEDIAAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (593113)	(14.810.115)
15	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN PERALATAN DAN MESIN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (593124) KE BEBAN PERSEDIAAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (593113)	(79.580)
16	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN SUKU CADANG (593114) MENJADI BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111)	92.969
17	JURNAL KOREKSI TAMBAH BEBAN PERSEDIAAN ATAS KOREKSI KELEBIHAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN YANG MENGGUNAKAN MENU KOREKSI KUANTITAS	138.750
JUMLAH		**1.117.189.136**

Beban Perjalanan Dinas Rp581.055.989.412

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp581.055.989.412,00 dan Rp481.609.316.000,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 99

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	344.043.270.974	309.672.923.693	11,10
Beban Perjalanan Dinas Tetap	3.852.776.374	3.334.464.380	15,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.387.665.634	10.169.007.117	2,15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	122.366.172.328	94.561.643.263	29,40
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90.435.096.269	59.207.070.136	52,74
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	9.971.007.833	4.664.207.411	113,78
TOTAL	**581.055.989.412**	**481.609.316.000**	**20,65**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp581.055.989.412,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp581.300.288.533,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Perjalanan Dinas (basis akrual) dengan Belanja Perjalanan Dinas (basis kas) sebesar Rp244.299.121,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 100

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	344.202.777.732	344.043.270.974	(159.506.758)
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	3.852.776.374	3.852.776.374	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.387.665.634	10.387.665.634	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	122.367.556.328	122.366.172.328	(1.384.000)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90.472.694.070	90.435.096.269	(37.597.801)
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	10.016.818.395	9.971.007.833	(45.810.562)
BEBAN PERJALANAN DINAS		**581.300.288.533**	**581.055.989.412**	**(244.299.121)**

Perbedaan pencatatan Beban Perjalanan Dinas menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa berbeda sebesar Rp159.506.758,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Tahun 2023 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp8.828.222,00.

b. Pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp150.678.536,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berbeda sebesar Rp1.384.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023.

3. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berbeda sebesar Rp37.597.801,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023.

4. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri berbeda sebesar Rp45.810.562,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2023.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp319.337.106.602

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp319.337.106.602,00 dan Rp233.020.009.151,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 101

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	550.000.000	150.000.000	266,67
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-	150.000.000	(100,00)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	3.520.415.640	2.547.714.000	38,18
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	6.580.002.221	3.529.076.428	86,45
Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	6.499.206.528	(100,00)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	19.314.078.659	15.677.159.624	23,20
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	289.372.610.082	204.466.852.571	41,53
TOTAL	**319.337.106.602**	**233.020.009.151**	**37,04**

Penjelasan hubungan mutasi kurang Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 102

Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	SALDO AKHIR	PENYERAHAN	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN		SELISIH
						AKUN	SALDO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	(8)	(9) = (6) - (8)
117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	24.144.320.110		21.334.897.038	2.809.423.072	593122	3.520.415.640	(710.992.568)
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	9.609.318.759		382.720.441	9.226.598.318	593124	6.580.002.221	2.646.596.097
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.095.980.150		5.095.980.150	-			-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000		446.822.000	-			-
117127	Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	181.397.049.965		160.017.091.880	21.379.958.085	593127	19.314.078.659	2.065.879.426
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	1.083.142.625		9.154.135.762	(8.070.993.137)	593128	289.372.610.082	(297.443.603.219)
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	67.670.350		925.651.980	(857.981.630)			(857.981.630)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai. Meterai dan Leges		1.235.000		1.235.000			1.235.000
526112	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		123.659.988		123.659.988			123.659.988
526115	Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		849.300.000		849.300.000			849.300.000
526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Uang		500.000.000		500.000.000	526123	550.000.000	(50.000.000)
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		4.308.172.630		4.308.172.630			4.308.172.630
526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		273.439.844.778		273.439.844.778			273.439.844.778
JUMLAH		**221.844.303.959**	**279.222.212.396**	**197.357.299.251**	**303.709.217.104**		**319.337.106.602**	**(15.627.889.498)**

Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2022 (saldo awal) sebesar Rp221.844.303.959,00 dan saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2023 (saldo akhir) sebesar Rp197.357.299.251,00.

Selama Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp279.222.212.396,00 sehingga perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp303.709.217.104,00. Perbedaan sebesar Rp15.627.889.498,00 antara perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp303.709.217.104,00 dengan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp319.337.106.602,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 103

Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN NAMUN MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)	(14.936.639.825)
2	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PEMELIHARAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN NAMUN MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)	(23.000)
3	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 521252) YANG MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	(128.506.000)
4	KESALAHAN PENGANGGARAN DI ANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA MENJADI BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN MENJADI PERSEDIAAN)	900.599.000
5	REALISASI BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG MENJADI PERALATAN DAN MESIN (132111)	1.066.800.000
6	REALISASI BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG MENJADI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (136111)	178.171.000
7	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI HIBAH (MASUK)	(588.787.223)
8	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI KUANTITAS KURANG	1.471.121.000
9	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI KOREKSI NILAI TAMBAH	(1.638.843.900)
10	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA	(4.000.000.000)
11	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI PERSEDIAAN DALAM PROSES KELUAR	1.879.281.000
12	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI PERSEDIAAN DALAM PROSES MASUK	(1.879.281.000)
13	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI DARI ASET	(1.244.971.000)
14	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KELUAR	5.717.590.470
15	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI MASUK	(5.572.890.000)
16	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES (593121) KE BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111)	2.247.500
17	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN PERALATAN DAN MESIN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (593124) KE BEBAN PERSEDIAAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (593113)	79.580
18	JURNAL ANTAR BEBAN PERSEDIAAN UNTUK MEREKLASIFIKASI AKUN BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI (593111) MENJADI BEBAN BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT (593128)	(899.560.000)
19	JURNAL BALIK PENGAKUAN BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA (114112) ATAS BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA DALAM BENTUK UANG BERUPA BANTUAN REHABILITASI BANGUNAN KANTOR DESA PADA TAHUN 2019	(300.000.000)
20	JURNAL PENYESUAIAN PENGAKUAN BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA (114112) ATAS BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA DALAM BENTUK UANG BERUPA BANTUAN REHABILITASI BANGUNAN KANTOR DESA PADA TAHUN 2019	250.000.000
21	JURNAL TAMBAHAN ATAS KESALAHAN PEMILIHAN JENIS BAST PADA MODUL KOMITMEN (MENGGUNAKAN BAST RPATA SEHARUSNYA BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI RPATA) SEHINGGA MEMBENTUK SALDO BELANJA DIBAYAR DIMUKA DAN PERSEDIAAN DICATAT MENGGUNAKAN MENU KOREKSI KUANTITAS BERTAMBAH	167.722.900
22	JURNAL KOREKSI *AUDITED* KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI (391116) ATAS PENGADAAN *ROLL BANNER* ELEKTRIK SEBANYAK 40 UNIT MENGGUNAKAN BELANJA MODAL, NAMUN DISERAHKAN KEPADA PEMDA	(72.000.000)
23	JURNAL KOREKSI *AUDITED* UNTUK MENGELIMINASI PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA (491429) ATAS PENGAKUAN PERSEDIAAN BARANG BANTUAN LAINNYA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERASAL DARI DANA HIBAH PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (PPEA) TAHUN 2023	4.000.000.000
	JUMLAH	**(15.627.889.498)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp298.246.135.111

D8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp298.246.135.111,00 dan Rp 282.561.223.819,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 104
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	174.613.986.831	165.231.043.670	5,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.250.059.967	77.276.862.146	1,26
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.300.241.118	6.829.561.906	6,89
Beban Penyusutan Irigasi	4.796.503.626	4.712.111.686	1,79
Beban Penyusutan Jaringan	4.602.239.925	4.388.981.378	4,86
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	61.218.881	108.462.851	(43,56)
Beban Amortisasi Software	26.550.893.666	22.752.838.080	16,69
Beban Amortisasi Lisensi	1.724.885.277	920.651.969	87,35
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	49.680.125	51.922.750	(4,32)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	296.425.695	288.787.383	2,64
TOTAL	**298.246.135.111**	**282.561.223.819**	**5,55**

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan sebagai berikut:

Tabel 105
Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan
dengan Beban Penyusutan

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.274.188.181.175	3.124.102.309.295	150.085.871.880	174.613.986.831	(24.528.114.951)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	486.261.917.923	407.891.710.638	78.370.207.285	78.250.059.967	120.147.318
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	51.619.327.489	43.897.315.948	7.722.011.541	7.300.241.118	421.770.423
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	28.558.348.182	23.667.141.544	4.891.206.638	4.796.503.626	94.703.012
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	66.995.459.088	62.363.683.888	4.631.775.200	4.602.239.925	29.535.275
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	94.678.343.010	94.631.924.129	46.418.881	61.218.881	(14.800.000)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	78.939.040.303	70.663.401.267	8.275.639.036	296.425.695	7.979.213.341
JUMLAH		**4.081.240.617.170**	**3.827.217.486.709**	**254.023.130.461**	**269.920.676.043**	**(15.897.545.582)**

Terdapat perbedaan sebesar Rp15.897.545.582,00 antara penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 106

Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG	(40.582.288)
2	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH	692.553.730
3	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	(14.571.514.318)
4	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN PEMBATALAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	26.736.100
5	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI REKLASIFIKASI KELUAR	(6.955.339.304)
6	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI REKLASIFIKASI MASUK	6.954.979.304
7	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER KELUAR	(934.242.500)
8	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER MASUK	934.242.500
9	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI MANUAL	245.587.793
10	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN	(3.407.847.269)
11	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI SALDO AWAL	3.366.134.927
12	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI HIBAH KELUAR	(97.767.272)
13	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI HIBAH KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)	(1.582.358.985)
14	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN	(89.904.000)
15	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENGHAPUSAN	(438.224.000)
JUMLAH		**(15.897.545.582)**

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi sebagai berikut:

Tabel 107

Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2022	AMORTISASI PERIODE BERJALAN	BEBAN AMORTISASI TAHUN 2023	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	664.419.698.032	656.254.387.971	8.165.310.061	26.550.893.666	(18.385.583.605)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	3.022.601.394	1.297.716.117	1.724.885.277	1.724.885.277	-
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	118.715.258.702	113.441.816.554	5.273.442.148	49.680.125	5.223.762.023
JUMLAH		**786.157.558.128**	**770.993.920.642**	**15.163.637.486**	**28.325.459.068**	**(13.161.821.582)**

Terdapat perbedaan sebesar Rp13.161.821.582,00 antara amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 108

Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI SALDO AWAL	2.566.936.366
2	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN	(3.782.745.715)
3	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	(11.946.012.233)
JUMLAH		**(13.161.821.582)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp1.171.673.142

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.171.673.142,00 dan Rp2.588.804.950,00.

Tabel 109

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tahun 2023 dengan Tahun 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.171.673.142	2.588.804.950	(54,74)
TOTAL	**1.171.673.142**	**2.588.804.950**	**(54,74)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang timbul sebagai akibat pembentukan cadangan piutang agar piutang dapat disajikan sesuai dengan tingkat ketertagihannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.694.415.415, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.145.198.862,00 atau terdapat perubahan sebesar Rp549.216.553,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.171.673.142,00 sehingga terdapat perbedaan antara perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp622.456.589,00.

Tabel 110

Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023

dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO	URAIAN	SALDO
1	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2023	27.694.415.415
2	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2022	27.145.198.862
3	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN 2023 ((1) - (2))	549.216.553
4	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN 2023	1.171.673.142
5	SELISIH PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TA 2023 DENGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN 2023 ((3) - (4))	**(622.456.589)**

Terdapat perbedaan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp622.456.589,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 111

Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	KOREKSI KURANG PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DARI PELUNASAN PIUTANG PNBP	(78.750)
2	MUTASI KURANG PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DARI PELUNASAN PIUTANG PNBP	(125.173.750)
3	MUTASI KURANG PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DARI PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAS PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN	(492.890.339)
4	JURNAL KOREKSI KURANG PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG PNBP ATAS KOREKSI KURANG PENCATATAN PIUTANG MAHASISWA PROGRAM S2 ANGKATAN 30	(3.250.000)
5	JURNAL KOREKSI ATAS PERHITUNGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG YANG MINUS	(1.063.750)
JUMLAH		**(622.456.589)**

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp8.516.711.793

D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 112

Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dengan Tahun 2022

KODE AKUN	URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK/TURUN (%)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.605.149.886	203.053.933	690,50
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	612.863.601	718.033.188	(14,65)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	27.700.000	294.000.000	(90,58)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.450.321.018	1.465.231.457	(1,02)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.990.129.679	11.550.313.953	(56,80)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	283.926.270	576.633.284	(50,76)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	17.790.070	2.790.242	537,58
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	5.855.347.342	(100,00)
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		**8.987.880.524**	**20.665.403.399**	**(56,51)**
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	304.297.318	122.838.376	147,72
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	5.849.893.328	(100,00)
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	166.840.345	2.917.275.542	(94,28)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	31.068	59.639.113	(99,95)
Total Beban dari Kegiatan Non Operasional		**471.168.731**	**8.949.646.359**	**(94,74)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**8.516.711.793**	**11.715.757.040**	**(27,31)**

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp8.987.880.524,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp881.280.249.636,00, diantaranya sebesar Rp12.233.040.700,00 berasal dari kegiatan non operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan non operasional (basis kas) sebesar Rp3.245.160.176,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 113

Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrual

	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.605.149.886	1.605.149.886	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	612.863.601	612.863.601	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.334.461.763	27.700.000	(1.306.761.763)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yg Lalu	1.450.974.618	1.450.321.018	(653.600)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yg Lalu	6.454.579.148	4.990.129.679	(1.464.449.469)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yg Lalu	775.011.684	283.926.270	(491.085.414)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	17.790.070	17.790.070
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**12.233.040.700**	**8.987.880.524**	**(3.245.160.176)**

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain berbeda sebesar Rp1.306.761.763,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

   a. Pengakuan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp21.500.000,00.

   b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp1.328.261.763,00 yang terdiri dari:

      1) Pengakuan pendapatan-LO atas akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilakukan pada saat timbulnya pengakuan piutang. Dengan demikian pada saat terjadi penyetoran pendapatan ke kas negara sebesar Rp1.090.761.763,00 hanya dicatat sebagai pendapatan LRA.

2) Pelunasan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp237.500.000,00.

2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp653.600,00.

3. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berbeda sebesar Rp1.464.449.469,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

   a. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp156.730.672,00.

   b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.307.718.797,00.

4. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu berbeda sebesar Rp491.085.414,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

   a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp447.703.264,00.

   b. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp43.382.150,00.

5. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi berbeda sebesar Rp17.790.070,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena perbedaan selisih kurs saat pencatatan di modul komitmen (SPP) dan saat pembayaran (SP2D) atas belanja jasa konsultan dengan valuta asing sebesar USD95.899,50. Nilai tagihan dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SPP sebesar Rp1.488.783.725,00, sedangkan nilai realisasi dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SP2D sebesar Rp1.470.993.655,00.

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp471.168.731,00, sedangkan LRA tidak menyajikan kegiatan non operasional, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 114
Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	304.297.318	304.297.318
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	-	166.840.345	166.840.345
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	31.068	31.068
TOTAL		**-**	**471.168.731**	**471.168.731**

Penjelasan perbedaan pencatatan beban dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp304.297.318,00 berasal dari:
   a. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp432.826.918,00 yang terdiri dari:
      1) Transaksi hibah keluar sebesar Rp12.160.560,00.
      2) Transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan terhadap aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp292.136.758,00.
      3) Transaksi keluar lainnya sebesar Rp128.529.600,00.
   b. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp128.529.600,00 yang terdiri dari:
      1) Jurnal koreksi atas kesalahan pendetailan persediaan melalui menu keluar lainnya yang tidak diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp128.506.000,00.
      2) Jurnal manual dalam rangka void BAST karena kesalahan penginputan BAST yang seharusnya tidak dicairkan namun pendetailan BMN telah dilakukan sebesar Rp23.600,00.
2. Beban-LO untuk akun Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp166.840.345,00 berasal dari nilai persediaan yang dikeluarkan dari Neraca karena rusak/usang berdasarkan hasil opname fisik.
3. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp31.068,00 berasal dari perbedaan selisih kurs saat pencatatan di modul komitmen (SPP) dan saat pembayaran (SP2D) atas belanja jasa konsultan dengan valuta asing sebesar USD31.067,50. Nilai tagihan dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SPP sebesar Rp477.383.205,00, sedangkan nilai realisasi dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SP2D sebesar Rp477.414.273,00.

Terhadap transaksi tersebut tidak terjadi arus kas keluar atau masuk sehingga realisasi belanja tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pos-Pos Luar Biasa

Rp0,00

D.11 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 nihil.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp15.835.604.107.918

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp15.835.604.107.918,00 dan Rp15.362.241.991.047,00.

Defisit LO Rp3.613.525.599.661

E.2 Surplus (Defisit) - LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp3.613.525.599.661,00 dan Rp3.266.535.282.196,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.079.107,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp19.005.933.912)

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp19.005.933.912,00) dan (Rp749.685.789,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp16.791.155.661,00) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar (Rp2.214.778.251,00).

E.3.2.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp16.791.155.661,00) terdapat pada satker Sekretariat Jenderal

(403200) sebesar (Rp991.020.916,00), IPDN Jatinangor (448302) sebesar (Rp252.261.565,00), IPDN Kampus Jakarta (352593) sebesar (Rp108.548.207,00), IPDN Kampus Sulut (677010) sebesar (Rp29.087.573,00), IPDN Kampus Kalbar (683070) sebesar (Rp126.742.455,00), Ditjen Polpum (027210) sebesar Rp360.000,00, BSKDN (403222) sebesar (Rp15.105.381.375,00), dan Balai Damkar dan Satpol PP (506138) sebesar (Rp178.473.570).

Penjelasan terkait Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada tabel 115.

Tabel 115

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2023

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN BERUPA KURSI FIBER GLAS/PLASTIK PADA SATKER SETJEN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	(26.994.100)
2	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER SETJEN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	16.196.460
3	MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER SETJEN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	(116.762.694)
4	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER SETJEN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	11.164.908
5	MUTASI KURANG JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER SETJEN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	(22.876.250)
6	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER SETJEN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	11.092.816
7	JURNAL MODUL GLP ATAS KOREKSI KURANG NILAI ASET PADA SATKER SETJEN KARENA ADANYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	166.633.044
8	KOREKSI KURANG NILAI KDP PADA SATKER SETJEN YANG DIPEROLEH SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PENGEMBALIAN BELANJA MODALNYA TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2022	(1.029.475.100)
9	MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	(240.881.772)
10	JURNAL MODUL GLP ATAS KOREKSI KURANG NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR KARENA ADANYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	240.881.772

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
11	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) YANG DISEBABKAN TERDAPATNYA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU	2.128.104
12	MUTASI TAMBAH JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN	430.940.800
13	JURNAL MODUL GLP ATAS KOREKSI TAMBAH JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR KARENA KAPITALISASI NILAI JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN	(430.940.800)
14	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN	(254.389.669)
15	MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN (305) DALAM RANGKA MELAKUKAN KOREKSI PENCATATAN GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DIGABUNGKAN KE DALAM SATU NUP	(752.987.000)
16	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN (305) DALAM RANGKA MELAKUKAN KOREKSI PENCATATAN GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DIGABUNGKAN KE DALAM SATU NUP	245.587.792
17	MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI MANUAL (209) DALAM RANGKA MELAKUKAN KOREKSI PENCATATAN GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DIGABUNGKAN KE DALAM SATU NUP	752.987.000
18	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI MANUAL (209) DALAM RANGKA MELAKUKAN KOREKSI PENCATATAN GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DIGABUNGKAN KE DALAM SATU NUP	(245.587.793)
19	MUTASI KURANG ASET TETAP RENOVASI PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN (305) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI ASET TETAP RENOVASI KE GEDUNG DAN BANGUNAN YANG TELAH SELESAI PEKERJAANNYA	(423.338.000)
20	MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI ASET TETAP RENOVASI KE GEDUNG DAN BANGUNAN YANG TELAH SELESAI PEKERJAANNYA	423.338.000
21	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI ASET TETAP RENOVASI KE GEDUNG DAN BANGUNANI YANG TELAH SELESAI PEKERJAANNYA	(108.548.206)
22	MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN (305) KARENA KESALAHAN PENCATATAN KODE BARANG PERALATAN DAN MESIN PADA TAYL	(47.531.000)
23	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN (305) KARENA KESALAHAN PENCATATAN KODE BARANG PERALATAN DAN MESIN PADA TAYL	9.506.200

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
24	MUTASI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT MELALUI KOREKSI SALDO AWAL (100) KARENA KESALAHAN PENCATATAN KODE BARANG PERALATAN DAN MESIN PADA TAYL (BMN SEBESAR Rp5.220.000,00 TERCATAT KEMBALI SEBAGAI EKSTRAKOMPTABEL)	38.312.000
25	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT MELALUI KOREKSI SALDO AWAL (100) KARENA KESALAHAN PENCATATAN KODE BARANG PERALATAN DAN MESIN PADA TAYL	(8.481.650)
26	JURNAL MELALUI MODUL GLP PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT UNTUK MENGELIMINASI SALDO KOREKSI NILAI PERSEDIAAN YANG TERBENTUK KARENA KESALAHAN PENCATATAN KODE BARANG PERALATAN DAN MESIN PADA TAYL MENJADI PERSEDIAAN	3.999.000
27	MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	199.136.969
28	JURNAL MODUL GLP ATAS KOREKSI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT KARENA KAPITALISASI NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(199.136.969)
29	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(24.892.123)
30	MUTASI KURANG KDP PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR MELALUI MENU KOREKSI NILAI KDP BERKURANG DALAM RANGKA REKLASIFIKASI SEBAGIAN NILAI KDP KE ASET DEFINITIF DAN DICATAT PADA NUP BARU SEBESAR Rp11.169.805.882,00 (GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp10.790.325.705,00, PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp87.790.405,00 DAN JARINGAN SEBESAR Rp291.689.772,00) DAN DICATAT PADA NUP LAMA SEBESAR Rp609.685.925,00 (IRIGASI SEBESAR Rp270.580.035,00 DAN JARINGAN SEBESAR Rp336.601.722,00, SERTA EKSTRAKOMPTABEL SEBESAR Rp2.504.168,00)	(11.779.491.807)
31	JURNAL MODUL GLP ATAS PENCATATAN REKLASIFIKASI KDP MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN DAN JARINGAN PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR MELALUI MENU PEROLEHAN LAINNYA (112) DALAM RANGKA MENGELIMINASI SALDO PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA (KODE AKUN 491429)	11.169.805.882
32	MUTASI TAMBAH IRIGASI PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR MELALUI MENU KOREKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KDP DAN DICATAT PADA NUP LAMA	270.580.035
33	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR MELALUI MENU KOREKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KDP DAN DICATAT PADA NUP LAMA	(94.703.012)
34	MUTASI TAMBAH JARINGAN PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR MELALUI MENU KOREKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KDP DAN DICATAT PADA NUP LAMA	336.601.722
35	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR MELALUI MENU KOREKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KDP DAN DICATAT PADA NUP LAMA	(29.535.275)

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
36	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN PADA DITJEN POLPUM (PENYUSUTAN TRANSAKSIONAL) YANG BERASAL DARI REKLASIFIKASI KELUAR DAN REKLASIFIKASI MASUK PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp7.200.000,00 DALAM RANGKA KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN KODE BARANG TAYL YANG MEMILIKI MASA MANFAAT BERBEDA	360.000
37	MUTASI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER BSKDN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI PERALATAN DAN MESIN YANG BERASAL DARI BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	9.435.000
38	JURNAL MODUL GLP ATAS KOREKSI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER BSKDN KARENA KAPITALISASI NILAI PERALATAN DAN MESIN YANG BERASAL DARI BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	(9.435.000)
39	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER BSKDN MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI PERALATAN DAN MESIN YANG BERASAL DARI BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	(2.011.875)
40	MUTASI KURANG TANAH PADA SATKER BSKDN MELALUI MENU MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG (264) SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN PENCATATAN GANDA ASET TETAP TANAH KEMENDAGRI DAN KEMENKUMHAM	(15.103.369.500)
41	MUTASI TAMBAH JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER BADAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	178.473.570
42	JURNAL MODUL GLP ATAS KOREKSI TAMBAH JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER BADAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR KARENA KAPITALISASI NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(178.473.570)
43	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER BADAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR MELALUI MENU KOREKSI PENCATATAN NILAI BERTAMBAH (204) KARENA KAPITALISASI NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(178.473.570)
JUMLAH		**(16.791.155.661)**

Rincian pada **Lampiran XXIX** (Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)

E.3.2.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis aset tak berwujud yang mempengaruhi perhitungan akumulasi amortisasi.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar

(Rp2.214.778.251,00) terdapat pada satker Ditjen Dukcapil (634082).

Penjelasan terkait Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada tabel 116.

Tabel 116

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2023

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG *SOFTWARE* PADA SATKER DITJEN DUKCAPIL MELALUI KOREKSI PENCATATAN (305) DALAM RANGKA KOREKSI PENGEMBANGAN NILAI *SOFTWARE* TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNNYA	(8.987.888.895)
2	JURNAL MODUL GLP PADA SATKER DITJEN DUKCAPIL DALAM RANGKA KOREKSI KAPITALISASI NILAI *SOFTWARE* YANG BERASAL DARI BELANJA JASA LAINNYA PADA TAHUN 2023	2.085.866.490
3	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI *SOFTWARE* PADA SATKER DITJEN DUKCAPIL MELALUI KOREKSI PENCATATAN (305) DALAM RANGKA KOREKSI PENGEMBANGAN NILAI *SOFTWARE* TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNNYA	3.782.745.715
4	MUTASI TAMBAH *SOFTWARE* PADA SATKER DITJEN DUKCAPIL MELALUI MENU SALDO AWAL (100) UNTUK MENCATAT KEMBALI NILAI *SOFTWARE* SETELAH DILAKUKAN KOREKSI PENGEMBANGAN NILAI *SOFTWARE* TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNNYA	3.471.434.805
5	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI *SOFTWARE* PADA SATKER DITJEN DUKCAPIL MELALUI MENU SALDO AWAL (100) UNTUK MENCATAT KEMBALI NILAI *SOFTWARE* SETELAH DILAKUKAN KOREKSI PENGEMBANGAN NILAI *SOFTWARE* TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNNYA	(2.566.936.366)
JUMLAH		**(2.214.778.251)**

Rincian pada **Lampiran XXX** (Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi).

Koreksi Lain-Lain (Rp235.572.293)

E.3.3 Koreksi Lain – Lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar (Rp235.572.293,00) dan Rp196.361.186,00.

Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp235.572.293,00) terdapat pada satker IPDN Jatinangor (448302) sebesar (Rp224.917.500,00), Ditjen Bina Pemdes (027753) sebesar Rp690.000,00, Balai Besar Pemerintahan Desa Malang (028830) sebesar (Rp10.500.000,00), Ditjen Dukcapil (634082) sebesar (Rp888.543,00), dan Ditjen Bina Keuda

(662766) sebesar Rp43.750,00.

Penjelasan terkait Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada tabel 117.

Tabel 117

Rincian Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	KOREKSI KURANG BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG-TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI PADA SATKER IPDN JATINANGOR.	330.000
2	KOREKSI KURANG PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATKER IPDN JATINANGOR.	(306.750.000)
3	KOREKSI KURANG ATAS PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH-PIUTANG PNBP PADA SATKER IPDN JATINANGOR.	81.502.500
4	JURNAL KOREKSI ATAS PERHITUNGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG – TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI PADA SATKER DITJEN BINA PEMDES.	690.000
5	JURNAL KOREKSI PENDAPATAN SEWA TANAH, GEDUNG, DAN BANGUNAN (PENDAPATAN-LO) PADA SATKER BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG ATAS KONTRAK SEWA YANG PENYESUAIANNYA TIDAK DIBENTUK PADA AKHIR TAHUN 2022.	(10.500.000)
6	JURNAL KOREKSI ATAS SALDO BELANJA DIBAYAR DIMUKA PADA SATKER DITJEN DUKCAPIL YANG DIBENTUK PADA TAHUN 2022. SETELAH DILAKUKAN PENELUSURAN LEBIH LANJUT, SALDO BELANJA DIBAYAR DIMUKA TERSEBUT SEHARUSNYA TIDAK DISAJIKAN KARENA SALDO TERBENTUK ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI DILAKUKAN MELALUI POTONGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI YANG MENERIMA KELEBIHAN BELANJA NAMUN DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA DENGAN AKUN PENERIMAAN KEMBALI PERSEKOT/UANG MUKA GAJI, YANG SEHARUSNYA PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAYL.	(888.543)
7	JURNAL KOREKSI ATAS PERHITUNGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG YANG MINUS PADA SATKER DITJEN BINA KEUDA.	43.750
JUMLAH		**(235.572.293)**

Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada **Lampiran XXXI** (Rincian Koreksi Lain-Lain).

Transaksi Antar Entitas Rp4.396.884.290.892

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.396.884.290.892,00 dan Rp3.740.440.644.563,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada tabel 118.

Tabel 118

Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.239.292.443.686
313121	Diterima dari Entitas Lain	(881.280.249.636)
313211	Transfer Keluar	(723.193.222.724)
313221	Transfer Masuk	1.429.982.573.234
391131	Pengesahan Hibah Langsung	332.267.195.069
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(184.448.737)
JUMLAH		**4.396.884.290.892**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp881.280.249.636,00) sedangkan DKEL sebesar Rp4.239.292.443.686,00.

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.429.982.573.234,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200), IPDN Jatinangor (448302), IPDN Kampus Jakarta (352593), IPDN Kampus Kalbar (683070), IPDN Kampus NTB (634084), IPDN Kampus Sumbar (677045), IPDN Kampus Sulsel (677024), IPDN Kampus Sulut (677010), Ditjen Dukcapil (634082), dan BPSDM (403231).

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp723.193.222.724,00) terdapat satker Sekretariat Jenderal (403200), IPDN Kampus Jakarta (352593), IPDN Jatinangor (448302), Ditjen Bina Bangda (039729) dan Ditjen Otonomi Daerah (621892).

Penjelasan selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara neto dan absolut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

1. Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp723.193.222.724,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp1.429.982.573.234,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp706.789.350.510,00. Selisih tersebut berupa berasal transfer masuk antar kementerian yang berasal dari alih status Barang Milik Negara berupa Tanah dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk diperoleh melalui pengurangan kolom Transfer Keluar dan Trasfer Masuk. Selanjutnya, hasil pengurangan yang bernilai negatif diabsolutkan atau hasilnya dibuat positif. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara absolut sebesar Rp119.416.020,00. Selisih tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan milik satker Sekretariat Jenderal oleh satker Ditjen Otonomi Daerah sebesar Rp59.708.010,00. Pada saat diserahterimakan, Ditjen Otonomi Daerah mencatat transfer keluar ATR sebesar Rp59.708.010,00 dan Sekretariat Jenderal mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.708.010,00.

Rincian transaksi transfer masuk dan transfer keluar pada **Lampiran XXXII** (Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp332.267.195.069,00 yang terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200) sebesar Rp25.048.828.347,00, IPDN Jatinangor (448302) sebesar Rp6.045.945.524,00, IPDN Kampus Kalbar (683070) sebesar Rp6.000.000.000,00, Ditjen Bina Adwil (027486) sebesar Rp588.787.223,00, dan Ditjen Bina Bangda (039729) sebesar Rp266.463.308.104,00, Ditjen Dukcapil (634082) sebesar Rp28.120.325.871,00,. Hibah langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp184.448.737,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengesahan pengembalian hibah langsung pada satker Ditjen Bina Bangda (039729) yang merupakan pengembalian atas Hibah Langsung dalam bentuk uang sebesar Rp184.442.255,00 dengan jumlah hibah yang telah terealisasi sebesar Rp4.344.822.545,00 dari UNICEF dengan SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) Nomor 02609T tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan pengembalian hibah langsung pada satker IPDN Kampus Kalbar (683070) yang merupakan pengembalian atas Hibah Langsung dalam bentuk uang sebesar Rp6.482,00 dengan jumlah hibah yang telah terealisasi sebesar Rp5.999.993.518,00 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) Nomor 00441T tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Akhir Rp16.599.721.292.944

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.599.721.292.944,00 dan Rp15.835.604.107.918,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca berupa pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp429.966.795,00 atas kerugian negara yang timbul dari pengelolaan anggaran belanja pada satker IPDN Kampus Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp21.060.000,00 a.n RSP yang akan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan dengan menyerahkan jaminan berupa pemotongan gaji sesuai dengan SKTJM pada tanggal 3 Mei 2024; dan
2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp408.906.795,00 a.n MAAR yang akan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan dengan menyerahkan jaminan berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan SKTJM pada tanggal 8 Mei 2024.

F.2 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Data tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) dengan status perkara selesai berdasarkan Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (Sepatuh) terdiri dari:
   a. Tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) atas Gugatan sengketa tanah dari penggugat SR, dkk. dengan Nomor Perkara Pengadilan Negeri Makassar 111/Pdt.G/2017/PN.Mks merupakan sengketa tanah yang dipergunakan oleh SMA Negeri 4 Makassar dan dan SMP Negeri 7 Makassar. Kedua sekolah tersebut menggunakan tanah seluas 14.072 m^2 masing-masing seluas kurang lebih 6.237 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20.001 Tahun 1999 dan seluas kurang lebih 7.835 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20.002 tahun 1999. Tanah tersebut terletak di Desa/Kelurahan Totaka, Kota Makassar dan merupakan bagian dari tanah milik penggugat-penggugat, yaitu SR, dkk. seluas 26.784 m^2 berdasarkan *Eigendom Vervonding* Nomor 2149. Amar putusan pengadilan terhadap gugatan tersebut mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang saat ini ditaksir sekitar sebesar Rp5.836.000,00. Kedudukan tergugat (Kemendagri) dalam perkara tersebut berkaitan dengan kewenangan pertanahan yang pada saat itu merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Agraria yang berada dibawah Kemendagri. Status perkara selesai dan para pihak tergugat menang, namun pencatatan pada Aplikasi Sepatuh dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga Kementerian Dalam Negeri tidak dapat memperbaharui status perkara yang tidak berisiko tuntutan inkracht tersebut.
   b. Status perkara terhadap tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dari penggugat NAM dengan Nomor Perkara 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst telah selesai, namun terdapat gugatan *immaterial* sebesar Rp50.000.000,00 yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Kemendagri yang disebabkan belum ada *aanmaning* dari penggugat karena kuasa hukum

penggugat berstatus terpidana dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang lain.

c. Status perkara terhadap tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dari penggugat PT ASK dengan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel telah selesai, namun terdapat gugatan *immaterial* sebesar Rp4.141.000.000,00 yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Kemendagri yang disebabkan belum ada *aanmaning* dari penggugat dan keberadaan para penggugat saat ini tidak diketahui dan beberapa telah meninggal dunia.

2. Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak yang sudah tidak berhak menghuni/pihak lain yaitu:

   a. Tanah Balai PMD Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati Kab. Sleman Yogyakarta yang diatasnya berdiri satu unit rumah ditempati oleh masyarakat eks Timor-Timur tanpa didukung perjanjian pinjam pakai. Langkah awal penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengamanan secara fisik berupa pemasangan papan kepemilikan Kemendagri di depan Asrama Eks Timor-Timur.

   b. Tanah seluas 258 m^2 beserta bangunan seluas 45 m^2 senilai Rp66.273.500,00 yang terletak di lingkungan perkantoran Ditjen Bina Pemdes dan awalnya merupakan kantor Ditjen Bina Pemdes dikuasai oleh pensiunan pegawai Ditjen Bina Pemdes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/4853/SJ tanggal 22 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hal Pembatalan atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022, seluas 258 m^2. Penyelesaian permasalahan tersebut masih menunggu keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta atas permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik dimaksud.

   c. Terdapat hunian warga (semi permanen) yang dibangun tanpa izin di atas sebidang tanah eks-rumah dinas milik Setjen yang terletak di Jalan Danau Indah XVI Blok B-6 Nomor 27 s.d. 30 Sunter Jaya. Kepala Biro Umum memberikan izin kepada petugas penjaga untuk menempati tanah tersebut sekaligus untuk mengawasi aset tanah Kemendagri berdasarkan Surat Izin Penghunian Nomor 012.7/4356/BU tanggal 2 Agustus 2019. Namun demikian, izin yang diberikan kepada petugas penjaga tidak termasuk pemberian izin dan/atau kewenangan kepada petugas penjaga untuk mengelola tanah maupun pembangunan hunian semi permanen untuk warga lainnya.

3. Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti kebijakan pencatatan Barang Milik Negara pada satker inaktif bersaldo yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB). Kebijakan tersebut berupa penyelesaian hingga tuntas proses likuidasi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo

(SITB). Satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021, dilikuidasi dengan cara mengalihkan aset satker inaktif bersaldo tersebut ke satker pusat pada Unit Eselon I yang menjadi penanggung jawab proses likuidasi.

Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dialihkan ke satker pusat per Unit Eselon I pada Tahun 2021 dan progres penyelesaian aset tersebut selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 119
Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya pada Tahun 2022

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2021	Aset Tetap per 31 Desember 2021		Aset Lainnya per 31 Desember 2021	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	97	191.707.612.750	597.752.000	(597.752.000)	17.881.146.014	(17.881.146.014)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
Jumlah		**491**	**240.817.499.881**	**92.834.265.629**	**(92.834.265.629)**	**34.420.200.991**	**(34.420.200.991)**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2022	Aset Tetap per 31 Desember 2022		Aset Lainnya per 31 Desember 2022	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	78	160.453.206.096	-	-	16.608.103.564	(16.608.103.564)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
Jumlah		**472**	**209.563.093.227**	**92.236.513.629**	**(92.236.513.629)**	**33.147.158.541**	**(33.147.158.541)**
Perubahan		**(19)**	**(31.254.406.654)**	**(597.752.000)**	**597.752.000**	**(1.273.042.450)**	**1.273.042.450**

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk menyelesaikan aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama tersebut. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan aset yang disajikan pada akun Persediaan sebesar Rp29.207.138.507,00, Aset Tetap sebesar Rp20.793.696.021,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp20.793.696.021,00) dan Aset Lainnya sebesar Rp1.582.358.985,00 dengan akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar (Rp1.582.358.985,00). Penyelesaian aset tersebut diantaranya berupa reklasifikasi saldo persediaan sebesar Rp4.505.951.484,00 ke daftar persediaan yang tidak dikuasai atas persediaan yang telah terbit persetujuan hibahnya sebelum Tahun 2020. Penyelesaian aset tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya.

Progres penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama selama Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 120
Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama pada Tahun 2023

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2022	Aset Tetap per 31 Desember 2022		Aset Lainnya per 31 Desember	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	78	160.453.206.096	-	-	16.608.103.564	(16.608.103.564)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
Jumlah		**472**	**209.563.093.227**	**92.236.513.629**	**(92.236.513.629)**	**33.147.158.541**	**(33.147.158.541)**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2023	Aset Tetap per 31 Desember 2023		Aset Lainnya per 31 Desember 2023	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	22	19.370.862.156	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	342	14.141.386.945	2.763.654.365	(2.763.654.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	73	143.831.099.395	-	-	15.025.744.579	(15.025.744.579)
4	Ditjen Otda	18	3.012.606.224	64.444.158.794	(64.444.158.794)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
Jumlah		**455**	**180.355.954.720**	**71.442.817.608**	**(71.442.817.608)**	**31.564.799.556**	**(31.564.799.556)**
Perubahan		**(17)**	**(29.207.138.507)**	**(20.793.696.021)**	**20.793.696.021**	**(1.582.358.985)**	**1.582.358.985**

Rincian aset eks. Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran XXXIII**.**

4. Indikator kualitas data laporan keuangan yang perlu dijelaskan berdasarkan menu-menu pada Aplikasi MonSAKTI disajikan pada lampiran sebagai berikut:
   a. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan (Lampiran XXXIV); dan
   b. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB (Lampiran XXXV).
5. Daftar Rekening Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 disusun berdasarkan data Aplikasi Sprint dan hasil konfirmasi dengan Unit Eselon I terkait. Daftar rekening tersebut disajikan pada Lampiran XXXVI.

G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperoleh berdasarkan dokumen sumber dan/atau laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) di lingkungan Kemendagri yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diberikan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, semoga tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Jakarta, 13 Mei 2024

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK:

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	987.930.000	1.600.826.908	-	1.600.826.908	162,04
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	15.163.852.000	19.597.686.108	-	19.597.686.108	129,24
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	-	1.296.582.134	-	1.296.582.134	0,00
01	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	KD	-	90.240.338	-	90.240.338	0,00
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	-	207.090.615	-	207.090.615	0,00
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	-	189.689.212	-	189.689.212	0,00
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	-	48.652.882	-	48.652.882	0,00
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	-	311.101.552	-	311.101.552	0,00
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	-	42.731.421	-	42.731.421	0,00
		KP :		**16.151.782.000**	**22.495.095.150**	**-**	**22.495.095.150**	**139,27**
		KD :		**-**	**889.506.020**	**-**	**889.506.020**	**0,00**
		Total Eselon I Setjen :		**16.151.782.000**	**23.384.601.170**	**-**	**23.384.601.170**	**144,78**
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	-	198.676.486	-	198.676.486	0,00
		KP :		**-**	**198.676.486**	**-**	**198.676.486**	**0,00**
		Total Eselon I Itjen :		**-**	**198.676.486**	**-**	**198.676.486**	**0,00**
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	-	977.039.243	-	977.039.243	0,00
		KP :		**-**	**977.039.243**	**-**	**977.039.243**	**0,00**
		Total Eselon I Ditjen Polpum :		**-**	**977.039.243**	**-**	**977.039.243**	**0,00**
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	-	1.032.146.847	-	1.032.146.847	0,00
04	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	DK	-	10.880.000	-	10.880.000	0,00
04	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DK	-	10.540.000	-	10.540.000	0,00
04	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	DK	-	16.080.000	-	16.080.000	0,00
04	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DK	-	17.386.269	-	17.386.269	0,00
04	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	DK	-	13.635.000	-	13.635.000	0,00
04	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DK	-	1.200.000	-	1.200.000	0,00
04	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	-	180	-	180	0,00
04	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	DK	-	30	-	30	0,00
04	417936	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	TP	-	633.788	-	633.788	0,00

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
		KP :		**-**	**1.032.146.847**	**-**	**1.032.146.847**	**0,00**
		DK :		**-**	**69.721.479**	**-**	**69.721.479**	**0,00**
		TP :		**-**	**633.788**	**-**	**633.788**	**0,00**
		Total Eselon I Ditjen Bina Adwil :		**-**	**1.102.502.114**	**-**	**1.102.502.114**	**0,00**
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	81.204.000	1.206.316.343	-	1.206.316.343	1485,54
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	KD	-	171.786.673	-	171.786.673	0,00
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	33.500.000	136.854.360	-	136.854.360	408,52
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	-	254.570.000	-	254.570.000	0,00
		KP :		**81.204.000**	**1.206.316.343**	**-**	**1.206.316.343**	**1485,54**
		KD :		**33.500.000**	**563.211.033**	**-**	**563.211.033**	**1681,23**
		Total Eselon I Ditjen Bina Pemdes :		**114.704.000**	**1.769.527.376**	**-**	**1.769.527.376**	**1542,69**
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	400.000.000	2.147.576.462	-	2.147.576.462	536,89
		KP :		**400.000.000**	**2.147.576.462**	**-**	**2.147.576.462**	**536,89**
		Total Eselon I Ditjen Bina Bangda :		**400.000.000**	**2.147.576.462**	**-**	**2.147.576.462**	**536,89**
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	-	133.988.741	-	133.988.741	0,00
		KP :		**-**	**133.988.741**	**-**	**133.988.741**	**0,00**
		Total Eselon I Ditjen Otda :		**-**	**133.988.741**	**-**	**133.988.741**	**0,00**
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	398.534.266.000	795.078.317.795	-	795.078.317.795	199,50
		KP :		**398.534.266.000**	**795.078.317.795**	**-**	**795.078.317.795**	**199,50**
		Total Eselon I Ditjen Dukcapil :		**398.534.266.000**	**795.078.317.795**	**-**	**795.078.317.795**	**199,50**
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	-	10.025.240	-	10.025.240	0,00
		KP :		**-**	**10.025.240**	**-**	**10.025.240**	**0,00**
		Total Eselon I Ditjen Bina Keuda :		**-**	**10.025.240**	**-**	**10.025.240**	**0,00**
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	KP	-	552.472.128	-	552.472.128	0,00
		KP :		**-**	**552.472.128**	**-**	**552.472.128**	**0,00**
		Total Eselon I BSKDN :		**-**	**552.472.128**	**-**	**552.472.128**	**0,00**
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	14.565.314.000	17.120.653.986	-	17.120.653.986	117,54

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	6.069.820.000	6.322.040.926	169.985.000	6.152.055.926	104,16
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	7.383.907.000	7.422.702.869	42.520.000	7.380.182.869	100,53
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	10.916.782.000	11.173.513.980	-	11.173.513.980	102,35
12	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	13.573.601.000	13.754.970.093	-	13.754.970.093	101,34
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	-	344.146.027	-	344.146.027	0,00
		KP :		**14.565.314.000**	**17.120.653.986**	**-**	**17.120.653.986**	**117,54**
		KD :		**37.944.110.000**	**39.017.373.895**	**212.505.000**	**38.804.868.895**	**102,83**
		Total Eselon I BPSDM :		**52.509.424.000**	**56.138.027.881**	**212.505.000**	**55.925.522.881**	**106,91**
		KP :		**429.732.566.000**	**840.952.308.421**	**-**	**840.952.308.421**	**195,69**
		KD :		**37.977.610.000**	**40.470.090.948**	**212.505.000**	**40.257.585.948**	**106,56**
		DK :		**-**	**69.721.479**	**-**	**69.721.479**	**0,00**
		TP :		**-**	**633.788**	**-**	**633.788**	**0,00**
		Total Kementerian :		**467.710.176.000**	**881.492.754.636**	**212.505.000**	**881.280.249.636**	**188,47**

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	461.809.049.000	475.877.457.000	473.692.155.912	297.504.645	473.394.651.267	99,54	2.482.805.733
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	355.166.824.000	352.681.005.000	352.439.843.549	176.263.061	352.263.580.488	99,93	417.424.512
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	26.100.000.000	91.686.384.000	85.141.039.475	577.313.659	84.563.725.816	92,86	7.122.658.184
01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	54.742.080.000	49.979.110.000	49.920.443.690	36.035.478	49.884.408.212	99,88	94.701.788
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28.552.324.000	26.848.100.000	26.828.672.753	8.490.650	26.820.182.103	99,93	27.917.897
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	33.484.053.000	30.995.445.000	30.994.501.071	7.585.199	30.986.915.872	99,99	8.529.128
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	27.178.412.000	29.318.340.000	29.300.026.468	370.434	29.299.656.034	99,94	18.683.966
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	28.735.965.000	32.762.903.000	32.761.093.943	768	32.761.093.175	99,99	1.809.825
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	31.805.534.000	29.597.919.000	29.596.739.890	13.244.953	29.583.494.937	99,99	14.424.063
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	33.098.336.000	31.070.561.000	31.040.110.619	556.301	31.039.554.318	99,90	31.006.682
		KP :		**843.075.873.000**	**920.244.846.000**	**911.273.038.936**	**1.051.081.365**	**910.221.957.571**	**99,03**	**10.022.888.429**
		KD :		**237.596.704.000**	**230.572.378.000**	**230.441.588.434**	**66.283.783**	**230.375.304.651**	**99,94**	**197.073.349**
		Total Eselon I Setjen :		**1.080.672.577.000**	**1.150.817.224.000**	**1.141.714.627.370**	**1.117.365.148**	**1.140.597.262.222**	**99,21**	**10.219.961.778**
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	76.002.600.000	76.271.846.000	76.327.570.032	84.047.128	76.243.522.904	100,07	28.323.096
		KP :		**76.002.600.000**	**76.271.846.000**	**76.327.570.032**	**84.047.128**	**76.243.522.904**	**100,07**	**28.323.096**
		Total Eselon I Itjen :		**76.002.600.000**	**76.271.846.000**	**76.327.570.032**	**84.047.128**	**76.243.522.904**	**100,07**	**28.323.096**
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	265.979.233.000	262.470.077.000	262.426.990.383	60.596.542	262.366.393.841	99,98	103.683.159
		KP :		**265.979.233.000**	**262.470.077.000**	**262.426.990.383**	**60.596.542**	**262.366.393.841**	**99,98**	**103.683.159**
		Total Eselon I Ditjen Polpum :		**265.979.233.000**	**262.470.077.000**	**262.426.990.383**	**60.596.542**	**262.366.393.841**	**99,98**	**103.683.159**
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	124.632.875.000	157.664.713.000	157.107.873.630	227.244.196	156.880.629.434	99,65	784.083.566
04	019080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	320.000.000	229.146.000	228.869.002	-	228.869.002	99,88	276.998
04	029134	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	2.091.015.000	1.186.386.000	1.183.694.343	771.725	1.182.922.618	99,77	3.463.382
04	039667	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2.352.390.000	1.158.693.000	1.121.401.611	5.119.000	1.116.282.611	96,78	42.410.389
04	049061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	924.129.000	564.270.000	564.261.000	-	564.261.000	100,00	9.000
04	059663	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1.829.636.000	-	-	-	-	0,00	-
04	069084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	2.178.439.000	1.494.026.000	1.425.759.697	1.618.000	1.424.141.697	95,43	69.884.303
04	079078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2.300.115.000	1.278.770.000	1.274.251.143	-	1.274.251.143	99,65	4.518.857
04	089106	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1.464.009.000	1.043.563.000	1.028.619.373	-	1.028.619.373	98,57	14.943.627
04	099438	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1.175.051.000	909.332.000	897.093.697	-	897.093.697	98,65	12.238.303
04	109074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1.299.642.000	1.296.642.000	1.296.500.000	-	1.296.500.000	99,99	142.000

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	119082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.551.134.000	1.134.633.000	1.134.452.861	-	1.134.452.861	99,98	180.139
04	129074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.246.195.000	1.019.577.000	1.016.345.663	-	1.016.345.663	99,68	3.231.337
04	129098	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	124.620.000	120.240.000	120.020.000	3.629.600	116.390.400	99,82	3.849.600
04	139078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.411.734.000	1.344.434.000	1.326.154.226	-	1.326.154.226	98,64	18.279.774
04	149072	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.411.734.000	910.504.000	894.632.412	-	894.632.412	98,26	15.871.588
04	149130	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	141.173.000	141.173.000	141.172.500	-	141.172.500	100,00	500
04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.315.896.000	826.185.000	820.510.714	-	820.510.714	99,31	5.674.286
04	169185	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.220.058.000	-	-	-	-	0,00	-
04	179088	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	218.294.000	205.934.000	204.674.206	-	204.674.206	99,39	1.259.794
04	179223	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.182.938.000	2.128.868.000	2.128.712.057	-	2.128.712.057	99,99	155.943
04	189087	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.385.896.000	1.330.396.000	1.325.008.146	-	1.325.008.146	99,60	5.387.854
04	199080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.916.764.000	1.205.580.000	1.193.811.941	-	1.193.811.941	99,02	11.768.059
04	209071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.638.261.000	956.628.000	835.922.224	-	835.922.224	87,38	120.705.776
04	209095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	213.825.000	213.825.000	213.825.000	-	213.825.000	100,00	-
04	219062	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1.455.896.000	1.118.628.000	1.125.037.486	22.511.597	1.102.525.889	100,57	16.102.111
04	229068	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1.168.381.000	1.048.188.000	1.047.581.637	-	1.047.581.637	99,94	606.363
04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.497.508.000	1.464.728.000	1.464.717.659	-	1.464.717.659	99,99	10.341
04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.231.012.000	1.651.437.000	1.651.038.908	-	1.651.038.908	99,98	398.092
04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	223.101.000	223.101.000	222.837.940	-	222.837.940	99,88	263.060
04	250048	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	1.581.274.000	-	-	-	-	0,00	-
04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	173.603.000	147.193.000	138.350.470	-	138.350.470	93,99	8.842.530
04	269093	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1.028.381.000	996.241.000	996.234.958	-	996.234.958	99,99	6.042
04	289095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	161.243.000	155.623.000	154.122.770	-	154.122.770	99,04	1.500.230
04	289174	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1.612.421.000	1.523.641.000	1.471.127.590	-	1.471.127.590	96,55	52.513.410
04	299348	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	740.716.000	406.691.000	388.341.800	-	388.341.800	95,49	18.349.200
04	309148	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.290.058.000	1.263.458.000	1.240.752.490	-	1.240.752.490	98,20	22.705.510
04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1.022.081.000	993.651.000	992.961.637	-	992.961.637	99,93	689.363
04	329116	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.150.058.000	920.155.000	919.154.573	-	919.154.573	99,89	1.000.427
04	339161	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	940.956.000	614.791.000	590.971.095	-	590.971.095	96,13	23.819.905
04	340166	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1.150.506.000	1.135.616.000	1.135.571.092	-	1.135.571.092	99,99	44.908

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	115.051.000	115.051.000	114.820.548	-	114.820.548	99,80	230.452
04	359002	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	129.696.000	129.696.000	129.687.964	-	129.687.964	99,99	8.036
04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	996.956.000	959.676.000	959.497.305	-	959.497.305	99,98	178.695
04	433316	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	146.401.000	136.175.000	135.516.643	-	135.516.643	99,52	658.357
04	433317	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	117.505.000	117.505.000	117.505.000	-	117.505.000	100,00	-
04	433318	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	135.006.000	127.316.000	115.636.623	-	115.636.623	90,83	11.679.377
04	433341	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	129.964.000	129.964.000	129.963.720	-	129.963.720	100,00	280
04	433342	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	155.113.000	155.113.000	154.022.481	-	154.022.481	99,30	1.090.519
04	433343	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	129.006.000	120.606.000	119.478.600	-	119.478.600	99,07	1.127.400
04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	152.838.000	152.838.000	152.822.899	-	152.822.899	99,99	15.101
04	433345	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	124.072.000	124.072.000	122.509.000	-	122.509.000	98,74	1.563.000
04	433347	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	116.838.000	116.838.000	116.629.420	-	116.629.420	99,82	208.580
04	433348	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	141.170.000	135.670.000	135.664.000	-	135.664.000	100,00	6.000
04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	132.208.000	132.208.000	132.164.530	-	132.164.530	99,97	43.470
04	433350	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	138.590.000	138.590.000	138.589.811	-	138.589.811	100,00	189
04	433351	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	191.676.000	191.676.000	191.545.459	-	191.545.459	99,93	130.541
04	433352	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	149.751.000	149.751.000	148.677.748	-	148.677.748	99,28	1.073.252
04	433353	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	145.590.000	145.590.000	145.563.304	-	145.563.304	99,98	26.696
04	484101	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	217.844.000	205.374.000	205.362.740	-	205.362.740	99,99	11.260
04	484102	DK	BAPPEDA PROVINSI ACEH	435.687.000	397.327.000	382.481.960	-	382.481.960	96,26	14.845.040
04	484103	DK	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	280.085.000	280.085.000	280.024.610	-	280.024.610	99,98	60.390
04	484105	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	230.012.000	174.322.000	161.395.435	-	161.395.435	92,58	12.926.565
04	484106	DK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	460.023.000	432.100.000	430.888.642	-	430.888.642	99,72	1.211.358
04	484107	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	295.729.000	275.398.000	274.904.224	-	274.904.224	99,82	493.776
04	484109	DK	BAPPEDA PROVINSI RIAU	235.010.000	225.030.000	224.016.082	-	224.016.082	99,55	1.013.918
04	484110	DK	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	151.078.000	130.098.000	128.221.240	-	128.221.240	98,56	1.876.760
04	484112	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	230.011.000	224.481.000	218.221.386	-	218.221.386	97,21	6.259.614
04	484113	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	147.865.000	126.985.000	126.685.861	-	126.685.861	99,76	299.139
04	484115	DK	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	259.928.000	248.118.000	245.397.634	-	245.397.634	98,90	2.720.366
04	484116	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	167.097.000	162.667.000	162.623.626	-	162.623.626	99,97	43.374

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484118	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	292.802.000	274.920.000	274.622.402	-	274.622.402	99,89	297.598
04	484119	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	188.230.000	169.190.000	168.687.979	-	168.687.979	99,70	502.021
04	484121	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	310.227.000	281.866.000	278.712.457	-	278.712.457	98,88	3.153.543
04	484122	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	199.432.000	176.342.000	168.680.265	-	168.680.265	95,66	7.661.735
04	484124	DK	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	249.239.000	213.689.000	212.597.250	-	212.597.250	99,49	1.091.750
04	484125	DK	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	160.225.000	150.628.000	150.623.800	-	150.623.800	99,99	4.200
04	484127	DK	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	205.676.000	198.056.000	198.053.000	-	198.053.000	99,99	3.000
04	484128	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	132.220.000	122.470.000	121.506.500	-	121.506.500	99,21	963.500
04	484131	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	258.011.000	250.901.000	250.601.365	-	250.601.365	99,88	299.635
04	484132	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	165.865.000	165.865.000	165.730.160	-	165.730.160	99,92	134.840
04	484134	DK	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	148.143.000	138.663.000	137.069.000	-	137.069.000	98,85	1.594.000
04	484135	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	125.235.000	104.255.000	100.491.730	-	100.491.730	96,39	3.763.270
04	484137	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	209.101.000	188.011.000	179.282.721	-	179.282.721	95,36	8.728.279
04	484138	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	418.203.000	402.403.000	402.282.876	-	402.282.876	99,97	120.124
04	484139	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	268.845.000	251.655.000	251.247.593	-	251.247.593	99,84	407.407
04	484145	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	235.239.000	235.239.000	235.104.320	-	235.104.320	99,94	134.680
04	484146	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	470.478.000	297.810.000	280.879.700	-	280.879.700	94,32	16.930.300
04	484147	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	302.450.000	287.255.000	286.090.646	-	286.090.646	99,59	1.164.354
04	484149	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	112.413.000	112.413.000	110.853.500	-	110.853.500	98,61	1.559.500
04	484150	DK	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	184.826.000	179.428.000	179.336.900	-	179.336.900	99,95	91.100
04	484151	DK	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	138.817.000	138.817.000	128.286.139	-	128.286.139	92,41	10.530.861
04	484153	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	182.964.000	182.964.000	182.475.963	-	182.475.963	99,73	488.037
04	484154	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	365.927.000	340.077.000	326.347.825	-	326.347.825	95,96	13.729.175
04	484157	DK	BAPPEDA PROVINSI BALI	233.676.000	207.458.000	200.378.720	-	200.378.720	96,59	7.079.280
04	484158	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	150.220.000	142.190.000	141.596.600	-	141.596.600	99,58	593.400
04	484160	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	299.501.000	299.501.000	299.493.000	-	299.493.000	99,99	8.000
04	484161	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	192.537.000	192.537.000	192.526.958	-	192.526.958	99,99	10.042
04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	746.207.000	733.597.000	733.592.097	-	733.592.097	99,99	4.903
04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	286.843.000	270.863.000	270.568.800	-	270.568.800	99,89	294.200
04	484166	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	582.347.000	519.037.000	497.660.645	-	497.660.645	95,88	21.376.355

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	181.509.000	175.009.000	171.782.918	-	171.782.918	98,16	3.226.082
04	484169	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	282.348.000	247.834.000	243.862.778	-	243.862.778	98,40	3.971.222
04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	181.509.000	174.649.000	174.249.236	-	174.249.236	99,77	399.764
04	484172	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	131.590.000	114.240.000	109.326.600	-	109.326.600	95,70	4.913.400
04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	263.179.000	245.699.000	208.306.203	-	208.306.203	84,78	37.392.797
04	484174	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	169.187.000	148.281.000	117.974.494	-	117.974.494	79,56	30.306.506
04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	122.006.000	116.236.000	116.229.083	-	116.229.083	99,99	6.917
04	484177	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	544.011.000	502.121.000	456.168.091	-	456.168.091	90,85	45.952.909
04	484178	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	156.865.000	146.425.000	133.443.013	-	133.443.013	91,13	12.981.987
04	484180	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	499.391.000	435.808.000	339.846.271	-	339.846.271	77,98	95.961.729
04	484181	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	128.180.000	128.180.000	126.705.450	-	126.705.450	98,85	1.474.550
04	484183	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	736.587.000	667.782.000	655.295.045	-	655.295.045	98,13	12.486.955
04	484184	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	280.663.000	280.663.000	280.663.000	-	280.663.000	100,00	-
04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	204.416.000	197.516.000	197.514.885	-	197.514.885	99,99	1.115
04	484188	DK	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	131.410.000	131.410.000	131.409.590	-	131.409.590	100,00	410
04	484190	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	230.101.000	214.101.000	214.095.420	-	214.095.420	99,99	5.580
04	484191	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	147.922.000	147.922.000	147.907.634	-	147.907.634	99,99	14.366
04	484193	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	383.353.000	322.423.000	321.436.090	-	321.436.090	99,69	986.910
04	484194	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	246.441.000	232.551.000	232.550.790	-	232.550.790	100,00	210
04	484196	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	277.179.000	277.179.000	276.896.820	-	276.896.820	99,90	282.180
04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	178.187.000	161.257.000	148.024.220	-	148.024.220	91,79	13.232.780
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	327.652.000	327.652.000	327.652.000	-	327.652.000	100,00	-
04	484200	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	250.633.000	233.353.000	229.325.200	-	229.325.200	98,27	4.027.800
04	484202	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	591.179.000	566.059.000	564.680.859	-	564.680.859	99,76	1.378.141
04	484203	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	237.187.000	226.837.000	226.201.587	-	226.201.587	99,72	635.413
04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	322.484.000	288.794.000	287.069.129	-	287.069.129	99,40	1.724.871
04	484206	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	207.311.000	181.351.000	169.070.000	-	169.070.000	93,23	12.281.000
04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	347.207.000	308.768.000	307.778.655	-	307.778.655	99,68	989.345
04	484209	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	223.204.000	134.654.000	127.011.010	-	127.011.010	94,32	7.642.990
04	484211	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	94.096.000	55.621.000	55.316.485	-	55.316.485	99,45	304.515

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484212	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	188.191.000	-	-	-	-	0,00	-
04	484213	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	120.980.000	109.410.000	97.586.000	-	97.586.000	89,19	11.824.000
04	356000	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN	1.750.000.000	1.655.910.000	1.652.783.500	-	1.652.783.500	99,81	3.126.500
04	417936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	2.000.000.000	1.975.143.000	1.971.511.000	-	1.971.511.000	99,82	3.632.000
04	690639	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	1.750.000.000	941.650.000	934.254.990	-	934.254.990	99,21	7.395.010
		KP :		**124.632.875.000**	**157.664.713.000**	**157.107.873.630**	**227.244.196**	**156.880.629.434**	**99,65**	**784.083.566**
		DK :		**72.000.000.000**	**55.250.152.000**	**54.335.771.883**	**33.649.922**	**54.302.121.961**	**98,35**	**948.030.039**
		TP :		**5.500.000.000**	**4.572.703.000**	**4.558.549.490**	**-**	**4.558.549.490**	**99,69**	**14.153.510**
		Total Eselon I Ditjen Bina Adwil :		**202.132.875.000**	**217.487.568.000**	**216.002.195.003**	**260.894.118**	**215.741.300.885**	**99,32**	**1.746.267.115**
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	100.385.584.000	1.053.602.042.000	952.497.576.381	2.256.976.751	950.240.599.630	90,40	103.361.442.370
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	16.053.112.000	15.130.840.000	15.103.275.107	1.457.648	15.101.817.459	99,82	29.022.541
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15.290.049.000	15.102.930.000	15.041.595.367	555.203	15.041.040.164	99,59	61.889.836
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	13.276.690.000	12.972.144.000	12.961.247.469	2.378.432	12.958.869.037	99,92	13.274.963
		KP :		**100.385.584.000**	**1.053.602.042.000**	**952.497.576.381**	**2.256.976.751**	**950.240.599.630**	**90,40**	**103.361.442.370**
		KD :		**44.619.851.000**	**43.205.914.000**	**43.106.117.943**	**4.391.283**	**43.101.726.660**	**99,77**	**104.187.340**
		Total Eselon I Ditjen Bina Pemdes :		**145.005.435.000**	**1.096.807.956.000**	**995.603.694.324**	**2.261.368.034**	**993.342.326.290**	**90,77**	**103.465.629.710**
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	171.632.573.000	278.801.747.000	278.275.924.659	273.915.462	278.002.009.197	99,81	799.737.803
		KP :		**171.632.573.000**	**278.801.747.000**	**278.275.924.659**	**273.915.462**	**278.002.009.197**	**99,81**	**799.737.803**
		Total Eselon I Ditjen Bina Bangda :		**171.632.573.000**	**278.801.747.000**	**278.275.924.659**	**273.915.462**	**278.002.009.197**	**99,81**	**799.737.803**
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	99.044.400.000	97.509.565.000	97.292.315.659	120.778.475	97.171.537.184	99,78	338.027.816
		KP :		**99.044.400.000**	**97.509.565.000**	**97.292.315.659**	**120.778.475**	**97.171.537.184**	**99,78**	**338.027.816**
		Total Eselon I Ditjen Otda :		**99.044.400.000**	**97.509.565.000**	**97.292.315.659**	**120.778.475**	**97.171.537.184**	**99,78**	**338.027.816**
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	619.735.136.000	852.401.004.000	851.178.841.610	1.304.686.127	849.874.155.483	99,86	2.526.848.517
		KP :		**619.735.136.000**	**852.401.004.000**	**851.178.841.610**	**1.304.686.127**	**849.874.155.483**	**99,86**	**2.526.848.517**
		Total Eselon I Ditjen Dukcapil :		**619.735.136.000**	**852.401.004.000**	**851.178.841.610**	**1.304.686.127**	**849.874.155.483**	**99,86**	**2.526.848.517**
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	77.703.342.000	81.275.352.000	80.883.517.783	95.704.872	80.787.812.911	99,52	487.539.089
		KP :		**77.703.342.000**	**81.275.352.000**	**80.883.517.783**	**95.704.872**	**80.787.812.911**	**99,52**	**487.539.089**
		Total Eselon I Ditjen Bina Keuda :		**77.703.342.000**	**81.275.352.000**	**80.883.517.783**	**95.704.872**	**80.787.812.911**	**99,52**	**487.539.089**
11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	54.855.592.000	52.149.718.000	51.948.036.955	89.620.413	51.858.416.542	99,61	291.301.458
		KP :		**54.855.592.000**	**52.149.718.000**	**51.948.036.955**	**89.620.413**	**51.858.416.542**	**99,61**	**291.301.458**

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
		Total Eselon I BSKDN :		**54.855.592.000**	**52.149.718.000**	**51.948.036.955**	**89.620.413**	**51.858.416.542**	**99,61**	**291.301.458**
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	93.007.690.000	100.495.848.000	100.025.135.198	29.047.178	99.996.088.020	99,53	499.759.980
12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGION	26.841.759.000	26.288.099.000	26.216.189.475	13.898.947	26.202.290.528	99,73	85.808.472
12	027177	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGION	18.610.901.000	21.710.390.000	21.693.302.662	14.036.503	21.679.266.159	99,92	31.123.841
12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGION	22.591.556.000	25.114.109.000	25.041.025.435	1.170.374	25.039.855.061	99,71	74.253.939
12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGION	21.686.310.000	26.779.824.000	26.670.044.848	925.556	26.669.119.292	99,59	110.704.708
12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAM	11.301.011.000	19.588.799.000	19.587.561.036	5.865.131	19.581.695.905	99,99	7.103.095
		KP :		**93.007.690.000**	**100.495.848.000**	**100.025.135.198**	**29.047.178**	**99.996.088.020**	**99,53**	**499.759.980**
		KD :		**101.031.537.000**	**119.481.221.000**	**119.208.123.456**	**35.896.511**	**119.172.226.945**	**99,77**	**308.994.055**
		Total Eselon I BPSDM :		**194.039.227.000**	**219.977.069.000**	**219.233.258.654**	**64.943.689**	**219.168.314.965**	**99,66**	**808.754.035**
		KP :		**2.526.054.898.000**	**3.932.886.758.000**	**3.819.236.821.226**	**5.593.698.509**	**3.813.643.122.717**	**97,11**	**119.243.635.283**
		KD :		**383.248.092.000**	**393.259.513.000**	**392.755.829.833**	**106.571.577**	**392.649.258.256**	**99,87**	**610.254.744**
		DK :		**72.000.000.000**	**55.250.152.000**	**54.335.771.883**	**33.649.922**	**54.302.121.961**	**98,35**	**948.030.039**
		TP :		**5.500.000.000**	**4.572.703.000**	**4.558.549.490**	**-**	**4.558.549.490**	**99,69**	**14.153.510**
		Total Kementerian :		**2.986.802.990.000**	**4.385.969.126.000**	**4.270.886.972.432**	**5.733.920.008**	**4.265.153.052.424**	**97,38**	**120.816.073.576**

LAMPIRAN III

IKHTISAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PER 31 DESEMBER 2023

No		LK PLN 1	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	
2	Pemberi Pinjaman	*The World Bank*	
3	Nama Proyek	*Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project (* Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ *Frontline Service Delivery)*	
4	*Loan ID*	8941-ID	
5	No. Register	1CZ6CF2A	
6	*Date Sign*	30 Januari 2020	
7	*Date Effective*	19 Februari 2020	
8	*Closing Date*	31 Desember 2024	
9	*Loan Amount*	USD 6.000.000	USD 6.000.000
10	*Disbursement* s.d. 2020		-
11	*Disbursement* pada tahun 2021		-
12	*Disbursement* pada tahun 2022		-
13	*Disbursement* pada tahun 2023	13.069.878.000	13.069.878.000
14	**Belanja Tahun 2023 (Rupiah)**	**12.759.773.235**	**12.759.773.235**
	a. Belanja Pegawai	-	-
	b. Belanja Barang	12.759.773.235	12.759.773.235
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja Bansos	-	-
15	Neraca (Rupiah)	-	-
	a. Aset Lancar	-	-
	b. Aset Tetap	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-
	d. Kewajiban	-	-
16	*Executing Agency*	Kementerian Dalam Negeri	
17	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)		

Kepala Bagian Keuangan,

Mey Rany Wahida Utami, S.STP, MM
NIP. 19820520 200012 2 001

Paraf Koordinasi	
Kabag Keu	
Kasubbag	
Staf	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

PER 31 DESEMBER 2023

No		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
2	Pemberi Pinjaman	The World Bank		
3	Nama Proyek	Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project		
4	*Loan ID*	8941-ID		
5	No. Register	1CZ6CF2A		
6	*Date Sign*	30 Januari 2020		
7	*Date Effective*	19 Februari 2020		
8	*Closing Date*	31 Desember 2024		
9	*Loan Amount*	$ 153,020,000		$ 153,020,000
10	*Disbursement* pada tahun 2020	Rp 850,976,500		Rp 850,976,500
11	*Disbursement* pada tahun 2021	Rp 34,048,360,462		Rp 34,048,360,462
12	*Disbursement* pada tahun 2022	Rp 37,982,101,946		Rp 37,982,101,946
13	*Disbursement* pada tahun 2023	Rp 856,874,791,500		Rp 856,874,791,500
14	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)	Rp 856,874,791,500		Rp 856,874,791,500
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang	Rp 856,874,791,500		Rp 856,874,791,500
	c. Belanja Modal			
	d. Belanja Bansos			
15	Neraca (Rupiah)	-		-
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
16	*Executing Agency*	Kementerian Dalam Negeri		
17	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK		

Kepala Bagian Keuangan,

Ratnawati, S.P., M.M.
NIP. 19741113 200312 2 002

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO.		LK PLN 1	LK PLN 2	LK PLN 3	LK PLN 4	LK PLN 5	LK PLN 6	LK PLN 7	Jumlah
1	Nama PHLN	*Asean Development Bank-Ordinary Fund*	*Asean Development Bank-Ordinary Fund*	*Startegic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)*	*Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)*	*National Urban Supply Water Project*	*National Urban Development Project*	*National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)*	
2	Pemberi Pinjaman	ADB	ADB	IBRD dan AIIB	IBRD	IBRD	IBRD	IBRD	
3	Nama Proyek	Flood Management In Selected River Basins (FMSRB)	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	SIMURP	ISWMP	NUSWP	NUDP	NUFReP	
4	Loan ID	3440-INO	3529-INO dan 8327-INO (AIF)	IBRD No. 8891-ID dan AIIB No. L0060A	IBRD No. 9021-ID	IBRD LOAN No. 8872-ID	IBRD LOAN No. 8967-ID	IBRD No. 9459-ID	
5	No. Register	1RUX78CA	1Z83YQPA dan 11DDKS1A	1NF3PM6A dan 1HS4NF9A	1HFQ7GNA	1CPUK3GA	1PF7SCLA	1739NSEA	
6	Data Sign	2 Nopember 2016	31 Juli 2017	IBRD 25 Juli 2018 dan AIIB 11 Juli 2018	6 Januari 2020	20 Agustus 2018	15 November 2019	11 Januari 2023	
7	Data Effective	9 Desember 2016	8 September 2017	25 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018	3 April 2020	20 Agustus 2018	25 November 2019	27 Maret 2023	
8	Closing Date	30 September 2024	30 Juni 2024	30 Juni 2024	30 November 2025	31 Maret 2024	31 Desember 2024	31 Januari 2028	
9	Loan Amount	USD 108.700.000	USD 500.000.000 (ADB); USD 100.000.000 (AIF)	USD 250.000.000; USD 250.000.000	12.125.000.000	50.750.000.000	USD 49.600.000	USD 2.000.000	
10	Disbursment s.d 2017	8.268.298.905	-	-	-	-	-	-	8.268.298.905
11	Disbursment s.d 2018	15.155.070.803	17.425.523.167	-	-	-	-	-	32.580.593.970
12	Disbursment s.d 2019	15.300.000.000	47.000.000.000	6.787.750.000	-	9.228.258.000	-	-	78.316.008.000
13	Disbursment s.d 2020	11.341.125.000	26.903.931.000	16.070.000.000	-	15.007.500.000	5.855.810.000	-	75.178.366.000
14	Disbursment s.d 2021	15.032.812.556	28.036.722.742	35.613.132.668	8.428.417.805	12.730.906.574	3.991.965.575	-	103.833.957.920
15	Disbursment s.d 2022	18.262.156.000	38.811.422.000	50.233.638.000	17.972.260.000	16.354.553.000	28.685.835.000	-	170.319.864.000
16	Disbursment s.d 2023	6.532.000.000	18.343.646.000	41.796.150.000	14.645.786.000	20.388.432.000	37.850.992.000	631.106.000	140.188.112.000
17	**Belanja Tahun 2023 (Rupiah)**	**6.531.429.500**	**18.311.929.787**	**41.783.053.168**	**14.601.609.644**	**20.387.214.072**	**37.833.658.413**	**630.238.212**	**140.079.132.796**
	a. Belanja Pegawai					-			-
	b. Belanja Barang	6.531.429.500	18.311.929.787	41.783.053.168	14.601.609.644	20.387.214.072	37.682.358.413	630.238.212	139.927.832.796
	c. Belanja Modal	-	-	-	-	-	151.300.000	-	151.300.000
	d. Belanja Bansos	-	-	-	-	-	-	-	-
18	**Neraca (Rupiah)**	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Aset Lancar	-	-	-		-	-	-	-
	b. Aset Tetap	-	-	-		-	151.300.000	-	151.300.000
	c. Aset Lainnya	-	-	-		-	-	-	-
	d. Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	
19	Executing Agency	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Cipta Karya Dit. Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
20	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	

a.n. Kepala Bagian Keuangan
Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi

Yeni Nur'aeni, SE., M.Ak
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197808022006042001

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PER 31 DESEMBER 2023

NO.		LK PLN 1	Jumlah
1	Nama PHLN	*IBRD Loan*	
2	Pemberi Pinjaman	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	
3	Nama Proyek	ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project	
4	Loan ID	No. 9520- ID	
5	No. Register	1F2V2KKA	
6	Data Sign	30 Mei 2023	
7	Data Effective	3 Agustus 2023	
8	Closing Date	31 Desember 2027	
9	Loan Amount		USD 250.000.000,00
16	Disbursment s.d 2023		USD 83.930,00
17	**Belanja Tahun 2023 (Rupiah)**		**300,625,518**
	a. Belanja Pegawai		-
	b. Belanja Barang		300,625,518
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja Bansos	-	-
18	**Neraca (Rupiah)**	-	-
	a. Aset Lancar	-	-
	b. Aset Tetap	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-
	d. Kewajiban	-	-
19	Executing Agency	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	
20	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	

Plh. Kepala Bagian Keuangan

HERMAWAN APRIYANTO, SE
Penata Tk. I
NIP 19660921 198703 1 001

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO.		LK HLN 1	Jumlah
1	Nama PHLN	Investing in Nutrition and Early Years (INEY)	
2	Pemberi Pinjaman	Bank Dunia (World Bank)	
3	Nama Proyek	INEY	
4	Loan ID	GFF Grant Number TF0A7565	
5	No. Register	278EATNA	
6	Data Sign	1 Agustus 2018	
7	Data Effective	15 November 2018	
8	Closing Date	31 Desember 2023	
9	Loan Amount	82.000.000.000	
10	Disbursment s.d 2017		-
11	Disbursment s.d 2018		-
12	Disbursment s.d 2019	4.895.685.000	4.895.685.000
13	Disbursment s.d 2020	23.477.484.000	23.477.484.000
14	Disbursment s.d 2021	21.513.020.764	21.513.020.764
15	Disbursment s.d 2022	22.920.877.000	22.920.877.000
16	Disbursment s.d 2023	15.418.327.000	15.418.327.000
17	**Belanja Tahun 2022(Rupiah)**	**15.320.371.880**	**15.320.371.880**
	a. Belanja Pegawai		-
	b. Belanja Barang	15.320.371.880	15.320.371.880
	c. Belanja Modal		-
	d. Belanja Bansos		-
18	**Neraca (Rupiah)**	-	-
	a. Aset Lancar		-
	b. Aset Tetap		-
	c. Aset Lainnya		-
	d. Kewajiban		
19	Executing Agency	Sekretaris Wakil Presiden	
20	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPKP	

Kepala Bagian Keuangan

Amaryadi, S.IP., M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197711122006041001

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

No		LK HLN 1		Jumlah	
1	Nama Hibah	*Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project*			
2	Pemberi Hibah	The World Bank			
3	Nama Proyek	*Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project*			
4	*Loan ID*	Grant No TF0B5420			
5	No. Register	2FPJR4SA			
6	*Date Sign*	18 Mei 2021			
7	*Date Effective*	18 Mei 2021			
8	*Closing Date*	30 Juni 2025			
9	*Loan Ammount*	USD 3.259.000			
11	*Disbursement* pada tahun 2021	Rp	1.643.769.290	Rp	1.643.769.290
	Disbursement pada tahun 2022	Rp	771.865.390	Rp	771.865.390
	Disbursement pada tahun 2023	Rp	1.037.484.348	Rp	1.037.484.348
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)	Rp	1.037.484.348	Rp	1.037.484.348
	a. Belanja Pegawai	Rp	-	Rp	-
	b. Belanja Barang	Rp	1.037.484.348	Rp	1.037.484.348
	c. Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
	d. Belanja Bansos	Rp	-	Rp	-
13	Neraca (Rupiah)	Rp	-	Rp	-
	a. Aset Lancar				
	b. Aset Tetap				
	c. Aset Lainnya				
	d. Kewajiban				
14	*Executing Agency*	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan			
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				

a.n Kepala Bagian Keuangan
Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi,

Sri Murniati, S.Sos, M.Si
NIP. 19740610 199311 2 001

LAMPIRAN IV

RINCIAN PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, KEGIATAN, PROGRAM, OUTPUT DAN TARGET DARI MASING-MASING FUNGSI DAN SUB FUNGSI

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	002	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		700.000.000	699.998.871	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
2	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	003	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		750.000.000	749.998.974	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
3	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	004	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.450.000.000	1.449.362.502	99,96%	34,00	34,00	100,00%	
4	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	006	Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		600.000.000	599.988.935	100,00%	23,00	23,00	100,00%	
5	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	001	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.400.000.000	1.399.997.128	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
6	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	PBC	001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan		1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
7	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QEI	001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga		126.376.418.000	126.376.418.000	100,00%	9,00	9,00	100,00%	
8	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	002	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang		1.149.900.000	1.149.900.000	100,00%	400,00	400,00	100,00%	
9	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	UBA	001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.700.000.000	1.699.903.130	99,99%	15,00	15,00	100,00%	
10	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	Orang		4.000.000.000	4.000.000.000	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	
11	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	003	Kapasitas pengurus ormas	Orang		1.052.400.000	1.052.317.724	99,99%	1.200,00	1.200,00	100,00%	
12	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1234	UAC	001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Orang		7.500.000.000	7.499.394.432	99,99%	750,00	750,00	100,00%	
13	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1234	UBA	001	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.265.410.000	1.265.401.691	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
14	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1233	UBA	005	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	799.970.950	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
15	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	PBL	001	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	Rekomendasi Kebijakan		85.927.765.000	84.998.983.058	98,92%	22,00	22,00	100,00%	
16	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UAE	001	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	Laporan		2.554.158.000	2.552.669.729	99,94%	34,00	34,00	100,00%	
17	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.221.662.000	1.217.798.323	99,68%	80,00	80,00	100,00%	
18	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.292.336.000	2.288.018.560	99,81%	68,00	68,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	004	Asistensi kerja sama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)		967.620.000	956.922.522	98,89%	46,00	46,00	100,00%	
20	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	005	Pengintegrasian perjanjian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)		801.330.000	795.697.936	99,30%	34,00	34,00	100,00%	
21	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	003	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.093.810.000	1.092.989.717	99,93%	426,00	426,00	100,00%	
22	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	001	Penerapan SPM sub bidang Bencana	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.527.078.000	1.524.909.874	99,86%	468,00	468,00	100,00%	
23	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	002	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)		958.878.000	951.438.122	99,22%	426,00	426,00	100,00%	
24	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	005	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Daerah (Prov/Kab/Kota)		880.000.000	879.052.916	99,89%	34,00	34,00	100,00%	
25	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	006	Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		513.998.000	513.660.808	99,93%	34,00	34,00	100,00%	
26	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	1237	UBA	006	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.857.531.000	1.857.142.648	99,98%	76,00	76,00	100,00%	
27	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	CM	6136	UBA	004	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.252.800.000	1.239.784.472	98,96%	34,00	34,00	100,00%	
28	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	PEC	002	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	Kesepakatan		1.028.000.000	1.007.926.557	98,05%	6,00	6,00	100,00%	
29	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	Rekomendasi Kebijakan		3.500.000.000	3.492.362.004	99,78%	43,00	43,00	100,00%	
30	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	UBA	001	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.760.000.000	1.749.146.568	99,38%	14,00	14,00	100,00%	
31	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	1241	PEC	001	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	Kesepakatan		3.736.429.000	3.734.103.127	99,94%	5,00	5,00	100,00%	
32	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1244	UBB	013	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	Desa		2.000.000.000	1.997.152.165	99,86%	150,00	150,00	100,00%	
33	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1244	UBB	014	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa		1.000.000.000	996.969.901	99,70%	105,00	105,00	100,00%	
34	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6484	UBB	001	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Desa		10.904.875.000	10.027.592.967	91,96%	1.034,00	618,00	59,77%	
35	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang		10.405.796.000	10.388.871.065	99,84%	3.240,00	3.240,00	100,00%	
36	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	012	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		947.381.000	947.380.424	100,00%	30,00	34,00	113,33%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	008	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		660.000.000	658.958.427	99,84%	18,00	26,00	144,44%	
38	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	010	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Daerah (Prov/Kab/Kota)		604.000.000	602.964.295	99,83%	19,00	19,00	100,00%	
39	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	009	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS	Daerah (Prov/Kab/Kota)		831.827.000	830.924.183	99,89%	27,00	27,00	100,00%	
40	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	028	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	Daerah (Prov/Kab/Kota)		741.150.000	741.116.454	100,00%	34,00	38,00	111,76%	
41	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	007	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.297.323.000	1.295.103.994	99,83%	7,00	7,00	100,00%	
42	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	003	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		931.680.000	916.690.967	98,39%	412,00	515,00	125,00%	
43	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	004	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Daerah (Prov/Kab/Kota)		791.200.000	790.747.711	99,94%	412,00	509,00	123,54%	
44	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	005	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	Daerah (Prov/Kab/Kota)		737.500.000	736.548.964	99,87%	412,00	512,00	124,27%	
45	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	999.999.500	100,00%	412,00	509,00	123,54%	
46	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	002	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	Daerah (Prov/Kab/Kota)		841.708.000	841.706.647	100,00%	412,00	507,00	123,06%	
47	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	006	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		959.081.000	957.522.743	99,84%	412,00	511,00	124,03%	
48	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	023	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	Daerah (Prov/Kab/Kota)		576.000.000	563.215.001	97,78%	60,00	60,00	100,00%	
49	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan *stunting*	Daerah (Prov/Kab/Kota)		462.500.000	457.889.450	99,00%	514,00	514,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	022	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	Daerah (Prov/Kab/Kota)		473.947.000	472.646.111	99,73%	7,00	7,00	100,00%	
51	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	026	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		570.924.000	568.033.752	99,49%	28,00	28,00	100,00%	
52	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	024	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		554.193.000	550.737.904	99,38%	28,00	28,00	100,00%	
53	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		429.193.000	423.446.415	98,66%	26,00	26,00	100,00%	
54	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	027	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		718.654.000	717.583.603	99,85%	30,00	30,00	100,00%	
55	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	021	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	Daerah (Prov/Kab/Kota)		495.972.000	495.812.808	99,97%	7,00	7,00	100,00%	
56	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CM	6139	UBA	029	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		255.575.000	255.004.218	99,78%	58,50	59,00	100,85%	
57	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	018	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	999.413.028	99,94%	48,00	48,00	100,00%	
58	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		879.083.000	878.924.218	99,98%	34,00	34,00	100,00%	
59	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		607.800.000	603.216.147	99,25%	34,00	34,00	100,00%	
60	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		651.950.000	646.867.356	99,22%	34,00	34,00	100,00%	
61	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.500.000.000	1.499.992.673	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
62	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		680.000.000	678.505.188	99,78%	34,00	34,00	100,00%	
63	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	019	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Daerah (Prov/Kab/Kota)		600.000.000	600.000.000	100,00%	24,00	34,00	141,67%	

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	030	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		411.250.000	410.734.136	99,87%	8,00	8,00	100,00%	
65	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	020	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		890.978.000	890.513.870	99,95%	34,00	34,00	100,00%	
66	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	1254	UAB	001	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	Sistem Informasi		796.932.000	796.931.382	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
67	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	005	Rekomendasi Qanun/Pergub Aceh	Rekomendasi Kebijakan		480.000.000	479.340.220	99,86%	1,00	2,00	200,00%	
68	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1261	UBA	001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.858.200.000	2.850.738.668	99,74%	18,00	12,00	66,67%	
69	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1261	UBA	003	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.056.000.000	1.054.458.588	99,85%	234,00	48,00	20,51%	
70	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PAG	001	Permendagri mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan, Tata Cara Seleksi, Materi Seleksi, dan Indikator Penilaian Calon Anggota Pansel Provinsi	PerMen		160.000.000	159.748.000	99,84%	1,00	1,00	100,00%	
71	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	001	Rekomendasi kebijakan DPOD dalam penyelenggaaran pemerintahan dan keuangan daerah	Rekomendasi Kebijakan		2.352.085.000	2.351.743.651	99,99%	4,00	4,00	100,00%	
72	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	001	Daerah otonom hasil pemekaran yang difasilitasi penyelesaian permasalahan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.744.992.000	2.739.642.376	99,81%	17,00	17,00	100,00%	
73	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	002	Provinsi yang disupervisi kinerjanya dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.510.170.000	2.508.551.333	99,94%	5,00	9,00	180,00%	
74	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6140	PAC	001	Perubahan kedua PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	RPP		500.000.000	499.388.700	99,88%	1,00	1,00	100,00%	
75	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	PBL	001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	Rekomendasi Kebijakan		525.000.000	520.551.122	99,15%	3,00	3,00	100,00%	
76	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	QMA	001	*Database* peraturan daerah	Data		1.056.000.000	1.049.145.725	99,35%	1,00	1,00	100,00%	
77	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	UAE	001	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil *review* Kemendagri	Rekomendasi		1.424.815.000	1.420.683.307	99,71%	23,00	23,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	UBA	001	Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.387.083.000	1.380.340.002	99,51%	30,00	30,00	100,00%	
79	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PAH	006	Revisi UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Prov. DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI	peraturan		800.000.000	793.801.850	99,23%	1,00	1,00	100,00%	
80	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	004	Rekomendasi Perdais/Pergub DIY	Rekomendasi Kebijakan		400.000.000	399.108.400	99,78%	1,00	2,00	200,00%	
81	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	003	Fasilitasi Pelaksanaan Program Afirmasi Pembangunan SDM di Wilayah Papua	Provinsi		880.000.000	875.992.553	99,54%	1,00	6,00	600,00%	
82	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PAG	002	Permendagri mengenai Tata Cara Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Daerah Otonom hasil pemekaran di Provinsi Papua	PerMen		160.000.000	159.669.000	99,79%	1,00	1,00	100,00%	
83	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	002	Pemantapan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua	Rekomendasi Kebijakan		1.080.000.000	1.079.591.030	99,96%	2,00	6,00	300,00%	
84	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	6140	UBA	006	Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.600.000.000	1.599.955.000	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
85	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	6140	UBA	001	Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	798.915.000	99,86%	170,00	170,00	100,00%	
86	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	001	Akta Kematian yang diterbitkan	Akta		478.603.000	455.262.849	95,12%	250.000,00	2.228.368,00	891,35%	
87	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	002	Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta		372.620.000	371.270.019	99,64%	30.000,00	218.785,00	729,28%	
88	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	003	Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta		319.100.000	314.390.892	98,52%	4.000,00	15.035,00	375,88%	
89	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta		1.258.433.000	1.244.220.020	98,87%	400.000,00	1.144.569,00	286,14%	
90	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1271	UBA	001	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.000.000.000	1.998.195.545	99,91%	15,00	18,00	120,00%	
91	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1268	QAB	001	Pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK Nasional	Lembaga		4.459.660.000	4.453.614.899	99,86%	1.000,00	1.005,00	100,50%	
92	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CP	1271	UBA	002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.461.940.000	2.457.974.668	99,84%	5,00	5,00	100,00%	
93	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	001	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	Daerah (Prov/Kab/Kota)		785.000.000	774.248.874	98,63%	34,00	34,00	100,00%	
94	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	002	Daerah yang Memenuhi Indikator *Mandatory Spending*	Daerah (Prov/Kab/Kota)		700.000.000	698.597.721	99,80%	450,00	450,00	100,00%	
95	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	004	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	795.699.222	99,46%	426,00	426,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	006	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.286.000.000	1.269.293.806	98,70%	455,00	455,00	100,00%	
97	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	007	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.578.685.000	1.572.147.517	99,59%	426,00	426,00	100,00%	
98	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1276	UBA	002	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		834.280.000	833.771.780	99,94%	65,00	65,00	100,00%	
99	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	005	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	Daerah (Prov/Kab/Kota)		365.000.000	357.891.139	98,05%	34,00	34,00	100,00%	
100	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	008	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.338.664.000	1.336.574.213	99,84%	225,00	225,00	100,00%	
101	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	009	Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.021.680.000	1.018.296.858	99,67%	478,00	478,00	100,00%	
102	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6141	UBA	003	Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.339.780.000	1.330.685.678	99,32%	426,00	426,00	100,00%	
103	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	001	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	999.996.004	100,00%	176,00	176,00	100,00%	
104	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	002	Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		648.288.000	683.730.496	105,47%	34,00	34,00	100,00%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
105	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	003	Penerapan *Pilot Project* Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	799.698.298	99,96%	5,00	5,00	100,00%	
106	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	004	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	998.380.898	99,84%	542,00	542,00	100,00%	
107	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	004	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	Orang		251.920.000	251.920.000	100,00%	182,00	913,00	501,65%	
108	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang Meningkat Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Pusat	Orang		580.760.000	579.039.122	99,70%	390,00	420,00	107,69%	
109	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	003	Aparatur yang meningkat Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	Orang		216.920.000	216.919.844	100,00%	180,00	188,00	104,44%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	005	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Legal *Drafting* (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	Orang		433.840.000	433.836.886	100,00%	300,00	300,00	100,00%	
111	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	006	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Orang		1.032.325.000	989.446.374	95,85%	272,00	272,00	100,00%	
112	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	007	Aparatur yang Meningkat Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	Orang		867.680.000	855.684.379	98,62%	600,00	600,00	100,00%	
Jumlah													**359.831.518.000**	**357.647.129.471**	**99,39%**				

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan

I Nengah Sandiyasa
197412082006041000

Kementerian PPN/Bappenas
Koordinator Bidang Wawasan Kebangsaan

Maharani
198311042009012005

Direktorat Jenderal Anggaran
Kasubdit Anggaran Bidang Politik

Itjok Henandarto
197208291999031001

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	AEC	001	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Kesepakatan	Kesepakatan	318.970.000	317.586.454	99,57%	2,00	3,00	150,00%	
2	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	BAH	001	Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	layanan	layanan	871.390.000	811.975.509	93,18%	1,00	1,00	100,00%	
3	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	BCB	001	Persidangan dan Putusan Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Perkara	Perkara	67.068.685.000	61.028.624.358	90,99%	746,00	355,00	47,59%	
4	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	321.658.000	280.601.899	87,24%	1,00	1,00	100,00%	
5	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	579.365.000	542.740.642	93,68%	1,00	1,00	100,00%	
6	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	959	Layanan Protokoler	Layanan	Layanan	180.523.000	179.743.961	99,57%	1,00	1,00	100,00%	
7	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	482.101.000	453.732.233	94,12%	1,00	1,00	100,00%	
8	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	5.486.721.000	5.362.672.007	97,74%	1,00	1,00	100,00%	
9	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	43.490.000	34.227.000	78,70%	1,00	1,00	100,00%	
10	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Layanan	330.000	-	0,00%	1,00	1,00	100,00%	
11	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	4255	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	16.333.151.000	16.129.135.412	98,75%	1,00	1,00	100,00%	
12	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	AEC	001	Kerjasama Dalam Negeri	Kesepakatan	Kesepakatan	1.147.500.000	1.145.935.592	99,86%	16,00	24,00	150,00%	
13	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	AEC	002	Kerjasama Luar Negeri	Kesepakatan	Kesepakatan	2.289.493.000	2.288.346.272	99,95%	9,00	23,00	255,56%	
14	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	BAH	001	Layanan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri	layanan	layanan	376.673.000	375.961.419	99,81%	1,00	1,00	100,00%	
15	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	BCB	001	Penanganan Perkara Litigasi	Perkara	Perkara	1.836.486.000	1.837.764.497	100,07%	120,00	120,00	100,00%	
16	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	EBA	001	Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum	Layanan	Layanan	593.549.000	600.233.977	101,13%	1,00	1,00	100,00%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
17	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	EBA	002	Layanan Dukungan Manajemen Pusat Fasilitasi Kerja Sama	Layanan	Layanan	907.603.000	906.213.236	99,85%	1,00	1,00	100,00%	
18	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	4.710.300.000	4.720.045.445	100,21%	1,00	1,00	100,00%	
19	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	2.776.386.000	2.775.082.736	99,95%	1,00	1,00	100,00%	
20	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Layanan	56.135.000	57.309.281	102,09%	1,00	1,00	100,00%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
21	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6083	FBA	001	Asistensi dan Supervisi Litigasi dan Advokasi Hukum Pemerintahan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	373.530.000	386.020.000	103,34%	64,00	64,00	100,00%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
22	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	001	Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	Layanan	Layanan	13.871.785.000	13.859.911.508	99,91%	1,00	1,00	100,00%	
23	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	002	Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan	Layanan	Layanan	1.679.172.000	1.679.160.113	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
24	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	003	Layanan Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Aset	Layanan	Layanan	835.900.000	832.877.478	99,64%	1,00	1,00	100,00%	
25	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	004	Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum	Layanan	Layanan	581.515.000	574.673.725	98,82%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	005	Layanan Dukungan Manajemen Biro Administrasi Pimpinan	Layanan	Layanan	1.221.150.000	1.217.388.064	99,69%	1,00	1,00	100,00%	
27	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	956	Layanan BMN	Layanan	Layanan	1.662.500.000	1.656.550.065	99,64%	1,00	1,00	100,00%	
28	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	959	Layanan Protokoler	Layanan	Layanan	3.150.813.000	3.149.916.500	99,97%	1,00	1,00	100,00%	
29	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	5.500.965.000	5.459.726.374	99,25%	1,00	1,00	100,00%	
30	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	330.098.247.000	328.352.917.805	99,47%	1,00	1,00	100,00%	
31	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	12.654.949.000	12.580.641.916	99,41%	273,00	320,00	117,22%	
32	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit	1.764.000.000	1.751.491.261	99,29%	4,00	6,00	150,00%	
33	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	001	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	Dokumen	Dokumen	319.222.000	319.115.627	99,97%	1,00	1,00	100,00%	
34	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	002	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	Dokumen	Dokumen	262.179.000	262.177.380	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
35	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	003	Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal di atas 10 unit	Dokumen	Dokumen	148.960.000	148.927.175	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
36	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	004	Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	Dokumen	Dokumen	133.897.000	133.895.175	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
37	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	3.886.864.000	3.886.098.520	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
38	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	2.201.332.000	2.199.494.826	99,92%	1,00	1,00	100,00%	
39	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	4.253.600.000	4.221.186.155	99,24%	1,00	1,00	100,00%	
40	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6084	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	Dokumen	2.324.257.000	2.310.160.091	99,39%	1,00	1,00	100,00%	
41	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	BAH	001	Layanan Pengaduan	layanan	layanan	301.792.000	301.657.973	99,96%	1,00	1,00	100,00%	
42	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	CAN	001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	Unit	5.548.057.000	5.541.222.426	99,88%	3,00	3,00	100,00%	
43	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	CBT	001	Pengadaan Data Center	Unit	Unit	9.867.910.000	9.867.723.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
44	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	CBT	002	Pengadaan Jaringan	Unit	Unit	10.980.895.000	10.860.415.433	98,90%	3,00	3,00	100,00%	
45	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	CBT	003	Pengadaan Sistem Keamanan	Unit	Unit	974.380.000	936.284.590	96,09%	1,00	1,00	100,00%	
46	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	001	Layanan Dukungan Manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi	Layanan	Layanan	946.490.000	940.609.860	99,38%	1,00	1,00	100,00%	
47	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	002	Layanan Dukungan Manajemen Pusat Penerangan	Layanan	Layanan	1.000.136.000	999.995.262	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
48	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	003	Publikasi	Layanan	Layanan	8.459.095.000	8.457.388.121	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
49	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	004	Strategi Komunikasi	Layanan	Layanan	602.567.000	602.482.000	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
50	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	005	Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri	Layanan	Layanan	309.698.000	309.381.536	99,90%	1,00	1,00	100,00%	
51	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	111.098.000	111.045.094	99,95%	1,00	1,00	100,00%	
52	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	716.098.000	715.964.418	99,98%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	3.947.511.000	3.911.364.554	99,08%	1,00	1,00	100,00%	
54	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	FAB	001	Pengelolaan dan Implementasi SI Manajemen dan eksekutif	Sistem Informasi	Sistem Informasi	1.182.726.000	1.176.843.478	99,50%	1,00	1,00	100,00%	
55	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	FAB	002	Pengelolaan Implementasi SIPD dan SPBE Kemendagri	Sistem Informasi	Sistem Informasi	4.540.198.000	4.527.846.971	99,73%	1,00	1,00	100,00%	
56	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	FAB	004	Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	Sistem Informasi	Sistem Informasi	353.748.000	353.279.202	99,87%	1,00	1,00	100,00%	
57	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	FBA	001	Asistensi dan Supervisi Kehumasan Pemda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	859.481.000	859.418.671	99,99%	408,00	275,00	67,40%	
58	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6085	FBA	002	Asistensi dan Supervisi Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Pemda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.123.579.000	1.123.455.827	99,99%	28,00	32,00	114,29%	
59	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	AAG	001	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri	PerMen	PerMen	43.718.000	43.717.450	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
60	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	ADG	U01	Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	Orang	Orang	1.260.644.000	1.260.639.383	100,00%	480,00	480,00	100,00%	
61	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	ADG	U02	Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	Orang	Orang	204.065.000	204.062.389	100,00%	60,00	60,00	100,00%	
62	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	ADG	U03	Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	Orang	Orang	447.965.000	447.963.347	100,00%	180,00	160,00	88,89%	
63	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	BAH	001	Layanan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	layanan	layanan	1.512.200.000	1.510.702.267	99,90%	1,00	1,00	100,00%	
64	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	EBA	001	Layanan Dukungan Manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	Layanan	Layanan	996.944.000	996.267.736	99,93%	1,00	1,00	100,00%	
65	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	EBA	002	Layanan Dukungan Manajemen Biro Kepegawaian	Layanan	Layanan	802.210.000	801.998.030	99,97%	1,00	1,00	100,00%	
66	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	3.321.121.000	3.319.599.029	99,95%	1,00	1,00	100,00%	
67	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	11.096.635.000	11.074.521.372	99,80%	7.008,00	8.057,00	114,97%	
68	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	FBA	001	Asistensi dan Supervisi Ketatalaksanaan Pemda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	460.604.000	460.454.044	99,97%	7,00	-	0,00%	
69	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	FBA	002	Asistensi dan Supervisi Kelembagaan Sekretariat Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.058.320.000	1.058.178.571	99,99%	181,00	204,00	112,71%	
70	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	FBA	003	Asistensi dan Supervisi Reformasi Birokrasi Pemda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.056.410.000	1.056.251.665	99,99%	34,00	34,00	100,00%	
71	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	WA	6086	FBA	004	Layanan Administrasi dan Konsultasi Pemda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	172.200.000	172.200.000	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
72	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	2.308.812.000	2.314.992.017	100,27%	8,00	8,17	102,08%	
73	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBD	S01	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Esselon I dengan Unit Vertikal 7 s.d 15 Satker	Dokumen	Dokumen	393.825.000	393.809.818	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
74	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6090	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	455.999.000	455.828.205	99,96%	8,00	8,17	102,08%	
75	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	ADB	001	Akreditasi Institusi dan Prodi	produk	produk	917.020.000	900.297.976	98,18%	12,00	12,00	100,00%	
76	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	EBD	001	Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	Laporan	Laporan	1.604.688.000	1.620.763.114	101,00%	9,00	10,17	112,96%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
77	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	EBD	965	Layanan Audit Internal	Dokumen	Dokumen	1.041.628.000	1.041.451.923	99,98%	8,00	8,17	102,08%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	EBD	S01	Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	Dokumen	Dokumen	104.557.000	104.533.500	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
79	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	EBD	S02	SBK Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	302.749.000	302.564.325	99,94%	2,00	2,00	100,00%	
80	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	ABL	005	Pengabdian Masyarakat	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	1.868.676.000	1.868.277.664	99,98%	14,00	14,00	100,00%	
81	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	ABL	006	Pengabdian Masyarakat di Bidang Pengembangan SDM Pemerintah Daerah	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	250.000	250.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
82	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	ABL	S01	Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	3.254.639.000	3.253.646.071	99,97%	21,00	23,00	109,52%	
83	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	ABL	S03	Laporan Kajian Aktual Strategis (3 Naskah Kebijakan)	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	62.990.000	62.957.000	99,95%	3,00	3,00	100,00%	
84	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	DBA	001	Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana	Orang	Orang	9.715.854.000	9.583.302.215	98,64%	842,00	842,00	100,00%	
85	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	DBA	002	Layanan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan	Orang	Orang	1.557.235.000	1.554.558.328	99,83%	100,00	100,00	100,00%	
86	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	EBC	968	Layanan Pendidikan Kedinasan	Orang	Orang	60.790.414.000	60.766.949.317	99,96%	5.072,00	5.110,16	100,75%	
87	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6092	EBC	U01	Seleksi Penerimaan Calon Praja	Orang	Orang	6.262.898.000	6.262.863.152	100,00%	534,00	534,00	100,00%	
88	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	11.798.103.000	11.792.745.839	99,95%	8,00	11,17	139,58%	
89	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	458.958.663.000	458.782.545.191	99,96%	8,00	10,17	127,08%	
90	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	9.575.329.000	9.566.703.980	99,91%	3.499,00	3.499,00	100,00%	
91	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit	5.669.038.000	5.644.448.860	99,57%	17,00	17,00	100,00%	
92	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6089	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	1.205.434.000	1.204.990.100	99,96%	8,00	8,17	102,08%	
93	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6090	EBA	959	Layanan Protokoler	Layanan	Layanan	191.154.000	190.488.476	99,65%	1,00	1,00	100,00%	
94	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6088	AAG	001	Peraturan Menteri Yang Bersifat Internal	PerMen	PerMen	118.030.000	118.028.500	100,00%	5,00	5,00	100,00%	
95	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6088	AAH	001	Keputusan Menteri Dalam Negeri Terkait IPDN	peraturan	peraturan	31.085.000	31.084.000	100,00%	2,00	4,00	200,00%	
96	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6088	AAH	002	Peraturan Rektor IPDN	peraturan	peraturan	115.753.000	115.752.400	100,00%	9,00	9,00	100,00%	
97	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6088	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	144.234.000	144.226.000	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
98	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6088	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Layanan	143.882.000	143.881.600	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
99	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6090	EBA	S01	Layanan Kehumasan dan Informasi	Layanan	Layanan	457.924.000	457.923.400	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
100	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	AEC	001	Kerjasama Dalam Negeri	Kesepakatan	Kesepakatan	421.554.000	421.344.054	99,95%	23,00	27,32	118,78%	
101	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	AEC	002	Kerjasama Luar Negeri	Kesepakatan	Kesepakatan	36.663.000	36.662.500	100,00%	1,00	2,00	200,00%	
102	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	478.471.000	478.459.869	100,00%	6,00	6,17	102,77%	
103	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6091	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	3.265.832.000	3.265.102.589	99,98%	1.363,00	1.382,50	101,43%	
104	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6093	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	331.304.000	331.299.588	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
105	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	680.910.000	680.890.100	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
106	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	52.725.915.000	52.725.659.756	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
107	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Paket	Paket	784.992.000	784.988.575	100,00%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Paket	Paket	500.000.000	499.881.917	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
109	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBD	001	Layanan Penyusunan Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (SBKU)	Dokumen	Dokumen	6.753.000	6.752.380	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
110	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBD	002	Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	Dokumen	Dokumen	35.692.000	35.691.148	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
111	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	173.526.000	173.524.988	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
112	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	159.363.000	159.361.611	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
113	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6094	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	868.831.000	871.225.594	100,28%	1,00	1,00	100,00%	
114	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6095	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	28.297.000	28.297.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
115	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6095	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	274.888.000	274.887.008	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
116	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6096	AEC	001	LAYANAN FASILITASI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN	Dokumen	Dokumen	150.549.000	150.545.442	100,00%	3,00	3,00	100,00%	
117	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6096	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	322.186.000	322.184.645	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
118	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6096	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	1.331.550.000	1.331.356.538	99,99%	307,00	307,00	100,00%	
119	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	FAE	001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	143.282.000	143.281.836	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
120	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	FBA	001	KOORDINASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.003.658.000	3.003.651.387	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
121	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	BIE	005	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KHUSUS	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	1.252.039.000	1.255.107.503	100,25%	34,00	34,00	100,00%	
122	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	009	PENANGANAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEMENDAGRI DAN BNPP	Dokumen	Dokumen	203.637.000	204.718.631	100,53%	2,00	2,00	100,00%	
123	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	FAI	005	PEMBANGUNAN INTEGRITAS	Lembaga	Lembaga	146.193.000	146.191.569	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
124	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6097	ADG	001	STANDARISASI HASIL KERJA PPUPD INSPEKTORAT	Orang	Orang	383.457.000	383.452.571	100,00%	2.514,00	2.514,00	100,00%	
125	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6097	FAC	001	BIMBINGAN TEKNIS PPUPD INSPEKTORAT	Orang	Orang	62.818.000	62.816.856	100,00%	600,00	600,00	100,00%	
126	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	BIE	001	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT JENDERAL	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	6.224.448.000	6.268.718.209	100,71%	76,00	76,00	100,00%	
127	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	BIE	009	Pengelolaan Bersama Pelaksanaan MCP Kemendagri	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	1.585.030.000	1.584.429.976	99,96%	34,00	34,00	100,00%	
128	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	001	PEMERIKSAAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	Dokumen	Dokumen	1.372.110.000	1.377.593.229	100,40%	1,00	1,00	100,00%	
129	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	005	PENGAWASAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	Dokumen	Dokumen	2.713.139.000	2.713.823.215	100,03%	1,00	1,00	100,00%	
130	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	011	Audit Kinerja Inspektorat Jenderal	Laporan	Laporan	500.000	500.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
131	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	012	Audit Kinerja Sekretariat Jenderal	Laporan	Laporan	21.000.000	21.000.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
132	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	013	Audit Kinerja DKPP	Laporan	Laporan	19.646.000	19.166.000	97,56%	1,00	1,00	100,00%	
133	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	014	Audit Kinerja IPDN	Laporan	Laporan	153.680.000	153.680.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
134	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	015	Audit Kinerja Audit Kinerja BPSDM	Laporan	Laporan	21.000.000	21.000.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
135	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	016	Audit Kinerja Ditjen OTDA	Laporan	Laporan	13.780.000	13.780.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
136	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	017	Audit Kinerja BSKD	Laporan	Laporan	21.000.000	21.000.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
137	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	018	Audit Kinerja BNPP	Laporan	Laporan	15.810.000	15.810.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
138	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	019	Audit Kinerja Ditjen Bina PEMDES	Laporan	Laporan	29.564.000	29.564.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	020	Audit Kinerja Ditjen Bina KEUDA	Laporan	Laporan	20.300.000	20.300.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
140	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	021	Audit Kinerja Ditjen Bina BANGDA	Laporan	Laporan	28.438.000	28.437.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
141	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	022	Audit Kinerja Ditjen DUKCAPIL	Laporan	Laporan	26.257.000	26.256.500	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
142	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	023	Audit Kinerja Ditjen Bina ADWIL	Laporan	Laporan	15.337.000	15.337.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
143	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	EBD	024	Audit Kinerja Ditjen Bina POLPUM	Laporan	Laporan	26.257.000	26.257.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
144	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6098	FAI	001	PENINGKATAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH	Lembaga	Lembaga	394.710.000	395.151.260	100,11%	35,00	35,00	100,00%	
145	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	AEB	001	Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia	forum	forum	296.485.000	296.475.270	100,00%	3,00	3,00	100,00%	
146	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	ABC	001	Rekomendasi kebijakan bidang organisasi masyarakat	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	155.068.000	154.803.136	99,83%	1,00	1,00	100,00%	
147	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	AEB	001	Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang organisasi kemasyarakatan	forum	forum	4.563.870.000	4.563.845.852	100,00%	6,00	6,00	100,00%	
148	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	AEF	001	Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan bidang Organisasi Kemasyarakatan	orang	orang	238.654.000	238.571.236	99,97%	300,00	300,00	100,00%	
149	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	BDD	001	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	1.197.190.000	1.196.719.826	99,96%	20,00	20,00	100,00%	
150	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FBA	001	Kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan ormas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.736.918.000	2.736.557.771	99,99%	34,00	34,00	100,00%	
151	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FBA	002	Indeks Kinerja Ormas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	555.900.000	555.898.878	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
152	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	AEB	002	Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bidang Politik Dalam Negeri	forum	forum	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,00	3,00	100,00%	
153	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	BMA	001	Iklan Layanan Masyarakat Untuk Sukses Pemilu Tahun 2024	publikasi	publikasi	600.000.000	599.997.666	100,00%	4,00	4,00	100,00%	
154	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FAE	001	Fasilitasi dan Evaluasi Kelengkapan Admnistrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Laporan	Laporan	600.000.000	600.000.000	100,00%	18,00	18,00	100,00%	
155	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FAE	002	Pemantauan dan Evaluasi perkembangan politik di daerah	Laporan	Laporan	1.300.280.000	1.299.867.858	99,97%	34,00	34,00	100,00%	
156	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FBA	003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.063.274.000	1.063.274.000	100,00%	7,00	7,00	100,00%	
157	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	ABC	003	Indeks Harmoni Indonesia	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000	1.248.561.970	99,88%	4,00	4,00	100,00%	
158	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	003	Fasilitasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dalam mendukung Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	400.000.000	399.992.498	100,00%	23,00	23,00	100,00%	
159	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	010	Fasilitasi Penanganan Ketahanan Ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	999.769.475	99,98%	34,00	34,00	100,00%	
160	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	011	Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.700.000.000	1.699.989.243	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
161	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	012	Fasilitasi penanganan ketahanan Sosial Kemasyarakatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	299.995.247	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
162	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	013	Fasilitasi Literasi Budaya dalam Kerangka Ketahanan Identitas Bangsa	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.100.000.000	1.099.994.848	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
163	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	014	Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	950.000.000	949.972.925	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
164	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	ABC	001	Kebijakan/regulasi Indeks kewaspadaan Nasional	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000	699.514.562	99,93%	1,00	1,00	100,00%	
165	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	ABC	002	modul pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000	99.994.445	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
166	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	ABC	003	Pedoman SOP penerbitan rekomendasi tenaga ahli asing di daerah dan SOP Hibah bantuan dari luar negeri	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	150.000.000	149.996.660	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
167	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	ACB	001	Izin penelitian di daerah	Orang	Orang	200.000.000	199.975.492	99,99%	410,00	410,00	100,00%	
168	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	ACD	001	Rekomendasi Penerima Hibah lembaga asing	Institusi	Institusi	100.000.000	99.997.460	100,00%	6,00	6,00	100,00%	
169	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	AEB	002	Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Melalui Komunikasi Sosial	forum	forum	2.903.180.000	2.903.155.900	100,00%	23,00	23,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	BKA	001	Deteksi Dini	laporan	laporan	200.000.000	199.994.890	100,00%	417,00	417,00	100,00%	
171	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1234	FBA	001	Fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.399.800.000	1.399.275.419	99,96%	34,00	34,00	100,00%	
172	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	001	Fasilitasi Penguatan Nilai Sejarah Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	400.000.000	397.606.194	99,40%	34,00	34,00	100,00%	
173	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	002	Fasilitasi Penguatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	700.000.000	698.938.538	99,85%	34,00	34,00	100,00%	
174	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	007	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	930.000.000	927.171.506	99,70%	3,00	3,00	100,00%	
175	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	008	Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam membangun Harmoni Kebangsaan Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	760.000.000	759.996.950	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
176	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	009	Komunikasi Sosial dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.570.000.000	1.569.925.454	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
177	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	1233	FBA	016	Fasilitasi Kemah Kebangsaan Bagi Generasi Muda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.720.265.000	1.720.106.358	99,99%	34,00	34,00	100,00%	
178	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FBA	004	Pembinaan Teknis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.248.636.000	13.248.224.613	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
179	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CR	6145	FBA	005	Harmoni Papua Untuk Indonesia	Provinsi	Provinsi	1.150.000.000	1.149.447.458	99,95%	2,00	2,00	100,00%	
180	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6099	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	2.000.000.000	1.998.450.990	99,92%	1,00	1,00	100,00%	
181	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	2.400.000.000	2.399.979.600	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
182	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	47.185.696.000	47.159.672.086	99,94%	2,00	2,00	100,00%	
183	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	2.300.000.000	2.299.855.535	99,99%	574,00	574,00	100,00%	
184	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBD	001	Dokumen RKA Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	Dokumen	Dokumen	51.700.000	50.698.100	98,06%	1,00	1,00	100,00%	
185	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBD	002	Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	17.300.000	17.299.200	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
186	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	2.174.400.000	2.174.381.483	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
187	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	Laporan	240.000.000	239.993.508	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
188	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Layanan	1.800.000.000	1.799.967.362	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
189	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6100	FBA	001	Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.817.333.000	1.817.324.934	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
190	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6101	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	4.000.000.000	3.999.664.623	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
191	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6102	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	1.000.000.000	999.611.607	99,96%	1,00	1,00	100,00%	
192	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6102	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	500.000.000	499.829.420	99,97%	287,00	287,00	100,00%	
193	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6103	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	1.500.418.000	1.499.830.570	99,96%	1,00	1,00	100,00%	
194	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	47.877.970.000	47.801.922.604	99,84%	1,00	1,00	100,00%	
195	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	2.500.000.000	2.498.795.205	99,95%	73,00	73,00	100,00%	
196	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBD	001	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	51.700.000	51.653.986	99,91%	1,00	1,00	100,00%	
197	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBD	002	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	17.300.000	17.292.000	99,95%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	1.000.000.000	998.578.988	99,86%	1,00	1,00	100,00%	
199	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	240.000.000	239.962.674	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
200	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	1.598.059.000	1.569.166.687	98,19%	1,00	1,00	100,00%	
201	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6105	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	300.000.000	299.922.775	99,97%	1,00	1,00	100,00%	
202	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6105	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	1.612.000.000	1.610.064.979	99,88%	1,00	1,00	100,00%	
203	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6106	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	1.200.000.000	1.198.039.949	99,84%	1,00	1,00	100,00%	
204	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6106	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	635.250.000	633.539.990	99,73%	275,00	275,00	100,00%	
205	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6104	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	5.723.212.000	5.722.782.779	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
206	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6137	ABL	051	Rekomendasi tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000	496.950.964	99,39%	3,00	3,00	100,00%	
207	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6136	BEG	001	Bantuan Sarpras Tibumtranmas	Unit	Unit	2.562.592.000	2.558.777.920	99,85%	35,00	35,00	100,00%	
208	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6136	AFA	001	NSPK Urusan Trantibumlinmas	NSPK	NSPK	550.000.000	549.184.881	99,85%	6,00	6,00	100,00%	
209	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6136	FBA	006	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	350.000.000	347.629.225	99,32%	34,00	34,00	100,00%	
210	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6136	FBA	007	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	470.000.000	466.646.580	99,29%	60,00	60,00	100,00%	
211	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	-	-	CM	1241	BIC	001	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus	Lembaga	Lembaga	400.000.000	399.141.682	99,79%	4,00	4,00	100,00%	
212	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	-	-	CM	1241	CAI	001	Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	Unit	Unit	5.600.000.000	5.580.060.276	99,64%	6,00	6,00	100,00%	
213	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	-	-	CM	1241	FBA	004	Penanganan Konflik Pertanahan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	700.000.000	696.790.882	99,54%	20,00	20,00	100,00%	
214	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1237	FBA	051	Piloting Penguatan Peran Kecamatan (Frontline Service) dalam Peningkatan Kualitas Tala Kelola Desa	Kab/Kota	Kab/Kota	13.069.878.000	12.759.773.235	97,63%	60,00	60,00	100,00%	
215	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	-	-	CM	1241	FBA	007	Pelaksanaan Discussion Series dan Annual Meeting ASEAN Smart Cities Network Tahun 2023	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17.155.794.000	17.153.079.231	99,98%	34,00	34,00	100,00%	
216	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6107	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	1.700.000.000	1.688.549.060	99,33%	1,00	1,00	100,00%	
217	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	706.210.000	706.210.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
218	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBA	959	Layanan Protokoler	Layanan	Layanan	1.609.340.000	1.609.278.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
219	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	874.590.000	873.942.783	99,93%	3,00	3,00	100,00%	
220	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	94.515.791.000	94.006.930.096	99,46%	5,00	5,00	100,00%	
221	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	2.011.823.000	2.007.622.783	99,79%	181,00	181,00	100,00%	
222	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit	967.500.000	963.644.093	99,60%	5,00	5,00	100,00%	
223	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBD	001	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 dengan Unit Vertikal 1 S.D. 6 Satker	Dokumen	Dokumen	341.410.000	337.368.900	98,82%	1,00	1,00	100,00%	
224	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBD	002	Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s.d. 6 Satker	Dokumen	Dokumen	108.979.000	101.131.000	92,80%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	1.428.873.000	1.373.657.876	96,14%	5,00	5,00	100,00%	
226	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6108	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	2.546.949.000	2.536.396.733	99,59%	5,00	5,00	100,00%	
227	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6109	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	800.143.000	777.897.800	97,22%	1,00	1,00	100,00%	
228	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6109	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	339.442.000	338.726.571	99,79%	2,00	2,00	100,00%	
229	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6110	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	641.468.000	624.609.070	97,37%	2,00	2,00	100,00%	
230	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6110	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	781.922.000	780.567.450	99,83%	155,00	155,00	100,00%	
231	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	001	Nama dan kode desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi	Desa	Desa	302.000.000	301.652.278	99,88%	100,00	100,00	100,00%	
232	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	002	Desa yang memiliki produk hukum bidang pemerintahan sosial ekonomi, budaya dan regulasi penetapan, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Desa	Desa	346.892.000	346.664.250	99,93%	20,00	21,00	105,00%	
233	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	003	Desa yang menerapkan pelayanan berbasis ITE dan Desa yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa serentak	Desa	Desa	323.901.000	320.191.700	98,85%	1.000,00	1.600,00	160,00%	
234	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	005	Hasil klarifikasi usulan penataan desa	Desa	Desa	319.951.000	319.829.750	99,96%	30,00	30,00	100,00%	
235	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	006	Desa yang telah melaksanakan penataan kewenangan desa	Desa	Desa	426.763.000	426.389.350	99,91%	100,00	97,00	97,00%	
236	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6138	BEI	002	Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Lembaga	Lembaga	650.000.000	649.833.360	99,97%	10,00	10,00	100,00%	
237	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	007	Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa Secara Partisipatif	Desa	Desa	323.300.000	300.243.800	92,87%	10,00	12,00	120,00%	
238	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	013	Desa yang Ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa	Desa	Desa	486.372.000	471.904.857	97,03%	5,00	5,00	100,00%	
239	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6138	BDB	001	Lembaga PKK dan Posyandu yang tertata	Lembaga	Lembaga	5.000.000.000	4.829.326.630	96,59%	4.500,00	4.500,00	100,00%	
240	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6138	BDB	002	Fasilitasi pembentukan dan penataan Lembaga Linmas	Lembaga	Lembaga	697.786.000	675.458.014	96,80%	60,00	62,00	103,33%	
241	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6138	BDB	003	Lembaga LKD dan LAD yang terbentuk dan tertata	Lembaga	Lembaga	378.660.000	377.247.760	99,63%	150,00	150,00	100,00%	
242	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6138	FAI	001	Fasilitasi Pembentukan dan penataan Lembaga BPD	Lembaga	Lembaga	241.708.000	204.915.748	84,78%	5,00	5,00	100,00%	
243	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	008	Fasilitasi peningkatan pendapatan desa	Desa	Desa	850.000.000	834.147.163	98,13%	100,00	99,00	99,00%	
244	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	009	Desa yang tertib dan disiplin anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	Desa	614.510.000	608.769.443	99,07%	60,00	60,00	100,00%	
245	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	010	Desa yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Desa	Desa	555.000.000	554.600.000	99,93%	120,00	120,00	100,00%	
246	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1248	AFA	001	Kebijakan/Regulasi/Pedoman Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	NSPK	NSPK	275.160.000	275.153.765	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
247	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1248	FAC	003	Aparatur Desa yang memiliki Kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan desa	Orang	Orang	1.004.744.000	988.204.338	98,35%	25,00	25,00	100,00%	
248	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FAB	001	Sistem Aplikasi Prodeskel	Sistem Informasi	Sistem Informasi	99.000.000	99.000.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
249	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	011	Desa dengan status kategori "berkembang"	Desa	Desa	904.084.000	899.842.988	99,53%	2.000,00	2.000,00	100,00%	
250	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	012	Desa/Kelurahan yang datanya terpublikasi secara online	Desa	Desa	647.700.000	646.505.426	99,82%	1.500,00	1.500,00	100,00%	
251	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1244	FBB	014	Penguatan Teknis Pemerintahan Desa	Desa	Desa	500.000.000	479.172.983	95,83%	25,00	25,00	100,00%	
252	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6484	AFA	001	Sistem dan Prosedur yang dikembangkan	NSPK	NSPK	10.882.799.000	10.236.013.703	94,06%	14,00	12,00	85,71%	
253	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6484	BAH	001	Dukungan Manajamen P3PD	layanan	layanan	169.944.064.000	150.108.238.947	88,33%	12,00	12,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6484	FAC	001	Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan Kualitasnya	Orang	Orang	746.888.110.000	668.578.973.299	89,52%	141.623,00	124.714,00	88,06%	
255	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6484	FBA	001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20.460.341.000	19.934.296.459	97,43%	239,00	140,00	58,58%	
256	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6111	FBA	001	Pelaksanaaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.090.812.000	3.090.296.770	99,98%	34,00	38,00	111,76%	
257	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6111	FBA	002	Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.425.299.000	2.423.498.910	99,93%	34,00	38,00	111,76%	
258	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6112	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	1.425.000.000	1.424.744.898	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
259	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBA	956	Layanan BMN	Layanan	Layanan	389.000.000	378.047.419	97,18%	1,00	1,00	100,00%	
260	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBA	959	Layanan Protokoler	Layanan	Layanan	532.998.000	529.595.839	99,36%	1,00	1,00	100,00%	
261	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	2.362.497.000	2.356.911.526	99,76%	1,00	1,00	100,00%	
262	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	59.617.380.000	59.305.554.786	99,48%	2,00	2,00	100,00%	
263	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	253.848.000	249.761.400	98,39%	86,00	86,00	100,00%	
264	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit	316.020.000	315.479.022	99,83%	2,00	2,00	100,00%	
265	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBD	001	Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	5.768.870.000	5.765.315.798	99,94%	1,00	1,00	100,00%	
266	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBD	002	Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	Dokumen	Dokumen	5.257.000	5.257.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
267	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBD	003	Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	Dokumen	Dokumen	51.700.000	51.687.100	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
268	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	446.600.000	446.450.000	99,97%	1,00	1,00	100,00%	
269	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	180.000.000	179.985.687	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
270	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6113	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	1.832.608.000	1.830.732.591	99,90%	7,00	7,00	100,00%	
271	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6114	CAN	001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Unit	Unit	468.017.000	463.084.000	98,95%	31,00	31,00	100,00%	
272	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6114	CBT	001	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	Unit	1.498.786.000	1.498.586.000	99,99%	2,00	2,00	100,00%	
273	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6114	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	462.247.000	461.741.600	99,89%	1,00	1,00	100,00%	
274	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6115	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	222.511.000	222.511.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
275	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6115	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	152.924.000	152.074.263	99,44%	284,00	284,00	100,00%	
276	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6115	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	Dokumen	39.850.000	38.660.000	97,01%	1,00	1,00	100,00%	
277	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	002	Fasilitasi Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dalam Rangka Pemindahan Ibu kota	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25.000.000	23.484.211	93,94%	2,00	2,00	100,00%	
278	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	003	Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100.000.000	98.744.832	98,74%	30,00	34,00	113,33%	
279	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	004	Fasilitasi Pelayanan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50.000.000	50.000.000	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
280	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	005	Daerah yang ranperda rencana tata ruang daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25.000.000	24.950.800	99,80%	43,00	43,00	100,00%	
281	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	006	Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100.000.000	99.899.823	99,90%	34,00	34,00	100,00%	
282	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	008	Fasilitasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	200.000.000	200.000.000	100,00%	15,00	34,00	226,67%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	009	Fasilitasi Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	270.000.000	269.891.511	99,96%	15,00	15,00	100,00%	
284	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	010	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50.000.000	49.994.030	99,99%	384,00	384,00	100,00%	
285	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	029	Implementasi Lahan Pertanian Beririgasi yang Terintegrasi (IPDMIP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.343.646.000	18.328.871.509	99,92%	86,00	86,00	100,00%	
286	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	030	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Resiko Banjir di Daerah Terpilih pada Area Cekungan Tangkapan Sungai (FMSRB)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.532.000.000	6.531.429.500	99,99%	5,00	5,00	100,00%	
287	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	039	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	631.106.000	630.924.920	99,97%	6,00	6,00	100,00%	
288	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FAE	001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri	Rekomendasi	Rekomendasi	200.000.000	199.693.783	99,85%	5,00	5,00	100,00%	
289	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	011	Fasilitasi Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.397.344.000	1.394.695.319	99,81%	34,00	34,00	100,00%	
290	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	013	Fasilitasi Penguatan Kewirausahaan, usaha mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	104.253.000	104.253.000	100,00%	5,00	5,00	100,00%	
291	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	014	Fasilitasi Penerapan Penyederhanaan Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	78.542.000	78.542.000	100,00%	20,00	20,00	100,00%	
292	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	018	Fasilitasi Promosi dan Kemudahan Berusaha UMKM Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.822.757.000	2.818.830.962	99,86%	30,00	30,00	100,00%	
293	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	032	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.418.327.000	15.381.382.980	99,76%	514,00	514,00	100,00%	
294	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	033	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategis (SIMURP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	41.796.150.000	41.794.931.772	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
295	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	035	Fasilitasi Penyediaan Air Minum Perkotaan Kawasan Permukiman (NUWSP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20.388.432.000	20.387.214.072	99,99%	12,00	12,00	100,00%	
296	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1254	AAG	001	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	PerMen	PerMen	197.400.000	197.400.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
297	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1254	FAE	001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi	Rekomendasi	1.765.632.000	1.764.448.191	99,93%	34,00	38,00	111,76%	
298	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1254	FAE	002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi	Rekomendasi	809.149.000	808.724.427	99,95%	34,00	38,00	111,76%	
299	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1254	FBA	001	Fasilitasi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.335.883.000	1.335.865.881	100,00%	34,00	38,00	111,76%	
300	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1254	FBA	002	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	89.273.000	89.271.225	100,00%	34,00	38,00	111,76%	
301	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	1254	FBA	006	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru Papua	Provinsi	Provinsi	2.081.560.000	2.081.549.100	100,00%	4,00	4,00	100,00%	
302	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	038	Fasilitasi Percepatan Penurunan Stunting di daerah	Kab/Kota	Kab/Kota	391.000.000	390.721.000	99,93%	12,00	12,00	100,00%	
303	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	AFA	001	NSPK dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disinkronkan	NSPK	NSPK	573.573.000	572.865.546	99,88%	14,00	32,00	228,57%	
304	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	001	Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.088.917.000	6.068.901.763	99,67%	34,00	34,00	100,00%	
305	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	031	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.645.786.000	14.638.209.391	99,95%	12,00	12,00	100,00%	
306	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6139	FBA	036	Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	37.850.992.000	37.841.125.933	99,97%	15,00	15,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1261	FAB	001	Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Sistem Informasi	Sistem Informasi	830.050.000	830.040.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
308	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1261	FAB	002	Pembangunan Sistem Aplikasi Geographic Information System (GIS) Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sistem Informasi	Sistem Informasi	50.100.000	48.618.000	97,04%	1,00	1,00	100,00%	
309	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1261	FBA	001	Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kinerja 6 urusan wajib pelayanan dasar	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.304.354.000	2.288.280.504	99,30%	7,00	7,00	100,00%	
310	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	ABL	001	Kebijakan Terkait KDH dan DPRD	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	347.179.000	346.261.000	99,74%	1,00	2,00	200,00%	
311	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FAI	001	Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang optimal	Lembaga	Lembaga	310.702.000	310.534.290	99,95%	7,00	7,00	100,00%	
312	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FBA	001	Fasilitasi Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.620.861.000	1.620.299.634	99,97%	20,00	20,00	100,00%	
313	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FBA	005	Fasilitasi Peningkatan kinerja DPRD	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.389.614.000	1.388.617.640	99,93%	20,00	20,00	100,00%	
314	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1259	ABL	001	Desain Besar Penataan Daerah (Desartada	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	3.890.596.000	3.887.547.923	99,92%	1,00	1,00	100,00%	
315	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	ABL	002	Kebijakan terkait kelembagaan dan kepegawaian	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	59.000.000	58.976.500	99,96%	2,00	2,00	100,00%	
316	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	AFA	004	Penyempurnaan Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah	Pedoman	Pedoman	200.000.000	199.800.000	99,90%	1,00	1,00	100,00%	
317	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FAE	003	Monitoring dan evaluasi penerapan PP 18/2016 dan Permendagri pedoman nomenklatur perangkat daerah	Laporan	Laporan	240.000.000	239.527.659	99,80%	1,00	1,00	100,00%	
318	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FBA	002	Fasilitasi penyelenggaraan penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	150.000.000	150.000.000	100,00%	34,00	38,00	111,76%	
319	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FBA	003	Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.751.155.000	1.749.652.912	99,91%	34,00	38,00	111,76%	
320	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6140	FBA	004	Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	299.359.950	99,79%	34,00	34,00	100,00%	
321	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	3991	FBA	001	Fasilitasi Capaian Pembentukan Perda dan Perkada bagi Daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	953.217.000	949.599.177	99,62%	271,00	271,00	100,00%	
322	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	3991	FBA	002	Daerah yang dianalisis kebutuhan pembentukan perda	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	400.000.000	399.056.102	99,76%	15,00	15,00	100,00%	
323	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6116	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	2.200.000.000	2.189.717.042	99,53%	1,00	1,00	100,00%	
324	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBA	956	Layanan BMN	Layanan	Layanan	846.000.000	845.491.407	99,94%	1,00	1,00	100,00%	
325	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	1.176.363.000	1.170.407.925	99,49%	1,00	1,00	100,00%	
326	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	51.249.629.000	51.136.463.485	99,78%	12,00	12,00	100,00%	
327	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	598.600.000	597.687.350	99,85%	1,00	1,00	100,00%	
328	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBD	001	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal	Dokumen	Dokumen	34.631.000	34.531.000	99,71%	1,00	1,00	100,00%	
329	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBD	002	Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	Dokumen	Dokumen	17.350.000	17.250.000	99,42%	1,00	1,00	100,00%	
330	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	435.535.000	435.199.960	99,92%	1,00	1,00	100,00%	
331	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	1.424.256.000	1.423.893.640	99,97%	1,00	1,00	100,00%	
332	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6117	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	1.500.000.000	1.498.460.804	99,90%	1,00	1,00	100,00%	
333	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6118	EBD	965	Layanan Audit Internal	Dokumen	Dokumen	62.821.000	62.720.730	99,84%	1,00	1,00	100,00%	

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6119	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	167.800.000	167.800.000	100,00%	270,00	270,00	100,00%	
335	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6119	EBD	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	Dokumen	225.407.000	225.156.500	99,89%	1,00	1,00	100,00%	
336	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	FAB	007	Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Sistem Informasi	Sistem Informasi	500.000.000	497.496.900	99,50%	1,00	1,00	100,00%	
337	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1269	BAA	001	Blangko KTP-el untuk daerah	Keping	Keping	265.705.967.000	265.702.385.997	100,00%	26.011.119,00	26.011.119,00	100,00%	
338	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1271	FBA	003	Fasilitasi pelayanan Pendaftaran Penduduk	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.712.549.000	1.666.865.678	97,33%	514,00	514,00	100,00%	
339	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1271	FBA	002	Fasilitasi pelayanan pencatatan sipil	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.348.321.000	1.312.485.807	97,34%	21,00	140,00	666,67%	
340	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	CAN	001	Sarpras SIAK serta DC dan DRC Kependudukan	Unit	Unit	21.968.878.000	21.967.387.712	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
341	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	FAB	001	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi	Sistem Informasi	269.482.045.000	269.375.285.890	99,96%	1,00	1,00	100,00%	
342	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	FBA	001	Fasilitasi Online Layanan Jaringan Komunikasi Data	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	133.676.299.000	133.674.527.145	100,00%	548,00	548,00	100,00%	
343	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1271	FBA	001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.582.524.000	5.568.538.530	99,75%	548,00	548,00	100,00%	
344	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	FAB	006	Sistem Informasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Informasi	Sistem Informasi	186.330.000	186.330.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
345	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1271	FBA	004	Fasilitasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.190.489.000	3.149.685.027	98,72%	548,00	548,00	100,00%	
346	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	BDB	001	Fasilitasi Data Kependudukan Nasional	Lembaga	Lembaga	1.993.393.000	1.989.771.533	99,82%	350,00	401,00	114,57%	
347	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	BDB	002	Fasilitasi Data Balikan Nasional	Lembaga	Lembaga	1.180.902.000	1.180.876.026	100,00%	250,00	250,00	100,00%	
348	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1268	FAB	004	Sistem Informasi Integrasi Data dan Dokumen Kependudukan Nasional	Sistem Informasi	Sistem Informasi	32.583.199.000	32.582.904.849	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
349	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1271	FBA	005	Fasilitasi Integrasi data kependudukan Nasional	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	958.646.000	957.724.330	99,90%	42,00	69,00	164,29%	
350	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	1271	FBA	006	Fasilitasi Integrasi data kependudukan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.126.652.000	1.122.907.485	99,67%	38,00	38,00	100,00%	
351	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6120	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	1.554.412.000	1.549.253.852	99,67%	1,00	1,00	100,00%	
352	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBA	956	Layanan BMN	Layanan	Layanan	1.529.078.000	1.518.410.410	99,30%	1,00	1,00	100,00%	
353	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	6.355.018.000	6.337.391.184	99,72%	1,00	1,00	100,00%	
354	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	54.309.996.000	54.074.227.667	99,57%	1,00	1,00	100,00%	
355	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	4.509.722.000	4.240.961.658	94,04%	58,00	58,00	100,00%	
356	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit	1.038.206.000	1.038.205.585	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
357	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBD	001	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satkcr Eselon I - tanpa satker vertikal	Dokumen	Dokumen	22.734.000	19.690.000	86,61%	1,00	1,00	100,00%	
358	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	8.930.016.000	8.909.743.679	99,77%	1,00	1,00	100,00%	
359	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	193.077.000	182.840.414	94,70%	1,00	1,00	100,00%	
360	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	2.977.925.000	2.977.190.229	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
361	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	Dokumen	699.520.000	657.629.273	94,01%	1,00	1,00	100,00%	
362	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	FAB	001	Pemeliharaan Perangkat KTP-el	Sistem Informasi	Sistem Informasi	1.891.254.000	1.883.102.683	99,57%	1,00	1,00	100,00%	
363	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6122	EBA	959	Layanan Protokoler	Layanan	Layanan	230.800.000	157.903.219	68,42%	1,00	1,00	100,00%	
364	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6122	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	2.619.986.000	2.595.707.684	99,07%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
365	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6123	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	1.109.670.000	1.073.379.525	96,73%	1,00	1,00	100,00%	
366	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6123	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	11.579.120.000	11.430.038.029	98,71%	500,00	500,00	100,00%	
367	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CP	6997	BAH	002	Dukungan Manajemen PMU Identitas Digital	layanan	layanan	300.920.000	300.625.518	99,90%	1,00	1,00	100,00%	
368	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6121	EBD	002	Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	Dokumen	Dokumen	3.000.000	2.439.200	81,31%	1,00	1,00	100,00%	
369	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	AAG	001	Permendagri Bidang Perencanan Anggaran Daerah	PerMen	PerMen	150.000.000	148.177.496	98,78%	1,00	1,00	100,00%	
370	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	BMA	001	Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	layanan	layanan	500.000.000	493.830.411	98,77%	1,00	1,00	100,00%	
371	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	010	Provinsi yang Patuh Terhadap hasil Evaluasi Ranperda APBD	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	204.000.000	202.359.686	99,20%	34,00	34,00	100,00%	
372	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	AAG	003	Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	PerMen	PerMen	150.000.000	149.191.731	99,46%	1,00	1,00	100,00%	
373	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Daerah	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	588.626.000	586.009.442	99,56%	1,00	1,00	100,00%	
374	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	AEG	003	Lokakarya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan	Kegiatan	455.479.000	451.474.906	99,12%	2,00	2,00	100,00%	
375	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	BMA	003	Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	layanan	layanan	150.000.000	149.875.068	99,92%	1,00	1,00	100,00%	
376	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	015	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Penerimaan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	206.400.000	206.200.370	99,90%	200,00	200,00	100,00%	
377	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1276	AAG	001	Permendagri Bidang Dana Transfer dan Pinjaman Daerah	PerMen	PerMen	150.000.000	149.876.609	99,92%	1,00	1,00	100,00%	
378	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1276	BMA	001	Data dan Informasi Pengelolaan Dana Transfer dan Pinjaman Daerah	layanan	layanan	475.000.000	473.605.740	99,71%	1,00	1,00	100,00%	
379	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	1276	FBA	001	Daerah yang Optimal Memanfaatkan Dana Transfer	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.441.632.000	1.434.138.885	99,48%	434,00	434,00	100,00%	
380	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	AAG	002	Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	PerMen	PerMen	113.100.000	112.839.379	99,77%	1,00	1,00	100,00%	
381	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	BMA	002	Data dan Informasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	layanan	layanan	479.168.000	467.219.655	97,51%	1,00	1,00	100,00%	
382	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	011	Provinsi yang Mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	349.000.000	341.838.744	97,95%	34,00	34,00	100,00%	
383	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	012	Daerah yang LKPDnya Akuntabel	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	299.577.432	99,86%	434,00	434,00	100,00%	
384	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	013	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pengeluaran Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	430.000.000	429.535.981	99,89%	426,00	426,00	100,00%	
385	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	014	Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungajawaban	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	754.550.000	752.704.020	99,76%	426,00	426,00	100,00%	
386	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	017	Daerah yang memenuhi Pendanaan Pilkada Serentak	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	650.000.000	648.676.468	99,80%	541,00	541,00	100,00%	
387	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	018	Daerah Otonom Baru yang di fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.736.000.000	4.681.450.324	98,85%	4,00	4,00	100,00%	
388	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	AEG	002	Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan	Kegiatan	1.211.926.000	1.175.049.454	96,96%	3,00	3,00	100,00%	
389	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	AAG	004	Permendagri Bidang Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD	PerMen	PerMen	300.000.000	295.214.600	98,40%	2,00	2,00	100,00%	
390	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	-	-	CM	6141	FBA	016	Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	497.760.000	496.298.659	99,71%	542,00	542,00	100,00%	
391	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6124	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	576.775.000	572.625.080	99,28%	1,00	1,00	100,00%	
392	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6124	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Layanan	250.000.000	248.975.158	99,59%	1,00	1,00	100,00%	
393	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBA	956	Layanan BMN	Layanan	Layanan	175.000.000	169.876.812	97,07%	1,00	1,00	100,00%	
394	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	1.798.348.000	1.787.161.499	99,38%	1,00	1,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
395	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	50.365.397.000	50.272.994.085	99,82%	1,00	1,00	100,00%	
396	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	910.000.000	906.201.727	99,58%	30,00	30,00	100,00%	
397	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBD	001	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	51.300.000	51.280.500	99,96%	1,00	1,00	100,00%	
398	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBD	002	Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	17.100.000	17.011.000	99,48%	1,00	1,00	100,00%	
399	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	341.702.000	340.945.837	99,78%	1,00	1,00	100,00%	
400	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	240.000.000	236.661.627	98,61%	2,00	2,00	100,00%	
401	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6125	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	660.000.000	655.467.643	99,31%	1,00	1,00	100,00%	
402	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6126	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	458.000.000	456.034.220	99,57%	1,00	1,00	100,00%	
403	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6126	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	210.000.000	209.693.903	99,85%	1,00	1,00	100,00%	
404	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6127	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	480.000.000	474.719.215	98,90%	1,00	1,00	100,00%	
405	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6127	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	400.000.000	351.517.609	87,88%	270,00	270,00	100,00%	
406	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6128	EBA	957	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	Layanan	Layanan	115.000.000	114.844.900	99,87%	1,00	1,00	100,00%	
407	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	38.043.733.000	37.817.819.429	99,41%	1,00	1,00	100,00%	
408	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	800.797.000	798.932.000	99,77%	40,00	40,00	100,00%	
409	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit	386.104.000	385.960.551	99,96%	4,00	4,00	100,00%	
410	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBD	001	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	26.540.000	26.538.100	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
411	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBD	002	Dokumen Lakin Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	Dokumen	Dokumen	12.650.000	12.647.400	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
412	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBD	004	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	305.622.000	305.593.059	99,99%	1,00	1,00	100,00%	
413	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	239.197.000	239.194.300	100,00%	5,00	5,00	100,00%	
414	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Dokumen	630.000.000	629.931.918	99,99%	2,00	2,00	100,00%	
415	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6130	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	20.000.000	20.000.000	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
416	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6131	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	700.000.000	699.008.135	99,86%	2,00	2,00	100,00%	
417	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6131	EBC	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	185.090.000	184.727.377	99,80%	20,00	20,00	100,00%	
418	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	1.869.405.000	1.864.881.800	99,76%	1,00	1,00	100,00%	
419	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6129	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Dokumen	596.201.000	596.053.790	99,98%	5,00	5,00	100,00%	
420	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	ABL	001	Rekomendasi Hasil Kelitbangan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	250.000.000	249.994.317	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
421	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	FAB	001	Pengembangan Aplikasi Pengukuran Pegelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi	Sistem Informasi	100.000.000	99.204.000	99,20%	1,00	1,00	100,00%	
422	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	FBA	001	Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	720.000.000	719.994.657	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
423	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	ABL	003	Rekomendasi hasil kelitbangan lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	250.000.000	249.990.890	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
424	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	ABL	005	Rekomendasi Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	250.000.000	249.996.521	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
425	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	FBA	002	Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	680.000.000	679.996.814	100,00%	34,00	34,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	ABL	006	Rekomendasi hasil kelitbangan lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	523.800.000	523.769.162	99,99%	2,00	2,00	100,00%	
427	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	FBA	003	Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	375.500.000	375.492.932	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
428	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6143	FBA	001	Fasilitasi dan Pembinaan Strategi Kebijakan di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.057.301.000	1.057.170.157	99,99%	15,00	15,00	100,00%	
429	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6142	ABL	008	Forum Diskusi Aktual/ Diskusi Publik	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	564.490.000	564.489.050	100,00%	3,00	3,00	100,00%	
430	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CM	1285	ADI	001	Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Orang	1.447.409.000	1.447.402.792	100,00%	1.372,00	1.504,00	109,62%	
431	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CM	1285	AFA	001	NSPK Standarisasi dan Sertifikasi	NSPK	NSPK	910.748.000	910.501.666	99,97%	8,00	8,00	100,00%	
432	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CM	1285	AFA	002	Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	NSPK	NSPK	599.135.000	598.498.750	99,89%	7,00	7,00	100,00%	
433	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CM	1285	AFA	003	Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	NSPK	NSPK	172.027.000	171.337.802	99,60%	2,00	2,00	100,00%	
434	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	CM	1285	AFA	004	Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	NSPK	NSPK	885.800.000	858.060.000	96,87%	4,00	4,00	100,00%	
435	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6132	EBA	957	Layanan Hukum	Layanan	Layanan	200.000.000	199.595.686	99,80%	1,00	1,00	100,00%	
436	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	Unit	11.973.056.000	11.966.080.227	99,94%	283,00	283,00	100,00%	
437	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBD	001	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 Dengan Unit Vertikal 1 S/D 6 Satker	Layanan	Layanan	200.000.000	199.818.427	99,91%	1,00	1,00	100,00%	
438	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBD	002	Dokumen Lakin Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s/d 6 Unit satker	Dokumen	Dokumen	140.712.000	140.474.912	99,83%	1,00	1,00	100,00%	
439	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBD	003	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen	Dokumen	1.604.374.000	1.603.063.892	99,92%	6,00	6,00	100,00%	
440	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBD	004	Pengelolaan keuangan	Dokumen	Dokumen	1.252.783.000	1.251.791.962	99,92%	6,00	6,00	100,00%	
441	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Dokumen	912.619.000	910.781.482	99,80%	5,00	5,00	100,00%	
442	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6134	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	Layanan	360.000.000	359.940.175	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
443	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6134	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Layanan	518.280.000	518.192.695	99,98%	1,00	1,00	100,00%	
444	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6135	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Layanan	303.362.000	302.915.716	99,85%	1,00	1,00	100,00%	
445	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6135	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Orang	1.129.275.000	1.118.764.750	99,07%	587,00	601,00	102,39%	
446	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBA	962	Layanan Umum	Layanan	Layanan	2.537.280.000	2.535.452.192	99,93%	6,00	6,00	100,00%	
447	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	-	-	WA	6133	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan	132.603.523.000	132.496.702.204	99,92%	6,00	6,00	100,00%	
448	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	BDB	001	Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	Lembaga	Lembaga	74.000.000	75.848.134	102,50%	1,00	1,00	100,00%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
449	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	001	Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi	Orang	Orang	457.138.000	461.935.000	101,05%	214,00	260,00	121,50%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
450	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S01	Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	Orang	Orang	76.920.000	76.395.000	99,32%	30,00	30,00	100,00%	
451	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S02	Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertfikasi	Orang	Orang	87.875.000	87.834.200	99,95%	30,00	30,00	100,00%	
452	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	002	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Orang	4.470.531.000	4.182.435.187	93,56%	2.190,00	2.190,00	100,00%	

LAMPIRAN IV

Rincian Fungsi Sub Fungsi (Kategori Non Prioritas Nasional) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
453	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S03	Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	Orang	74.720.000	74.714.000	99,99%	30,00	30,00	100,00%	
454	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	ABQ	001	Penyusunan Rekomendasi Bidang Kepamongprajaan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	46.353.000	46.351.666	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
455	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	003	Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	Orang	Orang	14.625.027.000	14.614.024.633	99,92%	2.690,00	2.895,00	107,62%	
456	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S04	Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	Orang	Orang	72.920.000	72.249.000	99,08%	30,00	30,00	100,00%	
457	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	004	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	Orang	Orang	4.449.070.000	4.372.011.892	98,27%	1.667,00	1.667,00	100,00%	
458	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S05	Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	Orang	Orang	75.795.000	75.750.000	99,94%	30,00	30,00	100,00%	
459	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S06	Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	Orang	Orang	137.222.000	137.164.000	99,96%	30,00	30,00	100,00%	
460	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	S07	Pengembangan Kompetensi 14 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	Orang	Orang	171.550.000	171.478.321	99,96%	30,00	30,00	100,00%	
461	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	-	-	CM	6144	FAC	005	Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	Orang	Orang	34.024.120.000	33.868.845.686	99,54%	6.809,00	8.025,00	117,86%	
Jumlah													**4.026.137.608.000**	**3.913.239.842.961**	**97,20%**				**-**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Dalam Negeri Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Kementerian PPN/Bappenas Koordinator Bidang Wawasan Kebangsaan	Direktorat Jenderal Anggaran Kasubdit Anggaran Bidang Politik
I Nengah Sandiyasa 197412082006041000	Maharani 198311042009012005	Itjok Henandarto 197208291999031001

LAMPIRAN V

RINCIAN PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, KEGIATAN, PROGRAM, OUTPUT DAN TARGET DARI MASING-MASING YANG MENJADI PRIORITAS NASIONAL

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	002	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		700.000.000	699.998.871	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
2	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	003	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		750.000.000	749.998.974	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
3	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	004	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.450.000.000	1.449.362.502	99,96%	34,00	34,00	100,00%	
4	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	006	Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		600.000.000	599.988.935	100,00%	23,00	23,00	100,00%	
5	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	001	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.400.000.000	1.399.997.128	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
6	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	PBC	001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan		1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	2,00	2,00	100,00%	
7	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QEI	001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga		126.376.418.000	126.376.418.000	100,00%	9,00	9,00	100,00%	
8	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	002	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang		1.149.900.000	1.149.900.000	100,00%	400,00	400,00	100,00%	
9	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	UBA	001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.700.000.000	1.699.903.130	99,99%	15,00	15,00	100,00%	
10	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	Orang		4.000.000.000	4.000.000.000	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	
11	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	003	Kapasitas pengurus ormas	Orang		1.052.400.000	1.052.317.724	99,99%	1.200,00	1.200,00	100,00%	
12	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1234	UAC	001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Orang		7.500.000.000	7.499.394.432	99,99%	750,00	750,00	100,00%	
13	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1234	UBA	001	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.265.410.000	1.265.401.691	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
14	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1233	UBA	005	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	799.970.950	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
15	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	PBL	001	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	Rekomendasi Kebijakan		85.927.765.000	84.998.983.058	98,92%	22,00	22,00	100,00%	
16	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UAE	001	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	Laporan		2.554.158.000	2.552.669.729	99,94%	34,00	34,00	100,00%	
17	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.221.662.000	1.217.798.323	99,68%	80,00	80,00	100,00%	
18	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.292.336.000	2.288.018.560	99,81%	68,00	68,00	100,00%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	004	Asistensi kerja sama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)		967.620.000	956.922.522	98,89%	46,00	46,00	100,00%	
20	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	005	Pengintegrasian perjanjian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)		801.330.000	795.697.936	99,30%	34,00	34,00	100,00%	
21	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	003	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.093.810.000	1.092.989.717	99,93%	426,00	426,00	100,00%	
22	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	001	Penerapan SPM sub bidang Bencana	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.527.078.000	1.524.909.874	99,86%	468,00	468,00	100,00%	
23	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	002	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)		958.878.000	951.438.122	99,22%	426,00	426,00	100,00%	
24	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	005	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Daerah (Prov/Kab/Kota)		880.000.000	879.052.916	99,89%	34,00	34,00	100,00%	
25	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	006	Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		513.998.000	513.660.808	99,93%	34,00	34,00	100,00%	
26	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	1237	UBA	006	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.857.531.000	1.857.142.648	99,98%	76,00	76,00	100,00%	
27	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	CM	6136	UBA	004	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.252.800.000	1.239.784.472	98,96%	34,00	34,00	100,00%	
28	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	PEC	002	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	Kesepakatan		1.028.000.000	1.007.926.557	98,05%	6,00	6,00	100,00%	
29	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	Rekomendasi Kebijakan		3.500.000.000	3.492.362.004	99,78%	43,00	43,00	100,00%	
30	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	UBA	001	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.760.000.000	1.749.146.568	99,38%	14,00	14,00	100,00%	
31	010	Kementerian Dalam Negeri	0190	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	1241	PEC	001	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	Kesepakatan		3.736.429.000	3.734.103.127	99,94%	5,00	5,00	100,00%	
32	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1244	UBB	013	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	Desa		2.000.000.000	1.997.152.165	99,86%	150,00	150,00	100,00%	
33	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1244	UBB	014	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa		1.000.000.000	996.969.901	99,70%	105,00	105,00	100,00%	
34	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6484	UBB	001	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Desa		10.904.875.000	10.027.592.967	91,96%	1.034,00	618,00	59,77%	
35	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang		10.405.796.000	10.388.871.065	99,84%	3.240,00	3.240,00	100,00%	
36	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	012	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		947.381.000	947.380.424	100,00%	30,00	34,00	113,33%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	008	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		660.000.000	658.958.427	99,84%	18,00	26,00	144,44%	
38	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	010	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Daerah (Prov/Kab/Kota)		604.000.000	602.964.295	99,83%	19,00	19,00	100,00%	
39	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	009	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS	Daerah (Prov/Kab/Kota)		831.827.000	830.924.183	99,89%	27,00	27,00	100,00%	
40	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	028	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	Daerah (Prov/Kab/Kota)		741.150.000	741.116.454	100,00%	34,00	38,00	111,76%	
41	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	007	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.297.323.000	1.295.103.994	99,83%	7,00	7,00	100,00%	
42	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	003	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		931.680.000	916.690.967	98,39%	412,00	515,00	125,00%	
43	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	004	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Daerah (Prov/Kab/Kota)		791.200.000	790.747.711	99,94%	412,00	509,00	123,54%	
44	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	005	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	Daerah (Prov/Kab/Kota)		737.500.000	736.548.964	99,87%	412,00	512,00	124,27%	
45	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	999.999.500	100,00%	412,00	509,00	123,54%	
46	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	002	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	Daerah (Prov/Kab/Kota)		841.708.000	841.706.647	100,00%	412,00	507,00	123,06%	
47	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	006	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		959.081.000	957.522.743	99,84%	412,00	511,00	124,03%	
48	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	023	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	Daerah (Prov/Kab/Kota)		576.000.000	563.215.001	97,78%	60,00	60,00	100,00%	
49	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan *stunting*	Daerah (Prov/Kab/Kota)		462.500.000	457.889.450	99,00%	514,00	514,00	100,00%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	022	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	Daerah (Prov/Kab/Kota)		473.947.000	472.646.111	99,73%	7,00	7,00	100,00%	
51	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	026	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		570.924.000	568.033.752	99,49%	28,00	28,00	100,00%	
52	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	024	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		554.193.000	550.737.904	99,38%	28,00	28,00	100,00%	
53	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		429.193.000	423.446.415	98,66%	26,00	26,00	100,00%	
54	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	027	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		718.654.000	717.583.603	99,85%	30,00	30,00	100,00%	
55	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	021	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	Daerah (Prov/Kab/Kota)		495.972.000	495.812.808	99,97%	7,00	7,00	100,00%	
56	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CM	6139	UBA	029	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		255.575.000	255.004.218	99,78%	58,50	59,00	100,85%	
57	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	018	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	999.413.028	99,94%	48,00	48,00	100,00%	
58	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		879.083.000	878.924.218	99,98%	34,00	34,00	100,00%	
59	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		607.800.000	603.216.147	99,25%	34,00	34,00	100,00%	
60	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)		651.950.000	646.867.356	99,22%	34,00	34,00	100,00%	
61	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.500.000.000	1.499.992.673	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
62	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		680.000.000	678.505.188	99,78%	34,00	34,00	100,00%	
63	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	019	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Daerah (Prov/Kab/Kota)		600.000.000	600.000.000	100,00%	24,00	34,00	141,67%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	030	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		411.250.000	410.734.136	99,87%	8,00	8,00	100,00%	
65	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	020	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		890.978.000	890.513.870	99,95%	34,00	34,00	100,00%	
66	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	1254	UAB	001	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	Sistem Informasi		796.932.000	796.931.382	100,00%	1,00	1,00	100,00%	
67	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	005	Rekomendasi Qanun/Pergub Aceh	Rekomendasi Kebijakan		480.000.000	479.340.220	99,86%	1,00	2,00	200,00%	
68	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1261	UBA	001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.858.200.000	2.850.738.668	99,74%	18,00	12,00	66,67%	
69	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1261	UBA	003	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.056.000.000	1.054.458.588	99,85%	234,00	48,00	20,51%	
70	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PAG	001	Permendagri mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan, Tata Cara Seleksi, Materi Seleksi, dan Indikator Penilaian Calon Anggota Pansel Provinsi	PerMen		160.000.000	159.748.000	99,84%	1,00	1,00	100,00%	
71	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	001	Rekomendasi kebijakan DPOD dalam penyelenggaaran pemerintahan dan keuangan daerah	Rekomendasi Kebijakan		2.352.085.000	2.351.743.651	99,99%	4,00	4,00	100,00%	
72	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	001	Daerah otonom hasil pemekaran yang difasilitasi penyelesaian permasalahan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.744.992.000	2.739.642.376	99,81%	17,00	17,00	100,00%	
73	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	002	Provinsi yang disupervisi kinerjanya dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.510.170.000	2.508.551.333	99,94%	5,00	9,00	180,00%	
74	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6140	PAC	001	Perubahan kedua PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	RPP		500.000.000	499.388.700	99,88%	1,00	1,00	100,00%	
75	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	PBL	001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	Rekomendasi Kebijakan		525.000.000	520.551.122	99,15%	3,00	3,00	100,00%	
76	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	QMA	001	*Database* peraturan daerah	Data		1.056.000.000	1.049.145.725	99,35%	1,00	1,00	100,00%	
77	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	UAE	001	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil *review* Kemendagri	Rekomendasi		1.424.815.000	1.420.683.307	99,71%	23,00	23,00	100,00%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	UBA	001	Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.387.083.000	1.380.340.002	99,51%	30,00	30,00	100,00%	
79	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PAH	006	Revisi UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Prov. DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI	peraturan		800.000.000	793.801.850	99,23%	1,00	1,00	100,00%	
80	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	004	Rekomendasi Perdais/Pergub DIY	Rekomendasi Kebijakan		400.000.000	399.108.400	99,78%	1,00	2,00	200,00%	
81	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	003	Fasilitasi Pelaksanaan Program Afirmasi Pembangunan SDM di Wilayah Papua	Provinsi		880.000.000	875.992.553	99,54%	1,00	6,00	600,00%	
82	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PAG	002	Permendagri mengenai Tata Cara Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Daerah Otonom hasil pemekaran di Provinsi Papua	PerMen		160.000.000	159.669.000	99,79%	1,00	1,00	100,00%	
83	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	002	Pemantapan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua	Rekomendasi Kebijakan		1.080.000.000	1.079.591.030	99,96%	2,00	6,00	300,00%	
84	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	6140	UBA	006	Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.600.000.000	1.599.955.000	100,00%	34,00	34,00	100,00%	
85	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	6140	UBA	001	Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	798.915.000	99,86%	170,00	170,00	100,00%	
86	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	001	Akta Kematian yang diterbitkan	Akta		478.603.000	455.262.849	95,12%	250.000,00	2.228.368,00	891,35%	
87	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	002	Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta		372.620.000	371.270.019	99,64%	30.000,00	218.785,00	729,28%	
88	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	003	Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta		319.100.000	314.390.892	98,52%	4.000,00	15.035,00	375,88%	
89	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta		1.258.433.000	1.244.220.020	98,87%	400.000,00	1.144.569,00	286,14%	
90	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1271	UBA	001	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.000.000.000	1.998.195.545	99,91%	15,00	18,00	120,00%	
91	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1268	QAB	001	Pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK Nasional	Lembaga		4.459.660.000	4.453.614.899	99,86%	1.000,00	1.005,00	100,50%	
92	010	Kementerian Dalam Negeri	0103	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CP	1271	UBA	002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.461.940.000	2.457.974.668	99,84%	5,00	5,00	100,00%	
93	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	001	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	Daerah (Prov/Kab/Kota)		785.000.000	774.248.874	98,63%	34,00	34,00	100,00%	
94	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	002	Daerah yang Memenuhi Indikator *Mandatory Spending*	Daerah (Prov/Kab/Kota)		700.000.000	698.597.721	99,80%	450,00	450,00	100,00%	
95	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	004	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	795.699.222	99,46%	426,00	426,00	100,00%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	006	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.286.000.000	1.269.293.806	98,70%	455,00	455,00	100,00%	
97	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	007	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.578.685.000	1.572.147.517	99,59%	426,00	426,00	100,00%	
98	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1276	UBA	002	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		834.280.000	833.771.780	99,94%	65,00	65,00	100,00%	
99	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	005	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	Daerah (Prov/Kab/Kota)		365.000.000	357.891.139	98,05%	34,00	34,00	100,00%	
100	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	008	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.338.664.000	1.336.574.213	99,84%	225,00	225,00	100,00%	
101	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	009	Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.021.680.000	1.018.296.858	99,67%	478,00	478,00	100,00%	
102	010	Kementerian Dalam Negeri	0101	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6141	UBA	003	Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.339.780.000	1.330.685.678	99,32%	426,00	426,00	100,00%	
103	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	001	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	999.996.004	100,00%	176,00	176,00	100,00%	
104	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	002	Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas)	Daerah (Prov/Kab/Kota)		648.288.000	683.730.496	105,47%	34,00	34,00	100,00%	Realisasi Belanja Bruto lebih besar dari pagu belanja disebabkan terdapat pengembalian belanja
105	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	003	Penerapan *Pilot Project* Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000.000	799.698.298	99,96%	5,00	5,00	100,00%	
106	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	004	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000.000	998.380.898	99,84%	542,00	542,00	100,00%	
107	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	004	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	Orang		251.920.000	251.920.000	100,00%	182,00	913,00	501,65%	
108	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang Meningkat Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Pusat	Orang		580.760.000	579.039.122	99,70%	390,00	420,00	107,69%	
109	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	003	Aparatur yang meningkat Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	Orang		216.920.000	216.919.844	100,00%	180,00	188,00	104,44%	

LAMPIRAN V

Rincian Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	005	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Legal *Drafting* (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	Orang		433.840.000	433.836.886	100,00%	300,00	300,00	100,00%	
111	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	006	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Orang		1.032.325.000	989.446.374	95,85%	272,00	272,00	100,00%	
112	010	Kementerian Dalam Negeri	0106	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	007	Aparatur yang Meningkat Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	Orang		867.680.000	855.684.379	98,62%	600,00	600,00	100,00%	
Jumlah													**359.831.518.000**	**357.647.129.471**	**99,39%**				

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan

I Nengah Sandiyasa
197412082006041000

Kementerian PPN/Bappenas
Koordinator Bidang Wawasan Kebangsaan

Maharani
198311042009012005

Direktorat Jenderal Anggaran
Kasubdit Anggaran Bidang Politik

Itjok Henandarto
197208291999031001

LAMPIRAN VI

BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN VI

BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Es I	Kode Satker	JK	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Kode Periode	Belanja s.d. 30 Juni 2023 (Rp)	Kode Periode	Belanja s.d. 31 Desember 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Belanja COVID-19 Setelah 30 Juni 2023	KETERANGAN (PENGGUNAAN)	KETERANGAN (KENAPA TIDAK DILAKUKAN REVISI)
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	12.863.859	2023-14	15.591.215	2.727.356	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Dalam rangka menghindari ketidaksesuaian masing-masing akun belanja dengan beban sebagai dampak dari revisi/ralat Akun COVID-19 yang membutuhkan jurnal manual, maka tidak dilakukan ralat akun di semester II
04	179223	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	6.052.000	2023-14	11.752.000	5.700.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	189087	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.000.000	2023-14	2.500.000	500.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	209095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	1.500.000	1.500.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.600.000	2023-14	8.000.000	6.400.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	500.000	500.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	309148	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.842.000	2023-14	2.418.000	576.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	4.800.000	2023-14	7.400.000	2.600.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	340166	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	2.000.000	2.000.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.986.000	2023-14	5.373.500	3.387.500	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	433345	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	1.275.000	1.275.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	433348	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	70.000	70.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.800.000	2023-14	4.000.000	2.200.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484115	DK	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	1.615.470	1.615.470	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484127	DK	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.400.000	2023-14	5.400.000	3.000.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484132	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.000.000	2023-14	3.615.470	1.615.470	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484138	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	3.230.941	3.230.941	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484145	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.472.220	2023-14	2.672.220	200.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484146	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	2.850.000	2.850.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484147	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	500.000	500.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484150	DK	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	2.400.000	2.400.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	4.800.000	2023-14	6.400.000	1.600.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	800.000	800.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484191	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	400.000	400.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484194	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	1.500.000	1.500.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	150.000	150.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.200.000	2023-14	2.750.000	1.550.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484200	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	285.096	285.096	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484203	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	-	2023-14	7.079.500	7.079.500	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484209	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	306.900	2023-14	3.056.900	2.750.000	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	

BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Es I	Kode Satker	JK	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Kode Periode	Belanja s.d. 30 Juni 2023 (Rp)	Kode Periode	Belanja s.d. 31 Desember 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Belanja COVID-19 Setelah 30 Juni 2023	KETERANGAN (PENGGUNAAN)	KETERANGAN (KENAPA TIDAK DILAKUKAN REVISI)
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	94.050.063	2023-14	98.902.922	4.852.859	v	biaya langganan layanan Virtual Meeting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan rapat/koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal Ditjen Bina Pembanguan Daerah.	Tidak memiliki pagu yang mencukupi dalam komponen RO untuk dilakukan koreksi SPM atas Belanja yang sudah terealisasi
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.513.654	2023-14	2.013.929	500.275	v	biaya langganan layanan Virtual Meeting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan rapat/koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal Ditjen Bina Pembanguan Daerah.	
04	219062	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	3.974.683	2023-14	3.974.683	-	v	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	46.193.760	2023-14	46.193.760	-	x	Pembayaran zoom video communication pada kantor Itjen Dagri bulan Jan sd Des TA 2023	
04	099438	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	3.800.000	2023-14	3.800.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	139078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.000.000	2023-14	2.000.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	149130	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	130.000	2023-14	130.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	199080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	50.000	2023-14	50.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	289174	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	4.800.000	2023-14	4.800.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.697.000	2023-14	2.697.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484102	DK	BAPPEDA PROVINSI ACEH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.764.122	2023-14	2.764.122	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484128	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	400.000	2023-14	400.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484160	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	6.500.000	2023-14	6.500.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484161	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.400.000	2023-14	2.400.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484166	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	2.154.200	2023-14	2.154.200	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	400.000	2023-14	400.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
04	484181	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	1.920.000	2023-14	1.920.000	-	x	Belanja Layanan Virtual Meeting dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan	
12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	646.188	2023-14	646.188	-	x	Pembelian Lisensi Zoom Meeting	
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	3.226.933	2023-14	3.226.933	-	x	Pembelian Lisensi Zoom Meeting	
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	9.160.000	2023-14	9.160.000	-	x	Pembelian Paket Data kepada Peserta Diklat	
12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	71.250.000	2023-14	71.250.000	-	x	Pembelian Paket Data kepada Peserta Diklat	
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2023-06	520.000	2023-14	-	(520.000)			
TOTAL							**306.673.582**		**372.469.049**	**65.795.467**			

LAMPIRAN VII

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN, SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER PER 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN VII

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN, SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER

PER 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2023	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DESEMBER 2023	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2023	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2023	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2023	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DESEMBER 2023	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.828.222	40.112.385	(31.284.163)	-	-	-	-	-	-
	01	352593	KP	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000	-	290.000	-	-	-	-	-	-
2	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	2.343.805.012	2.128.986.750	214.818.262	37.237.600	102.203.082	(64.965.482)	-	-	-	-	-	-
3	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.207.268	-	22.207.268	-	-	-	-	-	-
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	-	-	-	4.522.600	(4.522.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	4.634.820	-	4.634.820	-	-	-	49.876.253	2.864.750	47.011.503	-	-	-	-	-	-
6	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.838.863	1.000.000	177.838.863	-	-	-	-	-	-
7	04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	42.073.185	-	42.073.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.415.205	(14.415.205)	-	-	-	-	-	-
9	04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	712.597	(712.597)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.670.000	7.597.000	7.073.000	-	-	-	-	-	-
11	04	433350	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	1.643.765	(1.643.765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-
13	04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	1.115	-	1.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	(1.800.000)	-	-	-
16	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.835	97.857	186.978	-	19.550.000	(19.550.000)	231.332.699.525	-	231.332.699.525
17	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.328	(101.328)	-	-	-	-	-	-
18	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.016.598	-	16.016.598	-	-	-	-	-	-
TOTAL					**52.074.300**	**2.356.362**	**49.717.938**	**4.634.820**	**4.522.600**	**112.220**	**2.343.805.012**	**2.128.986.750**	**214.818.262**	**328.249.699**	**168.391.607**	**159.858.092**	**-**	**21.350.000**	**(21.350.000)**	**231.332.699.525**	**-**	**231.332.699.525**

LAMPIRAN VIII

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

LAMPIRAN VIII

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN								
1	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	4.634.820	03-Jan-24	7F3065UFPHC8TDV0	4.634.820	
2	04	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	42.073.185	03-Jan-24	DB6DD0JUQHTKU6K4	42.073.185	
3	04	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	10.000.000	02-Jan-24	B6B5C5UFPHBLQUQ0	10.000.000	
4	04	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	1.115	03-Jan-24	952BA0JUQHTKU77G	1.115	
JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				**56.709.120**			**56.709.120**	
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN								
1	01	448302	IPDN JATINANGOR	2.343.805.012	31-Jan-24	9C1657QLUONTMIVQ	957.005.011	
						EF3716U8EU5H981P	1.114.050.001	
						ACD3748VVEEC2178	272.750.000	
JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN				**2.343.805.012**			**2.343.805.012**	
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS								
1	01	403200	SETJEN	8.828.222	03-Jan-24	49A550NA043UNF8C	471.911	
					05-Jan-24	B76E06U8EU4NQK75	8.356.311	
2	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	2.490.000	01-Apr-24	C97F848VVEKAJU7H	2.945.000	Terdapat kelebihan penyetoran sebesar Rp455.000,00 atas Pajak Honor Jasa Profesi Tahun 2023
				8.140.000	29-Apr-24	BBB551JNFV031VRN	8.140.000	
				11.673.253	19-Feb-24	BB5B31JNFUPON3CT	230.400	
					19-Feb-24	4D7B11JNFUPQM8LJ	1.124.965	
					19-Feb-24	SE21E1JNFUPON49A	447.000	
					19-Feb-24	F37213CIFJUHH4FA	4.161.237	
					19-Feb-24	1C3A355DF93AB587	5.709.651	
				27.573.000				Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum diberikan ke penerima hak sampai dengan berakhirnya periode pelaporan 31 Desember 2023
3	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	37.237.600	28-Mar-24	0FAA62G4VPFFO0TL	37.237.600	
4	01	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	290.000	22-Feb-24	F13063CIFJUJJP68	290.000	
5	01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	22.207.268	16-Feb-24	CDA290T7EK701API	1.363.636	
					16-Feb-24	71D2F2M2E9BPIE2P	204.545	
					16-Feb-24	047271PKUETH2BBC	1.110.000	
					16-Feb-24	F3ADB4ETDUKML1GT	500.000	
					16-Feb-24	A429C5BATP73VFS4	636.364	
					16-Feb-24	C457D3IFU42BEETQ	95.455	
					16-Feb-24	918614ETDUKUC8HB	8.386.364	
					16-Feb-24	1C9DF67ODJPNJICT	1.257.955	
					16-Feb-24	571D55BATP7KJ7C8	1.363.636	
					16-Feb-24	250F62M2E9GFKORB	204.545	
					16-Feb-24	E18F467ODJQ50POG	1.009.091	
					16-Feb-24	8C72A745TECHNVRC	151.364	
					16-Feb-24	B69443IFU44SJ4MG	1.018.182	
					16-Feb-24	CCC455BATP9LNATH	152.727	
					16-Feb-24	405FC3IFU44TEPDB	338.182	
					16-Feb-24	E3DBD5BATP9MI564	50.727	
					16-Feb-24	BAF233IFU44U6UU2	113.636	
					16-Feb-24	2A1453IFU44UME2N	17.045	
					16-Feb-24	82596745TEEGQEL7	568.182	
					16-Feb-24	870F82M2E9IJ0P10	85.227	
					16-Feb-24	8930D0T7EKF2S7G0	32.550	
					16-Feb-24	44B853IFU469PDUP	45.000	
					16-Feb-24	5A7AA0T7EKF5EECI	800.000	
					16-Feb-24	321D55BATPB34KOK	120.000	
					16-Feb-24	2F2120T7EKF64R53	16.275	
					16-Feb-24	B940A4ETDUOP8RB9	40.275	
					16-Feb-24	2F81C1PKUF1KFBT3	245.455	
					16-Feb-24	ED0824ETDUOPVNPF	36.818	
					16-Feb-24	604A81PKUF1LD46B	181.818	
					16-Feb-24	783845BATPB7A39E	27.273	
					16-Feb-24	5D0510T7EKFA27SJ	227.273	
					16-Feb-24	32A410T7EKFAE7MS	34.091	
					16-Feb-24	47830745TEG1JTDU	55.800	
					16-Feb-24	F92965BATPB97LRV	90.909	
					16-Feb-24	D674D67ODJTLS64N	13.636	
					16-Feb-24	E06BB5BATPB9P4J7	163.636	
					16-Feb-24	497C55BATPB56TO9	50.550	
					16-Feb-24	AC6424ETDUP10OT7	18.000	
					16-Feb-24	1769B00PUPJR3GK5	55.364	
					16-Feb-24	1DCE21PKUEOJ5DVO	369.091	
					16-Feb-24	126421PKUET67367	831.818	
					16-Feb-24	6FAD74ETDUKBRTG3	124.773	

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
6	04	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. PAPUA	14.670.000				Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum diberikan ke penerima hak sampai dengan berakhirnya periode pelaporan 31 Desember 2023
7	04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	178.838.863	04-Apr-24	46F5A1JNFUVBIU0P	1.400.599	
					04-Apr-24	ED29A7QLUP02EF12		
					05-Apr-24	28FF53CIFK45GO05		
					04-Apr-24	3E7D51JNFUVBJOPN	79.000	
					16-Feb-24	952F555DF9372GGE	2.474.780	
					04-Apr-24	BD9236U8EUDM11JJ	178.000	
					28-Mar-24	C29F661QV3P1B0DL	1.872.000	
					16-Feb-24	7D7513CIFJUGBGGG	250.000	
					22-Feb-24	D59B80NA047FHDPF	1.272.200	
					29-Feb-24	ACF430NA047N5TT1	26.000	
					15-Feb-24	AE3B60NA04792NUO	296.700	
					04-Apr-24	24FC961QV3R9KOIQ	1.618.000	
					05-Apr-24	CED5F61QV3RANNT8		
					13-Feb-24	C3F4D7QLUOQC96E8	1.724.400	
					13-Mar-24	3033C6U8EUAVFIOM	22.990.236	
					4 April 2024	74E0961QV3R9K0SK	63.000	
					4 April 2024	8BBF661QV3R9KFN6	1.198.250	
					16-Feb-24	952F555DF9372GGE	1.032.400	
					22-Feb-24	D59B80NA047FHDPF	212.000	
					13-Feb-24	C3F4D7QLUOQC96E8	367.812	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	1.974.000	
					15-Feb-24	AE3B60NA04792NUO	1.160.000	
					03-Apr-24	243302G4VPHMT8E7	353.000	
					16-Apr-24	93D361JNFUVMIK25		
					28-Mar-24	C29F661QV3P1B0DL	1.990.000	
					16-Feb-24	478042G4VPC51E39	1.394.000	
					13-Feb-24	404460NA04791SCK	1.936.794	
					3 April 2024	243302G4VPHMT8E7	594.000	
					28-Mar-24	A5DBF61QV3P1A6LA	45.000	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	1.055.000	
					13-Feb-24	404460NA04791SCK		
					15-Feb-24	51A337QLUOQCAF9T		
					15-Feb-24	AE3B60NA04792NUO		
					16-Feb-24	952F555DF9372GGE	968.882	
					16-Feb-24	3CD5148VVEGST43D		
					13-Mar-24	BA88F7QLUOT5OC8E	1.157.345	
					04-Apr-24	FF4116U8EUDM1HPQ	6.811.878	
					04-Apr-24	081312G4VPHO0G4U		
					28-Feb-24	90C1061QV3M1I1I8	78.000	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	74.173	
					16-Feb-24	952F555DF9372GGE	126.320	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	345.200	
					03-Apr-24	243302G4VPHMT8E7	542.000	
					16-Apr-24	A1EDF1JNFUVMILAE		
					27-Mar-24	F1AC83CIFK1R0MH0	300.000	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	764.320	
					03-Apr-24	66DB51JNFUVAGTVG	384.330	
					05-Apr-24	F4FE31JNFUVCMNUK		
					03-Apr-24	243302G4VPHMT8E7	1.027.500	
					16-Apr-24	A14261JNFUVMILPB		
					16-Feb-24	952F555DF9372GGE	300.000	
					15-Feb-24	AE3B60NA04792NUO	1.190.000	
					13-Feb-24	915A155DF9373MF6	2.108.000	
					22-Feb-24	D59B80NA047FHDPF		
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	345.191	
					16-Feb-24	952F555DF9372GGE	12.559.993	
					15-Feb-24	AE3B60NA04792NUO	91.000	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	56.100	
					13-Feb-24	404460NA04791SCK	524.319	
					16 April 2024	91DD061QV3RKJL0I	240.000	
					22-Feb-24	D59B80NA047FHDPF	1.879.308	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	12.020	
					21-Feb-24	78E4848VVEH1524I	89.340	
					15-Feb-24	AE3B60NA04792NUO	247.878	
					13-Feb-24	F4D727QLUOQC9P66	15.798	
					03-Apr-24	243302G4VPHMT8E7	150.000	
					15-Feb-24	51A337QLUOQCAF9T	32.000	
					16-Feb-24	C697055DF939A99D	921.480	
					13-Feb-24	404460NA04791SCK	320.000	
					29-Feb-24	ACF430NA047N5TT1	50.000	
					15-Feb-24	51A337QLUOQCAF9T	504.880	
					16-Feb-24	7D7513CIFJUGBGGG	200.000	
					4 April 2024	CFB166U8EUDM1TA	49.760	
					14-Feb-24	7577348VVEGQMML4	577.540	
					04-Apr-24	306AC3CIFK44CE3S	0,7	
					28-Feb-24	129502G4VPCDMM13	907.000	
					4 April 2024	46E2F1JNFUVBIT0Q	477.000	
					28-Feb-24	129502G4VPCDMM13	580.318	
					04-Apr-24	DE3B96U8EUDM1F53	4.568.437	
					04-Apr-24	91E246U8EUDM20B9		
					04-Apr-24	E831D48VVEMGS008		
					16-Feb-24	2007248VVEGSTIBT	36.000	
					16-Feb-24	267C80NA047B9HRK	7.320.033	
					16-Feb-24	478042G4VPC51E39	2.617.950	
					16-Feb-24	7D7513CIFJUGBGGG	3.000.000	
					22-Feb-24	9F42961QV3LS6911	23.469.148	
					13-Mar-24	15B173CIFK1DQSPL	836.957	
					13-Feb-24	404460NA04791SCK	1.432.604	
					22-Feb-24	E79057QLUOQL093G	13.125.168	
					04-Apr-24	82F560NA04CV62ED	1.199.253	
					04-Apr-24	5E8D26U8EUDM14VK		
					13-Feb-24	404460NA04791SCK	1.042.380	
					27-Mar-24	F1AC83CIFK1R0MH0	600.000	

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
					16-Feb-24	3CD5148VVEGST43D	128.722	
					16-Feb-24	2007248VVEGSTIBT		
					16-Feb-24	3CD5148VVEGST43D	580.700	
					13-Feb-24	C3F4D7QLUOQC96E8	3.290.000	
					23-Feb-24	370133CIFJUMSFO3		
					21-Feb-24	78E4848VVEH1524I	84.000	
					4 April 2024	86ED67QLUP02DPHD	737.000	
					16-Feb-24	3CD5148VVEGST43D	35.000	
					13-Feb-24	404460NA04791SCK	1.301.823	
					15-Feb-24	4902755DF9395Q0S	3.380.582	
					04-Apr-24	7B1D73CIFK44CCM9	133.406	
					21-Feb-24	78E4848VVEH1524I	490.192	
					28-Feb-24	129502G4VPCDMM13	357.000	
					28-Feb-24	129502G4VPCDMM13	1.366.000	
					13-Mar-24	3033C6U8EUAVFIOM	4.219.234	
					16-Feb-24	881040NA047934O9	5.380.740	
					21-Feb-24	78E4848VVEH1524I	649.500	
					4 April 2024	AA32C7QLUP02EJDI	3.652.054	
					4 April 2024	42B1D2G4VPHO0FGE		
					4 April 2024	2058E3CIFK44DKJL	247.000	
					03-Apr-24	6FFDE3CIFK43AMHO	1.271.470	
					04-Apr-24	63B1A1JNFUVAHUNU		
					21-Feb-24	78E4848VVEH1524I	2.906.354	
					16-Feb-24	C697055DF939A99D	113.500	
					14-Feb-24	7577348VVEGQMML4	2.371.419	
					16-Feb-24	881040NA047934Q9		
					13-Mar-24	3033C6U8EUAVFIOM	922.000	
					04-Apr-24	6FB967QLUP02DDU3	1	
					4 April 2024	63B1A1JNFUVAHUNU	64.660	
					4 April 2024	8D6743CIFK44CD6A	847.580	
					21-Feb-24	78E4848VVEH1524I	494.952	
8	04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	60				Sisa saldo dana titipan pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara
9	06	039729	DITJEN BINA BANGDA	284.835	29-Apr-24	4B53248VVEN5OOFP	284.835	
				231.332.699.525				sisa hibah langsung dalam bentuk uang dari UAE atas Program *Financing The Regional Development* sebesar Rp235.500.000.000,00 yang baru direalisasikan sebesar Rp4.167.300.475,00
10	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.016.598	15-Jan-24	C0D570NA0448O2CM	16.016.598	
JUMLAH KAS LAINNYA DAN SETARA KAS				**231.660.949.224**			**286.461.639**	
TOTAL				**234.061.463.356**			**2.686.975.771**	

LAMPIRAN IX

RINCIAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA

LAMPIRAN IX

DESA YANG BELUM MENYERAHKAN LAPORAN PER 23 JANUARI 2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN	LPJ	BABT	NOTA	BUKTI PAJAK	FOTO	KET DOKUMEN
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	v	-	Kurang bukti pajak
3	Papua	Supion	Supiori Utara	Mbrunwandi	50.000.000	Berkas sudah diterima berupa soft file, info dr bnpp bukti pajaknya tidak ada	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak
4	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Kuler	50.000.000	Berkas berupa softfile	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BABT dan bukti pajak
5	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Tomer	50.000.000	Berkas berupa softfile	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto

Mengetahui,
Plh. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Sri Wahyu Febrianti Firman, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19750207.200502.2.003

Dipindai dengan CamScanner

DESA YANG BELUM MENYERAHKAN LAPORAN PER 20 JANUARI 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN	LPJ	BAST	NOTA	BUKTI PAJAK	FOTO	KET DOKUMEN
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	v	-	Kurang bukti pajak
3	Lampung	Pesawaran	Teghoneng	Margorejo	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	-	v	v	v	v	Kurang LPJ
4	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrunwandi	50.000.000	Berkas sudah diterima berupa soft file, info di bapp bukti pajaknya tidak ada	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak
5	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Kuler	50.000.000	Berkas berupa softfile	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BAST dan bukti pajak
6	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Tomer	50.000.000	Berkas berupa softfile	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto

Mengetahui,
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Drs. Matheos Tan, MM
NIP. 19720425.199203.1.001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN X

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN

LAMPIRAN X

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	AKUN PERSEDIAAN (Rp)											SALDO PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)
					117111	117113	117114	117122	117124	117125	117126	117127	117128	117129	117199	
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.458.454	183.458.454
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	610.751.684	196.997.455	97.529.500	-	-	-	-	-	636.480.000	-	423.418.451	1.965.177.090
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	811.155.460	195.506.000	-	-	-	-	-	-	-	-	76.704.320	1.083.365.780
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	159.349.685	15.589.150	1.354.200	-	-	-	-	-	-	-	-	176.293.035
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	67.906.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.609.055	129.515.986
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	33.174.160	597.500	-	-	-	-	-	-	-	-	42.961.666	76.733.326
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	86.751.218	39.283.500	6.031.450	-	-	-	-	-	-	-	103.810.126	235.876.294
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	15.915.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.874.353	39.789.717
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	24.376.388	30.376.600	-	-	-	-	-	-	-	-	70.365.892	125.118.880
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	12.626.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.625.405	35.252.240
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	140.303.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.303.120
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	13.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.480.000
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	297.730.860	31.945.800	-	16.183.716.138	353.557.773	3.177.105.294	-	-	-	-	-	20.044.055.865
14	04	356000	DK	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN				1.570.910.000			-	-			-	1.570.910.000
15	04	417936	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI				1.879.281.000				-		-	-	1.879.281.000
16	04	690639	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.981.630	-	857.981.630
17	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	99.184.446	-	-	-	-	-	-	14.060.914.995	-	-	22.215.096	14.182.314.537
18	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	17.563.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.685.231	21.248.697
19	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	18.321.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.321.200
20	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	2.361.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.361.850
21	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	97.101.670	-	6.612.000	1.700.989.900	23.660.000	-	446.822.000	141.076.968.285	4.000.000.000	67.670.350	22.428.400	147.442.252.605
22	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	464.643.339	11.454.867	-	-	5.502.668	1.918.874.856	-	1.088.228.700	-	-	-	3.488.704.430
23	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.620.694.584	78.844.300	-	-	-	-	-	3.790.979.900	4.517.655.762	-	-	10.008.174.546
24	09	662766	KP	DITJEN KEUANGAN DAERAH	4.763.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.763.171
25	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14.478.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.932.173	115.410.471
26	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	3.386.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.386.494
27	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	17.625.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.625.500
28	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	160.497.483	9.881.270	1.929.072	-	-	-	-	-	-	-	35.369.160	207.676.985
29	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	24.808.800	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	2.514.800	27.358.600
30	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	25.529.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.529.780
TOTAL					**4.844.481.786**	**610.476.442**	**113.491.222**	**21.334.897.038**	**382.720.441**	**5.095.980.150**	**446.822.000**	**160.017.091.880**	**9.154.135.762**	**925.651.980**	**1.195.972.582**	**204.121.721.283**

LAMPIRAN XI

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

LAMPIRAN XI

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Setjen	Itjen	Ditjen Polpum	Ditjen BAK	Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Bangda	Ditjen Otda	Ditjen Dukcapil	Ditjen Bina Keuda	Badan Litbang	BPSDM	TOTAL
Saldo 31 Desember 2022		**3.900.409.595**	**78.669.925**	**134.088.500**	**36.127.910.999**	**14.757.649.109**	**160.764.634.276**	**3.542.110.919**	**8.378.080.523**	**5.409.400**	**158.898.228**	**306.679.352**	**228.154.540.826**
Koreksi Nilai Kurang	K98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.600	35.600
Saldo Awal	M01	3.999.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.999.000
Pembelian	M02	12.721.800.783	534.828.525	1.360.173.330	8.983.729.785	2.552.473.078	5.420.238.300	1.617.354.915	282.462.488.074	607.207.086	223.035.523	1.307.949.083	317.791.278.482
Hibah (Masuk)	M04	-	-	-	588.787.223	-	-	-	-	-	-	-	588.787.223
Perolehan Lainnya	M06	180.654.900	-	-	-	5.328.000	4.000.000.000	-	-	-	-	-	4.185.982.900
Reklasifikasi Masuk	M10	1.509.657.271	-	-	1.570.910.000	9.466.281	4.003.178.000	5.849.700	83.994.532	5.532.000	11.086.505	14.222.410	7.213.896.699
Reklasifikasi Dari Aset	M11	-	-	-	1.244.971.000	-	-	-	-	-	-	-	1.244.971.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	M15	-	-	-	1.879.281.000	-	-	-	-	-	-	-	1.879.281.000
Koreksi Nilai Tambah	M98	2.775.900	-	-	1.638.843.900	-	84.000	-	-	-	-	-	1.641.703.800
Koreksi Kuantitas Tambah	M99	36.063.100	-	-	-	-	1.970.200	-	-	6.547.750	-	-	44.581.050
Hasil Opname Fisik Kurang	P01	1.700.939.381	-	-	19.981.818	-	125.000	-	-	-	-	-	1.721.046.199
Mutasi Tambah		**16.155.890.335**	**534.828.525**	**1.360.173.330**	**15.926.504.726**	**2.567.267.359**	**13.425.595.500**	**1.623.204.615**	**282.546.482.606**	**619.286.836**	**234.122.028**	**1.322.207.093**	**336.315.562.953**
Habis Pakai	K01	(8.691.859.318)	(473.195.330)	(1.480.781.830)	(7.789.144.705)	(2.510.204.303)	(5.562.924.210)	(1.663.033.404)	(280.832.394.051)	(589.065.065)	(266.523.280)	(1.313.421.026)	(311.172.546.522)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	(10.891.163.723)	(161.717.500)	(17.160.755.561)	-	-	-	-	-	(28.213.636.784)
Barang Usang	K04	(151.656.845)	-	-	-	-	(7.012.500)	-	-	-	-	(8.171.000)	(166.840.345)
Keluar Lainnya	K06	(128.506.000)	-	-	-	(23.600)	-	-	-	-	-	-	(128.529.600)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	(4.078.964.984)	(419.258.500)	-	(7.728.000)	-	-	-	-	(4.505.951.484)
Reklasifikasi Keluar	K10	(1.509.657.271)	-	-	(1.570.910.000)	(9.466.281)	(4.003.178.000)	(5.849.700)	(83.994.532)	(5.532.000)	(11.086.505)	(14.222.410)	(7.213.896.699)
Reklasifikasi ke Aset	K11	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.000.000)
Persediaan Dalam Proses Keluar	K15	-	-	-	(1.879.281.000)	-	-	-	-	-	-	-	(1.879.281.000)
Koreksi Nilai Kurang	K98	(23.655.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.600)	(23.690.600)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	(6.500.000)	-	-	(1.472.741.000)	-	(4.275.900)	-	-	-	-	-	(1.483.516.900)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(5.490.884.694)	-	-	(19.981.818)	-	(9.831.000)	-	-	(25.336.000)	-	(11.459.050)	(5.557.492.562)
Mutasi Kurang		**(16.005.719.128)**	**(473.195.330)**	**(1.480.781.830)**	**(27.702.187.230)**	**(3.100.670.184)**	**(26.747.977.171)**	**(1.676.611.104)**	**(280.916.388.583)**	**(619.933.065)**	**(277.609.785)**	**(1.347.309.086)**	**(360.348.382.496)**
Saldo 31 Desember 2023		**4.050.580.802**	**140.303.120**	**13.480.000**	**24.352.228.495**	**14.224.246.284**	**147.442.252.605**	**3.488.704.430**	**10.008.174.546**	**4.763.171**	**115.410.471**	**281.577.359**	**204.121.721.283**

LAMPIRAN XII

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

LAMPIRAN XII

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Barang Konsumsi (117111)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Suku Cadang (117114)	Pita Cukai, Materai dan Leges (117121)	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (117126)	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (117128)	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)	Bahan Baku (117131)	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial (117141)	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (117191)	Persediaan Lainnya (117199)	TOTAL
Saldo 31 Desember 2022		**4.565.341.209**	**450.959.385**	**88.933.749**	**-**	**24.144.320.110**	**9.609.318.759**	**5.095.980.150**	**446.822.000**	**181.397.049.965**	**1.083.142.625**	**67.670.350**	**-**	**-**	**15.418.250**	**1.189.584.274**	**228.154.540.826**
Koreksi Nilai Kurang	K98	35.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.600
Saldo Awal	M01	3.999.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.999.000
Pembelian	M02	18.147.428.948	2.425.152.726	424.176.414	5.681.600	-	3.928.229.188	-	1.403.187.100	14.717.944.775	268.859.954.028	2.559.091.630	2.281.673.227	89.878.232	780.000	2.948.100.614	317.791.278.482
Hibah (Masuk)	M04	-	-	-	-	-	588.787.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.787.223
Perolehan Lainnya	M06	132.828.000	53.154.900	-	-	-	-	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.185.982.900
Reklasifikasi Masuk	M10	1.158.237.747	449.649.367	35.000	-	1.570.910.000	-	-	-	-	4.001.980.000	-	21.000	-	-	33.063.585	7.213.896.699
Reklasifikasi Dari Aset	M11	-	-	-	-	-	1.066.800.000	-	-	-	-	178.171.000	-	-	-	-	1.244.971.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	M15	-	-	-	-	1.879.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.879.281.000
Koreksi Nilai Tambah	M98	2.859.000	-	-	-	-	-	-	1.638.843.900	-	-	-	-	-	-	900	1.641.703.800
Koreksi Kuantitas Tambah	M99	23.563.200	138.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.879.100	44.581.050
Hasil Opname Fisik Kurang	P01	1.637.126.402	22.469.000	-	-	-	19.881.818	-	-	-	-	-	-	-	-	41.568.979	1.721.046.199
Mutasi Tambah		**21.106.077.897**	**2.950.564.743**	**424.211.414**	**5.681.600**	**3.450.191.000**	**5.603.698.229**	**-**	**7.042.031.000**	**14.717.944.775**	**272.861.934.028**	**2.737.262.630**	**2.281.694.227**	**89.878.232**	**780.000**	**3.043.613.178**	**336.315.562.953**
Habis Pakai	K01	(15.894.618.829)	(2.246.241.386)	(392.334.160)	(2.247.500)	(836.458.500)	(5.991.294.578)	-	-	(17.492.084.315)	(264.776.200.521)	-	(967.096.810)	(4.920.000)	-	(2.569.049.923)	(311.172.546.522)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	-	(2.739.198.432)	(8.690.614.151)	-	-	(16.783.824.201)	-	-	-	-	-	-	(28.213.636.784)
Barang Usang	K04	(44.871.004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(121.969.341)	(166.840.345)
Keluar Lainnya	K06	(128.510.000)	(19.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.529.600)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	-	(2.683.957.140)	-	-	-	(1.821.994.344)	-	-	-	-	-	-	(4.505.951.484)
Reklasifikasi Keluar	K10	(37.137.370)	(3.482.000)	(280.281)	(3.434.100)	-	(128.506.000)	-	(5.570.910.000)	-	(14.740.370)	-	(1.314.597.417)	(84.958.232)	(10.108.050)	(45.742.879)	(7.213.896.699)
Reklasifikasi ke Aset	K11	-	-	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.000.000)
Persediaan Dalam Proses Keluar	K15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.879.281.000)	-	-	-	-	(1.879.281.000)
Koreksi Nilai Kurang	K98	(2.810.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.880.000)	(23.690.600)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	(12.395.900)	-	-	-	-	-	-	(1.471.121.000)	-	-	-	-	-	-	-	(1.483.516.900)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(4.706.593.617)	(541.304.700)	(4.039.500)	-	-	(19.881.818)	-	-	-	-	-	-	-	(6.090.200)	(279.582.727)	(5.557.492.562)
Mutasi Kurang		**(20.826.937.320)**	**(2.791.047.686)**	**(399.653.941)**	**(5.681.600)**	**(6.259.614.072)**	**(14.830.296.547)**	**-**	**(7.042.031.000)**	**(36.097.902.860)**	**(264.790.940.891)**	**(1.879.281.000)**	**(2.281.694.227)**	**(89.878.232)**	**(16.198.250)**	**(3.037.224.870)**	**(360.348.382.496)**
Saldo 31 Desember 2023		**4.844.481.786**	**610.476.442**	**113.491.222**	**-**	**21.334.897.038**	**382.720.441**	**5.095.980.150**	**446.822.000**	**160.017.091.880**	**9.154.135.762**	**925.651.980**	**-**	**-**	**-**	**1.195.972.582**	**204.121.721.283**

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI

NO	KODE ES I	URAIAN ESELON I	KODE SATKER EKS-TP	URAIAN SATKER EKS-TP	KODE AKUN	URAIAN AKUN	URAIAN BARANG	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN 179317	1.132.438.140
			251525	KANTOR PERBATASAN DAN KERJASAMA DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	MESS WISMA BUNGALOW TEMPAT PERISTIRAHATAN SEMI PERMANEN BARAK PEGAWAI DISTRIK TP 2012 251525	1.551.519.000
			170010	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	RUMAH DINAS CAMAT MIANGAS	702.568.212
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	KANTOR CAMAT PERBATASAN	692.439.632
			SUBTOTAL					**4.078.964.984**
2	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	119281	BPMD KAB. BANYUASIN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	83.000.000
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	174.258.500
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	162.000.000
			SUBTOTAL					**419.258.500**
3	07	DITJEN OTDA	120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	UNINTERUPTED POWER SUPPLY (UPS)	7.728.000
			SUBTOTAL					**7.728.000**
TOTAL PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI								**4.505.951.484**

LAMPIRAN XIV

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATKER PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran XIV

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI	JARINGAN	ASET TETAP RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	AKUMULASI PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL																			
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	2.577.683.998.000	16.386.204.108	89.384.087.872	2.611.678.000	2.160.986.040	118.693.752	-	1.486.127.146	-	(14.962.000.038)	(26.771.204.516)	(2.611.678.000)	(1.078.028.264)	(52.574.188)	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.443.605.071.000	427.321.040.362	547.626.077.626	1.487.045.700	-	23.392.977.865	727.387.694	1.278.587.938	2.613.058.195	(361.847.590.701)	(82.614.941.306)	(948.266.356)	-	(12.551.655.940)	(251.411.424)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	4.769.067.881.077	145.278.856.048	498.001.573.909	10.421.714.800	3.962.625.000	7.972.557.500	-	10.147.518.021	-	(118.557.743.258)	(94.229.892.108)	(5.393.170.095)	(1.693.828.783)	(7.260.036.978)	(3.067.537.013)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	17.545.508.883	-	-	-	-	3.558.528.970	-	-	(10.619.842.186)	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29.609.419.000	17.648.189.626	100.675.887.944	4.792.195.000	202.033.000	15.439.902.461	-	2.314.510.500	-	(17.323.607.942)	(14.339.474.313)	(3.461.029.724)	(36.478.182)	(5.358.791.061)	(1.385.202.000)
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	11.736.360.000	31.506.099.545	184.105.924.000	3.543.287.000	201.896.000	14.647.395.453	-	2.042.041.200	-	(31.106.728.239)	(26.732.046.019)	(2.303.136.550)	(38.597.767)	(5.517.694.963)	(1.001.261.000)
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	-	30.590.000.479	126.565.598.110	7.971.764.000	388.102.000	14.895.342.304	-	2.517.594.110	-	(29.860.176.234)	(19.418.532.546)	(7.402.352.286)	(164.804.939)	(6.010.418.908)	(1.186.642.240)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.548.358.000	15.117.921.413	194.120.582.231	19.588.249.120	3.984.743.385	8.276.991.130	55.581.858	2.049.129.090	25.017.976.204	(11.932.326.238)	(17.449.982.244)	(6.573.152.605)	(869.319.590)	(1.191.812.616)	(1.025.898.500)
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	231.199.726.000	37.724.882.390	134.862.787.820	8.086.188.000	29.756.933.000	28.159.224.989	-	2.244.609.215	-	(37.303.897.668)	(18.338.065.751)	(5.848.044.902)	(22.508.923.202)	(11.671.532.963)	(1.091.950.644)
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	49.868.855.559	197.508.321.388	4.101.699.325	49.942.712	25.705.464.617	-	1.161.876.215	-	(49.508.617.373)	(25.250.600.513)	(2.507.461.292)	(5.493.697)	(6.671.299.885)	(377.293.000)
				SUBTOTAL PER ESELON I	**10.183.450.813.077**	**788.987.558.413**	**2.072.850.840.900**	**62.603.820.945**	**40.707.261.137**	**138.608.550.071**	**4.341.498.522**	**25.241.993.435**	**27.631.034.399**	**(683.022.529.877)**	**(325.144.739.316)**	**(37.048.291.810)**	**(26.395.474.424)**	**(56.285.817.502)**	**(9.387.195.821)**
ESELON I INSPEKTORAT JENDERAL																			
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	142.267.725.000	19.694.568.304	45.459.818.486	-	-	-	-	-	-	(15.666.742.632)	(7.363.527.350)	-	-	-	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**142.267.725.000**	**19.694.568.304**	**45.459.818.486**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(15.666.742.632)**	**(7.363.527.350)**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM																			
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	17.651.540.515	-	-	-	-	-	-	-	(14.685.255.934)	-	-	-	-	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**-**	**17.651.540.515**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(14.685.255.934)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN																			
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	131.256.615.123	1.576.390.000	-	-	11.245.442.670	-	17.686.224.808	-	(122.241.834.280)	(233.348.138)	-	-	(3.795.333.318)	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**-**	**131.256.615.123**	**1.576.390.000**	**-**	**-**	**11.245.442.670**	**-**	**17.686.224.808**	**-**	**(122.241.834.280)**	**(233.348.138)**	**-**	**-**	**(3.795.333.318)**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA																			
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	483.090.835.000	79.861.576.666	114.305.225.847	637.667.000	17.967.000	1.369.558.074	-	13.437.286.108	24.997.200	(74.778.561.185)	(29.106.281.780)	(637.667.000)	(4.491.747)	(810.543.262)	(273.461.320)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	34.042.849.000	10.745.328.526	39.822.425.497	-	-	526.026.800	-	13.320.000	-	(9.615.948.295)	(5.958.332.732)	-	-	(259.286.910)	(7.375.000)
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	62.457.627.000	5.576.253.941	23.039.415.000	-	-	-	-	54.108.000	-	(5.270.252.665)	(5.014.955.818)	-	-	-	-
17	05	613629	KP	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	33.642.823.493	3.340.847.590	9.170.797.000	308.907.000	-	198.734.000	-	73.365.000	-	(3.075.225.433)	(1.447.922.872)	(308.907.000)	-	(69.556.900)	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**613.234.134.493**	**99.524.006.723**	**186.337.863.344**	**946.574.000**	**17.967.000**	**2.094.318.874**	**-**	**13.578.079.108**	**24.997.200**	**(92.739.987.578)**	**(41.527.493.202)**	**(946.574.000)**	**(4.491.747)**	**(1.139.387.072)**	**(280.836.320)**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH																			
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	479.054.657.019	66.955.981.914	103.281.574.926	1.327.878.000	1.572.044.000	807.674.890	-	4.951.568.889	-	(62.350.816.040)	(17.400.009.372)	(1.327.878.000)	(268.902.262)	(449.252.727)	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**479.054.657.019**	**66.955.981.914**	**103.281.574.926**	**1.327.878.000**	**1.572.044.000**	**807.674.890**	**-**	**4.951.568.889**	**-**	**(62.350.816.040)**	**(17.400.009.372)**	**(1.327.878.000)**	**(268.902.262)**	**(449.252.727)**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH																			
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	53.354.583.543	-	-	-	489.387.520	84.567.861.119	15.827.000	-	(50.644.390.522)	-	-	-	(354.805.504)	(84.567.861.119)
				SUBTOTAL PER ESELON I	**-**	**53.354.583.543**	**-**	**-**	**-**	**489.387.520**	**84.567.861.119**	**15.827.000**	**-**	**(50.644.390.522)**	**-**	**-**	**-**	**(354.805.504)**	**(84.567.861.119)**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.293.725.365.948	36.357.571.783	-	2.084.000	2.861.849.000	5.537.853.237	46.194.500	-	(2.062.657.679.145)	(4.889.822.782)	-	(1.007.264)	(627.885.113)	(419.899.750)
				SUBTOTAL PER ESELON I	**-**	**2.293.725.365.948**	**36.357.571.783**	**-**	**2.084.000**	**2.861.849.000**	**5.537.853.237**	**46.194.500**	**-**	**(2.062.657.679.145)**	**(4.889.822.782)**	**-**	**(1.007.264)**	**(627.885.113)**	**(419.899.750)**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH																			
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	18.984.460.832	-	-	-	-	1.071.408.634	219.886.683	-	(16.661.224.881)	-	-	-	-	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**-**	**18.984.460.832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.071.408.634**	**219.886.683**	**-**	**(16.661.224.881)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	224.894.826.500	26.040.568.538	32.481.509.071	121.615.000	336.689.400	47.428.700	-	519.862.436	-	(21.765.006.656)	(8.058.820.730)	(79.049.750)	(54.712.028)	(17.785.761)	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**224.894.826.500**	**26.040.568.538**	**32.481.509.071**	**121.615.000**	**336.689.400**	**47.428.700**	**-**	**519.862.436**	**-**	**(21.765.006.656)**	**(8.058.820.730)**	**(79.049.750)**	**(54.712.028)**	**(17.785.761)**	**-**
ESELON I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
23	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	347.284.531.000	15.943.829.512	28.634.053.000	789.524.000	123.391.000	623.374.000	-	206.819.000	-	(13.845.144.150)	(9.714.234.319)	(789.524.000)	(26.059.423)	(185.371.301)	-
24	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	40.121.093.000	9.666.237.178	33.745.891.000	2.578.757.000	573.132.000	862.362.170	-	348.650.229	1.596.263.260	(7.808.257.294)	(5.408.676.361)	(2.186.511.450)	(363.343.900)	(236.999.171)	-
25	12	352588	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	6.129.686.896	98.366.965.000	3.053.191.000	2.714.597.000	1.811.782.159	-	-	-	(6.018.393.456)	(13.709.501.095)	(3.053.191.000)	(354.508.965)	(588.325.125)	-
26	12	403216	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BANDUNG	119.023.192.923	17.293.026.480	43.004.634.000	2.661.751.000	193.060.000	1.657.662.471	-	587.930.500	-	(15.552.956.476)	(7.797.173.822)	(2.311.325.557)	(47.867.261)	(653.744.889)	-
27	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	706.789.350.510	65.861.915.090	151.696.212.211	-	33.753.000	4.631.768.475	-	1.385.222.775	318.987.650	(61.604.206.819)	(31.528.787.528)	-	(10.121.657)	(2.147.838.447)	(7.150.000)
28	12	506137	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BUKIT TINGGI	111.860.000.000	14.938.812.320	46.688.914.407	2.046.567.537	587.061.000	1.921.508.468	-	289.207.750	-	(11.731.142.750)	(7.474.558.539)	(2.046.567.537)	(587.061.000)	(512.913.158)	(15.400.000)
29	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	198.386.414.000	17.733.900.505	23.630.976.084	1.935.271.134	1.231.749.000	-	-	148.395.500	-	(15.192.612.685)	(6.011.225.369)	(1.830.414.385)	(444.798.251)	-	-
				SUBTOTAL PER ESELON I	**1.523.464.581.433**	**147.567.407.981**	**425.767.645.702**	**13.065.061.671**	**5.456.743.000**	**11.508.457.743**	**-**	**2.966.225.754**	**1.915.250.910**	**(131.752.713.630)**	**(81.644.157.033)**	**(12.217.533.929)**	**(1.833.760.457)**	**(4.325.192.091)**	**(22.550.000)**
				JUMLAH	**13.166.366.737.522**	**3.663.742.657.834**	**2.904.113.214.212**	**78.064.949.616**	**48.092.788.537**	**167.663.109.468**	**95.518.621.512**	**65.225.862.613**	**29.571.282.509**	**(3.274.188.181.175)**	**(486.261.917.923)**	**(51.619.327.489)**	**(28.558.348.182)**	**(66.995.459.088)**	**(94.678.343.010)**

LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	PEMDES	BANGDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo per 31 Desember 2022		**10.196.512.429.000**	**142.267.725.000**	**613.234.134.493**	**479.054.657.019**	**239.998.196.000**	**803.613.615.000**	**12.474.680.756.512**
Transfer Masuk	102	706.789.350.510	-	-	-	-	719.850.966.433	**1.426.640.316.943**
Reklasifikasi Masuk	107	227.364.666.000	-	14.481.952.000	-	-	-	241.846.618.000
Perolehan Lainnya	112	84.779.901.000	-	-	-	-	-	84.779.901.000
Mutasi Tambah		**1.018.933.917.510**	**-**	**14.481.952.000**	**-**	**-**	**719.850.966.433**	**1.753.266.835.943**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	-	-	-	-	(15.103.369.500)	-	**(15.103.369.500)**
Transfer Keluar	302	(719.850.966.433)	-	-	-	-	-	**(719.850.966.433)**
Reklasifikasi Keluar	304	(227.364.666.000)	-	(14.481.952.000)	-	-	-	**(241.846.618.000)**
Koreksi Pencatatan	305	(84.779.901.000)	-	-	-	-	-	**(84.779.901.000)**
Mutasi Kurang		**(1.031.995.533.433)**	**-**	**(14.481.952.000)**	**-**	**(15.103.369.500)**	**-**	**(1.061.580.854.933)**
Saldo per 31 Desember 2023		**10.183.450.813.077**	**142.267.725.000**	**613.234.134.493**	**479.054.657.019**	**224.894.826.500**	**1.523.464.581.433**	**13.166.366.737.522**

LAMPIRAN XVI

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVI

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Saldo per 31 Desember 2022		**767.357.069.904**	**19.315.279.729**	**15.354.024.980**	**128.841.882.782**	**98.365.982.780**	**66.479.106.814**	**52.952.629.703**	**2.170.198.648.741**	**19.602.213.537**	**25.212.311.538**	**145.088.235.254**	**3.508.767.385.762**
Saldo Awal	100	3.395.965.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.395.965.277
Pembelian	101	28.066.693.194	759.458.575	2.297.515.535	3.565.595.205	2.089.920.733	873.305.100	537.979.340	105.600.030.336	440.443.645	868.283.600	3.054.755.727	148.153.980.990
Transfer Masuk	102	1.135.261.331	-	-	-	-	-	-	396.430.000	-	-	-	1.531.691.331
Hibah Masuk	103	4.297.628.579	-	-	-	-	-	-	17.623.235.871	-	-	-	21.920.864.450
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	5.496.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.496.000.000
Reklasifikasi Masuk	107	2.835.715.052	-	7.200.000	-	-	-	42.957.000	63.712.000	-	164.411.600	-	3.113.995.652
Perolehan Lainnya	112	3.729.989.285	-	-	935.000.000	61.730.000	-	-	4.476.807.642	-	-	443.333.000	9.646.859.927
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	2.121.969.451	25.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.147.499.451
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	4.279.882	-	-	-	-	-	-	33.191.000	-	9.435.000	-	46.905.882
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	402	775.175.572	-	-	-	69.494.500	-	-	-	-	-	37.000.000	881.670.072
Mutasi Tambah		**51.858.677.623**	**784.988.575**	**2.304.715.535**	**4.500.595.205**	**2.221.145.233**	**873.305.100**	**580.936.340**	**128.193.406.849**	**440.443.645**	**1.042.130.200**	**3.535.088.727**	**196.335.433.032**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(141.864.362)	-	-	(3.800.032)	(8.450.000)	-	-	(4.066.262.145)	-	-	-	(4.220.376.539)
Transfer Keluar	302	(1.135.261.331)	-	-	-	-	(396.430.000)	-	-	-	-	-	(1.531.691.331)
Hibah Keluar	303	-	-	-	(80.262.832)	(29.665.000)	-	-	-	-	-	-	(109.927.832)
Reklasifikasi Keluar	304	(2.835.715.052)	-	(7.200.000)	-	-	-	(42.957.000)	(63.712.000)	-	(164.411.600)	-	(3.113.995.652)
Koreksi Pencatatan	305	(3.960.565.027)	-	-	(935.000.000)	-	-	-	(536.715.497)	-	(49.461.600)	-	(5.481.742.124)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	315	-	-	-	(1.066.800.000)	-	-	-	-	-	-	-	(1.066.800.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	(22.154.783.342)	(405.700.000)	-	-	(1.025.006.290)	-	(136.025.500)	-	(1.058.196.350)	-	(1.055.916.000)	(25.835.627.482)
Mutasi Kurang		**(30.228.189.114)**	**(405.700.000)**	**(7.200.000)**	**(2.085.862.864)**	**(1.063.121.290)**	**(396.430.000)**	**(178.982.500)**	**(4.666.689.642)**	**(1.058.196.350)**	**(213.873.200)**	**(1.055.916.000)**	**(41.360.160.960)**
Saldo per 31 Desember 2023		**788.987.558.413**	**19.694.568.304**	**17.651.540.515**	**131.256.615.123**	**99.524.006.723**	**66.955.981.914**	**53.354.583.543**	**2.293.725.365.948**	**18.984.460.832**	**26.040.568.538**	**147.567.407.981**	**3.663.742.657.834**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		**(683.022.529.877)**	**(15.666.742.632)**	**(14.685.255.934)**	**(122.241.834.280)**	**(92.739.987.578)**	**(62.350.816.040)**	**(50.644.390.522)**	**(2.062.657.679.145)**	**(16.661.224.881)**	**(21.765.006.656)**	**(131.752.713.630)**	**(3.274.188.181.175)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023		**105.965.028.536**	**4.027.825.672**	**2.966.284.581**	**9.014.780.843**	**6.784.019.145**	**4.605.165.874**	**2.710.193.021**	**231.067.686.803**	**2.323.235.951**	**4.275.561.882**	**15.814.694.351**	**389.554.476.659**

LAMPIRAN XVII

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

LAMPIRAN XVII

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

Es I	Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	4.075.089.880
1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	20.106.612.488
1001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	3.884.990.826
1002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	759.458.575
1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	2.297.515.535
1004	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.565.595.205
1005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.105.877.783
1005	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	934.342.950
1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	49.700.000
1006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	873.305.100
1007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	537.979.340
1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	105.600.030.336
1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	440.443.645
1011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	868.283.600
1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	1.476.500.800
1012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	607.999.417
1012	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	124.811.000
1012	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	356.770.700
1012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	388.685.010
1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	99.988.800
TOTAL			**148.153.980.990**

LAMPIRAN XVIII

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVIII

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo per 31 Desember 2022		**2.047.873.454.412**	**45.000.125.017**	**1.576.390.000**	**185.399.216.451**	**102.966.095.904**	**36.357.571.783**	**32.115.438.520**	**416.285.508.202**	**2.867.573.800.289**
Pembelian	101	284.225.675	-	-	-	-	-	-	-	284.225.675
Transfer Masuk	102	2.261.761.450	-	-	-	-	-	-	-	2.261.761.450
Hibah Masuk	103	2.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.150.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	105	1.736.706.606	-	178.171.000	-	-	-	-	-	1.914.877.606
Reklasifikasi Masuk	107	14.322.117.176	-	-	-	-	-	-	1.945.674.000	16.267.791.176
Perolehan Lainnya	112	14.310.863.360	-	-	-	-	-	-	-	14.310.863.360
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	3.204.405.410	499.881.917	-	938.646.893	315.479.022	-	366.070.551	3.531.636.500	8.856.120.293
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	622.474.969	-	-	-	-	-	-	-	622.474.969
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	206	59.708.010	-	-	-	-	-	-	-	59.708.010
Pengembangan melalui KDP	208	3.781.051.410	-	-	-	-	-	-	5.950.501.000	9.731.552.410
Koreksi Manual	209	752.987.000	-	-	-	-	-	-	-	752.987.000
Mutasi Tambah		**43.486.301.066**	**499.881.917**	**178.171.000**	**938.646.893**	**315.479.022**	**-**	**366.070.551**	**11.427.811.500**	**57.212.361.949**
Koreksi Susulan	214	(149.607.217)	-	-	-	-	-	-	-	(149.607.217)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(716.011.776)	(40.188.448)	-	-	-	-	-	-	(756.200.224)
Transfer Keluar	302	(2.261.761.450)	-	-	-	-	-	-	-	(2.261.761.450)
Reklasifikasi Keluar	304	(14.322.117.176)	-	-	-	-	-	-	(1.945.674.000)	(16.267.791.176)
Koreksi Pencatatan	305	(1.059.416.959)	-	-	-	-	-	-	-	(1.059.416.959)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	315	-	-	(178.171.000)	-	-	-	-	-	(178.171.000)
Mutasi Kurang		**(18.508.914.578)**	**(40.188.448)**	**(178.171.000)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.945.674.000)**	**(20.672.948.026)**
Saldo per 31 Desember 2023		**2.072.850.840.900**	**45.459.818.486**	**1.576.390.000**	**186.337.863.344**	**103.281.574.926**	**36.357.571.783**	**32.481.509.071**	**425.767.645.702**	**2.904.113.214.212**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		**(325.144.739.316)**	**(7.363.527.350)**	**(233.348.138)**	**(41.527.493.202)**	**(17.400.009.372)**	**(4.889.822.782)**	**(8.058.820.730)**	**(81.644.157.033)**	**(486.261.917.923)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023		**1.747.706.101.584**	**38.096.291.136**	**1.343.041.862**	**144.810.370.142**	**85.881.565.554**	**31.467.749.001**	**24.422.688.341**	**344.123.488.669**	**2.417.851.296.289**

LAMPIRAN XIX

RINCIAN MUTASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XIX

RINCIAN MUTASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo per 31 Desember 2022		**239.079.909.017**	**11.245.442.670**	**3.058.859.874**	**3.707.596.890**	**489.387.520**	**1.482.364.000**	**505.733.100**	**29.229.132.844**	**288.798.425.915**
Pembelian	101	-	-	-	-	-	1.195.000.000	-	-	1.195.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	105	1.146.678.707	-	-	-	-	-	-	224.683.000	1.371.361.707
Reklasifikasi masuk	107	2.500.584.257	-	-	-	-	-	-	-	2.500.584.257
Perolehan Lainnya	112	291.689.772	-	-	-	-	-	-	198.663.000	490.352.772
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	386.108.350	-	-	-	-	186.569.000	-	199.310.000	771.987.350
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	1.038.122.557	-	-	-	-	-	-	178.473.570	1.216.596.127
Mutasi Tambah		**5.363.183.643**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.381.569.000**	**-**	**801.129.570**	**7.545.882.213**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(22.876.250)	-	-	-	-	-	-	-	(22.876.250)
Reklasifikasi Keluar	304	(2.500.584.257)	-	-	-	-	-	-	-	(2.500.584.257)
Mutasi Kurang		**(2.523.460.507)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.523.460.507)**
Saldo per 31 Desember 2023		**241.919.632.153**	**11.245.442.670**	**3.058.859.874**	**3.707.596.890**	**489.387.520**	**2.863.933.000**	**505.733.100**	**30.030.262.414**	**293.820.847.621**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		**(119.729.583.736)**	**(3.795.333.318)**	**(2.090.452.819)**	**(2.046.032.989)**	**(354.805.504)**	**(628.892.377)**	**(151.547.539)**	**(18.376.486.477)**	**(147.173.134.759)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023		**122.190.048.417**	**7.450.109.352**	**968.407.055**	**1.661.563.901**	**134.582.016**	**2.235.040.623**	**354.185.561**	**11.653.775.937**	**146.647.712.862**

LAMPIRAN XX

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XX

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2022	**Saldo per 31 Desember 2022**	**25.874.227.277**	**17.686.224.808**	**559.361.170**	**4.951.568.889**	**84.583.688.119**	**4.545.842.152**	**827.310.235**	**519.862.436**	**2.966.225.754**	**142.514.310.840**
Pembelian	101	234.525.710				59.708.010	1.038.205.585	465.758.082			1.798.197.387
Transfer Masuk	102	423.338.000									423.338.000
Hibah Masuk	103	37.800.000									37.800.000
Reklasifikasi Masuk	107	3.500.000									3.500.000
Perolehan Lainnya	112	4.245.248.000		13.033.517.938				676.919.813			17.955.685.751
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**4.944.411.710**	**-**	**13.033.517.938**	**-**	**59.708.010**	**1.038.205.585**	**1.142.677.895**	**-**	**-**	**20.218.521.138**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(388.471.030)						(1.773.000)			(390.244.030)
Transfer Keluar	302	(423.338.000)				(59.708.010)					(483.046.010)
Koreksi Pencatatan	305	(423.338.000)						(676.919.813)			(1.100.257.813)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401			(14.800.000)							(14.800.000)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(1.235.147.030)**	**-**	**(14.800.000)**	**-**	**(59.708.010)**	**-**	**(678.692.813)**	**-**	**-**	**(1.988.347.853)**
Saldo per 31 Desember 2023	**Saldo per 31 Desember 2023**	**29.583.491.957**	**17.686.224.808**	**13.578.079.108**	**4.951.568.889**	**84.583.688.119**	**5.584.047.737**	**1.291.295.317**	**519.862.436**	**2.966.225.754**	**160.744.484.125**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023**	**(9.387.195.821)**	**-**	**(280.836.320)**	**-**	**(84.567.861.119)**	**(419.899.750)**	**-**	**-**	**(22.550.000)**	**(94.678.343.010)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Nilai Buku per 31 Desember 2023**	**20.196.296.136**	**17.686.224.808**	**13.297.242.788**	**4.951.568.889**	**15.827.000**	**5.164.147.987**	**1.291.295.317**	**519.862.436**	**2.943.675.754**	**66.066.141.115**

LAMPIRAN XXI

RINCIAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXI

RINCIAN MUTASI KDP PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	BPSDM	JUMLAH
1		2	3	4	5	6
Saldo per 31 Desember 2022	**Saldo per 31 Desember 2022**	**40.031.094.622**	**-**	**-**	**1.915.250.910**	**41.946.345.532**
Perolehan Penambahan KDP	502	9.527.081.105	178.171.000	24.997.200	6.075.672.500	15.805.921.805
Pengembangan KDP	503	9.747.592.381	-	-	-	9.747.592.381
Koreksi Nilai KDP Bertambah	504	1.874.061.408	-	-	65.785.000	1.939.846.408
Perolehan Lainnya KDP	510	1.324.955.782	-	-	99.511.500	1.424.467.282
Reklasifikasi Masuk KDP	514	1.146.678.707	-	-	308.683.000	1.455.361.707
Mutasi Tambah		**23.620.369.383**	**178.171.000**	**24.997.200**	**6.549.652.000**	**30.373.189.583**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	(8.379.385.313)	(178.171.000)	-	(224.683.000)	(8.782.239.313)
Pengembangan Melalui KDP	208	(3.781.051.410)	-	-	(5.950.501.000)	(9.731.552.410)
Reklasifikasi Keluar KDP	513	(1.146.678.707)	-	-	(308.683.000)	(1.455.361.707)
Koreksi Pencatatan KDP	517	(3.947.000.000)	-	-	(65.785.000)	(4.012.785.000)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	564	(18.766.314.176)	-	-	-	(18.766.314.176)
Mutasi Kurang		**(36.020.429.606)**	**(178.171.000)**	**-**	**(6.549.652.000)**	**(42.748.252.606)**
Saldo per 31 Desember 2023	**Saldo per 31 Desember 2023**	**27.631.034.399**	**-**	**24.997.200**	**1.915.250.910**	**29.571.282.509**

LAMPIRAN XXII

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER SATKER

LAMPIRAN XXII

RINCIAN KDP PER SATKER

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak (Rp)	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
1	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor Kontrak : 602/6326/BU	60 hari	3.374.341.895	86%	2.613.058.195	Perbaikan M/E Gedung B	Pihak Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak/wanprestasi	Dilanjutkan
2	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/020/SPK.MK/IPDN.28.2	10 Maret sd 3 April 2020	195.450.000	100%	195.450.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi		Tidak Dilanjutkan
3	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/023/SPK.KP/IPDN.28.2	10 Maret sd 30 April 2020	231.200.000	100%	231.200.000			
4	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR				100%	202.098.311	Pengelola Kegiatan TA 2020		
5	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	011/2711/PAKPA Tanggal 9 September			20%	5.429.180.237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Belum tersedia Anggaran	Pembangunan IPDN selesai di tahun 2024
6	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.488.726.913	Asrama Permanen		Akan dilanjut di TA 2023
7	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.400.755.659	Asrama Permanen		Pembangunan IPDN selesai di tahun 2024
8	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	5.669.645.981	Gedung Pos Jaga Permanen		Akan dilanjut di TA 2023
9	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR		1 Januari s/d 31 Desember 2022			400.919.103	Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat TA 2022		
JUMLAH SETJEN						**3.800.991.895**		**27.631.034.399**			
1	05	027753	DITJEN BINA PEMDES	6973/SPK/BPD/X/2023	1 TAHUN	24.997.200	100%	24.997.200	Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor	Tidak tersedia pagu anggaran	Dilanjutkan
JUMLAH SETJEN						**24.997.200**		**24.997.200**			
1	12	403231	BPSDM	027/1273/KONT/IX/2015 dan 027/577/KONT/III/2017	6 Bulan	318.987.650	100%	318.987.650	Realisasi konsultan perencana Pembangunan Gedung Alat Bantu Damkar pada Satker Balai Pol PP dan Damkar Rokan Hilir	Satker Balai Pol PP dan Damkar Rohil sudah dalam posisi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) dan aset pada Satker Balai Pol PP dan Damkar Bogor juga sudah terpisah dari BPSDM Kemendagri	Tidak Dilanjutkan
2	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/829/PUSDIKLATREG/2014	6 Bulan	805.361.000	5%	805.361.000	Belanja Konsultan perencana Pembangunan Gedung Asrama TA 2014 yang terhenti akibat kebijakan moratorium pembangunan gedung	Adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 Hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, sehingga tidak mendapatkan anggaran di Tahun Berikutnya	Tidak Dilanjutkan
3	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/263/KONTRAK/PPSDM/2019	90 Hari Kalender	636.075.260	100%	790.902.260	Belanja Renovasi Gedung Kantor Tahap I PPSDM Kemendagri Regional Makassar	Tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun berikutnya	Dilanjutkan
4	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/007/2019/PPSDM-MKS	16 Hari Kalender	55.000.000	100%		Realisasi pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 berupa Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (jasa konsultan)		
5	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/255/2019/PPSDM	90 Hari Kalender	38.800.000	100%		Belanja Biaya Pengawas Gedung dan Bangunan Kantor PPSDM Regional Makassar		
6	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	-	-	61.027.000	-		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan meliputi perjalanan dinas rapat biaya honorarium panitia dan sebagainya		
JUMLAH BPSDM						**1.915.250.910**		**1.915.250.910**			
TOTAL						**5.716.242.805**		**29.571.282.509**			

LAMPIRAN XXIII

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran XXIII

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	*SOFTWARE*	LISENSI	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI AMORTISASI *SOFTWARE*	AKUMULASI AMORTISASI LISENSI	AKUMULUASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	29.975.000	2.768.930.811	18.898.000	(2.473.293.704)	-	-	(18.898.000)
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	23.288.689.280	7.131.168.041	1.676.759.600	53.300.000	6.897.396.210	9.132.791.875	(4.390.491.271)	(19.282.147.613)	(1.679.374.350)	(9.132.791.875)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2.235.972.500	-	197.795.000	1.560.446.750	9.400.940.900	2.743.342.400	(9.400.940.900)	(2.122.272.500)	-	(356.842.000)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	1.000.000.000	-	-	-	234.819.113	-	(234.819.113)	(125.000.000)		-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	988.715.000	-	(988.715.000)	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	24.717.000	-	-	-	-	-	-	(12.358.500)	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	70.120.000	-	-	-	2.559.667.160	23.000.000	(2.559.667.160)	(43.825.000)	-	(20.750.000)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19.472.000	-	-	-	1.791.173.069	-	(1.435.037.697)	(17.038.000)	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	252.755.330	-	(252.755.330)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	367.096.000	349.100.000	(367.096.000)	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	789.614.320	-	-	-	405.700.000	6.732.487.300	(405.700.000)	(735.771.775)	-	-
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	139.050.000	-	-	-	-	1.611.327.750	-	(139.050.000)	-	(1.317.842.250)
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	836.030.200	198.090.600	-	-	4.087.466.408	4.130.192.170	(4.087.466.408)	(378.224.888)	(29.713.590)	(4.130.192.170)
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7.107.147.630	-	397.210.000	299.605.000	3.763.420.747	200.343.000	(3.761.312.168)	(7.088.399.505)	-	(200.343.000)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25.000.000	-	-	-	-	-	-	(25.000.000)	-	-
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	-	-	-	-	870.750.290	-	(862.129.251)	-	-	-
17	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	-		-	103.566.040	-	(103.566.040)	-		-
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	16.636.280.140	-	-	-	29.854.021.189	4.029.152.092	(29.209.705.625)	(16.488.751.338)	-	(4.029.152.092)
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	4.401.946.950	-	-	-	3.866.724.866	36.070.186.197	(3.866.724.866)	(3.425.019.700)	-	(35.983.038.697)
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	622.375.256.076	10.987.102.360	-	219.764.000	120.195.909	63.415.678.618	(105.435.909)	(576.049.477.265)	(1.306.638.454)	(63.415.678.618)
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	35.522.380.435	-	-	-	5.688.009.410	109.730.000	(5.333.952.268)	(35.341.880.165)	-	(109.730.000)
22	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.470.015.131	6.875.000	-	3.124.665.850	-	-	-	(3.037.470.881)	(6.875.000)	-
23	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	2.698.000	-	(2.148.000)	-	-	-
24	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	54.500.000	-	-	20.750.000	1.265.809.308	-	(1.130.824.580)	(54.500.000)	-	-
25	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	-	-	-	49.885.000	498.960.000	-	(498.960.000)	-		-
26	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	66.059.443	-	-	99.678.000	6.836.260.539	-	(6.703.722.613)	(53.510.902)	-	-
27	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	-	-	-	764.576.400	-	(764.576.400)	-	-	-
TOTAL					**718.062.251.105**	**18.323.236.001**	**2.271.764.600**	**5.458.069.600**	**83.389.652.699**	**128.566.229.402**	**(78.939.040.303)**	**(664.419.698.032)**	**(3.022.601.394)**	**(118.715.258.702)**

LAMPIRAN XXIV

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXIV

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2022	**Saldo per 31 Desember 2022**	**33.978.652.855**	**789.614.320**	**432.535.500**	**935.275.300**	**7.828.962.630**	**20.656.632.232**	**15.920.456.458**	**587.110.544.880**	**35.522.380.435**	**6.403.450.381**	**735.287.399**	**710.313.792.390**
Saldo Awal	100								3.471.434.805				3.471.434.805
Pembelian	101	1.319.084.207							44.025.528.781				45.344.612.988
Perolehan Lainnya	112	1.000.000.000											1.000.000.000
Pengembangan Nilai Aset	202	4.168.400.659			98.845.500			832.873.950	7.962.502.865		78.744.000		13.141.366.974
Pengembangan Melalui KDP	208										69.900.000		69.900.000
Koreksi Susulan	214										49.461.600		49.461.600
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	402											444.414.956	444.414.956
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**6.487.484.866**	**-**	**-**	**98.845.500**	**-**	**-**	**832.873.950**	**55.459.466.451**	**-**	**198.105.600**	**444.414.956**	**63.521.191.323**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(43.382.150)											(43.382.150)
Koreksi Pencatatan	305								(8.987.888.895)				(8.987.888.895)
Penghentian Aset dari Penggunaan	401	(3.134.340.400)		(293.485.500)			(4.020.352.092)	(12.351.383.458)				(888.829.912)	(20.688.391.362)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(3.177.722.550)**	**-**	**(293.485.500)**	**-**	**-**	**(4.020.352.092)**	**(12.351.383.458)**	**(8.987.888.895)**	**-**	**-**	**(888.829.912)**	**(29.719.662.407)**
Saldo per 31 Desember 2023	**Saldo per 31 Desember 2023**	**37.288.415.171**	**789.614.320**	**139.050.000**	**1.034.120.800**	**7.828.962.630**	**16.636.280.140**	**4.401.946.950**	**633.582.122.436**	**35.522.380.435**	**6.601.555.981**	**290.872.443**	**744.115.321.306**
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2023	**Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2023**	**(23.282.015.963)**	**(735.771.775)**	**(139.050.000)**	**(407.938.478)**	**(7.113.399.505)**	**(16.488.751.338)**	**(3.425.019.700)**	**(577.356.115.719)**	**(35.341.880.165)**	**(3.044.345.881)**	**(108.010.902)**	**(667.442.299.426)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Nilai Buku per 31 Desember 2023**	**14.006.399.208**	**53.842.545**	**-**	**626.182.322**	**715.563.125**	**147.528.802**	**976.927.250**	**56.226.006.717**	**180.500.270**	**3.557.210.100**	**182.861.541**	**76.673.021.880**

LAMPIRAN XXV

REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XXV

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
1	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	154.577.688	00386T/352593/2023	231330301000000	19-Des-23	523111	154.577.688	815619	(154.577.688)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/06/IPDN.24.1 untuk Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta	00002T/352593/2024	249991304001307	09-Jan-24	825619	154.577.688	411124	2.785.184	172.681.382	-	Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta sesuai BAST/BAPP Nomor 027/1311/BA-STHP/Bek/XII/2023 Tanggal 31-12-2023
2	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA																411211	15.318.510			
3	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	4.154.181.904	01804T/403200/2023	231330301000470	27-Des-23	522141	291.500.000	815619	(291.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 100.4.7/8629/Pusdatin/2022 untuk Pengadaan Sewa Layanan Akses Internet	00013T/403200/2024	249991303003570	09-Jan-24	825619	291.500.000	411124	(5.252.252)	286.247.748	-	Pengadaan Sewa Layanan Akses Internet sesuai BAST Nomor 000.4/8724/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
4	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01805T/403200/2023	231330301000480	27-Des-23	522141	352.917.100	815619	(352.917.100)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8598/Pusdatin/2022 untuk Pengadaan Layanan Video Converence	00011T/403200/2024	249991303003600	09-Jan-24	825619	352.917.100	411124	(6.358.867)	311.584.466	-	Pengadaan Layanan Video Converence sesuai BAST Nomor 000.4/8717/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
5	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(34.973.767)			
6	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01806T/403200/2023	231330301000380	27-Des-23	522141	291.250.000	815619	(291.250.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 100.4.7/8562/Pusdatin/2022 untuk Pengadaan Sewa Layanan Akses Internet Secondary	00014T/403200/2024	249991304001620	11-Jan-24	825619	291.250.000	411124	(5.247.748)	257.139.639	-	Pengadaan Sewa Layanan Akses Internet Secondary sesuai BAST Nomor 000.4/8725/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
7	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(28.862.613)			
8	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01807T/403200/2023	231330301000420	27-Des-23	522191	86.549.683	815619	(86.549.683)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8600/Pusdatin/2022 untuk Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center	00009T/403200/2024	249991303003570	09-Jan-24	825619	86.549.683	411124	(1.559.454)	76.413.233	-	Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center sesuai BAST Nomor 000.4/8721/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
9	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(8.576.996)			
10	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01808T/403200/2023	231330301000420	27-Des-23	522191	164.816.500	815619	(164.816.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/106/Pusdatin/2023 untuk Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center	00008T/403200/2024	249991303003580	09-Jan-24	825619	164.816.500	411124	(2.969.667)	145.513.666	-	Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center sesuai BAST Nomor 000.4/8723/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
11	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(16.333.167)			
12	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01809T/403200/2023	231330301000420	27-Des-23	536111	445.498.500	815619	(445.498.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/5782/Pusdatin untuk Pengembangan Microservices Modul Lanjutan Penatausahaan dan AKLAP	00017T/403200/2024	249991303004080	12-Jan-24	825619	445.498.500	411124	(8.027.000)	393.323.000	-	Pengembangan Microservices Modul Lanjutan Penatausahaan dan AKLAP sesuai BAST Nomor 000.4/8726/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
13	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(44.148.500)			
14	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01810T/403200/2023	231330301000470	27-Des-23	522141	118.500.010	815619	(118.500.010)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8596/Pusdatin/2022 untuk Sewa Layanan Virtual Private Network	00010T/403200/2024	249991303003570	09-Jan-24	825619	118.500.010	411124	(2.135.135)	116.364.875	-	Sewa Layanan Virtual Private Network sesuai BAST Nomor 000.4/8719/Pusdatin Tanggal 31-12-2023
15	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01811T/403200/2023	231330301000470	27-Des-23	536111	310.478.100	815619	(310.478.100)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6687/Pusdatin untuk Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	00022T/403200/2024	249991303004060	12-Jan-24	825619	310.478.100	411124	(5.594.200)	274.115.800	-	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai BAST Nomor 000.4/8727/Pusdatin/2023 Tanggal 31-12-2023
16	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(30.768.100)			
17	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01812T/403200/2023	231330301000480	27-Des-23	536111	556.137.750	815619	(556.137.750)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7178/Pusdatin untuk Pengintegrasian Aplikasi Ke SIPD RI	00016T/403200/2024	249991302002040	12-Jan-24	825619	556.137.750	411124	(10.020.500)	491.004.500	-	Pengintegrasian Aplikasi Ke SIPD RI sesuai BAST Nomor 000.4/8648/Pusdatin Tanggal 30-12-2023
18	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(55.112.750)			

LAMPIRAN XXV

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
19	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01813T/403200/2023	231330301000440	27-Des-23	536111	230.824.500	815619	(230.824.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7176/Pusdatin untuk Pengembangan Aplikasi P3DN SIPD	00018T/403200/2024	249991302001990	11-Jan-24	825619	230.824.500	411124	(4.159.000)	203.791.000	-	Pengembangan Aplikasi P3DN SIPD sesuai BAST Nomor 000.4/8681/Pusdatin/2023 Tanggal 30-12-2023
20	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(22.874.500)			
21	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01814T/403200/2023	231330301000480	27-Des-23	522131	488.527.650	815619	(488.527.650)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7513/Pusdatin untuk Pembangunan Pusat Penanganan Insiden Siber	00012T/403200/2024	249991303003580	09-Jan-24	825619	488.527.650	411124	(8.802.300)	431.312.700	-	Pembangunan Pusat Penanganan Insiden Siber sesuai BAST Nomor 000.4/8647/Pusdatin Tanggal 29-12-2023
22	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(48.412.650)			
23	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		01819T/403200/2023	231330301000430	27-Des-23	523111	817.182.111	815619	(817.182.111)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/56/PPK/I/BU untuk Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arsip dan Gedung Pertemuan Cipayung	00007T/403200/2024	249991303003030	09-Jan-24	825619	817.182.111	411124	(14.724.002)	721.476.098	-	Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arsip dan Gedung Pertemuan Cipayung sesuai BAST Nomor 602/6500/PPK/XII/BU Tanggal 29-12-2023
24	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(80.982.011)		-	
25	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	144.717.455	01987T/448302/2023	230870301000060	22-Des-23	523111	63.081.807	815619	(63.081.807)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.2.8.6/03/SP/I/2023 untuk Paket Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Pertamanan IPDN Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2023	00005T/448302/2024	249991304000030	03-Jan-24	825619	63.081.807			63.081.807	-	Paket Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Pertamanan IPDN Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.2.8.6/1806/BAST/Bek/XII/2023 Tanggal 30-12-2023
26	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01990T/448302/2023	230870301000060	22-Des-23	523111	81.635.648	815619	(81.635.648)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.2.8.6/1663/SP/XII/2023 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Bulan Desember Tahun 2023 di IPDN Kampus Jatinangor	00006T/448302/2024	249991303000090	03-Jan-24	825619	81.635.648			81.635.648	-	Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Bulan Desember Tahun 2023 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.2.8.6/1810/BAST/XII/2023 Tanggal 30-12-202 3
27	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	189.345.000	00260T/483005/2023	231330301000560	29-DEC-23	522191	78.575.000	815619	(78.575.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 0822/SP/PPK-DKPP/XII/2022 untuk PENGAADAN JASA PENYEDIA ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK COLLOCATION) BULAN JANUARI - DESEMBER 2023	00004T/483005/2024	249991303004070	12-JAN-24	825619	78.575.000	411124	(1.415.766)	69.372.522	-	PENGAADAN JASA PENYEDIA ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK COLLOCATION) BULAN JANUARI - DESEMBER 2023 sesuai BAST Nomor 554/BAPP/PPK-DKPP/XII/2023 Tanggal 31-12-2023
28	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU									-							411211	(7.786.712)		-	
29	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		00261T/483005/2023	231330301000560	29-DEC-23	522191	110.770.000	815619	(110.770.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 326/SP/PPK-DKPP/IX/2023 untuk Belanja Jasa Lainnya Penyediaan Layanan Call Center Pengaduan, PersidanganDugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu danInformasi Hasil Putusan Perkara	00005T/483005/2024	249991303002320	08-JAN-24	825619	110.770.000	411124	(1.995.856)	97.796.937	-	Belanja Jasa Lainnya Penyediaan Layanan Call Center Pengaduan, PersidanganDugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu danInformasi Hasil Putusan Perkara sesuai BAST Nomor 555/BAPP/PPK - DKPP/XII/2023 Tanggal 31-12-2023
30	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU									-							411211	(10.977.207)		-	

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
31	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		00265T/483005/2023	231330301000330	27-DEC-23	522191	169.192.517	815619	(169.192.517)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 489/SPK/PPK-DKPP/XII/2023 untuk SOSIALISASI PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA DI KAMPUS UNDIP	00275T/483005/2023	239991303000460	29-Des-23	825619	169.192.517	411124	(3.048.514)		-	SOSIALISASI PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA DI KAMPUS UNDIP sesuai BAST Nomor 508/BAST/PPK-DKPP/XII/2023 Tanggal 22-12-2023
32	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU																411211	(16.766.826)			
33	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		00264T/483005/2023	231330301000470	27-DEC-23	522191	178.925.828	815619	(178.925.828)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 501/SPK/PPK-DKPP/XII/2023 untuk SOSIALISASI PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA DIKAMPUS UNAIR	00274T/483005/2023	239991303000490	29-Des-23	825619	178.925.828	411124	(3.223.889)	157.970.551	-	SOSIALISASI PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA DIKAMPUS UNAIR sesuai BAST Nomor 527/BAST/PPK-DKPP/XII/2023 Tanggal 25-12-2023
34	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU																411211	(17.731.388)			
35	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		00262T/483005/2023	231330301000370	27-DEC-23	533121	3.185.000.000	815619	(3.185.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 417/SP/PPK-DKPP/XI/2023 untuk PENGADAAN REHABILITASI BANGUNAN PERKANTORAN DKPP	00272T/483005/2023	239991302000780	29-Des-23	825619	3.185.000.000	411124	(57.387.387)	2.811.981.982	-	PENGADAAN REHABILITASI BANGUNAN PERKANTORAN DKPP sesuai BAST Nomor 549/BAST/PPK-DKPP/XII/2023 Tanggal 29-12-2023
36	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU																411211	(315.630.631)			
37	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		00263T/483005/2023	231330301000450	27-DEC-23	533121	762.000.000	815619	(762.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 440/SP/PPK-DKPP/XII/2023 untuk PENATAAN GEDUNG DKPP RI LANTAI 3, LANTAI 4, DAN TOILET PIMPINAN	00273T/483005/2023	239991302000830	29-Des-23	825619	762.000.000	411124	(13.729.730)	672.756.756	-	PENATAAN GEDUNG DKPP RI LANTAI 3, LANTAI 4, DAN TOILET PIMPINAN sesuai BAST Nomor 551/BAST/PPK-DKPP/XII/2023 Tanggal 29-12-2023
38	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU																411211	(75.513.514)			
39	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	99.603.000	00453T/683084/2023	230380301000360	20-DEC-23	533121	99.603.000	815619	(99.603.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/02/SP/IPDN.29/2023 untuk Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2023 sesuai BAPP No:000.2.8/284/BAPP /I PDN.29/2023 Tanggal 16 Desember 2023	00002T/683084/2024	249991303000380	04-JAN-24	825619	99.603.000	411124	(1.992.060)	101.595.060	-	Pekerjaan Pemeliharaan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPDN Kampus NTB atas kontrak No:027/02/SP/IPDN.29/2023 Tgl 31-01-2023, BAST No: 0002.8/285/BAST/IPDN.31/2023 Tgl 31-12-2023 d an BAP No:0002.8/286/BAST/IPDN.31/2023
40	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.695.241.808	02567T/039729/2023	231330301000490	28-DEC-23	522191	83.333.000	815619	(83.333.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 006/PRC/PPK-SET/I/2023 untuk Biaya Bandwidth Internet Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/PR C/PPK-SET/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023	00006T/039729/2024	249991303001040	05-JAN-24	825619	83.333.000	411124	(1.501.495)	73.573.280	-	Biaya Bandwidth Internet Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/PRC/PPK-SET/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023. sesuai BAST Nomor 6407/Prc/PPK-SET/XII/2023 Tanggal
41	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH																411211	(8.258.225)			

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
42	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02558T/039729/2023	231330301000530	28-DEC-23	522131	900.909.334	815619	(900.909.334)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 40/SD.I/TU/SUPD.III/2020 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Bantuan Teknis Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Program Percepatan Penurunan Stunting	00004T/039729/2024	249991304000260	04-JAN-24	825619	900.909.334				-	Pengadaan Jasa Konsultan Bantuan Teknis Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Program Percepatan Penurunan Stunting sesuai BAST Nomor 400.5/6283/SD.I/SUPD.III Tanggal 30-12-2023
43	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02568T/039729/2023	231330301000530	28-DEC-23	522131	149.104.593	815619	(149.104.593)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 0483/PRC/PPK-SET/I/2023 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2023	00007T/039729/2024	249991302000540	05-JAN-24	825619	149.104.593	411124	(2.686.569)	131.641.893	-	Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 6405/PPK-SET/XII/2023 Tanggal 29-12-2023
44	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH																411211	(14.776.131)			
45	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02556T/039729/2023	231330301000520	28-DEC-23	522131	151.976.277	815619	(151.976.277)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 0487/PRC/PPK-SET/I/2023 untuk Pengerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2023	00008T/039729/2024	249991302000490	05-JAN-24	825619	151.976.277	411124	(2.738.311)	134.177.254	-	Pengerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 6401/PPK-SET/XII/2023 Tanggal 29-12-2023
46	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH																411211	(15.060.712)			
47	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02566T/039729/2023	231330301000480	27-DEC-23	522131	409.918.604	815619	(409.918.604)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 6255/SD.III/TU SUPD I/XI/2017 untuk Institutional Development for Community-Based Flood Risk	00002T/039729/2024	249991304000250	04-JAN-24	825619	409.918.600			409.918.600	-	Institutional Development for Community-Based Flood Risk sesuai BAST Nomor 500.1/4151/SD III/SUPD I Tanggal 31-12-2023
48	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH											00003T/039729/2024	23133030100570	04-JAN-24	825619	4	425912	(4)			Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 6255/SD.III/TU SUPD I/XI/2017 untuk Institutional Development for Community-Based Flood Risk
49	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48.270.530.866	02630T/634082/2023	231330301000330	27-Des-23	522131	16.850.000	815619	(16.850.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12292/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Administrator Database Senior	00017T/634082/2024	249991302002020	11-Jan-24	825619	16.850.000	411121	(1.406.250)	15.443.750	-	Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15825/PIAK Tanggal 31-12-2023
50	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02651T/634082/2023	231330301000460	27-Des-23	522191	6.975.000	815619	(6.975.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/203/PIAK.2023 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023	00038T/634082/2024	249991302001990	11-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	-	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15888/PIAK Tanggal 31-12-2023
51	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02639T/634082/2023	231330301000460	27-Des-23	522131	7.600.000	815619	(7.600.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12416/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023	00025T/634082/2024	249991304001590	10-Jan-24	825619	7.600.000	411121	(380.000)	7.220.000	-	Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15855/PIAK Tanggal 31-12-2023
52	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02631T/634082/2023	231330301000330	27-Des-23	522131	15.900.000	815619	(15.900.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12290/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Administrator Database Junior	00018T/634082/2024	249991303003710	10-Jan-24	825619	15.900.000	411121	(1.287.500)	14.612.500	-	Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15819/PIAK Tanggal 31-12-2023
53	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02654T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522191	1.037.995.965	815619	(1.037.995.965)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/03/PIAK.2023 untuk Annual Technical Server Perangkat Server Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	00046T/634082/2024	249991304001600	10-JAN-24	825619	1.037.995.965	411124	(18.702.630)	916.428.870	-	Annual Technical Server Perangkat Server Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15944/PIAK Tanggal 31-12-2023

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
54	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(102.864.465)			
55	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02624T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522131	19.650.000	815619	(19.650.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12284/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Data Analis Senior	00016T/634082/2024	249991302002020	11-Jan-24	825619	19.650.000	411121	(1.718.750)	17.931.250	-	Tenaga Ahli Data Analis Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15810/PIAK Tanggal 31-12-2023
56	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02625T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522131	7.550.000	815619	(7.550.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12402/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Jaringan Junior Tahun Anggaran 2023	00028T/634082/2024	249991304001580	10-Jan-24	825619	7.550.000	411121	(377.500)	7.172.500	-	Tenaga Ahli Infrastruktur Junior Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15837/PIAK Tanggal 31-12-2023
57	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02638T/634082/2023	231330301000330	27-Des-23	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12423/PIAK.2022 untuk Operator KTP-El Tahun Anggaran 2023	00027T/634082/2024	249991305000460	10-Jan-24	825619	5.500.000	411121	(275.000)	5.225.000	-	Operator KTP-El Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15858/PIAK Tanggal 31-12-2023
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02629T/634082/2023	231330301000380	27-Des-23	522131	6.199.000	815619	(6.199.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12400/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023	00029T/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	-	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02648T/634082/2023	231330301000460	27-Des-23	522191	6.975.000	815619	(6.975.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/205/PIAK.2023 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023	00039T/634082/2024	249991302001850	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	-	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15891/PIAK Tanggal 31-12-2023
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02661T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522191	1.370.881.917	815619	(1.370.881.917)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2154/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2023	00051T/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)	1.343.464.279	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02626T/634082/2023	231330301000480	27-Des-23	522131	14.500.000	815619	(14.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12303/PIAK.2022 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior	00057T/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)	13.443.750	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02658T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522131	15.700.000	815619	(15.700.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1262/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior	00048T/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	-	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02656T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522131	291.282.315	815619	(291.282.315)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1001/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan	00042T/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)	257.168.170	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(28.865.815)			

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02646T/634082/2023	231330301000470	27-Des-23	522131	938.984.160	815619	(938.984.160)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/53/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat	00033T/634082/2024	249991303003970	11-Jan-24	825619	938.984.160	411124	(16.918.634)	829.013.042	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/15960/PIAK Tanggal 31-12-2023
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(93.052.484)		-	
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02655T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522191	1.234.364.400	815619	(1.234.364.400)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/333/PIAK.2023 untuk Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00047T/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)	1.089.799.200	-	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(122.324.400)			
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02632T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522131	19.955.000	815619	(19.955.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12301/PIAK.2022 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior	00059T/634082/2024	249991303003710	10-JAN-24	825619	19.955.000	411121	(1.756.875)	18.198.125	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15965/PIAK Tanggal 31-12-2023
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02627T/634082/2023	231330301000440	27-Des-23	522131	19.900.000	815619	(19.900.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12305/PIAK.2022 untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior	00058T/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	19.900.000	411121	(1.750.000)	18.150.000	-	Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15971/PIAK Tanggal 31-12-2023
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02662T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522191	10.133.190.000	815619	(10.133.190.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8291/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023	00053T/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	10.133.190.000	411124	(182.580.000)	9.950.610.000	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15910/PIAK Tanggal 31-12-2023
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(1.004.190.000)	(1.004.190.000)		
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02652T/634082/2023	231330301000430	27-Des-23	522191	528.554.250	815619	(528.554.250)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/57/PIAK.2023 untuk Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	00044T/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	528.554.250	411124	(9.523.500)	466.651.500	-	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15948/PIAK Tanggal 31-12-2023
74	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(52.379.250)			
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02643T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522131	17.000.000	815619	(17.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/212/PIAK.2023 untuk Tenaga Ahli Administrator Database Senior	00035T/634082/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	17.000.000	411121	(1.425.000)	15.575.000	-	Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02634T/634082/2023	231330301000330	27-Des-23	522131	6.495.834	815619	(6.495.834)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12341/PIAK.2022 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Programmer	00020T/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	-	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
77	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02636T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522131	6.500.000	815619	(6.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12286/PIAK.2022 untuk Tenaga Desain Grafis	00021T/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.500.000	411121	(325.000)	6.175.000	-	Tenaga Desain Grafis sesuai BAST Nomor 000.4/15813/PIAK Tanggal 31-12-2023
78	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02649T/634082/2023	231330301000470	27-Des-23	522191	6.975.000	815619	(6.975.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/207/PIAK.2023 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023	00040T/634082/2024	249991303003710	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	-	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15885/PIAK Tanggal 31-12-2023
79	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02644T/634082/2023	231330301000430	27-Des-23	522191	4.530.440.683	815619	(4.530.440.683)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/209/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Operasionalisasi Call Center Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	00037T/634082/2024	249991304001610	11-JAN-24	825619	4.530.440.683	411124	(81.629.562)	3.999.848.531	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Operasionalisasi Call Center Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai BAST Nomor 000.4/15901/PIAK Tanggal 31-12-2023
80	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(448.962.590)			
81	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02659T/634082/2023	231330301000460	27-Des-23	522191	1.663.750.000	815619	(1.663.750.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1795/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2023	00049T/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	1.663.750.000	411124	(29.977.477)	1.468.896.397	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15875/PIAK Tanggal 31-12-2023
82	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(164.876.126)			
83	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02657T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522191	217.304.329	815619	(217.304.329)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1003/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2023	00043T/634082/2024	249991303003710	10-JAN-24	825619	217.304.329	411124	(3.915.393)	191.854.273	-	Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15916/PIAK Tanggal 31-12-2023
84	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(21.534.663)			
85	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02623T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522191	788.100.000	815619	(788.100.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1901/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan DC MMU dan DRC Batam	00050T/634082/2024	249991303003670	10-JAN-24	825619	788.100.000	411124	(14.200.000)	695.800.000	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan DC MMU dan DRC Batam sesuai BAST Nomor 000.4/15922/PIAK Tanggal 31-12-2023
86	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(78.100.000)			
87	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02637T/634082/2023	231330301000400	27-Des-23	522191	106.920.000	815619	(106.920.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12418/PIAK.2022 untuk Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama Dengan BP Batam Tahun 2023	00032T/634082/2024	249991304001610	11-Jan-24	825619	106.920.000				-	Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama Dengan BP Batam Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15881/PIAK Tanggal 31-12-2023

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
88	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02642T/634082/2023	231330301000340	27-Des-23	522131	7.550.000	815619	(7.550.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12408/PIAK.2022 untuk Tenaga Keamanan Jaringan Tahun Anggaran 2023	00022T/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	7.550.000	411121	(377.500)	7.172.500	-	Tenaga Keamanan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15840/PIAK Tanggal 31-12-2023
89	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02633T/634082/2023	231330301000330	27-Des-23	522131	13.697.250	815619	(13.697.250)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12294/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Administrator Database	00015T/634082/2024	249991302002020	11-Jan-24	825619	13.697.250	411121	(993.407)	12.703.843	-	Tenaga Ahli Administrator Database sesuai BAST Nomor 000.4/15828/PIAK Tanggal 31-12-2023
90	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02628T/634082/2023	231330301000380	27-Des-23	522131	6.199.000	815619	(6.199.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12410/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Database Junior Tahun Anggaran 2023	00030T/634082/2024	249991302001960	11-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	-	Tenaga Ahli Database Junior Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15846/PIAK Tanggal 31-12-2023
91	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02660T/634082/2023	231330301000350	27-Des-23	522131	49.500.000	815619	(49.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6481/PIAK.2023 untuk Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023	00052T/634082/2024	249991303003920	11-JAN-24	825619	49.500.000	411121	(1.485.000)	48.015.000	-	Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15905/ PIAK Tanggal 31-12-2023
92	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02650T/634082/2023	231330301000460	22-Des-23	522191	6.975.000	815619	(6.975.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/201/PIAK.2023 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023	00041T/634082/2024	249991302001850	10-JAN-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	-	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15894/PIAK Tanggal 31-12-2023
93	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02641T/634082/2023	231330301000470	22-Des-23	522131	6.600.000	815619	(6.600.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12412/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023	00023T/634082/2024	249991304001590	10-JAN-24	825619	6.600.000	411121	(330.000)	6.270.000	-	Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15852/PIAK Tanggal 31-12-2023
94	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02653T/634082/2023	231330301000380	22-Des-23	522191	828.415.200	815619	(828.415.200)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/01/PIAK.2023 untuk Annual Technical Support Perangkat Jaringan Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00045T/634082/2024	249991302001830	10-JAN-24	825619	828.415.200	411124	(14.926.400)	731.393.600	-	Annual Technical Support Perangkat Jaringan Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15936/PIAK Tanggal 31-12-2023
95	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(82.095.200)			
96	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02635T/634082/2023	231330301000340	22-Des-23	522131	7.550.000	815619	(7.550.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12404/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Infrastruktur Junior Tahun Anggaran 2023	00031T/634082/2024	249991302001960	11-Jan-24	825619	7.550.000	411211	(377.500)	7.172.500	-	Tenaga Ahli Jaringan Junior Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15834/PIAK Tanggal 31-12-2023
97	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02645T/634082/2023	231330301000410	21-Des-23	522131	281.191.700	815619	(281.191.700)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/55/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00034T/634082/2024	249991303003990	11-Jan-24	825619	281.191.700	411124	(5.066.517)	248.259.339	-	Paket Pekerjaan Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15952/PIAK Tanggal 31-12-2023
98	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(27.865.844)		-	
99	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02640T/634082/2023	231330301000470	21-Des-23	522131	6.600.000	815619	(6.600.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12414/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023	00024T/634082/2024	249991304001570	10-JAN-24	825619	6.600.000	411211	(330.000)	6.270.000	-	Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15849/PIAK Tanggal 31-12-2023

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
100	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02666T/634082/2023	231330301000300	21-Des-23	522191	95.000.000	815619	(95.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/13287/PIAK.2023 untuk Pengadaan Assessment Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	00056T/634082/2024	249991303003680	10-JAN-24	825619	95.000.000	411124	(1.711.712)	83.873.874	-	Pengadaan Assessment Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15455/PIAK Tanggal 29-12-2023
101	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(9.414.414)			
102	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02664T/634082/2023	231330301000290	21-Des-23	522191	563.868.900	815619	(563.868.900)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8596/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sertifikasi Design Rencana Pembangunan Data Center dan IT Master Plan	00054T/634082/2024	249991302001860	10-JAN-24	825619	563.868.900	411124	(10.159.800)	497.830.200	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sertifikasi Design Rencana Pembangunan Data Center dan IT Master Plan sesuai BAST Nomor 000.4/15928/PIAK Tanggal 31-12-2023
103	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(55.878.900)			
104	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02668T/634082/2023	231330301000290	21-Des-23	522131	6.000.000	815619	(6.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12406/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Adjudikasi Tahun Anggaran 2023	00026T/634082/2024	249991304001570	10-Jan-24	825619	6.000.000	411121	(300.000)	5.700.000	-	Tenaga Ahli Adjudikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15861/PIAK Tanggal 31-12-2023
105	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02663T/634082/2023	231330301000290	21-Des-23	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12288/PIAK.2022 untuk Tenaga Operator Komputer	00019T/634082/2024	249991302001850	10-Jan-24	825619	5.500.000	411121	(275.000)	5.225.000	-	Tenaga Operator Komputer sesuai BAST Nomor 000.4/15816/PIAK Tanggal 31-12-2023
106	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02665T/634082/2023	231330301000240	21-Des-23	522191	22.222.042.602	815619	(22.222.042.602)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/11337/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 November 2023 s.d 31 Desember 2023 Tahun Anggar an 2023	00055T/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	22.222.042.602	411124	(400.397.164)	21.821.645.438	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 November 2023 s.d 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15932/PIAK Tanggal 3 1-12-2023
107	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02669T/634082/2023	231330301000160	21-Des-23	522131	7.800.000	815619	(7.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/05/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Junior Asistensi Profesional Staf.	00009T/634082/2024	249991302001030	08-Jan-24	825619	7.800.000	411121	(195.000)	7.605.000	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Junior Asistensi Profesional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3366/IDKN Tanggal 31-12-2023
108	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02674T/634082/2023	231330301000170	21-Des-23	522191	279.819.900	815619	(279.819.900)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/01/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi Tahun 2023.	00014T/634082/2024	249991303001620	05-Jan-24	825619	279.819.900	411121	(27.729.900)	252.090.000	-	Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi Tahun 2023. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3345/IDKN Tanggal 31-12-2023
109	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02670T/634082/2023	231330301000160	21-Des-23	522131	7.200.000	815619	(7.200.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/09/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan.	00007T/634082/2024	249991303002310	08-Jan-24	825619	7.200.000	411121	(180.000)	7.020.000	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3372/IDKN Tanggal 31-12-2023
110	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02672T/634082/2023	231330301000160	21-Des-23	522131	16.500.000	815619	(16.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/03/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan.	00008T/634082/2024	249991303002310	08-Jan-24	825619	16.500.000	411121	(737.500)	15.762.500	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3360/IDKN Tanggal 31-12-2023

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
111	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02671T/634082/2023	231330301000160	21-Des-23	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/07/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan.	00006T/634082/2024	249991302001030	08-Jan-24	825619	7.500.000	411121	(187.500)	7.312.500	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3378/IDKN Tanggal 31-12-2023
112	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02673T/634082/2023	231330301000160	21-Des-23	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/11/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf.	00004T/634082/2024	249991304000900	08-Jan-24	825619	7.500.000	411121	(187.500)	7.312.500	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3396/IDKN Tanggal 31-12-2023
113	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02677T/634082/2023	231330301000110	21-Des-23	536111	302.430.600	815619	(302.430.600)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/445/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi Data Balikan Pusat dan Daerah.	00012T/634082/2024	249991303002310	08-Jan-24	825619	302.430.600	411124	(5.449.200)	267.010.800	-	Paket Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi Data Balikan Pusat dan Daerah. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3293/IDKN Tanggal 27-12-2023
114	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(29.970.600)		-	
115	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02676T/634082/2023	231330301000110	21-Des-23	536111	378.741.101	815619	(378.741.101)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/383/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Middleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR).	00013T/634082/2024	249991303002290	08-Jan-24	825619	378.741.101	411124	(6.824.164)	334.384.035	-	Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Middleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR). sesuai BAST Nomor 000.4.2/3300/IDKN Tanggal 27-12-2023
116	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(37.532.902)		-	
117	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02675T/634082/2023	231330301000110	21-Des-23	522131	6.300.000	815619	(6.300.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/15/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf.	00005T/634082/2024	249991302001030	08-Jan-24	825619	6.300.000	411121	(157.500)	6.142.500	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3384/IDKN Tanggal 31-12-2023
118	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02678T/634082/2023	231330301000110	21-Des-23	522131	6.900.000	815619	(6.900.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/834/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff.	00010T/634082/2024	249991304000900	08-Jan-24	825619	6.900.000	411121	(172.500)	6.727.500	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3351/IDKN Tanggal 31-12-2023
119	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02679T/634082/2023	231330301000090	21-Des-23	522131	6.900.000	815619	(6.900.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/837/FPD2K untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff.	00011T/634082/2024	249991303002320	08-Jan-24	825619	6.900.000	411121	(172.500)	6.727.500	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff. sesuai BAST Nomor 000.4.2/3355/IDKN Tanggal 31-12-2023
120	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02647T/634082/2023	231330301000030	21-Des-23	522191	94.256.760	815619	(94.256.760)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/101/PIAK.2023 untuk Pemeliharaan Zimbra Mail Server	00036T/634082/2024	249991302002010	11-JAN-24	825619	94.256.760	411124	(1.698.320)	83.217.680	-	Pemeliharaan Zimbra Mail Server sesuai BAST Nomor 000.4/15956/PIAK Tanggal 31-12-2023
121	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(9.340.760)			

Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2023	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
122	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	171.600.000	01529T/403231/2023	231330301000030	20-DEC-23	521111	120.000.000	815619	(120.000.000)	-	RPTA atas Kontrak Nomor 027/146/SP/I/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2023	00002T/403231/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	120.000.000	411124	(2.162.162)	105.945.946	-	Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2023 sesuai BAST Nomor 027/5079/BA-ST/XII/2023 Tanggal 31-12-2023
123	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411211	(11.891.892)			
124	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		01530T/403231/2023	231330301000010	20-DEC-23	521111	51.600.000	815619	(51.600.000)	-	RPTA atas Kontrak Nomor 027/2591/SP/VII/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet (backup provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2023	00003T/403231/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	51.600.000	411124	(927.729)	45.538.757	-	Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet (backup provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2023 sesuai BAST Nomor 027/5081/BA-ST/XII/2023 Tanggal 31-12-2023
125	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411211	(5.133.514)			
126	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	102.442.000	00362T/506138/2023	230230301000230	21-DEC-23	522191	90.390.000	815619	(90.390.000)	-	RPTA atas Kontrak Nomor 000.4/154/e-CAT/SPK-PL/Balai-KMG untuk Pengadaan Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	00002T/506138/2024	249991302000610	05-JAN-24	825619	90.390.000	411124	(1.628.649)	79.803.783	-	Pengadaan Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service) sesuai BAST Nomor 000.4/7172/e-CAT/BAST-PL/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2023
127	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									-							411211	(8.957.568)			
128	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		00364T/506138/2023	230230301000220	21-DEC-23	533121	1.834.933.350	815619	(1.834.933.350)	-	RPTA atas Kontrak Nomor 000.4/4573/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk Renovasi penambahan nilai bangunan permanen asrama kenanga	00368T/506138/2023	239991302000390	29-DEC-23	825619	1.834.933.350	411128	(28.929.129)	1.624.163.979	-	Renovasi penambahan nilai bangunan permanen asrama kenanga sesuai BAST No. 000.4/7205/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tgl 28 Des 2023 Jaminan Pemeliharaan No.20.06.01.1106.00106 Tgl 29 Des 2023
129	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									-							411211	(181.840.242)			
130	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		00363T/506138/2023	230230301000230	21-DEC-23	522191	12.052.000	815619	(12.052.000)	-	RPTA atas Kontrak Nomor 000.4/157/e-CAT/SPK-PL/Balai-KMG untuk Pengadaan Jasa Pengemudi (Driver)	00003T/506138/2024	249991302000680	05-JAN-24	825619	12.052.000	411124	(217.153)	10.640.505	-	Pengadaan Jasa Pengemudi (Driver) sesuai BAST Nomor 000.4/7175/e-CAT/BAST-PL/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2023
131	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																411211	(1.194.342)			
Jumlah			**54.982.239.721**					**61.112.291.416**		**(61.112.291.416)**	**-**						**61.112.291.416**		**(4.519.648.615)**	**55.439.420.410**	**-**	

LAMPIRAN XXVI

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXVI

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2022	**Saldo per 31 Desember 2022**	**24.425.977.439**	**7.834.257.035**	**1.317.842.250**	**12.243.518.578**	**4.258.572.287**	**31.445.180.174**	**27.449.502.105**	**72.621.405.554**	**4.739.543.060**	**638.224.000**	**8.662.539.997**	**195.636.562.479**
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	401	25.289.123.742	405.700.000	293.485.500	-	1.039.806.290	4.020.352.092	12.487.408.958	-	1.058.196.350	-	1.944.745.912	46.538.818.844
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	912	26.736.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.736.100
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**25.315.859.842**	**405.700.000**	**293.485.500**	**-**	**1.039.806.290**	**4.020.352.092**	**12.487.408.958**	**-**	**1.058.196.350**	**-**	**1.944.745.912**	**46.565.554.944**
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	402	(775.175.572)	-	-	-	(69.494.500)	-	-	-	-	-	(481.414.956)	(1.326.085.028)
Penghapusan	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(438.224.000)	-	(438.224.000)
Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan)	393	-	-	-	-	-	(1.582.358.985)	-	-	-	-	-	(1.582.358.985)
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	911	(11.438.035.841)	(1.101.769.735)	-	(4.025.860.000)	(290.804.000)	-	-	(9.085.531.027)	-	(200.000.000)	(757.566.706)	(26.899.567.309)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(12.213.211.413)**	**(1.101.769.735)**	**-**	**(4.025.860.000)**	**(360.298.500)**	**(1.582.358.985)**	**-**	**(9.085.531.027)**	**-**	**(638.224.000)**	**(1.238.981.662)**	**(30.246.235.322)**
Saldo per 31 Desember 2023	**Saldo per 31 Desember 2023**	**37.528.625.868**	**7.138.187.300**	**1.611.327.750**	**8.217.658.578**	**4.938.080.077**	**33.883.173.281**	**39.936.911.063**	**63.535.874.527**	**5.797.739.410**	**-**	**9.368.304.247**	**211.955.882.101**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023**	**(31.632.098.050)**	**(405.700.000)**	**(1.317.842.250)**	**(8.217.658.578)**	**(4.927.350.459)**	**(33.238.857.717)**	**(39.849.763.563)**	**(63.521.114.527)**	**(5.443.682.268)**	**-**	**(9.100.231.593)**	**(197.654.299.005)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Nilai Buku per 31 Desember 2023**	**5.896.527.818**	**6.732.487.300**	**293.485.500**	**-**	**10.729.618**	**644.315.564**	**87.147.500**	**14.760.000**	**354.057.142**	**-**	**268.072.654**	**14.301.583.096**

LAMPIRAN XXVII

REKAPITULASI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

LAMPIRAN XXVII

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
01	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	28.469.000	133.320.202	154.577.688	316.366.890	192.355.583	107.966.792	-	300.322.375
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	5.082.246.771	-	4.154.181.904	9.236.428.675	4.646.788.639	1.331.645.195	-	5.978.433.834
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	5.434.581.669	-	144.717.455	5.579.299.124	4.274.425.847	-	-	4.274.425.847
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	6.808.000	167.955.170	189.345.000	364.108.170	-	31.129.754	-	31.129.754
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	346.508.583	-	27.573.000	374.081.583	355.844.951	70.507.200	-	426.352.151
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	423.134.094	42.076.319	-	465.210.413	465.918.613	62.278.620	-	528.197.233
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	279.917.085	-	-	279.917.085	274.031.075	-	-	274.031.075
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	189.701.826	111.747.810	-	301.449.636	237.915.276	117.474.018	-	355.389.294
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	459.122.584	77.531.575	99.603.000	636.257.159	450.243.746	79.308.425	-	529.552.171
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	148.078.393	29.524.900	-	177.603.293	140.412.563	-	-	140.412.563
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.771.713.895	86.653.399	-	1.858.367.294	1.681.290.297	73.151.313	-	1.754.441.610
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.456.481.950	981.906	-	1.457.463.856	1.460.202.414	1.090.710	-	1.461.293.124
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	6.549.120	-	-	6.549.120	481.410.658	-	-	481.410.658
04	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	-	-	14.670.000	14.670.000	-	-	7.597.000	7.597.000
04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	60	60	-	-	-	-
04	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.493.515.729	387.239.153	-	1.880.754.882	1.756.019.913	302.226.134	-	2.058.246.047
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	264.680.529	34.091.444	-	298.771.973	212.523.914	34.029.895	-	246.553.809
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	223.755.400	10.529.100	-	234.284.500	52.248.615	-	-	52.248.615
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	212.280.465	33.866.231	-	246.146.696	197.014.866	31.040.805	-	228.055.671
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.672.103.919	219.159.005	1.695.241.804	3.586.504.728	1.779.998.612	221.436.433	-	2.001.435.045
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.393.678.021	1.043.320	-	1.394.721.341	1.619.528.649	962.234	-	1.620.490.883
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.469.817.369	189.108.545	48.270.530.866	49.929.456.780	1.376.529.469	229.803.671	-	1.606.333.140
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.403.503.090	-	-	1.403.503.090	1.541.499.581	27.673.884	-	1.569.173.465
11	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	939.916.474	-	-	939.916.474	933.937.495	-	-	933.937.495
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	569.906.745	-	-	569.906.745	631.712.539	42.906.468	-	674.619.007

LAMPIRAN XXVII

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	376.011.671	38.758.702	-	414.770.373	347.816.880	42.741.316	-	390.558.196
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.104.698.323	187.633.345	171.600.000	1.463.931.668	1.059.832.433	186.286.256	-	1.246.118.689
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	76.789.267	35.388.750	102.442.000	214.620.017	86.826.701	35.388.750	-	122.215.451
JUMLAH			**26.833.969.972**	**1.795.608.876**	**55.024.482.777**	**83.654.061.625**	**26.256.329.329**	**3.029.047.873**	**7.597.000**	**29.292.974.202**

LAMPIRAN XXVIII

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

LAMPIRAN XXVIII

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
Setjen	IPDN Kampus Jakarta (352593)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	15.926.389	35.038.056
		PT. BNI (PERSERO) Tbk.	15.926.389	35.038.056
		PT. BRI (PERSERO) Tbk.	15.926.388	35.038.056
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)	15.926.389	35.038.055
		PT. STU	9.781.389	21.519.055
		Koperasi Bina Bhakti Praja (Minimarket)	12.788.646	-
		Koperasi Bina Bhakti Praja (Kantin)	26.972.344	-
	Kantor Pusat (403200)	Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri	19.428.000	38.856.000
		Penempatan Kantor Kas Bank BRI	-	119.738.000
		Penempatan 2 (dua) unit mesin ATM Bank BRI		
		BNI Gedung B Lantai I (Bank)	563.537.567	710.547.367
		Koperasi P (Kantin Gedung C)	205.464.400	13.298.500
		Yayasan APA	-	2.421.300
		Sewa Tanah dan Bangunan Dharma Wanita Persatuan Setjen Kemendagri- Kedai Kopi	6.759.000	13.084.000
		PT. DTN	68.181.818	109.090.909
		PT. TBS	186.007.467	297.611.946
	IPDN Jatinangor (448302)	Gedung Fitnes Tim Raga Praja Gym	3.666.667	9.166.667
		PT. BI	-	120.864.584
		BRI Cab Sumedang	-	13.630.750
		Bank BJB Jatinangor	113.426.250	143.673.250
		Bank BJB	84.750.000	-
		CV. M	40.037.500	88.082.500
		PT. STU	16.009.375	54.431.875
		PT. STU	35.343.750	49.968.750
		PT. STU	38.183.333	-
		BNI (samping Pengasuhan)	3.640.000	17.884.000
		BNI Cabang PTB	38.880.000	-
		Koperasi AP	5.217.375	15.652.125
		PT. SS	-	68.866.000
		PT. SS	68.866.000	-
		Dharma Wanita	9.799.500	29.398.500
		CV. KMR	-	78.540.000
		CV. KMR	-	798.417
		CV. KMR	248.809.167	-
		Koperasi KDKS	16.414.667	-
		Koprasi BBP	44.241.792	-
		KAMPUS PASCASARJANA	5.174.795.384	3.814.030.695
		AYI cs	1.417.229	-
	IPDN Kampus NTB (683084)	Koperasi Konsumen Abdi Praja Mandalika	25.909.167	-
	IPDN Kampus Sulsel (677024)	Koperasi WP	3.784.667	9.461.667
		Koperasi WP	16.500.000	-
		PT. BNI (PERSERO) Tbk.	16.288.792	-
Total Setjen			**7.168.606.801**	**5.980.769.080**
Itjen	Itjen (027203)	PT Bank Negara Indonesia	18.570.611	34.488.278
Total Itjen			**18.570.611**	**34.488.278**
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	PT Bank Negara Indonesia	34.806.000	58.010.000
		PT Bank Mandiri	23.705.417	42.669.750
		PT. Bank BRI	25.285.778	44.250.111
	Balai Besar PMD Malang (028830)	Koperasi RAS	7.000.000	-
Total Ditjen Bina Pemdes			**90.797.195**	**144.929.861**
Ditjen Bina Bangda	Ditjen Bina Bangda (039729)	PT Bank Negara Indonesia	23.684.000	47.368.000
		PT.Bank Mandiri	40.000.000	10.000.000
		PT. Bank BRI	41.250.000	-
		Sewa Gedung Serbaguna	160.640.000	111.280.000
		Sewa Koperasi PM	27.779.500	55.559.000
Total Ditjen Bina Bangda			**293.353.500**	**224.207.000**
Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil (634082)	Voucher Jasa Layanan Kependudukan	119.943.814.000	-
Total Ditjen Dukcapil			**119.943.814.000**	**-**
BPSDM	Kantor Pusat (403231)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	16.331.611	31.406.944
		Koperasi PP-I Kemendagri	28.697.000	-
	PPSDM Regional Yogyakarta (027114)	BPD Yogyakarta (Cabang Utama)	-	3.482.083
		BPD DIY	49.015.283	-
		KPN Melati	-	3.428.250
	PPSDM Regional Bukittingi (506137)	BNI	5.280.419	17.953.419
		BRI Cab Sumedang	5.315.419	50.398.000
		BPD SUMBAR	25.199.000	18.072.419
	Balai PK Satpol PP dan Damkar (506138)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	41.386.667	-
Total BPSDM			**171.225.399**	**124.741.115**
Total Keseluruhan			**127.686.367.506**	**6.509.135.334**

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	29-DEC-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	108.548.206	(108.548.206)
2	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	31-DEC-23	209	Koreksi Manual	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	156.132.563	(156.132.563)
3	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	156.132.562	156.132.562
4	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
5	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	22.876.250	(22.876.250)
6	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
7	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
8	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.109.442	(4.109.442)
9	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
10	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.467.750	(4.467.750)
11	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
12	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
13	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
14	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
15	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
16	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
17	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
18	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
19	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.525.250	(2.525.250)
20	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.501.940	(2.501.940)
21	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.513.815	(4.513.815)
22	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.469.750	(2.469.750)
23	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	8.760.675	(8.760.675)
24	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	733.700	(733.700)
25	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
26	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
27	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
28	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
29	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
30	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	8.521.470	(8.521.470)
31	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.781.435	(5.781.435)
32	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.484.845	(3.484.845)
33	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
34	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
35	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
36	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
37	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
38	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.305.357	(4.305.357)
39	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
40	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
41	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
42	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
43	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
44	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
45	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.625.000	(1.625.000)
46	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
47	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	25.287.406	(25.287.406)
48	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.121.875	(3.121.875)
49	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.090.000	(1.090.000)
50	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
51	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	13.783.647	(13.783.647)
52	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
53	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	2.459.050	(2.459.050)
54	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
55	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	25.162.035	(25.162.035)
56	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
57	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
58	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	771.260	(771.260)
59	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.248.747	(4.248.747)
60	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.068.150	(4.068.150)
61	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	6.946.380	(6.946.380)
62	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.402.817	(2.402.817)
63	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	974.968	(974.968)
64	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
65	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
66	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
67	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
68	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
69	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
70	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
71	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
72	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	842.913	842.913
73	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
74	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
75	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
76	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
77	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
78	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
79	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
80	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
81	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
82	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11.092.816	11.092.816
83	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
84	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	29.952	29.952
85	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
86	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
87	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
88	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
89	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
90	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
91	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
92	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
93	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
94	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
95	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
96	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
97	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
98	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
99	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
100	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
101	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	12-OCT-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	462.756	462.756
102	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	10.292.043	10.292.043
103	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.490.000	(5.490.000)
104	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	24.950.000	(24.950.000)

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
105	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	01-Nop-23	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	249.000.000	(249.000.000)
106	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	01-Nop-23	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	294.000.000	(294.000.000)
107	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	06-Nop-23	564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1.029.475.100	(1.029.475.100)
108	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	30-Nop-23			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	543.000.000	543.000.000
109	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	15-DEC-23			139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	26.560.857	26.560.857
110	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	29-DEC-23			533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.708.668	1.708.668
111	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	27-Nop-23			139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	30.440.000	30.440.000
112	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	29-DEC-23			425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	77.616.806	77.616.806
113	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	15-DEC-23			139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	87.329.523	87.329.523
114	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-DEC-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	254.389.669	(254.389.669)
115	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-DEC-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	430.940.800	430.940.800
116	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	21-AUG-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	38.083.587	(38.083.587)
117	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	22-AUG-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	51.533.886	(51.533.886)
118	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	21-AUG-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	32.871.020	(32.871.020)
119	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27-Nop-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	79.550.779	(79.550.779)
120	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	71.841.000	(71.841.000)
121	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	40.264.000	(40.264.000)
122	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	38.842.500	(38.842.500)
123	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	169.493.000	(169.493.000)
124	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	21-AUG-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	714.588	714.588

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
125	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	22-AUG-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	585.612	585.612
126	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	21-AUG-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	827.904	827.904
127	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	16-OCT-23	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	167.277.000	(167.277.000)
128	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-DEC-23			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	430.940.800	(430.940.800)
129	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-Sep-23			425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122.488.493	122.488.493
130	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-OCT-23			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	167.277.000	167.277.000
131	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23			425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	118.393.279	118.393.279
132	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	281.598.000	281.598.000
133	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	758.400	(758.400)
134	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	871.500	(871.500)
135	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.074.000	(1.074.000)
136	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.240.500	(2.240.500)
137	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.553.000	(2.553.000)
138	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	496.750	(496.750)
139	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	487.500	(487.500)
140	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.792.000	3.792.000
141	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.370.000	5.370.000
142	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.987.000	1.987.000
143	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12.765.000	12.765.000
144	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.950.000	1.950.000
145	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.486.000	3.486.000
146	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	27-Jun-22	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.962.000	8.962.000

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
147	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	31-DEC-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.892.123	(24.892.123)
148	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	31-DEC-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	199.136.969	199.136.969
149	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29-AUG-23	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	47.531.000	(47.531.000)
150	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29-AUG-23	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.506.200	9.506.200
151	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	31-DEC-23			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.136.969	(199.136.969)
152	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	31-OCT-23			391113	Koreksi Nilai Persediaan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.999.000	3.999.000
153	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	330.498	(330.498)
154	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	29.204.777	(29.204.777)
155	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	94.703.012	(94.703.012)
156	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	270.580.035	270.580.035
157	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134113	Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	333.768.881	333.768.881
158	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134113	Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.832.841	2.832.841
159	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19-Jun-23	564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	11.779.491.807	(11.779.491.807)
160	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	30-Jun-23			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11.169.805.882	11.169.805.882
161	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	30-MAY-22	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	360.000	360.000
162	1011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.011.875	(2.011.875)
163	1011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	15.103.369.500	(15.103.369.500)
164	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	31-DEC-23			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	178.473.570	(178.473.570)
TOTAL											**45.015.895.829**	**(16.791.155.661)**

LAMPIRAN XXX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI

LAMPIRAN XXX

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-20	100	Saldo Awal	162151	Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	686.015.000	686.015.000
2	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-20	100	Saldo Awal	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	169315	Akumulasi Amortisasi Software	428.759.375	(428.759.375)
3	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19-AUG-20	100	Saldo Awal	162151	Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.725.980.839	1.725.980.839
4	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19-AUG-20	100	Saldo Awal	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	169315	Akumulasi Amortisasi Software	1.078.738.025	(1.078.738.025)
5	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14-Nop-17	100	Saldo Awal	162151	Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.059.438.966	1.059.438.966
6	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14-Nop-17	100	Saldo Awal	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	169315	Akumulasi Amortisasi Software	1.059.438.966	(1.059.438.966)
7	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	162151	Software	1.709.289.805	(1.709.289.805)
8	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.709.289.805	1.709.289.805
9	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	162151	Software	3.578.151.690	(3.578.151.690)
10	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	849.814.395	849.814.395
11	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	162151	Software	3.700.447.400	(3.700.447.400)
12	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23	305	Koreksi Pencatatan	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.223.641.515	1.223.641.515
13	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23			522191	Belanja Jasa Lainnya	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.085.319.150	1.085.319.150
14	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-DEC-23			522191	Belanja Jasa Lainnya	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.000.547.340	1.000.547.340
TOTAL											**20.894.872.271**	**(2.214.778.251)**

LAMPIRAN XXXI

RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN

LAMPIRAN XXXI

RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
						Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	10-Feb-23	00002/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
2	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	10-Feb-23	00002/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	32.500	32.500
3	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	26-Apr-23	00003/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.500.000	(8.500.000)
4	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	26-Apr-23	00003/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	46.250	46.250
5	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-OCT-23	00006/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
6	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00010/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
7	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00010/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
8	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
9	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	(2.000.000)
10	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
11	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	(6.500.000)
12	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
13	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
14	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
15	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
16	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00011/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
17	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00012/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	(6.500.000)
18	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00012/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
19	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00012/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
20	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00012/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
21	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00012/KOR/448302/2023	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
22	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27-Nop-23	00014/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
23	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27-Nop-23	00014/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
24	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27-Nop-23	00014/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	(6.500.000)
25	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27-Nop-23	00014/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
26	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27-Nop-23	00014/KOR/448302/2023	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
27	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00015/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	(6.500.000)
28	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00015/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
						Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
29	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00015/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
30	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00015/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
31	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00015/KOR/448302/2023	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
32	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00020/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
33	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00020/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
34	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00021/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.000.000	(18.000.000)
35	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00021/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	9.000.000	9.000.000
36	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00022/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
37	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00022/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
38	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00023/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
39	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00023/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
40	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00024/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
41	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00024/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
42	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00025/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
43	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00025/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
44	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00026/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
45	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00026/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	650.000	650.000
46	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00027/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
47	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00027/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
48	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00028/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
49	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00028/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
50	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00029/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
51	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00029/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
52	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00030/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
53	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00030/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
54	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00031/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.250.000	(10.250.000)

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
						Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
55	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00031/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	1.025.000	1.025.000
56	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00032/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
57	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00032/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	1.300.000	1.300.000
58	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00033/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
59	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00033/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
60	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	01-DEC-23	00091/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	(750.000)
61	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	00092/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
62	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	00093/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	39.750.000	(39.750.000)
63	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29-DEC-23	00093/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	198.750	198.750
64	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00094/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.000.000	(13.000.000)
65	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00094/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
66	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00095/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	19.500.000	(19.500.000)
67	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	20-Nop-23	00096/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
68	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-DEC-23	00098/KOR/448302/2023	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
69	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-DEC-23	00098/KOR/448302/2023	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
70	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	31-DEC-23	034/Jukor BPK Point 9/2023	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	391119	Koreksi Lainnya	330.000	330.000
71	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	31-DEC-23	20	594931	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	391119	Koreksi Lainnya	690.000	690.000
72	1005	28830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	31-DEC-23	2	391119	Koreksi Lainnya	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.500.000	(10.500.000)
73	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31-OCT-23	1	391119	Koreksi Lainnya	114211	uang muka belanja pegawai (prepayment)	888.543	(888.543)
74	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	31-DEC-23	13	594931	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	391119	Koreksi Lainnya	43.750	43.750
TOTAL										**512.704.793**	**(235.572.293)**

LAMPIRAN XXXII

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

LAMPIRAN XXXII

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Selisih Absolut	Selisih Neto
1	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	132111	Peralatan dan Mesin	140.000.000	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	140.000.000	-	-	-
2	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(140.000.000)	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(140.000.000)	-	-	-
3	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	358.761.331	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	358.761.331	-	-	-
4	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	133111	Gedung dan Bangunan	2.150.000.000	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	2.150.000.000	-	-	-
5	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	131111	Tanah	706.789.350.510	1012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	706.789.350.510	-	-	-
6	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	132111	Peralatan dan Mesin	159.125.000	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	159.125.000	-	-	-
7	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	111.761.450	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	111.761.450	-	-	-
8	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	135111	Aset Tetap Renovasi	423.338.000	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	423.338.000	-	-	-
9	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(99.453.125)	1001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	(99.453.125)	-	-	-
10	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	132111	Peralatan dan Mesin	95.475.000	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	95.475.000	-	-	-
11	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.671.875)	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	(59.671.875)	-	-	-
12	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	132111	Peralatan dan Mesin	95.475.000	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	95.475.000	-	-	-
13	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.671.875)	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	(59.671.875)	-	-	-
14	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	132111	Peralatan dan Mesin	95.475.000	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	95.475.000	-	-	-
15	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.671.875)	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	(59.671.875)	-	-	-
16	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	132111	Peralatan dan Mesin	95.475.000	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	95.475.000	-	-	-
17	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.671.875)	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	(59.671.875)	-	-	-
18	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	132111	Peralatan dan Mesin	95.475.000	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	95.475.000	-	-	-
19	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.671.875)	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	(59.671.875)	-	-	-
20	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	13.061.615.923	1012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	13.061.615.923	-	-	-
21	1006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	132111	Peralatan dan Mesin	396.430.000	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	396.430.000	-	-	-
22	1006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(396.430.000)	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(396.430.000)	-	-	-
23	1007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	133111	Gedung dan Bangunan	-	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	59.708.010	(59.708.010)	59.708.010	-
24	1007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	135111	Aset Tetap Renovasi	59.708.010	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	-	59.708.010	59.708.010	-
25	1501	409294	SEKRETARIAT JENDERAL	131111	Tanah	706.789.350.510	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	706.789.350.510	-	-	706.789.350.510
TOTAL						**1.429.982.573.234**	**TOTAL**			**1.429.982.573.234**	**-**	**119.416.020**	**706.789.350.510**

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
1	01004	065129	DK	BAPPEDA PROPINSI NAD	-	17.500.000	(17.500.000)	-	-	-	P.C UNIT
2	01004	080054	TP	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT	1.809.502.117	-	-	-	-	1.809.502.117	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
3	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	1.575.601.236	1.629.744.712	(1.629.744.712)	-	-	1.575.601.236	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL
											RAK KAYU
											TELEVISI
											PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
4	01004	160080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	14.500.000	(14.500.000)	-	-	-	P.C UNIT
5	01004	170090	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
6	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	-	795.460.000	(795.460.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
											PERAHU PENUMPANG
											UNIT TRANCIEVER SSB PORTABLE
											P.C UNIT
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
7	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	-	18.000.000	(18.000.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
8	01004	240084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
9	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	2.837.269.543	248.875.000	(248.875.000)	-	-	2.837.269.543	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A SEMI PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN
											BANGUNAN DERMAGA
											SEPEDA MOTOR
											UNIT TRANCEIVER SsB PORTABLE
											P.C UNIT
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
10	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	291.825.605	174.900.000	(174.900.000)	-	-	291.825.605	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
											MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
11	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	762.374.061	175.000.000	(175.000.000)	-	-	762.374.061	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN
											TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA
											MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
12	01004	240351	TP	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	367.994.675	-	-	-	-	367.994.675	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
13	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	567.007.449	1.074.129.737	(1.074.129.737)	-	-	567.007.449	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) LAINNYA
											TELEVISI
											HANDY TALKY (HT)
											ALAT KOMUNIKASI RASIO SsB LAINNYA
											STELATH DIGITAL REPEATER
											RADIO LINK
											PORTABLE REPORTER LINK
											PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
											SWITCHER/MENARA ANTENA LAINNYA
											PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF STATIONARY
											UNINTERUPTED POWER SUPPLY (UPS)
14	01004	250084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
15	01004	250300	TP	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	345.658.565	-	-	-	-	345.658.565	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA
16	01004	251418	TP	BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. ASMAT	5.436.558.750	-	-	-	-	5.436.558.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN
17	01004	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	197.937.405	-	-	-	-	197.937.405	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA LAINNYA

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
18	01004	251907	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	3.917.569.440	-	-	-	-	3.917.569.440	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
19	01004	255161	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA	797.747.050	-	-	-	-	797.747.050	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
20	01004	259396	TP	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV PAPUA	463.816.260	-	-	-	-	463.816.260	GEDUNG MENARA PENUNJAU PERMANEN
21	01004	280067	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
22	01004	320052	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	-	26.895.000	(26.895.000)	-	-	-	STABILIZER/UPS
											P.C UNIT
23	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	144.164.028	-	-	-	-	144.164.028	P.C UNIT
24	01005	029367	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	166.000.000	-	-	-	-	166.000.000	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
25	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	-	9.775.000	(9.775.000)	-	-	-	P.C UNIT
26	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	499.000	9.800.000	(9.800.000)	-	-	499.000	P.C UNIT
											PENJEPIT KERTAS
											ORDNER DAN MAP
											KERTAS HVS
27	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
28	01005	029472	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
29	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	-	10.120.000	(10.120.000)	-	-	-	P.C UNIT
30	01005	029478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANDUNG BARAT	-	9.982.500	(9.982.500)	-	-	-	P.C UNIT
31	01005	039438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	170.461.250	-	-	-	-	170.461.250	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
32	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
33	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
34	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
35	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
36	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
37	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
38	01005	039490	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	161.028.000	-	-	-	-	161.028.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
39	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	-	10.125.000	(10.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
40	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
41	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	-	10.145.000	(10.145.000)	-	-	-	P.C UNIT
42	01005	039514	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	164.716.820	-	-	-	-	164.716.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
43	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	-	10.147.500	(10.147.500)	-	-	-	P.C UNIT
44	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
45	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	37.850	9.900.000	(9.900.000)	-	-	37.850	P.C UNIT
											KERTAS HVS
46	01005	039538	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	79.444.800	-	-	-	-	79.444.800	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
47	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
48	01005	039546	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	82.910.360	-	-	-	-	82.910.360	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
49	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
50	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
51	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	-	9.320.000	(9.320.000)	-	-	-	P.C UNIT
52	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	-	9.665.000	(9.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
53	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	-	9.923.500	(9.923.500)	-	-	-	P.C UNIT
54	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
55	01005	039605	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	74.629.350	-	-	-	-	74.629.350	PASAR DESA
56	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
57	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
58	01005	039621	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	302.500	-	-	-	-	302.500	BUKU TULIS
											ORDNER DAN MAP
											ALAT TULIS KANTOR LAINNYA
											KERTAS HVS
59	01005	039626	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUKOHARJO	135.000	-	-	-	-	135.000	ATK
60	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	134.000	10.065.000	(10.065.000)	-	-	134.000	P.C UNIT
											KERTAS HVS
61	01005	049147	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	417.809.252	-	-	-	-	417.809.252	KANTOR DESA/PASAR DESA
62	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
63	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
64	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
65	01005	059464	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	82.641.440	-	-	-	-	82.641.440	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
66	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	-	10.162.900	(10.162.900)	-	-	-	P.C UNIT
67	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	-	10.105.000	(10.105.000)	-	-	-	P.C UNIT
68	01005	059491	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	160.704.000	-	-	-	-	160.704.000	KANTOR DESA
69	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
70	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
71	01005	059556	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
72	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB.LUMAJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
73	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
74	01005	059613	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN	165.438.090	-	-	-	-	165.438.090	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
75	01005	059620	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	81.331.700	-	-	-	-	81.331.700	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
76	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	-	9.915.000	(9.915.000)	-	-	-	P.C UNIT
77	01005	059623	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	829.360.823	-	-	-	-	829.360.823	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
78	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
79	01005	059630	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO	172.474.830	-	-	-	-	172.474.830	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
80	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	-	9.780.000	(9.780.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
81	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
82	01005	069280	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	80.776.430	-	-	-	-	80.776.430	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
83	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
84	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
85	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
86	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
87	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
88	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	-	10.100.000	(10.100.000)	-	-	-	P.C UNIT
89	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
90	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
91	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
92	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
93	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
94	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
95	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
96	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	75.000	10.000.000	(10.000.000)	-	-	75.000	P.C UNIT KERTAS HVS
97	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
98	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
99	01005	079359	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	82.165.850	-	-	-	-	82.165.850	PASAR DESA
100	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	079369	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
102	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	-	10.160.000	(10.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
105	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
106	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
109	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
110	01005	079438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	165.751.000	-	-	-	-	165.751.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
111	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
113	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
115	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
117	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
118	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	-	9.436.000	(9.436.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	079473	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	494.680.000	-	-	-	-	494.680.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
120	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	-	9.949.995	(9.949.995)	-	-	-	P.C UNIT
122	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	089305	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	162.530.600	-	-	-	-	162.530.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
102	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	-	10.155.000	(10.155.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
105	01005	089338	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	82.116.050	-	-	-	-	82.116.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
106	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
109	01005	099452	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	161.747.080	-	-	-	-	161.747.080	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
110	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	-	10.157.960	(10.157.960)	-	-	-	P.C UNIT
111	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	099476	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	157.805.820	-	-	-	-	157.805.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
113	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	-	9.845.000	(9.845.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	099484	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	164.489.400	-	-	-	-	164.489.400	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
115	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	-	10.163.000	(10.163.000)	-	-	-	P.C UNIT
117	01005	099504	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	159.489.000	-	-	-	-	159.489.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
118	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	099510	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	78.282.280	-	-	-	-	78.282.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
120	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	109222	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	152.031.100	-	-	-	-	152.031.100	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS/PIH
122	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
123	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
124	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
125	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
126	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
127	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
128	01005	109272	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	173.071.600	-	-	-	-	173.071.600	BANGUNGAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
129	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
130	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
131	01005	119239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN	-	9.994.000	(9.994.000)	-	-	-	P.C UNIT
132	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
133	01005	119252	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	72.658.200	-	-	-	-	72.658.200	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
134	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
135	01005	119260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LAHAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
136	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	170.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	170.000	P.C UNIT
137	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMPEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
138	01005	119281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
139	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
140	01005	119294	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	171.565.320	-	-	-	-	171.565.320	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
141	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
142	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
143	01005	129235	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	71.678.000	-	-	-	-	71.678.000	ALAT TULIS
											ORDNER DAN MAP
											PENGGARIS
											ISI STAPLES
											BARANG CETAKAN
											KERTAS HVS
											BERBAGAI KERTAS
											CD/DVD
											BAHAN KOMPUTER LAINNYA
144	01005	129247	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	245.032.600	-	-	-	-	245.032.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
145	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
146	01005	129253	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH	-	9.976.000	(9.976.000)	-	-	-	P.C UNIT
147	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
148	01005	129270	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	82.087.000	-	-	-	-	82.087.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
149	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
150	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
151	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
152	01005	129296	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	233.945.280	-	-	-	-	233.945.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA
153	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
154	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	-	59.975.000	(59.975.000)	-	-	-	UPS (UNIT POWER SUPPLY)
											P.C UNIT
											LAPTOP
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
155	01005	139267	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	82.917.000	-	-	-	-	82.917.000	BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
156	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	754.500	10.165.000	(10.165.000)	-	-	754.500	P.C UNIT
											KERTAS HVS
157	01005	139274	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	159.870.510	-	-	-	-	159.870.510	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
158	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
159	01005	139285	TP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	75.558.620	-	-	-	-	75.558.620	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
160	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
161	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
162	01005	139313	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	163.443.600	-	-	-	-	163.443.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
163	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
164	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
165	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
166	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
167	01005	139335	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	602.913.780	-	-	-	-	602.913.780	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
168	01005	139335	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
169	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
170	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
171	01005	149257	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	80.750.451	-	-	-	-	80.750.451	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
172	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	-	9.880.000	(9.880.000)	-	-	-	P.C UNIT
173	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
174	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
175	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
176	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
177	01005	149296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	2.901.500	9.950.000	(9.950.000)	-	-	2.901.500	P.C UNIT
178	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	225.500	9.790.000	(9.790.000)	-	-	225.500	P.C UNIT KERTAS HVS
179	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	1.470.850	10.165.000	(10.165.000)	-	-	1.470.850	P.C UNIT KERTAS HVS
180	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
181	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
182	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
183	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
184	01005	159250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU	82.709.500	-	-	-	-	82.709.500	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
185	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
186	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	-	9.999.900	(9.999.900)	-	-	-	P.C UNIT
187	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
188	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
189	01005	169206	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	140.722.920	-	-	-	-	140.722.920	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
190	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
191	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	-	9.125.000	(9.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
192	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
193	01005	169223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA	87.547.620	-	-	-	-	87.547.620	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA SALURAN DRAINASE
194	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
195	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
196	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
197	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
198	01005	179296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	468.985.950	-	-	-	-	468.985.950	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
199	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
200	01005	189223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
201	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
202	01005	189229	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	242.270.570	-	-	-	-	242.270.570	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
203	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
204	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
205	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
206	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
207	01005	189249	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
208	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
209	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
210	01005	189260	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	995.592.470	-	-	-	-	995.592.470	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
211	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
212	01005	189271	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI	82.680.450	-	-	-	-	82.680.450	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
213	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	178.750	9.750.000	(9.750.000)	-	-	178.750	P.C UNIT
214	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
215	01005	199415	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	162.893.000	-	-	-	-	162.893.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
216	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
217	01005	199421	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
218	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
219	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
220	01005	199442	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	149.400.000	-	-	-	-	149.400.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
221	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
222	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	55.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	55.000	P.C UNIT
223	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
224	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	265.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	265.000	P.C UNIT
225	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
226	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
227	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
228	01005	199530	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	82.253.000	-	-	-	-	82.253.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
229	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
230	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
231	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
232	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	840.500	10.115.000	(10.115.000)	-	-	840.500	P.C UNIT KERTAS HVS
233	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
234	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
235	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
236	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
237	01005	209219	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	157.950.000	-	-	-	-	157.950.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
238	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
239	01005	209227	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	82.975.930	-	-	-	-	82.975.930	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
240	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
241	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
242	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
243	01005	209244	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	327.489.230	-	-	-	-	327.489.230	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
											BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
244	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
245	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
246	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. BUTON UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
247	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
248	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
249	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
250	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
251	01005	219217	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	173.238.430	-	-	-	-	173.238.430	BANGUN GEDUNG KANTOR PERMANEN
252	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
253	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
254	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
255	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
256	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR	-	7.160.000	(7.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
257	01005	229223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	418.821.685	-	-	-	-	418.821.685	PAS
258	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	-	9.800.000	(9.800.000)	-	-	-	P.C UNIT
259	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
260	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
261	01005	239273	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA	684.538.904	-	-	-	-	684.538.904	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
262	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
263	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
264	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
265	01005	249309	TP	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	86.670.000	-	-	-	-	86.670.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
266	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
267	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
268	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
269	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
270	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
271	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
272	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
273	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
274	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	-	8.665.000	(8.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
275	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
276	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
277	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
278	01005	249395	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	165.422.652	-	-	-	-	165.422.652	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
279	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
280	01005	249401	UB	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
281	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
282	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
283	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
284	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
285	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
286	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
287	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
288	01005	259331	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
289	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
290	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
291	01005	259345	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM	82.834.000	-	-	-	-	82.834.000	PASAR DESA
292	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
293	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
294	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
295	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
296	01005	269204	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
297	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
298	01005	269214	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	78.112.130	-	-	-	-	78.112.130	P.C UNIT
299	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	-	9.970.000	(9.970.000)	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
300	01005	269224	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG	169.009.580	-	-	-	-	169.009.580	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
323	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
324	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
325	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
326	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	-	10.010.000	(10.010.000)	-	-	-	P.C UNIT
327	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
328	01005	269245	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	165.677.960	-	-	-	-	165.677.960	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
329	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
330	01005	269248	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKULU TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
331	01005	289187	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
332	01005	289187	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	749.000	-	-	-	-	749.000	KERTAS HVS
333	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
334	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
335	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
336	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
337	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
338	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
339	01005	299468	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	638.050.190	-	-	-	-	638.050.190	KANTOR DESA/PASAR DESA
340	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
341	01005	299477	TP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	79.792.050	-	-	-	-	79.792.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
342	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
343	01005	299483	TP	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG	74.700.000	-	-	-	-	74.700.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
344	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	-	9.090.910	(9.090.910)	-	-	-	P.C UNIT
345	01005	309247	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	162.597.000	-	-	-	-	162.597.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
346	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
347	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
348	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
349	01005	329128	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
350	01005	329137	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	161.616.770	-	-	-	-	161.616.770	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
351	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
352	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
353	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
354	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
355	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
356	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
357	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
358	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
359	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
360	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	-	78.930.200	(78.930.200)	-	-	-	P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA
361	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
362	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
363	01005	340536	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	165.869.690	-	-	-	-	165.869.690	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
364	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
365	01006	052151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR	1.877.956.850	-	-	-	-	1.877.956.850	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
366	01006	070441	TP	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH	477.160.120	-	-	27.500.000	(27.500.000)	477.160.120	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
367	01006	070950	TP	DINAS PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1.585.459.931	-	-	-	-	1.585.459.931	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
368	01006	071519	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	1.595.071.168	-	-	249.500.000	(249.500.000)	1.595.071.168	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
369	01006	071623	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	1.924.780.798	-	-	298.816.000	(298.816.000)	1.924.780.798	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
370	01006	080928	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	1.488.917.069	-	-	-	-	1.488.917.069	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
371	01006	081021	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	1.229.483.605	-	-	193.634.400	(193.634.400)	1.229.483.605	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
372	01006	081219	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	2.473.039.371	-	-	370.670.000	(370.670.000)	2.473.039.371	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
373	01006	090256	TP	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS	67.670.350	-	-	-	-	67.670.350	KONSSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KONTRAK PERENCANAAN)
374	01006	090728	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	897.448.130	-	-	149.215.000	(149.215.000)	897.448.130	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
375	01006	100729	TP	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1.222.663.310	-	-	239.766.400	(239.766.400)	1.222.663.310	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
376	01006	100930	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	2.213.241.257	-	-	349.459.800	(349.459.800)	2.213.241.257	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
377	01006	111123	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	2.866.994.200	-	-	427.680.000	(427.680.000)	2.866.994.200	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
378	01006	131013	TP	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	2.520.867.077	-	-	366.929.700	(366.929.700)	2.520.867.077	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
379	01006	140645	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN (06)	3.171.799.345	-	-	335.790.000	(335.790.000)	3.171.799.345	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
380	01006	140727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	2.260.972.450	-	-	267.560.000	(267.560.000)	2.260.972.450	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
381	01006	140824	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	1.773.454.541	-	-	296.900.000	(296.900.000)	1.773.454.541	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
382	01006	140920	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	1.869.300.944	-	-	298.000.000	(298.000.000)	1.869.300.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
383	01006	141019	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	4.990.853.839	-	-	329.095.000	(329.095.000)	4.990.853.839	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
384	01006	141338	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	2.851.322.966	-	-	448.853.000	(448.853.000)	2.851.322.966	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
385	01006	151126	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	1.246.208.645	-	-	153.659.600	(153.659.600)	1.246.208.645	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
386	01006	160626	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	3.192.334.944	-	-	496.630.000	(496.630.000)	3.192.334.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
387	01006	160927	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	428.239.499	-	-	322.278.000	(322.278.000)	428.239.499	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
388	01006	180734	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	1.849.065.910	-	-	53.642.150	(53.642.150)	1.849.065.910	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
389	01006	180924	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA	1.095.340.500	-	-	-	-	1.095.340.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
390	01006	180925	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	1.419.376.840	-	-	172.341.800	(172.341.800)	1.419.376.840	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
391	01006	191426	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	947.211.500	-	-	149.850.000	(149.850.000)	947.211.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
392	01006	191429	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	2.538.006.797	-	-	75.000.000	(75.000.000)	2.538.006.797	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
393	01006	191939	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOPPENG	538.648.860	-	-	-	-	538.648.860	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
394	01006	192274	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	2.981.170.039	-	-	429.232.000	(429.232.000)	2.981.170.039	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
395	01006	200623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)	2.814.142.510	-	-	-	-	2.814.142.510	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
396	01006	200715	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	1.888.382.030	-	-	239.551.500	(239.551.500)	1.888.382.030	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
397	01006	200816	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	2.241.171.436	-	-	324.751.850	(324.751.850)	2.241.171.436	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
398	01006	210156	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)	907.769.600	-	-	-	-	907.769.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
399	01006	210428	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)	1.425.853.520	-	-	-	-	1.425.853.520	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
400	01006	210726	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	403.454.789	-	-	-	-	403.454.789	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
401	01006	210727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)	1.404.555.405	-	-	-	-	1.404.555.405	RUMAH NEGARA GOL.II TIPE A PERMANEN
402	01006	215128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON	446.822.000	-	-	-	-	446.822.000	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
403	01006	240553	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R	233.085.375	-	-	-	-	233.085.375	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
404	01006	241420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	3.498.550.603	-	-	557.777.000	(557.777.000)	3.498.550.603	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
405	01006	250936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	1.638.600.005	-	-	234.500.000	(234.500.000)	1.638.600.005	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
406	01006	251128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	1.609.527.750	-	-	249.306.000	(249.306.000)	1.609.527.750	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
407	01006	251129	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	2.474.045.920	-	-	378.641.000	(378.641.000)	2.474.045.920	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
408	01006	251413	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ASMAT	1.781.455.000	-	-	-	-	1.781.455.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
409	01006	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	213.186.750	-	-	-	-	213.186.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
410	01006	251516	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	3.791.009.500	-	-	538.600.000	(538.600.000)	3.791.009.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
411	01006	251607	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	3.573.969.688	-	-	469.761.000	(469.761.000)	3.573.969.688	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
412	01006	251717	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	2.636.985.383	-	-	405.882.950	(405.882.950)	2.636.985.383	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
413	01006	251721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM	264.262.500	-	-	-	-	264.262.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
414	01006	251812	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	2.280.065.006	-	-	224.100.000	(224.100.000)	2.280.065.006	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
415	01006	251918	TP	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	5.357.304.290	-	-	703.999.885	(703.999.885)	5.357.304.290	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
416	01006	252318	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN	1.700.989.900	-	-	-	-	1.700.989.900	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN
417	01006	260830	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	2.530.783.703	-	-	398.350.000	(398.350.000)	2.530.783.703	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
418	01006	265156	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	533.109.500	-	-	49.925.000	(49.925.000)	533.109.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
419	01006	280076	TP	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)	5.774.912.835	-	-	-	-	5.774.912.835	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
420	01006	280253	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	1.039.440.340	-	-	-	-	1.039.440.340	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
421	01006	280322	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1.051.489.810	-	-	-	-	1.051.489.810	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
422	01006	280417	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	3.241.547.215	-	-	698.997.544	(698.997.544)	3.241.547.215	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
423	01006	280424	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1.061.420.000	-	-	-	-	1.061.420.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
424	01006	280514	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	3.696.444.600	-	-	521.740.000	(521.740.000)	3.696.444.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
425	01006	280525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	1.062.666.110	-	-	-	-	1.062.666.110	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
426	01006	280621	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1.626.293.274	-	-	-	-	1.626.293.274	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
427	01006	280723	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1.398.942.800	-	-	-	-	1.398.942.800	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
428	01006	285125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE	331.568.877	-	-	-	-	331.568.877	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
429	01006	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	2.523.955.206	-	-	396.261.000	(396.261.000)	2.523.955.206	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
430	01006	310321	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	2.541.268.140	-	-	399.585.000	(399.585.000)	2.541.268.140	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
431	01006	330524	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT	5.483.131.144	-	-	858.726.000	(858.726.000)	5.483.131.144	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
432	01006	330531	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT	1.671.000.000	-	-	195.000.000	(195.000.000)	1.671.000.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
433	01006	330620	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	2.170.532.366	-	-	348.786.000	(348.786.000)	2.170.532.366	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
434	01006	330721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	2.256.803.760	-	-	329.500.000	(329.500.000)	2.256.803.760	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
435	01006	436044	TP	KPU KABUPATEN TANAH LAUT / POLEWALI MANDAR	2.757.039.900	-	-	-	-	2.757.039.900	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
436	01006	436096	TP	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	1.519.500.000	-	-	-	-	1.519.500.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
437	01006	436122	TP	KAB HALMAHERA TENGAH	1.380.000.000	-	-	-	-	1.380.000.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
438	01007	021504	TP	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA	-	295.812.000	(295.812.000)	3.345.568.000	(3.345.568.000)	-	SCANNER (UNIVERSAL TESTER)
											RAK-RAK PENYIMPANAN
											FILING CABINET KAYU
											BUFFET
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR
											KURSI BESI/METAL
											MEJA RAPAT
											MEJA KOMPUTER
											HANDY CAM
											BATTERY CHARGER (PERALATAN STUDIO AUDIO)
											CAMERA DIGITAL
											TAS KAMERA
											PESAWAT TELEPHONE
											FACSIMILE
											KURSI DORONG
											CASETTE FILM (ALAT KEDOKTERAN RADIOAGNOSTIC)
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											P.C UNIT
											NOTE BOOK
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											HUB
											MODEM
											PERALATAN JARINGAN LAINNYA
											SOFTWARE KOMPUTER
439	01007	032302	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN	-	10.372.552.691	(10.372.552.691)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
440	01007	052950	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LAMONGAN	857.169.171	-	-	-	-	857.169.171	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA LAINNYA
441	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.088.228.700	10.000.000	(10.000.000)	-	-	1.088.228.700	HARD DISK
											HASIL KAJIAN/PENELITIAN
442	01007	070244	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	-	-	-	2.076.889.018	(2.076.889.018)	-	SOFTWARE KOMPUTER
443	01007	075133	TP	BAPPEDA KOTA MEDAN	-	-	-	2.825.836.000	(2.825.836.000)	-	RAK-RAK PENYIMPANAN
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											KURSI DORONG
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											P.C UNIT
											NOTE BOOK
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SOFTWARE KOMPUTER
444	01007	080435	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK	274.817.795	4.541.238.182	(4.541.238.182)	-	-	274.817.795	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN LOKAL
											JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
445	01007	080444	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	-	9.980.125.000	(9.980.125.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
446	01007	080735	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH DATAR	-	20.687.247.948	(20.687.247.948)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
447	01007	110097	DK	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	-	-	-	624.800.000	(624.800.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
448	01007	110805	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	5.502.668	334.516.696	(334.516.696)	1.577.738.504	(1.577.738.504)	5.502.668	PERALATAN DAN MESIN
											SCANNER (UNIVERSAL TESTER)
											LEMARI PENYIMPANAN
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											KURSI BESI/METAL
											MEJA RAPAT
											A.C. SPLIT
											TELEVISI
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											UNINTERUPTED POWER SUPPLY (UPS)\
											LOCAL AREA NERWORK (LAN)
											P.C UNIT
											LAPTOP
											NOTE BOOK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											HUB
											MODEM
											PERALATAN DAN MESIN
											SOFTWARE KOMPUTER
449	01007	119267	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	-	-	502.946.000	(502.946.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
450	01007	120730	TP	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	-	-	1.438.332.000	(1.438.332.000)	-	LEMARI PENYIMPANAN
											RAK BESI
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											MEJA KERJA BESI/METAL
											KURSI BESI/METAL
											KURSI KAYU
											WIRELESS
											P.C UNIT
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											PERALATAN JARINGAN LAINNYA
											SOFTWARE KOMPUTER
451	01007	190223	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	-	1.480.000.000	(1.480.000.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
452	01007	191555	TP	DINAS KESEHATAN KAB. TAKALAR	786.887.890	-	-	-	-	786.887.890	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA LAINNYA
453	01007	205205	TP	SEKDA KOTA BAU-BAU	-	-	-	2.494.545.455	(2.494.545.455)	-	SOFTWARE KOMPUTER
454	01007	234007	DK	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	1.652.400.000	(1.652.400.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
455	01007	290355	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	-	16.742.666.277	(16.742.666.277)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
				TOTAL	180.355.954.720	71.442.817.608	(71.442.817.608)	31.564.799.556	(31.564.799.556)	180.355.954.720	

LAMPIRAN XXXIV

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN XXXIV

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
1	'01001	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	BAST KONTRAKTUAL	'027/016/BAST/IPDN.30/2023	17-04-2023	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pekerjaan Pengadaan Bendera Kemendagri, IPDN dan Kelengkapannya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua Tahun Anggaran 2023	1010501004	1	Rp128.506.000	Rp128.506.000	'230631302003245	Terjadi kesalahan penginputan yang harusnya Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel, tetapi Operator Komitmen menginputnya Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat
2	'01004	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'09-03-2023	521211	Belanja Bahan	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengelola Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang GWPP	1010302004	10	Rp15.000	Rp150.000		Proses koordinasi dengan satker Bappeda Kalsel untuk proses void BAST pada Aplikasi SAKTI
3	'01004	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'09-03-2023	521211	Belanja Bahan	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengelola Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang GWPP	1010302001	15	Rp48.000	Rp720.000		
4	'01004	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002	10-03-2023	521211	Belanja Bahan	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengelola Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang GWPP	1010302001	15	Rp50.000	Rp750.000		
5	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00176/UP_TUP/662766/	'09-10-2023	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pengadaan Plakat Pada Ditjen Bina Keuangan Daerah TA.2023	1010305999	3	Rp660.000	Rp1.980.000	'231331301042370	Belanja Ekstrakomtabel yang dicatat sebagai persediaan yang diserahkan kepada masyarakat berupa plakat.

LAMPIRAN XXXV

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN XXXV

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
1	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/2382/Pusdatin	10-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	8010101002	9	Rp19.664.658	Rp176.981.922	231331302007333	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
2	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/2382/Pusdatin	10-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	8010101002	9	Rp6.336.982	Rp57.032.838	231331302007333	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
3	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/2382/Pusdatin	10-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	8010101002	9	Rp18.944.243	Rp170.498.187	231331302007333	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
4	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/2382/Pusdatin	10-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	8010101002	3	Rp25.267.897	Rp75.803.691	231331302007333	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
5	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/2382/Pusdatin	10-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	8010101002	9	Rp18.944.243	Rp170.498.187	231331302007333	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
6	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/2382/Pusdatin	10-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	8010101002	9	Rp18.944.243	Rp170.498.187	231331302007333	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
7	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00186/UP_TUP/403200/2023	12-12-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan peralatan fasilitasi kegiatan kementerian berupa kursi pimpinan dan kasur	3050201016	6	Rp925.000	Rp5.550.000	231331701003856	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
8	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00198/UP_TUP/403200/2023	14-12-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan perlatan fasilitasi kegiatan kementerian berupa peralatan kesehatan tgl 5 desember 2023	3070102093	18	Rp450.000	Rp8.100.000	231331701003856	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
9	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	1454	11-12-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fsilitasi Kegiatan Kementerian berupa Perlengkapan Soundsystem dan Kompor tgl 7 Desember 2023	3060101036	4	Rp561.000	Rp2.244.000	231331301058769	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
10	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	602/5919/PPK/XI/BU	24-11-2023	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	Penambahan Jaringan Instalasi Listrik Gedung B	7010101002	1	Rp268.191.400	Rp268.191.400	231331303019642	Tidak dapat dilakukan koreksi SPM karena anggaran pada kode akun yang seharusnya tidak mencukupi.
11	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/1073/BAST/BEK/VIII/2023	08/08/2023	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pengadaan Gebyok Ukir Pada Ruang Sidang Utama Pascasarjana di IPDN.	6070301001	1	Rp56.000.000	Rp56.000.000	230871302000958	Pengadaan gebyok ukir untuk Ruang Sidang Utama Pascasarjana di Satker IPDN Kampus Jakarta, Aset Ruang Sidang Utama tercatat sebagai Aset IPDN Kampus Jakarta sehingga dicatat pada Komitment dengan kode barang ATR, untuk ini telah dilakukan permohonan revisi DIPA atas Akun 532111 menjadi 536111 namun Revisi ditolak kanwil karena dianggap sebagai penambahan ASEt baru sehingga harus revisi dipa DJA melalu Eselon 1
12	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/1328/BAST/BEK/IX/2023	11-10-2023	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Toilet Pria dan Wanita di Gedung Pascasarjana IPDN	6070301001	1	Rp85.740.000	Rp85.740.000	230871302001175	Perbaikan Toilet Pria dan Wanita dilakukan pada Gedung Pascasarjana IPDN di Satker IPDN Kampus Jakarta sehingga pada Komitmen dilakukan Pencatatan kode Aset sebagai ATR karena akan menambah Aset Gedung IPDN Kampus Jakarta untuk ini telah dilakukan permohonan revisi DIPA atas Akun 532111 menjadi 536111 namun ditolak kanwil karena dianggap penambahan ASEt baru sehingga harus revisi dipa DJA melalu Eselon 1
13	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/1629/BAST/XI/2023	27-11-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Ruang Kerja Lembaga Sertifikasi Profesi IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2023	3050201003	9	Rp940.000	Rp8.460.000	230871303001219	Pengadaan Peralatan Ruang Kerja Lembaga Sertifikasi Profesi IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2023, BAST. Nomor : 000.4.2/1629/BAST/XI/2023 Tgl. 24 Nov 2023 berupa Kursi Kerja Staf dengan Nominal dibawah Nilai Kapitalisasi sehingga dicatat sebagai aset ekstra

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
14	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/994/BAST/BEK/VII/2023	24-07-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Lukisan, Papan Nama, Foto Ruangan dan Prasasti untuk Gedung Perpustakaan di IPDN Kampus Jatinangor	4010101001	1	Rp3.500.000	Rp3.500.000	230871302000893	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Aset Prasasti di Perpustakaan di catat pada Komitmen sebagai Aset Gedung dan Bangunan namun tercatat sebagai Aset ektrakomptabel pada Gedung dan Bangunan namun telah di reklasifikasi pada Modul Aset menjadi Aset tetap lainnya karena karena Aset Prasasti merupakan Aset tetap lainnya pada BMN untuk ini juga telah dilakukan permohonan revisi dan di tolak kanwil dan harus revisi DJA melalui eselon 1
15	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/994/BAST/BEK/VII/2023	24-07-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Lukisan, Papan Nama, Foto Ruangan dan Prasasti untuk Gedung Perpustakaan di IPDN Kampus Jatinangor	6010303001	1	Rp3.250.000	Rp3.250.000	230871302000893	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Aset Lukisan Kanvas di Perpustakaan di catat pada Komitmen pada kode Aset Tetap lainnya karena Aset Lukisan merupakan Aset tetap lainnya pada BMN untuk ini juga telah dilakukan permohonan revisi dan di tolak kanwil dan harus revisi DJA melalui eselon 1
16	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/994/BAST/BEK/VII/2023	24-07-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Lukisan, Papan Nama, Foto Ruangan dan Prasasti untuk Gedung Perpustakaan di IPDN Kampus Jatinangor	6010303001	8	Rp1.145.000	Rp9.160.000	230871302000893	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Aset Lukisan Kanvas di Perpustakaan di catat pada Komitmen pada kode Aset Tetap lainnya karena Aset Lukisan merupakan Aset tetap lainnya pada BMN untuk ini juga telah dilakukan permohonan revisi dan di tolak kanwil dan harus revisi DJA melalui eselon 1
17	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/994/BAST/BEK/VII/2023	24-07-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Lukisan, Papan Nama, Foto Ruangan dan Prasasti untuk Gedung Perpustakaan di IPDN Kampus Jatinangor	6010303001	1	Rp6.525.000	Rp6.525.000	230871302000893	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Aset Lukisan Kanvas di Perpustakaan di catat pada Komitmen pada kode Aset Tetap lainnya karena Aset Lukisan merupakan Aset tetap lainnya pada BMN untuk ini juga telah dilakukan permohonan revisi dan di tolak kanwil dan harus revisi DJA melalui eselon 1
18	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/994/BAST/BEK/VII/2023	24-07-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Lukisan, Papan Nama, Foto Ruangan dan Prasasti untuk Gedung Perpustakaan di IPDN Kampus Jatinangor	6020202002	2	Rp1.250.000	Rp2.500.000	230871302000893	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Aset Lukisan Kanvas di Perpustakaan di catat pada Komitmen pada kode Aset Tetap lainnya karena Aset Lukisan merupakan Aset tetap lainnya pada BMN untuk ini juga telah dilakukan permohonan revisi dan di tolak kanwil dan harus revisi DJA melalui eselon 1
19	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/994/BAST/BEK/VII/2023	24-07-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Lukisan, Papan Nama, Foto Ruangan dan Prasasti untuk Gedung Perpustakaan di IPDN Kampus Jatinangor	6010303001	1	Rp4.350.000	Rp4.350.000	230871302000893	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel untuk bendera namun harga satuan pengadaan melebihi nilai kapitalisasi sehingga dicatat sebagai ASET
20	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST NONKONTRAKTUAL	00012/UP_TUP/448302/2023	04/10/2023	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bendera dan Bendera Rumbay Gedung Administrasi Luar dan Dalam pada Kegiatan Wisuda dan Pelantikan Pamong Praja Muda ke XXX di Kampus IPDN Jatinangor Tahun Anggaran 2023	3050206077	1	Rp8.325.000	Rp8.325.000	230871701000056	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel untuk bendera namun harga satuan pengadaan melebihi nilai kapitalisasi sehingga dicatat sebagai ASET
21	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST NONKONTRAKTUAL	00012/UP_TUP/448302/2023	04/10/2023	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bendera dan Bendera Rumbay Gedung Administrasi Luar dan Dalam pada Kegiatan Wisuda dan Pelantikan Pamong Praja Muda ke XXX di Kampus IPDN Jatinangor Tahun Anggaran 2023	3050206030	14	Rp1.760.600	Rp24.648.400	230871701000056	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel untuk Tiang bendera namun harga satuan pengadaan melebihi nilai kapitalisasi sehingga dicatat sebagai ASET

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
22	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	BAST NONKONTRAKTUAL	00012/UP_TUP/448302/2023	04/10/2023	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bendera dan Bendera Rumbay Gedung Administrasi Luar dan Dalam pada Kegiatan Wisuda dan Pelantikan Pamong Praja Muda ke XXX di Kampus IPDN Jatinangor Tahun Anggaran 2023	3050206077	1	Rp9.157.500	Rp9.157.500	230871701000056	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel untuk bendera namun harga satuan pengadaan melebihi nilai kapitalisasi sehingga dicatat sebagai ASET
23	1001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	BAST NONKONTRAKTUAL	00013/UP_TUP/483005/2023	06/10/2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN PEMBELIAN CBATTERY DAN CHRGER KAMERA	3030103001	5	Rp660.000	Rp3.300.000	231331301044483	Sudah dilakukan koreksi aset modul Aset Tetap dan diungkapkan dalam CaLK
24	1001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	BAST NONKONTRAKTUAL	00017/UP_TUP/483005/2023	03/12/2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBELIAN BELANJA MODAL BERUPA KAMERA DRONE DAN SARPRAS BERUPA KURSI SOFA DAN MEJA	3050201004	2	Rp489.941	Rp979.882	231331701002569	Sudah dilakukan koreksi aset modul Aset Tetap dan diungkapkan dalam CaLK
25	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	BAST NONKONTRAKTUAL	00050/UP_TUP/677045/2023	21-08-2023	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas sebanyak 3 perjalanan (Daftar Terlampir)	4010101001	1	Rp12.562.400	Rp12.562.400	230111303001694	Sudah dilakukan koreksi aset modul komitmen gedung bangunan, seharusnya KDP, nilai dibawah kapitalisasi - diungkapkan dalam CaLK
26	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	BAST NONKONTRAKTUAL	00051/UP_TUP/677045/2023	28-08-2023	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Rehab Atap Asrama Nusantara	4010101001	1	Rp1.440.000	Rp1.440.000	230111303001694	Sudah dilakukan koreksi aset modul komitmen gedung bangunan, seharusnya KDP, nilai dibawah kapitalisasi - diungkapkan dalam CaLK
27	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	BAST NONKONTRAKTUAL	13	06/01/2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBELIAN HT	3060201006	6	Rp260.000	Rp1.560.000	231331301005005	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan dimana telah dilakukannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) dengan harga dibawah nilai kapitalisasi yaitu pembelian 6 (enam) buah Handy Talkie (HT) pada harga Rp260.000,00 dengan jumlah Rp1.560.000,00. Adapun idealnya sudah terdapat akun khusus untuk Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel (521252), namun sampai dengan periode pelaporan, atas pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi DIPA untuk penganggaran akun tersebut sehingga tidak dilakukan ralat akun pada belanja tersebut dan akan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada pos penjelasan yang relevan.
28	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	BAST NONKONTRAKTUAL	14	11-01-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBELIAN HT	3060201006	3	Rp260.000	Rp780.000	231331301005005	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan dimana telah dilakukannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) dengan harga dibawah nilai kapitalisasi yaitu pembelian 3 (tiga) buah Handy Talkie (HT) pada harga Rp260.000,00 dengan jumlah Rp780.000,00. Adapun idealnya sudah terdapat akun khusus untuk Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel (521252), namun sampai dengan periode pelaporan, atas pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi DIPA untuk penganggaran akun tersebut sehingga tidak dilakukan ralat akun pada belanja tersebut dan akan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada pos penjelasan yang relevan.
29	1004	27486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	673.1/BAST/POLPPVII/2023	03/07/2023	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) (Motor 150 cc)	3020105132	28	Rp38.100.000	Rp1.066.800.000	231331301026754	Telah dilakukan koreksi reklasifikasi keluar ke Persediaan pada bulan Juli 2023 dan akan dijelaskan pada CaLK

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
30	1004	417936	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	BAST KONTRAKTUAL	01/BAP/APBN-TP/PRC-KANTOR-CAMAT/SETDA-PM/VI/2023	23-06-2023	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7010101003	1	Rp178.171.000	Rp178.171.000	231121302001143	Merupakan BAST RPATA namun proses pembayaran terjadi tanpa prosedur RPATA sehingga akan dikoordinasikan dengan SITP untuk penyelesaian dari sistem atau diperlukan jurnal manual.
31	1005	28449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	00086/UP_TUP/028449/2023	16-11-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Berupa Meja Lipat, Kursi&Dipan Besi Single, SP.027/SP- 367/PPK/X/BPD-YK tgl.27/10/2023, BAST.027/BAST-392/PPK/XI/BPD-YK tgl.16/11/2023	3050201003	48	Rp609.000	Rp29.232.000	230301701001589	Transaksi belanja modal peralatan dan mesin (532111) senilai Rp29.232.000 berupa kursi besi/metal sejumlah 48 buah dengan harga satuan Rp609.000 sesuai BAST Nomor : 00086/UP_TUP/028449/2023 Tanggal 16 November 2023 dan SP2D nomor 230301701001589, karena barang tersebut mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi sehingga masuk kedalam Kriteria Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (595112)
32	1005	28449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	BAST KONTRAKTUAL	011/BAST-136/PPK/IV/BPD-YK	10-04-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan Gedung Audiovisual berupa Pemasangan Peredam Suara Ruang Audiovisual	3150102999	1	Rp111.529.950	Rp111.529.950	230301303005353	Transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) senilai Rp111.529.950 berupa peredam suara sesuai dengan BAST Nomor : 011/BAST-136/PPK/IV/BPD-YK Tanggal 10 April 2023 dengan SPM nomor 00063A Tanggal 13 April 2023 dan SP2D nomor 230301303005353 Tanggal 17 April 2023 yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai SAP, sehingga tercatat dan menambah aset peralatan dan mesin sebesar Rp111.529.950.
33	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	6	10-02-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	043/F4/GUP/II/2023 Pengadaan Power Amplifer Profesional Sound LA 2000 Profesional Audio XR 8 dan Braket BMB Pada Kantor Ditjen Bina Bangda	3050206080	1	Rp300.000	Rp300.000	231331303001377	Pengadaan Bracket sebanyak 1 unit dibawah nilai kapitalisasi, proses tindak lanjut menunggu kebijakan Revisi DIPA pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah
34	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST NONKONTRAKTUAL	000.4.2/9449/SES	15-09-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BERUPA PENGADAAN KURSI RAPAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3050201003	50	Rp915.000	Rp45.750.000	231331301041074	Pembelian berupa Kursi Besi/Metal (KS FTR 415 - A Kain Hijau Tosca TS WR)
35	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/9487/SES	18-09-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk ruang Sekretariat dan ruang Direktorat dalam rangka Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3050201999	2	Rp336.000	Rp672.000	231331302019429	Pembelian Meubelair Lainnya berupa Akrilik putih susu pembatas meja Uk 58 cm x 35 cm x 0,5 cm (Custom)
36	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/9487/SES	18-09-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk ruang Sekretariat dan ruang Direktorat dalam rangka Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3050201999	1	Rp914.000	Rp914.000	231331302019429	Pembelian Meubelair Lainnya berupa Pembuatan penyekat meja dengan bahan multiplek finish HPL Uk 80 cm x 140 cm x 2cm (Custom)

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
37	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/9487/SES	18-09-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk ruang Sekretariat dan ruang Direktorat dalam rangka Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3050201999	1	Rp752.000	Rp752.000	231331302019429	Pembelian Meubelair Lainnya berupa Akrilik putih susu pembatas meja Uk 175 cm x 35 cm x 0,5 cm (Custom)
38	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2.507.c/PPSDM-BKT	11-05-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Parkir Depan Asrama Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010205001	1	Rp188.854.000	Rp188.854.000	230111304002028	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 53
39	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/459.a/PPSDM-BKT	01/05/2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pengadaan Gazebo Taman Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010130999	1	Rp8.436.000	Rp8.436.000	230111301003959	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 53
40	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/459.a/PPSDM-BKT	01/05/2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pengadaan Gazebo Taman Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010130999	4	Rp6.149.400	Rp24.597.600	230111301003959	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 54
41	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/459.a/PPSDM-BKT	01/05/2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pengadaan Gazebo Taman Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010130999	12	Rp4.329.000	Rp51.948.000	230111301003959	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 55
42	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/476.a/PPSDM-BKT	04/05/2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Taman Depan Asrama Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010205001	1	Rp198.096.000	Rp198.096.000	230111304001860	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 56
43	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/505.a/PPSDM-BKT	11-05-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pemeliharaan Lapangan Bagian Barat Kantor Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010101001	1	Rp198.610.000	Rp198.610.000	230111304001909	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 57
44	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/505.b/PPSDM-BKT	11-05-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Taman Belakang Kantor Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010101001	1	Rp121.055.000	Rp121.055.000	230111304001908	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 58
45	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/583.a/PPSDM-BKT	19-05-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Aula Nusantara Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010110001	1	Rp198.455.000	Rp198.455.000	230111304002310	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 59

LAMPIRAN XXXV

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	No. SP2D	Keterangan
46	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/616/PPSDM-BKT	25-05-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Taman Belakang Kantor Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2023	4010105001	1	Rp89.736.000	Rp89.736.000	230111304002027	Pengembangan aset gedung dan bangunan menggunakan akun belanja barang 52 yang seharusnya belanja modal 60

LAMPIRAN XXXVI

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXXVI

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN TA. 2023

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001000	BPG-133 SetjenKemendagri	BRI	50	001403	18/03/2020
2	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001001	BPP-133 Biro Hukum	BRI	51	001403	18/03/2020
3	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001002	BPP-133 Biro Kepegawaian	BRI	51	001403	18/03/2020
4	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650714032001004	BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	004800	19/11/2021
5	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001003	BPP-133 Biro Ortala	BRI	51	001403	18/03/2020
6	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001005	BPP-133 Biro Umum	BRI	51	001403	18/03/2020
7	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001006	BPP-133 PusatFaskerjasama	BRI	51	001403	18/03/2020
8	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001007	BPP-133 Biro Keuangan	BRI	51	001403	18/03/2020
9	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001008	BPP-133 Pusdatin	BRI	51	001403	18/03/2020
10	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001009	BPP-133 Biro Administrasi	BRI	51	001403	18/03/2020
11	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001010	BPP-133 PusatPenerangan	BRI	51	001403	18/03/2020
12	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	32901004322309	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BRI			
13	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	8887988875	RPL 133 SETJEN KEMENDAGRI UTK PENAMPUNGAN	BNI	30	S-1714/MK.5/2015	4 Maret 2015
14	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1174197874	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BNI			
15	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	650364830051000	BPG 133 DKPP	BRI	20	003337/133	31 Agustus 2021
16	Sumedang	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	9891484483021000	BPG 087 IPDN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
17	Sumedang	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2200088665	BPN 087 IPDN Jatinangor Sumedang	BNI	10	000294	12/03/2021
18	Manado	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	9891486770101000	BPG 049 IPDN KAMPUS SULUT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
19	Makassar I	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	9891486770241000	BPG 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	50	002040	29/03/2021
20	Makassar I	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	1067702427	BPN 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	10	001980	13/01/2021
21	Bukittinggi	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	9891486770451000	BPG 011 IPDN KAMPUS BUKITTINGGI	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
22	Pontianak	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	9891486830701000	BPG 042 IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
23	Pontianak	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	1000004380	RPL 042 PDHL IPDN KB 2HKT38AA	BPD KALBAR	30		
24	Mataram	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	9891486830841000	BPG 038 IPDN KAMPUS NTB	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
25	Jayapura	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	9891486830911000	BPG 063 IPDN KAMPUS PAPUA	BNI	50	583/485/SJ	28/01/2021
26	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031001	INSPEKTORAT I	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
27	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031002	BPP 133 Inspektorat II	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
28	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031003	BPP 133 Inspektorat III	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
29	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031004	BPP 133 Inspektorat IV	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
30	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031006	SETITJEN KEMENDAGRI	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
31	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031000	BPG 133 ITJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
32	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	32901004326303	RKK ITJEN KEMENDAGRI OPS	BRI			
33	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031005	BPP 133 INSPEKTORAT KHUSUS	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
34	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101000	BPG 133 DITJEN POLPUM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
35	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101001	BPP 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
36	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101002	BPP 133 DIREKTORAT WASBANG	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
37	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101003	BPP 133 DIREKTORAT POLDAGRI	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
38	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101004	BPP 133 DIREKTORAT EKOSOSBUD	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
39	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101005	BPP 133 DIREKTORAT ORMAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
40	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	32901004346303	RKK DITJEN POLPUM KEMENDAGRI OPS	BRI			
41	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650870272101006	BPP 133 DIREKTORAT WASNAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
42		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	00000000967302571	RKK DITJEN BAK KEMENDAGRI OPS	BNI	20	S-1419/WPB.12/KP.04/2020/133	26/05/2020
43		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	8808000009	RKK DITJEN BINA ADWIL OPS	BSI	20	S-1050/WPB.12/KP.04/2021/133	17/03/2021

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
44	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861000	BPG: 133 DITJEN BINA ADM.KEWILAYAHAN	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
45	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861001	BPP: 133 SEKRETARIAT DITJEN ADWIL	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
46	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861004	BPP: 133 DIR. POLPP DAN LINMAS	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
47	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861002	BPP: 133 DIR. DEKONSENTRASI TP	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
48	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861005	BPP: 133 DIREKTORAT TOPOBAD	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
49	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861003	BPP: 133 DIREKTORAT WASKOBAN	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
50	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861006	BPP: 133 DIREKTORAT MPBK	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
51	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	9890240190801000	BPG 133 SETDA PROV DKI JAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
52	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	9890240291341000	BPG 022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
53	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	9890240396671000	BPG 026 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
54	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890240490611000	BPG 030 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
55	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	8100710690841000	BPG 001 SEKDA PROVINSI ACEH 04	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
56	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	9890240790781000	BPG 123 SETDAPROVSU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
57	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	9890240891061000	BPG 010 SETDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
58	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890240994381000	BPG 008 SETDA PROV RIAU 04 DK	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
59	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	9890241090741000	BPG 012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
60	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890241190821000	BPG 014 SEKRETARIAT DAERAH PROV SUMSEL 2	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
61	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	9890241290741000	BPG 017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
62	Bandar Lampung	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	9890241290981000	BPG 040 DPMPTSP LAMPUNG	BNI	50	S-1498/WPB.12/KP.04/2021	15 Oktober 2021
63	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890241390781000	BPG 042 SETDA PROV. KALBAR 139078	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
64	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241490721000	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
65	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241491301000	BPG 043 DPMPTSP PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
66	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890241590711000	BPG 045 SEKDA PROV KAL SEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
67	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	160552	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	9890241605521000	BPG 152 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
68	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890241691851000	BPG 046 SETDA PROV KALTIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
69	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241790881000	BPG 049 DINAS PENANAMAN MODAL PTSPD PROV SULUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
70	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241792231000	BPG 049 SEKDA PROV SULUT BIRO PEMERINTAHAN HUMAS	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
71	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890241890871000	BPG 051 SETDA PROV. SULTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
72	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890241990801000	BPG 054 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
73	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090711000	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA DK 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
74	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090951000	BPG 060 DPMPTSP PROV SULTRA 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
75	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU	9890242190621000	BPG 061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU 219062	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
76	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	9890242290681000	BPG 037 SEKDA PROVINSI BALI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
77	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890242392361000	BPG 038 SETDA PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
78	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491361000	BPG 039 SEKDA PROV NTT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
79	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491741000	BPG 039 DPMPTSP PROV NTT 249174	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
80	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	9890242590841000	BPG 063 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. PAPUA	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
81	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	9890242690931000	BPG 016 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
82	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. MALUKU UTARA	9890242890951000	BPG 062 DINAS PMPTSP PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
83	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	9890242891741000	BPG 062 SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUKU UTARA 04 DK	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
84	Serang	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	9890242993481000	BPG 020 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	BNI	20	S-910/WPB.11/KP.020/2015	12/05/2015
85	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890243091481000	BPG 015 SETDA PROV. BABEL-04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
86	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	9890243190611000	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
87	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890243291161000	BPG 009 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAUES04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
88	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	9890243391611000	BPG 065 SETDA PROV PAPUA BARAT	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
89	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243401661000	BPG 178 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
90	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243490111000	BPG 178 DINAS PMPTSP SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
91	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	9890243560001000	BPG 185 DPUPRPKP KAB MALINAU	BNI	21	S-1508/KPN.1204/2023	11 Juli 2023
92	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890243590021000	BPG 185 DPMDPTSP PROV KALTARA 359002	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
93	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244176971000	BPG 185 SEKDA KALTARA 04 417697	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
94	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244333161000	BPG 010 DPMPTSP PROV SUMBAR	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
95	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	9890244333171000	BPG 008 DINAS PMPTSP PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
96	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244333181000	BPG 009 DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
97	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	9890244333411000	BPG 012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
98	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244333421000	BPG 014 DINAS PMPTSP SUMSEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
99	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433343	DPMPTSP BABEL	9890244333431000	BPG 015 DPMPTSP BABEL	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
100	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	9890244333441000	BPG 016 DINAS PMPTSP PROV BENGKULU	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
101	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	9890244333451000	BPG 020 DINAS PMPTSP PROV BANTEN	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
102	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	9890244333471000	BPG 037 DINAS PMPTSP PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
103	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433348	DPMPTSP PROV. KALBAR	9890244333481000	BPG 042 DINAS PMPTSP PROV KALBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
104	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL,ESDM DAN TRANSMIGRASI PROV GORONTALO	9890244333491000	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
105	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244333501000	BPG 051 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV SULTENG 433350	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
106	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244333511000	BPG 054 DPMPTSP SULSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
107	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244333521000	BPG 038 DPMPT SATU PINTU PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
108	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	9890244333531000	BPG 061 DINAS PMPTSP PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
109	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	8100714841011000	BPG 001 DPM DAN PTSP PROV	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
110	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	8100714841021000	BPG 001 BAPPEDA PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
111	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	8100714841031000	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
112	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841051000	BPG 004 DPMPTSP SUMUT	BNI	21	S-1508/KPN.1204/2023	11 Juli 2023
113	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484106	BAPPEDA PROV SUMATERA UTARA	9890244841061000	BPG 123 BAPPEDA PROV SUMUT	BNI	21	S-2223/KPN.1204/2022	22 Juli 2022
114	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841071000	BPG 123 INSPEKTORAT PROVINSI SUMUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
115	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	9890244841091000	BPG 008 BAPPEDA RIAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
116	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484110	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890244841101000	BPG 008 INSPEKTORAT PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
117	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841121000	BPG 009 BAPPEDA PROV KEPRI	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
118	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841131000	BPG 009 INSPEKTORAT PROV KEPRI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
119	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	9890244841151000	BPG 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
120	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	9890244841161000	BPG 012 INSPEKTORAT PROV JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
121	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841181000	BPG 010 BAPPEDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
122	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841191000	BPG 010 INSPEKTORAT PROV SUMBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
123	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841211000	BPG 014 BAPPEDA PROV SUMSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
124	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841221000	BPG 014 INSPEKTORAT SUMSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
125	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	9890244841241000	BPG 017 BAPPEDA PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
126	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	9890244841251000	BPG 017 INSPEKTORAT LAMPUNG	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
127	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	9890244841271000	BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
128	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	9890244841281000	BPG 016 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
129	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841311000	BPG 015 BAPPEDABABEL 484131	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
130	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841321000	BPG 015 INSPEKTORAT PROV. BABEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
131	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484134	BAPPEDA PROV BANTEN	9890244841341000	BPG 020 BAPPEDA PROV BANTEN	BNI	21	S-2575/KPN.1204/2022	5 September 2022
132	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	9890244841351000	BPG 001 INSPEKTORAT BANTEN	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
133	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	9890244841371000	BPG 022 DINAS PMPTSP JABAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
134	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	9890244841381000	BPG 022 BAPPEDA PROV JABAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
135	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	9890244841391000	BPG 022 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
136	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841451000	BPG 026 DINAS PMPTSP PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
137	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841461000	BPG 026 BAPPEDA PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
138	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841471000	BPG 026 INSPEKTORAT PROVINSI JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
139	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484149	DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY	9890244841491000	BPG 030 DPPM PROVINSI D.I YOGYAKARTA	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
140	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484150	BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	9890244841501000	BPG 030 BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
141	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI. YOGYAKARTA	9890244841511000	BPG 030 INSPEKTORAT PROV DIY	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
142	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841531000	BPG 135 DINAS PMPTSP JATIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
143	Surabaya II	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841541000	BPG 135 BAPPEDA PROV JATIM	BNI	50	S-2100/KPN.1204/2022	08/07/2022
144	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	9890244841571000	BPG 037 BAPPEDA PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
145	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	9890244841581000	BPG 037 INSPEKTORAT BALI	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
146	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484160	BAPPEDA PROVINSI NTB	9890244841601000	BPG 038 BAPPEDA PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
147	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	9890244841611000	BPG 038 INSPEKTORAT PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
148	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484163	BAPPEDA NTT	9890244841631000	BPG 039 DEKON BAPPELITBAGDA	BNI	50	S-3391/WPB.12/KP.04/2021	24 Agustus 2021
149	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484164	INSPEKTORAT DAERAH PROV.NTT	9890244841641000	BPG 039 INSPEKTORAT PROV NTT	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
150	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841661000	BPG 042 BAPPEDA PROVINSI KALBAR 484166	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
151	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841671000	BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
152	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841691000	BPG 043 BAPPEDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
153	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841701000	BPG 043 INSPEKTORAT PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
154	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484172	DINAS PMPTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841721000	BPG 045 PMPTSP PROV KALSEL	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
155	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841731000	BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL 484173	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
156	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841741000	BPG 015 INSPEKTORAT KALSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
157	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841761000	BPG 046 DINAS PMPTSP PROV KALTIM	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
158	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841771000	BPG 046 BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
159	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841781000	BPG 046 INSPEKTORAT KALTIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
160	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841801000	BPG 185 BAPPEDA PROV KALUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
161	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841811000	BPG 185 INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN UTARA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
162	Manado	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841831000	BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
163	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841841000	BPG 049 INSPEKTORAT PROV SULUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
164	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484187	BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO	9890244841871000	BPG 050 BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
165	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	9890244841881000	BPG 050 INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
166	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841901000	BPG 178 BAPPEDA PROV SULBAR	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
167	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841911000	BPG 178 INSPEKTORAT PROV SULBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
168	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841931000	BPG 054 BAPPEDA SULSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
169	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841941000	BPG 054 INSPEKTORAT PROV SULSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
170	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841961000	BPG 051 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
171	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841971000	BPG 051 ITDA PROV SULTENG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
172	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244841991000	BPG 060 BAPPEDA PROV SULTRA	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
173	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484200	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244842001000	BPG 060 Inspektorat Daerah Prov Sultra	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
174	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	9890244842021000	BPG 061 BAPPEDA PROVINSI MALUKU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
175	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	9890244842031000	BPG 061 INSPEKTORAT PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
176	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842051000	BPG 062 BAPPEDA PROV MALUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
177	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842061000	BPG 062 INSPEKTORAT PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
178	Jayapura	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	9890244842081000	BPG 063 BAPPEDA PROV PAPUA	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
179	Jayapura	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	9890244842091000	BPG 063 INSPEKTORAT PROV PAPUA	BNI	50	S-1247/KPN.1204/2022	04/08/2022
180	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842111000	BPG 065 DPMPTSP PABAR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
181	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484212	BAPPEDA PROV PAPUA BARAT	9890244842121000	BPG 065 PROV PAPUA BARAT	BNI	21	S-2433/KPN.1204/2022	18 Agustus 2022
182	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842131000	BPG 065 INSPEKTORAT PABAR	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
183	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	966535960	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS				
184	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531000	BPG 133 DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI	BSI	50	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
185	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531001	BPP:133 Direktorat PAPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
186	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531002	BPP:133 Direktorat FPKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
187	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531003	BPP:133 Direktorat FKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
188	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531004	BPP:133 Direktorat KKD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
189	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531005	BPP:133 Direktorat EPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
190	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531006	BPP:133 Sekretariat	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
191	Yogyakarta	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	9890280284491000	BPG 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	50	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
192	Malang	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	651560288301000	BPG 032 BBPMD MALANG	BRI	50	S-831/PB.3/2020	11/12/2020
193	Malang	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	005101003361303	BPN 032 BBPD MALANG	BRI	10	S-251/WPB.16/KP.04/2021	08/02/2021
194	Bandar Lampung	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	651566136291000	BPG 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	BRI	50	S-452/WPB.08/KP.01/2021	05/02/2021

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
195	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	967410258	RKK DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI OPS				
196	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291000	BPG: 133 DITJEN BINA BANGDA	BNI	50	003899	29/09/2021
197		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291001	BPP: 133 SEKRETARIAT	BNI		S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
198		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291002	BPP: 133 DIREKTORAT PEIPD	BNI		S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
199		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291003	BPP: 133 Direktorat SUPD I	BNI		S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
200		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291004	BPP: 133 Direktorat SUPD II	BNI		S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
201		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291005	BPP 133: Direktorat SUPD III	BNI		S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
202		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291006	BPP: 133 Direktorat SUPD IV	BNI		S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
203	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240002324250	RPL 140 PDHL DITJEN BANGDA untuk 2TCK92FA	MANDIRI	30	000105	16/03/2021
204	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240012217528	RPL 140 PDHL BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00035608/2023	17 Mei 2023
205	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240011070373	RPL 133 PDHL DITBINABANGDA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005344?WPB.12/KP.04/2021	16 Desember 2021
206	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1380077714777	RPL 140 PDH BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00040708/2023	30 Oktober 2023
207		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1350018299303	RPL 133 PDH BAPPEDA JTG UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	005487	27/12/2021
208		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1520031369222	RPL 133 PDH BAPPEDA SULSEL UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	005487	27/12/2021
209		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1810013300133	RPL 133 PDH BAPPEDA NTT UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	005487	27/12/2021
210		01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1860002829840	RPL 133 PDH BAPPEDA MALUKU UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	005487	27/12/2021
211	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1540017450739	RPL 133 PDH BAPPEDA PAPUA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	005487	27/12/2021
212	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1600004285322	RPL 133 PDH BAPPEDA PABAR UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	005487	27/12/2021
213	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	7187436437	RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA	BSI	30	005487	27/12/2021
214	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	32901004310302	RKK DITJEN OTDA KEMENDAGRI OPS				
215	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921000	BPG : 133 DITJEN OTDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
216	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921001	BPP : 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
217	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921002	BPP : 133 DIR.PENATAAN DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
218	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650406218921003	BPP : 133 DIR.KEPALA DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
219	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921004	BPP : 133 DIR.KELEMBAGAAN	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
220	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921005	BPP : 133 DIR.PRODUK HUKUM	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
221	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921006	BPP : 133 DIR.EVALUASI KINERJA	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
222	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	917164447	RKK DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI OPS				
223	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	BPG: 133 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	BNI	50	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
224	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821001	BPP: 133 SEKRETARIAT PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
225	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821002	BPP: 133 PENDAFTARAN PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
226	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821003	BPP: 133 CATATAN SIPIL PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
227	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821004	BPP: 133 INFORMASI	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
228	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821005	BPP: 133 FASILITAS DATA PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
229	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821006	BPP: 133 BINA APARATUR PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
230	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1448029944	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2FWTYN9A	BNI	30	002342	08/08/2022
231	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821007	BPP 133 SEKRETARIAT 2	BNI	51		

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
232	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821008	BPP 133 SEKRETARIAT PHLN	BNI	51	s-2841/KPN.1204/2023	04/12/2023
233	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	32901004307309	RKK DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI OPS	BRI			
234	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661000	BPG 133 DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
235	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661001	BPP 133 SEKRETARIAT KEUDA	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
236	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661002	BPP 133 DIREKTORAT PAD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
237	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661003	BPP 133 DIREKTORAT PPKD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
238	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661004	BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
239	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661005	BPP 133 DIREKTORAT FDPPD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
240	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661006	BPP 133 DIT BUMD BLUD BMD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
241	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32901004321303	RKK BALITBANG KEMENDAGRI OPS	BRI			
242	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221000	BPG 133 BALITBANG KEMENDAGRI	BRI	50	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
243	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221001	BPP 133 PUSLITBANG OTDAPOLPUM	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
244	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221002	BPP 133 PUSLITBANG ADWIL	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
245	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221003	BPP 133 PUSLITBANG KEUDA	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
246	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221004	BPP 133 PUSLITBANG INOVASI	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
247	Yogyakarta	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	650060271141000	BPG 030 PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
248	Yogyakarta	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	1370007202589	BPN 030 PUSDIKLAT REGIONAL YOGYAKARTA	MANDIRI	10	S-1156/WPB.15/KP/01/2015	26/02/2015
249	Makassar I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7145711667	BPN 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BSI	10	001960	20/10/2020
250	Makassar I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	9890070271771000	BPG 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BNI	50	001117	04/03/2020
251	Bandung I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	1320010408616	BPN 022 PUSDIKLAT REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	10	S-414/WPB.13/KP.022/2015	02/03/2015
252	Bandung I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161000	BPG 022 PPSDM REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	50	S-1119/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
253	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	042601001412305	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS				
254	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	913758491	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS				
255	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311000	BPG 133 BADAN PENGEMB. SDM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
256	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311001	BPP 133 Sekretariat	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
257	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311002	BPP 133 Pusat I	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
258	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311003	BPP 133 Pusat II	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
259	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311004	BPP 133 Pusat III	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
260	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311005	BPP 133 Pusat IV	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
261	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1240009999484	BPN 133 BPSDM	MANDIRI	10	S-7197/WPB.12/KP.0404/2018	18/12/2018

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
262	Bukittinggi	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	650065061371000	BPG 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
263	Bogor	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	650065061381000	BPG023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	50	S-2782/WPB.12/KP.04/2021	13/07/2021

II. DATA REKENING YANG AKAN DITUTUP

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	650363525931000	BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.04/ 2020	18/03/2020
2	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	9891483525931000	BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BNI	50	S-1403/WPB.12/KP.04/2020	18 Maret 2020
3	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031000	BPG: 133 Itjen Kemendagri	BRI			
4		01002	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031005	BPP: 133 Inspektorat IV	BRI			
5	Tobelo	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419064	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	522301001363309	BPG 112 BP PERBATASAN MOROTAI	BRI	20	S-276/WPB.30/KP.0230/2017	10/04/2017
6	Tual	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419075	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU	105901000487303	BPG 084 BAG PENGELOLA PERBATASAN SETDA KAB KEP ARU	BRI	20	S-659/WPB.31/KP.0330/2017	0000-00-00
7	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	1049158897	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI		S-701/WPB.01/KP.01/2020	12/03/2020
8		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	00000000188380452	BPG 022 SEKDA PROV JABAR	BNI			
9		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	050037	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	0011220797	BPG 031 SATPOL PP DANA DEKON	BPD JAWA TIMUR			
10		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	0011204619	BPG 135 SETDA JATIM 04	BPD JAWA TIMUR			
11		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	00000000810101009	BPG 001 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH (04)	BNI			
12		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	090058	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU	00000000337089501	BPG 008 SATPOL PP PROV RIAU	BNI			
13		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099403	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU	00000000298221791	BPG 008 BPBD PROVINSI RIAU	BNI			
14		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	00000000871154006	BPG 049 BPPD PROV SULUT	BNI			
15		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199389	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	00000002013072013	BPG 054 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULSEL	BNI			
16		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	00101055001318	BPG 060 SAT.POL.PP PROV. SULTRA	BPD SULTRA			
17		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240168	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. KUPANG	00101050077473	BPG 039 BPPD KAB. KUPANG	BPD NTT			
18		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	0001701300004816	BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	BTN			
19		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	00000000290873641	BPG 020 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	BNI			
20		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417939	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMPANG	0241286967	BPG 036 BPBD SAMPANG	BPD JAWA TIMUR			
21		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	418159	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto	025201001095304	BPG 056 BPBD KABUPATEN JENEPONTO	BRI			
22		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419638	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE	00000008888676762	BPG 060 BPBD KAB KONAWE	BNI			
23		01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921003	BPP : 133 DIR.KEPALA DAERAH	BRI			

III. DATA REKENING YANG SUDAH DITUTUP

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1		01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001004	BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	S-4800/WPB.12/KP.04/2021	2021-11-19

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
2		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1788413141	RPL 133 PDHL DUKCAPIL KDR UTK 2GFSGBQA	BNI			
3		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1788419041	RPL 133 PDHL DUKCAPIL MPWH UTK 2GFSGBQA	BNI			
4		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1810234612	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2N5BA8ZA	BNI			
5		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1811936892	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2N3CV82A	BNI			
6		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1810233823	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2BD8RG3A	BNI			
7		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1810232988	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2ME2LPAA	BNI			
8		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1810234099	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2Q8DSW6A	BNI			
9		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1810237839	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 22FP5BLA	BNI			
10		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	215140	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	000101001108306	BPG (061) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	BRI			
11	Bukittinggi	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	146001000007306	BPN 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	10	S-038/WPB.03/KP.0330/2016	12/01/2016
12		01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	0203294002	BPn 054 PPSDM Regional Makassar	BNI			

IV. BUKAN REKENING MILIK KEMENDAGRI

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1		01001	SEKRETARIAT JENDERAL	280089	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA	160501000007304	RPL 175 BPBD PROVINSI MALUT	BRI			
2		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	652594173941000	BPG 029 KEMENAG KAB. PURBALINGGA	BRI	50	S-6415/WPB.12/KP.04/2020	03/12/2020

V. DATA REKENING YANG MASIH DITELUSURI

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079140	Dinas PenanamModal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	849006916	BPG 123 DINAS PMPPTSP PROVSU				
2		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	024301000879308	BPG 043 SETDA PROV KALTENG				
3		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	202301000043307	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO				
4		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	00000000950679851	BPG 009 DPMPTSP PROV KEPRI				
5		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	695698626	BPG 037 DINAS PMPT SATU PINTU PROVINSI BALI				
6		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	1500013456239	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS Gorontalo				
7		01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	249395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	01401050001542	BPG 039 BPMPD KAB ROTE NDAO	BPD NTT			
8		01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	4000106002128	BPG 068 BPMK KAB MERAUKE	BPD PAPUA			
9		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	209029	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	20501050000069	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA 08 DK	BPD SULTRA			
10		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	240858	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE	002401001021308	BPG 040 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB ENDE				
11		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	241437	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTENDAO	01401050001361	BPG 039 DUKCAPIL KAB ROTE NDAO	BPD NTT			

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
12		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251323	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAPPI	4000106000413	BPG 068 DUKCAPIL NAKERKIM KAB MAPPI	BPD PAPUA			
13		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251626	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SARMI	030701002206309	BPG 063 DUKCAPIL KAB SARMI	BRI			

VI. DATA REKENING YANG TERCATAT GANDA PADA APLIKASI SPRINT KEMENDAGRI

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	42601001412305	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS				

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 06/05/2024
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,356,362	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4,522,600	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2,128,986,750	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	168,391,607	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21,350,000	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	325,108,829	0
0.0	114211	uang muka belanja pegawai (prepayment)	888,543	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,540,933,512	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	14,466,367,294	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	492,890,339	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	19,099,350,998	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	8,795,745,479
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	492,890,339
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	17,856,110,544
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,565,341,209	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	450,959,385	0
0.0	117114	Suku Cadang	88,933,749	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	24,144,320,110	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9,609,318,759	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	5,095,980,150	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446,822,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	181,397,049,965	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,083,142,625	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	67,670,350	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15,418,250	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,189,584,274	0
0.0	131111	Tanah	12,474,680,756,512	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,508,767,385,762	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,867,573,800,289	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	76,659,617,496	0
0.0	134112	Irigasi	46,675,529,795	0
0.0	134113	Jaringan	165,463,278,624	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	90,390,901,165	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	52,123,409,675	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	41,946,345,532	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,124,102,309,295
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	407,891,710,638
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	43,897,315,948

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 06/05/2024
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	23,667,141,544
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	62,363,683,888
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	94,631,924,129
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	135,500,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	452,500
0.0	162151	Software	690,127,558,860	0
0.0	162161	Lisensi	9,536,975,880	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	4,895,388,050	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	5,753,869,600	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	75,356,877,250	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	120,279,685,229	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	70,663,401,267
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	656,254,387,971
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,297,716,117
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	113,441,816,554
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	26,256,329,329
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	3,029,047,873
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	7,597,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,695,104,639
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	3,814,030,695
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	6,878,962
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	2,864,750
0.0	391111	Ekuitas	0	15,835,604,107,918
JUMLAH			**20,496,772,567,379**	**20,496,772,567,379**

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:45 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	52,074,300	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4,634,820	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2,343,805,012	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	328,249,699	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	231,332,699,525	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	7,050,534,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	124,718,757	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,536,525,594	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	78,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	9,844,326,180
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,844,481,786	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	610,476,442	0
0.0	117114	Suku Cadang	113,491,222	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	21,334,897,038	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	382,720,441	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	5,095,980,150	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446,822,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	160,017,091,880	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	9,154,135,762	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat –	925,651,980	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,195,972,582	0
0.0	131111	Tanah	13,166,366,737,522	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,663,742,657,834	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,904,113,214,212	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	78,064,949,616	0
0.0	134112	Irigasi	48,092,788,537	0
0.0	134113	Jaringan	167,663,109,468	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	95,518,621,512	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	65,225,862,613	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	29,571,282,509	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,274,188,181,175
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	486,261,917,923
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	51,619,327,489
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	28,558,348,182
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	66,995,459,088
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	94,678,343,010
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	17,850,089,235	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	17,850,089,235

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:45 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	718,062,251,105	0
0.0	162161	Lisensi	18,323,236,001	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	5,458,069,600	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	54,982,239,721	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	83,389,652,699	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	128,566,229,402	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	78,939,040,303
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	664,419,698,032
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,022,601,394
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	118,715,258,702
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	26,833,969,972
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	1,795,608,876
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	55,024,482,777
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,567,758,122
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	125,118,609,384
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	56,709,120
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	24,697,268
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,239,292,443,686
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	881,280,249,636	0
0.0	313211	Transfer Keluar	723,193,222,724	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,429,982,573,234
0.0	391111	Ekuitas	0	15,835,604,107,918
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16,791,155,661	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2,214,778,251	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	235,572,293	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	332,267,195,069
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	184,448,737	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,605,149,886
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	612,863,601
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,871,916,523
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,665,000
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	30,080,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	225,747,100
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	15,772,013,373
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	404,203,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	50,243,378,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	2,286,950,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:45 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	673,874,677,500
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,201,093
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	27,700,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	59,538,792
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	388,498,703
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	1,450,321,018
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	4,990,129,679
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang	0	283,926,270
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	217,692,557
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	17,790,070
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	319,093,323,670	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,407,657	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	15,030,664,766	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,110,323,446	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,466,753,550	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	23,427,656,078	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,433,774,802	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	14,320,204,065	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	30,575,086,900	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	56,150,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	205,800,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,265,491,183	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	8,448,335,305	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1,757,966,800	0
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	88,800,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,689,301,400	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	66,115,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	532	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,611,520	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	991,728	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	70,000,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,969,220	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	12,366,528,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	370,374,445,332	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	142,713,565	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	172,799,688,061	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	52,548,682,582	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,310,178,542	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:45 AM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	547,327,567	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,304,718,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	58,217,024,786	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	153,048,359	0
3.0	521211	Beban Bahan	124,511,508,927	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	18,175,751,750	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	150,823,214,050	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	222,495,434	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	786,727,723	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	39,861,488,702	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	358,955,234	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,803,774,631	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,000,144,083	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	169,826,623,038	0
3.0	522141	Beban Sewa	88,869,712,912	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	49,254,013,505	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,238,619,921,599	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74,294,893,988	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,670,101,378	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,677,446,518	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,846,250	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	5,991,620,081	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,638,001,100	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	344,043,270,974	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	3,852,776,374	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,387,665,634	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	122,366,172,328	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90,435,096,269	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	9,971,007,833	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	550,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	174,613,986,831	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78,250,059,967	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,300,241,118	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	4,796,503,626	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,602,239,925	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	61,218,881	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	26,550,893,666	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	1,724,885,277	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:45 AM
Halaman : 5
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	49,680,125	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	296,425,695	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,080,607,583	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,786,728,031	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	396,280,691	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	3,520,415,640	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	6,580,002,221	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	19,314,078,659	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	289,372,610,082	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	3,713,975,246	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	1,177,083,201	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	0	5,410,059
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,177,572,158	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	84,981,600	0
3.0	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	81,500,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	304,297,318	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	166,840,345	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	31,068	0
JUMLAH			**27,700,031,598,363**	**27,700,031,598,363**

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:46 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,265,153,052,424
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	881,280,249,636	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,605,149,886
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	612,863,601
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,874,512,506
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,665,000
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	30,080,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	220,997,100
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	17,440,051,500
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	462,953,000
3.1	425421	Pengembalian Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	46,185,000	0
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	50,289,563,000
3.1	425429	Pengembalian Pendapatan Pengembangan Sumber Daya	166,320,000	0
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	2,453,270,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	793,818,491,500
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,298,950
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	1,101,328
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	1,334,461,763
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	59,538,792
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	388,498,703
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	1,450,974,618
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	6,454,579,148
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	775,011,684
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	217,692,557
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	16,895,953
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	319,109,267,823	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	43,021
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,452,301	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,235,795
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,032,977,300	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	32,912
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,110,457,326	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	38,471,450
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,499,825,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,933,771,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	24,432,922
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,437,556,674	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	597,465

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:46 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	14,320,801,530	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	30,314,757,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,757,500
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	56,150,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	205,800,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,306,971,860	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	41,670,677
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,448,335,305	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,757,966,800	0
3.0	511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	88,800,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,689,301,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	66,115,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	532	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,611,520	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	991,728	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	70,000,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,969,220	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,751,979,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	370,305,085,531	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	99,495,702
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	142,713,565	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	17,035,666
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	172,932,525,998	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	52,548,682,582	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,310,178,542	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	548,607,567	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,280,000
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	17,111,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,321,829,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,438,367,886	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	4,050,000
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	149,973,615	0
3.0	521211	Belanja Bahan	124,513,834,952	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,326,025
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,195,074,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	16,072,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	150,823,214,050	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	222,495,434	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:46 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	980,323,623	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	35,600
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,049,394,348	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,235,000	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	793,126,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	41,107,509,120	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	398,482,087	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,721,966,231	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,000,144,083	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	169,808,864,040	0
3.0	522141	Belanja Sewa	89,250,417,695	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	6,446,668
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	282,120,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	49,540,894,005	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,211,951,873,285	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	1,027,798,203
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76,455,573,828	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	17,540,751
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	2,904,458,917	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,670,101,378	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	19,156,318
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,429,421,236	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	1,579,813,471	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,846,250	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6,422,560,881	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,638,001,100	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346,335,759,986	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,132,982,254
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3,852,783,288	0
3.1	524112	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	6,914
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,520,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,390,185,634	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	664,667,705
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123,032,224,033	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	904,379,129
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	91,377,073,199	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	385,476,178
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	10,402,294,573	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 10:46 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	123,659,988	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	849,300,000	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	500,000,000	0
3.0	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk	4,308,172,630	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	273,439,844,778	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3,800,032
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153,249,129,342	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,051,332,163	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,636,723,519	0
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	21,990,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	68,792,200	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	1,708,668
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	21,276,380,003	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	395,448,000	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	1,839,730,750	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	57,970,302,595	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	1,377,397,632	0
3.1	536121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap	0	1,773,000
JUMLAH			**5,152,379,727,068**	**5,152,379,727,068**

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	269,754,771,000	319,310,060,000	319,109,267,823	16,895,953	319,092,371,870	99.94	217,688,130
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,876,000	5,610,000	5,452,301	43,021	5,409,280	97.19	200,720
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	20,192,648,000	15,084,020,000	15,032,977,300	2,235,795	15,030,741,505	99.66	53,278,495
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	5,147,897,000	4,145,935,000	4,110,457,326	32,912	4,110,424,414	99.14	35,510,586
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	13,858,428,000	9,561,061,000	9,499,825,000	38,471,450	9,461,353,550	99.36	99,707,450
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,933,178,000	24,020,251,000	23,933,771,000	24,432,922	23,909,338,078	99.64	110,912,922
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,308,498,000	1,465,520,000	1,437,556,674	0	1,437,556,674	98.09	27,963,326
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	12,052,183,000	14,367,427,000	14,320,801,530	597,465	14,320,204,065	99.68	47,222,935
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	169,074,000	0	0	0	0		0
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,933,618,000	30,830,396,000	30,314,757,000	1,757,500	30,312,999,500	98.33	517,396,500
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	55,575,000	56,150,000	56,150,000	0	56,150,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	106,445,000	205,800,000	205,800,000	0	205,800,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,119,684,000	13,333,577,000	13,306,971,860	41,670,677	13,265,301,183	99.8	68,275,817
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,837,652,000	8,474,565,000	8,448,335,305	0	8,448,335,305	99.69	26,229,695
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,774,800,000	1,762,127,000	1,757,966,800	0	1,757,966,800	99.76	4,160,200
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	130,500,000	88,800,000	88,800,000	0	88,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	393,381,827,000	442,711,299,000	441,628,889,919	126,137,695	441,502,752,224	99.76	1,208,546,776
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,705,620,000	1,801,309,000	1,689,301,400	0	1,689,301,400	93.78	112,007,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,705,620,000	1,801,309,000	1,689,301,400	0	1,689,301,400	93.78	112,007,600
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	70,247,000	66,115,200	0	66,115,200	94.12	4,131,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	532	0	532	13.3	3,468
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,025,000	6,611,520	0	6,611,520	94.11	413,480
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,405,000	991,728	0	991,728	70.59	413,272
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	74,375,000	70,000,000	0	70,000,000	94.12	4,375,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	3,476,000	2,969,220	0	2,969,220	85.42	506,780
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	156,532,000	146,688,200	0	146,688,200	93.71	9,843,800
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	11,519,731,000	12,280,589,000	11,751,979,000	0	11,751,979,000	95.7	528,610,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	11,519,731,000	12,280,589,000	11,751,979,000	0	11,751,979,000	95.7	528,610,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	454,123,640,000	370,904,712,000	370,305,085,531	99,495,702	370,205,589,829	99.84	699,122,171

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	190,285,000	142,713,565	0	142,713,565	75	47,571,435
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	454,123,640,000	371,094,997,000	370,447,799,096	99,495,702	370,348,303,394	99.83	746,693,606
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	860,730,818,000	828,044,726,000	825,664,657,615	225,633,397	825,439,024,218	99.71	2,605,701,782
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	174,399,190,000	173,173,455,000	172,932,525,998	17,035,666	172,915,490,332	99.86	257,964,668
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	64,086,932,000	52,606,413,000	52,548,682,582	0	52,548,682,582	99.89	57,730,418
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,450,130,000	2,310,466,000	2,310,178,542	0	2,310,178,542	99.99	287,458
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,173,451,000	592,795,000	548,607,567	1,280,000	547,327,567	92.55	45,467,433
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,775,965,000	20,477,126,000	20,321,829,000	17,111,000	20,304,718,000	99.24	172,408,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63,248,651,000	58,558,958,000	58,438,367,886	4,050,000	58,434,317,886	99.79	124,640,114
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	160,160,000	157,645,000	149,973,615	0	149,973,615	95.13	7,671,385
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	328,294,479,000	307,876,858,000	307,250,165,190	39,476,666	307,210,688,524	99.8	666,169,476
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	120,964,524,000	126,081,502,000	124,513,834,952	2,326,025	124,511,508,927	98.76	1,569,993,073
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,162,120,000	18,301,022,000	18,195,074,000	16,072,500	18,179,001,500	99.42	122,020,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	148,281,877,000	150,960,738,000	150,823,214,050	0	150,823,214,050	99.91	137,523,950
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,663,657,000	238,750,000	222,495,434	0	222,495,434	93.19	16,254,566
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	800,000,000	984,171,000	980,323,623	0	980,323,623	99.61	3,847,377
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	295,872,178,000	296,566,183,000	294,734,942,059	18,398,525	294,716,543,534	99.38	1,849,639,466
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,290,244,000	35,080,837,000	35,049,394,348	35,600	35,049,358,748	99.91	31,478,252
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	1,260,000	1,235,000	0	1,235,000	98.02	25,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	473,600,000	793,294,000	793,126,300	0	793,126,300	99.98	167,700
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	850,936,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	27,616,280,000	35,875,391,000	35,843,755,648	35,600	35,843,720,048	99.91	31,670,952
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	38,186,325,000	41,182,859,000	41,107,509,120	0	41,107,509,120	99.82	75,349,880
522112	Belanja Langganan Telepon	1,527,126,000	410,060,000	398,482,087	0	398,482,087	97.18	11,577,913
522113	Belanja Langganan Air	5,404,600,000	4,733,245,000	4,721,966,231	0	4,721,966,231	99.76	11,278,769
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,455,114,000	1,002,533,000	1,000,144,083	0	1,000,144,083	99.76	2,388,917
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	3,000,000	0	0	0	0		0
522131	Belanja Jasa Konsultan	72,827,063,000	170,460,560,000	169,808,864,040	0	169,808,864,040	99.62	651,695,960
522141	Belanja Sewa	79,756,200,000	90,322,481,000	89,250,417,695	6,446,668	89,243,971,027	98.81	1,078,509,973
522151	Belanja Jasa Profesi	54,027,116,000	51,985,222,000	49,540,894,005	282,120,000	49,258,774,005	95.3	2,726,447,995

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	424,641,199,000	1,306,923,325,000	1,211,951,873,285	1,027,798,203	1,210,924,075,082	92.73	95,999,249,918
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	375,418,000	8,000	0	0	0	0	8,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	678,203,161,000	1,667,020,293,000	1,567,780,150,546	1,316,364,871	1,566,463,785,675	94.05	100,556,507,325
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74,071,316,000	76,483,957,000	76,455,573,828	17,540,751	76,438,033,077	99.96	45,923,923
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,069,558,000	2,917,809,000	2,904,458,917	0	2,904,458,917	99.54	13,350,083
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,698,253,000	3,670,484,000	3,670,101,378	0	3,670,101,378	99.99	382,622
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,991,760,000	37,533,535,000	37,429,421,236	19,156,318	37,410,264,918	99.72	123,270,082
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,525,000	1,590,989,000	1,579,813,471	0	1,579,813,471	99.3	11,175,529
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	10,000,000	0	0	0	0		0
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	15,000,000	14,846,250	0	14,846,250	98.98	153,750
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,158,601,000	6,424,706,000	6,422,560,881	0	6,422,560,881	99.97	2,145,119
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	16,523,430,000	1,639,882,000	1,638,001,100	0	1,638,001,100	99.89	1,880,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	142,833,443,000	130,276,362,000	130,114,777,061	36,697,069	130,078,079,992	99.88	198,282,008
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	241,943,959,000	351,686,931,000	346,335,759,986	2,132,982,254	344,202,777,732	98.48	7,484,153,268
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,577,475,000	3,852,916,000	3,852,783,288	6,914	3,852,776,374	100	139,626
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,514,131,000	10,868,555,000	10,390,185,634	2,520,000	10,387,665,634	95.6	480,889,366
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	122,342,348,000	125,218,355,000	123,032,224,033	664,667,705	122,367,556,328	98.25	2,850,798,672
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57,811,663,000	93,605,258,000	91,377,073,199	904,379,129	90,472,694,070	97.62	3,132,563,930
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	439,189,576,000	585,232,015,000	574,988,026,140	3,704,556,002	571,283,470,138	98.25	13,948,544,862
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,815,530,000	10,426,974,000	10,402,294,573	385,476,178	10,016,818,395	99.76	410,155,605
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	2,815,530,000	10,426,974,000	10,402,294,573	385,476,178	10,016,818,395	99.76	410,155,605
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	0	123,660,000	123,659,988	0	123,659,988	100	12
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	850,000,000	849,300,000	849,300,000	0	849,300,000	100	0
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	1,350,000,000	1,472,960,000	1,472,959,988	0	1,472,959,988	100	12
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas							
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan	5,237,000,000	4,317,883,000	4,308,172,630	0	4,308,172,630	99.78	9,710,370
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	5,237,000,000	4,317,883,000	4,308,172,630	0	4,308,172,630	99.78	9,710,370
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	108,421,184,000	273,446,060,000	273,439,844,778	0	273,439,844,778	100	6,215,222

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	108,421,184,000	273,446,060,000	273,439,844,778	0	273,439,844,778	100	6,215,222
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,029,832,831,000	3,312,510,979,000	3,200,335,088,613	5,501,004,911	3,194,834,083,702	96.61	117,676,895,298
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,835,956,000	153,617,451,000	153,249,129,342	3,800,032	153,245,329,310	99.76	372,121,690
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,200,000,000	2,115,929,000	2,051,332,163	0	2,051,332,163	96.95	64,596,837
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	69,035,956,000	155,733,380,000	155,300,461,505	3,800,032	155,296,661,473	99.72	436,718,527
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	378,000,000	6,638,602,000	6,636,723,519	0	6,636,723,519	99.97	1,878,481
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	21,990,000	21,990,000	0	21,990,000	100	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	68,795,000	68,792,200	0	68,792,200	100	2,800
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,960,340,000	21,339,832,000	21,276,380,003	1,708,668	21,274,671,335	99.7	65,160,665
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	5,338,340,000	28,069,219,000	28,003,885,722	1,708,668	28,002,177,054	99.77	67,041,946
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	396,138,000	395,448,000	0	395,448,000	99.83	690,000
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	200,000,000	1,847,699,000	1,839,730,750	0	1,839,730,750	99.57	7,968,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	200,000,000	2,243,837,000	2,235,178,750	0	2,235,178,750	99.61	8,658,250
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	21,554,545,000	57,984,094,000	57,970,302,595	0	57,970,302,595	99.98	13,791,405
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	110,500,000	1,382,891,000	1,377,397,632	1,773,000	1,375,624,632	99.6	7,266,368
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	21,665,045,000	59,366,985,000	59,347,700,227	1,773,000	59,345,927,227	99.97	21,057,773
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	96,239,341,000	245,413,421,000	244,887,226,204	7,281,700	244,879,944,504	99.79	533,476,496
	JUMLAH BELANJA	2,986,802,990,000	4,385,969,126,000	4,270,886,972,432	5,733,920,008	4,265,153,052,424	97.38	120,816,073,576

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATKER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA							
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	461,809,049,000	475,877,457,000	473,692,155,912	297,504,645	473,394,651,267	99.48	2,482,805,733
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	461,809,049,000	475,877,457,000	473,692,155,912	297,504,645	473,394,651,267	99.54	2,482,805,733
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT							
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	355,166,824,000	352,681,005,000	352,439,843,549	176,263,061	352,263,580,488	99.88	417,424,512
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	355,166,824,000	352,681,005,000	352,439,843,549	176,263,061	352,263,580,488	99.93	417,424,512
010010800KD	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT							
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	27,178,412,000	29,318,340,000	29,300,026,468	370,434	29,299,656,034	99.94	18,683,966
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	27,178,412,000	29,318,340,000	29,300,026,468	370,434	29,299,656,034	99.94	18,683,966
010011300KD	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT							
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	28,735,965,000	32,762,903,000	32,761,093,943	768	32,761,093,175	99.99	1,809,825
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	28,735,965,000	32,762,903,000	32,761,093,943	768	32,761,093,175	99.99	1,809,825
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA							
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28,552,324,000	26,848,100,000	26,828,672,753	8,490,650	26,820,182,103	99.9	27,917,897
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	28,552,324,000	26,848,100,000	26,828,672,753	8,490,650	26,820,182,103	99.93	27,917,897
010011900KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	33,484,053,000	30,995,445,000	30,994,501,071	7,585,199	30,986,915,872	99.97	8,529,128
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	33,484,053,000	30,995,445,000	30,994,501,071	7,585,199	30,986,915,872	100	8,529,128
010012300KD	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT							
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	31,805,534,000	29,597,919,000	29,596,739,890	13,244,953	29,583,494,937	99.95	14,424,063
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	31,805,534,000	29,597,919,000	29,596,739,890	13,244,953	29,583,494,937	100	14,424,063
010012500KD	BA(010) ES1(01) PAPUA							
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	33,098,336,000	31,070,561,000	31,040,110,619	556,301	31,039,554,318	99.9	31,006,682
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) PAPUA	33,098,336,000	31,070,561,000	31,040,110,619	556,301	31,039,554,318	99.9	31,006,682
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	54,742,080,000	49,979,110,000	49,920,443,690	36,035,478	49,884,408,212	99.81	94,701,788
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	26,100,000,000	91,686,384,000	85,141,039,475	577,313,659	84,563,725,816	92.23	7,122,658,184
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	80,842,080,000	141,665,494,000	135,061,483,165	613,349,137	134,448,134,028	95.34	7,217,359,972
	JUMLAH BELANJA 01	1,080,672,577,000	1,150,817,224,000	1,141,714,627,370	1,117,365,148	1,140,597,262,222	99.21	10219961778
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA							
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	76,002,600,000	76,271,846,000	76,327,570,032	84,047,128	76,243,522,904	99.96	28,323,096
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	76,002,600,000	76,271,846,000	76,327,570,032	84,047,128	76,243,522,904	100.07	28,323,096

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 02	76,002,600,000	76,271,846,000	76,327,570,032	84,047,128	76,243,522,904	100.07	28323096
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA							
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	265,979,233,000	262,470,077,000	262,426,990,383	60,596,542	262,366,393,841	99.96	103,683,159
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	265,979,233,000	262,470,077,000	262,426,990,383	60,596,542	262,366,393,841	99.98	103,683,159
	JUMLAH BELANJA 03	265,979,233,000	262,470,077,000	262,426,990,383	60,596,542	262,366,393,841	99.98	103683159
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1,022,081,000	993,651,000	992,961,637	0	992,961,637	99.93	689,363
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,022,081,000	993,651,000	992,961,637	0	992,961,637	99.93	689,363
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA							
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	124,632,875,000	157,664,713,000	157,107,873,630	227,244,196	156,880,629,434	99.5	784,083,566
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	124,632,875,000	157,664,713,000	157,107,873,630	227,244,196	156,880,629,434	99.65	784,083,566
010040400	BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	924,129,000	564,270,000	564,261,000	0	564,261,000	100	9,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA	924,129,000	564,270,000	564,261,000	0	564,261,000	100	9,000
010040700	BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA							
079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2,300,115,000	1,278,770,000	1,274,251,143	0	1,274,251,143	99.65	4,518,857
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA	2,300,115,000	1,278,770,000	1,274,251,143	0	1,274,251,143	99.65	4,518,857
010040800	BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT							
089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1,464,009,000	1,043,563,000	1,028,619,373	0	1,028,619,373	98.57	14,943,627
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT	1,464,009,000	1,043,563,000	1,028,619,373	0	1,028,619,373	98.57	14,943,627
010040900DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU							
099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1,175,051,000	909,332,000	897,093,697	0	897,093,697	98.65	12,238,303
433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	117,505,000	117,505,000	117,505,000	0	117,505,000	100	0
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1,292,556,000	1,026,837,000	1,014,598,697	0	1,014,598,697	98.81	12,238,303
010041400DK	BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi							
149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,411,734,000	910,504,000	894,632,412	0	894,632,412	98.26	15,871,588
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi	1,411,734,000	910,504,000	894,632,412	0	894,632,412	98.26	15,871,588
010041900	BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,916,764,000	1,205,580,000	1,193,811,941	0	1,193,811,941	99.02	11,768,059
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN	1,916,764,000	1,205,580,000	1,193,811,941	0	1,193,811,941	99.02	11,768,059
010042000	BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,638,261,000	956,628,000	835,922,224	0	835,922,224	87.38	120,705,776
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	1,638,261,000	956,628,000	835,922,224	0	835,922,224	87.38	120,705,776
010042100	BA(010) ES1(04) MALUKU							
219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1,455,896,000	1,118,628,000	1,125,037,486	22,511,597	1,102,525,889	98.56	16,102,111
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) MALUKU	1,455,896,000	1,118,628,000	1,125,037,486	22,511,597	1,102,525,889	100.57	16,102,111
010042600	BA(010) ES1(04) BENGKULU							
269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1,028,381,000	996,241,000	996,234,958	0	996,234,958	100	6,042
433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	152,838,000	152,838,000	152,822,899	0	152,822,899	99.99	15,101
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BENGKULU	1,181,219,000	1,149,079,000	1,149,057,857	0	1,149,057,857	100	21,143
010042900	BA(010) ES1(04) BANTEN							
299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	740,716,000	406,691,000	388,341,800	0	388,341,800	95.49	18,349,200
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANTEN	740,716,000	406,691,000	388,341,800	0	388,341,800	95.49	18,349,200
010043000	BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG							
309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1,290,058,000	1,263,458,000	1,240,752,490	0	1,240,752,490	98.2	22,705,510
433343	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	129,006,000	120,606,000	119,478,600	0	119,478,600	99.07	1,127,400
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG	1,419,064,000	1,384,064,000	1,360,231,090	0	1,360,231,090	98.28	23,832,910
010043400DK	BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT							
340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1,150,506,000	1,135,616,000	1,135,571,092	0	1,135,571,092	100	44,908
	JUMLAH BELANJA BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT	1,150,506,000	1,135,616,000	1,135,571,092	0	1,135,571,092	100	44,908
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	320,000,000	229,146,000	228,869,002	0	228,869,002	99.88	276,998
029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	2,091,015,000	1,186,386,000	1,183,694,343	771,725	1,182,922,618	99.71	3,463,382
039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2,352,390,000	1,158,693,000	1,121,401,611	5,119,000	1,116,282,611	96.34	42,410,389
059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1,829,636,000	0	0	0	0	0	0
069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	2,178,439,000	1,494,026,000	1,425,759,697	1,618,000	1,424,141,697	95.32	69,884,303
109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1,299,642,000	1,296,642,000	1,296,500,000	0	1,296,500,000	99.99	142,000
119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,551,134,000	1,134,633,000	1,134,452,861	0	1,134,452,861	99.98	180,139
129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1,246,195,000	1,019,577,000	1,016,345,663	0	1,016,345,663	99.68	3,231,337
129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	124,620,000	120,240,000	120,020,000	3,629,600	116,390,400	96.8	3,849,600
139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,411,734,000	1,344,434,000	1,326,154,226	0	1,326,154,226	98.64	18,279,774
149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	141,173,000	141,173,000	141,172,500	0	141,172,500	100	500
159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,315,896,000	826,185,000	820,510,714	0	820,510,714	99.31	5,674,286

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1,220,058,000	0	0	0	0	0	0
179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	218,294,000	205,934,000	204,674,206	0	204,674,206	99.39	1,259,794
179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2,182,938,000	2,128,868,000	2,128,712,057	0	2,128,712,057	99.99	155,943
189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,385,896,000	1,330,396,000	1,325,008,146	0	1,325,008,146	99.6	5,387,854
209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	213,825,000	213,825,000	213,825,000	0	213,825,000	100	0
229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1,168,381,000	1,048,188,000	1,047,581,637	0	1,047,581,637	99.94	606,363
239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,497,508,000	1,464,728,000	1,464,717,659	0	1,464,717,659	100	10,341
249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2,231,012,000	1,651,437,000	1,651,038,908	0	1,651,038,908	99.98	398,092
249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	223,101,000	223,101,000	222,837,940	0	222,837,940	99.88	263,060
250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	1,581,274,000	0	0	0	0	0	0
259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	173,603,000	147,193,000	138,350,470	0	138,350,470	93.99	8,842,530
289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	161,243,000	155,623,000	154,122,770	0	154,122,770	99.04	1,500,230
289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1,612,421,000	1,523,641,000	1,471,127,590	0	1,471,127,590	96.55	52,513,410
329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,150,058,000	920,155,000	919,154,573	0	919,154,573	99.89	1,000,427
339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	940,956,000	614,791,000	590,971,095	0	590,971,095	96.13	23,819,905
349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	115,051,000	115,051,000	114,820,548	0	114,820,548	99.8	230,452
356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	1,750,000,000	1,655,910,000	1,652,783,500	0	1,652,783,500	99.81	3,126,500
359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	129,696,000	129,696,000	129,687,964	0	129,687,964	99.99	8,036
417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	996,956,000	959,676,000	959,497,305	0	959,497,305	99.98	178,695
417936	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	2,000,000,000	1,975,143,000	1,971,511,000	0	1,971,511,000	99.82	3,632,000
433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	146,401,000	136,175,000	135,516,643	0	135,516,643	99.52	658,357
433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	135,006,000	127,316,000	115,636,623	0	115,636,623	90.83	11,679,377
433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	129,964,000	129,964,000	129,963,720	0	129,963,720	100	280
433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	155,113,000	155,113,000	154,022,481	0	154,022,481	99.3	1,090,519
433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	124,072,000	124,072,000	122,509,000	0	122,509,000	98.74	1,563,000
433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	116,838,000	116,838,000	116,629,420	0	116,629,420	99.82	208,580
433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	141,170,000	135,670,000	135,664,000	0	135,664,000	100	6,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	132,208,000	132,208,000	132,164,530	0	132,164,530	99.97	43,470
433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	138,590,000	138,590,000	138,589,811	0	138,589,811	100	189
433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	191,676,000	191,676,000	191,545,459	0	191,545,459	99.93	130,541
433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	149,751,000	149,751,000	148,677,748	0	148,677,748	99.28	1,073,252
433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	145,590,000	145,590,000	145,563,304	0	145,563,304	99.98	26,696
484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	217,844,000	205,374,000	205,362,740	0	205,362,740	99.99	11,260
484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	435,687,000	397,327,000	382,481,960	0	382,481,960	96.26	14,845,040
484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	280,085,000	280,085,000	280,024,610	0	280,024,610	99.98	60,390
484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	230,012,000	174,322,000	161,395,435	0	161,395,435	92.58	12,926,565
484106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA)	460,023,000	432,100,000	430,888,642	0	430,888,642	99.72	1,211,358
484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	295,729,000	275,398,000	274,904,224	0	274,904,224	99.82	493,776
484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	235,010,000	225,030,000	224,016,082	0	224,016,082	99.55	1,013,918
484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	151,078,000	130,098,000	128,221,240	0	128,221,240	98.56	1,876,760
484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	230,011,000	224,481,000	218,221,386	0	218,221,386	97.21	6,259,614
484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	147,865,000	126,985,000	126,685,861	0	126,685,861	99.76	299,139
484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	259,928,000	248,118,000	245,397,634	0	245,397,634	98.9	2,720,366
484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	167,097,000	162,667,000	162,623,626	0	162,623,626	99.97	43,374
484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	292,802,000	274,920,000	274,622,402	0	274,622,402	99.89	297,598
484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	188,230,000	169,190,000	168,687,979	0	168,687,979	99.7	502,021
484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	310,227,000	281,866,000	278,712,457	0	278,712,457	98.88	3,153,543
484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	199,432,000	176,342,000	168,680,265	0	168,680,265	95.66	7,661,735
484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	249,239,000	213,689,000	212,597,250	0	212,597,250	99.49	1,091,750
484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	160,225,000	150,628,000	150,623,800	0	150,623,800	100	4,200
484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	205,676,000	198,056,000	198,053,000	0	198,053,000	100	3,000
484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	132,220,000	122,470,000	121,506,500	0	121,506,500	99.21	963,500
484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	258,011,000	250,901,000	250,601,365	0	250,601,365	99.88	299,635
484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	165,865,000	165,865,000	165,730,160	0	165,730,160	99.92	134,840
484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	148,143,000	138,663,000	137,069,000	0	137,069,000	98.85	1,594,000
484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	125,235,000	104,255,000	100,491,730	0	100,491,730	96.39	3,763,270
484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	209,101,000	188,011,000	179,282,721	0	179,282,721	95.36	8,728,279

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	PINTU PROVINSI JAWA BARAT							
484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	418,203,000	402,403,000	402,282,876	0	402,282,876	99.97	120,124
484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	268,845,000	251,655,000	251,247,593	0	251,247,593	99.84	407,407
484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	235,239,000	235,239,000	235,104,320	0	235,104,320	99.94	134,680
484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	470,478,000	297,810,000	280,879,700	0	280,879,700	94.32	16,930,300
484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	302,450,000	287,255,000	286,090,646	0	286,090,646	99.59	1,164,354
484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	112,413,000	112,413,000	110,853,500	0	110,853,500	98.61	1,559,500
484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	184,826,000	179,428,000	179,336,900	0	179,336,900	99.95	91,100
484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	138,817,000	138,817,000	128,286,139	0	128,286,139	92.41	10,530,861
484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	182,964,000	182,964,000	182,475,963	0	182,475,963	99.73	488,037
484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	365,927,000	340,077,000	326,347,825	0	326,347,825	95.96	13,729,175
484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	233,676,000	207,458,000	200,378,720	0	200,378,720	96.59	7,079,280
484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	150,220,000	142,190,000	141,596,600	0	141,596,600	99.58	593,400
484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	299,501,000	299,501,000	299,493,000	0	299,493,000	100	8,000
484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	192,537,000	192,537,000	192,526,958	0	192,526,958	99.99	10,042
484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	746,207,000	733,597,000	733,592,097	0	733,592,097	100	4,903
484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	286,843,000	270,863,000	270,568,800	0	270,568,800	99.89	294,200
484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	582,347,000	519,037,000	497,660,645	0	497,660,645	95.88	21,376,355
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	181,509,000	175,009,000	171,782,918	0	171,782,918	98.16	3,226,082
484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	282,348,000	247,834,000	243,862,778	0	243,862,778	98.4	3,971,222
484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	181,509,000	174,649,000	174,249,236	0	174,249,236	99.77	399,764
484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	131,590,000	114,240,000	109,326,600	0	109,326,600	95.7	4,913,400
484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	263,179,000	245,699,000	208,306,203	0	208,306,203	84.78	37,392,797
484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	169,187,000	148,281,000	117,974,494	0	117,974,494	79.56	30,306,506
484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	122,006,000	116,236,000	116,229,083	0	116,229,083	99.99	6,917
484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	544,011,000	502,121,000	456,168,091	0	456,168,091	90.85	45,952,909
484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	156,865,000	146,425,000	133,443,013	0	133,443,013	91.13	12,981,987
484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	499,391,000	435,808,000	339,846,271	0	339,846,271	77.98	95,961,729
484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	128,180,000	128,180,000	126,705,450	0	126,705,450	98.85	1,474,550
484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	736,587,000	667,782,000	655,295,045	0	655,295,045	98.13	12,486,955
484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	280,663,000	280,663,000	280,663,000	0	280,663,000	100	0
484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	204,416,000	197,516,000	197,514,885	0	197,514,885	100	1,115

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	131,410,000	131,410,000	131,409,590	0	131,409,590	100	410
484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	230,101,000	214,101,000	214,095,420	0	214,095,420	100	5,580
484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	147,922,000	147,922,000	147,907,634	0	147,907,634	99.99	14,366
484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	383,353,000	322,423,000	321,436,090	0	321,436,090	99.69	986,910
484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	246,441,000	232,551,000	232,550,790	0	232,550,790	100	210
484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	277,179,000	277,179,000	276,896,820	0	276,896,820	99.9	282,180
484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	178,187,000	161,257,000	148,024,220	0	148,024,220	91.79	13,232,780
484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	327,652,000	327,652,000	327,652,000	0	327,652,000	100	0
484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	250,633,000	233,353,000	229,325,200	0	229,325,200	98.27	4,027,800
484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	591,179,000	566,059,000	564,680,859	0	564,680,859	99.76	1,378,141
484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	237,187,000	226,837,000	226,201,587	0	226,201,587	99.72	635,413
484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	322,484,000	288,794,000	287,069,129	0	287,069,129	99.4	1,724,871
484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	207,311,000	181,351,000	169,070,000	0	169,070,000	93.23	12,281,000
484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	347,207,000	308,768,000	307,778,655	0	307,778,655	99.68	989,345
484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	223,204,000	134,654,000	127,011,010	0	127,011,010	94.32	7,642,990
484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	94,096,000	55,621,000	55,316,485	0	55,316,485	99.45	304,515
484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	188,191,000	0	0	0	0	0	0
484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	120,980,000	109,410,000	97,586,000	0	97,586,000	89.19	11,824,000
690639	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	1,750,000,000	941,650,000	934,254,990	0	934,254,990	99.21	7,395,010
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	59,582,950,000	46,648,974,000	45,937,023,621	11,138,325	45,925,885,296	98.47	723,088,704
	JUMLAH BELANJA 04	202,132,875,000	217,487,568,000	216,002,195,003	260,894,118	215,741,300,885	99.32	1746267115
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA							
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	100,385,584,000	1,053,602,042,000	952,497,576,381	2,256,976,751	950,240,599,630	90.19	103,361,442,370
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	100,385,584,000	1,053,602,042,000	952,497,576,381	2,256,976,751	950,240,599,630	90.4	103,361,442,370
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	16,053,112,000	15,130,840,000	15,103,275,107	1,457,648	15,101,817,459	99.81	29,022,541
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	16,053,112,000	15,130,840,000	15,103,275,107	1,457,648	15,101,817,459	99.82	29,022,541
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR							
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15,290,049,000	15,102,930,000	15,041,595,367	555,203	15,041,040,164	99.59	61,889,836
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	15,290,049,000	15,102,930,000	15,041,595,367	555,203	15,041,040,164	99.59	61,889,836
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG							
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	13,276,690,000	12,972,144,000	12,961,247,469	2,378,432	12,958,869,037	99.9	13,274,963
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) LAMPUNG	13,276,690,000	12,972,144,000	12,961,247,469	2,378,432	12,958,869,037	99.92	13,274,963

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 05	145,005,435,000	1,096,807,956,000	995,603,694,324	2,261,368,034	993,342,326,290	90.77	103465629710
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	171,632,573,000	278,801,747,000	278,275,924,659	273,915,462	278,002,009,197	99.71	799,737,803
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	171,632,573,000	278,801,747,000	278,275,924,659	273,915,462	278,002,009,197	99.81	799,737,803
	JUMLAH BELANJA 06	171,632,573,000	278,801,747,000	278,275,924,659	273,915,462	278,002,009,197	99.81	799737803
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA							
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	99,044,400,000	97,509,565,000	97,292,315,659	120,778,475	97,171,537,184	99.65	338,027,816
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	99,044,400,000	97,509,565,000	97,292,315,659	120,778,475	97,171,537,184	99.78	338,027,816
	JUMLAH BELANJA 07	99,044,400,000	97,509,565,000	97,292,315,659	120,778,475	97,171,537,184	99.78	338027816
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA							
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	619,735,136,000	852,401,004,000	851,178,841,610	1,304,686,127	849,874,155,483	99.7	2,526,848,517
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	619,735,136,000	852,401,004,000	851,178,841,610	1,304,686,127	849,874,155,483	99.86	2,526,848,517
	JUMLAH BELANJA 08	619,735,136,000	852,401,004,000	851,178,841,610	1,304,686,127	849,874,155,483	99.86	2526848517
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	77,703,342,000	81,275,352,000	80,883,517,783	95,704,872	80,787,812,911	99.4	487,539,089
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	77,703,342,000	81,275,352,000	80,883,517,783	95,704,872	80,787,812,911	99.52	487,539,089
	JUMLAH BELANJA 09	77,703,342,000	81,275,352,000	80,883,517,783	95,704,872	80,787,812,911	99.52	487539089
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	54,855,592,000	52,149,718,000	51,948,036,955	89,620,413	51,858,416,542	99.44	291,301,458
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	54,855,592,000	52,149,718,000	51,948,036,955	89,620,413	51,858,416,542	99.61	291,301,458
	JUMLAH BELANJA 11	54,855,592,000	52,149,718,000	51,948,036,955	89,620,413	51,858,416,542	99.61	291301458
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	93,007,690,000	100,495,848,000	100,025,135,198	29,047,178	99,996,088,020	99.5	499,759,980
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	93,007,690,000	100,495,848,000	100,025,135,198	29,047,178	99,996,088,020	99.53	499,759,980
010120200KD	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT							
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	22,591,556,000	25,114,109,000	25,041,025,435	1,170,374	25,039,855,061	99.7	74,253,939
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	22,591,556,000	25,114,109,000	25,041,025,435	1,170,374	25,039,855,061	99.71	74,253,939

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 10:34 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
010120400KD 027114	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	26,841,759,000	26,288,099,000	26,216,189,475	13,898,947	26,202,290,528	99.67	85,808,472
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	26,841,759,000	26,288,099,000	26,216,189,475	13,898,947	26,202,290,528	99.73	85,808,472
010120800KD 506137	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	21,686,310,000	26,779,824,000	26,670,044,848	925,556	26,669,119,292	99.59	110,704,708
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	21,686,310,000	26,779,824,000	26,670,044,848	925,556	26,669,119,292	99.59	110,704,708
010121900KD 027177	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	18,610,901,000	21,710,390,000	21,693,302,662	14,036,503	21,679,266,159	99.86	31,123,841
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	18,610,901,000	21,710,390,000	21,693,302,662	14,036,503	21,679,266,159	99.92	31,123,841
null 506138	Kode UAPPAW Tidak Ada BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11,301,011,000	19,588,799,000	19,587,561,036	5,865,131	19,581,695,905	99.96	7,103,095
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	11,301,011,000	19,588,799,000	19,587,561,036	5,865,131	19,581,695,905	99.99	7,103,095
	JUMLAH BELANJA 12	194,039,227,000	219,977,069,000	219,233,258,654	64,943,689	219,168,314,965	99.66	808754035
	JUMLAH BELANJA	2,986,802,990,000	4,385,969,126,000	4,270,886,972,432	5,733,920,008	4,265,153,052,424	97.38	120,816,073,576

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 5:15 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	402,306,111,000	403,894,084,000	402,810,088,575	116,833,550	402,693,255,025	99.7	1,200,828,975
52	BELANJA BARANG	643,669,859,000	687,946,658,000	680,080,817,293	998,822,930	679,081,994,363	98.71	8,864,663,637
53	BELANJA MODAL	34,696,607,000	58,976,482,000	58,823,721,502	1,708,668	58,822,012,834	99.74	154,469,166
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	1,080,672,577,000	1,150,817,224,000	1,141,714,627,370	1,117,365,148	1,140,597,262,222	99.21	10,219,961,778
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	41,180,325,000	40,526,362,000	40,526,157,189	22,730,942	40,503,426,247	99.94	22,935,753
52	BELANJA BARANG	33,822,275,000	34,460,492,000	34,516,542,351	61,316,186	34,455,226,165	99.98	5,265,835
53	BELANJA MODAL	1,000,000,000	1,284,992,000	1,284,870,492	0	1,284,870,492	99.99	121,508
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	76,002,600,000	76,271,846,000	76,327,570,032	84,047,128	76,243,522,904	100.07	28,323,096
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	38,150,973,000	34,665,875,000	34,628,979,513	185,143	34,628,794,370	99.89	37,080,630
52	BELANJA BARANG	225,528,260,000	225,504,202,000	225,498,155,335	60,411,399	225,437,743,936	99.97	66,458,064
53	BELANJA MODAL	2,300,000,000	2,300,000,000	2,299,855,535	0	2,299,855,535	99.99	144,465
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	265,979,233,000	262,470,077,000	262,426,990,383	60,596,542	262,366,393,841	99.98	103,683,159
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
51	BELANJA PEGAWAI	40,794,303,000	36,803,923,000	36,730,041,489	16,364,123	36,713,677,366	99.75	90,245,634
52	BELANJA BARANG	157,938,572,000	178,083,645,000	176,674,512,809	240,729,963	176,433,782,846	99.07	1,649,862,154
53	BELANJA MODAL	3,400,000,000	2,600,000,000	2,597,640,705	3,800,032	2,593,840,673	99.76	6,159,327
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	202,132,875,000	217,487,568,000	216,002,195,003	260,894,118	215,741,300,885	99.32	1,746,267,115
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
51	BELANJA PEGAWAI	64,571,803,000	57,408,721,000	56,922,193,910	3,489,031	56,918,704,879	99.15	490,016,121
52	BELANJA BARANG	78,306,523,000	1,036,409,912,000	935,710,233,538	2,257,879,003	933,452,354,535	90.07	102,957,557,465
53	BELANJA MODAL	2,127,109,000	2,989,323,000	2,971,266,876	0	2,971,266,876	99.4	18,056,124
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	145,005,435,000	1,096,807,956,000	995,603,694,324	2,261,368,034	993,342,326,290	90.77	103,465,629,710
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	44,307,040,000	41,574,543,000	41,380,751,976	14,472,279	41,366,279,697	99.5	208,263,303
52	BELANJA BARANG	126,585,372,000	236,028,484,000	235,706,088,561	259,443,183	235,446,645,378	99.75	581,838,622
53	BELANJA MODAL	740,161,000	1,198,720,000	1,189,084,122	0	1,189,084,122	99.2	9,635,878
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	171,632,573,000	278,801,747,000	278,275,924,659	273,915,462	278,002,009,197	99.81	799,737,803
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	43,151,662,000	39,472,272,000	39,446,473,235	20,291,722	39,426,181,513	99.88	46,090,487
52	BELANJA BARANG	54,828,738,000	56,603,582,000	56,415,281,124	100,486,753	56,314,794,371	99.49	288,787,629
53	BELANJA MODAL	1,064,000,000	1,433,711,000	1,430,561,300	0	1,430,561,300	99.78	3,149,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 5:15 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN OTONOMI DAERAH	99,044,400,000	97,509,565,000	97,292,315,659	120,778,475	97,171,537,184	99.78	338,027,816
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
51	BELANJA PEGAWAI	40,211,787,000	36,136,970,000	36,005,033,837	16,059,139	35,988,974,698	99.59	147,995,302
52	BELANJA BARANG	531,440,886,000	655,902,798,000	655,138,862,206	1,288,626,988	653,850,235,218	99.69	2,052,562,782
53	BELANJA MODAL	48,082,463,000	160,361,236,000	160,034,945,567	0	160,034,945,567	99.8	326,290,433
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	619,735,136,000	852,401,004,000	851,178,841,610	1,304,686,127	849,874,155,483	99.86	2,526,848,517
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	40,542,076,000	39,490,397,000	39,415,776,398	3,125,756	39,412,650,642	99.8	77,746,358
52	BELANJA BARANG	36,661,266,000	40,874,955,000	40,561,539,658	90,806,116	40,470,733,542	99.01	404,221,458
53	BELANJA MODAL	500,000,000	910,000,000	906,201,727	1,773,000	904,428,727	99.39	5,571,273
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	77,703,342,000	81,275,352,000	80,883,517,783	95,704,872	80,787,812,911	99.52	487,539,089
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
51	BELANJA PEGAWAI	25,082,311,000	22,380,567,000	22,171,862,468	740,730	22,171,121,738	99.06	209,445,262
52	BELANJA BARANG	28,652,280,000	28,383,250,000	28,393,176,336	88,879,683	28,304,296,653	99.72	78,953,347
53	BELANJA MODAL	1,121,001,000	1,385,901,000	1,382,998,151	0	1,382,998,151	99.79	2,902,849
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	54,855,592,000	52,149,718,000	51,948,036,955	89,620,413	51,858,416,542	99.61	291,301,458
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	80,432,427,000	75,691,012,000	75,627,299,025	11,340,982	75,615,958,043	99.9	75,053,957
52	BELANJA BARANG	112,398,800,000	132,313,001,000	131,639,879,402	53,602,707	131,586,276,695	99.45	726,724,305
53	BELANJA MODAL	1,208,000,000	11,973,056,000	11,966,080,227	0	11,966,080,227	99.94	6,975,773
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	194,039,227,000	219,977,069,000	219,233,258,654	64,943,689	219,168,314,965	99.66	808,754,035
	JUMLAH BELANJA	2,986,802,990,000	4,385,969,126,000	4,270,886,972,432	5,733,920,008	4,265,153,052,424	97.38	120,816,073,576

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	100,248,031,000	95,622,402,000	94,667,232,776	85,278,273	94,581,954,503	12645.18	1,040,447,497
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	20,628,000,000	33,880,223,000	33,812,610,327	96,176,579	33,716,433,748	398.33	163,789,252
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	9,476,579,000	9,699,473,000	9,603,036,054	144,954,466	9,458,081,588	97.51	241,391,412
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	13,228,200,000	11,685,700,000	11,652,229,168	38,330,649	11,613,898,519	395.32	71,801,481
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	4,800,000,000	7,075,829,000	7,074,190,206	2,839,257	7,071,350,949	99.94	4,478,051
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	12,166,909,000	15,457,843,000	15,434,736,336	52,835,409	15,381,900,927	99.51	75,942,073
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7,466,709,000	7,098,704,000	7,072,135,760	15,236,000	7,056,899,760	99.41	41,804,240
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	3,075,000,000	2,900,912,000	2,891,393,014	3,024,320	2,888,368,694	99.57	12,543,306
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,448,288,000	3,448,288,000	3,481,805,696	61,188,228	3,420,617,468	99.2	27,670,532
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,090,020,000	2,267,710,000	2,238,392,210	0	2,238,392,210	98.71	29,317,790
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	6,044,000,000	5,746,115,000	5,719,375,435	7,854,120	5,711,521,315	99.4	34,593,685
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11,593,826,000	10,159,156,000	10,124,074,515	12,655,078	10,111,419,437	99.53	47,736,563
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas dan kewilayahan	500,000,000	500,000,000	496,950,964	0	496,950,964	99.39	3,049,036
6138	Penataan kelembagaan Desa	6,801,446,000	6,968,154,000	6,736,781,512	43,074,238	6,693,707,274	96.06	274,446,726
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	28,560,498,000	29,380,813,000	29,281,444,022	99,674,952	29,181,769,070	99.32	199,043,930
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	9,749,000,000	9,268,511,000	9,261,288,285	5,418,432	9,255,869,853	99.86	12,641,147
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	16,536,926,000	20,396,713,000	20,203,474,506	57,376,826	20,146,097,680	98.77	250,615,320
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	4,600,000,000	3,713,790,000	3,712,928,343	2,858,392	3,710,069,951	99.9	3,720,049

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	132,926,000	1,057,301,000	1,057,170,157	71,187	1,057,098,970	99.98	202,030
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	12,535,978,000	20,220,518,000	20,198,699,762	11,353,608	20,187,346,154	593.3	33,171,846
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**273,682,336,000**	**296,548,155,000**	**294,719,949,048**	**740,200,014**	**293,979,749,034**	**99.384**	**2,568,405,966**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	397,688,612,000	356,059,868,000	355,992,641,599	1,008,774,669	354,983,866,930	99.7	1,076,001,070
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	108,957,190,000	141,626,125,000	141,578,941,271	121,639,355	141,457,301,916	99.88	168,823,084
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16,869,655,000	18,381,121,000	18,234,377,070	32,645,852	18,201,731,218	99.02	179,389,782
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**523,515,457,000**	**516,067,114,000**	**515,805,959,940**	**1,163,059,876**	**514,642,900,064**	**99.949**	**1,424,213,936**
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	21,450,000,000	18,480,265,000	18,471,338,566	408,360	18,470,930,206	99.95	9,334,794
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	14,850,000,000	14,814,875,000	14,813,176,221	12,111,340	14,801,064,881	99.91	13,810,119
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	160,707,706,000	163,688,508,000	163,685,747,148	36,661,699	163,649,085,449	99.98	39,422,551
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CR	**197,007,706,000**	**196,983,648,000**	**196,970,261,935**	**49,181,399**	**196,921,080,536**	**99.993**	**62,567,464**
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	26,100,000,000	91,686,384,000	85,141,039,475	577,313,659	84,563,725,816	92.23	7,122,658,184
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	15,450,000,000	15,067,655,000	15,092,912,455	36,480,491	15,056,431,964	99.93	11,223,036
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	372,241,160,000	386,551,307,000	384,596,309,758	213,726,426	384,382,583,332	99.44	2,168,723,668
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	53,117,889,000	51,825,459,000	51,596,378,416	12,259,390	51,584,119,026	99.53	241,339,974
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	21,000,000,000	22,433,036,000	22,406,555,283	35,038,338	22,371,516,945	99.73	61,519,055
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	754,361,000	552,984,000	552,972,500	0	552,972,500	100	11,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	491,003,542,000	482,673,106,000	482,485,534,837	90,368,875	482,395,165,962	799.45	277,940,038
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,326,267,000	1,105,077,000	1,104,240,081	0	1,104,240,081	799.54	836,919
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	10,880,958,000	7,997,283,000	8,011,452,850	27,627,884	7,983,824,966	799.39	13,458,034
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	78,133,053,000	72,148,181,000	72,132,677,204	101,048,385	72,031,628,819	798.89	116,552,181
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	600,000,000	331,304,000	331,299,588	0	331,299,588	100	4,412
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	56,097,335,000	55,935,982,000	55,937,976,069	26,897,270	55,911,078,799	99.96	24,903,201
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	310,000,000	303,185,000	303,184,008	0	303,184,008	100	992
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,985,025,000	1,804,285,000	1,804,086,625	112,000	1,803,974,625	99.98	310,375
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	253,986,000	446,275,000	446,269,427	0	446,269,427	100	5,573
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	16,756,254,000	17,450,815,000	17,504,754,315	57,037,858	17,447,716,457	99.98	3,098,543
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	2,000,000,000	1,998,450,990	0	1,998,450,990	99.92	1,549,010
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	61,471,527,000	57,986,429,000	57,959,171,808	11,415,143	57,947,756,665	99.93	38,672,335
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	4,000,000,000	4,000,000,000	3,999,664,623	0	3,999,664,623	99.99	335,377
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,499,441,027	0	1,499,441,027	99.96	558,973
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,500,418,000	1,500,418,000	1,499,830,570	0	1,499,830,570	99.96	587,430
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	63,915,350,000	59,008,241,000	58,900,154,923	28,292,952	58,871,861,971	99.77	136,379,029
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	1,912,000,000	1,912,000,000	1,909,987,754	37,801,896	1,872,185,858	97.92	39,814,142
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	1,835,250,000	1,835,250,000	1,831,579,939	689,340	1,830,890,599	99.76	4,359,401
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	1,700,000,000	1,700,000,000	1,688,549,060	0	1,688,549,060	99.33	11,450,940
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	110,660,280,000	105,096,861,000	104,501,578,264	17,888,608	104,483,689,656	398.48	613,171,344

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,179,592,000	1,139,585,000	1,116,624,371	5,736,453	1,110,887,918	197.12	28,697,082
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	1,444,734,000	1,423,390,000	1,405,176,520	1,059,745	1,404,116,775	298.34	19,273,225
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	5,760,667,000	5,516,111,000	5,513,795,680	0	5,513,795,680	99.96	2,315,320
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	1,425,000,000	1,424,744,898	0	1,424,744,898	99.98	255,102
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	69,974,775,000	67,589,477,000	67,247,477,693	36,815,852	67,210,661,841	99.44	378,815,159
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	1,893,017,000	2,429,050,000	2,423,411,600	0	2,423,411,600	99.77	5,638,400
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	406,774,000	415,285,000	413,245,263	0	413,245,263	99.51	2,039,737
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,200,000,000	2,200,000,000	2,189,717,042	9,874,011	2,179,843,031	99.08	20,156,969
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	60,749,982,000	57,282,364,000	57,159,385,571	29,560,503	57,129,825,068	99.73	152,538,932
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	150,000,000	62,821,000	62,720,730	0	62,720,730	99.84	100,270
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	517,800,000	393,207,000	392,956,500	0	392,956,500	99.94	250,500
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,658,083,000	1,554,412,000	1,549,253,852	2,634,729	1,546,619,123	99.5	7,792,877
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,703,170,000	82,459,546,000	81,841,831,982	131,533,396	81,710,298,586	99.09	749,247,414
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,800,000,000	2,850,786,000	2,753,610,903	49,318	2,753,561,585	96.59	97,224,415
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13,058,426,000	12,688,790,000	12,503,417,554	7,408,808	12,496,008,746	98.48	192,781,254
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	900,000,000	826,775,000	821,600,238	0	821,600,238	99.37	5,174,762
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	55,543,416,000	54,558,847,000	54,437,600,730	32,456,346	54,405,144,384	99.72	153,702,616
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	728,000,000	668,000,000	665,728,123	0	665,728,123	99.66	2,271,877
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	920,000,000	880,000,000	826,236,824	2,847,380	823,389,444	93.57	56,610,556
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	115,000,000	115,000,000	114,844,900	324,962	114,519,938	99.58	480,062

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	45,539,378,000	42,910,249,000	42,677,552,347	16,431,654	42,661,120,693	99.42	249,128,307
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	100	0
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,000,000,000	885,090,000	883,735,512	8,745,990	874,989,522	98.86	10,100,478
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	200,000,000	200,000,000	199,595,686	0	199,595,686	99.8	404,314
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	146,584,629,000	148,540,383,000	148,425,584,035	26,182,429	148,399,401,606	599.28	140,981,394
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	950,000,000	878,280,000	878,132,870	1,663	878,131,207	99.98	148,793
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,517,657,000	1,357,843,000	1,346,906,591	0	1,346,906,591	596.67	10,936,409
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**1,892,519,755,000**	**1,936,121,808,000**	**1,924,530,939,864**	**1,585,661,754**	**1,922,945,278,110**	**99.401**	**13,176,529,890**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**2,886,725,254,000**	**2,945,720,725,000**	**2,932,027,110,787**	**3,538,103,043**	**2,928,489,007,744**	**99.535**	**17,231,717,256**
02	**PINJAMAN LUAR NEGERI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	0	13,069,878,000	12,759,773,235	0	12,759,773,235	97.63	310,104,765
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	50,198,646,000	140,188,112,000	140,152,707,097	73,574,301	140,079,132,796	99.92	108,979,204
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	500,000,000	959,080,189,000	858,885,115,375	2,010,323,875	856,874,791,500	89.34	102,205,397,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**50,698,646,000**	**1,112,338,179,000**	**1,011,797,595,707**	**2,083,898,176**	**1,009,713,697,531**	**90.961**	**102,624,481,469**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	0	300,920,000	300,625,518	0	300,625,518	99.9	294,482
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**0**	**300,920,000**	**300,625,518**	**0**	**300,625,518**	**99.902**	**294,482**
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	**50,698,646,000**	**1,112,639,099,000**	**1,012,098,221,225**	**2,083,898,176**	**1,010,014,323,049**	**90.964**	**102,624,775,951**
04	**PNBP**							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	607,557,000	1,747,409,000	1,747,408,800	0	1,747,408,800	100	200
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	29,453,386,000	42,006,168,000	41,445,183,562	27,405,989	41,417,777,573	493.84	588,390,427
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**30,060,943,000**	**43,753,577,000**	**43,192,592,362**	**27,405,989**	**43,165,186,373**	**98.718**	**588,390,627**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	0	109,970,838,000	109,915,553,355	0	109,915,553,355	99.95	55,284,645
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	116,011,508,000	116,011,498,506	0	116,011,498,506	100	9,494
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**0**	**225,982,346,000**	**225,927,051,861**	**0**	**225,927,051,861**	**99.976**	**55,294,139**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	4,058,000	1,236,098,000	1,214,707,450	0	1,214,707,450	98.27	21,390,550
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	120,987,000	175,879,000	159,727,000	0	159,727,000	90.82	16,152,000
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	10,540,302,000	11,364,775,000	11,220,126,543	23,501,700	11,196,624,843	98.52	168,150,157
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	14,604,000	14,604,000	14,604,000	0	14,604,000	100	0
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	2,683,964,000	2,678,581,263	0	2,678,581,263	499.35	5,382,737
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	74,794,000	74,773,875	0	74,773,875	99.97	20,125
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**10,779,951,000**	**15,550,114,000**	**15,362,520,131**	**23,501,700**	**15,339,018,431**	**98.794**	**211,095,569**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**40,840,894,000**	**285,286,037,000**	**284,482,164,354**	**50,907,689**	**284,431,256,665**	**99.718**	**854,780,335**
09	**HIBAH LUAR NEGERI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	8,538,196,000	15,418,327,000	15,381,382,980	61,011,100	15,320,371,880	99.36	97,955,120

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,044,105,000	1,037,484,348	0	1,037,484,348	99.37	6,620,652
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**8,538,196,000**	**16,462,432,000**	**16,418,867,328**	**61,011,100**	**16,357,856,228**	**99.735**	**104,575,772**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	**8,538,196,000**	**16,462,432,000**	**16,418,867,328**	**61,011,100**	**16,357,856,228**	**99.735**	**104,575,772**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	9,642,354,000	9,642,354,000	0	9,642,354,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**0**	**9,642,354,000**	**9,642,354,000**	**0**	**9,642,354,000**	**100**	**0**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	0	6,000,000,000	5,999,993,518	0	5,999,993,518	100	6,482
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**6,000,000,000**	**5,999,993,518**	**0**	**5,999,993,518**	**100**	**6,482**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**15,642,354,000**	**15,642,347,518**	**0**	**15,642,347,518**	**100**	**6,482**
11	**HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	5,196,442,000	5,196,224,745	0	5,196,224,745	100	217,255
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**0**	**5,196,442,000**	**5,196,224,745**	**0**	**5,196,224,745**	**99.996**	**217,255**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	854,736,000	854,736,000	0	854,736,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**0**	**854,736,000**	**854,736,000**	**0**	**854,736,000**	**100**	**0**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	0	4,167,301,000	4,167,300,475	0	4,167,300,475	100	525

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**4,167,301,000**	**4,167,300,475**	**0**	**4,167,300,475**	**100**	**525**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	**0**	**10,218,479,000**	**10,218,261,220**	**0**	**10,218,261,220**	**99.998**	**217,780**
	JUMLAH	**2,986,802,990,000**	**4,385,969,126,000**	**4,270,886,972,432**	**5,733,920,008**	**4,265,153,052,424**	**97.38**	**120,816,073,576**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19 MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:32 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	160,160,000	157,645,000	149,973,615	0	149,973,615	95.13	7,671,385
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	160,160,000	157,645,000	149,973,615	0	149,973,615	95.13	7,671,385
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,663,657,000	238,750,000	222,495,434	0	222,495,434	93.19	16,254,566
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,663,657,000	238,750,000	222,495,434	0	222,495,434	93.19	16,254,566
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	850,936,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	850,936,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	375,418,000	8,000	0	0	0	0	8,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	375,418,000	8,000	0	0	0	0	8,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,050,171,000	396,403,000	372,469,049	0	372,469,049	93.96	23,933,951
	JUMLAH BELANJA	3,050,171,000	396,403,000	372,469,049	0	372,469,049	93.96	23,933,951

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	269,754,771,000	319,310,060,000	319,109,267,823	16,895,953	319,092,371,870	99.94	217,688,130
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,876,000	5,610,000	5,452,301	43,021	5,409,280	97.19	200,720
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	20,192,648,000	15,084,020,000	15,032,977,300	2,235,795	15,030,741,505	99.66	53,278,495
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	5,147,897,000	4,145,935,000	4,110,457,326	32,912	4,110,424,414	99.14	35,510,586
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	13,858,428,000	9,561,061,000	9,499,825,000	38,471,450	9,461,353,550	99.36	99,707,450
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,933,178,000	24,020,251,000	23,933,771,000	24,432,922	23,909,338,078	99.64	110,912,922
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,308,498,000	1,465,520,000	1,437,556,674	0	1,437,556,674	98.09	27,963,326
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	12,052,183,000	14,367,427,000	14,320,801,530	597,465	14,320,204,065	99.68	47,222,935
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	169,074,000	0	0	0	0	0	0
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,933,618,000	30,830,396,000	30,314,757,000	1,757,500	30,312,999,500	98.33	517,396,500
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	55,575,000	56,150,000	56,150,000	0	56,150,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	106,445,000	205,800,000	205,800,000	0	205,800,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,119,684,000	13,333,577,000	13,306,971,860	41,670,677	13,265,301,183	99.8	68,275,817
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,837,652,000	8,474,565,000	8,448,335,305	0	8,448,335,305	99.69	26,229,695
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,774,800,000	1,762,127,000	1,757,966,800	0	1,757,966,800	99.76	4,160,200
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	130,500,000	88,800,000	88,800,000	0	88,800,000	100	0
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,705,620,000	1,801,309,000	1,689,301,400	0	1,689,301,400	93.78	112,007,600
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	70,247,000	66,115,200	0	66,115,200	94.12	4,131,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	532	0	532	13.3	3,468
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,025,000	6,611,520	0	6,611,520	94.11	413,480
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,405,000	991,728	0	991,728	70.59	413,272
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	74,375,000	70,000,000	0	70,000,000	94.12	4,375,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	3,476,000	2,969,220	0	2,969,220	85.42	506,780
512211	Belanja Uang Lembur	11,519,731,000	12,280,589,000	11,751,979,000	0	11,751,979,000	95.7	528,610,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	454,123,640,000	370,904,712,000	370,305,085,531	99,495,702	370,205,589,829	99.84	699,122,171
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	190,285,000	142,713,565	0	142,713,565	75	47,571,435
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**860,730,818,000**	**828,044,726,000**	**825,664,657,615**	**225,633,397**	**825,439,024,218**	**99.71**	**2,605,701,782**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	174,399,190,000	173,173,455,000	172,932,525,998	17,035,666	172,915,490,332	99.86	257,964,668
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	64,086,932,000	52,606,413,000	52,548,682,582	0	52,548,682,582	99.89	57,730,418
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,450,130,000	2,310,466,000	2,310,178,542	0	2,310,178,542	99.99	287,458
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,166,251,000	589,049,000	545,147,967	1,280,000	543,867,967	92.55	45,181,033
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,492,465,000	20,200,546,000	20,045,249,000	17,111,000	20,028,138,000	99.23	172,408,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63,248,651,000	58,537,208,000	58,416,617,886	4,050,000	58,412,567,886	99.79	124,640,114
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	139,160,000	151,908,000	144,238,589	0	144,238,589	94.95	7,669,411
521211	Belanja Bahan	108,076,608,000	103,946,270,000	102,846,045,882	2,326,025	102,843,719,857	98.94	1,102,550,143
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,994,505,000	14,989,655,000	14,895,209,000	16,072,500	14,879,136,500	99.37	110,518,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	146,164,713,000	148,207,808,000	148,150,109,620	0	148,150,109,620	99.96	57,698,380

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:35 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,015,407,000	167,014,000	150,760,793	0	150,760,793	90.27	16,253,207
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	800,000,000	968,586,000	964,788,623	0	964,788,623	99.61	3,797,377
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,261,494,000	29,501,039,000	29,469,696,748	35,600	29,469,661,148	99.89	31,377,852
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	1,260,000	1,235,000	0	1,235,000	98.02	25,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	473,600,000	793,294,000	793,126,300	0	793,126,300	99.98	167,700
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	850,936,000	0	0	0	0	0	0
522111	Belanja Langganan Listrik	38,186,325,000	41,182,859,000	41,107,509,120	0	41,107,509,120	99.82	75,349,880
522112	Belanja Langganan Telepon	1,527,126,000	410,060,000	398,482,087	0	398,482,087	97.18	11,577,913
522113	Belanja Langganan Air	5,404,600,000	4,733,245,000	4,721,966,231	0	4,721,966,231	99.76	11,278,769
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,455,114,000	1,002,533,000	1,000,144,083	0	1,000,144,083	99.76	2,388,917
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	3,000,000	0	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	30,137,573,000	32,543,101,000	32,354,879,849	0	32,354,879,849	99.42	188,221,151
522141	Belanja Sewa	78,148,570,000	83,834,268,000	82,966,299,695	866,668	82,965,433,027	98.96	868,834,973
522151	Belanja Jasa Profesi	42,018,486,000	33,588,308,000	31,965,257,000	205,510,000	31,759,747,000	95.17	1,828,561,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	413,653,879,000	410,620,853,000	409,862,487,429	1,021,031,083	408,841,456,346	99.82	1,779,396,654
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	150,698,000	0	0	0	0	0	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74,071,316,000	76,483,957,000	76,455,573,828	17,540,751	76,438,033,077	99.96	45,923,923
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,069,558,000	2,917,809,000	2,904,458,917	0	2,904,458,917	99.54	13,350,083
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,698,253,000	3,670,484,000	3,670,101,378	0	3,670,101,378	99.99	382,622
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,991,760,000	37,533,535,000	37,429,421,236	19,156,318	37,410,264,918	99.72	123,270,082
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,525,000	1,590,989,000	1,579,813,471	0	1,579,813,471	99.3	11,175,529
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	10,000,000	0	0	0	0	0	0
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	15,000,000	14,846,250	0	14,846,250	98.98	153,750
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,158,601,000	6,424,706,000	6,422,560,881	0	6,422,560,881	99.97	2,145,119
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	16,523,430,000	1,639,882,000	1,638,001,100	0	1,638,001,100	99.89	1,880,900
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232,707,129,000	309,022,214,000	304,812,615,266	1,369,850,275	303,442,764,991	98.64	5,579,449,009
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,577,475,000	3,852,916,000	3,852,783,288	6,914	3,852,776,374	100	139,626
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,315,069,000	10,093,975,000	9,617,777,534	2,520,000	9,615,257,534	95.28	478,717,466
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119,873,182,000	94,123,540,000	93,739,908,486	17,920,570	93,721,987,916	99.59	401,552,084
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56,318,170,000	66,319,736,000	66,177,265,454	210,724,098	65,966,541,356	99.79	353,194,644
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,815,530,000	9,260,812,000	9,243,360,588	382,150,478	8,861,210,110	99.81	399,601,890
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	100,000,000	99,999,988	0	99,999,988	100	12
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	850,000,000	849,300,000	849,300,000	0	849,300,000	100	0
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	0
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	5,237,000,000	4,317,883,000	4,308,172,630	0	4,308,172,630	99.78	9,710,370
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	108,421,184,000	143,792,198,000	143,785,992,272	0	143,785,992,272	100	6,205,728

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:35 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BARANG	**1,929,755,095,000**	**1,986,568,134,000**	**1,975,692,590,591**	**3,305,187,946**	**1,972,387,402,645**	**99.45**	**14,180,731,355**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,835,956,000	82,220,546,000	81,917,586,962	3,800,032	81,913,786,930	99.63	306,759,070
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,200,000,000	2,115,929,000	2,051,332,163	0	2,051,332,163	96.95	64,596,837
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	378,000,000	366,104,000	366,070,551	0	366,070,551	99.99	33,449
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	25,000,000	24,997,200	0	24,997,200	99.99	2,800
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,960,340,000	20,767,220,000	20,714,062,003	1,708,668	20,712,353,335	99.74	54,866,665
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	196,138,000	196,138,000	0	196,138,000	100	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	200,000,000	1,847,699,000	1,839,730,750	0	1,839,730,750	99.57	7,968,250
536111	Belanja Modal Lainnya	21,554,545,000	22,186,338,000	22,182,547,320	0	22,182,547,320	99.98	3,790,680
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	110,500,000	1,382,891,000	1,377,397,632	1,773,000	1,375,624,632	99.6	7,266,368
	JUMLAH BELANJA MODAL	**96,239,341,000**	**131,107,865,000**	**130,669,862,581**	**7,281,700**	**130,662,580,881**	**99.67**	**445,284,119**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**2,886,725,254,000**	**2,945,720,725,000**	**2,932,027,110,787**	**3,538,103,043**	**2,928,489,007,744**	**99.54**	**17,231,717,256**
02	**PINJAMAN LUAR NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	2,585,000	2,584,093	0	2,584,093	99.96	907
521211	Belanja Bahan	291,247,000	5,578,988,000	5,391,078,494	0	5,391,078,494	96.63	187,909,506
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	13,150,000	13,150,000	0	13,150,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	825,850,000	794,075,523	0	794,075,523	96.15	31,774,477
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,685,490,000	124,741,533,000	124,278,058,191	0	124,278,058,191	99.63	463,474,809
522141	Belanja Sewa	663,760,000	4,388,399,000	4,184,663,000	0	4,184,663,000	95.36	203,736,000
522151	Belanja Jasa Profesi	129,000,000	4,494,703,000	3,779,150,000	61,100,000	3,718,050,000	84.08	776,653,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	10,497,520,000	894,578,508,000	800,367,256,656	6,767,120	800,360,489,536	89.47	94,218,018,464
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13,365,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,073,738,000	29,016,620,000	27,999,183,134	675,778,890	27,323,404,244	96.49	1,693,215,756
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	188,550,000	187,950,000	0	187,950,000	99.68	600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,025,420,000	28,126,039,000	26,405,588,297	646,597,135	25,758,991,162	93.88	2,367,047,838
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	316,106,000	20,522,674,000	18,544,183,837	693,655,031	17,850,528,806	90.36	2,672,145,194
	JUMLAH BELANJA BARANG	**50,698,646,000**	**1,112,477,599,000**	**1,011,946,921,225**	**2,083,898,176**	**1,009,863,023,049**	**90.96**	**102,614,575,951**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	151,500,000	151,300,000	0	151,300,000	99.87	200,000
536111	Belanja Modal Lainnya	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**161,500,000**	**151,300,000**	**0**	**151,300,000**	**93.68**	**10,200,000**
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	**50,698,646,000**	**1,112,639,099,000**	**1,012,098,221,225**	**2,083,898,176**	**1,010,014,323,049**	**90.96**	**102,624,775,951**
04	**PNBP**							
52	**BELANJA BARANG**							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,200,000	3,746,000	3,459,600	0	3,459,600	92.35	286,400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	283,500,000	269,900,000	269,900,000	0	269,900,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:35 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18,000,000	3,152,000	3,150,933	0	3,150,933	99.97	1,067
521211	Belanja Bahan	12,268,719,000	16,135,693,000	15,856,430,524	0	15,856,430,524	98.27	279,262,476
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,167,615,000	3,292,097,000	3,280,595,000	0	3,280,595,000	99.65	11,502,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,117,164,000	1,816,030,000	1,767,978,907	0	1,767,978,907	97.35	48,051,093
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	648,250,000	71,736,000	71,734,641	0	71,734,641	100	1,359
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	15,585,000	15,535,000	0	15,535,000	99.68	50,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,750,000	5,579,798,000	5,579,697,600	0	5,579,697,600	100	100,400
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	495,504,000	495,504,000	0	495,504,000	100	0
522141	Belanja Sewa	477,020,000	1,570,194,000	1,569,835,000	0	1,569,835,000	99.98	359,000
522151	Belanja Jasa Profesi	11,865,730,000	13,193,248,000	13,090,125,000	15,510,000	13,074,615,000	99.22	118,633,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	195,000,000	469,428,000	469,428,000	0	469,428,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	211,355,000	8,000	0	0	0	0	8,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,663,092,000	11,436,389,000	11,329,520,548	31,921,989	11,297,598,559	99.07	138,790,441
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	199,062,000	586,030,000	584,458,100	0	584,458,100	99.73	1,571,900
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	513,050,000	1,353,534,000	1,278,070,000	150,000	1,277,920,000	94.42	75,614,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,177,387,000	4,191,202,000	4,096,592,630	0	4,096,592,630	97.74	94,609,370
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	732,300,000	727,680,760	3,325,700	724,355,060	99.37	7,944,940
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	116,011,508,000	116,011,498,506	0	116,011,498,506	100	9,494
	JUMLAH BELANJA BARANG	**40,840,894,000**	**177,227,082,000**	**176,501,194,749**	**50,907,689**	**176,450,287,060**	**99.59**	**776,794,940**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	71,160,304,000	71,095,141,880	0	71,095,141,880	99.91	65,162,120
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	272,498,000	270,659,450	0	270,659,450	99.33	1,838,550
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	21,990,000	21,990,000	0	21,990,000	100	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	43,795,000	43,795,000	0	43,795,000	100	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	572,612,000	562,318,000	0	562,318,000	98.2	10,294,000
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	200,000,000	199,310,000	0	199,310,000	99.66	690,000
536111	Belanja Modal Lainnya	0	35,787,756,000	35,787,755,275	0	35,787,755,275	100	725
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**108,058,955,000**	**107,980,969,605**	**0**	**107,980,969,605**	**99.93**	**77,985,395**
	JUMLAH PNBP	**40,840,894,000**	**285,286,037,000**	**284,482,164,354**	**50,907,689**	**284,431,256,665**	**99.72**	**854,780,335**
09	**HIBAH LUAR NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521211	Belanja Bahan	327,950,000	196,058,000	195,998,407	0	195,998,407	99.97	59,593
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	6,120,000	6,120,000	0	6,120,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	6,004,000,000	12,680,422,000	12,680,422,000	0	12,680,422,000	100	0
522141	Belanja Sewa	466,850,000	529,620,000	529,620,000	5,580,000	524,040,000	100	5,580,000
522151	Belanja Jasa Profesi	13,900,000	49,300,000	46,700,000	0	46,700,000	94.73	2,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	294,800,000	563,000,000	561,166,000	0	561,166,000	99.67	1,834,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500,000,000	1,051,184,000	1,033,918,933	55,431,100	978,487,833	98.36	72,696,167

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 10:35 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	930,696,000	670,986,000	664,402,000	0	664,402,000	99.02	6,584,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	281,880,000	269,266,763	0	269,266,763	95.53	12,613,237
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	433,862,000	431,253,225	0	431,253,225	99.4	2,608,775
	JUMLAH BELANJA BARANG	**8,538,196,000**	**16,462,432,000**	**16,418,867,328**	**61,011,100**	**16,357,856,228**	**99.74**	**104,575,772**
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	**8,538,196,000**	**16,462,432,000**	**16,418,867,328**	**61,011,100**	**16,357,856,228**	**99.74**	**104,575,772**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	9,642,354,000	9,642,354,000	0	9,642,354,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**0**	**9,642,354,000**	**9,642,354,000**	**0**	**9,642,354,000**	**100**	**0**
53	**BELANJA MODAL**							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	6,000,000,000	5,999,993,518	0	5,999,993,518	100	6,482
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**6,000,000,000**	**5,999,993,518**	**0**	**5,999,993,518**	**100**	**6,482**
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**15,642,354,000**	**15,642,347,518**	**0**	**15,642,347,518**	**100**	**6,482**
11	**HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	6,680,000	6,680,000	0	6,680,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	21,750,000	21,750,000	0	21,750,000	100	0
521211	Belanja Bahan	0	224,493,000	224,281,645	0	224,281,645	99.91	211,355
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	111,050,000	111,050,000	0	111,050,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	659,663,000	659,662,005	0	659,662,005	100	995
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	691,536,000	691,535,200	0	691,535,200	100	800
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,160,524,000	1,160,522,105	0	1,160,522,105	100	1,895
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	944,256,000	944,255,250	0	944,255,250	100	750
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,289,766,000	2,289,764,515	0	2,289,764,515	100	1,485
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	23,660,000	23,660,000	0	23,660,000	100	0
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**0**	**10,133,378,000**	**10,133,160,720**	**0**	**10,133,160,720**	**100**	**217,280**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	85,101,000	85,100,500	0	85,100,500	100	500
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**85,101,000**	**85,100,500**	**0**	**85,100,500**	**100**	**500**
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	**0**	**10,218,479,000**	**10,218,261,220**	**0**	**10,218,261,220**	**100**	**217,780**
	TOTAL	**2,986,802,990,000**	**4,385,969,126,000**	**4,270,886,972,432**	**5,733,920,008**	**4,265,153,052,424**	**97.38**	**120,816,073,576**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	181,100,000	1,605,149,886	0	1,605,149,886	886.33
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	612,863,601	0	612,863,601	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,557,898,000	3,874,512,506	0	3,874,512,506	248.7
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,665,000	0	1,665,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,738,998,000	6,094,190,993	0	6,094,190,993	350.44
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24,227,000	30,080,000	0	30,080,000	124.16
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	24,227,000	30,080,000	0	30,080,000	124.16
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	314,000,000	220,997,100	0	220,997,100	70.38
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	13,955,050,000	17,440,051,500	0	17,440,051,500	124.97
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	746,850,000	462,953,000	0	462,953,000	61.99
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	50,587,858,000	50,289,563,000	46,185,000	50,243,378,000	99.32
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,808,927,000	2,453,270,000	166,320,000	2,286,950,000	126.43
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	67,412,685,000	70,866,834,600	212,505,000	70,654,329,600	104.81
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	398,534,266,000	793,818,491,500	0	793,818,491,500	199.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	398,534,266,000	793,818,491,500	0	793,818,491,500	199.18
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,298,950	0	1,298,950	0
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	1,101,328	0	1,101,328	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	1,334,461,763	0	1,334,461,763	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 06/05/24 10:36 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	1,336,862,041	0	1,336,862,041	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	59,538,792	0	59,538,792	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	388,498,703	0	388,498,703	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	448,037,495	0	448,037,495	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,450,974,618	0	1,450,974,618	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,454,579,148	0	6,454,579,148	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	775,011,684	0	775,011,684	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	217,692,557	0	217,692,557	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	8,898,258,007	0	8,898,258,007	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	467,710,176,000	881,492,754,636	212,505,000	881,280,249,636	188.42
	JUMLAH PENDAPATAN	467,710,176,000	881,492,754,636	212,505,000	881,280,249,636	188.42

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	**SEKRETARIAT JENDERAL**					
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA					
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	987,930,000	1,600,826,908	0	1,600,826,908	162.04
	JUMLAH PENDAPATAN 010010100KP BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	987,930,000	1,600,826,908	0	1,600,826,908	162.04
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT					
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	15,163,852,000	19,597,686,108	0	19,597,686,108	129.24
	JUMLAH PENDAPATAN 010010200KP BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	15,163,852,000	19,597,686,108	0	19,597,686,108	129.24
010010800KD	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT					
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	0	48,652,882	0	48,652,882	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010010800KD BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	0	48,652,882	0	48,652,882	
010011300KD	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	0	311,101,552	0	311,101,552	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011300KD BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	0	311,101,552	0	311,101,552	
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA					
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	0	207,090,615	0	207,090,615	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011700KD BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	207,090,615	0	207,090,615	
010011900KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	0	189,689,212	0	189,689,212	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011900KD BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	189,689,212	0	189,689,212	
010012300KD	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	0	42,731,421	0	42,731,421	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012300KD BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	0	42,731,421	0	42,731,421	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	0	90,240,338	0	90,240,338	0
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	1,296,582,134	0	1,296,582,134	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	1,386,822,472	0	1,386,822,472	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	16,151,782,000	23,384,601,170	0	23,384,601,170	144.78
02	**INSPEKTORAT JENDERAL**					
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA					
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	0	198,676,486	0	198,676,486	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010020100KP BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	0	198,676,486	0	198,676,486	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	198,676,486	0	198,676,486	
03	**DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**					
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA					
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	977,039,243	0	977,039,243	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010030100KP BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	0	977,039,243	0	977,039,243	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	977,039,243	0	977,039,243	
04	**DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**					
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA					
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	1,032,146,847	0	1,032,146,847	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040100KP BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	0	1,032,146,847	0	1,032,146,847	
010040700	BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA					
079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	0	10,880,000	0	10,880,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040700 BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA	0	10,880,000	0	10,880,000	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	10,540,000	0	10,540,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	0	16,080,000	0	16,080,000	0
249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	17,386,269	0	17,386,269	0
289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	0	13,635,000	0	13,635,000	0
417936	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	0	633,788	0	633,788	0
433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	1,200,000	0	1,200,000	0
484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	0	180	0	180	0
484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	0	30	0	30	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	59,475,267	0	59,475,267	
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	1,102,502,114	0	1,102,502,114	
05	**DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA**					
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA					
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	81,204,000	1,206,316,343	0	1,206,316,343	1485.54
	JUMLAH PENDAPATAN 010050100KP BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	81,204,000	1,206,316,343	0	1,206,316,343	1,485.54
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA					
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	0	171,786,673	0	171,786,673	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010050400KD BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	0	171,786,673	0	171,786,673	
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR					
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	33,500,000	136,854,360	0	136,854,360	408.52
	JUMLAH PENDAPATAN 010050500KD BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	33,500,000	136,854,360	0	136,854,360	408.52
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG					
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	0	254,570,000	0	254,570,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010051200KD BA(010) ES1(05) LAMPUNG	0	254,570,000	0	254,570,000	
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	114,704,000	1,769,527,376	0	1,769,527,376	1,542.69

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
06	**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH**					
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	400,000,000	2,147,576,462	0	2,147,576,462	536.89
	JUMLAH PENDAPATAN 010060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	400,000,000	2,147,576,462	0	2,147,576,462	536.89
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	400,000,000	2,147,576,462	0	2,147,576,462	536.89
07	**DITJEN OTONOMI DAERAH**					
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA					
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	0	133,988,741	0	133,988,741	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010070100KP BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	0	133,988,741	0	133,988,741	
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	133,988,741	0	133,988,741	
08	**DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA					
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	398,534,266,000	795,078,317,795	0	795,078,317,795	199.5
	JUMLAH PENDAPATAN 010080100KP BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	398,534,266,000	795,078,317,795	0	795,078,317,795	199.5
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	398,534,266,000	795,078,317,795	0	795,078,317,795	199.5
09	**DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH**					
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	10,025,240	0	10,025,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010090100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	10,025,240	0	10,025,240	
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	10,025,240	0	10,025,240	
11	**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**					
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	552,472,128	0	552,472,128	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 010110100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	552,472,128	0	552,472,128	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	552,472,128	0	552,472,128	
12	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14,565,314,000	17,120,653,986	0	17,120,653,986	117.54
	JUMLAH PENDAPATAN 010120100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	14,565,314,000	17,120,653,986	0	17,120,653,986	117.54
010120200KD	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT					
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	10,916,782,000	11,173,513,980	0	11,173,513,980	102.35
	JUMLAH PENDAPATAN 010120200KD BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	10,916,782,000	11,173,513,980	0	11,173,513,980	102.35
010120400KD	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA					
027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	6,069,820,000	6,322,040,926	169,985,000	6,152,055,926	101.35
	JUMLAH PENDAPATAN 010120400KD BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	6,069,820,000	6,322,040,926	169,985,000	6,152,055,926	101.35
010120800KD	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT					
506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	13,573,601,000	13,754,970,093	0	13,754,970,093	101.34
	JUMLAH PENDAPATAN 010120800KD BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	13,573,601,000	13,754,970,093	0	13,754,970,093	101.34
010121900KD	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN					
027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7,383,907,000	7,422,702,869	42,520,000	7,380,182,869	99.95
	JUMLAH PENDAPATAN 010121900KD BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	7,383,907,000	7,422,702,869	42,520,000	7,380,182,869	99.95
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	344,146,027	0	344,146,027	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	344,146,027	0	344,146,027	
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52,509,424,000	56,138,027,881	212,505,000	55,925,522,881	106.51

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **010** **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	467,710,176,000	881,492,754,636	212,505,000	881,280,249,636	188.42

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	156,100,000	919,292,786	0	919,292,786	588.91
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,450,999	0	2,450,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	974,055,000	1,214,340,375	0	1,214,340,375	124.67
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	5,727,000	0	0	0	0
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	314,000,000	220,997,100	0	220,997,100	70.38
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	13,955,050,000	17,440,051,500	0	17,440,051,500	124.97
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	746,850,000	462,953,000	0	462,953,000	61.99
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	1,168,111,763	0	1,168,111,763	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,652,847	0	1,652,847	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	795,340	0	795,340	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	86,809,674	0	86,809,674	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,319,244,712	0	1,319,244,712	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	547,901,074	0	547,901,074	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	16,151,782,000	23,384,601,170	0	23,384,601,170	144.78
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	24,659,000	0	24,659,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,698,921	0	8,698,921	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	125,130,117	0	125,130,117	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,188,448	0	40,188,448	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	198,676,486	0	198,676,486	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	546,853,034	0	546,853,034	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	430,186,209	0	430,186,209	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	0	977,039,243	0	977,039,243	
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	130,158,000	0	130,158,000	0
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	1,000,000	0	1,000,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	633,590	0	633,590	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	294,770,000	0	294,770,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	675,940,314	0	675,940,314	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	210	0	210	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI	0	1,102,502,114	0	1,102,502,114	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	25,000,000	184,298,000	0	184,298,000	737.19
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	8,600,000	0	8,600,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	71,204,000	343,182,000	0	343,182,000	481.97
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	18,500,000	30,080,000	0	30,080,000	162.59
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	151,400,000	0	151,400,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,295,338	0	1,295,338	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,050,672,038	0	1,050,672,038	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	114,704,000	1,769,527,376	0	1,769,527,376	1,542.69
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	400,000,000	1,008,180,000	0	1,008,180,000	252.05
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	97,857	0	97,857	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	962,498,144	0	962,498,144	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176,800,461	0	176,800,461	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	400,000,000	2,147,576,462	0	2,147,576,462	536.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,870,210	0	1,870,210	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	132,118,531	0	132,118,531	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	133,988,741	0	133,988,741	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,168,575	0	2,168,575	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,665,000	0	1,665,000	0
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	398,534,266,000	793,818,491,500	0	793,818,491,500	199.18
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,201,093	0	1,201,093	0
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	101,328	0	101,328	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24,971,215	0	24,971,215	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,748,103	0	4,748,103	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,214,849,280	0	1,214,849,280	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,121,701	0	10,121,701	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	398,534,266,000	795,078,317,795	0	795,078,317,795	199.5
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	8,750,000	0	8,750,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,275,240	0	1,275,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	10,025,240	0	10,025,240	
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	175,004,000	0	175,004,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	322,282,200	0	322,282,200	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	55,185,928	0	55,185,928	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	0	552,472,128	0	552,472,128	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 06/05/24 10:37 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	476,900,100	0	476,900,100	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	294,482,027	0	294,482,027	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	112,639,000	1,308,810,131	0	1,308,810,131	1161.95
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	50,587,858,000	50,289,563,000	46,185,000	50,243,378,000	99.32
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,808,927,000	2,453,270,000	166,320,000	2,286,950,000	126.43
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	6,200,000	0	6,200,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	32,281,140	0	32,281,140	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	387,703,363	0	387,703,363	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	182,371,898	0	182,371,898	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	488,753,875	0	488,753,875	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	217,692,347	0	217,692,347	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	52,509,424,000	56,138,027,881	212,505,000	55,925,522,881	106.91
	JUMLAH PENDAPATAN	467,710,176,000	881,492,754,636	212,505,000	881,280,249,636	188.47

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TA 2023 AUDITED

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
TAHUNAN TA 2023 *AUDITED*

Kode dan Nama K/L : (010) Kementerian Dalam Negeri

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNBP		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak

	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak

	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	**119.416.020**		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	**706.789.350.510**		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	-	-	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	-	-	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	N/A	N/A	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak

7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	v		Ya/Tidak
6	*Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar*	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	v		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	v		Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	N/A		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	v		Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya

	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	v		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	v		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan

1 Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan terdapat pada satker IPDN Kampus Papua (683091) atas kesalahan penginputan yang seharusnya merupakan Peralatan dan Mesin, tetapi Operator Modul Komitmen menginputnya sebagai Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat, Bappeda Prov. Kalsel (484173) atas BAST yang seharusnya tidak dilanjutkan sampai terbit SP2D namun sudah didetilkan sebagai persediaan sehingga muncul ketidaksesuaian kode Akun dan dilakukan void BAST, dan Ditjen Bina Keuda (662766) atas Belanja Ekstrakomptabel yang dicatat sebagai Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa plakat.

2 Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan pada satker Setjen (403200), IPDN Jatinangor (448302), IPDN Kampus Sumbar (677045), Ditjen Polpum (027210), Ditjen Bina Adwil (027486), Setda Kab. Pulau Morotai (417936), Balai Pemdes Yogyakarta (028449), Ditjen Bina Bangda (039729), Ditjen Dukcapil (634082), PPSDM Regional Bukit Tinggi (506137), dan DKPP (483005). Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB disebabkan oleh penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang, pengadaan barang yang menggunakan akun non barang (salah akun) dan kesalahan perekaman kode barang untuk akun yang menghasilkan barang.

3 Berdasarkan data Rekap Rekonsiliasi Internal Aplikasi MonSAKTI, tidak terdapat selisih rekonsiliasi internal untuk periode pelaporan Tahun 2023 *Audited*, namun berdasarkan data detail rekonsiliasi internal terdapat selisih pada akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (kode akun 115421) dan akun Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (kode akun 152111) pada satker IPDN Jatinangor (448302). Modul Piutang Aplikasi SAKTI masih menyajikan piutang tersebut sebagai piutang jangka panjang, sementara Neraca telah menyajikan sebagai piutang jangka pendek sesuai dengan perhitungan pada akhir tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Modul Piutang pada Aplikasi SAKTI masih belum disempurnakan sehingga ketika reklasifikasi piutang ke bagian lancar menggunakan menu perhitungan bagian lancar piutang pada Modul Piutang, hanya Neraca yang dapat menyajikan piutang jangka pendek, sementara Modul Piutang tetap mencatat sebagai piutang jangka panjang.

4 Neraca Percobaan Akrual menyajikan saldo akun Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (kode akun 425913) sebesar Rp283.926.270,00 yang terdapat pada satker IPDN Kampus Sulut (677010), IPDN Kampus Kalbar (683070), Ditjen Bina Bangda (039729), dan Ditjen Dukcapil (634082). Hal ini disebabkan Operator Modul Aset Tetap masih melakukan penelusuran terhadap Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Barang Milik Negara yang perlu dilakukan koreksi berdasarkan setoran pengembalian belanja modal tersebut.

5 Terdapat kenaikan saldo kas lainnya dan setara kas diantaranya berasal dari hibah langsung dalam bentuk uang berupa program *Financing The Regional Development* sebesar Rp235.500.000.000,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp4.167.300.475,00 sehingga sisa saldo kas lainnya dan setara kas sebesar Rp231.332.699.525,00 pada Ditjen Bina Bangda.

Terdapat kenaikan saldo dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp54.982.239.721,00 yang merupakan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas pekerjaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum terselesaikan.

6 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp747.377.561.641,00 dan Rp74.295.704.529,00 atau mengalami kenaikan sebesar 905,95%. Kenaikan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional sebagian besar berasal dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (kode akun 425692) pada satker Ditjen Dukcapil (634082) yang merupakan pendapatan atas pemanfaatan data kependudukan. Pendapatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp793.818.491.500,00 dan Rp0,00.

Terdapat kenaikan Pinjaman dan hibah luar negeri pada satker Ditjen Bina Adwil sebesar Rp13.069.878.000,00 untuk program *Proyek Improvement Village Service Delivery atau* Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan satker Ditjen Bina Pemdes mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp959.080.189.000,00 untuk program *Proyek Improvement Village Service Delivery atau* Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Diperiksa oleh:
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II,

Ady Candra Try Laksana, S.STP
NIP. 19900601 201010 1 005

Jakarta, 11 Mei 2024
Penelaah,

Cicilia Eka Yunita, A.Md.Ak
NIP. 20000609 202302 2 004

Mengetahui
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,

I Nengah Sandiyasa, M.Ak
NIP. 19741208 200604 1 001

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2023

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 dengan benar, dan tepat waktu sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi atas pencapaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 (Adendum II), dan merupakan laporan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyesuaian indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Adendum II) didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai bentuk tindaklanjut atas catatan evaluasi dari Tahun 2020-2023 oleh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdampak terhadap penyesuaian indikator dan target kinerja pada Rencana Strategis. Selain itu, penyesuaian juga didasari oleh adanya revisi DIPA sepanjang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama, yang menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2023, yang antara lain menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sinergitas, pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran dilingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itjen.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu kami, kami yakin bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 21 Februari 2024
Inspektur Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh

Tomsi Tohir

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BHINNE
A NEGARA KES

DAFTAR ISI

Kata pengantar iii
Surat Pernyataan Telah Direviu v
Penghargaan/Prestasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 xvii

BAB I:
PENDAHULUAN 1
Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri 2
Latar Belakang 4
Visi & Misi Presiden 6
Visi & Misi Kementerian Dalam Negeri 8
Tugas dan Fungsi 9
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 10
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri 11
Data Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri 32

BAB II:
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024 36
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024 40
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 43
Pengukuran Kinerja Tahun 2023 46
Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 49

BAB III:
AKUNTABILITAS KINERJA 79
Capaian Kinerja Tahun 2023 82

Sasaran Strategis 1:
Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia 85
Indikator Sasaran:
- Indeks Demokrasi Indonesia 87
- Indeks Kinerja Ormas 103

Sasaran Strategis 2:
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah 109

Indikator Sasaran:
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 111
- Indeks Harmoni Indonesia 121

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional 131

Indikator Sasaran:
- Indeks Kewaspadaan Nasional 133

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 151

Indikator Sasaran:
- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" 153

Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 161

Indikator Sasaran:
- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun 163
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 169
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional 173
- Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni 177

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah 195

Indikator Sasaran:
- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah 197

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif 207

Indikator Sasaran:
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 209
- Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah 215
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 223
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" 231
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 239
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi 251
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 257
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah 261

Sasaran Strategis 8:
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan 265

Indikator Sasaran:
- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 267
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik 273

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 279

Indikator Sasaran:
- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 281

Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 295

Indikator Sasaran:
- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 297

Sasaran Strategis 11:
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas 305

Indikator Sasaran:
- Indeks Pengawasan Internal 307
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 311

Sasaran Strategis 12:
Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 315

Indikator Sasaran:
- Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri 317

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 321

BAB IV
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 325

Tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2023 326
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja 328
Implementasi dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pengendalian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2023 330
Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri TA.2023 332

BAB V 345
PENUTUP 346
LAMPIRAN 347

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal	47
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2023	85
Tabel 3.2	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	89
Tabel 3.3	Kategorisasi Rentang Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	92
Tabel 3.4	Angka Indikator Aspek Kebebasan IDI Tahun 2022	93
Tabel 3.5	Angka Indikator Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2022	94
Tabel 3.6	Angka Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Tahun 2022	95
Tabel 3.7	Rekapitulasi Jumlah Bantuan Dana Partai Politik Tahun 2022 dan 2023	97
Tabel 3.8	Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Level Pusat	98
Tabel 3.9	Aspek dan Indikator dalam Pengukuran IDI	99
Tabel 3.10	Timeline Penghitungan IDI	100
Tabel 3.11	Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas	105
Tabel 3.12	Dimensi, Variabel, Indikator pada Indeks Kinerja Ormas	105
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah Tahun 2023	109
Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2019 dan 2022	112
Tabel 3.15	Daftar Indikator Penyusunan ICRM, Sumber dan Ketersediaan Data ICRM	114
Tabel 3.16	Dimensi dan Bobot ICRM	116
Tabel 3.17	Perhitungan Uji Reliabilitas Indeks Harmoni Indonesia	123
Tabel 3.18	Skor Penilaian Indeks Harmoni Keseluruhan 8 Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023	125
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2023	131
Tabel 3.20	Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional	134
Tabel 3.21	Lokasi dan Hasil Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional	135
Tabel 3.22	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten	146
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tran-tibumlinmas Tahun 2023	151
Tabel 3.24	Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	154
Tabel 3.25	Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di 100 daerah	155
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Apara-tur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023	161
Tabel 3.27	Jumlah pejabat fungsional auditor	170
Tabel 3.28	Jumlah pejabat fungsional PPUPD	174
Tabel 3.29	Data Alumni Pada 7 Provinsi Lokasi Survei	177

Tabel 3.30	Lokasi Survei dan Realisasi Nilai Hasil Survei Tahun 2020-2023	178
Tabel 3.31	Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai Pada Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja	180
Tabel 3.32	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan	181
Tabel 3.33	Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi	182
Tabel 3.34	Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi	183
Tabel 3.35	Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi	184
Tabel 3.36	Rekapitulasi Gap Analysis di 7 Provinsi	185
Tabel 3.37	Analisa Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi	186
Tabel 3.38	Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi	187
Tabel 3.39	Kriteria kompetensi dan posisinya pada diagram kartesius IPA	188
Tabel 3.40	Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap kinerja alumni IPDN	190
Tabel 3.41	Jumlah Responden Penelitian	191
Tabel 3.42	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan	192
Tabel 3.43	Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2020-2024	193
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah Tahun 2023	195
Tabel 3.45	pembobotan aspek, variabel, dan indikator	199
Tabel 3.46	Skala Perhitungan	203
Tabel 3.47	Nilai dan Kategori Indeks Kepatuhan Daerah per Provinsi terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023	204
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2023	208
Tabel 3.49	Klasifikasi Skor dan Status Kinerja	210
Tabel 3.50	skor dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 Provinsi	211
Tabel 3.51	Capaian Terhadap Realisasi Target EPPD Tahun 2023	212
Tabel 3.52	Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	213
Tabel 3.53	Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009	213
Tabel 3.54	Target dan Realisasi Indikator Rincian Output Prioritas Nasional terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023	217
Tabel 3.55	Pengkategorian Nilai Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	226
Tabel 3.56	Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023	241
Tabel 3.57	Matrik Persandingan IPKD Tahun 2019 s.d 2023	241
Tabel 3.58	Grafik Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD	242
Tabel 3.59	rincian nilai IPKD masing-masing daerah provinsi berdasarkan dimensi	243
Tabel 3.60	Nilai dan Kategori IPKD pada 32 Provinsi	245

Tabel 3.61	Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat “Sangat Inovatif’	253
Tabel 3.62	Rekapitulasi Indeks Inovasi Daerah per Kategori Tahun 2023	254
Tabel 3.63	beberapa inovasi pemerintah daerah di bidang stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi	255
Tabel 3.64	Nilai Pengawasan APIP terhadap 34 Provinsi	258
Tabel 3.65	Nilai Kepatuhan Anggaran Pemerintah Daerah	262
Tabel 3.66	Nilai Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah	263
Tabel 3.67	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan Tahun 2023	265
Tabel 3.68	Jumlah Pengguna yang menggunakan PNBP	275
Tabel 3.69	Pemasukan PNBP Tahun 2023	275
Tabel 3.70	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2023	279
Tabel 3.71	Contoh Simulasi Pengukuran Skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kabupaten Aceh Barat	282
Tabel 3.72	Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik	283
Tabel 3.73	Daftar Kinerja GWPP Per Provinsi	287
Tabel 3.74	Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Provinsi	288
Tabel 3.75	Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Kabupaten/Kota	290
Tabel 3.76	Rekapitulasi Kecamatan sesuai kategori Indeks Kinerja Kecamatan Tahun 2023	292
Tabel 3.77	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	295
Tabel 3.78	Komponen dan Bobot perhitungan nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023	298
Tabel 3.79	Formula Rumusan Pengukuran Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023	299
Tabel 3.80	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	305
Tabel 3.81	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023	315
Tabel 3.82	Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)	317
Tabel 3.83	Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)	318
Tabel 3.84	Penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	322
Tabel 3.85	Pengurangan Anggaran Tahun 2023	323
Tabel 3.86	Pagu dan Realisasi Per Unit Kerja Eselon I Kemendagri Tahun 2023	324
Tabel 4.1	Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja Kemendagri Tahun 2023	328
Tabel 4.2	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kemendagri Tahun 2022 dan 2023	331
Tabel 4.3	Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri Tahun Anggaran 2023	333
Tabel 5.1	Capaian Sasaran Strategis	346

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Nilai Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2021 dan 2022	98
Grafik 3.2	Nilai Aspek Kebebasan Nasional dan Pusat Tahun 2021 dan 2022	98
Grafik 3.3	Nilai Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 - 2022	99
Grafik 3.4	Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas	104
Grafik 3.5	Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas per Dimensi	104
Grafik 3.6	Perbandingan Nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022 dan 2023	104
Grafik 3.7	Nilai Indeks Kinerja Ormas dan Target	107
Grafik 3.8	Pembentukan dan Presentase GNRM di Daerah	113
Grafik 3.9	Presentase Pembentukan GNRM Kab/Kota	113
Grafik 3.10	Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) menurut Indikator Tahun 2021	117
Grafik 3.11	Perhitungan Nilai IHal per Daerah	124
Grafik 3.12	Trend Capaian Standar Pelayanan Minimal se-Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023	221
Grafik 3.13	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Provinsi Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA	221
Grafik 3.14	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA	221
Grafik 3.15	Persandingan Nilai Indeks Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan 2023 SE INDONESIA	225
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah SE INDONESIA	226
Grafik 3.17	Target dan realisasi capaian IKU Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” Tahun 2020 – 2023	234
Grafik 3.18	Perkembangan IPKD tahun 2019 s.d 2023	241
Grafik 3.19	Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD	242
Grafik 3.20	Presentase Perekaman KTP-el	268
Grafik 3.21	Presentase Penerbitan Akta Kelahiran	268
Grafik 3.22	Presentase Penerbitan KIA	269
Grafik 3.23	Penerbitan Akta Kematian (jiwa)	269
Grafik 3.24	Penerbitan Akta Kawin dan Akta Cerai	270
Grafik 3.25	Indeks RB Kemendagri Tahun 2021 – 2023	298

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Data Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2023	122
Gambar 3.2	Infografis Indeks Harmoni Indonesia	129
Gambar 3.3	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung	136
Gambar 3.4	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Pringsewu	137
Gambar 3.5	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah	138
Gambar 3.6	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Semarang	139
Gambar 3.7	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Timur	140
Gambar 3.8	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Nganjuk	141
Gambar 3.9	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten	142
Gambar 3.10	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Serang	143
Gambar 3.11	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan	144
Gambar 3.12	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Maros	145
Gambar 3.13	Contoh operasionalisasi hasil pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional 2023 di Kesbangpol Jawa Timur	147
Gambar 3.14	Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi BPSDM Tahun 2023	165
Gambar 3.15	Peta sebaran desa di Indonesia	232
Gambar 3.16	Pemanfaatan Data Kependudukan	274
Gambar 4.1	Prioritas Nasional RKP 2023 Lingkup Kemendagri	332

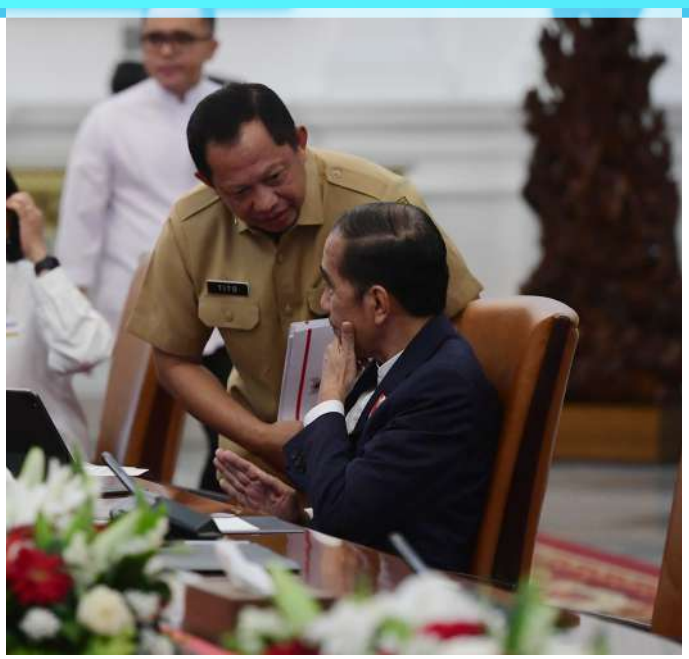

PETA NEGARA KESATUAN
MENDAGRI
WAMENDAGRI

PENGHARGAAN & PRESTASI KEMENDAGRI TAHUN 2023

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kemendagri meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 (9 kali secara berturut-turut) dari BPK RI kepada Kemendagri dan BNPP.

Prestasi Peringkat 1 Nilai Kinerja Anggaran Kategori Pagu Sedang (merupakan prestasi 3 tahun berturut-turut Tahun 2020 s.d 2022), diterima dari Kementerian Keuangan.

Penghargaan Kemendagri atas Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat sebagai Badan Publik kategori “INFORMATIF” pada acara Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden RI.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 18 Desember 2023.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 90,47 (Zona Hijau) terhadap 3 Produk Layanan Administrasi (TOP 4 Kementerian) dari Ombudsman RI.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Anugerah Reksa Bandha kategori Pemohon Lelang Noneksekusi Wajib dari Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas keaktifannya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam kategori Penerbit Kementerian/Lembaga dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 sebesar 90,04 dengan predikat "Sangat Memuaskan (AA)" dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2023 sebesar 91,04 dengan predikat "Sangat Baik".

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Terbaik Kedua dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat Kementerian/ Lembaga Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Dukungannya dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan Badan Pusat Statistik *Awards* Kategori Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Dalam Negeri dari Badan Pusat Statistik .

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai penerima Anugerah Merdeka Belajar kategori Mitra Program Merdeka Belajar, Subkategori “Kementerian” dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Inisiator Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) untuk Kementerian/ Lembaga dengan Kriteria Lembaga yang Menginisiasi Pelaksanaan RAN PE ditingkat Pusat dan Daerah dari Sekretariat Bersama RAN PE.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Jasa dan Partisipasi dalam Mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Komitmen dan Jasanya dalam melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional.

Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) *Award* 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri atas Kinerjanya Melaksanakan Prinsip Persaingan Usaha Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kategori Persaingan Usaha Pusat dari KPPU.

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas Peran Aktif terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Khusus Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disalahgunakan dalam Pendanaan Terorisme sebagai Rencana Aksi Nasional Indonesia sebagai Anggota Penuh *Financial Action Task Force* (FATF) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri dengan capaian level 3 atau kategori “Terdefinisi”, berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP.

2. SEKRETARIAT JENDERAL

Penghargaan kepada Satker Sekretariat Jenderal atas penilaian IKPA terbaik ke-4 Pagu Jumbo dan Pengguna KKP terbaik ke-4 yang diberikan oleh Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta.

Penghargaan kepada Unit Layanan Administrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023 dengan nilai sebesar 4,56 atau masuk kategori “Nilai A dari KemenPAN-RB.

Apresiasi Stranas PK kepada Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri atas pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi SIPD Republik Indonesia hingga menjadi Aplikasi Umum sebagai sarana untuk memperkuat transformasi digital Pemerintah Daerah dari KPK.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal atas terbentuknya Kemendagri-CSIRT sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintahan Pusat sesuai Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

3. INSPEKTORAT JENDERAL

Penghargaan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Peringkat Terbaik atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA.2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Prestasi Inspektorat Jenderal atas capaian Kapabilitas APIP Level 3 "*Integrated*", berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Penghargaan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Kategori Pagu Besar Semester I TA. 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

4. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai Terbaik atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA. 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Jumbo Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

5. DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Ketiga Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Pagu Jumbo Peringkat II Semester I TA 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Jumbo Terbaik Kelima Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku *Focal Point Review Border Crossing Agreement* (BCA) 2006 dan *Border Crossing Agreement* (BCA) RI-Malaysia telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Dalam Negeri Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023 di Putrajaya Malaysia pada kunjungan Presiden RI ke Malaysia.

Penghargaan kepada Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atas Indeks Maturitas Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Tahun 2023 dengan kategori Level 3 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atas Kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan Penyidik Polri Pengemban Fungsi Korwas PPNS dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

6. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Atas Partisipasi Pada Kegiatan Sail Teluk Cendrawasih 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal pada tanggal 29 November 2023.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023 dengan nilai 2,94 predikat "Baik" dari Badan Pusat Statitistik.

7. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Terbaik Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Katagori Pagu Besar kategori Terbaik Ketiga Semester I Tahun 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

8. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penghargaan *Obsession Awards* kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kategori Inovasi *Best Bureaucrats Obsession Awards* dari *Obsession Media Group* (OMG).

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Komitmen dan Dukungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah kategori Dukungan dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat melalui Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari PT. Jasa Raharja.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas *Digipay Bank* BRI Peringkat Terbaik Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Peringkat Terbaik Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Besar Terbaik Pertama Semester I Tahun 2023, dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas *Digipay One* Terbaik Kedua Semester I Tahun 2023, dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Kelima Semester I Tahun 2023, dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

10. BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Penghargaan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan/Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kategori Terbaik Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan/Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kategori Terbaik Keempat Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Prestasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan Akreditasi A untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari Lembaga Administrasi Negara.

Penghargaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Besar kategori Terbaik Keempat Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Peringkat Ketiga Satuan Kerja Terbaik Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun 2023 kategori Pagu DIPA di atas Rp 8 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar Lingkup KPPN Bandung dari KPPN Bandung I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Peringkat I Satuan Kerja Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I 2023 Kategori Pagu Besar dari KPPN Bukittinggi Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori "Sangat Baik" untuk Satuan Kerja dengan Pagu Kecil dibawah Rp. 30 Miliar Lingkup KPPN Makassar I Semester I Tahun 2023, dari KPPN Makassar, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan yang Bekerja Sama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai (PKA/PKP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 23 Lembaga Pendidikan K/L/Prov di seluruh Indonesia Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

12. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Unit Penyelenggaraan Publik Kategori "Sangat Baik" Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2022 dari Kementerian PAN dan RB.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan kerja dengan Peringkat I Terbaik Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 dengan Kategori Pagu Belanja Besar dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Terbaik Kategori Inovasi Tata Kelola BMN dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat sebagai Peringkat Kedua Terbaik atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai 99,96 (Kategori Pagu Diatas 18 Miliar) Periode Semester I TA. 2023 dari KPPN Pontianak, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Terbaik Ketiga Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2023 Kategori Pagu Besar dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Terbaik Pertama dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023, kategori Pagu Besar dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Responsif dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Periode Semester I tahun 2023 dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor atas Prestasi Sebagai Satuan Kerja Terbaik Kategori Inovasi Tata Kelola Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas Dukungan dan Kontribusi Stadion IPDN sebagai Lapangan Latihan pada FIFA U-17 *World Cup* Indonesia 2023 di Wilayah Jawa Barat.

BAB I
PENDAHULUAN

Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

1942

Diawali dengan zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi dan Agraria.

1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

1942 - 1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

SEJARAH KEMENDAGRI

1959 - 1968

Departemen Dalam Negeri dalam kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring diterapkannya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".

1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.

Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjamin dan mengawal terselenggaranya roda pemerintahan dalam negeri, khususnya pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, dan sekaligus bagian dari penyelenggaraan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan dan sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2023 juga bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.

VISI

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong",**

MISI

Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Perlindungan bagi segenap bangsa dan maemberiakan rasa aman pada seluruh warga.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan untuk periode 2020-2024 **5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden**, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

VISI

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

MISI

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

STRUKTUR ORGANISASI

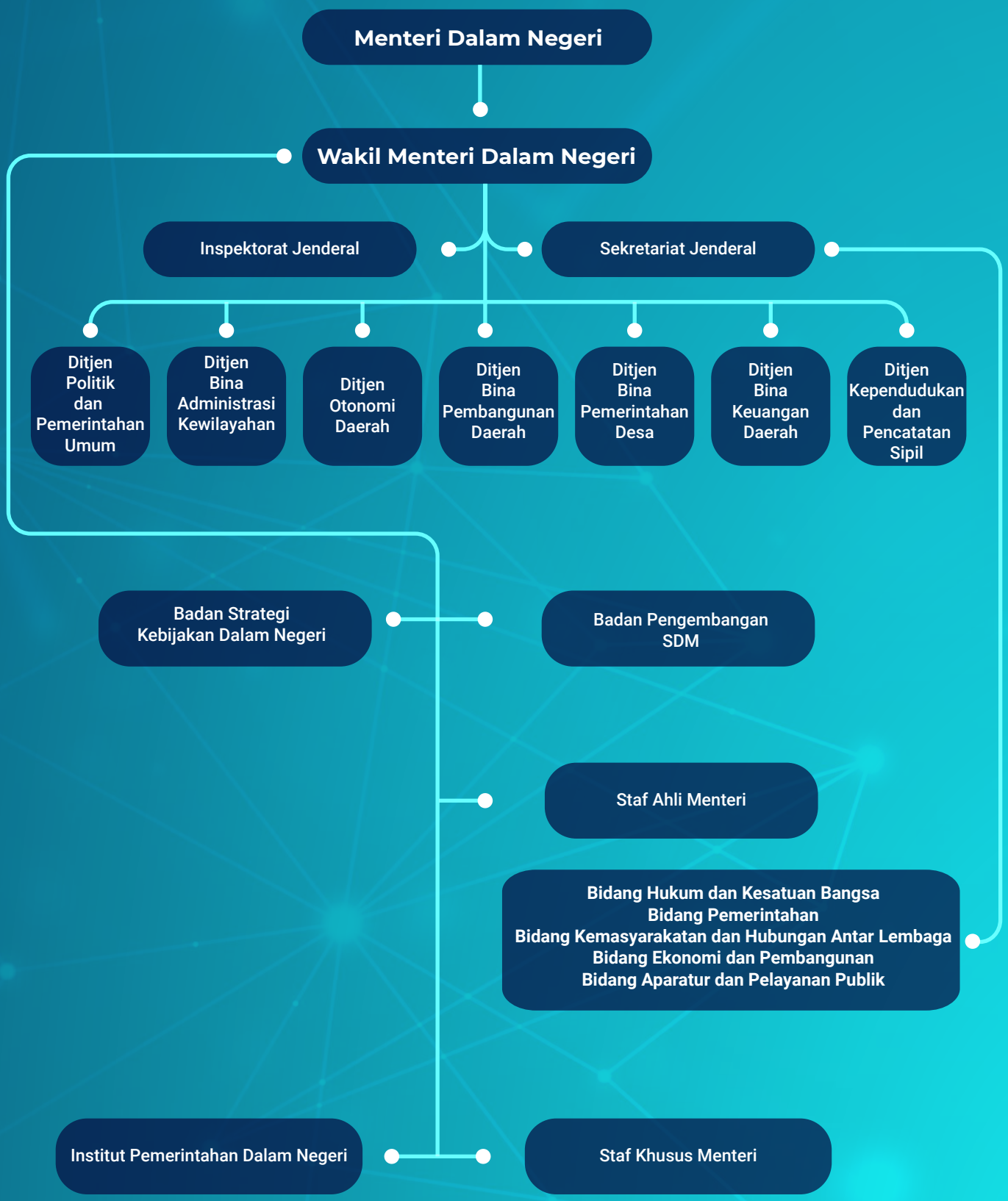

PROFIL PEJABAT

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri

TTL	• Palembang, 26 Oktober 1964
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude. • 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja). • 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. • 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand. • 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand. • 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia). • 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom. • 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa). • 1983 | SMAN 2 Palembang.
RIWAYAT JABATAN	• 2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. • 2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) • 2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). • 2015 | Kapolda Metro Jaya. • 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri. • 2012 | Kapolda Papua. • 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). • 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri. • 2005 | Kapolres Serang Polda Banten. • 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. • 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya. • 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.

Dipercaya itu butuh waktu, usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Bila anda mendapat kepercayaan jagalah dengan baik dan kerja ikhlas.

John Wempi Wetipo SH., MH
Wakil Menteri Dalam Negeri

TTL	• Hulakaima, 15 September 1972
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2011 | S2 Universitas Cendrawasih, Papua. • 2009 | S1 Universitas Cendrawasih, Papua. • 1994 | D.III Akademi Pariwisata Manado. • 1991 | SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua. • 1988 | SMP Negeri 2 Wamena, Papua. • 1985 | SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.
RIWAYAT JABATAN	• 2022 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri. • 2019 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. • 2013 - 2018 | Bupati Kabupaten Jayawijaya • 2008 - 2013 | Bupati Kabupaten Jayawijaya. • 2006 | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya. • 2001 | Kepala Seksi Pemasaran Wisata.

Pengukuran Indeks Budaya Organisasi BerAKHLAK adalah sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan reformasi birokrasi. Organisasi BerAKHLAK menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagaimana yang tertuang dalam road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Presiden Joko Widodo. Dalam rangka mempercepat proses perubahan budaya organisasi di lingkungan Kemendagri, telah dibentuk tim agen perubahan yang terdiri dari change leader dan change agent. Kinerja agen perubahan terus akan dioptimalkan untuk mempercepat proses transformasi di lingkungan Kemendagri

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Sekretaris Jenderal

TTL
- Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 Mei 1964

DOMISILI
- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN
- 2011 | S3 / Doktor (DN) Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- 2004 | S2 Magister / Master (DN) Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.
- 1990 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
- 1988 | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Pekanbaru.
- 1983 | Sekolah Menengah Atas SMAN 02 Pekanbaru.
- 1980 | Sekolah Menengah Pertama SMPN Batu Kundur.
- 1976 | Sekolah Dasar SDN 02 Sei Ungar Kundur.

RIWAYAT JABATAN
- 2022 - Sekarang | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2022 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Pj. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2021 | Plt. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2015 | Pj. Gubernur Bengkulu.
- 2015 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2013 | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2011 | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2010 | Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2009 | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2008 | Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- 2007 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2004 | Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.
- 2004 | Kepala Badan Litbang Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun.
- 2001 | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
- 1999 | Camat Karimun Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1996 | Camat Kundur Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1993 | Camat Serasan Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1991 | Sekretaris Kecamatan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
Inspektur Jenderal

TTL	• Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2001 | Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. • 1997 | Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. • 1990 | Akademi Kepolisian. • 1987 | SMA Negeri 1 Jakarta. • 1984 | SMP Negeri 15 Bandung. • 1981 | SD Kristen PPKP Palembang.
RIWAYAT JABATAN	• 2022 - Sekarang | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2019 | Kapolda Nusa Tenggara Barat. • 2018 | Kapolda Banten. • 2017 | Karowassidik Bareskrim Polri. • 2016 | Sesropaminal Divpropam Polri. • 2016 | Dirreskrimsus Polda Sumsel. • 2014 | Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri. • 2011 | Kabid Propam Polda Jawa Timur. • 2010 | Wakapolrestabes Surabaya. • 2009 | Kapolres Jombang. • 2007 | Kapolres Pamekasan. • 2006 | Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. • 2005 | Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. • 2004 | Kasatresmob Polda Metro Jaya.

Lakukan terus terobosan-terobosan berbasis data driven, jangan bergerak dalam ruang rutinitas semata, bergerak taktis - berpikir strategis untuk kinerja lembaga yang paripurna.

Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

TTL	• Banda Aceh, 21 April 1970
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2019 | Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • 2007 | Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik. • Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNPAD. • 1998 | Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. • 1992 | STPDN Jatinangor.
RIWAYAT JABATAN	• 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. • 2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan. • 2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan . • 2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan. • 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda. • 2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. • 2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum. • 2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum. • 2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. • 2005 | Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. • 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen. • 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara. • 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara. • 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.

Birokrat harus sibuk melayani masyarakat, jangan sibuk dilayani dan melayani diri sendiri, tinggalkan pola-pola kolonial, Reformasi Birokrasi adalah keharusan.

Jajaran ASN Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Kesbangpol seluruh Indonesia harus berkolaborasi dengan seluruh instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan, untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

TTL	• Bone, 16 Januari 1973
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran. • 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran. • 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan. • 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemeritahan Dalam Negeri. • 1991 | SLTA 2 Watampone. • 1998 | SLTP 4 Watampone. • 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.
RIWAYAT JABATAN	• 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau. • 2019 | Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. • 2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal. • 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. • 2016 | Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. • 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. • 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. • 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. • 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD. • 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.Wajo. • 1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.

Layanan Administrasi Kependudukan melaluli Dukcapil PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Akuntabel) Menuju Indonesia Maju

Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTL
- Banyumas, 08 Maret 1967

DOMISILI
- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN
- 2021 | S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.
- 1998 | S2/Magister Bidang Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
- 1991 | Sarjana S1 Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- 1986 | SMA Negeri I Purwokerto.
- 1983 | SMP Negeri III Purwokerto.
- 1980 | SD Negeri Bobosan II.

RIWAYAT JABATAN
- 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 2022 - 2023 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.
- 2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.
- 2016 - 2022 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 - 2016 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2010 - 2014 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2007| Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
- 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
- 1998 | Pj . Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
- 1996 | Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.

Otonomi Daerah menjadi Langkah Strategis untuk Merajut Kepentingan Nasional, Mengukuhkan Potensi Wilayah Untuk Pertumbuhan Serta Memperkuat Peran dalam Pembangunan dan Pelayanan Publik Berintegritas

Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TTL	• Pulau Punjung, 16 Maret 1970
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2021 | S-3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. • 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. • 1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). • 1993 | D-III Diploma Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang | Pj. Gubernur Kalimantan Timur • 2022 - 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Barat. • 2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. • 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. • 2018 - 2019 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. • 2016 - 2018 | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. • 2015 - 2016 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. • 2014 - 2015| Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. • 2012 - 2014 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. • 2011 - 2012| Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah . • 2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat. • 2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat. • 1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. • 1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Pembangunan daerah sebagai perwujudan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, mensyaratkan kolaborasi semua pihak untuk mengelola sumber daya yang ada dan bersinergi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

ASN Ditjen Bina Pembangunan Daerah: berkomitmen melanjutkan Reformasi Birokrsasi yang memberi hasil dan manfaat, serta agile dengan Berakhlak sebagai core value.

Ir. Restuardy Daud, M.Sc.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL	• Manado, Sulawesi Utara, 29 Desember 1967
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2001 | S2 IDEC Hiroshima University, Jepang • 1992 | S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik), Universitas Hasanudin, Makassar • 1986 | SMA Negeri 1 Manado. • 1983 | SMP Negeri 1 Manado. • 1980 | SD Eben Haezar.
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2020 - 2023 | Sekretaris BNPP. • 2020 | Pjs. Gubernur Jambi • 2018 | Pj. Gubernur Kalimantan Timur. • 2017 | Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada BNPP RI. • 2015 | Kepala Biro Perencanaan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. • 2014 | Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri • 2014 | Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. • 2013 | Kepala Pusat Penerangan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. • 2012 | Kepala Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TTL
- Bantul, 4 Juni 1968

DOMISILI
- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN
- 2018 | Lemhannas RIPPRA LVII.
- 2012 | S3 Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan fokus studi Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.
- 2006 | S2/ MA in Community Development at Faculty of Social Sciences, La Trobe University, Australia.
- 2000 | S2/ M.Si. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi Disparitas (Kesenjangan) Antar Wilayah.
- 1992 | S1 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi *Land Use Planning in Rural Area.*
- 1987 | SMA Bopkri 1 Yogyakarta.
- 1984 | SMPN 8 Yogyakarta.
- 1981 | SD Bopkri Demangan Yogyakarta.

RIWAYAT JABATAN
- 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- 2022 | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
- 2020 | Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.
- 2020 | Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.
- 2015 | Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 | Direktur PemerIntahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
- 2008 | Kasubdit Penataan dan Pengembangan Desa, Direktorat Pemdes dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2007 | Kepala Seksi Penataan Desa, Subdit Penataan dan Pengembangan Desa, Dit.Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
- 2004 | Kepala Seksi Penataan Kelembagaan, Subdit BPD, Dit. Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
- 2003 | Kepala Seksi Pelatihan, Subdit Pelatihan, Direktorat Pelatihan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
- 2000 | Kepala Seksi Administrasi Kelurahan, Subdit Administrasi Desa dan Kelurahan, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri.

Keuda Digital merupakan Layanan Digital Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Layanan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar lebih Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

TTL	• Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2009 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. • 2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. • 1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta. • 1994 | D III STPDN Jatinangor.
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang Pj. Gubernur Sumatera Selatan • 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara. • 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri . • 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri. • 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri. • 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri. • 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri. • 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri. • 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda. • 1995 | ADC Gubernur Lampung.

Keberagaman bukanlah merupakan suatu kelemahan tetapi yang terpenting adalah persamaan tujuan yaitu pengabdian kepada bangsa

Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

TTL	• Klaten, 3 April 1960
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2019 | S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor. • 2000 | S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. • 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang. • 1979 | SMAN 2 Klaten. • 1975 | SMPN Klaten. • 1973 | SD Kristen I Grobogan.
RIWAYAT JABATAN	• 2020 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • 2019 | Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • 2018 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan. • 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2017 | Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. • 2016 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. • 2015 | Pj. Gubernur Kalimantan Tengah. • 2014 | Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. • 2014 | Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. • 2008 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. • 2005 | Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah. • 2000 | Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah. • 1996 | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah. • 1994 | Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah Setprov Jawa Tengah. • 1988 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah Setprov Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perjuangan yang kita lakukan hari ini merupakan investasi untuk hari esok.

Dr. Sugeng Hariyono
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TTL	• Temanggung. 17 Oktober 1966
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2013 | S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung. • 1997 | S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta. • 1990 | S1 (Sarjana) FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.
RIWAYAT JABATAN	• 2022 - Sekarang | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. • 2021 | Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. • 2019 | Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri. • 2017 | Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2016 | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri. • 2012 | Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. • 2010 | Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Bekerja tanpa rumusan strategi yang cepat dan adaptif hanyalah proses menunda kegagalan

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

TTL	• Parigi, 29 April 1967
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2008 | S3 Universitas Negeri Jakarta. • 1997 | S2 IKIP Jakarta. • 1992 | S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah. • 1989 | D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan. • 1985 | SMA Negeri 1 Gorontalo. • 1982 | SMP Negeri 2 Gorontalo. • 1979 | SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.
RIWAYAT JABATAN	• 2022 - Sekarang | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. • 2020 | Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. • 2019 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri. • 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. • 2015 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN. • 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 1998 | Pj. Kasubbag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc
Staf Ahli Mendagri
Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga

TTL	• Brastagi, 28 Oktober 1965
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• Sekarang - Program Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta. • 1997 | Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia. • 1995 | Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda. • 1991 | Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang | Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum • 2022 - Sekarang | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga. • 2021 | Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. • 2020 | Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). • 2016 | Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). • 2014 | Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra. • 2012 | Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan Iklim, Kemenko Kesra. • 2010 | Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra. • 2008 | Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri. • 2006 | Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri. • 2001 | Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri. • 2000 | Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.

Dr. La Ode Ahmad P Bolombo
Staf Ahli Mendagri
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

TTL	• Wakuru, 24 Februari 1974
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2021 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • 2010 | S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa. • 2001 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan. • 1997 | Diploma Pemerintahan STPDN. • 1992 | SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha. • 1989 | SMP Negeri 1 Raha. • 1986 | SDN 1 Wakuru.
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang Plh. Direktur Jendereal Bina Pemerintahan Desa • 2022 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. • 2021 | Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. • 2020 | Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. • 2019 | Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. • 2018 | Direktur Politik Dalam Negeri. • 2016 | Direktur Organisasi Kemasyarakatan. • 2015 | Kasubdit Penanganan Konflik. • 2012 | Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan. • 2010 | Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI. • 2008 | Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda. • 2003 | Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung. • 2002 | Kasubbag Tata Pemerintahan. • 2000 | Sekcam Bitung Timur. • 1998 | Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.

Drs. Andi Bataralifu, MSi
Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

TTL	• Maddukelleng, 6 September 1971
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2002 | (S2) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin • 1999 | (S1) Manajemen Pembangunan, Institut Ilmu Pemerintahan • 1994 | (D-III) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri • 1990 | SMA Al Chasanah Jakarta Barat • 1987 | SMP No 1 Sengkang Kab. Wajo • 1984 | SDN No 2 Sengkang Kab. Wajo
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik • 2020 - Sekarang | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • 2019 - 2020 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah • Kasubdit Wilayah I Dit. FKDH dan DPRD • 2012 - 2015 | Kepala Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah I/2 Ditjen Otonomi Daerah • 2008 - 2012 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Subdirektorat Asosiasi Daerah Ditjen Otonomi Daerah • 2003 - 2008 | Kepala Subbag Penyusunan Rencana Kegiatan pada Bappeda Kab. Bulukumba • 2000 - 2003 | Kepala Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan Pada Bappeda Kab. Bulukumba • 1995 - 2000 | Kepala SubSeksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Gangking

Dr.Dra. Rochayati Basra, M.Pd
Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan

TTL	• Cirebon, 31Oktober 1967
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2011 | (S3) Doktor Bidang Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia • 2002 | (S2) Magister Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia • 1992 | (S1) Tarbiyah IAIN Sunan Gn Jati • 1986 | SMA Negeri 1 Sumber - Cirebon • 1983 | SMP Negeri 1 Sumber - Cirebon • 1980 | SD Negeri II Sumber - Cirebon
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Pemerintahan • 2020 | Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pada Badan Pengembangan Sumber Daya • 2017 | Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia • 2015 | Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan • 2014 | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan • 2010 | Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan

Sang Made Mahendra Jaya
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa

TTL	• Singaraja, 3 Juli 1966
DOMISILI	• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2001 |S2 Universitas Hasanudin (Magister) • 1996 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian • 1989 | Akademi Kepolisian • 1985 | SMAN 2 Samarinda • 1982 | SMPN 1 Singaraja • 1979 | SDN 10 Naikoten I Kupang
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan Kesatuan Bangsa • 2020 - 2023 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan Dan Hukum • 2020 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamandan, Hukum, Dan Pengawasan • 2018 - 2020 | Kasetum Polri • 2016 - 2018 | Dirreskrimum Polda Bali • 2015 - 2016 | Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti 2015) • 2014 - 2015 | Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri • 2011 - 2014 | Dirreskrimsus Polda Bengkulu • 2010 - 2011 | Penyidik Utama Tk Iii Dit Iii/Kor Dan Wcc Bareskrim Polri • 2008 - 2010 | Waka Poltabes Samarinda Polda Kaltim • 2008 | Kapolres Paser Polda Kaltim • 2007 - 2008 | Kapolres Nunukan Polda Kaltim • 2004 - 2007 | Penyidik Madya Unit V Bareskrim Polri (Ditugaskan Sebagai Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) • 2004 | Pama Pd Ptik (Dlm Rangka Dik Ptik) • 2003 - 2004 | Kasat Iv Dit Reskrim Polda Sulsel • 2002 - 2003 | Kasubbag Bin Ops Tipiter Dit Serse Polda Sulsel • 2001 - 2002 | Waka Polres Pangkep Polwil Pare-Pare Polda Sulsel • 2000 - 2001 | Kasubbag Binops Bag Serse Tipikor Dit Reskrim Polda Sulsel • 2000 | Kasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel • 1999 - 2000 | Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel • 1997 - 1999 | Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujungpandang Polda Sulsel • 1996 - 1997 | Pamin Ops C Pus Kodal Ops Polda Sulselra • 1993 - 1996 | Ka Kpp3 Tenau Polres Kupang Polda Nusra • 1992 - 1993 | Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda Nusra • 1991 - 1992 | Kaurbin Ops Sat Bimmas Polres Kupang Polda Nusra • 1990 - 1991 | Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusra

Staf Khusus Menteri

Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan

HERRY HERYAWAN, S.I.K., M.H.
Staf Khusus Menteri
Bidang Keamanan dan Hukum

Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.i, M.Si, M.M
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan

Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa
dan Pembangunan Perbatasan

Dr. Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik dan Media

SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. BERDASARKAN JENIS KELAMIN

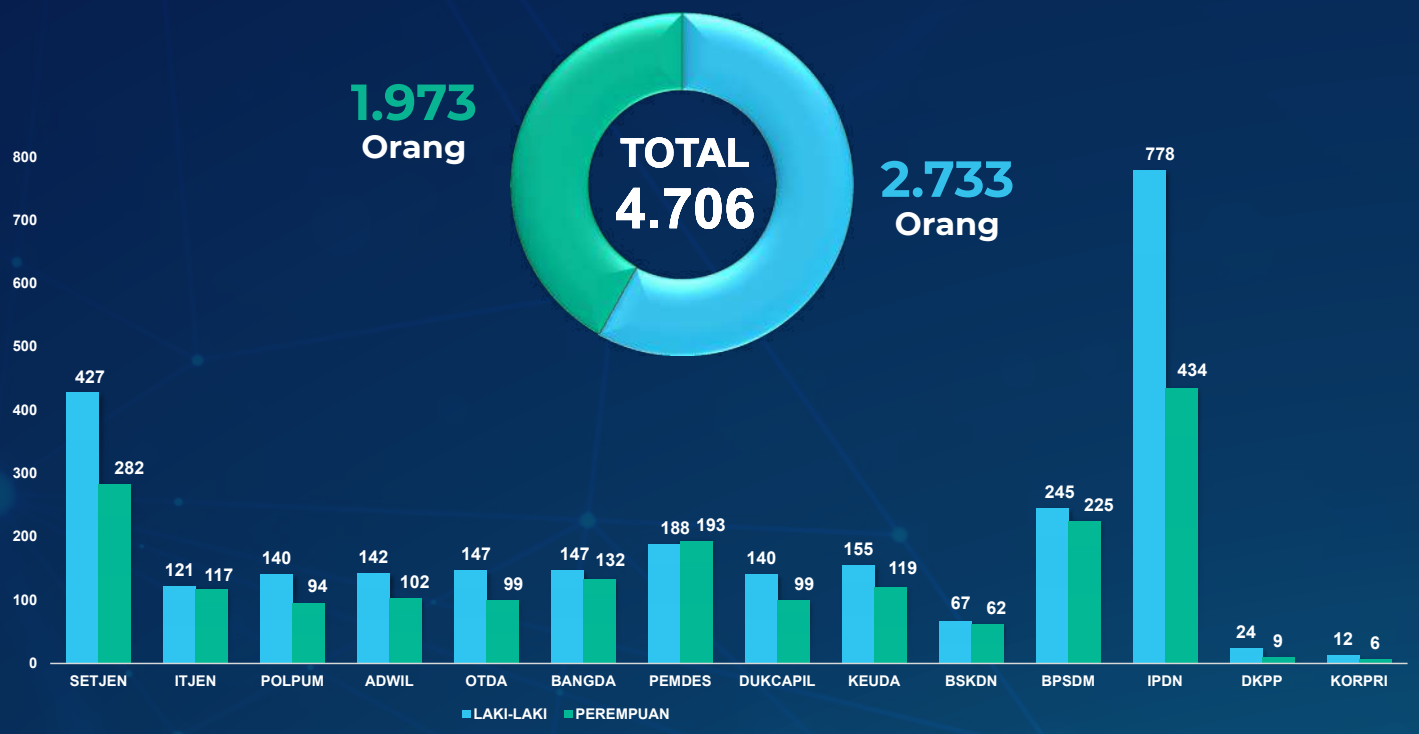

1. BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Jumlah Total PNS
4706 Orang

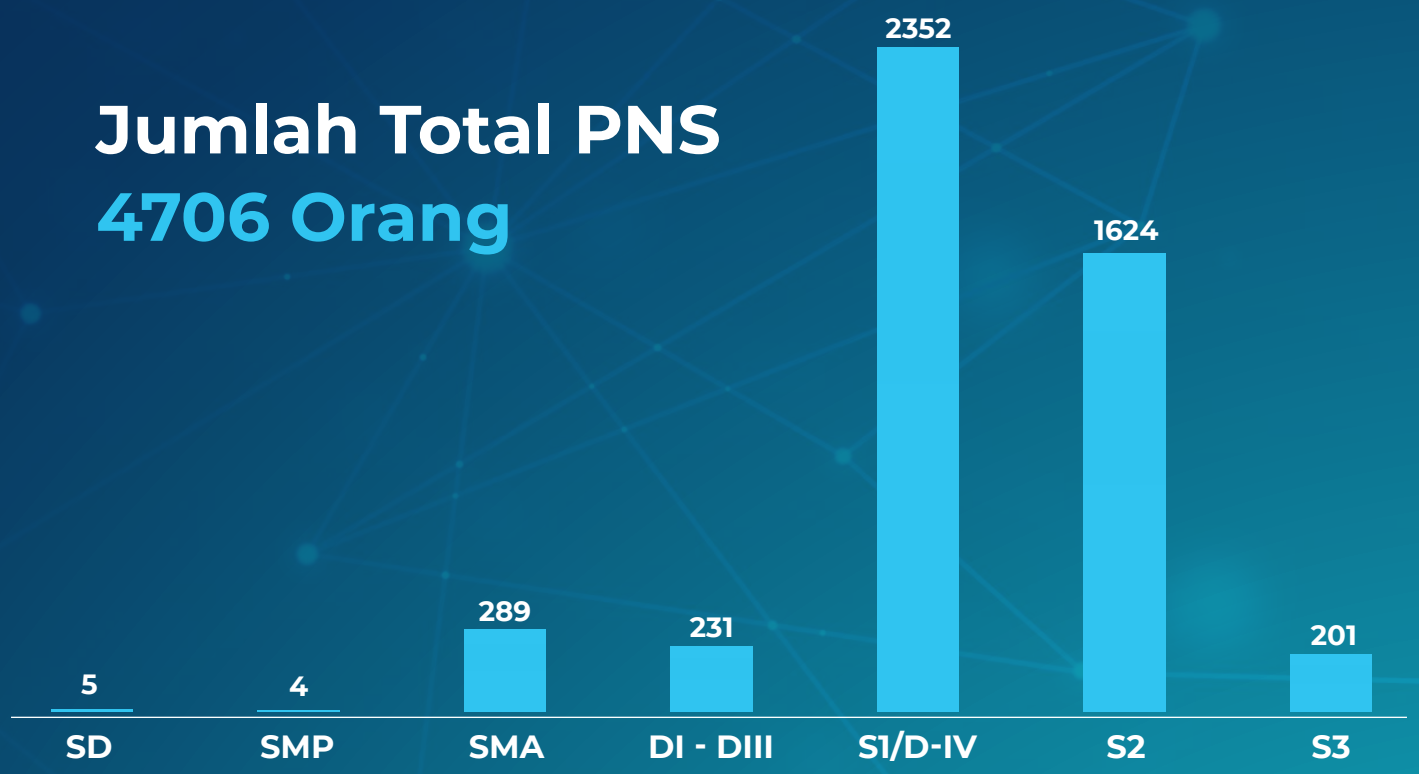

3. BERDASARKAN GOLONGAN

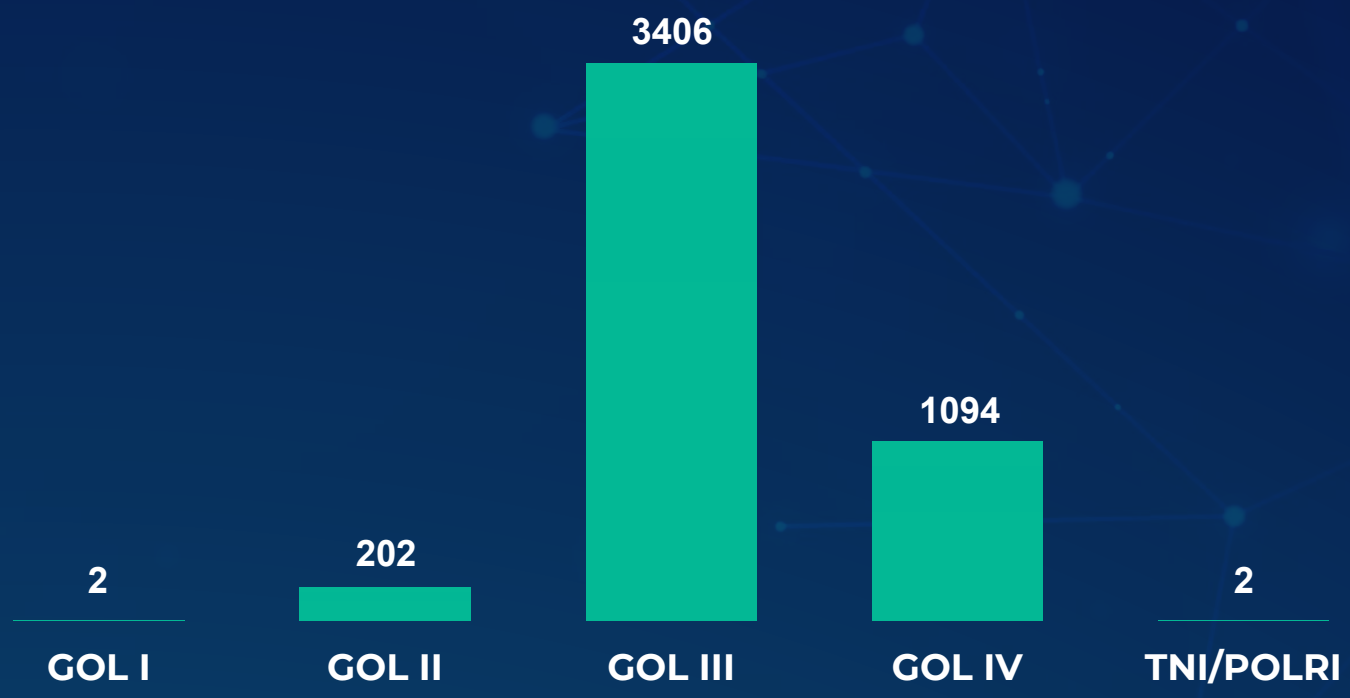

4. BERDASARKAN JENIS JABATAN

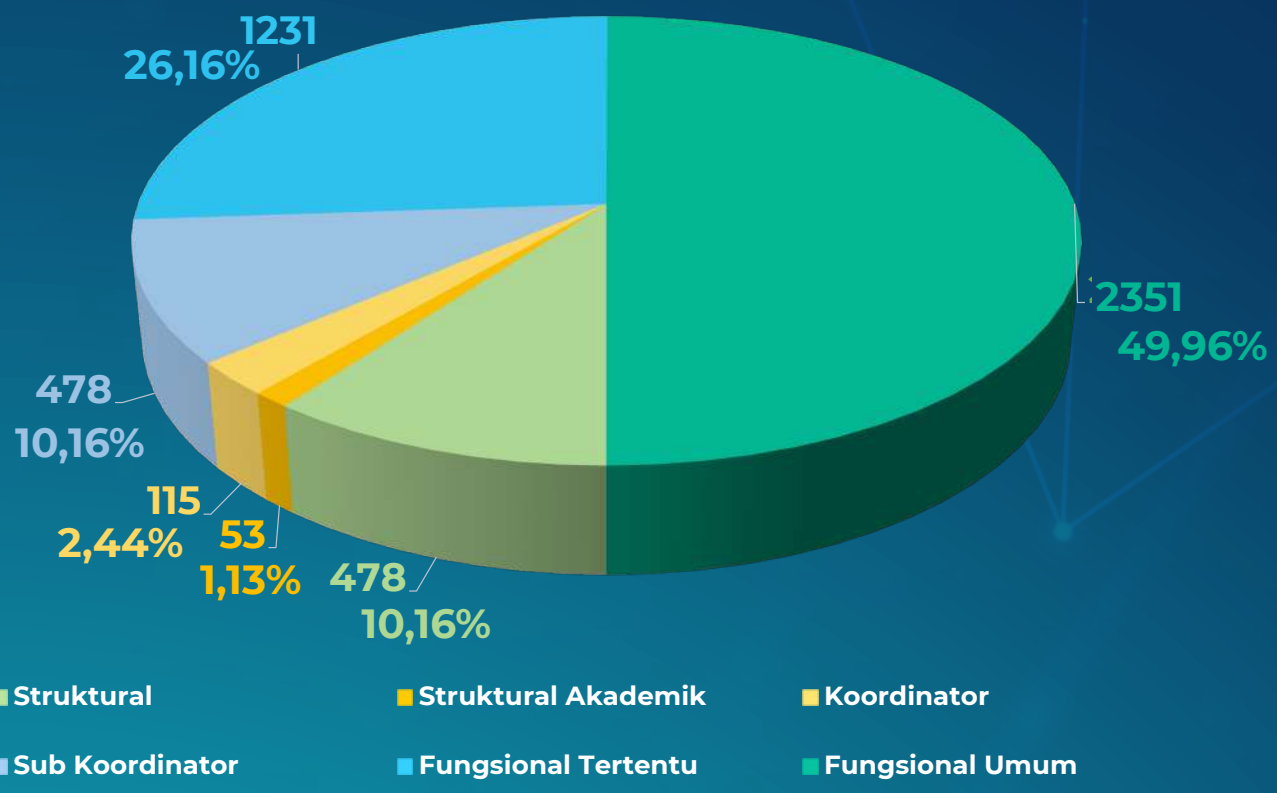

5. PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENSIUN, MENINGGAL, PINDAH WILAYAH KERJA, DAN BERHENTI

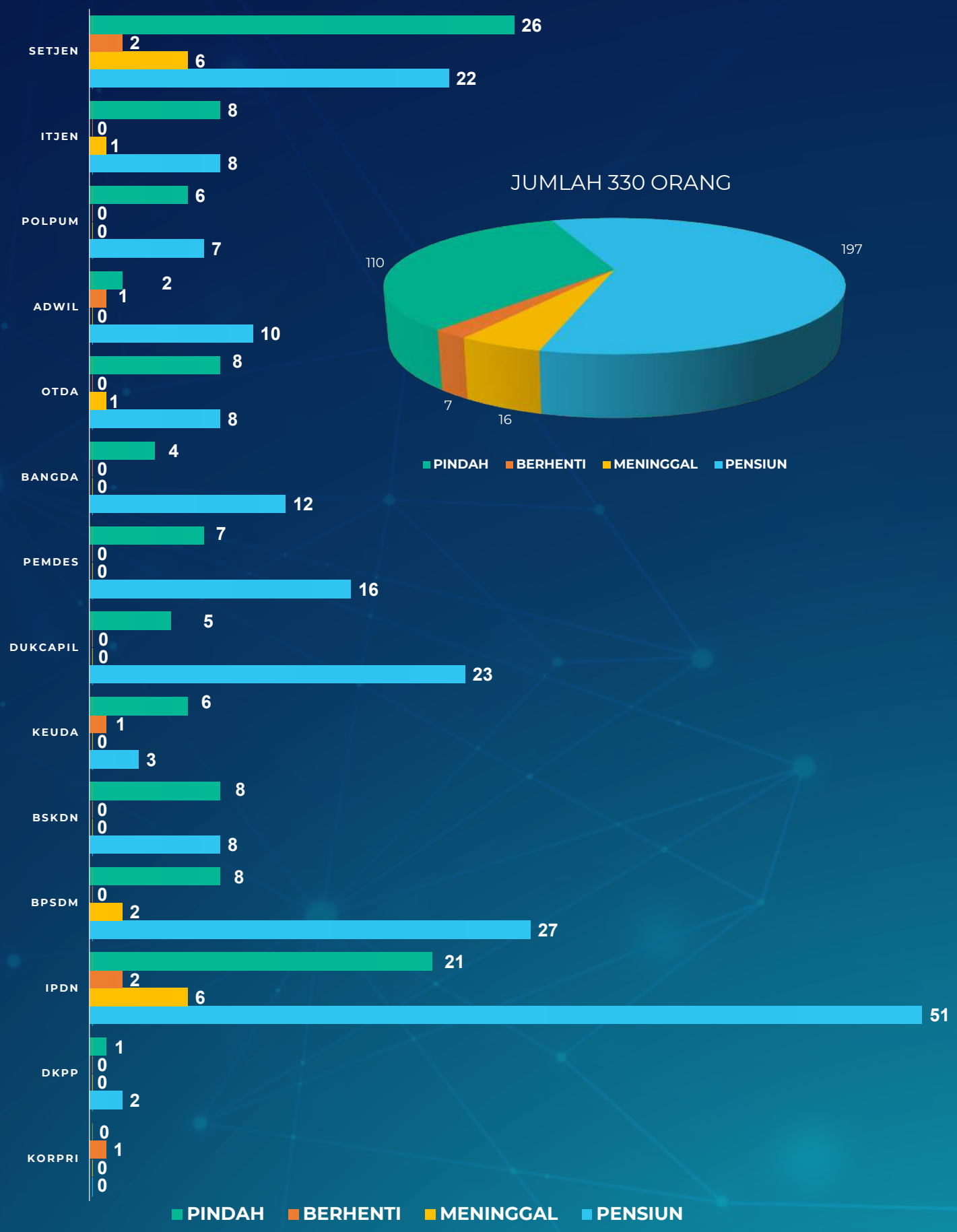

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2020-2024

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 yang indikator, target, pagu mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, yang dalam penyusunannya didasari pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai pertanggung-jawaban atas peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjabaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, sebagai berikut:

Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian

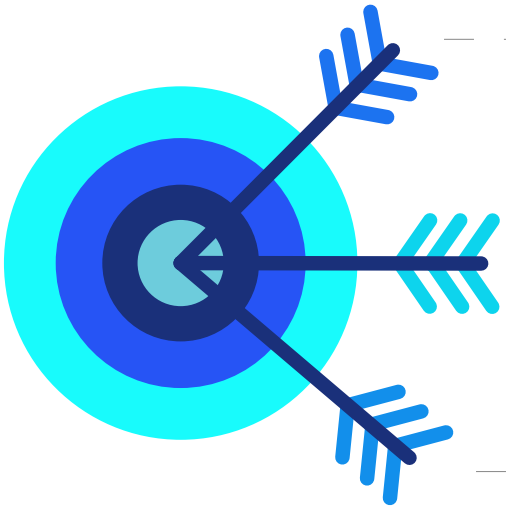

T1 Terwujudnya Stabilitas Politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

T2 Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

T3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T1:

1. **Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
   a. Indeks Demokrasi Indonesia.
   b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
   c. Indeks Kinerja Ormas.
2. **Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
   a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
   b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
   c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
   d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. **Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Kewaspadaan Nasional**.**
4. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
   a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T2:

1. **Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**

   a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
   b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
   c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
   d. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.

2. **Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

3. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**

   a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
   d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
   e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
   f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
   g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
   h. Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama".
   i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
   j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

4. **Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**

   a. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   b. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaakan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

5. **Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T3:

1. **Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10),dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu** Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

2. **Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**

   a. Indeks Pengawasan Internal.
   b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

3. **Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun periode Renstra. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arahan Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 77,36	Nilai 78,66
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)
			Indeks Kinerja Ormas	1 Dokumen	Nilai 70
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,40
			Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,1	Nilai 67,5
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,885
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,330
		Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Nilai 64
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	1 Dokumen	150 daerah
			Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	Nilai 60

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	80%
			Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,06	Nilai 3,60
		Meningkatknya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1 Dokumen	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
			Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
			Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
			Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik	10%	75%
			Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 37

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	1 Dokumen	36%
			Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori "utama"	55 Daerah	165 Daerah
			Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 100
			Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	1 Dokumen	Nilai 90 (A)
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90%	100%
			Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	Nilai 60
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 93,01
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 100
			Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 85
		Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	65%

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akuntabel secara berjenjang, sehingga Visi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dapat terwujud. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 juga dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Namun, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, berdampak terhadap penyesuaian Rencana Strategis sekaligus perbaikan atas catatan-catatan evaluasi dari Tahun 2020 - 2022 oleh Kementerian Lembaga termasuk Kementerian PAN dan RB. Sehingga penyesuaian tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 revisi, yang telah mendapat persetujuan prinsip Kementerian PPN/ Bappenas per tanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya saat ini proses pembahasan internal untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomenklatur Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di bawah ini mempedomani indikator pada Draft Dokumen Revisi Renstra 2020 - 2024 dan mengacu pada Rencana Kerja, RKA-K/L, dan DIPA Tahun 2023 lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan penjabaran sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25*	DITJEN POLPUM
		Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	DITJEN POLPUM
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 73,13*	DITJEN POLPUM
		Indeks Harmoni Indonesia **	Nilai 6**	DITJEN POLPUM
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	DITJEN POLPUM
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori "Baik"	100 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (90%)	ITJEN
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		Persentase capaian penerapan SPM di daerah **	80%**	DITJEN BINA BANGDA
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron) *	DITJEN BINA BANGDA
		Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2,5%	DITJEN BINA PEMDES
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	DITJEN BINA KEUDA
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	BSKDN
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	ITJEN
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik	1.250 Lembaga Pengguna	DITJEN DUKCAPIL

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01*	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	ITJEN
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri *	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri *	40%*	BSKDN

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2023 sebesar **Rp.4.385.969.126.000,** yang digunakan untuk melaksanakan 4 Program, sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.961.839.223.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.474.298.785.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 752.847.470.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 196.983.648.000,-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 (Adendum II)

Keterangan:
*Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra
**Indikator baru dalam Usulan Revisi Renstra

Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak Tahun 2018 pelaporan kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Reviu (esr) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran strategis atau disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen manajemen atau tolok ukur untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja (wujud pertanggungjawaban) dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan. Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja IKU, kinerja Sasaran Strategis, yang selanjutnya menjadi gambaran umum capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun pengukuran kinerja masing-masing tingkatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

   Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja\ IKU = \frac{Realisasi}{Target}\ X\ 100\%$$

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

   Penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU pada setiap sasaran strategis yang menunjukkan semakin tinggi capaian maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah capaian maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja\ Sasaran\ Strategis = \frac{\Sigma\ Capaian\ IKU\ dalam\ sasaran\ strategis}{\Sigma\ IKU\ dalam\ \ sasaran\ strategis}\ X\ 100\%$$

   Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dirata-ratakan, yang dijadikan sebagai capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, adapun rumus yang digunakan:

$$Capaian\ Kinerja\ Kementerian\ Dalam\ Negeri = \frac{\Sigma\ Capaian\ Kinerja\ Sasaran\ Strategis}{\Sigma\ Sasaran\ Strategis}\ X\ 100\%$$

Untuk menentukan tingkat keberhasilan atas kinerja Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis, dan tingkat Kementerian menggunakan pengukuran skala ordinal, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat	Kategori
≥100%	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
90% ≥ x < 100%	Tinggi	Berhasil
75% ≥ x < 90%	Sedang	Cukup Berhasil
50% ≥ x < 75%	Rendah	Tidak Berhasil
< 50%	Sangat Rendah	Sangat Tidak Berhasil

X = Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja ini, Apabila perhitungan berdasarkan analisis gap terdapat capaian Indikator Kinerja Utama lebih besar dari 100%, maka penulisan capaian dibatasi maksimal sampai dengan 120%, sekaligus menjadi dasar perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam penjelasan masing-masing indikator kinerja utama dapat menarasikan capaian kinerja IKU lebih besar dari 120%.

Manual Indikator

Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/Pemili dan Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun provinsi. Instrumen Pengukuran IDI terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator. Guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia, serta penguatan pada 13 indikator (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, Kesetaraan Gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, Kesetaraan dalam pelayanan dasar, Kinerja Lembaga Legislatif, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Trasnparansi Anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan poitik pada kader partai politik).
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI disetiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang, >80 baik.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
Sumber Data	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi, Big Data Verifikasi
Periode Pelaporan	1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)
Target Tahun 2023	Nilai 79,25

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/Pemili dan Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	**Indek Kinerja Ormas**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indek Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indokator)
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel input, output, outcome dan impact. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai berikut : (1)Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan ; (2)Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program, Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi. Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kenerja Buruk). Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun 2022 ini dilakukan dengan berfokus kepada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang dinilai memiliki heteroginitas tinggi atau keberagaman karakteristik yang cenderung lebih besar dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia. Dengan Formulasi Pegukuran %Indikator = n Total Indikator / n Indikator x 100% Kemudian %Variabel = n%Indikator / n Variabel dan %Dimensi = n%Variabel/ n Dimensi
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Organisasi Masyarakat, Kesbangpol Provinsi dan Ormas yang Terdaftar di Kemendagri dengan SKT
Sumber Data	Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Google Form Pengisian Kertas Kerja dan Hasil Survey Pengukuran Kinerja Ormas.
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2023	Nilai 65

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang,pikir,sikap,perilaku,dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur,sejahtera dan bermartabat. Pengukuran ICRM berdasarkan 5 Dimensi Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dengan tahapan Penghitungan ICRM yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi dan (4) Penghitungan ICRM. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini adalah penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran ICRM diantaranya: 1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsan dan Forum Pembauran Kebangsaan 2. Penguatan Ideologi Pancasila, Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara 3. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan kabupaten/Kota 4. Peran serta masyarakat dalam menjalin persatuan dan kesatuan.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Penghitungan ICRM dilakukan Dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandiddat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi dan (4) Penghitungan ICRM. Penghitungan Nilai ICRM Nasional dilakukan dengan: (1) menghitung nilai indeks setiap dimensi (Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu) yang bobotnya telah ditetapkan; (2) kemudian hasil nilai indeks di setiap dimensi tersebut dilakukan akumulasi dan perhitungan rata-rata yang menghasilkan Nilai ICRM.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Sumber Data	Kemenko PMK, BPS, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Database sumber lainnya
Periode Pelaporan	3 Tahun Sekali (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2019)
Target Tahun 2023	Nilai 73,13

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis	**Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah**
Deskripsi Sasaran Strategis	Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Harmoni (IHaI) dan (3) Indeks Capaian Revolusi Mental.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Harmoni Indonesia**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Pengukuran Indeks Harmoni menggunakan 4 dimensi : Ekonomi (30%), Sosial (23%), Budaya (22%), Keberagamaan (25%), yang terdiri dari 10 variabel dan 31 indikator. Pengukuran Indeks Harmoni sebagai instrumen evaluasi yang esensial dalam menganalisis tingkat keselarasan dan keseimbangan antara berbagai dimensi pembangunan. Sebagai instrumen evaluasi, pengukuran ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data untuk menyusun indeks yang bercerminkan status pembangunan suatu wilayah. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi indikator yang relevan, penentuan bobot atau pentingnya setiap indikator, dan pembuatan rumus atau metode penghitungan untuk menghasilkan nilai Indeks Harmoni. Indeks Harmoni menjadi alat evaluasi yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektifitas pembangunan suatu wilayah, membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidakseimbangan dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan strategis.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 9) beserta nilai variabel Sangat Baik, Baik, Moderat ke Arah Baik, Moderat dan kurang
Formula Pengukuran	Pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) mengunakan welbeing methodologi (WM) dengan menganalisis skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap variabel Xi dengan rumusan pengukuran : Ruang Lingkup dan Uji Instrumen Survey, Analisis Regularity (R), Analisis Response Rate (RR), Analisis Singifikansi Skor Penilaian (SSP) dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS), Analisis Standar Deviasi (SD), Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR), Analisis Data Matriks, Analisis Distribusi Skor Penilaian, Analisis Keseimbangan Data PPA, Analisis Resume Data Non Struktural
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota
Sumber Data	Unsur dodeca-helix di Kabupaten/Kota terdiri dari : akademisi, kelompok usahawan, organisasi profesi, ormas, wirausahawan sosial, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, penanam modal/investor, pasar/agen ekonomi, jurnalis dan media massa dan masyarakat penerima manfaat
Periode Pelaporan	1 Tahun (pengukuran tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2023)
Target Tahun 2023	Nilai 6

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Dalam Melaksanakan Deteksi Dini Dan Cegah Dini.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Kewaspadaan Nasional**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan Nasional yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut diantaranya adalah: 1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penestrasi kebijakan; 2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan; 3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini; 4. Sumber data rujuan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan; 5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut: 1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. 2. Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna, seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja. 3. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas masyarakat. 4. Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisanya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan. 5. Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling). Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih responden.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya
Sumber Data	Hasil Survey dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2023	Nilai 63

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM): 1. Sub Urusan Trantibum; 2. Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat; 3. Sub Urusan Bencana; dan 4. aSub Urusan Kebakaran.
Indikator Kinerja Utama	**Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- PP No. 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Permendagri No. 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum;
- Permendagri No. 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;
- Permendagri No. 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
- Permendagri No. 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran;
- Permendagri No. 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas; dan
- Permendagri No. 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal; dan
- Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:
1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB) IKP1;
2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) IKP2;
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM SATLINMAS) IKP3; dan
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK) IKP4.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 18 dimensi/Pilrar dan 27 subdimensi/Indikator. Setiap dimensi, subdimensi/indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) dengan menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu:

PARAMETER DAN DEFINISI INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

IKP	Dimensi/Pilar	Subdimensi /Indikator	Bobot
IPT SUB	Kelembagaan	Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Komunikasi	0,25
	Sumber Daya Aparatur	Pembagian Tugas dan Monitoring	
	Regulasi dan Kebijakan	Regulasi, rencana PB, Evaluasi	
	Keuangan	Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan	
	Teknis Operasional	Ketersediaan Logistik, Peringatan Dini, Sistem informasi	
	Kepemimpinan	Pengambilan keputusan	
IPKKU	Strategi	Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam menegakkan Perda & Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam Penyelenggaraan Tantribum Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	0,25
	Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	
	Sistem	Sarana dan prasarana, Perencanaan dan Anggaran, Akuntabilitas	
IPM SATLINMAS	Strategi	Pelaksanaan fungsi Satlinmas dan Kebijakan Satlinmas	0,25
	Sumber Daya Manusia	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	
	Sistem	Sarana dan Prasarana Satlinmas	
IPT SUK	Kelembagaan, Perencanaan anggaran, Pemenuhan capaian SPM, Pemenuhan sarana dan prasarana, Pemenuhan SDM terverifikasi, Pemberdayaan masyarakat		0,25

Satuan Pengukuran	Daerah

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.
(1-4 x 100):4
Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

Formula Pengukuran

$$\text{IPT} = \sum_{q=1}^{Q} w_q I_q$$

$$\text{IPT} = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Keterangan:
IPT : Nilai Ditjen Bina Adwil
wq : Bobot Indikator Kinerja Program ke-iIq
Iq : Nilai Indikator Kinerja Program

Kategori Penilaian IPT:
- Sangat Baik = 80,01 – 100
- Baik = 60,01 – 80,00
- Cukup Baik = 40,01 – 60,00
- Kurang Baik = 20,01 – 40,00
- Buruk = 00,00 – 20,00

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	100 Daerah

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 7

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang profesional, akuntabel dan efektif serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.
Indikator Kinerja Utama	**Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Indikator ini mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi pada Lingkup Kemendagri. 2. Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja dalam indikator ini merupakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. 3. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup kegiatan: a. Pendidikan dan pelatihan; b. Bimbingan teknis; c. Workshop; dan d. Seminar/webinar. 4. Penetapan Target pada dalam indikator merupakan jumlah total target peserta pengembangan kompetensi berdasarkan Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta tersebut dibagi kedalam proporsi sebagai berikut: a. Jumlah ASN Kemendgari sebanyak 5448 orang; dan b. Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Formula Pengukuran	((jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/jumlah ASN Kemendagri x 100%) + (jumlah ASN Pemerintah Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/target ASN Pemerintah Daerah sesuai dokumen Renstra x 100%)) /2
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Sumber Data	1. Renstra Kemendagri 2. Dokumen rencana tahunan kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan (Tahun 2023)
Target Tahun 2023	70%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 8

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	**Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%); 2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%); 3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%); dan 4. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%) Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator. (1-4 x 100):4 Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Level 3 (90%)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 9

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Indikator Kinerja Utama	**Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%); 2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%); 3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%); dan 4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%) Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator. (1-4 x 100):4 Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Level 3 (90%)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 10

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: a. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; b. Penyusunan standar kompetnensi aparatur pemerintahan dalam negeri; b. Penyusunan standar komptenesi pemerintahan dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; d. Pembangunan Big Data SDM ASN; e. Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; g. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; dan h. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.
Satuan Pengukuran	Indeks
Formula Pengukuran	Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu *communication*, *organizational skill*, *leadership*, *logic*, *effort*, *groupskills*, *ethics*, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah: 1. PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan. 2. PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus : $$\text{Indeks Kepuasaan Stakeholders} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \text{ X Nilai Penimbang}$$ Keterangan : Nilai Indeks: 1,00 – 1,75 = Kurang Puas 1,76 – 2,51 = Cukup Puas 2,52 – 3,27 = Puas 3,28 – 4 = Sangat Puas
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Adm. Keprajaan, Kemahasiswaan dan Alumni
Sumber Data	Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 3,5

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 11

Sasaran Strategis	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada alenia IV pembukaan UUD 1945 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan sehingga peraturan daerah yang dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Indeks Kepatuhan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari susunan 5 (lima) Aspek, 12 (dua belas) Variabel, dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator parametrik penilaian Indeks. Kelima Aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan Peraturan Daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Pengukuran pembobotan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 237 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibagi 5 aspek: 1. Perencanaan 2. Penyusunan 3. Pembahasan 4. Penetapan 5. Pengundangan dan pelaporan Selanjutnya dalam merumuskan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, dibagi menjadi 3 (tiga) struktur turunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Aspek merupakan satuan terbesar dalam pengukuran Indeks yang terdiri dari setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Adapun rumus yang ditetapkan dalam penjumlahan Aspek yakni: **Aspek A + Aspek B + Aspek C + dst** b. Variabel merupakan satuan turunan dalam Aspek yang terdiri dari masing-masing kepatuhan dari alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus yang ditetapkan pada masing-masing aspek yakni: **(Total Skor Indikator)** **(Target Bobot Aspek) x Bobot dalam Indikator** c. Indikator merupakan satuan terkecil dalam penghitungan IKD dan juga merupakan turunan dari setiap Aspek yang dinilai dalam IKD. Dalam aspek ini penghitungan diukur melalui kelengkapan dokumen yang telah diunggah melalui Aplikasi e-Perda Hasil perhitungan dinilai berdasarkan Skala Indeks sebagai berikut: 1. 0% - 20% = Sangat Rendah 2. ≥20% - 40% = Rendah 3. ≥40% - 60% = Sedang 4. ≥60% - 80% = Tinggi 5. ≥80% - 100% = Sangat Tinggi
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Ditjen Otonomi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 80 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 12

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi jurusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
Indikator Kinerja Utama	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut : 1,00 - 1,80 = Sangat Rendah 1,81 - 2,60 = Rendah 2,61 – 3,40 = Sedang 3,41 – 4,20 = Tinggi 4,21 – 5,00 = Sangat Tinggi Definisi Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut : Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai : 1) Kinerja makro, dan 2) Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rumus penghitungan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memperoleh nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) antara lain : Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro sebagai berikut : KPPD = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25 KPPD : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CKM : Capaian Kinerja Makro CKUP : Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan PKM : Perubahan Kinerja Makro
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 3,41 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 13

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang behak sesuai dengan SPM.
Indikator Kinerja Utama	**Persentase capaian penerapan SPM di daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari bidang: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Kawasan Permukiman 5. Trantibumlinmas 6. Sosial Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu: 1) capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan 2) capaian Penerima Layanan Dasar. Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP) Keterangan: IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini. BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 Kategori nilai indeks pencapaian SPM 1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna 2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama 3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya 4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama 5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda 6. Nilai <60 : Belum
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Direktorat SUPD II Direktorat SUPD III Direktorat SUPD IV Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM) Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Sumber Data	Aplikasi e-SPM
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	80%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 14

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Sinkronisasi dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan daerah merupakan urusan konkuren yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada setiap urusan konkuren dilakukan pengukuran pada salah satu sub urusannya. Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek: 1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan). 2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan). 3. Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target). Norma Standar Prosedur dan Kriteria merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). NSPK yang ditetapkan oleh K/L merupakan pedoman bagi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembinan umum, menyusun indeks penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk mensinronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di daerah. Daerah yang diukur adalah 34 Provinsi Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut: 1. Jika nilai indeks <50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah “Kurang Sinkron”; 2. jika nilai indeks ≥ 50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan < 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah “Sinkron”; dan 3. jika nilai indeks ≥ 80 (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah “Sangat Sinkron”.
Satuan Pengukuran	Indeks
Formula Pengukuran	IS = (% Kebijakan x BK) + (% Implementasi Kebijakan x BIK) + (% Kinerja Kebijakan x BKK) Keterangan: • IS (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan. • Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan. • Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya. • Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan Perkada). • Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah.• Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator. • BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40. • BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30. • BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Sumber Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah NSPK Kementerian/Lembaga RKPD dan Laporan Daerah Provinsi
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 80 (Sinkron)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 15

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
Indikator Kinerja Utama	**Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik.**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Desa dengan target kategori nilai "Baik" merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan. Desa yang mendapatkan kategori nilai "Baik" merupakan Desa yang berada pada status Desa Swasembada dan Desa Swakarya Lanjut
Satuan Pengukuran	Persentase Desa
Formula Pengukuran	Indikator untuk mengukur klasifikasi desa adalah sebagai berikut : a. Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencaharian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, Pemilik Aset Ekonomi Lainnya; b. Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 Tahun, Rasio Guru dan Murid, Kelembagaan Pendidikan Masyarakat, c. Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB, Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat; d. Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik Sara, Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta; e. Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan; f. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/Musrenbangdes/Kelurahan, Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, Etos Kerja Penduduk; g. Lembaga Kemasyarakatan meliputi LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Bumdes, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Posyantekdes, Organisasi Keagamaan; h. Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi APBD Desa dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan i. Pembinaan Dan Pengawasan Meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

	$$\Sigma = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Desa Seluruh Indonesia}} \times 100\%$$ Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai lampiran II Permendagri 12 Tahun 2007 dengan kategori sebagai berikut: a. Nilai total skor ≥ 80% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada; b. Nilai total skor 60% - 80% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya; c. Nilai total skor ≤ 60% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya;
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Pelaporan	Tahun 2023
Target Tahun 2023	2,5 %

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 16

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah
Indikator Kinerja Utama	**Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	- Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah - Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Keuangan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPK-RI, Pemda.
Sumber Data	SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	65

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 17

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	**Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah mengamanatkan Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penilaian inovasi daerah. Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 30-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542 daerah).
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{Jumlah\ daerah\ dengan\ kategori\ sangat\ inovatif\ dan\ inovatif}{Jumlah\ daerah\ (542)} X\ 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
Sumber Data	Laporan Indeks Inovasi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	30%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 18

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaktif, profesional, proaktif dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	1. Itjen Kemendagri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%) 2. Itjen K/L Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%) 3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Itprov dan Itkab/kota) (bobot 20%) 4. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controling dalam SIPD) (bobot 10%) Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 tahapan: 1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator. 2. Menghitung Indeks Provinsi. 3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 100 (Sangat Baik)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 19

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaktif, profesional, proaktif dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	1. Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan (bobot 25%) 2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD (bobot 25%) 3. Capaian kapabilitas APIP (bobot 25%) 4. Rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH. (bobot 25%) Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir presentase total dibagi 4 sub indikator. (1-4 x 100):4 Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 85 (B)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 20

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	**Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti: (1). KTP elektronik, (2). KIA, (3). Akta Kelahiran, (4). Akta Kematian, (5). Akta Perkawinan, (6). Akta Perceraian
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	1. KTP elektronik : Jumlah Perekaman/Jumlah WKTP*100% 2. KIA: Jumlah KIA yang terbitkan/Jumlah Wajib KIA (0-17<1 hari)*100% 3. Akta Kelahiran : Jumlah Akta kelahiran yang terbitkan/Jumlah anak usia 0-18 tahun*100% 4. Akta Kematian : Jumlah akta kematian yang diterbitkan/Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan*100% 5. Akta Perkawinan : Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan/Jumlah peristiwa Perkawinan yang dilaporkan*100% 6. 6. Akta Perceraian : Jumlah akta perceraian yang diterbitkan/Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan*100% Capaian : Rata-rata capaian 6 (enam) Layanan Dukcapil.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Dukcapil
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Daerah
Sumber Data	Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 21

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	**Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Satuan Pengukuran	Jumlah
Formula Pengukuran	Jumlah Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
Sumber Data	Laporan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan Pusat dan Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	1.250 Lembaga Pengguna

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 22

Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui: 1. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 2. Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan; 3. Pelaksanaan pelayanan perizininan terintegrasi dan terpadu; 4. Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial; dan 5. Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; • PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; • PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; • Permendagri 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum; • Permendagri 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas; • Permendagri 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota; • Permendagri 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran; • Permendagri 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas; dan • Permendagri 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal; dan • Kepmendagri No. 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 5 (lima) indeks, yaitu: 1. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori “Baik” (IKP 1); 2. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial (IKP 2); 3. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori “Baik” (IKP 3); 4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 4); dan 5. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik” (IKP 5). Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan terdiri dari 22 (dua puluh dua) dimensi/pilar/sektor/variabel dan 73 (tujuh puluh tiga) komponen/Indikator/SubVariabel yang memiliki jenis pembobotan berbeda setiap Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

PARAMETER PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN			
IKP	**Dimensi/Pilar/ Sektor/Variabel**	**Komponen /Indikator/ Sub Variabel**	**Bobot**
IKP I	Pemerintahan	15 Komponen	Setiap komponen yang ada pada masing-masing Dimensi memiliki 2 aspek penilaian yaitu "Pelaksanaan" dengan bobot 40% serta "Hasil & Pelaporan" dengan bobot 60%
	Hukum dan Organisasi	10 Komponen	
	Keuangan	4 Komponen	
	Perencanaan	7 Komponen	
	Pengawasan	10 Komponen	
IKP 2	Segmen Batas	Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri	40
	Rupa Bumi	Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah	40
	Terintegrasi	Segmen *Polygon* tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial	20
IKP 3	Pendidikan	3 Indikator	Sesuai SNI/ISO 37122 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator Kota Cerdas
	Kesehatan	3 Indikator	
	Perumahan	2 Indikator	
	Populasi dan Kondisi Sosial	4 Indikator	
	Keamanan	1 Indikator	
	Perencanaan Kota	4 Indikator	
IKP 4	Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada perizinan kepada DPMPTSP	25
	Non Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada non perizina kepada DPMPTSP	25
	Terintegrasi	Daerah telah menggunakan aplikasi mandiri dalam pelayanan perizinan & non perizinan	25
		Daerah telah menerapkan/menggunakan aplikasi OSS RBA dalam rangka pelayanan perizinan & non perizinan	
	Terpadu	Daerah telah mendelegasikan pelayanan dalam satu pintu	25
IKP 5	Program Penyeleggaaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Sub Variabel	40%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Sub Variabel	20%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Sub Variabel	20%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Sub Variabel	20%

Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang dari setiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: $ITKK = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_n$ **atau** $ITKK = W_1P_1 + w_2P_2 + w_3P_3 + \cdots + w_nP_n$ Ket: ITKK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan I_n : Skor indikator ke-n W_n : Penimbang parameter indikator ke-n P_n : Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dst.) ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kab/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan klasifikasi sebagai berikut: Kategori Penilaian IPT: - Sangat Baik = 75 – 100 - Baik = 50 – 74 - Cukup Baik = 1 – 49 - Belum Mengisi = 0
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 40

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 23

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: 1. RB General (100%) terdiri dari: a. Strategi Pelaksanaan RB General 10% b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 40% c. Capaian Sasaran Strategis RB 50% 2. RB Tematik (10%) terdiri dari: a. Pengentasan Kemiskinan 2% b. Realisasi Investasi 2% c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting 2% d. Prioritas Aktual Presiden terdiri dari: 1) Penggunaan Produk Dalam Negeri 2% 2) Pengendalian Inflasi 2% Didukung dengan kegiatan, antara lain: 1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri 2. Melakukan sosialisasi ke seluruh komponen Kemendagri 3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri 4. Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun 5. Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB 6. Mengisi rencana aksi capaian pada Portal RB Nasional Kemenpan RB 7. Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB 8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB 9. Melaksanakan entry meeting pelaksanaan RB 10. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB 11. Melaksanakan exit meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Kementerian Pan-RB
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	Penilaian Eksternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	83,01

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 24

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
Indikator Kinerja Utama	**Indeks pengawasan Internal**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahaan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	1. BPK RI (Opini laporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%) 2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%) 3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%) 4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%) 5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%) Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 100 (Sangat Baik)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 25

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahaan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	**Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (Bobot 40%) 2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot 40%) 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%) Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot. Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemndagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 83 (Baik)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 26

Sasaran Strategis	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
Indikator Kinerja Utama	**Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, berupa disposisi Mendagri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{Jumlah\ Disposisi\ Rekomendasi\ yang\ disampaikan\ Mendagri\ ke\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ disampaikan\ kepada\ Mendagri} X\ 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Sumber Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	40%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis 1:
Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Indikator Sasaran:
- Indeks Demokrasi Indonesia
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Indikator Sasaran:
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Harmoni Indonesia

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional
Indikator Sasaran:
- Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Indikator Sasaran:
- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"

Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Indikator Sasaran:
- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah
Indikator Sasaran:
- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
Indikator Sasaran:
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase capaian penerapan SPM di daerah
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 8:
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan
Indikator Sasaran:
- Persentase cakupan layanan ndaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Indikator Sasaran:
- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Indikator Sasaran:
- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas
Indikator Sasaran:
- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:
Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
Indikator Sasaran:
- Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri

Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang tergambarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana data berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25	Nilai 80,41	101,46%
		Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	Nilai 76,45	117,62%
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 73,13	Nilai 70,47	96,36%
		Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6	Nilai 7,13	118,83%
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	Nilai 76,83	120%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	100 Daerah	100 Daerah	100%
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	70,87%	101,24%
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	Level 3 72,97%	81,08%
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (90%)	Level 3 71,95%	79,94%
		Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	Nilai 3,69	105,43%
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 73,63 (Tinggi)	92,04%

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 3,04	89,15%
		Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah	80%	83,23%	104,04%
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 86,56	108,20%
		Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2,5%	12,23%	120%
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	Nilai 69,18	106,43%
		Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	30%	74,53%	120%
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100	Nilai 82,06	82,06%
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	Nilai 80,63 (B)	94,86%
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100,23%	103,33%
		Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	4.959 Lembaga Pengguna	120%
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	Nilai 40	100%
10	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01	Nilai 84,19	101,42%

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 91,18	91,18%
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	Nilai 73,55	88,61%
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Direkomendasikan dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	56,25%	120%

Catatan:

Capaian Tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 120%. Untuk capaian riil tertuang dalam penjelasan masing-masing IKU pada BAB III .

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (konvensional) sampai bentuk yang tidak resmi (inkonvensional). Pada saat ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Aspek yang termasuk didalamnya antara lain "Pembangunan Politik" yang mempunyai beberapa segi diantaranya pelibatan partisipasi politik. Sasaran strategis "Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia" diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik.

Untuk mencapai Sasaran "Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia" yang capaian kinerjanya diukur dari 3 Indikator Kinerja yaitu: (1) Indeks Demokrasi Indonesia, indikator ini telah dilembagakan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. Dalam pengukurannya, IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dan didapatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 80,41 yang terealisasi sebesar 101,46%; (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu, Indikator ini baru dapat diukur pada tahun 2024 pada saat penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu; dan (3) Indeks Kinerja Ormas, menggunakan 3 indikator dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi. Dari pemetaan 3 provinsi yang diukur (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten) didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 76,45 yang terealisasi sebesar 117,62%.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia"** diperoleh sebesar **109,54%** sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil** Hal ini didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori	Keterangan
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25	Nilai 80,41	101,46%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	-	-	-	-	Indikator ini baru dapat diukur pada tahun 2024 pada saat penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu
3	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	Nilai 76,45	117,62%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-
Kinerja Sasaran Strategis				**109,54%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**	-

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik Indonesia yang diukur sejak tahun 2009. Ukuran ini telah dilembagakan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa. Dengan demikian ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila. Dalam pengukuran IDI, Badan Pusat Statitik (BPS) melakukan penilaian menggunakan 3 aspek IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dengan rincian sebagai berikut:

1. Aspek Kebebasan
   Penilaian terhadap Aspek Kebebasan di derivasi menjadi 7 (tujuh) indikator, yaitu:
   a. Indikator 1, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara,
   b. Indikator 2, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat,
   c. Indikator 3, terjaminnya kebebasan berkeyakinan,
   d. Indikator 4, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan,
   e. Indikator 5, terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu,
   f. Indikator 6, pemenuhan hak-hak pekerja, dan
   g. Indikator 7, pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

   Pada Aspek Kebebasan, indikator 1, indikator 2, indikator 4, dan indikator 5 merupakan dimensi politik, indikator 3 merupakan dimensi sosial, dan indikator 6 merupakan dimensi ekonomi. Sedangkan indikator 7 tercakup ke dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi.

2. Aspek Kesetaraan
   Aspek Kesetaraan tidak hanya berfokus pada aspek politik saja, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Kesetaraan merupakan kunci untuk menjamin terbukanya akses bagi semua kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumber daya pada sekelompok warga tertentu. Aspek Kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor. Sumber daya dalam hal ini dapat berupa kebijakan, anggaran, pelayanan, afirmasi dan penghormatan hak, dan sebagainya yang ditujukan untuk memampukan kelompok-kelompok minoritas agar berdaya.
   a. Indikator 8 (kesetaraan *gender*),
   b. Indikator 9 (partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan);,
   c. Indikator 10 (anti monopoli sumber daya ekonomi),
   d. Indikator 11 (akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial),
   e. Indikator 12 (kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah),
   f. Indikator 13 (akses Masyarakat terhadap informasi publik), dan
   g. Indikator 14 (kesetaraan dalam pelayanan dasar).

Pada Aspek Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator di mana dimensi ekonomi diukur melalui 3 (tiga) indikator, dimensi politik diukur menggunakan 2 (dua) indikator, serta dimensi sosial diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator. Di samping itu, terdapat satu indikator lainnya yaitu kesetaraan gender yang mencakup ketiga dimensi.

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
   Salah satu komponen penting dari demokrasi adalah kapasitas Lembaga demokrasi yang ada di sebuah negara. Keberlangsungan demokrasi yang baik sangat bergantung pada kapabilitas lembaga yang ada. Dalam konteks kapasitas, aspek ini mencoba mengukur bagaimana peran, kinerja dan kualitas Lembaga demokrasi seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Pada aspek ini hampir seluruhnya adalah aspek politik kecuali pada indikator 19 di mana pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat selain ditentukan oleh kebijakan pemerintah (politik) juga terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:
   a. Indikator 15, Kinerja Lembaga Legislatif,
   b. Indikator 16, Kinerja Lembaga Yudikatif,
   c. Indikator 17, Netralitas Penyelenggara Pemilu,
   d. Indikator 18, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah,
   e. Indikator 19, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup Masyarakat,
   f. Indikator 20, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah,
   g. Indikator 21, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan
   h. Indikator 22, Pendidikan politik pada kader partai politik.

Capaian IDI yang dituangkan pada Laporan ini merupakan capaian tahun 2022 dikarenakan penghitungan IDI Tahun 2023 dilakukan di tahun 2024 dan saat ini sedang dalam proses.

Pengukuran IDI Tahun 2022 menghasilkan gambaran mengenai wajah terkini demokrasi di Tanah Air, khususnya berkenaan dengan pentingnya revitalisasi kapasitas lembaga demokrasi di daerah. Fokus ini diambil karena performa lembaga demokrasi di daerah masih cenderung lemah merujuk pada hasil pengukuran IDI 2022. Peran lembaga-lembaga demokrasi di daerah perlu diperkuat, khususnya lembaga legislatif dan partai politik. Hal ini karena kedua lembaga tersebut menjadi wadah dan sarana utama dalam menjaring partisipasi politik masyarakat. Melalui dua institusi ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diproses, dan diformulasikan menjadi kebijakan publik. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, pada hakikatnya masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan. Pada satu sisi, lembaga ini juga merupakan tonggak dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis karena mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan melalui mekanisme *check and balances*.

Pada pengukuran IDI, terdapat 3 (tiga) aspek yang digunakan, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang dijabarkan dalam 22 indikator. Hasil pengukuran IDI 2022 menunjukkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran IDI 2022 tingkat nasional mendapatkan skor 80,41 yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,29 poin dengan rincian:
1. Aspek Kebebasan sebesar 82,80.
2. Aspek Kesetaraan sebesar 80,28.
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 78,22;

Pada tingkat pusat, secara keseluruhan hasil pengukuran IDI 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, dari 81,33 menjadi 84,29 dengan rincian:
1. Aspek Kebebasan sebesar 85,59.
2. Aspek Kesetaraan sebesar 81,47.
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 85,39.

Kenaikan hasil pengukuran IDI 2022 juga terjadi pada tingkat provinsi (rata-rata), yaitu dari 76,08 menjadi 77,95 dengan rincian:
1. Aspek Kebebasan sebesar 80,39.
2. Aspek Kesetaraan sebesar 79,52.
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 73,66.

Secara nasional, Nilai IDI 2022 dihitung secara agregat dengan komposisi 65% Nilai IDI Provinsi dan 35% Nilai IDI Pusat sehingga didapatkan adalah 80,41 yang berkategori tinggi (skor >80). Kategori nilai tinggi pun berlaku untuk hasil pengukuran IDI pada tingkat pusat yang memiliki skor 84,29. Sedangkan, IDI tingkat provinsi mendapatkan skor 76,08 (rata-rata) sehingga masuk pada kategori sedang.

Tabel 3.2
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

INDIKATOR		DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KEBEBASAN					
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Agregasi provinsi	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Jumlah pemda yang memiliki aturan diskriminatif/juml ah pemda	Perda/Pergub/ SE	Jumlah UU/aturan yang dikaji Komnas HAM per jumlah K/L	Komnas HAM
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Kasus pelanggaran pemilu/100.000 pemilih	Bawaslu	Agregasi provinsi	Bawaslu
6	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Persentase pekerja yang memiliki (semua) jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua	Sakernas BPS	Agregasi provinsi	Sakernas BPS
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi	Dewan Pers	Indeks Kemerdekaan Pers Nasional	Dewan Pers
ASPEK KESETARAAN					
8	Kesetaraan *Gender*	Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG)	Badan Pusat Statistik	Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG)	Badan Pusat Statistik
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai forum DPRD (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap jumlah kursi DPRD	Sekertariat DPRD Provinsi	Prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPR dan DPD terhadap jumlah kursi DPR dan DPD.	Sekertariat DPR dan DPD RI
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Indeks Persaingan Usaha Provinsi	KPPU	Indeks Persaingan Usaha Nasional	KPPU
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi	Susenas BPS	Agregasi provinsi	Susenas BPS
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik

INDIKATOR		DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KESETARAAN					
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan dasar Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI					
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Persentase Perda/ UU yang disahkan terhadap target Propemperda	Sekretariat DPRD	Persentase UU disahkan trehadap target Prolegnas Prioritas Tahunan	Sekretariat DPR
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan	Mahkamah Agung	Persentase putusan terhadap beban di MA dan MK	Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstutisi
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaran pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah kabupaten/kota	Bawaslu	Rasio putusan yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu tingkat pusat per/ total penyelenggara pemilu	DKPP
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah kab/kota	PTUN	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah K/L	PTUN
19	Jaminan pemerintah/ pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	KLHK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	KLHK
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah	Persentase informasi APBD yang tersedia di *website*	Pemda	Persentase informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu	Kemenkeu
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Provinsi	Kemenpan RB	Indeks Pelayanan Publik K/L	Kemenpan RB
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD	- Surat Kabar - Portal Berita *Online* - Kemendagri/ Bakesbangpol	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPR oleh kepengurusan lingkup nasional terhadap jumlah partai politik di DPR	- Surat Kabar - Portal Berita *Online* - Kemendagri

*Pada Indikator yang Bewarna Biru merupakan Indikator yang dipengaruhi langsung oleh Kinerja Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan pada tabel indikator IDI diatas, dapat dilihat bahwa dari 22 indikator tersebut, ada 13 indikator yang dipengaruhi langsung oleh Kinerja Kementerian Dalam Negeri. Pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Kementerian Dalam Negeri turut menyediakan data pendukung terhadap 3 (tiga) indikator yang dimana data pendukung tersebut akan menjadi dasar dalam perhitungan capaian IDI. 3 (tiga) indikator tersebut antara lain:

1. Indikator nomor 18 "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah" yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
2. Indikator nomor 20 "Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah", yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
3. Indikator nomor 22 "Pendidikan Politik pada kader partai politik", yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam melakukan penghitungan dengan metode baru, IDI menggunakan 3 jenis indeks, yaitu Indeks Demokrasi di Tingkat Provinsi, Indeks Demokrasi di Tingkat Pusat, dan Indeks Demokrasi di Tingkat Nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat. Penghitungan IDI dilakukan melalui empat tahap penghitungan, yaitu penghitungan IDI untuk setiap provinsi, penghitungan IDI provinsi, penghitungan IDI pusat, dan penghitungan IDI nasional.

1. Perhitungan IDI tiap Provinsi:
   Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator di tingkat provinsi. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \text{x } 100$$

   Keterangan:
   Xijk: tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.
   Xideal : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator Xijk
   Xterburuk : tingkat capaian terburuk dari indikator Xijk
   Sehingga persamaan (2) menghasilkan nilai 0 ≤ Indeks (Xijk) ≤ 100;
   Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^{3} P_j I(A_{ij})$$

   Keterangan:
   IDIi : Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi ke-i
   Pj : Nilai penimbang dari aspek ke-j
   I (Aij) : Indeks provinsi ke-i aspek ke-j
   j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi

2. Perhitungan IDI Provinsi (rata-rata)
   Indeks Provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari indikator provinsi. Langkah pertama, indikator provinsi didapatkan dari rata-rata skor indikator semua provinsi dengan rumus sebagai berikut:

$$I\left(X_{jk_{provinsi}}\right) = \frac{\sum_{i=1}^{n} I\,(X_{ijk})}{n_i}$$

   Keterangan:
   I (Xjk_provinsi) : Skor indikator ke-k di aspek ke-j untuk seluruh provinsi
   I (Xijk) : Skor Indikator ke-k di aspek ke-j pada provinsi ke-i
   ni : jumlah provinsi
   Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I\left(A_{j_provinsi}\right) = \sum_{k=1}^{n} P_{jk} I(X_{jk})$$

   Keterangan:
   I (Aj_provinsi) : Indeks aspek ke-j
   Pjk : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
   I (Xjk) : Indeks indikator komponen penyusun IDI aspek ke-j, indikator ke-k
   Langkah ketiga adalah menghitung IDI provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{provinsi} = \sum_{j=1}^{3} P_j I(A_{j_provinsi})$$

Keterangan:
IDI provinsi : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi
Pj : Nilai penimbang aspek ke-j
I (Aj_provinsi) : Indeks aspek ke-j
j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi

3. Perhitungan IDI Pusat
Langkah pertama adalah penghitungan indeks tiap-tiap indikator pada tingkat pusat. Indikator pusat hanya dihitung untuk indikator yang memiliki data untuk pusat. Sebagai contoh, pada indikator 2 hambatan kebebasan yang dilakukan masyarakat tidak tersedia data pusat karena tidak ada masyarakat di tingkat pusat. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:

$$I(X_{jk_pusat}) = \frac{(X_{jk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \text{x } 100$$

Xjk_pusat : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-j, indikator ke-k Xideal : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator Xjk Xterburuk : tingkat capaian terburuk dari indikator Xjk Sehingga persamaan (8) menghasilkan nilai 0 ≤ Indeks (Xjk) ≤ 100; Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
I (Aj_pusat) : Indeks aspek ke-j
Pjk : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
I (Xjk) : Indeks indikator komponen penyusun IDI pusat aspek ke-j, indikator ke-k
Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat pusat yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^{3} P_j I(A_{j_pusat})$$

Keterangan:
IDI pusat : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat pusat
Pj : Nilai penimbang aspek ke-j
I (Aj_pusat) : Indeks aspek ke-j
j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^{3} P_j I(A_{j_pusat})$$

Tabel 3.3
Kategorisasi Rentang Nilai Indeks Demokrasi Indonesia

Kategorisasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Aspek Kesetaraan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kebebasan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	<60	60 – 80	>80

Pemerintah dapat melihat berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau peningkatan kinerja yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada pada data IDI 2022 sebagai acuan program penguatan demokrasi. Pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat yang masih terjadi sebagai prioritas. Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pada aspek kesetaraan, indikator anti monopoli sumber daya ekonomi merupakan indikator dengan skor terendah di IDI Provinsi. Ini menunjukkan pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, indikator yang perlu mendapat perhatian di aspek

ini adalah akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan pada instansi pemerintah untuk menyediakan informasi publik sebagaimana amanat Indang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemerintah perlu memberikan perhatian pada indikator pendidikan politik pada kader partai politik.

Tabel 3.4
Angka Indikator Aspek Kebebasan IDI Tahun 2022

Provinsi	Aspek 1	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5	Indikator 6	Indikator 7
D.I.Yogyakarta	87.35	93.02	100.00	88.36	100.00	70.39	76.06	78.86
Jawa Timur	88.48	98.09	96.81	95.75	97.44	98.07	51.43	72.88
Jawa Tengah	88.83	93.54	96.41	96.41	94.44	94.18	58.63	80.99
Kalimantan Timur	91.40	92.78	81.95	100.00	90.91	97.97	89.50	83.78
Jawa Barat	90.61	98.33	98.61	94.43	85.71	95.95	77.27	81.53
Bali	85.78	93.98	69.88	100.00	90.00	99.24	56.83	79.78
DKI Jakarta	87.39	94.95	87.38	70.56	100.00	98.05	83.39	79.42
Kalimantan Barat	91.35	100.00	87.31	100.00	100.00	98.79	61.68	82.32
Sulawesi Tengah	81.69	71.93	29.83	100.00	100.00	98.16	80.64	81.94
Kalimantan Selatan	80.70	86.35	100.00	100.00	35.71	97.28	67.79	78.58
Aceh	84.66	78.66	86.66	91.11	95.83	98.07	61.35	76.39
Sumatera Selatan	86.78	93.45	100.00	89.08	88.89	94.73	54.61	81.40
Sulawesi Tenggara	87.49	100.00	100.00	100.00	83.33	69.26	71.66	80.47
Sulawesi Selatan	83.39	82.08	77.60	95.02	84.00	94.41	68.43	77.28
Sumatera Utara	87.66	96.21	90.52	93.68	94.12	96.68	59.21	75.92
Kalimantan Tengah	82.05	89.81	74.52	83.01	100.00	48.67	88.80	83.23
Kalimantan Utara	77.93	61.08	2.69	100.00	100.00	98.17	93.25	81.43
Kepulauan Riau	88.34	100.00	66.50	100.00	87.50	77.68	100.00	80.95
Banten	83.80	97.70	100.00	92.33	33.33	97.80	98.31	74.50
Lampung	79.90	60.62	92.43	100.00	81.25	94.41	45.68	79.20
Sulawesi Utara	77.76	79.72	74.66	66.21	100.00	58.45	85.07	79.36
Nusa Tenggara Timur	89.06	94.56	86.40	90.93	100.00	99.55	68.39	78.24
Sumatera Barat	78.01	95.08	100.00	75.38	50.00	77.29	72.10	78.72
Jambi	77.13	84.47	100.00	87.06	66.67	57.49	54.52	83.68
Kep. Bangka Belitung	66.36	81.43	7.16	100.00	62.50	47.59	72.27	76.19
Maluku	74.49	54.92	62.43	100.00	83.33	49.70	87.94	77.28
Sulawesi Barat	67.78	59.66	0.00	100.00	42.86	99.16	84.97	82.53
Gorontalo	65.31	100.00	100.00	0.00	71.43	47.95	76.65	75.61
Riau	84.46	95.59	88.98	77.97	76.92	91.76	79.03	82.01
Nusa Tenggara Barat	76.75	89.48	60.54	91.23	72.73	78.27	54.78	79.62
Bengkulu	68.95	72.70	100.00	31.75	90.91	47.67	69.63	77.52
Papua	67.23	0.00	0.00	100.00	100.00	99.48	94.32	75.57
Papua Barat	53.64	51.27	0.00	18.78	85.71	66.21	91.86	69.23
Maluku Utara	70.84	0.00	100.00	100.00	100.00	49.30	79.15	69.84
Indonesia	81.83							
Rata-rata Provinsi	80.39	80.63	74.10	86.15	83.69	82.00	73.98	78.71
Pusat	86.59	88.51		92.34	88.51			75.92

Tabel 3.5
Angka Indikator Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2022

Provinsi	Aspek 2	Indikator 8	Indikator 9	Indikator 10	Indikator 11	Indikator 12	Indikator 13	Indikator 14
D.I.Yogyakarta	88.76	100.00	100.00	75.00	93.07	95.94	78.00	85.56
Jawa Timur	82.12	98.14	100.00	68.50	72.82	94.51	77.26	76.81
Jawa Tengah	82.73	97.29	86.67	74.67	77.48	94.43	79.27	77.66
Kalimantan Timur	79.25	88.21	100.00	66.17	67.18	94.29	79.05	72.86
Jawa Barat	82.61	93.92	100.00	75.00	71.58	91.69	85.05	71.94
Bali	83.90	95.33	100.00	62.67	80.24	95.20	84.11	81.56
DKI Jakarta	85.34	99.30	100.00	76.83	82.08	92.82	80.66	74.28
Kalimantan Barat	78.58	96.50	100.00	64.83	60.93	94.89	79.55	70.68
Sulawesi Tengah	81.51	100.00	100.00	57.83	82.72	97.00	74.33	71.46
Kalimantan Selatan	80.86	98.64	100.00	67.00	73.06	95.26	70.92	74.58
Aceh	80.10	84.29	69.14	58.50	97.48	93.83	82.93	74.18
Sumatera Selatan	80.86	98.76	100.00	73.17	66.21	95.37	72.50	74.45
Sulawesi Tenggara	85.83	97.21	100.00	72.83	85.79	96.64	80.28	76.23
Sulawesi Selatan	86.09	100.00	100.00	76.50	88.08	95.49	72.61	77.02
Sumatera Utara	77.71	91.43	86.00	69.67	66.51	93.84	73.53	74.11
Kalimantan Tengah	77.61	100.00	100.00	55.67	61.87	95.74	80.38	69.45
Kalimantan Utara	80.88	81.65	100.00	61.83	82.99	95.67	79.40	72.04
Kepulauan Riau	76.05	77.87	88.89	64.50	65.59	91.77	78.37	74.92
Banten	80.84	90.40	100.00	74.83	67.82	91.91	78.07	74.14
Lampung	79.37	89.99	100.00	66.50	69.21	95.48	70.40	76.77
Sulawesi Utara	82.80	100.00	100.00	67.33	78.67	93.39	77.65	74.42
Nusa Tenggara Timur	74.43	99.19	30.77	67.00	85.21	96.46	77.42	64.61
Sumatera Barat	79.85	86.35	100.00	70.00	70.51	93.72	75.80	73.15
Jambi	74.04	89.49	100.00	54.83	50.02	95.41	76.36	73.43
Kep. Bangka Belitung	78.11	76.75	100.00	64.50	68.23	95.23	79.70	72.67
Maluku	79.72	98.89	100.00	59.33	71.89	93.12	77.91	72.30
Sulawesi Barat	83.46	87.76	100.00	70.00	91.67	97.66	71.69	69.78
Gorontalo	82.21	93.89	100.00	53.17	89.18	97.42	82.22	70.01
Riau	70.53	93.84	46.15	60.83	56.24	95.63	79.59	72.80
Nusa Tenggara Barat	77.24	70.51	67.69	64.00	81.29	97.11	83.72	76.85
Bengkulu	81.29	92.48	100.00	64.67	70.18	96.41	83.46	75.59
Papua	67.85	90.54	100.00	57.50	39.86	97.17	63.03	50.22
Papua Barat	74.47	81.67	85.71	51.17	80.26	94.63	67.60	68.26
Maluku Utara	66.83	100.00	44.44	53.67	53.83	96.02	60.08	74.36
Indonesia	80.11							
Rata-rata Provinsi	79.52	92.36	91.34	65.31	73.52	95.03	76.85	73.21
Pusat	81.47	100.00	70.16				75.35	

Tabel 3.6
Angka Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Tahun 2022

Provinsi	Aspek 3	Indikator 15	Indikator 16	Indikator 17	Indikator 18	Indikator 19	Indikator 20	Indikator 21	Indikator 22
D.I.Yogyakarta	80.17	30.77	86.79	75.00	100.00	65.96	85.71	92.20	100.00
Jawa Timur	84.77	42.42	87.19	84.62	97.44	69.92	100.00	91.60	100.00
Jawa Tengah	83.25	52.00	86.29	87.50	73.61	66.85	100.00	90.80	100.00
Kalimantan Timur	81.06	57.14	86.03	77.27	68.18	74.46	100.00	80.00	100.00
Jawa Barat	77.05	76.92	83.26	53.57	33.93	64.66	100.00	92.40	100.00
Bali	79.83	50.00	84.71	70.00	80.00	70.89	100.00	80.00	100.00
DKI Jakarta	73.12	46.15	75.89	64.29	42.86	54.65	100.00	88.00	100.00
Kalimantan Barat	75.23	63.64	89.50	6.67	83.33	71.90	100.00	88.40	100.00
Sulawesi Tengah	79.46	100.00	84.37	89.29	0.00	78.66	100.00	70.80	100.00
Kalimantan Selatan	81.01	73.68	92.04	53.57	67.86	71.97	100.00	85.40	100.00
Aceh	77.90	50.00	92.73	64.58	81.25	78.29	100.00	80.20	66.67
Sumatera Selatan	74.15	100.00	87.99	52.78	30.56	72.12	100.00	90.60	40.00
Sulawesi Tenggara	66.74	50.00	87.35	61.11	66.67	76.88	42.86	86.60	49.09
Sulawesi Selatan	69.66	56.25	87.34	36.00	36.00	74.17	100.00	86.80	61.82
Sumatera Utara	73.71	28.12	86.22	64.71	60.29	74.11	85.71	80.00	100.00
Kalimantan Tengah	78.62	35.00	86.97	93.33	96.67	76.62	71.43	69.80	100.00
Kalimantan Utara	77.13	18.52	85.22	100.00	75.00	80.67	100.00	76.00	65.00
Kepulauan Riau	72.60	46.15	83.94	87.50	93.75	74.17	57.14	86.80	40.00
Banten	71.27	100.00	77.49	0.00	55.56	63.41	100.00	79.80	100.00
Lampung	75.52	40.00	86.17	87.50	50.00	69.10	71.43	86.20	100.00
Sulawesi Utara	73.20	45.45	87.31	78.13	71.88	72.37	57.14	82.80	82.22
Nusa Tenggara Timur	70.83	69.23	86.09	86.96	76.09	73.49	42.86	56.20	80.00
Sumatera Barat	73.69	58.33	83.04	87.50	35.00	74.98	100.00	76.80	53.33
Jambi	81.01	58.18	90.99	83.33	54.17	70.32	100.00	80.80	100.00
Kep. Bangka Belitung	85.05	87.50	88.78	100.00	31.25	71.67	100.00	89.00	97.78
Maluku	70.69	78.95	90.28	37.50	70.83	77.69	100.00	78.20	20.00
Sulawesi Barat	68.90	66.67	89.77	21.43	100.00	76.77	100.00	69.80	24.00
Gorontalo	71.92	53.33	84.99	85.71	50.00	79.79	85.71	86.80	24.00
Riau	66.69	33.33	85.04	30.77	23.08	72.10	100.00	74.20	100.00
Nusa Tenggara Barat	65.44	28.57	86.06	54.55	18.18	70.56	100.00	74.20	66.67
Bengkulu	67.81	43.75	86.23	63.64	22.73	70.82	100.00	88.00	36.36
Papua	64.63	16.22	91.45	85.00	88.33	81.46	42.86	65.00	33.85
Papua Barat	61.77	52.00	96.58	64.29	92.86	84.22	0.00	78.40	16.36
Maluku Utara	50.47	40.00	87.93	0.00	63.64	78.84	0.00	83.80	40.00
Indonesia	78.22								
Rata-rata Provinsi	73.66	54.36	86.82	64.36	61.50	73.07	83.61	81.36	73.45
Pusat	85.39	60.00	99.02	91.67	53.45		100.00	82.60	100.00

Rendahnya skor pada indikator ini merupakan indikasi lemahnya partai politik dalam mempersiapkan kader yang nantinya akan duduk pada jabatan-jabatan publik. Pemerintah dapat melakukan penguatan parpol dengan dukungan pendanaan dan pendampingan pada penggunaaanya, sehingga pendidikan politik pada kader bisa optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu bersinergi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tata kelola yang lebih baik agar secara nasional netralitas penyelenggara pemilu semakin meningkat.

Alternatif solusi serta upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bentuk perhatian dalam membantu menjaga stabilitas demokrasi ialah melakukan koordinasi dengan intens kepada Kementerian/Lembaga terkait dan dengan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun kegiatan (asistensi) terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk konfirmasi, diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan capaian IDI tahun 2023 yang akan dilakukan penilaian pada tahun 2024 termasuk melihat Proyeksi IDI kedepan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dari hasil analisis **efisiensi penggunaan sumber daya** terhadap keberhasilan IDI, Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing Pemerintah Provinsi baik itu Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga vertikal yang berada di daerah sudah relatif baik, namun perlu ditingkatkan lagi khususnya pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap masing-masing indikator yang menjadi penilaian sehingga data yang disajikan pada saat proses pelaksanaan penilaian IDI bisa terverifikasi, tervalidasi serta maksimal untuk meningkatkan capaian IDI pada tahun berikutnya.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian target nilai IDI Tahun 2022:

1. Secara keseluruhan, nilai indikator pada Aspek Kebebasan tahun 2022 tidak ada yang berada pada kategori rendah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Pada tingkat provinsi, indikator yang masih berada pada kategori sedang adalah indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; pemenuhan hakhak pekerja; dan kebebasan pers. Sedangkan pada tingkat pusat, indikator yang masih berada pada kategori sedang adalah indikator kebebasan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Secara keseluruhan, nilai indikator pada Aspek Kesetaraan tahun 2022 tidak ada yang berada pada kategori rendah, baik di tingkat Pusat maupun provinsi. Pada tingkat Pusat, terdapat 1 (satu) indikator yang berada pada kategori tinggi, yakni Kesetaraan *Gender*. Selanjutnya, indikator yang memperoleh kategori sedang, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Memengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik. Meskipun, capaian ini dalam kategori sedang, diperlukan upaya bersama untuk menjalankan demokrasi yang lebih inklusif. Masyarakat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan.
3. Masih pada capaian Indikator Aspek Kesetaraan, di tingkat provinsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian pada aspek kesetaraan menunjukan perbaikan. Hal itu dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah provinsi yang meraih kategori tinggi. Perkembangan IDI 2022 Aspek Kesetaraan menunjukkan hasil yang menarik. Terdapat 10 (sepuluh) provinsi yang meraih peningkatan dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, yaitu Sulawesi Selatan (86,09), Bali (83,90), Sulawesi Utara (82,80), Jawa Tengah (82,73), Sulawesi Tengah (81,51), Bengkulu (81,29), Sumatera Selatan (80,86), Kalimantan Selatan (80,86), dan Banten (80,84). Namun, ada 2 (dua) provinsi yang mengalami penurunan kategori dari tinggi menjadi sedang, yaitu Lampung (79,37) dan Nusa Tenggara Barat (77,24). Secara khusus perlu perhatian pemerintah pada capaian Aspek Kesetaraan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami penurunan skor cukup tajam dibandingkan IDI 2021, sebelumnya meraih skor 80,15 menjadi 77,24.

4. Seperti halnya pengukuran Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi tahun 2021, aspek ini hanya mengukur 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator. Indikator Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat merupakan satu-satunya indikator yang tidak dihitung pada tingkat pusat namun dihitung di tingkat provinsi. Indikator Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat tidak dihitung pada tingkat pusat dikarenakan tidak tersedianya data di tingkat pusat.
5. Hasil pengukuran Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Tahun 2023 terhadap IDI Tahun 2022 mencatat 5 (lima) indikator mendapatkan nilai dengan kategori tinggi dengan capaian berkisar antara 80,00 sampai 100,00, yaitu indikator 16 (Kinerja Lembaga Yudikatif), 17 (Netralitas Penyelenggara Pemilu), 20 (Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/APBD oleh pemerintah), 21 (Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik) dan 22 (Pendidikan politik pada kader partai politik).
6. Sehubungan dengan indikator 22 (Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik), Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyediakan Bantuan Partai Politik yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai, masyarakat serta dapat menjadi dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik. Bantuan Partai Politik dimaksud nantinya akan berdampak pada pencapaian nilai IDI khususnya pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Penyaluran Bantuan Partai Politik yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Jumlah Bantuan Dana Partai Politik Tahun 2022 dan 2023

No.	Nama Partai Politik	2022	2023	Total
1	PDI-Perjuangan	27.053.961.000	27.053.961.000	54.107.922.000
2	Partai Gerindra	17.594.839.000	17.594.839.000	35.189.678.000
3	Partai Golkar	17.229.789.000	17.229.789.000	34.459.578.000
4	PKB	13.570.097.000	13.570.097.000	27.140.194.000
5	Partai Nasdem	12.661.792.000	12.661.792.000	25.323.584.000
6	PKS	11.493.663.000	11.493.663.000	22.987.326.000
7	Partai Demokrat	10.876.507.000	10.876.507.000	21.753.014.000
8	PAN	9.572.623.000	9.572.623.000	19.145.246.000
9	PPP	6.323.147.000	6.323.147.000	12.646.294.000
Total		**126.376.418.000**	**126.376.418.000**	**252.752.836.000**

7. Pada aspek ini juga terdapat 1 (satu) indikator yang berada di kategori sedang, yaitu Indikator 15 (Kinerja Lembaga Legislatif). Sementara itu masih terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah) yang masih berkategori rendah dengan capaian 53,45 atau turun sebesar 27,58 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 81,03. Indikator ini mengalami penurunan tertinggi pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Adapun program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai IDI Tahun 2022:

1. Kenaikan nilai capaian IDI tahun 2022 dibanding tahun 2021 setidaknya di pengaruhi oleh peran Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan intens kepada Kementerian/Lembaga terkait dan dengan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun kegiatan (asistensi) terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk konfirmasi, diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan capaian IDI.
2. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagan Demokrasi dan Komunikasi Sosial yang bertujuan untuk melakukan penyamaan persepsi terkait dengan indikator-indikator pada Aspek Penguatan Kelembagan Demokrasi yang dilaksanakan di Ambon.
3. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
4. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagan Demokrasi dan Komunikasi Sosial yang bertujuan untuk pemahaman terhadap informasi atau data pendukung yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penilaian IDI yang dilaksanakan di Lhoksumawe, Provinsi Aceh.
5. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat .
6. Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang telah disalurkan pada tahun 2023 disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Bendahara Umum DPP

Partai Politik bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

7. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan *Review* Peraturan tentang Partai Politik dalam rangka optimalisasi bantuan keuangan kepada Partai Politik serta mendorong terwujudnya tertib administrasi dan transparansi tata kelola keuangan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang dilaksanakan di Padang.
8. Forum Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa Melalui Forum Demokrasi yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi politik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 terutama untuk Generasi Milenial dan Generasi Z di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
9. Forum Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa Melalui Forum Demokrasi yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi politik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 terutama untuk Generasi Milenial dan Generasi Z yang dilaksanakan di Kota Semarang.
10. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda yang dilaksanakan di Bali.
11. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda yang dilaksanakan yang dihadiri oleh pemerhati perempuan, aktivis dan tokoh perempuan, kader perempuan partai politik, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar di Bali.
12. Fasilitasi Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik dalam rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan guna pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi pengurus partai politik sehingga memiliki cakrawala pandang berbangsa dan bernegara yang utuh menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Jember.

Grafik 3.1
Nilai Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2021 dan 2022

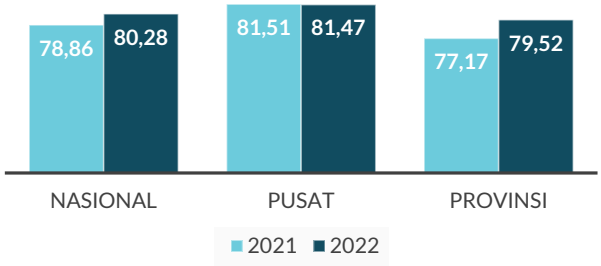

Grafik 3.2
Nilai Aspek Kebebasan Nasional dan Pusat Tahun 2021 dan 2022

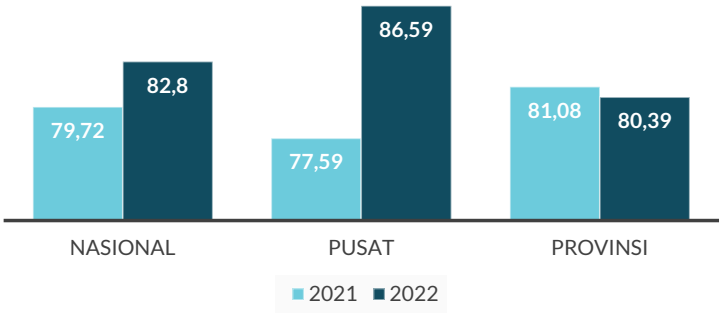

Tabel 3.8
Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Level Pusat

Indilkator IDI Pusat	Tahun	
	2021	2022
Kinerja lembaga legislatif	33,33	60,00
Kinerja lembaga yudikatif	99,10	99,02
Netralitas penyelenggara Pemilu	91,67	91,67
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah	81,03	53,45
Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat*	-	
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00	100,00
Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	80,00	80,60
Pendidikan politik pada kader partai politik	100,00	100,00

Sumber Indeks Demokrasi Indonesia
*Indikator ini tidak dihitung di tingkat pusat karena data tidak tersedia

Grafik 3.3
Nilai Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 - 2022

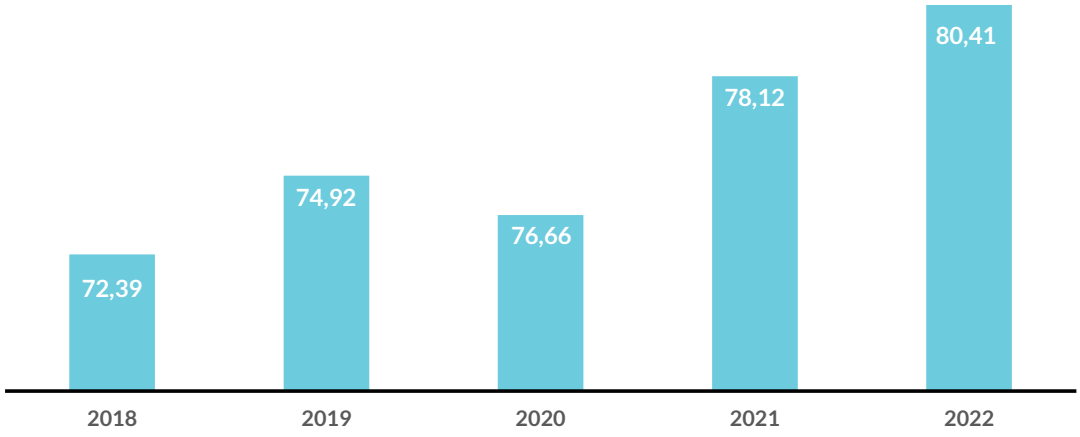

Tabel 3.9
Aspek dan Indikator dalam Pengukuran IDI

ASPEK	INDIKATOR
Kebebasan	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh masyarakat
	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu
	Pemenuhan hak-hak pekerja
	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Kesetaraan	Kesetaraan *Gender*
	Partisipasi Masyarakat Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan
	Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi
	Akses Masyarakat Pada Jaminan Sosial Dan Perlindungan Bagi Warga Miskin
	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antarwilayah
	Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
	Kesetaraan Pada Pelayanan Dasar
Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kinerja Lembaga Legislatif
	Kinerja Lembaga Yudikatif
	Netralitas Penyelenggara Pemilu
	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah
	Jaminan Pemerintah Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Ruang Hidup Masyarakat
	Transparansi Anggaran Dalam Bentuk Penyediaan Informasi Terhadap APBN/ APBD Oleh Pemerintah
	Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
	Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik

Tabel 3.10
***Timeline* Penghitungan IDI**

No	Item Pekerjaan	Waktu	Januari				Februari			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1	Melakukan identifikasi berita relevan dari hasil *scraping* portal *online*	2 minggu								
2	Melakukan perbaikan *keyword* untuk *web scraping*	1 minggu								
3	Membangun *machine learning* untuk IDI	2 minggu								
4	Melakukan *Web Scraping* Portal *Online*	3 minggu								
5	Melakukan pengajuan data pada *Subject Matter* BPS	1 minggu								
6	Melakukan permintaan data dokumen ke K/L	2 minggu								
7	Melakukan verifikasi data koran	2 minggu								
8	Melakukan verifikasi data dokumen	1 minggu								
9	Melakukan verifikasi data portal berita *online*	2 Minggu								
10	Menyiapkan data FGD IDI provinsi dan pusat	1 minggu								
11	Pelaksanaan FGD Provinsi	2 Minggu								

No	Item Pekerjaan	Waktu	Maret				April				Mei	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
12	Pelaksanaan FGD Pusat	1 minggu										
13	Melakukan verifikasi hasil FGD	1 Minggu										
14	Melakukan *matching* kasus	1 minggu										
15	Rekonsiliasi Data	1 minggu										
16	Membuat penghitungan IDI	1 minggu										
17	Menyusun tabel IDI berdasarkan provinsi serta aspek dan indikator	1 minggu										
18	Rilis IDI	1 Minggu										
19	Menyusun naskah publikasi dan infografis	4 Minggu										

Dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 menggunakan 3 indikator dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi. Indeks ini tetap menggunakan metode yang sama seperti pada Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan wilayah mana saja yang akan dijadikan basis penelitian. Peneliti dan Tim Kementerian Dalam Negeri menyepakati 3 (tiga) wilayah yang menjadi basis penelitian yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Dipilihnya ketiga wilayah ini tentu mempertimbangkan banyak hal. Satu diantaranya soal pembiayaan yang hanya mencukupi untuk ketiga wilayah tersebut. Kedua, untuk melengkapi data di Pulau Jawa, minus Daerah Istimewa Yogjakarta. Ketiga, pemilihan wilayah tersebut dapat dianggap sebagai reflektif untuk banyak hal. Seperti soal tingkat pengetahuan para ormas tentang tata kelola. Tingkat Pendidikan para ormas serta anggota didasari peluang dan kesempatan memperoleh informasi lebih mudah ketimbang wilayah lain.

Klaim bahwa pemilihan ketiga wilayah itu sebagai representasi sebaran ormas di seluruh Indonesia tentu saja tidak bisa. Jika menggunakan diksi ini maka teknik yang dipilih haruslah metode sampling, bukan sensus. Sebaliknya jika menggunakan metode sampling maka Kementerian Dalam Negeri tidak bisa mengaudit kinerja ormas itu secara menyeluruh. Soalnya, cita-cita pembuatan indeks ini sebagai salah satu alat untuk mengaudit kinerja ormas. Banyaknya jumlah ormas di ketiga provinsi tersebut, maka diambil 10 ormas badan hukum dari masing-masing provinsi, serta 33 Ormas tidak berbadan hukum yang diambil dari ketiga provinsi tersebut. Penentuan mengenai ormas mana saja yang disurvei sudah berdasarkan pada rekomendasi konsil Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hasil pemetaan Tahun 2023 secara agregrat provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dari 0-100 untuk ketiga dimensi yang diukur adalah Dimensi Kelembagaan (72,937), Dimensi Partisipasi (63,892) dan Dimensi Kerawanan (92,525). Hasil ini menunjukkan bahwa dari kedua dimensi yakni Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Partisipasi, Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih perlu perbaikan secara berkelanjutan.

Dari pemetaan 3 (tiga) Provinsi yang diukur (Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 76,45 dari target sebesar nilai 65 atau tercapai sebesar 117,62%.

Nilai Indeks Kinerja Ormas secara Nasional Tahun 2023 sebesar 76,45 berdasarkan Laporan hasil sensus Pengukuran Indeks Kinerja Ormas merupakan akumulasi dari:

1. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Banten sebesar 78,94, yang terdiri dari:
   a. Dimensi Kelembagaan 74,92
   b. Dimensi Partisipasi 65,72
   c. Dimensi Kerawanan 96,18
2. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Jawa Barat 78,05
   a. Dimensi Kelembagaan 71,75
   b. Dimensi Partisipasi 71,52
   c. Dimensi Kerawanan 90,87
3. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Jawa Tengah 62.22
   a. Dimensi Kelembagaan 72,13
   b. Dimensi Partisipasi 54,43
   c. Dimensi Kerawanan 90,51

Grafik 3.4
Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas

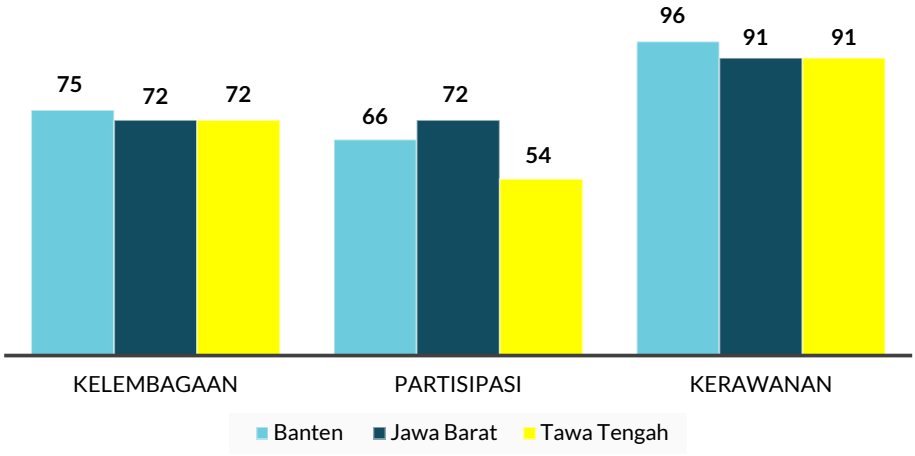

Grafik 3.5
Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas per Dimensi

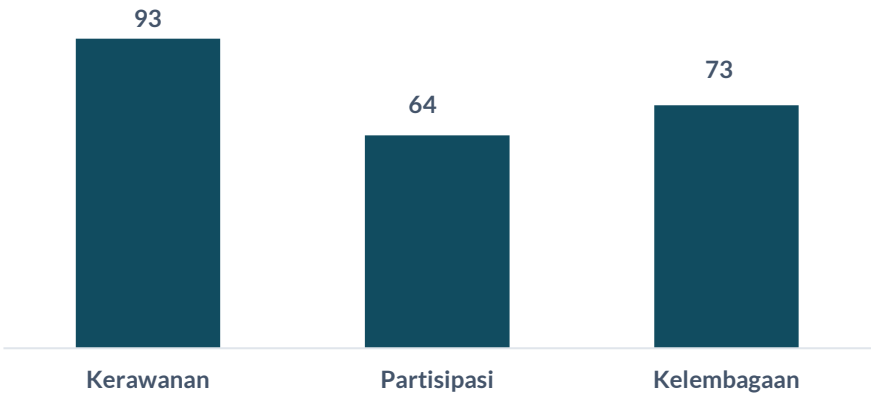

Grafik 3.6
Perbandingan Nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022 dan 2023

Adapun Formula perhitungan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n\ Total\ Indikator}{n\ Indikator} \text{x } 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n\ Total\ Indikator}{n\ Variabel} \text{x } 100\%$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n\ Total\ Indikator}{n\ Dimensi} \text{x } 100\%$$

Tabel 3.11
Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas

Kategorisasi	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
Rentang Nilai	**00 - 19**	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 100

Tabel 3.12
Dimensi, Variabel, Indikator pada Indeks Kinerja Ormas

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Kerawanan	Rekruetmen Pejabat Publik	Pejabat Publik
		Izin Tertulis dan bermaterai
	Nirsengketa	Sengketa
	Atribusi	Atribut Ormas
		Izin Atribut
	Nirvandalisme dan anarkisme	Unras
		Vandalisme Unras
		Anarkis
	Nirkonflik	Konflik
		Konflik 2
	Nonpartisan	Sanksi Administratif
		Afiliasi Parpol
Partisipasi	Pelibatan masyarakat	Peran
		Evaluasi Program
Kelembagaan	Media	Media Informasi
		Jenis Media Informasi
	Legalitas	Kesekretariatan
		Alamat 2
		Legalitas
	Organisasi	Kantor
		Kantor 2
		SOTK
		Pekerja
		Pekerja 2
		Status Hukum
		Jenis Waktu Pekerjaan
		Jenis Keanggotaan

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Kelembagaan	Pendanaan	Iuran
		Besaran Iuran
		Hasil Usaha
		Contoh Hasil Usaha
		Badan Usaha
		Terima sumbangan/bantuan/ donasi
		Besaran sumbangan/bantuan/ donasi
		Profilling sumbangan sumbangan/bantuan/donasi
		Mengikuti Kemauan Donatur
		LPJ
		Rekening Bank Nasional
	Pengawasan	Mekanisme Internal
		Contoh kasus
		Mekanisme Eksternal
		Contoh Kasus
	Program	Program Kerja
		Waktu Program Kerja
		Dasar Program Kerja
		Pelaksanaan Program Kerja

Pada Pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 masih didapatkan beberapa permasalahan, diantaranya kantor sekretariat yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang dilapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Ormas agar melaporkan keberadaan dan perubahan Alamat/ sekretariat kepada pemerintah daerah setempat.

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan pendaftaran dilakukan melalui inovasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Elektronik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. Membangun Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) yang berhasil melakukan integrasi data ormas nasional di seluruh Indonesia baik yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan), ormas tidak badan hukum dan

ormas yang didirikan warga negara asing. SIORMAS menjadi salah satu bentuk inovasi sebagai rumah besar data keormasan di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

3. Meningkatnya partisipasi Ormas yang bermitra dengan Pemerintah.
4. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pencegahan Konflik Ormas yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Tujuan agar tercipta sinergitas antara anggota Timdu Pengawasan Ormas dalam mencegah konflik Ormas menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
5. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Mitigasi Pencegahan Sengketa Ormas di Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 Juli 2023 dengan mengundang 100 Kelompok Ormas yang ditujukan sebagai bentuk langkah Kementerian Dalam Negeri untuk mitigasi terhadap sengketa internal yang terjadi pada Ormas.
6. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Pencegahan Konflik Ormas di Provinsi Banten pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan mengundang 100 Kelompok Ormas yang berada di wilayah Banten. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
7. Menyelenggarakan pertemuan terkait kemitraan Ormas Asing yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Tim Perizinan Ormas Asing dan Mitra Lokal Ormas Asing *Ford Foundation* yang dilaksanakan pada:
   a. 24 s.d. 25 Januari 2023 di Kantor Walikota Jakarta Utara.
   b. 15 Maret 2023 di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
   c. 28 November 2023 di Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Grafik 3.7
Nilai Indeks Kinerja Ormas dan Target

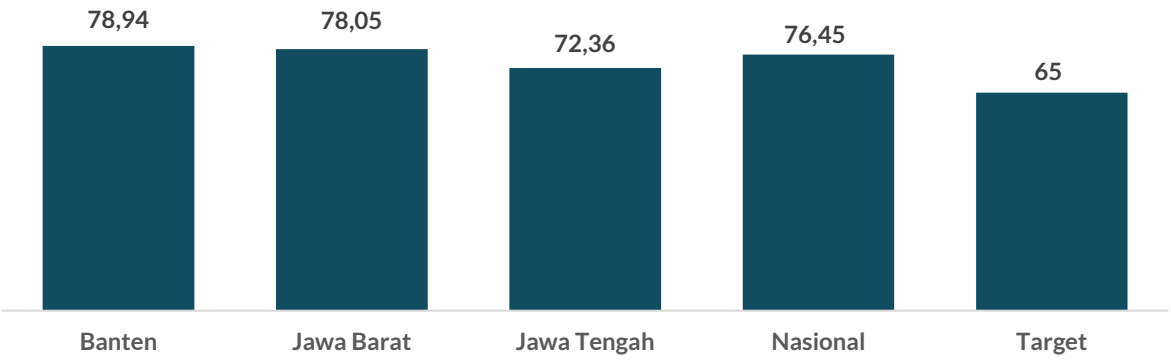

Sasaran 2 :

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa mencakup kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup serta menjadi tuntunan perilaku seluruh warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan serius dan konsisten oleh seluruh komponen bangsa, baik pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif serta elemen masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya gerakan pembangunan karakter bangsa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Revolusi mental merupakan gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam Pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan RI Tahun 1957. Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Selain itu perlu dilakukan pengukuran stabilitas sosial, keberagaman, dan toleransi antar kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya menjaga keberagaman dan mencegah konflik sosial, pemerintah dan berbagai lembaga di Indonesia dapat menggunakan Indeks Harmoni Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dalam pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2023 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi (30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagamaan (25%).

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah"** diperoleh **sebesar 107,60%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat sangat tinggi** atau **kategori sangat berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil dan 1 (satu) indikator dengan predikat tinggi atau kategori berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori	Keterangan
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	-	-	-	-	IKU dihapuskan
2	Indeks Capaian Revolusi Mental	Nilai 73,13	Nilai 70,47	96,36%	Tinggi/Berhasil	-
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	-	-	-	-	IKU dihapuskan
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	-	-	-	-	IKU dihapuskan
5	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6	Nilai 7,13	118,83%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-
	Kinerja Sasaran Strategis			**107,60%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**	-

Semangat revolusi mental diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

ICRM dihitung menggunakan data survei yang dirancang khusus untuk mengukur capaian Revolusi Mental. Namun dikarenakan belum adanya survei khusus yang mengukur capaian Revolusi Mental, maka ICRM diukur dengan menggunakan data-data hasil survei atau sensus yang telah tersedia datanya dan secara subtantif dapat dijadikan sebagai proksi indikator yang dapat menjelaskan dimensi revolusi mental yang mencakup Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Adapun sumber data yang digunakan untuk penyusunan ICRM 2021 mencakup data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) yang tersedia datanya setiap 3 tahun sekali. Survei tetap berjalan selama 3 tahun tersebut dan hasil akhirnya terlihat pada tahun terakhir. Perilisan nilai selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukuran, didapatkan hasil nilai ICRM Indonesia Tahun 2019-2021 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2024 dan merupakan Nilai ICRM Kedua Indonesia adalah sebesar 70,47 (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik/BPS), sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2021 hanya sebesar 67,3 sehingga diperoleh capaian sebesar 104,71%. Nilai sebesar 70,47 dimaksud menunjukkan bahwa telah meningkatnya persepsi masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya 5 dimensi Gerakan Revolusi Mental, dimana didapatkan perbaikan dalam kerangka pembangunan karakter bangsa melalui nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong di masyarakat yang dapat dilihat pada beberapa indikator di 5 (lima) Gerakan Nasional Revolusi Mental. Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada Tabel di Bawah:

Tabel 3.14
Perbandingan Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2019 dan 2022

Dimensi		Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2022
1.	Gerakan Indonesia Melayani	78,90	85,54
2.	Gerakan Indonesia Bersih	67,99	75,52
3.	Gerakan Indonesia Tertib	75,50	73,15
4.	Gerakan Indonesia Mandiri	47,25	47,69
5	Gerakan Indonesia Bersatu	65,42	72,48
Nilai ICRM		**67,01**	**70,47**

Keterangan kriteria penilaian:
Amat Baik : >90 - 100
Baik : >75 - < 90
Cukup : >60 - < 75
Sedang : >50 - < 60
Kurang : < 50 ke bawah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 nilai paling tinggi adalah pada dimensi Gerakan Indonesia Melayani dengan nilai sebesar 85,54, sedangkan nilai paling rendah adalah pada dimensi Gerakan Indonesia Mandiri dengan nilai sebesar 47,69. Selain itu dapat dilihat bahwa kenaikan Indeks sebesar adalah pada Dimensi Gerakan Indonesia Bersih dengan nilai indeks sebesar 11,7%, dan sebaliknya terjadi penurunan pada Dimensi Gerakan Indonesia Tertib, yaitu turun sebesar (-3,11%) dari nilai indeks tahun 2019. Jika dilakukan penjabaran capaian masing-masing gerakan, selama tahun 2018 dan 2021 terlihat bahwa empat dimensi masih berada pada kriteria yang sama dimana Gerakan Indonesia Melayani (baik), Gerakan Indonesia Bersih (cukup), Gerakan Indonesia Mandiri (kurang), dan Gerakan Indonesia Bersatu (cukup), sedangkan satu dimensi mengalami penurunan kriteria (Gerakan Indonesia Tertib) dari "baik" menjadi "cukup".

Pada tahun 2021, ICRM Indonesia sebesar 70,47. Dibandingkan dengan angka tahun 2018, angka ini berada pada kriteria yang sama yaitu "cukup". Angka ini didapatkan dari rata-rata capaian 5 dimensi gerakan, yang menunjukkan peningkatan dari capaian ICRM sebelumnya pada tahun 2018, yakni 67,01. Target dari capaian ini adalah terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu, yang ditunjukkan oleh tingginya penilaian masyarakat terhadap implementasi kondisi 5 dimensi gerakan yang dirasakan, serta tingginya apresiasi masyarakat yang ditunjukkan melalui potensi yang mendukung progres capaian pada masing-masing program gerakan.

Penghitungan ICRM adalah melakukan pemetaan indikator kandidat penyusun ICRM, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap dimensi, dan penghitungan ICRM. Dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terlibat aktif melalui pertemuan, rapat, ataupun koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BPS dan Masukan dari Tim Gugus Tugas Revolusi Mental. pengukuran dilakukan melalui pendekatan pada indikator-indikator hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2021. Diperoleh 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 dimensi, di mana penentuan dimensi mengacu kepada 5 program besar GNRM yang telah dicanangkan.

Grafik 3.8
Pembentukan dan Presentase GNRM di Daerah

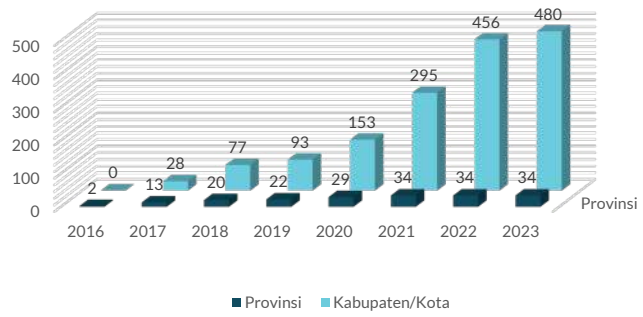

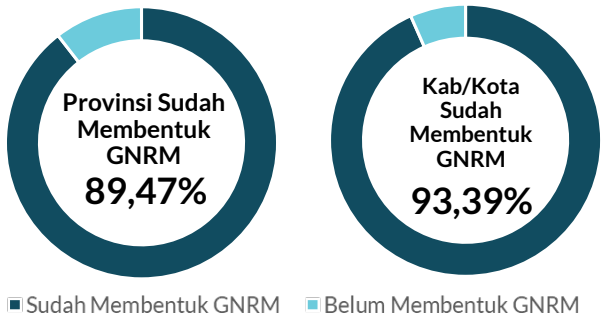

Grafik 3.9
Presentase Pembentukan GNRM Kab/Kota

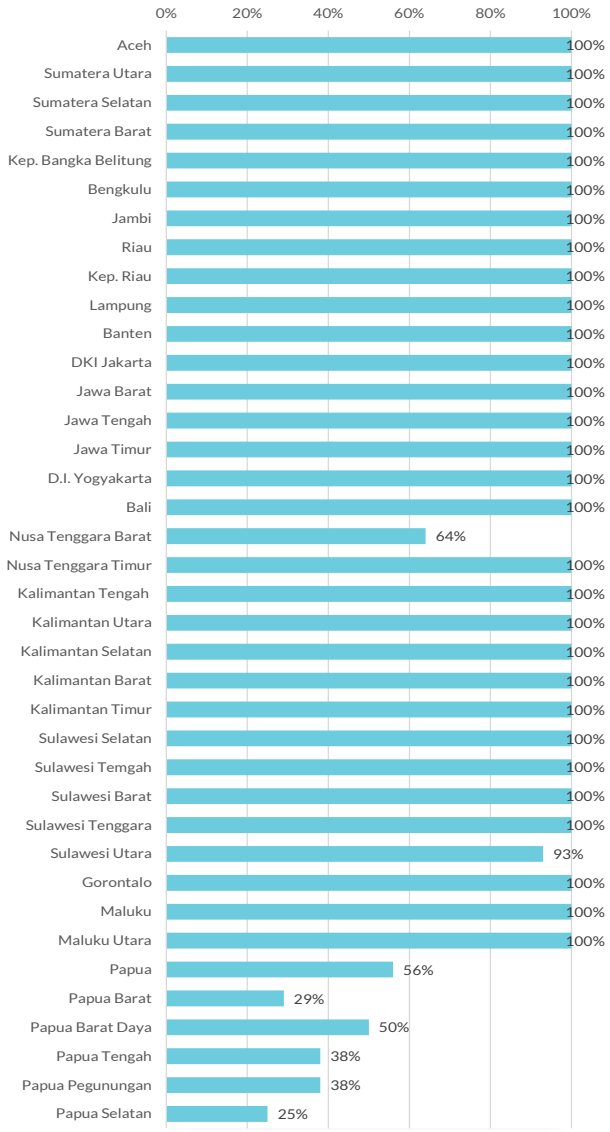

Provinsi	Sudah Bentuk	Belum Bentuk
Aceh	23	-
Sumatera Utara	33	-
Sumatera Selatan	17	-
Sumatera Baratss	19	-
Kep. Bangka Belitung	7	-
Bengkulu	10	-
Jambi	11	-
Riau	12	-
Kep. Riau	7	-
Lampung	15	-
Banten	8	-
DKI Jakarta	6	
Jawa Barat	27	-
Jawa Tengah	35	-
Jawa Timur	38	-
D.I. Yogyakarta	5	-
Bali	9	-
Nusa Tenggara Barat	10	-
Nusa Tenggara Timur	14	8
Kalimantan Tengah	14	-
Kalimantan Utara	5	-
Kalimantan Selatan	13	-
Kalimantan Barat	14	-
Kalimantan Timur	10	-
Sulawesi Selatan	24	-
Sulawesi Temgah	13	-
Sulawesi Barat	6	-
Sulawesi Tenggara	17	-
Sulawesi Utara	14	1
Gorontalo	6	-
Maluku	11	-
Maluku Utara	10	-
Papua	5	4
Papua Barat	2	5
Papua Barat Daya	3	3
Papua Tengah	3	5
Papua Pegunungan	3	5
Papua Selatan	1	3

Tahapan yang harus dilakukan sebelum penghitungan indeks adalah normalisasi nilai indikator. Normalisasi indikator ini merupakan proses penyekalaan nilai indikator yang bertujuan agar semua indikator penyusun indeks memiliki arah dan rentang yang sama.

Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan ICRM adalah metode Maksimal-Minimal. Untuk menggunakan metode ini, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan nilai minimum dan maksimum masing-masing indikator. Nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator penyusun indeks.

Tabel 3.15
Daftar Indikator Penyusunan ICRM, Sumber dan Ketersediaan Data ICRM

NO	KET	INDIKATOR ICRM	NILAI-NILAI LAIN	NILAI MAX	SUMBER DATA PUSAT
DIMENSI GERAKAN INDONESIA MELAYANI					
1.	X1.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	0	100	Susenas MSBP, 2021
2.	X1.2	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat	0	100	Susenas MSBP, 2021
3.	X1.3	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang pernah dirasakan di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan informasi biaya yang transparan	0	100	Susenas MSBP, 2021
4.	X1.4	Persentase penduduk yang pernah membayar melebihi ketentuan yang berlaku ketika berurusan dengan petugas layanan publik	10	0	Susenas MSBP, 2021
5.	X1.5	Persentase penduduk yang pernah menggunakan jasa perantara (calo) dalam mengurus dokumen yang berkaitan dengan pelayanan publik	10	0	Susenas MSBP, 2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA BERSIH					
6.	X2.1	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa fasilitas umum/fasilitas sosial diwilayah tempat tinggalnya bersih	0	100	Susenas MSBP, 2021
7.	X2.2	Persentase rumah tangga melakukan pengelolaan sampah dengan cara diangkut petugas/ dibuang ke TPS/dibuat kompos/ didaur ulang	0	60	Susenas MSBP, 2021
8.	X2.3	Persentase rumah tangga yang pernah melihat/ melakukan pelanggaran kebersihan lingkungan	35	0	Susenas MSBP, 2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA TERTIB					
9.	X3.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Anggota Masyarakat di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya	0	100	Susenas MSBP, 2021
10.	X3.2	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa budayaantre yang sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di wilayah tempat tinggal rumah tangga	0	100	Susenas MSBP, 2021

NO	KET	INDIKATOR ICRM	NILAI-NILAI LAIN	NILAI MAX	SUMBER DATA PUSAT
11.	X3.3	Persentase penduduk yang melaporkan perubahan administrasi kependudukan seperti kelahiran,kematian, pernikahan/perceraian, atau perpindahan	100	Susenas MSBP, 2021	Susenas MSBP, 2021
12.	X3.4	Persentase rumah tangga yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas	0	Susenas MSBP, 2021	Susenas KOR, 2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA MANDIRI					
13.	X4.1	Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya memiliki usaha mikro	0	30	Susenas 2021
14.	X4.2	Persentase rumah tangga yang menjadi anggota koperasi	0	30	Susenas 2021
15.	X4.3	Persentase penduduk miskin	30	3	Susenas 2021
16.	X4.4	Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	0	60	Susenas 2021
17.	X4.5	Penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan (Youth Not in Education, Employment, and Training/NEET)	30	5	Susenas 2021
18.	X4.6	Rasio kemandirian daerah	0	65	Publikasi PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2017-2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA BERSATU					
19.	X5.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong dalam 3 bulan terakhir	0	80	Susenas MSBP, 2021
20.	X5.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yangmelakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Susenas MSBP, 2021
21.	X5.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama/suku	0	90	Susenas MSBP, 2021
22.	X5.4	Persentase rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih padaperingatan kemerdekaan Republik Indonesia	0	100	Susenas MSBP, 2021
23.	X5.5	Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	0	95	Susenas MSBP, 2021
24.	X5.6	Persentase penduduk yang mengetahui wawasan kebangsaan	0	100	Susenas MSBP, 2021

Setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100. Nilai indikator yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai 0 dan setiap nilai indikator yang berada di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan semuanya akan diukur merata antara 0 dan 100. Indikator menggunakan Persamaan 1 sebagai berikut :

Persamaan 1

$$SX_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{\max - x_{min}}} \text{ x } 100$$

Keterangan :

SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi

X_i adalah nilai indikator (empiris)

X_{min} adalah nilai minimal indikator (ditetapkan)

X_{max} adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan)

Dalam penyusunan ICRM, pembobotan dimensi menggunakan metode penilaian para pakar yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan gugus tugas Revolusi Mental. Tiap dimensi dapat memiliki bobot yang berbeda (suatu dimensi lebih penting dari dimensi lain), atau sama (tiap dimensi dianggap sama pentingnya). Jika menggunakan bobot berbeda berdasarkan sebaran data, terdapat risiko perubahan bobot untuk tahun-tahun berikutnya karena adanya perbedaan pola sebaran data. Sehingga, disepakati menggunakan bobot yang sama untuk setiap dimensi penyusun ICRM yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Dimensi dan Bobot ICRM

DIMENSI	BOBOT
Dimensi 1 Gerakan Indonesia Melayani	1/5
Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih	1/5
Dimensi 3 Gerakan Indonesia Tertib	1/5
Dimensi 4 Gerakan Indonesia Mandiri	1/5
Dimensi 5 Gerakan Indonesia Bersatu	1/5

Berdasarkan hasil penilaian masyarakat melalui Susenas MSBP 2021, pencapaian revolusi mental ditinjau dari lima dimensi program gerakan secara umum menunjukkan peningkatan. Nilai tertinggi terletak pada Gerakan Indonesia Melayani yaitu sebesar 85,54 yang menunjukkan bahwa sebanyak 85,54 persen masyarakat setuju bahwa negara telah hadir melindungi kepentingan warganya melalui implementasi nyata pelayanan publik yang cepat, tidak bertele-tele, jelas dari segi biaya, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Sedangkan dimensi dengan nilai terendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 47,69, meskipun demikian nilai ini meningkat dari Tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemandirian ekonomi yang diukur dari persentase penduduk miskin, kemandirian usaha, dan kemandirian daerah. Gerakan Indonesia Tertib mencapai nilai 73,15. Gerakan Indonesia Bersih tahun 2021 menunjukkan nilai 75,52 yang menjadi gambaran penilaian masyarakat terkait kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan sekitar, kebiasaan pengelolaan sampah, serta pelanggaran terkait ketentuan kebersihan lingkungan. Sementara itu, Gerakan Indonesia Bersatu mencapai nilai 72,48. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun persatuan dan solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia, serta semangat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama di tengah kemajemukan.

Capaian ICRM 2021 menunjukkan bahwa secara umum Gerakan Nasional Revolusi Mental terus bergerak maju dalam menciptakan perubahan positif dalam budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelayanan, kebersihan, kemandirian, ketertiban, dan persatuan dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Lima dimensi gerakan yang digunakan dalam mengukur capaian ICRM dibentuk oleh indikator yang menghasilkan variasi capaian dan target yang berbeda-beda. Berikut adalah nilai capaian skor indeks dan target indikator untuk setiap dimensi.

Grafik 3.10
Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) menurut Indikator Tahun 2021

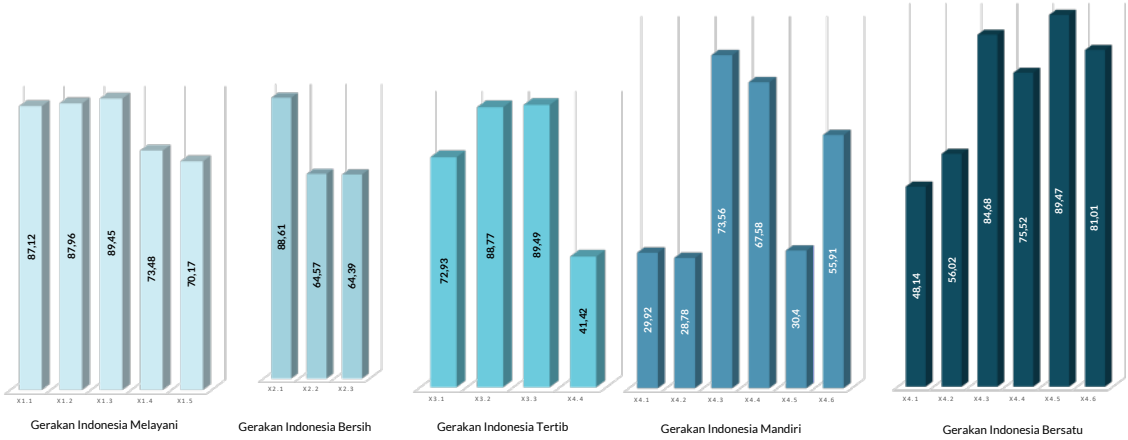

Tahapan berikutnya dalam penghitungan ICRM adalah penghitungan nilai indeks setiap dimensi. Nilai indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks dimensi adalah sebagai berikut:

Persamaan 2

$$Indeks\ Demokrasi_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) \text{x } 100$$

Keterangan :

SXj_i adalah nilai indikator ke-i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi

n_i adalah banyaknya indikator pada dimensi ke-j

Penghitungan indeks Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih dilakukan dengan membentuk 2 sub dimensi, yaitu Sub Dimensi 1 yang terdiri dari indikator kebersihan pasar tradisonal dan terminal dan Sub Dimensi 2 yang terdiri dari indikator kebersihan rumah sakit/puskesmas, kantor pemerintah dan lembaga pendidikan. Penghitungan indeks masing-masing sub dimensi menggunakan Persamaan 2 dan penghitungan indeks dimensi diperoleh dengan menghitung rata-rata dari indeks sub dimensi tersebut.

Selanjutnya nilai ICRM dihitung dengan cara menghitung indeks setiap dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi. Namun, karena pembobotan dalam penyusunan ICRM dianggap sama, maka perhitungan Indeks menggunakan persamaan 3 sebagai berikut.

Persamaan 3

$$ICRM = \left(\frac{\sum_{j=1}^{5} Indeks\ D_j}{5}\right) \text{x } 100$$

Keterangan :

ICRM adalah Indeks Capaian Revolusi Mental

D_j adalah dimensi ke-j

Nilai akhir dari hasil penghitungan ICRM dalam Persamaan 3 digunakan untuk mengukur ICRM Indonesia baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja ICRM, yaitu:

1. Bahwa GNRM sebagai Perioritas Pembangunan nasional di beberapa daerah masih belum dimaknai oleh para pemangku pengelola anggaran.
2. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan tim Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah.
3. Kurang terintegrasinya program kegiatan antara Kesatuan Bangsa dan Politik dan Organisasi Perangkat Daerah terkait (terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk membantu menggerakkan 5 bidang (bersatu, melayani, mandiri, tertib, bersih) agar program atau kegiatan GNRM dapat terealisasi dengan baik.
4. Kurangnya dorongan intensif provinsi terhadap kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap pengarusutamaan serta perumpunan kebijakan sebagai upaya terdepan dalam hal pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) oleh Kepala Daerah, yang berimbas pada tidak didukungnya penganggaran kegiatan PPWK di daerah.

Upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terhadap kendala yang dihadapi:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mendorong daerah untuk memprioritaskan anggaran GNRM dan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang belum mencantumkan anggaran untuk GNRM.
2. Mengingatkan daerah untuk melakukan Percepatan Pembentukan dan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
3. Membangun koordinasi dan komunikasi efektif dengan OPD terkait (terutama Bappeda) terkait penggalangan dana program dan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan revolusi mental di daerah.
4. Melakukan himbauan dan dorongan intensif ke provinsi melalui surat jalur Surat Dinas, Monitoring dan evaluasi serta koordinasi melalui media sosial (*Whatsapp group*, *Telegram*, *Email*, dan alat komunikasi lainnya), yang selanjutnya disampaikan provinsi kepada kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Memberikan *reward* (penghargaan) kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah membentuk Gugus Tugas GNRM dan melaksanakan GNRM dengan baik serta bagi yang telah membentuk Pokja PPWK. *Reward* (penghargaan) ini diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

Adapun Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan sebagai bentuk dukungan penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai berikut:

1. Penguatan peran dan fungsi forum-forum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsan dan Forum Pembauran Kebangsaan dengan cara mengoptimalkan Pembentukan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah
   a. Data Per Desember 2023 pada saat ini sudah terbentuk di 26 Provinsi Forum Pembauran Kebangsaan, Dimana 8 provinsi lainnya masa periode SK sudah berakhir dan 4 provinsi belum dibentuk. Pada Tingkat Kab/Kota sudah Terbentuk pada 190 Kab/Kota FPK sedangkan 208 Kab/Kota masa periode SK sudah berakhir dan 116 Kab/Kota lainnya belum membentuk FPK. Berikut data Rekapitulasi Pembentukan Forum Pembentukan Kebangsaan (FPK).
   b. Data Per 14 Desember 2023, saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi Pokja (Kelompok Kerja) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, sedangkan 4 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) belum terbentuk. Pada Tingkat Kab/Kota sudah terbentuk pada 282 Kab/Kota, sedangkan 232 Kab/Kota belum membentuk. Berikut Data Rekapitulasi Pembentukan Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Pokja PPWK).
2. Melakukan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Berikut Data Rekapitulasi Pembentukan GNRM tgl per tanggal 7 Desember 2023.
3. Penguatan peran dan fungsi Forum Penguatan Ideologi Pancasila, Forum Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara dan Forum Penguatan Bela Negara dengan cara mengoptimalkan Pelaksanaan kegiatan di daerah; Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan yaitu Kampanye Gerakan Satu Hati Dalam Pancasila Menjaga NKRI dalam Menghalau Hoax dan Isu Sara Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 5 Oktober 2023 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Forum Penguatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 30 Mei 2023 di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah.
4. Pemberdayaan dan penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa dan pelajar yang peranannya sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan persatuan kesatuan bangsa. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan

Umum selalu melibatkan tokoh-tokoh tersebut.

5. Penguatan peran aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan 9 agenda prioritas Presiden Jokowi (Nawacita) melalui 5 (lima) gerakan, yaitu: a) Indonesia melayani, b) Indonesia bersih, 3) Indonesia tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5) Indonesia bersatu.
6. Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan. Gerakan ini sudah dilaksanakan diseluruh Indonesia dimulai sejak 1 Juni 2023 dan pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dilakukan pada tangal 17 Juni 2023 di Kota Lhokseumawe, Aceh. Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan, maupun swasta, dengan Kesbangpol sebagai leading sector.
7. Goes To Campus dalam rangka Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai Pondasi Karakter Bangsa Indonesia. Menyadari pentingnya peran dan fungsi yang melekat pada generasi penerus bangsa ini, maka pemerintah melalui ditjen Polpum bersinergi bersama seluruh lapisan untuk berusaha mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di segala bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan tetap berlandaskan pada Nilai-Nilai yang termuat di dalam Pancasila.
    a. Provinsi Jawa Tengah (dilaksanakan tanggal 7 Maret 2023 di Universitas Dian Nuswantoro Kota Semarang) dengan peserta 100 orang mahasiswa dan pelajar.
    b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (sudah dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023) Aula Disdik Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peserta 100 orang pelajar dan mahasiswa se Nusa Tenggara Barat.
    c. Provinsi Riau (sudah dilaksanakan kegiatan Ngobrol Inspirasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Goes to Campus) tanggal 8 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Kesbangpol Riau yang dihadiri pejabat Kesbangpol Prov Riau, akademisi dan mahasiswa se Provinsi Riau sebanyak 100 orang.
8. Kemah Kebangsaan Bagi Generasi Muda. Dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 26 Mei 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan mengumpulkan seluruh anak-anak muda berprestasi yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi dirasa merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menciptakan generasi muda yang memiliki Rasa Nasionalisme yang tinggi dan akan menjadi duta di wilayahnya, sehingga akan dapat menularkan semangat Nasionalisme dan kebangsaan kepada generasi muda lainnya.
9. Pelaksanaan Forum Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan mampu Mendorong daerah untuk menjadi pelopor perubahan karakter dan wawasan kebangsaan, memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Tersusunnya rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan pada bidang Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
10. Pagelaran Pesona Bhinneka Tunggal Ika tahun 2023 pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta digelar Pagelaran Pesona Bhinneka Tunggal Ika Tahun 2023 pada Harmoni Indonesia 2nd Indonesia International Culture festival (IIFC).
11. Penguatan dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah serta kegiatan forum asistensi Penguatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah dalam rangka penguatan karakter bangsa bagi masyarakat di daerah. Dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda pelajar dan mahasiswa akan arti pentingnya kesadaran bela negera serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2023 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi (30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagamaan (25%). Manfaat Indeks Harmoni bagi Pemerintah Daerah antara lain:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (PPD);
2. Perbaikan kualitas standar pelayanan minimal (SPM)-Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Sosial;
3. Peningkatan daya saing daerah;
4. Pengendalian inflasi dan pengelolaan investasi;
5. Pemantapan rentang kendali dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
6. Penumbuhan kepedulian dan semangat gotong royong; dan
7. Perwujudan hak konstitusional warga negara.

Indeks Harmoni Indonesia terdiri dari 10 variabel dan 33 indikator, 5 pertanyaan spesifik dan 1 non struktural untuk mendapatkan masukan, saran serta kritik dari responden. Indikator dan variabel sebagai berikut:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi:
   a. Variabel X1: Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan (ki: 15,05%)
   b. Variabel X2: Keadilan dan Kesejahteraan (ki: 14,95%)
2. Dimensi Harmoni Sosial:
   a. Variabel X3: Pluralisme (ki: 7,88%)
   b. Variabel X4: Pendidikan (ki: 7,54%)
   c. Variabel X5: Kewarganegaraan (ki: 7,58%)
3. Dimensi Harmoni Budaya:
   a. Variabel X6: Akulturasi dan Keragaman Budaya (ki: 11,00%)
   b. Variabel X7: Kearifan Lokal (ki: 11,00%)
4. Dimensi Harmoni Keberagamaan:
   a. Variabel X8: Kebijakan Pendukung Keberagamaan (ki: 8,56%)
   b. Variabel X9: Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan (ki: 8,15%)
   c. Variabel X10: Moderansi Beragama (ki: 8,29%)

Data Indeks Harmoni Indonesia hasil riset publik di 8 (delapan) daerah dengan minimal responden masing-masing daerah 1.250 responden yang melibatkan unsur dengan melibatkan unsur *Dodeca-helix* terdiri dari :

1. Akademisi (*Accademiciants/A*);
2. Kelompok usahawan dan pelaku bisnis (*Business/B*);
3. Komunitas kreatif/organisasi profesi (*Community/C*);
4. Lembaga donor/organisasi kemasyarakatan/LSM (*Donor agency/D*);
5. Wirausahawan khususnya wirausahawan sosial (*Enterpreneurs/E*);
6. Lembaga keuangan dan perbankan (*Financial/F*);
7. Pemerintah (*Government/G*);
8. Pemerintah daerah dan pemerintah desa (*Local Government/LG* dan *Rural Government/RG*);
9. Penanam modal terutama investor penyandang dana (*Investors/I*);
10. 10. Pasar dan agen ekonomi (*Market & Economic agents/M*);
11. Jurnalis dan media massa (*Press*/P); dan
12. Masyarakat penerima manfaat (*People Beneficiaries/ PB*).

Pemilihan lokus pada 8 (delapan) daerah tersebut sebagai *pilot project* Tahun 2023 didasarkan pada beberapa hal antara lain:

1. Daerah yang tidak terdampak politis Tahun 2024;
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah paling heterogen dan perwakilan untuk wilayah barat;
3. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwakilan daerah tengah dan kabupaten dengan tingkat potensi konflik tinggi;
4. Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan keterwakilan dari daerah Timur dan Kepulauan; DAN
5. Daerah *piloting* Pengukuran Tahun 2023 merupakan keterwakilan untuk wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur.

Adapun Pelaksanaan pengisian *e-Survey* Indeks Harmoni berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-215/Polpum tanggal 13 November 2023. Pelaksanaan *pilot project* tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2023 dilaksanakan di 8 (delapan) daerah:

1. Kota Yogyakarta (1.512 responden);
2. Kabupaten Sleman (1.552 responden);
3. Kabupaten Kulon Progo (1.307 responden);
4. Kabupaten Gunungkidul (2.060 responden);
5. Kabupaten Bantul (4.048 responden);
6. Kabupaten Kapuas (1.683 responden);
7. Kabupaten Kotawaringin Timur (1.269 responden); dan
8. Kabupaten Kepulauan Selayar (1.462 responden).

Gambar 3.1
Data Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2023

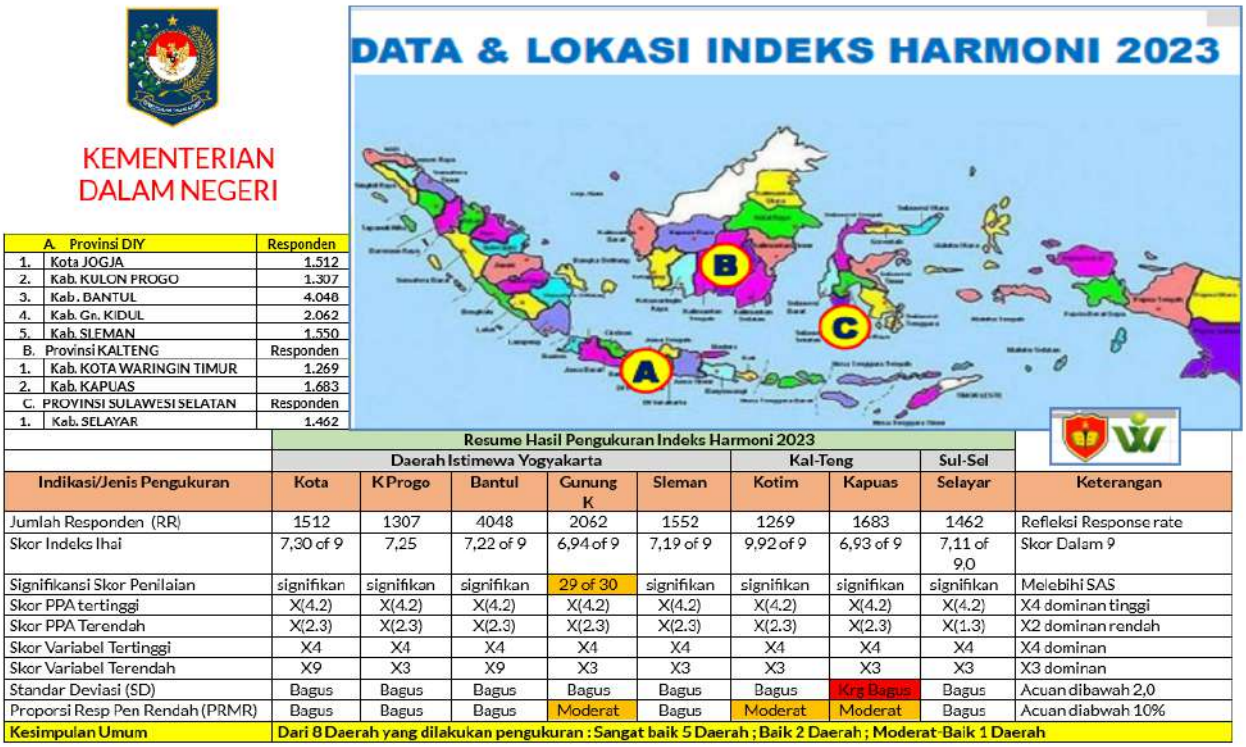

	A. Provinsi DIY	Responden
1.	Kota JOGJA	1.512
2.	Kab. KULON PROGO	1.307
3.	Kab. BANTUL	4.048
4.	Kab. Gn. KIDUL	2.062
5.	Kab. SLEMAN	1.550
B.	Provinsi KALTENG	Responden
1.	Kab. KOTA WARINGIN TIMUR	1.269
2.	Kab. KAPUAS	1.683
C.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Responden
1.	Kab. SELAYAR	1.462

	Resume Hasil Pengukuran Indeks Harmoni 2023								
	Daerah Istimewa Yogyakarta					Kal-Teng		Sul-Sel	
Indikasi/Jenis Pengukuran	Kota	K Progo	Bantul	Gunung K	Sleman	Kotim	Kapuas	Selayar	Keterangan
Jumlah Responden (RR)	1512	1307	4048	2062	1552	1269	1683	1462	Refleksi Response rate
Skor Indeks Ihai	7,30 of 9	7,25	7,22 of 9	6,94 of 9	7,19 of 9	9,92 of 9	6,93 of 9	7,11 of 9,0	Skor Dalam 9
Signifikansi Skor Penilaian	signifikan	signifikan	signifikan	29 of 30	signifikan	signifikan	signifikan	signifikan	Melebihi SAS
Skor PPA tertinggi	X(4.2)	X(4.2)	X(4.2)	X(4.2)	X(4.2)	X(4.2)	X(4.2)	X(4.2)	X4 dominan tinggi
Skor PPA Terendah	X(2.3)	X(2.3)	X(2.3)	X(2.3)	X(2.3)	X(2.3)	X(2.3)	X(1.3)	X2 dominan rendah
Skor Variabel Tertinggi	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4 dominan
Skor Variabel Terendah	X9	X3	X9	X3	X3	X3	X3	X3	X3 dominan
Standar Deviasi (SD)	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Krg Bagus	Bagus	Acuan dibawah 2,0
Proporsi Resp Pen Rendah (PRMR)	Bagus	Bagus	Bagus	Moderat	Bagus	Moderat	Moderat	Bagus	Acuan diabwah 10%
Kesimpulan Umum	Dari 8 Daerah yang dilakukan pengukuran : Sangat baik 5 Daerah ; Baik 2 Daerah ; Moderat-Baik 1 Daerah								

Peniliaian Indeks Harmoni dengan melihat keseluruan variabel yang mempengaruhi dengan melihat beberapa aspek :

1. Skor Sifnifikansi Penilaian (SSP) dimana untuk wilayah D.I. Yogyakarta SSP sebesar 6,5 dan Kalimantan Tengah serta Sulawesi Selatan 6 (skala 1 sampai 9), karakteristik wilayah mempengaruhi penilaian SSP dari titik tengah skala 1 sampai 9 ditambah karakteristik wilayah 30% untuk daerah yang maju dan prasana lengkap, 20% untuk wilayah wilayah bagian tengah dan 10% untuk wilayah timur dan kepulauan, dari keseluruhan indikator (30) Kabupaten Gunung Kidul terdapat satu Indikator di bawah SSP dengan kesimpulan SSP baik.
2. Standar deviasi yang merupakan ukuran keberagaman dengan acuan SD = 2,0 pada 30 titik, semua titik dibawah 2,0 Kapuas menunjukan hanya 3 titik nilai dibawah 2,0 selebihnya diatas 2,0 kesimpulan SD relatif tinggi mencerminkan "tingkat kohesivitas yang relative rendah"
3. Skor Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dari masing-masing variabel batas PRMR 10%, dari 8 daerah ada 3 daerah yang melebihi batas PRMR;
4. Kesimpulan Penilaian :
   a. 5 daerah dengan SSP (6,5 Wilayah D.I. Yogyakarta, 6 untuk Kalteng dan Sulses), SD (dibawah 2,0), dan PRMR (acuan dibawah 10) yaitu : Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Selayar masuk penilaian Sangat Baik
   b. 2 Daerah Baik, Gunung Kidul (satu indikator kurang dari SSP) dan Kotim (ada PRMR yang melebihi 10%, dan
   c. Kapuas Moderat-Baik, karena SD (27 titik datas 2,0) dan ada variabel yang melebihi PRMR

Penilian Indek Harmoni tediri dari :

1. Skor
   a. Sangat Baik skor 7 sd 9;
   b. Baik skor 6 sd 7;
   c. Moderat skor 5,5 sd 6
   d. Kurang Baik < 5,4
2. Signifikansi
   a. SSP;
   b. SD
   c. PRMR

Model formula pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan pendekatan *Wellbeing Methodology* (WM), yaitu :

IHaI = ∑(ki-Xi)

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan menggabungkan variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni Indonesia. Dalam konteks rumus ini:

4. IHaI: Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
5. ∑: Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
6. ki: Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.
7. Xi: Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

1. Cakupan Ruang Lingkup
   a. Domisili;
   b. Status/Pekerjaan Responden;
   c. Usia Responden;
   d. *Gender;*
   e. Pendidikan
2. Uji Instrumen Survei (contoh hasil pengukuran Kabupaten Kepulauan Selayar)
   a. Running Test dan Piloting;
   b. Uji Validitas;
      1) Pilih Instrumen Validasi: Pilih instrumen atau skala yang dianggap sebagai *gold standard* atau instrumen validasi yang dapat diandalkan.
      2) Terapkan kedua instrumen yaitu Indeks Harmoni Indonesia, dan instrumen validasi, pada kelompok responden yang sama.
      3) Hitung Korelasi *Pearson* (r):
         a) Hitung nilai koefisien korelasi *Pearson* (r) antara skor pada instrumen IHaI dan skor pada instrumen validasi.
         b) Rumus korelasi *Pearson*: r=∑(Xi−X¯)2∑(Yi−Y¯)2∑(Xi−X¯)(Yi−Y¯)
      4) Bandingkan dengan Tabel *Product Moment* dari *Pearson*:
         a) Bandingkan nilai "r" yang dihitung dengan nilai kritis dalam tabel *product moment* dari *Pearson* pada tingkat signifikansi yang diinginkan
         r=∑(Xi−X¯)2∑(Yi−Y¯)2∑(Xi−X¯)(Yi−Y¯)
         b) Jika nilai "r" lebih besar daripada nilai kritis, maka hubungan dianggap signifikan.
   c. Uji Reliabilitas, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perhitungan Uji Reliabilitas Indeks Harmoni Indonesia

No. Res	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Xtotal
1	8,60	8,60	8,60	8,00	8,00	7,20	8,20	8,00	8,2	8,20	81,60
2	8,20	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,6	8,60	85,60
3	7,00	7,60	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8	8,00	78,60
4	7,60	7,40	7,80	7,80	8,00	8,00	8,00	8,00	7,6	7,60	77,80
5	7,40	7,80	9,00	9,00	8,60	8,20	7,80	8,20	8,2	7,80	82,00
95	7,60	8,00	7,60	8,60	8,00	8,00	8,20	8,00	8,2	8,00	80,20
96	6,40	7,00	5,60	8,00	7,00	6,40	6,00	5,80	5	6,40	63,60
97	7,20	6,00	6,60	7,00	7,00	7,00	7,00	6,20	5	7,00	66,00
98	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7	7,00	71,00
99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	10,00
100	8,20	9,00	7,40	9,00	9,00	8,20	9,00	8,20	9	8,20	85,20
Varian Ind. & Total	2,24	1,63	1,91	1,40	1,93	1,93	1,41	1,57	1,71	1,58	
										16,79	130,55

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)$$

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

r = 0,88

Grafik 3.11
Perhitungan Nilai IHaI per Daerah

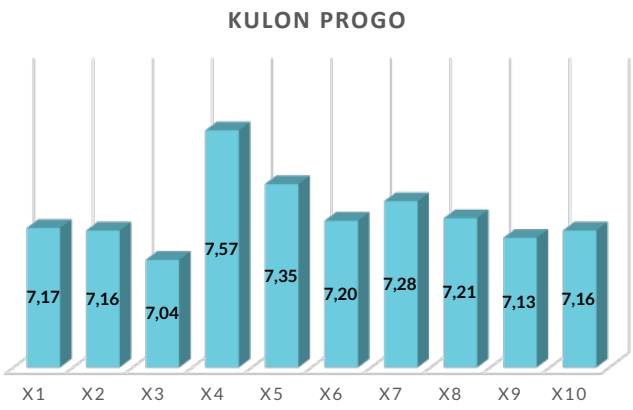

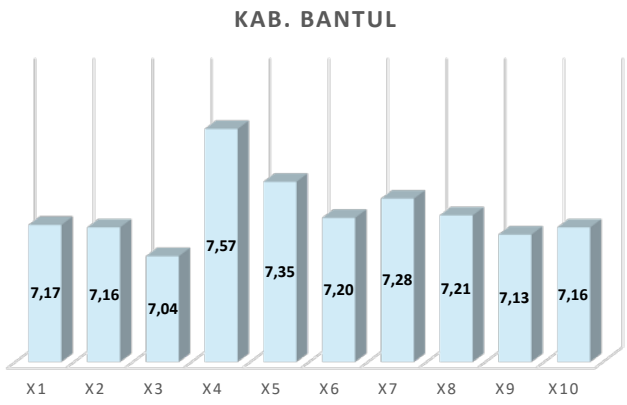

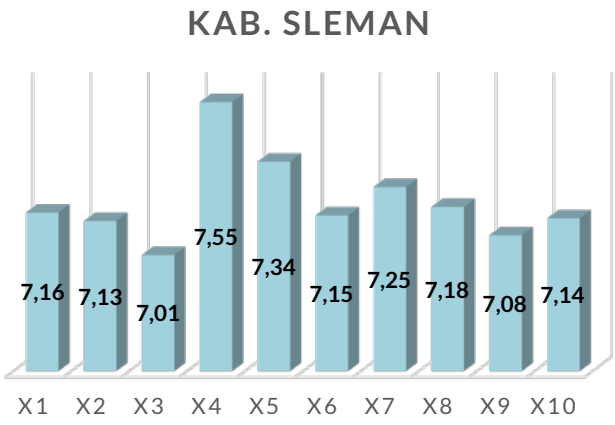

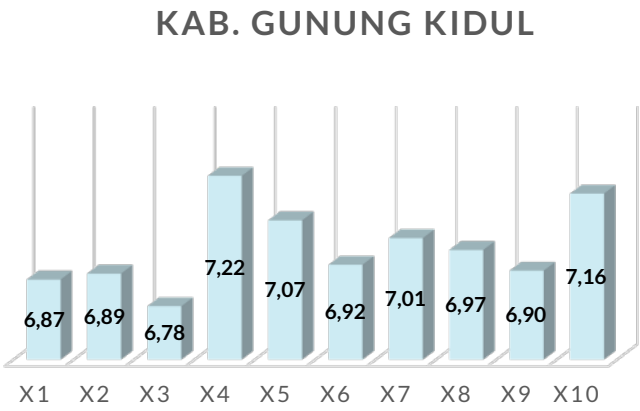

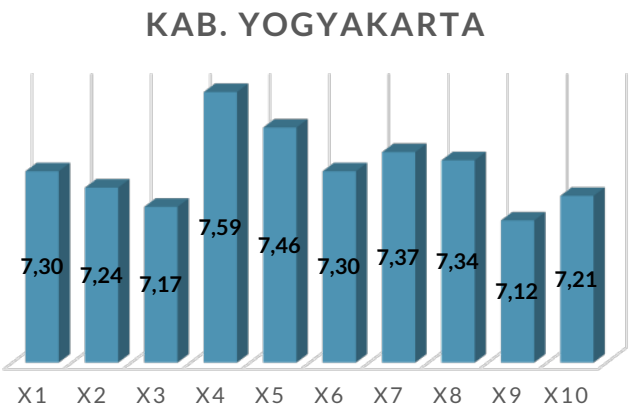

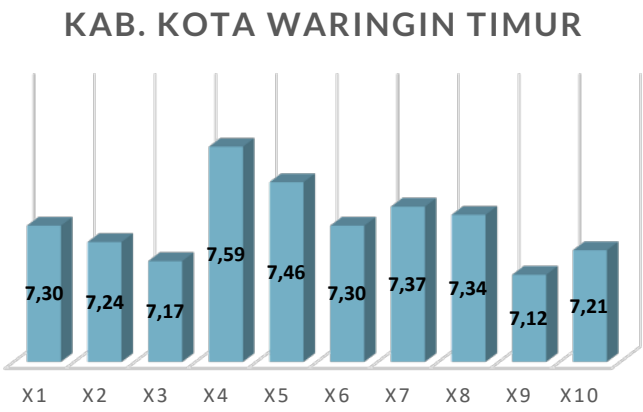

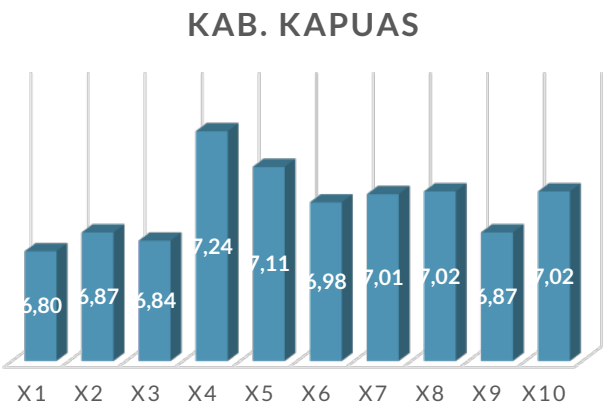

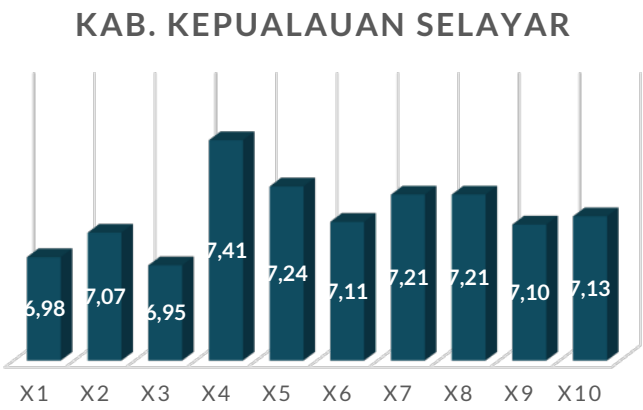

3. Data Identifikasi Responden
   a. Data Domisili Responden
   b. Data Status atau Kategori Pekerjaan Responden
   c. Data Usia Responden
   d. Data Tingkat Pendidikan Responden
4. Data Skor Penilaian *Participatory Prospective Analysis* (PPA) Responden
5. Pertanyaan Spesifik
6. Data Non Struktral
7. Analisis Data
   a. Analisis *Regularity* (R);
   b. Analisis *Response Rate* (RR);
   c. Analisis Signifikansi Skor Penilaian (SSP) dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS);
      1) SSP dapat dihitung dengan membandingkan rata-rata skor penilaian dengan nilai acuan atau rata-rata populasi dan kemudian dibandingkan dengan standar acuan signifikansi (SAS)
      2) Rumus SSP Signifikan : SSP>SAS
      3) SSP "Signifikan" bila SSP>SAS; Dan sebaliknya "tidak signifikan" bila SSP<SAS.
   d. Analis Standar Deviasi (SD);
      1) SD mengukur sejauh mana skor penilaian tersebar dari nilai rata-ratanya.
      2) Rumus SD:=N∑(X−X¯)2
      3) SD yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar dalam skor penilaian.
   e. Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR);
      1) PRMR dapat dihitung dengan mengidentifikasi jumlah responden yang memberikan skor rendah (misalnya, skor di bawah batas tertentu) dibagi dengan total responden.
      2) Rumus PRMR=Jumlah Responden Menilai Rendah/Total Responden
      3) PRMR memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi masyarakat yang memberikan penilaian rendah.
   f. Analisis Data Matriks;
   g. Analisis Distribusi Skor Penilaian;
   h. Analisis Keseimbangan Data PPA;
   i. Analisis Resume Data non Struktural

Tabel 3.18
Skor Penilaian Indeks Harmoni Keseluruhan 8 Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

	Skor Penilaian Indeks Harmoni (IHal) Keseluruhan 8 Daerah Kabupaten/Kota 2023																													
	Variabel X1			Variabel X2			Variabel X3			Variabel X4			Variabel X5			Variabel X6			Variabel X7			Variabel X8			Variabel X9			Variabel X10		
No. Res	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	X8.3	X9.1	X9.2	X9.3	X10.1	X10.2	X10.3
1	8	8	7	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7
2	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	8	7	9	9	8
1555	9	9	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1556	9	9	9	9	9	9	9	9	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	5	5
6908	9	8	9	9	8	9	9	8	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	8	8
6909	9	8	8	9	9	8	9	9	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	9	8
6910	7	7	7	8	8	7	8	8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	8	8
6911	8	8	7	7	8	7	7	8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	8	7
10491	3	3	3	1	3	2	1	2	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	2	2
10492	7	7	6	7	7	6	7	7	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	6	7
10493	9	5	5	8	7	5	8	7	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	8	7
10494	7	6	7	7	6	7	6	7	7	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	7	7
11724	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
11725	9	9	9	9	9	9	9	9	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	5	9	9	5	9	9	7	9	9	6	9	9	5	9	9	6
14591	8	8	8	8	8	8	8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	8	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Score of PPA X(i,j)	7,39	7,20	6,74	7,38	7,34	6,64	7,20	[illegible]	[illegible]	7,64	7,68	7,11	7,44	7,46	7,00	7,37	7,20	6,91	7,43	7,29	6,97	7,40	7,25	6,93	7,31	7,12	6,84	7,33	7,18	6,89
Stand.Dev. (SD)	1,75	1,68	1,62	1,71	1,70	[illegible]	[illegible]	1,68	1,64	1,74	1,71	1,67	1,72	1,69	1,64	1,68	1,64	1,60	1,71	1,66	1,63	1,71	1,66	1,64	1,75	1,70	1,66	1,73	1,70	1,66
Score of Var. Xi	7,05			[illegible]			6,96			7,45			7,27			7,12			7,19			7,15			7,04			7,09		
Score of IHal	7,13																													
PRMR	5,56%			6,07%			5,50%			5,31%			5,18%			4,75%			5,21%			5,37%			5,70%			5,35%		

Kesimpulan Umum:
1. SSP atas PPA dengan SAS 6,5 dan 6,0. Jumlah titik diuji 30, Jumlah titik kategori "Signifikan" 100% atau 30 of 30.
2. Standar Deviasi, dengan batas acuan 2,0. Jumlah titik diuji 30, kategori duharapkan (rendah) 100%, atau 30 of 30
3. Proporsi responden Menilai Rendah (PRMR). Jumlah titik diuji 10. Batas acuan maksimal 10%, hasil 100% baik atau 10 of 10.
4. Kesimpulan keseluruh atas Skor IHal "**Sangat Baik**".

Score IHal = (X1x15,05%)+(X1x14,95%)+(X3x7,88%)+(X4x7,54%)+(X5x7,5%)+(X6x11,00%)+(X7x11,00%)+(X8x8,56%)+(X9x8,15%)+(X10x8,29%)

Score of Variabel xi = (Xn.1x20%)+(Xn.2x40%)+(Xn.3x40%)

Standar Deviasi (SD) = STDEV (Sum Xn.n:total responden)

Adapun analisis penyebab keberhasilan dalam meningkatkan nilai Indeks Harmoni Indonesia:

1. Penguatan Program Pendidikan dan Literasi: Mengingat variabel X4 (Pendidikan) memiliki dampak yang signifikan, disarankan untuk memperkuat program pendidikan di wilayah tersebut. Ini dapat melibatkan inisiatif peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan literasi pendidikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik;
2. Pemberdayaan Kearifan Lokal: Dengan adanya variabel X7 (Kearifan Lokal) yang memegang peran penting, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan upaya lebih lanjut dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Hal ini dapat melibatkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelestarian budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tradisional;
3. Stimulasi Partisipasi Masyarakat: Melihat variabel X9 (Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan), Pemerintah Daerah dapat merancang kebijakan yang merangsang Indeks Harmoni: Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel & Kredibel partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Program kerukunan antar umat beragama juga dapat ditingkatkan untuk memperkuat kerjasama lintas agama;
4. Implementasi Kebijakan Pendukung Keberagamaan: Variabel X8 (Kebijakan Pendukung Keberagamaan)

menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penyempurnaan kebijakan atau pembuatan kebijakan baru yang lebih progresif dalam mendukung keragaman keberagamaan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari data non-struktural, usul saran, dan kritik masyarakat menjadi poin penting untuk meningkatkan interaksi dan keberlanjutan program pemerintah. Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui usul, saran, dan kritik yang mencakup beragam isu. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan peningkatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, implementasi program edukasi yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan lebih lanjut kepada ormas serta masyarakat sipil. Inovasi kebijakan pendukung keberagamaan dan kolaborasi antar berbagai pihak juga muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk respons yang holistik dan inklusif terhadap dinamika sosial dan budaya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam riset publik Indeks Harmoni Indonesia. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari masyarakat:

1. Peningkatan pemahaman tentang keberagaman;
2. Edukasi sebagai upaya mempertahankan harmoni;
3. Memperkuat kearifan lokal, moderasi beragama, pencegahan intoleransi, dan membangun kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 45;
4. Penguatan moderasi beragama di lini terbawah masyarakat; dan
5. Menanamkan sifat gotong-royong.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu Riset Publik Indeks Harmoni Indonesia menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan antara berbagai pihak, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sukarelawan. Kerjasama ini dirancang untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses riset. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan dukungan regulasi, serta memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mungkin memberikan keahlian akademis dan sumber daya penelitian.

LSM seperti *Wellbeing Institute* dapat berkontribusi dengan perspektif dan pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat, sementara sukarelawan mungkin turut serta dalam pengumpulan data atau kegiatan lainnya. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, termasuk peningkatan kualitas penelitian, representasi yang lebih baik dari masyarakat, serta penerapan hasil riset yang lebih berdampak. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa riset publik Indeks Harmoni Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat harmoni di masyarakat, serta menjadi landasan untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut dalam mencapai tujuan harmonisasi.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja Indeks Harmoni Indonesia, diantaranya:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi
   a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Meningkatkan Stabilitas Politik Nasional Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 di Cengkeh Ballroom Lt. 1 Menara Peninsula Hotel dengan mengundang secara daring Sekretaris Daerah, Ketua Satgas Pangan, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Perindag, Kepala Badan Ketahanan Pangan/Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Adapun yang hadir secara luring dari Badan Bulog, Kementerian Pertanahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Pada Rakornas ini membahas tentang dampak resesi global bagi Indonesia, pengaruh stabilitas dan ketersediaan terhadap Inflasi, dan perkembangan harga pangan pokok strategis.
   b. Menyelenggarakan Forum Dialog Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Investasi yang dilaksanakan di Same Hotel Bira pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi wisata, ekonomi kreatif dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan investasi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia.
   c. Menyelenggarakan Forum Dialog Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di Murakabi Craft Kabupaten Kulonprogo sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari Jadi ke-72 Kabupaten Kulonprogo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, Kabupaten Kulonprogo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan sebesar 18% dan jumlah stunting yang meningkat dari 14,9% menjadi 15,8% pada Tahun 2022. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong penguatan ekonomi melalui potensi pariwisata dan kebudayaan, penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan perekonomian berbasis keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Adapun Output pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
      1) Terlaksananya Dialog (Talk Show) Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
      2) Terlaksananya kegiatan Forum Dialog Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi; dan
      3) Terwujudnya sinergitas dan kolaborasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ketahanan ekonomi melalui potensi pariwisata dan kebudayaan, kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta perekonomian berbasis keluarga.

2. Dimensi Keberagaman
   a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema "Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat beragama Dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman, Damai dan Harmoni

      Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema "Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat beragama Dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman, Damai dan Harmoni yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Hotel Novotel Tanggerang, Banten. Kegiatan tersebut bertujuan untuk:
      1) Memahami Konsep toleransi antar-umat beragama;
      2) Mengantisipasi timbulnya konflik yang disebabkan oleh faktor agama, maupun faktor politik, ekonomi atau lainnya yang dikaitkan dengan agama;
      3) Menjaga Harmoni antar umat beragama;
      4) Mensinergikan kebijakan antar stakeholder pusat dan daerah; dan
      5) Rumusan langkah – langkah strategis Pemerintah dalam menjaga kondusifitas hubungan antar umat beragama menjelang Pemilu.
   b. Menyelenggarakan Forum Dialog Generasi Milenial Lintas Agama Mewujudkan Harmoni Indonesia Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 Yang Aman Dan Damai

      Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan dapat diwujudkan oleh pemangku kepentingan dalam masyarakat, Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, yang dapat mempengaruhi dalam menciptakan kondisi yang harmoni, aman dan tertib di daerah. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan berupa forum dialog Generasi Milenial Lintas Agama Mewujudkan Harmoni Indonesia Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 Yang Aman Dan Damai.
   c. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Sim-Ekososbud-FKUB

      Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialisasi aplikasi Sim-Ekososbud-FKUB dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-isu Strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bertujuan untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu program kegiatan

3. Dimensi Harmoni Sosial dan Budaya
   a. Menyelenggarakan Rakornas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan Tema "Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Aman, Damai, dan Harmoni" yang dilaksanakan pada tanggal 11 Aprli 2023 di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara yang bertujuan untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mungkin akan terjadi, termasuk dalam menjaga stabilitas ketahanan sosial yang merupakan salah satu unsur dalam ketahanan nasional.
   b. Menyelenggarakan acara Indonesia Maju Expo & Forum 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 4 Juni 2023 bertempat di Parkir Selatan Taman Mini Indonesia Indah dengan tema sentral "Transformasi Ekonomi & Nasionalisme Untuk Indonesia Berkelanjutan".
   c. Menyelenggarakan Webinar Sinergitas Peran Pemerintah dan Masyarakat Melawan Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan P4GN, sosialisasi kepada Pemerintah Daerah agar mengetahui peran masing-masing dalam kegiatan P4GN, dan Meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bidang memerangi narkoba.
   d. Menyelenggarakan Webinar Peran Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Rehabilitasi Korban NAPZA yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 secara daring via zoom meeting, webinar ini merupakan tindaklanjut Rapat Terbatas mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkoba yang dipimpin oleh bapak Presiden RI pada Tanggal 11 September 2023 yang menekankan pentingnya melakukan terobosan dalam menangani masalah narkoba yang telah merusak generasi bangsa.
   e. Menyelenggarakan Komunikasi Sosial Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dengan tema "Generasi Mudah Bersih Narkoba" yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 di GH Universal Hotel Bandung sebagai upaya sosialisasi agar Pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui peran masing-masing dalam P4GN dan PN di Indonesia.
   f. Menyelenggarakan Komunikasi Sosial Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Sosialisasi Aplikasi SIP4GN yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 di Hotel Sari Ater Kamboti Bandung sebagai bimbingan teknis dalam rangka mengoptimalkan pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan P4GN dan PN di daerah dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi P4GN yang telah dikembangkan sejak tahun 2020.
   g. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Badan Kesbangpol Provinsi Bali dalam rangka Koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sekaligus pembahasan Instrumen Pelaksanaan Komunikasi Sosial dan Politik Nasional.

Gambar 3.2
Infografis Indeks Harmoni Indonesia

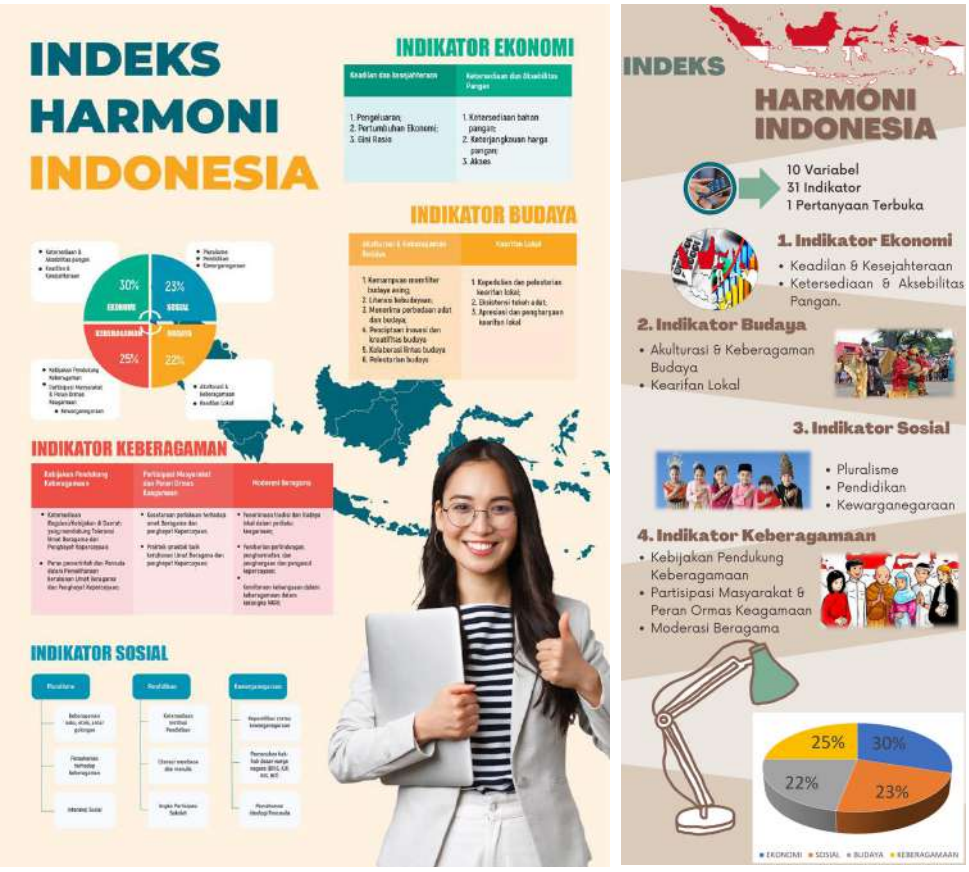

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan (ATHG) dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dini. ATHG sendiri diartikan sebagai upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan dan mengawal sasaran "Meningkatnya Kewaspadaan Nasional" dengan indikator kinerja Indeks Kewaspadaan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, Direktorat Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi, pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kewaspadaan Nasional"** diperoleh **sebesar 120%.** Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat sangat tinggi** atau **kategori sangat berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	Nilai 76,83	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**120%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan terhadap gangguan di masyarakat. Selain itu, indikator ini dijadikan pula sebagai alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dalam deteksi dini dan cegah dini bidang Kewaspadaan Nasional, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewaspadaan nasional di daerah masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melakukan penyesuaian terhadap Dimensi, Variabel dan Indikator pada pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional, sehingga pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional menggunakan 4 Dimensi, 11 Variabel dan 23 Indikator yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.20
Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional

Dimensi	Variabel	Indikator
Konflik pemerintahan	Konflik pemerintahan	Penyebab konflik
		Sumber konflik
		Jenis konflik
		Hubungan kelembagaan
		Kualitas pelayanan
	Penanganan konflik	Penanganan
	Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	Aktor
	Sistem penyelesaian perselisihan	Musyawarah mufakat
	Meredam konflik	Penanganan
Kewaspadaan informasi media	Literasi informasi	Disinformasi
		Sebar
		Verifikasi
Kewaspadaan dini	Toleransi	Toleransi Agama
		Toleransi suku/etnis
	Pencegahan	Upaya
	Nasionalisme	Wawasan Kebangsaan
		Patriotisme
		Nasionalisme/menghargai
	Cinta tanah air	Pengibaran bendera
		Pajak
Pengawasan orang asing	Ancaman asing	TKA ancaman
		WNA dirikan ormas asing
		Keberadaan orang asing

Dimensi konflik pemerintahan, merupakan upaya antisipasi dan penanganan terhadap konflik yang terjadi antar dan inter instansi pemerintahan, variabel yang diambil meliputi upaya penanganan, partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, sistem penyelesaian konflik dan upaya meredam konflik. Contoh konflik Pemerintahan, diantaranya soal perpecahan koalisi pemerintahan daerah pasca menang pilkada serta pada saat menjalankan roda Pemerintahan atau adanya konflik kepentingan yang terkait dengan implementasi kewenangan dan kebijakan pada pemerintahan daerah seperti batas wilayah maupun penunjukan pejabat pemerintahan.

Dimensi kewaspadaan informasi dan media dalam konteks konflik pemerintahan melibatkan pemahaman dan pengelolaan informasi serta media yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap

pemerintahan dan konflik yang terjadi. Hal ini mencakup penyebaran berita palsu, pengaruh media sosial dan upaya untuk mengontrol narasi publik. Kewaspadaan terhadap informasi dan media menjadi penting untuk memahami dinamika konflik dan mencegah disinformasi yang terus menyebar ke masyarakat dan pemerintahan. Dimensi ini mengulas soal tren pesebaran disinformasi, yang diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator dan dioperasionalisasi dalam sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah pernah menerima kabar disinformasi (*hoax*). Apakah terpengaruh dengan isi disinformasi. Apakah menyebarkan disinformasi tersebut. Apakah tahu cara membedakan isi disinformasi.

Dimensi kewaspadaan dini mencakup upaya identifikasi, analisis, dan pemantauan tanda-tanda awal konflik sebelum eskalasi yang serius. Ini melibatkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi konflik, memungkinkan pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanganan sebelum konflik menjadi lebih kompleks atau merugikan pemerintahan. Dimensi kewaspadaan dini mengambil variabel mengenai toleransi, upaya pencegahan, nasionalisme dan cinta tanah air.
Dimensi Pengawasan orang asing meliputi upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman asing yang meliputi tenaga kerja asing, peneliti asing, tenaga ahli/pakar asing, artis asing, rohaniawan asing dan keberadaan orang asing.

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2023 dilakukan pada 5 Provinsi dan perwakilan 5 Kabupaten/Kota dimasing-masing Provinsi. Berikut lokus pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional:

Tabel 3.21
Lokasi dan Hasil Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Hasil
1	Provinsi Lampung	75,97	Nilai 76,83	70,19
2	Provinsi Jawa Tengah	79,45	Kota Semarang	80,89
3	Provinsi Jawa Timur	76,93	Kabupaten Nganjuk	81,66
4	Provinsi Banten	81,99	Kota Serang	74,6
5	Provinsi Sulawesi Selatan	74,6	Kabupaten Maros	70,19
Agregat: 76,83				

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tahun ini belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dilakukan pemilihan lokus yang didasari atas tingginya jumlah penduduk, heterogenitas masyarakat dan sebaran wilayah lokus, diharapkan dapat mewakili daerah barat, tengah dan timur. 5 Provinsi yang dilakukan pengukuran merupakan daerah-daerah yang memiliki tingkat potensi konflik atau kerawanan yang cukup tinggi, khususnya menjelang tahun politik yang akan melaksanakan Pemilu dan Pemilukada.

Berikut pelaksanaan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional pada tahun 2023 diperoleh hasil antara lain:

1. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Lampung dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.3
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung

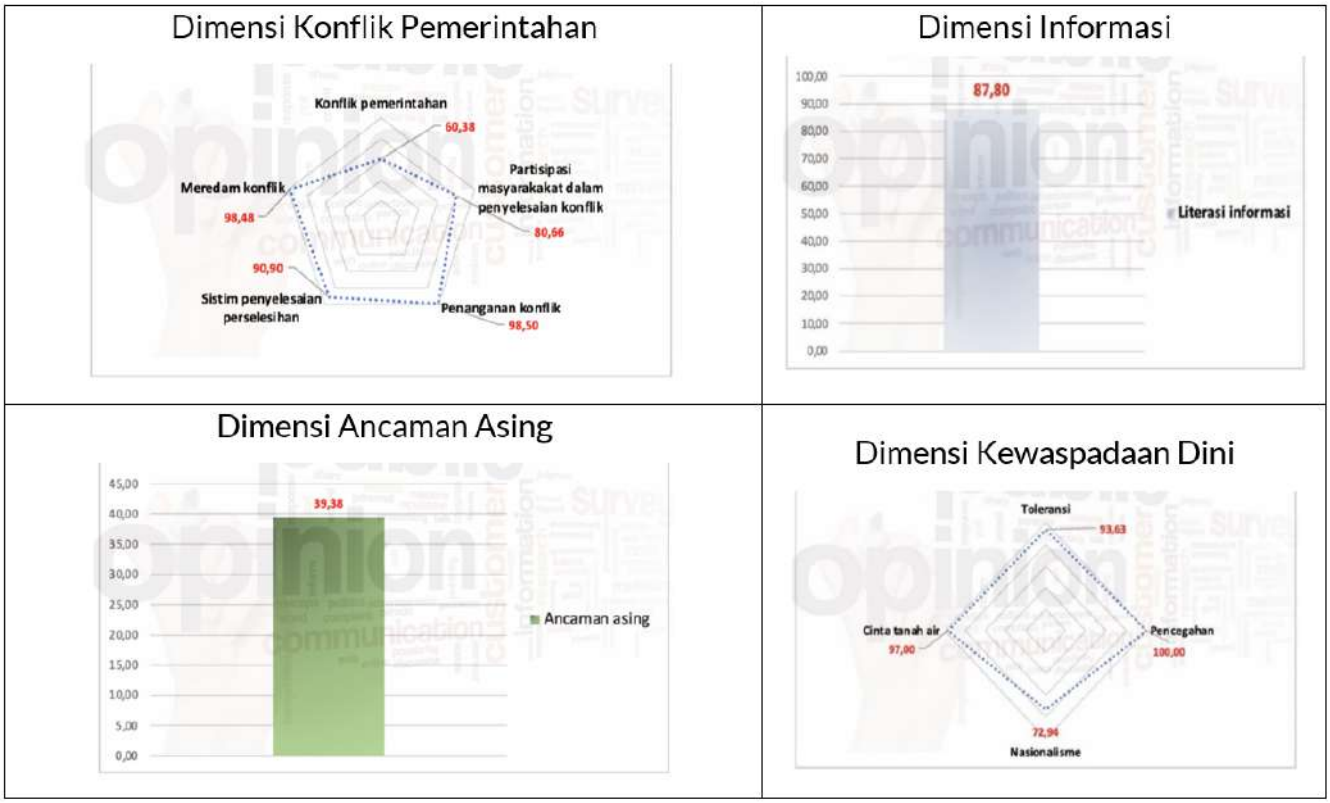

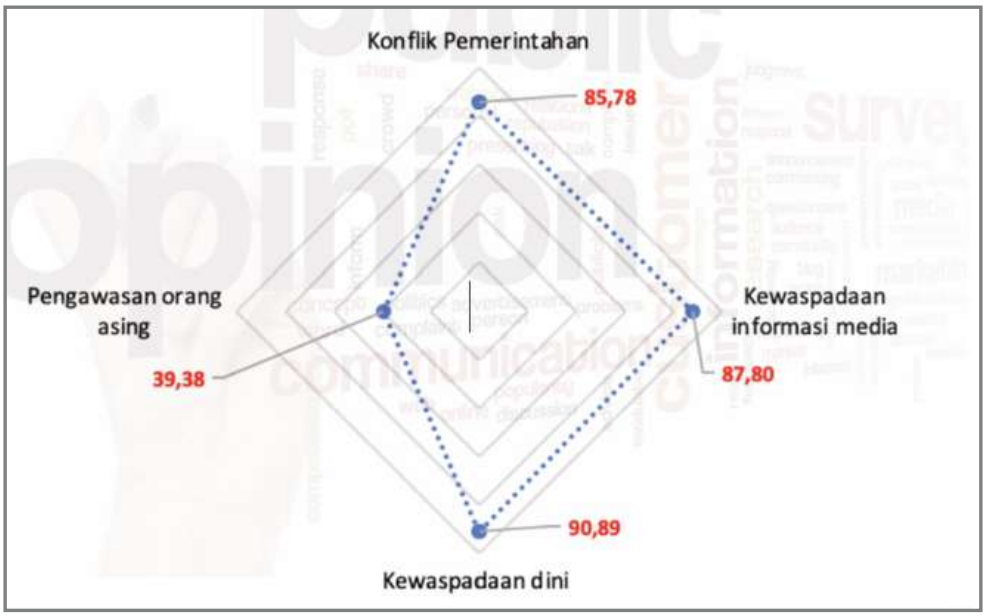

2. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Pringsewu, dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023

   Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.4
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Pringsewu

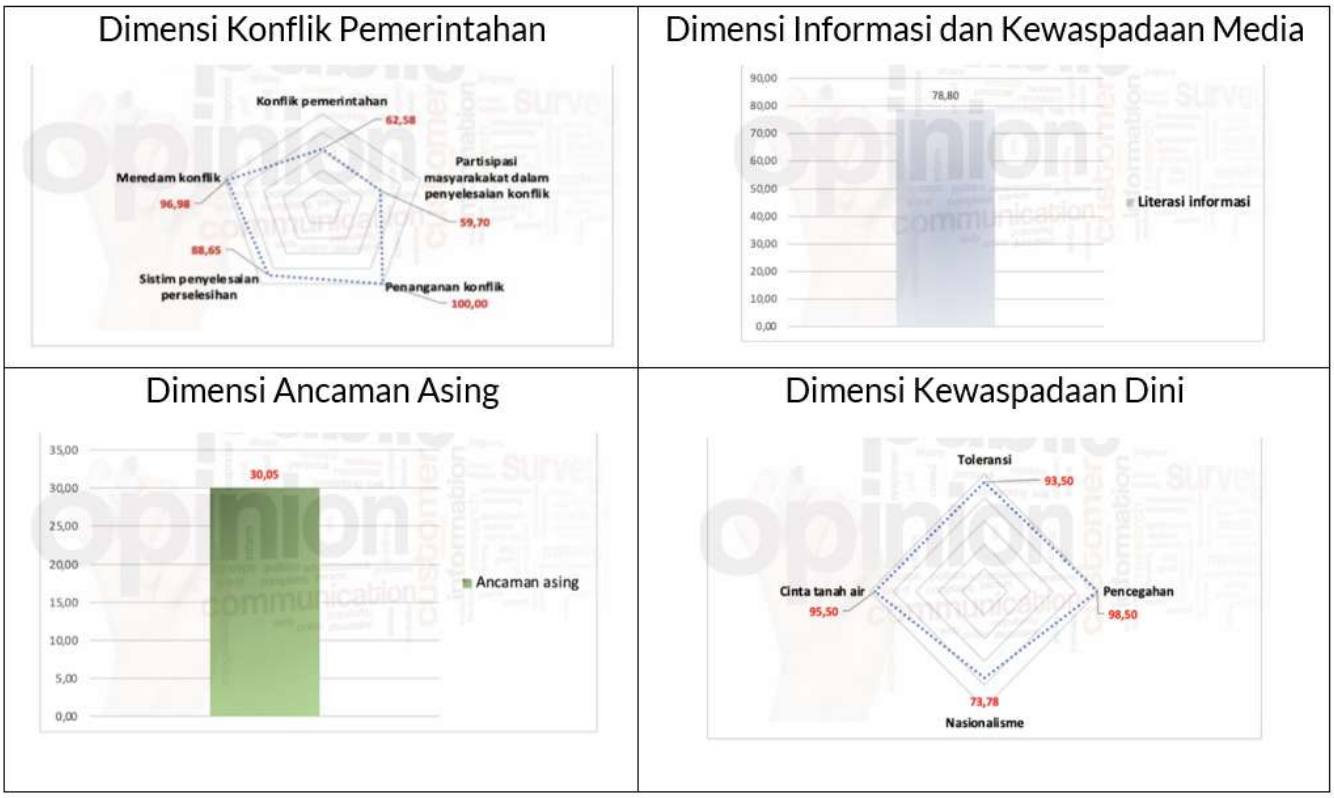

3. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.5
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah

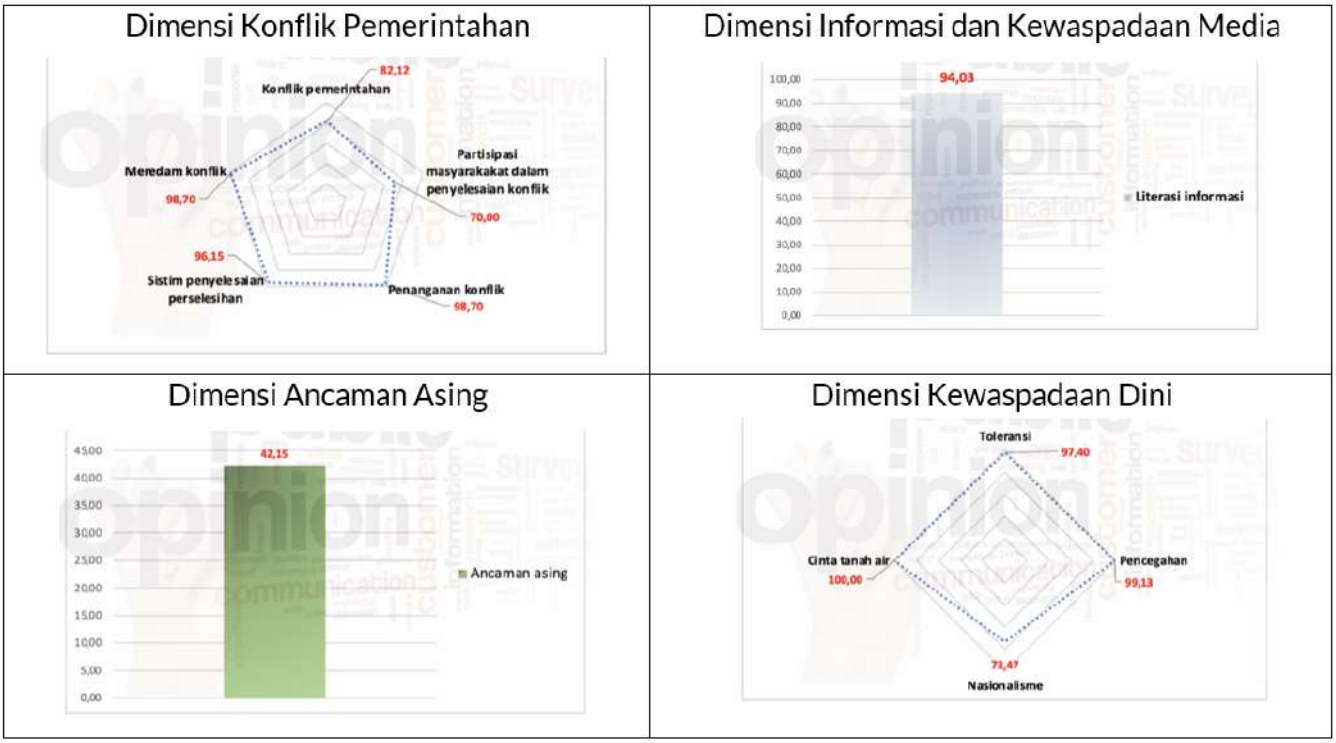

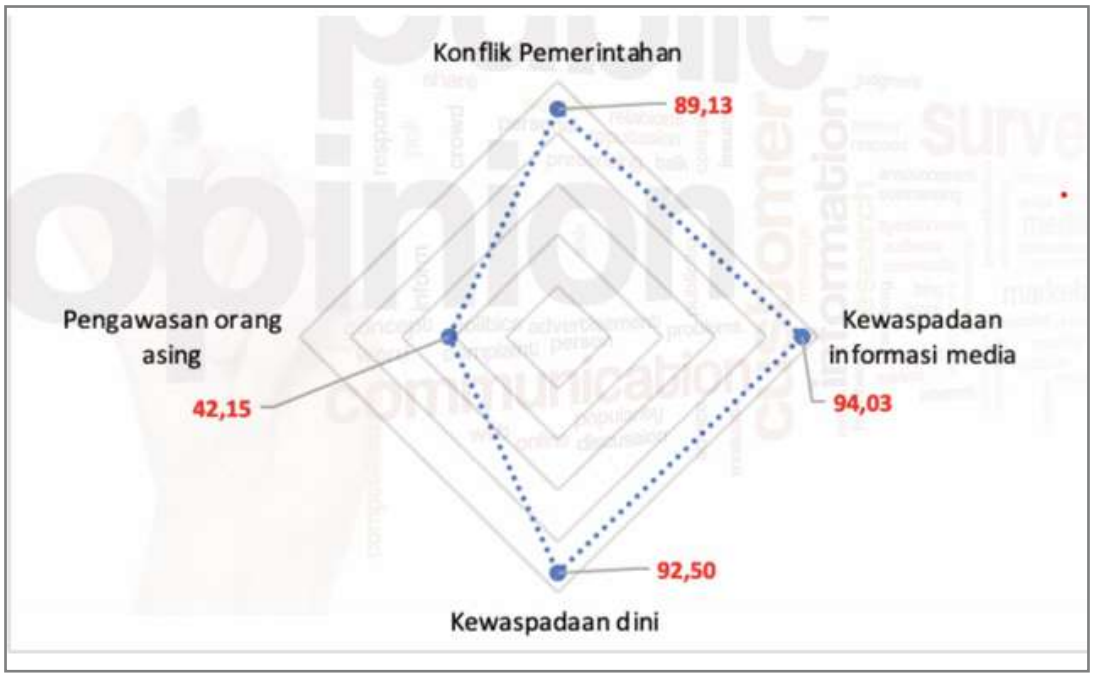

4. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ke Kantor Kesbangpol Kota Semarang, dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kota Semarang, dapat dilihat sebagai berikut:

   Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.6
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Semarang

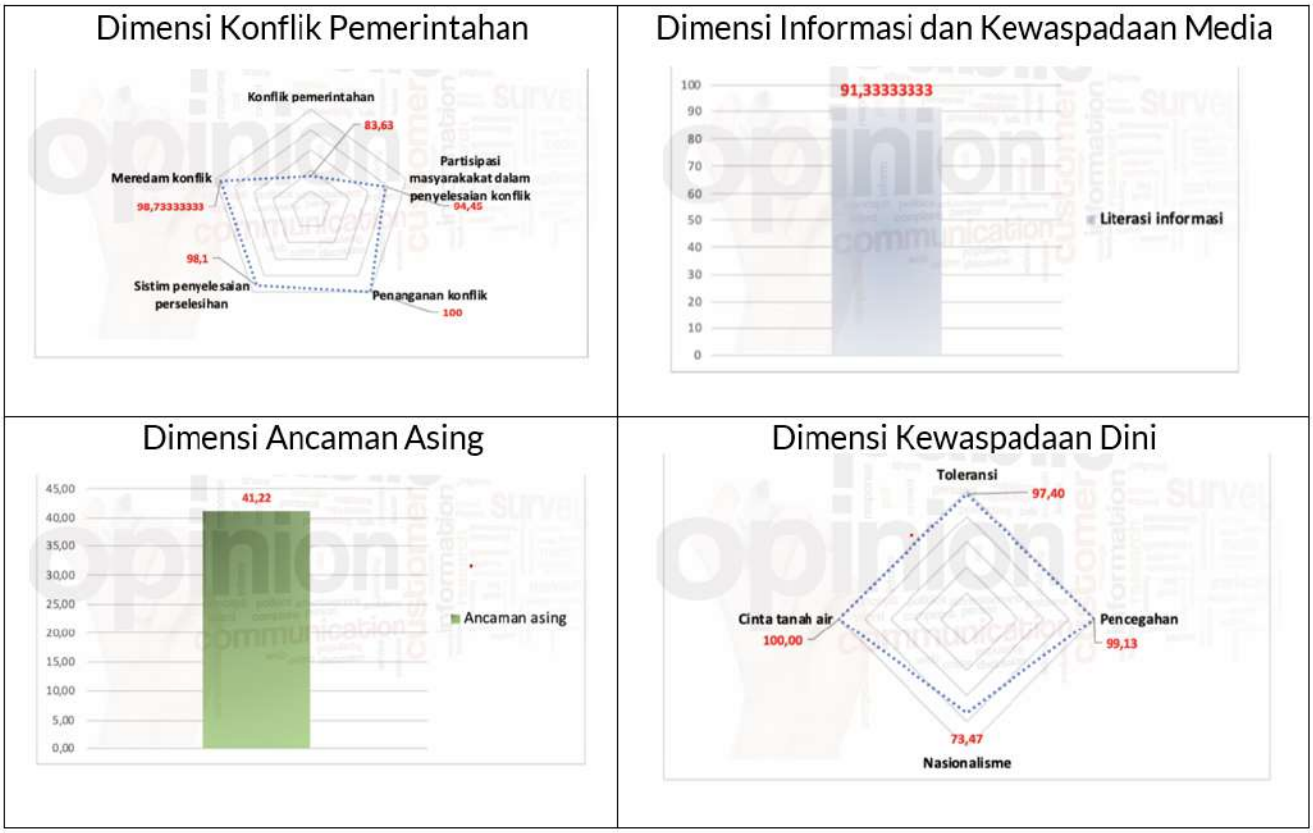

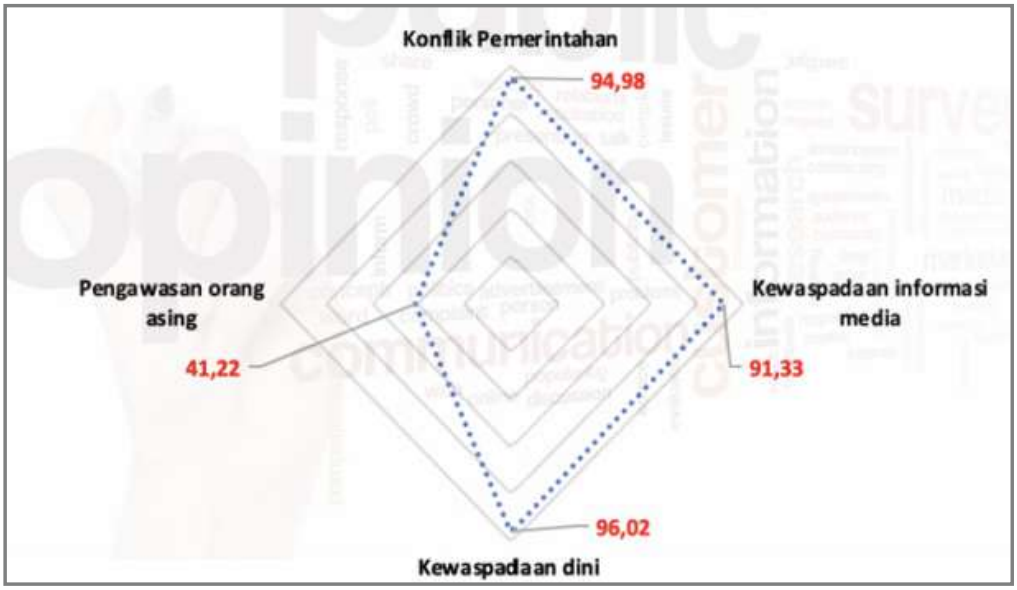

5. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi grafik 9 dan 10 sebagai berikut:

Gambar 3.7
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Timur

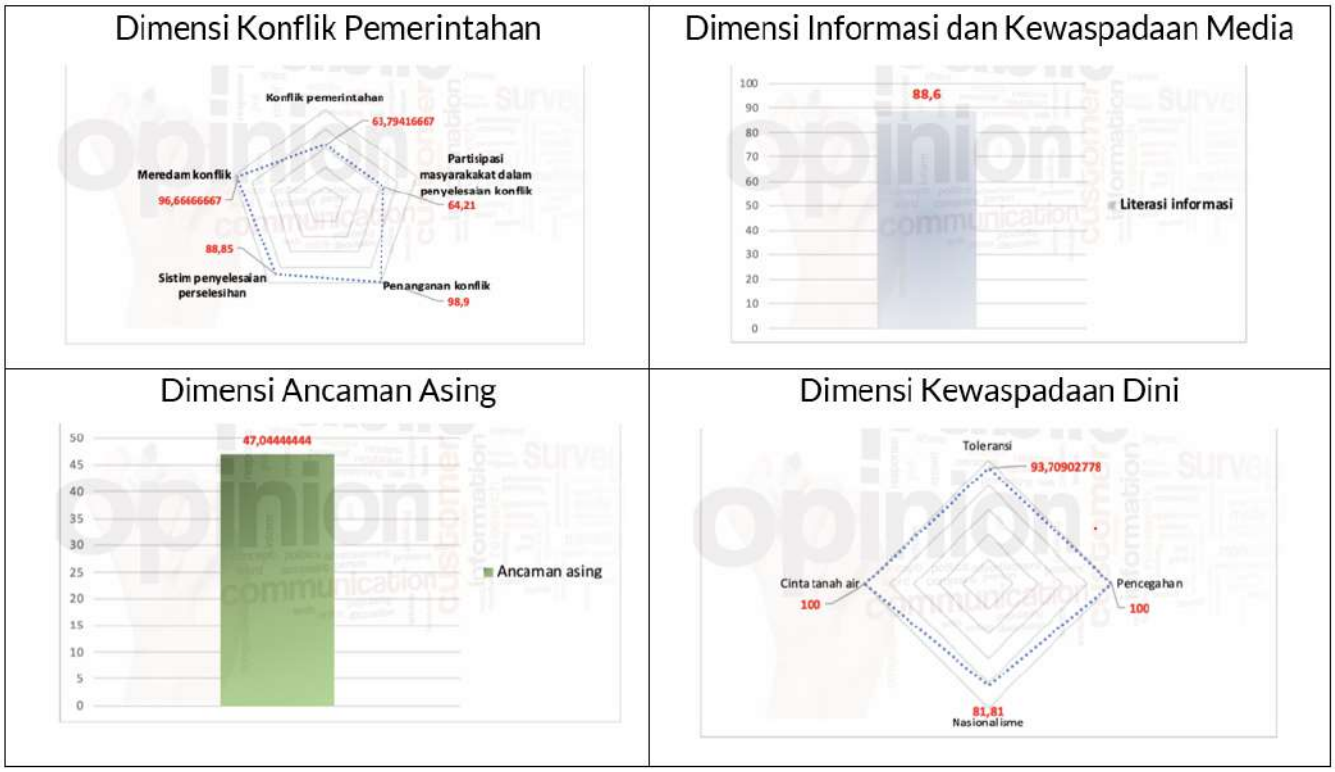

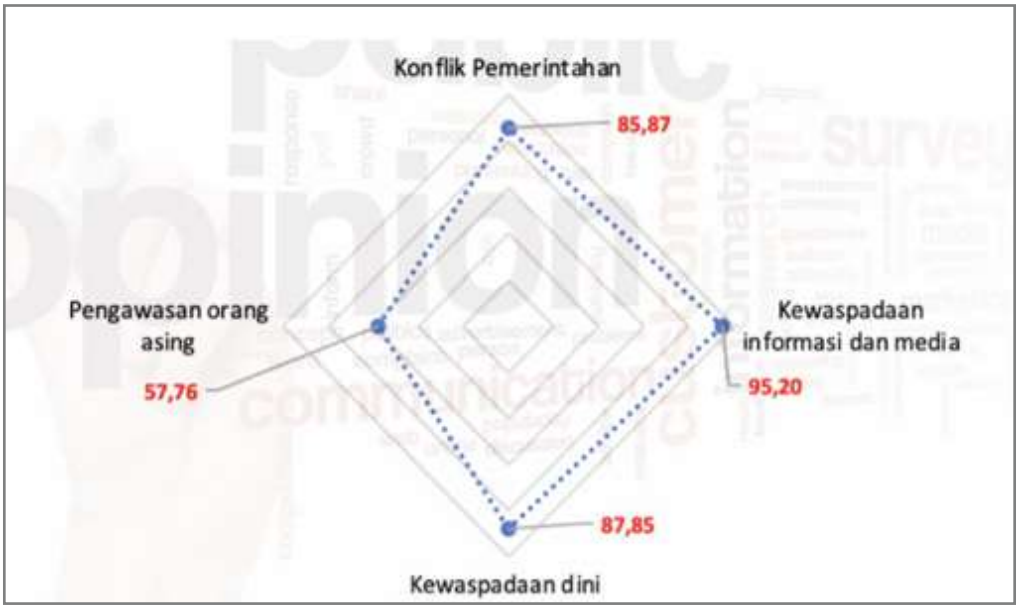

6. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Kabupaten Nganjuk dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.8
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Nganjuk

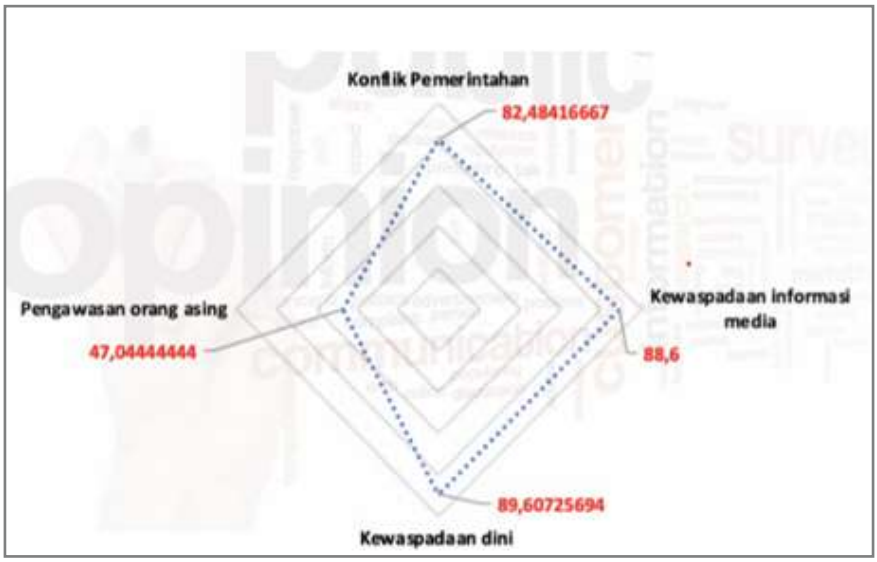

7. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Banten dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.9
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten

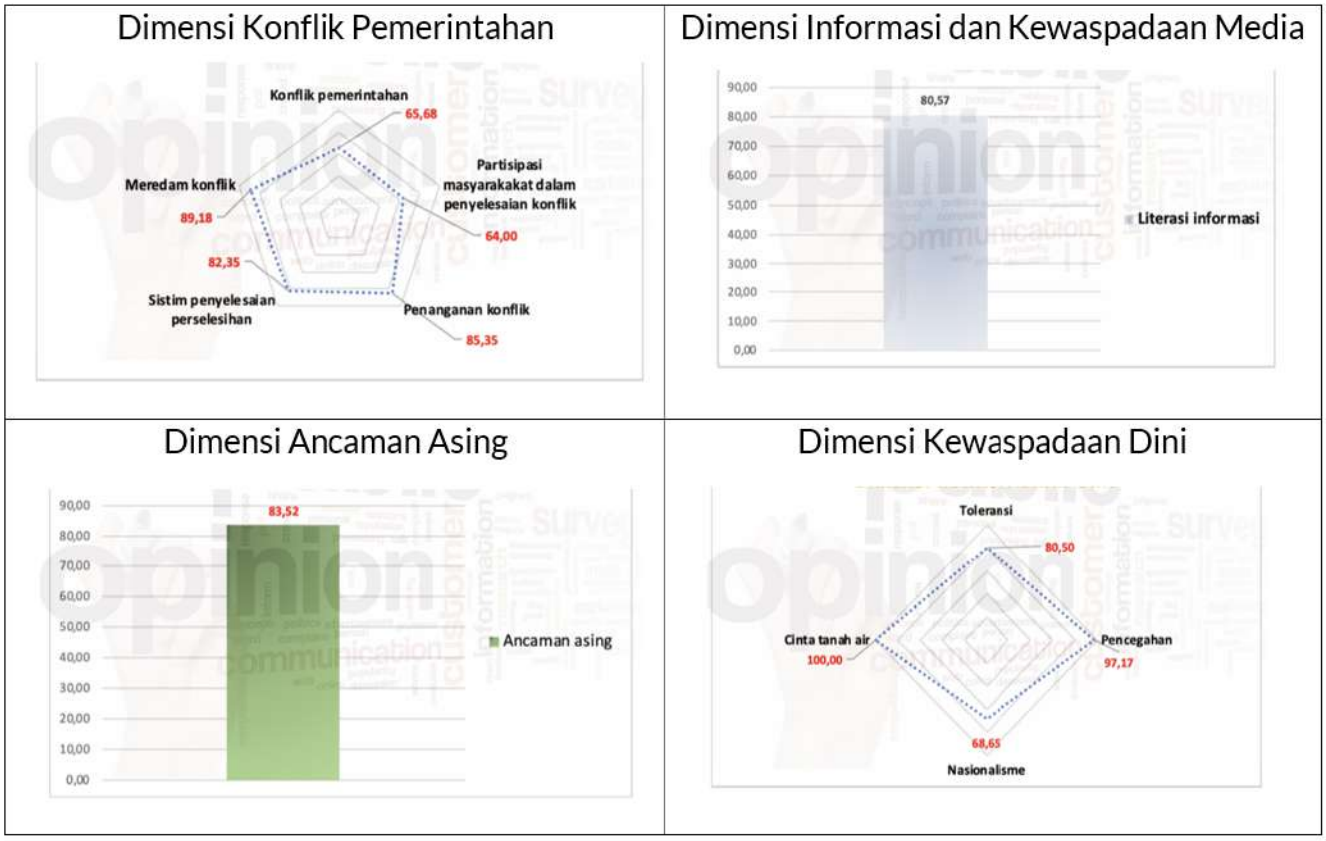

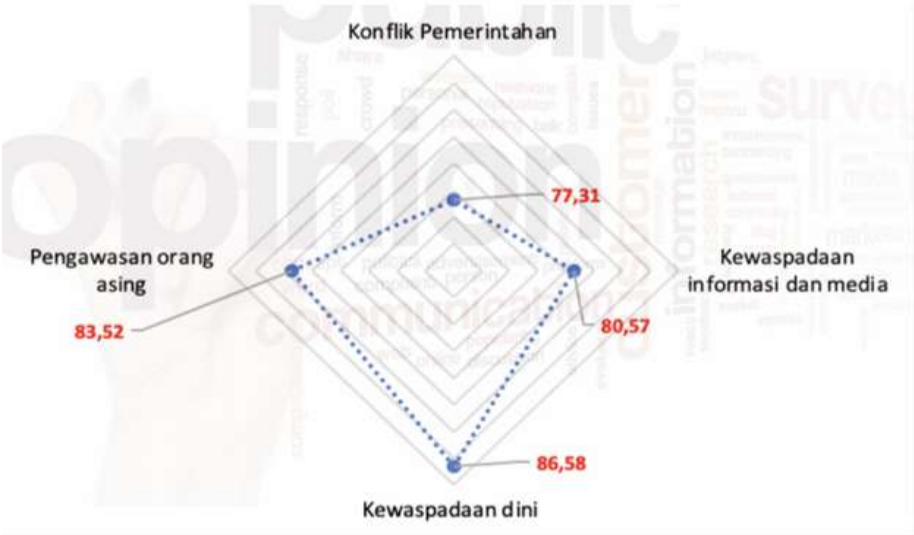

8. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Banten dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.10
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Serang

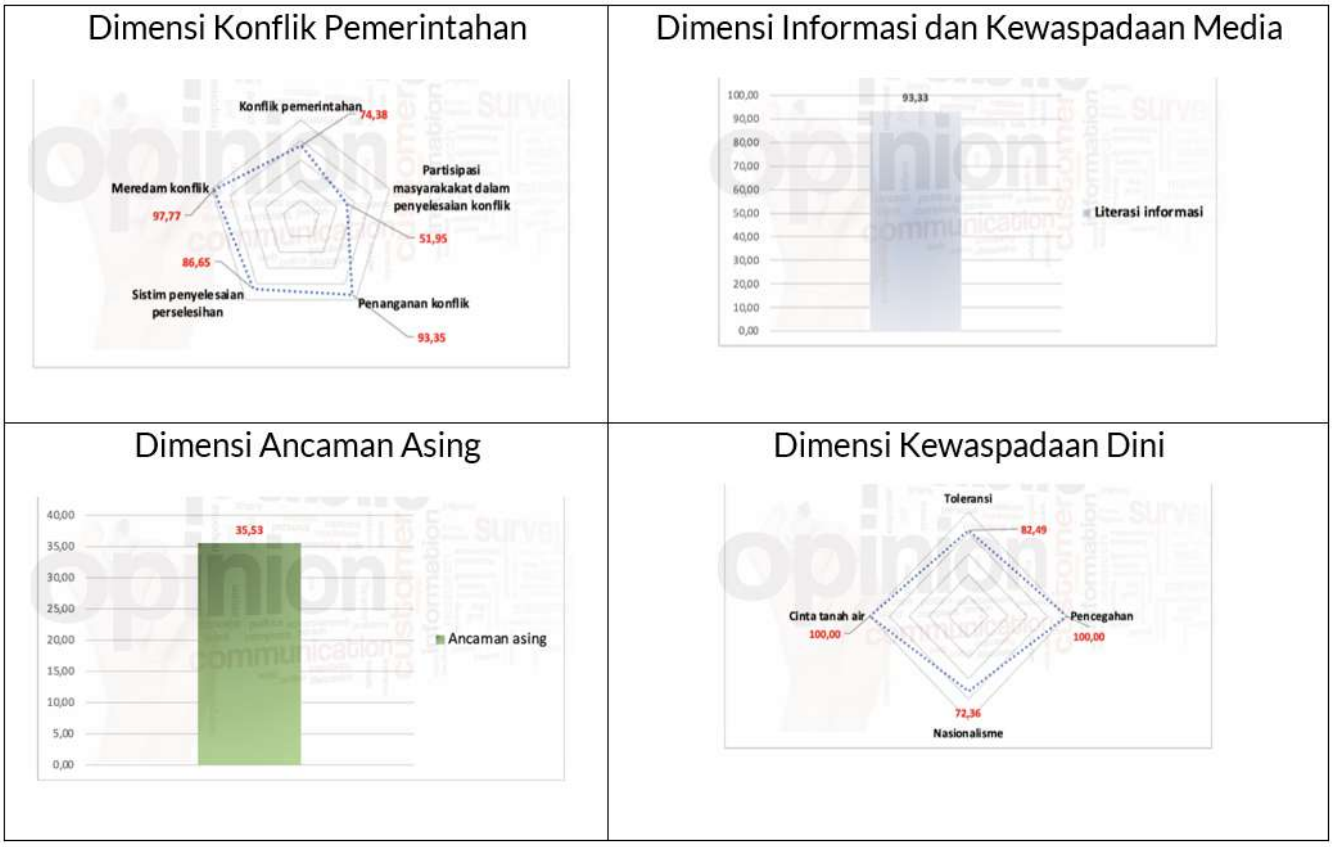

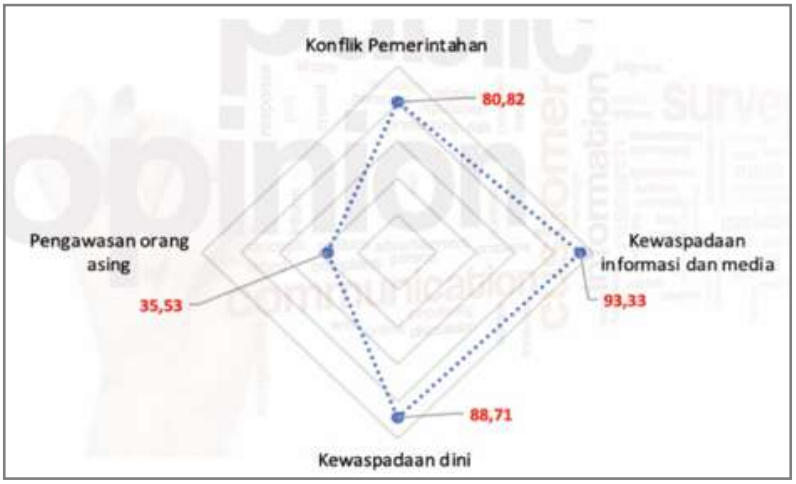

9. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.11
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan

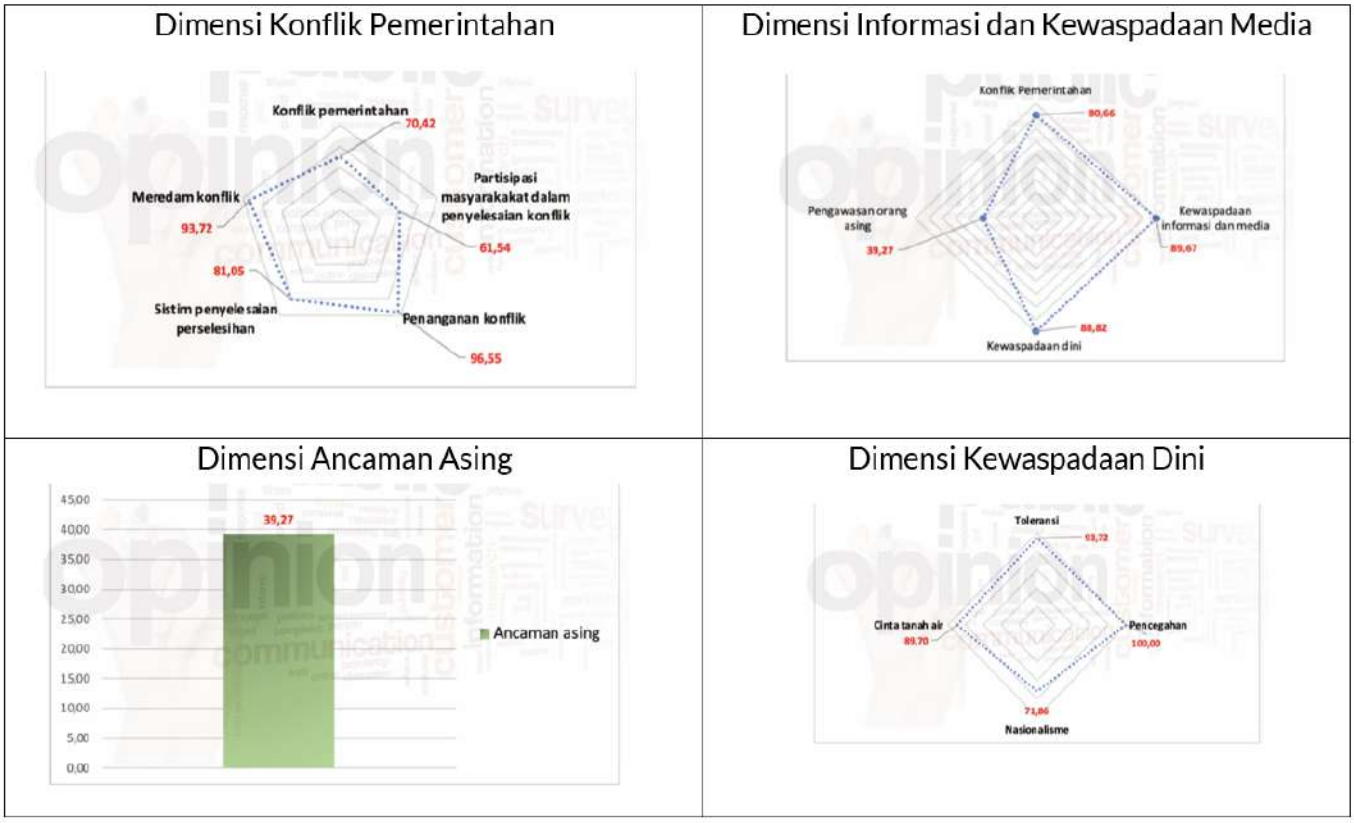

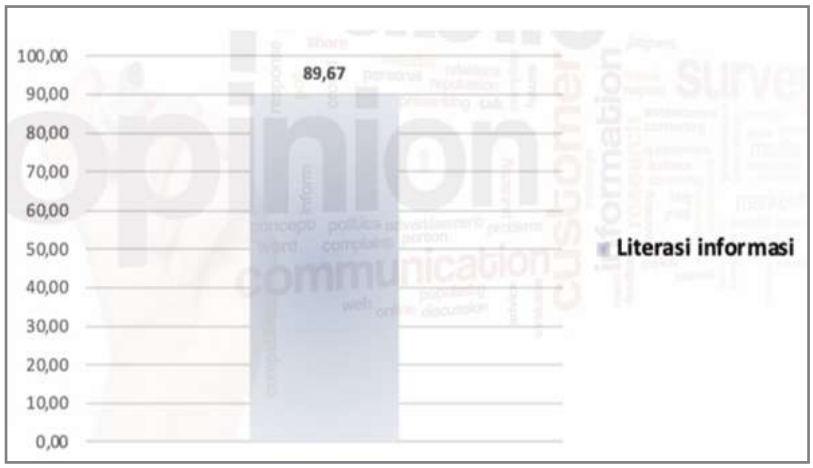

10. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Maros, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kabupaten Maros, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.12
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Maros

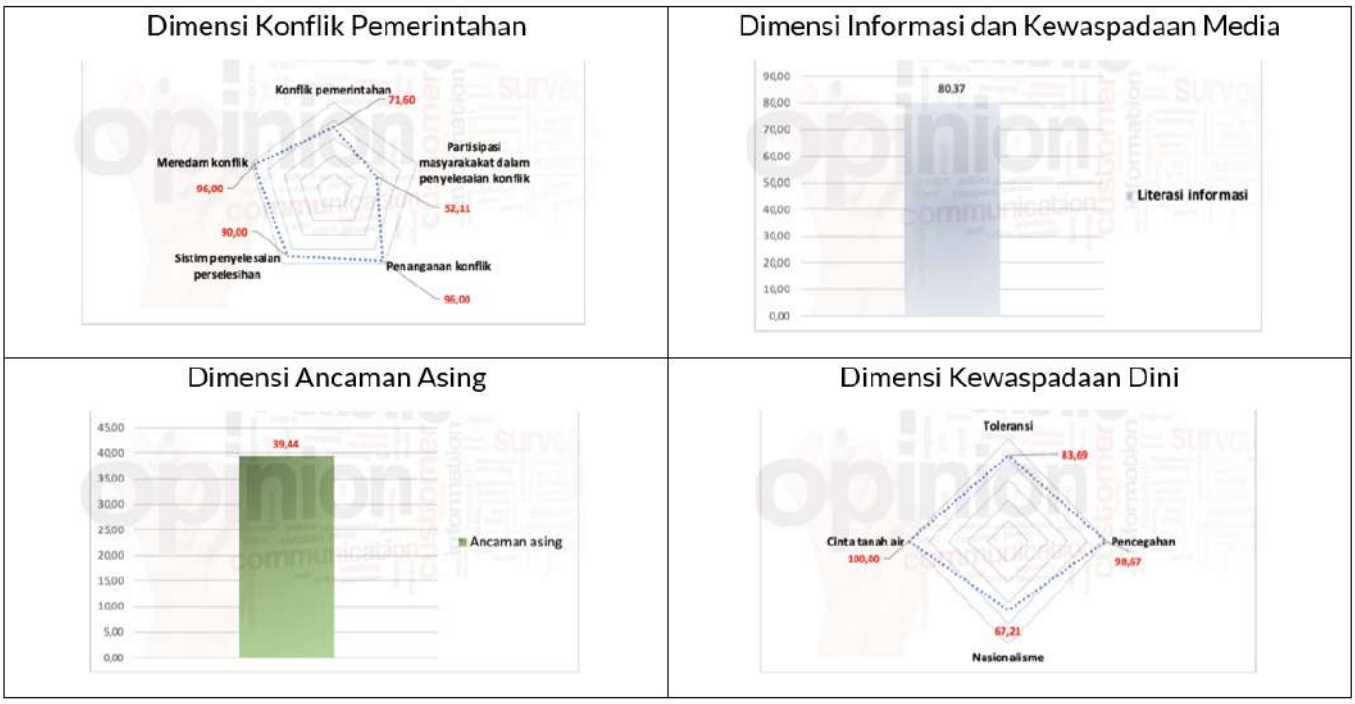

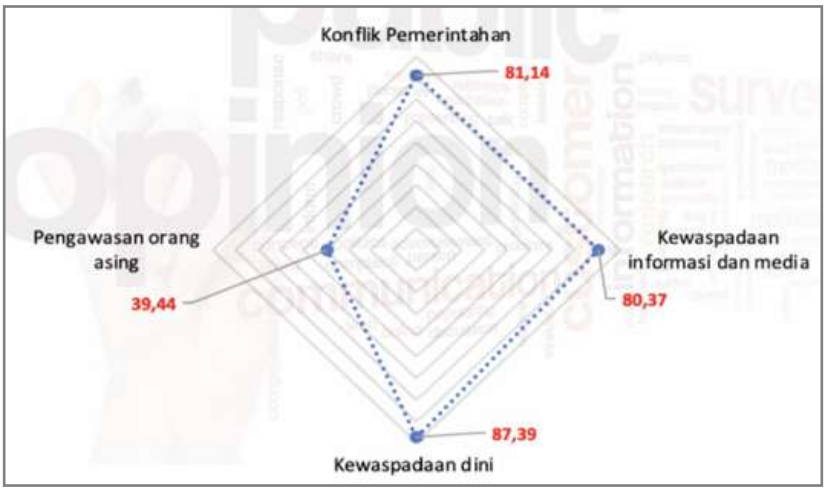

Dari hasil pengukuran di atas, diketahui bahwa Provinsi Banten memiliki nilai indeks kewaspadaan nasional yang tertinggi yaitu 81,99, artinya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam kewaspadaan nasional. Sedangkan daerah yang memiliki nilai indeks terendah adalah pada Kabupaten Pringsewu yaitu 70,19. Hasil pengukuran masing-masing daerah di atas kemudian dilakukan pengukuran secara agregat atau rata-rata atas keseluruhan atas hasil Indeks yang sudah dilakukan. Hasil agregat pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tahun 2023 diperoleh nilai 76,83.

Nilai sebesar 76,83 dimaksud berada dalam *range* kategori Sangat Tinggi, hal ini menggambarkan kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah cukup baik. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dimulai pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks selalu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Nilai capaian Indeks Kewaspadaan Nasional tahun ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor antara lain, adanya penyesuaian terhadap dimensi, variabel dan indikator serta perubahan lokus dan jumlah yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah lokus tentu mempengaruhi variasi nilai capaian Indeks Kewaspadaan Nasional, namun nilai yang diperoleh masih mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis.

Analisis keberhasilan capaian Indeks Kewaspadaan Nasionaldidukungolehimplementasitugasdanfungsi bidang kewaspadaan di pemerintah daerah, yang meliputi:

1. Bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen di daerah.
2. Kewaspadaan informasi dan media.
3. Fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah.
4. Pengawasan orang asing dan lembaga asing pelaksanaan pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan penanganan konflik pemerintah.

Secara umum dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten

Kategori	Rentang Nilai	Kode
Sangat Baik	>100	Biru
Baik	80-100	Hijau
Cukup	50-79	Kuning
Kurang	<49	Merah

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan dengan cara pembobotan yang dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran pendapat mayoritas masyarakat.

Teknik wawancara responden menggunakan tiga (3) metode pertanyaan. Pertama, teknik pertanyaan tertutup, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Kedua, teknik pertanyaan setengah tertutup atau terbuka, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Jika pilihan jawaban yang diberikan tidak memuaskan, maka responden diberikan kesempatan atau peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya. Ketiga, teknik pertanyaan terbuka, yaitu responden tidak diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Responden diberikan kesempatan atau peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya.

Survei ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokus yaitu 5 Provinsi dan perwakilan 5 Kabupaten/Kota, Responden yang dipilih adalah seluruh ASN dan CPNS, di Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol). Terpilihnya Provinsi diatas sebagai tempat pelaksanaan survei dikarenakan dua (2) alasan, yaitu keterbatasan pembiayaan riset dan waktu dan jumlah aparatur Kesbangpol yang tidak terlalu banyak menjadi alasan pendukung lainnya. Dengan begitu, jumlah biaya pelaksanaan riset yang tersedia serta jumlah aparatur Kesbangpol yang dijadikan responden saling berkaitan.

Dalam penghitungan perumusan 4 dimensi 11 indikator dan 23 variabel maka peneliti menghitung dengan metode perumusan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Indikator} = \frac{n\ Total\ Indikator}{n\ Indikator} \text{x } 100\%$$

$$\%\ \text{Variabel} = \frac{n\ Total\ Indikator}{n\ Variabel} \text{x } 100\%$$

$$\%\ \text{Dimensi} = \frac{n\ Total\ Indikator}{n\ Dimensi} \text{x } 100\%$$

Gambar 3.13
Contoh operasionalisasi hasil pengukuran
Indeks Kewaspadaan Nasional 2023 di Kesbangpol Jawa Timur

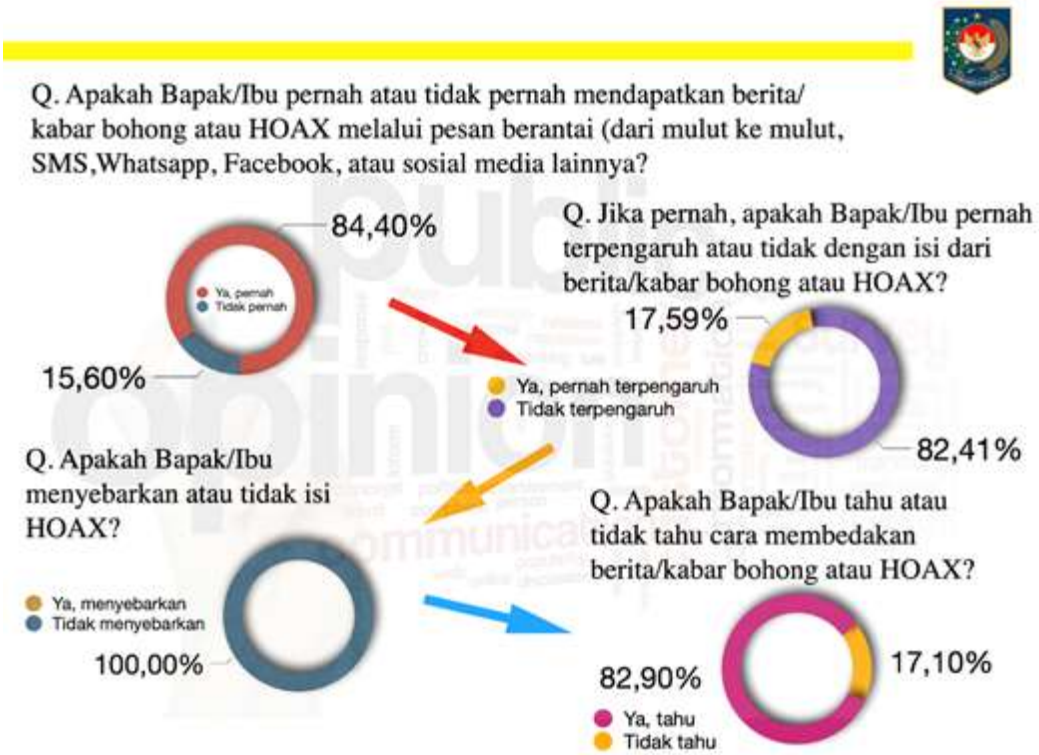

Bahwa didapati hasil % variabel = n% indikator = 265,8/n dimensi variabel. Didapat angka variabel literasi Informasi adalah 88.6. Karena Dimensi Kewaspadaan Informasi dan Media hanya satu memiliki satu varibel maka perolehan sama dengan angka variabel.

Kendala dalam pencapaian target dalam pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional khususnya tahun 2023 adalah belum maksimalnya dukungan anggaran yang ada sehingga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengambilan data pada seluruh wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Keterbatasan anggaran tentu mempengaruhi jumlah wilayah yang dapat dilakukan pengukuran, sehingga data Indeks kewaspadaan nasional belum mewakili secara nasional terhadap penilaian tingkat kewaspadaan nasional dilihat dari pengelolaan data sementara hanya ada dari beberapa wilayah yang terukur saja.

Dalam menyikapi hasil pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2023 di 5 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mendorong pemerintah daerah kedepan dapat melakukan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional pada wilayahnya masing-masing. Hal ini ditujukan untuk melakukan peningkatan upaya deteksi dini dan cegah dini atas persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

Kementerian dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum **terus berupaya memberikan informasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait dengan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional.** Selain itu kepada pemerintah provinsi yang telah dilakukan pengukuran Indeks dilakukan asistensi untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Selain itu melalui Indeks Kewaspadaan Nasional, menjadi bahan masukan dalam membangun **program kegiatan yang diharapkan mampu mencegah konflik internal maupun eksternal** seperti melalui peningkatan program peningkatan Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan politik bagi masyarakat, serta kewaspadaan nasional dalam rangkah cegah dini dan deteksi dini dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

Indeks Kewaspadaan Nasional diharapkan dapat menjadi **alat mitigasi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik** yang mungkin akan terjadi di tengah masyarakat dan pemerintahan, sehingga efektif dan efisien dalam membantu pemerintah daerah menyusun program dan rencana strategis untuk menjaga kewaspadaan di daerah.

Dalam mendukung keberhasilan capaian Indeks Kewaspadaan Nasional dilaksanakan tugas dan fungsi pada bidang kewaspadaan nasional yang juga senantiasa melibatkan berbagai *stakeholder* dan mitra kerja termaksud pemberdayaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini yang dibentuk di pemerintah daerah. Hal ini merupakan bentuk **efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya** baik oleh aparatur maupun langsung oleh masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi konflik di tengah masyarakat.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana trantibumlinmas merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas"** diperoleh **sebesar 100%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **atau kategori Sangat Berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah	100 Daerah	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**100%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketenteraman dan ketertiban umum, dengan aspek penilaian yang meliputi Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Ketenteraman dan ketertiban umum, Akuntabilitas Kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan Publik.
2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan aspek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa dengan aspek meliputi pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas), pembentukan satlinmas, efektivitas tugas satlinmas, pemberdayaan, pemenuhan hak anggota satlinmas.
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan aspek penilaian yang meliputi Manajemen Proteksi Kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Manajemen Pemadaman dan penyelamatan/penanggulangan Kebakaran, Penataan dan Penguatan kelembagaan Pemadam Kebakaran, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadam Kebakaran, Manajemen Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana dengan aspek penilaian yang meliputi Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana, Manajemen SDM, Manajemen Sarana Prasarana, dan Layanan Kebencanaan.

Metode perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urulsan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas. Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (*Additive Aggregation Methods*). Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah *Additive Aggregation Method* sebagai berikut:

$$IKU = \sum_{q=1}^{Q} W_q I_q$$

IKU : Nilai Indeks Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

w_q : Bobot Indikator Kinerja Program ke-i

I_q : Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKU = (W_{bencana}\ x\ I_{bencana}) + (W_{trantibum}\ x\ I_{trantibum}) + (W_{satlinmas}\ x\ I_{satlinmas}) + (W_{kebakaran}\ x\ I_{kebakaran})$$

Setelah perhitungan angka indeks dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategoriasi angka indeks untuk melihat apakah capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berada pada kategori baik atau buruk. Adapun kriteria nilai indeks dikategorisasikan sebagai berikut:

1. 0,00 – 25,00, kategori "Buruk"
2. 25, 01 – 50,00, kategori "Cukup"
3. 50,01 – 80,00, kategori "Baik"
4. 80,01 – 100,00, kategori " Sangat Baik"

Tabel 3.24
Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
	0,25	0,25	0,25	0,25		
Kota Salatiga	90,154	81,640	68,000	88,333	82,032	Kategori Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

IPT = (0,25x88,33) + (0,25x90,15) + (0,25x81,64) + (0,25x68,00) = 82,032

Tahun 2023 merupakan tahun kedua perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilakukan di 514 daerah dengan target 100 Daerah yang berkategori Baik. Hasil perhitungan yaitu:

1. Tahun 2023 diperoleh sebanyak 7 daerah dengan kategori sangat baik dan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 5 daerah dengan kategori sangat baik.
2. Tahun 2023 diperoleh sebanyak 302 daerah dengan kategori baik dan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 54 daerah dengan kategori baik.

Alternatif solusi yang digunakan dalam mengendalikan daerah yang hasil penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tidak mencapai target (cukup), antara lain:

1. meningkatkan koordinasi kelembagaan.
2. meningkatkan asistensi penyelenggaraan teknis.
3. meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi.
4. mengoptimalisasi bantuan sarana dan prasarana terhadap daerah yang melaksanakan masing-masing sub-urusan trantibumlinmas.

Perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tahun 2023 mendapatkan capaian 100 daerah atau sebesar 100% dari target 100 daerah. Adapun Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di 100 daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di 100 daerah

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
1	Kabupaten Luwu	94,63	81,69	95,00	83,89	88,80	Sangat Baik
2	Kota Banjarmasin	85,81	87,41	90,00	88,67	87,97	Sangat Baik
3	Kabupaten Sumbawa	86,23	82,62	95,00	83,99	86,96	Sangat Baik
4	Kabupaten Cilacap	98,06	85,38	74,00	84,88	85,58	Sangat Baik
5	Kota Tanjung Pinang	95,52	80,85	75,00	73,33	81,18	Sangat Baik
6	Kota Surakarta	100,00	85,69	50,00	87,55	80,81	Sangat Baik
7	Kabupaten Indragiri Hilir	98,75	72,83	73,00	75,90	80,12	Sangat Baik
8	Kota Tegal	97,93	88,18	50,00	82,12	79,56	Baik
9	Kabupaten Malang	97,20	82,12	50,00	85,67	78,75	Baik
10	Kabupaten Wonogiri	98,13	76,57	50,00	86,87	77,89	Baik
11	Kabupaten Wajo	92,06	77,85	50,00	90,11	77,50	Baik
12	Kabupaten Bojonegoro	82,42	84,35	50,00	84,77	75,38	Baik
13	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100,00	100,00	50,00	50,00	75,00	Baik
14	Kabupaten Kendal	50,00	88,00	74,00	86,33	74,58	Baik
15	Kota Medan	89,05	50,00	74,00	85,22	74,57	Baik
16	Kabupaten Badung	69,52	50,00	88,00	88,45	73,99	Baik
17	Kabupaten Pamekasan	82,52	79,12	50,00	82,67	73,58	Baik
18	Kabupaten Bone	81,68	78,05	50,00	82,00	72,93	Baik
19	Kabupaten Bombana	92,74	50,00	69,00	79,11	72,71	Baik
20	Kabupaten Magetan	85,93	68,80	50,00	85,88	72,65	Baik
21	Kota Madiun	75,64	81,23	50,00	83,56	72,61	Baik
22	Kabupaten Boyolali	100,00	50,00	50,00	89,94	72,49	Baik
23	Kabupaten Aceh Besar	50,00	89,16	75,00	74,83	72,25	Baik
24	Kabupaten Kediri	98,72	50,00	50,00	89,50	72,05	Baik
25	Kabupaten Kepulauan Selayar	74,16	78,29	50,00	85,66	72,03	Baik
26	Kabupaten Cianjur	80,51	50,00	68,00	89,11	71,90	Baik
27	Kabupaten Hulu Sungai Utara	94,56	50,00	93,00	50,00	71,89	Baik
28	Kabupaten Lombok Utara	50,00	77,85	72,00	86,34	71,55	Baik
29	Kabupaten Bogor	50,00	80,73	85,00	69,33	71,26	Baik
30	Kota Samarinda	99,37	83,35	50,00	50,00	70,68	Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
31	Kota Balikpapan	50,00	50,00	98,00	84,45	70,61	Baik
32	Kabupaten Sukoharjo	100,00	81,98	50,00	50,00	70,49	Baik
33	Kabupaten Sijunjung	50,00	72,00	81,00	78,89	70,47	Baik
34	Kabupaten Kutai Kartanegara	50,00	82,42	69,00	80,45	70,47	Baik
35	Kabupaten Lumajang	93,33	50,00	50,00	88,42	70,44	Baik
36	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	99,33	50,00	82,00	50,00	70,33	Baik
37	Kabupaten Mojokerto	98,15	83,06	50,00	50,00	70,30	Baik
38	Kabupaten Kotawaringin Barat	76,89	78,34	50,00	74,40	69,91	Baik
39	Kabupaten Penajam Paser Utara	79,29	50,00	100,00	50,00	69,82	Baik
40	Kabupaten Blora	50,00	87,54	50,00	90,56	69,52	Baik
41	Kota Banda Aceh	50,00	84,34	72,00	70,99	69,33	Baik
42	Kabupaten Pekalongan	81,11	59,30	50,00	85,54	68,99	Baik
43	Kota Malang	50,00	83,46	50,00	92,10	68,89	Baik
44	Kota Kediri	50,00	91,51	50,00	84,00	68,88	Baik
45	Kabupaten Gresik	50,00	50,00	89,00	85,66	68,67	Baik
46	Kota Administrasi Jakarta Selatan	50,00	79,41	95,00	50,00	68,60	Baik
47	Kabupaten Purworejo	50,00	85,91	50,00	88,22	68,53	Baik
48	Kota Administrasi Jakarta Timur	50,00	78,48	95,00	50,00	68,37	Baik
49	Kota Bontang	76,53	62,22	84,00	50,00	68,19	Baik
50	Kabupaten Semarang	88,91	50,00	50,00	83,66	68,14	Baik
51	Kota Payakumbuh	98,08	50,00	50,00	74,43	68,13	Baik
52	Kota Blitar	50,00	85,89	50,00	85,89	67,95	Baik
53	Kabupaten Magelang	70,41	59,65	50,00	91,67	67,93	Baik
54	Kabupaten Kudus	50,00	81,04	50,00	90,56	67,90	Baik
55	Kabupaten Blitar	87,35	50,00	50,00	82,89	67,56	Baik
56	Kota Parepare	99,37	50,00	50,00	70,78	67,54	Baik
57	Kota Bitung	50,00	85,97	50,00	82,88	67,21	Baik
58	Kabupaten Tegal	50,00	61,22	68,00	89,45	67,17	Baik
59	Kabupaten Bekasi	50,00	50,00	79,00	89,45	67,11	Baik
60	Kabupaten Purbalingga	85,81	50,00	50,00	82,55	67,09	Baik
61	Kabupaten Ciamis	50,00	78,78	50,00	88,88	66,91	Baik
62	Kota Serang	88,79	78,29	50,00	50,00	66,77	Baik
63	Kabupaten Enrekang	50,00	78,48	50,00	88,56	66,76	Baik
64	Kota Kendari	50,00	50,00	93,00	74,00	66,75	Baik
65	Kabupaten Belitung	50,00	81,98	50,00	84,44	66,61	Baik
66	Kota Sukabumi	77,83	50,00	50,00	88,44	66,57	Baik
67	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	50,00	67,07	72,00	76,56	66,41	Baik
68	Kabupaten Sambas	50,00	84,68	50,00	80,66	66,34	Baik
69	Kota Bengkulu	50,00	50,00	88,00	77,01	66,25	Baik
70	Kabupaten Cirebon	50,00	50,00	80,00	84,65	66,16	Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
71	Kabupaten Aceh Barat	97,32	66,78	50,00	50,00	66,03	Baik
72	Kabupaten Seluma	50,00	86,55	66,00	60,39	65,73	Baik
73	Kota Tasikmalaya	88,67	74,20	50,00	50,00	65,72	Baik
74	Kota Bau-Bau	50,00	83,51	50,00	79,14	65,66	Baik
75	Kabupaten Jombang	75,77	50,00	50,00	86,45	65,56	Baik
76	Kota Jambi	64,00	50,00	98,00	50,00	65,50	Baik
77	Kota Pekanbaru	64,00	50,00	98,00	50,00	65,50	Baik
78	Kabupaten Lombok Barat	77,32	50,00	50,00	84,32	65,41	Baik
79	Kota Padangsidempuan	79,37	81,69	50,00	50,00	65,26	Baik
80	Kabupaten Soppeng	81,32	79,41	50,00	50,00	65,18	Baik
81	Kota Subulussalam	50,00	77,49	60,00	73,06	65,14	Baik
82	Kabupaten Barru	83,03	76,85	50,00	50,00	64,97	Baik
83	Kabupaten Sumenep	50,00	78,83	50,00	80,45	64,82	Baik
84	Kabupaten Bengkulu Selatan	50,00	80,06	50,00	79,00	64,76	Baik
85	Kota Denpasar	70,90	50,00	50,00	88,10	64,75	Baik
86	Kabupaten Sukabumi	50,00	72,00	50,00	86,22	64,55	Baik
87	Kabupaten Tangerang	50,00	50,00	75,00	83,11	64,53	Baik
88	Kabupaten Bima	50,00	50,00	72,00	85,45	64,36	Baik
89	Kabupaten Tulang Bawang	91,38	50,00	66,00	50,00	64,35	Baik
90	Kabupaten Gorontalo	76,76	50,00	50,00	80,34	64,27	Baik
91	Kota Mataram	72,21	84,74	50,00	50,00	64,24	Baik
92	Kota Palopo	80,44	50,00	50,00	76,11	64,14	Baik
93	Kabupaten Serang	50,00	77,10	50,00	79,44	64,14	Baik
94	Kabupaten Banyumas	50,00	66,15	50,00	90,34	64,12	Baik
95	Kabupaten Pati	50,00	71,36	50,00	84,99	64,09	Baik
96	Kota Padang	64,75	50,00	50,00	91,55	64,07	Baik
97	Kabupaten Bengkalis	50,00	50,00	82,00	74,12	64,03	Baik
98	Kabupaten Pinrang	50,00	83,99	50,00	72,01	64,00	Baik
99	Kabupaten Malinau	78,49	77,20	50,00	50,00	63,92	Baik
100	Kabupaten Bangka Tengah	83,40	50,00	50,00	71,65	63,76	Baik

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas, menunjukkan bahwa Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran memiliki rata-rata pencapaian nilai paling rendah. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan penilaian Indikator Pemenuhan Sarana Prasarana yang tidak maksimal dikarenakan kondisi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tidak memadai, sehingga berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam memberikan layanan perlindungan bagi seluruh warga negara. Akan tetapi Indikator Kelembagaan mencapai nilai tertinggi, sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana diamanatkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki rata-rata pencapaian nilai indeks paling tinggi karena dalam pelaksanaan penilaiannya Pilar Sistem menjadi yang tertinggi dalam pengukurannya dikarenakan adanya dokumen inventarisasi sarana prasarana dan pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta programketertibanumum,ketenteramandanperlindungan kepada masyarakat (Tibumtranmas) melalui sistem layanan aduan masyarakat terkait dengan kinerja Satpol PP,

sementara Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dimensi terendah dalam pengukurannya hal ini disebabkan belum optimalnya perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungional dan perhitungan/penyusunan analisa jabatan dan beban kerja pada setiap unit jabatan fungsional serta pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP.

Dalam mendukung pemenuhan data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, terdapat beberapa media sistem informasi pemenuhan data dukung pada masing-masing sub urusan yang menjadi komposit IKU, yaitu:

1. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, melalui:
   a. Aplikasi Trantibumlinmas pada *https://trantibumlinmas.kemendagri.go.id/*.
   b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (Simlinmas) pada *https://simlinmas.kemendagri.go.id/management/login*, dan
   c. Aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja (Simpolpp) pada *https://satpolpp.kemendagri.go.id/*.
2. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, melalui:
   a. Aplikasi Pagar SPM Bencana pada *https://pagarspmbencana.kemendagri.go.id/*, dan
   b. Sebaran kuesioner pada setiap kegiatan sub urusan kebakaran yang melibatkan peserta daerah.

Kegiatan strategis yang menunjang dan mendukung pemenuhan data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2023, yaitu:

1. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan damkar.
2. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana.

3. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum.
4. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat.
5. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada masing-masing indeks komposit sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait Trantibumlinmas.
2. Penyusunan standardisasi sarana prasarana trantibumlinmas di daerah melalui petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah kepada daerah.
3. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka implementasi mutu pelayanan dasar urusan trantibumlinmas.
4. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan urusan Trantibumlinmas.
5. Meningkatkan peran Kementerian Dalam Negeri melalui asistensi dan supervisi pelaksanaan teknis urusan trantibumlinmas di daerah.
6. Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan trantibumlinmas.
7. Peningkatan layanan konsultasi dan fasilitasi pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan trantibumlinmas di daerah.

Adapun hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
   Berdasarkan rekapitulasi jumlah pegawai pada Subbag Kepegawaian Bagian Umum, total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2023 sejumlah 348 pegawai yang terdiri dari 251 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
2. Sarana dan Prasarana
   Adapun sumber daya yang dimiliki dalam mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil tahun 2023 yaitu seperti Peralatan dan Mesin sejumlah 4.140 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, aset Tetap Lainnya sebanyak 22 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, dan Aset tetap yang tidak digunakan sebanyak 138 unit buah/unit saldo per 31 Desember 2023. Setiap penjabaran sumber daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Pembangunan SDM di Indonesia merupakan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi butir dalam nawacita, serta menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan program prioritas pembangunan Indonesia maju. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia baik di internal Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Pengembangan SDM aparatur dimaksud dilakukan melalui sertifikasi, pengembangan kompetensi yang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Selain hal tersebut, pengembangan SDM dilakukan terhadap Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini terhadap Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Selanjutnya kegiatan pengajaran, pelatihan, pengasuhan bagi mahasiswa/praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan, dan lulusannya akan ditempatkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui pengembangan SDM yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diharapkan mampu mempercepat pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri"** diperoleh **sebesar 91,92%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Tinggi** atau **kategori Berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian 2 (dua) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil dan capaian 2 (dua) indikator dengan predikat sedang atau kategori cukup berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	70,87%	101,24%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	Level 3 (72,97%)	81,08%	Sedang/ Cukup Berhasil
3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (90%	Level 3 (71,95%)	79,94%	Sedang/ Cukup Berhasil
4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	Nilai 3,69	105,43%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**91,92%**	**Tinggi/Berhasil**

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap aparatur sipil negara (ASN). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri selain berfungsi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) internal Kementerian Dalam Negeri juga untuk ASN Pemerintah Daerah, sehingga perlu pemerataan sertifikasi dan pengembangan kompetensi baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum dijadikan sebagai dasar penghitungan capaian indikator dimaksud mengingat belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang tersebut.

Untuk mencapai implementasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM melakukan fungsinya yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia bagi ASN di internal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan fasilitasi. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi BPSDM yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yaitu standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Adapun Pengembangan SDM yang dimaksud mencakup kegiatan:

1. Sertifikasi (Uji Kompetensi); dan
2. Pengembangan kompetensi yang mencakup Pelatihan, Bimbingan Teknis, *Workshop*, dan Seminar/ Webinar bagi aparatur pemerintahan dalam negeri pada jabatan fungsional dan manajerial.

Penetapan target indikator dimaksud disesuaikan dengan target total yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sebanyak 702 angkatan atau 21.060 orang;
2. Sertifikasi sebanyak 14.320 orang; dan
3. Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 10.000 orang.

Adapun persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Per Tahun diukur melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$Persentase\ Pemenuhan\ PK = \frac{Jumlah\ alumni\ PK + Jumlah\ alumni\ sertifikasi\ dalam\ 1\ tahun}{Jumlah\ alumni\ PK + Jumlah\ alumni\ sertifikasi\ yang\ menjadi\ target\ sesuai\ renstra\ 2020-2024} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ alumni\ PK + Jumlah\ alumni\ sertifikasi\ dalam\ 1\ tahun}{Jumlah\ alumni\ PK + Jumlah\ alumni\ sertifikasi\ yang\ menjadi\ target\ sesuai\ renstra\ 2020 - 2024} \times 100\%$$

$$\frac{29.829\ orang + 2.332\ orang = 32.161}{31.060 + 14.320\ orang = 45.380} \times 100\% = 70{,}87\%$$

$$Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{70{,}87\%}{70\%} \times 100\% = 101{,}24\%$$

Pada tahun 2023 capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 101,24% dengan realisasi sebesar 70,87% dari target tahun 2023 sebesar 70%. Capaian atas Indikator ini diperoleh dari beberapa kegiatan Pengembangan Kompetensi, yaitu:

1. Target Jumlah Pejabat Strategis pemerintahan Dalam Negeri yang tersertifikasi dalam Rencana Strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebanyak 1.372 orang dan dinyatakan kompeten sebanyak 2.332 orang (169,97%), dengan rincian sebagai berikut:
   a. Telah dilaksanakan Kegiatan sertifikasi untuk Jabatan Aparatur Lingkup Kementerian Dalam Negeri, Sertifikasi Perpindahan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Sertifikasi Jenjang PPUPD, Sertifikasi Jenjang Pemadam Kebakaran melalui mekanisme APBN atau Rupiah Murni (RM) dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinyatakan kompeten sebanyak 1.417 orang.
   b. Telah terlaksana sertifikasi melalui mekanisme Fasilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap kegiatan sertifikasi di daerah oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) yang dinyatakan kompeten 915 orang.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah alumni sebanyak 2.673 orang alumni. Kegiatan pengembangan atas prioritas nasional tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:
   a. *Workshop*/Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebanyak 1.020 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksaaan SPM di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
   b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara sebanyak 188 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Camat terutama bagi Camat di wilayah perbatasan;
   c. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah sebanyak 913 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media bagi para ASN untuk dilatih lebih kritis mengidentifikasi permasalahan didaerah dan memberikan solusi inovasi atas permasalahan tersebut guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
   d. Diklat *Legal Drafting* bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Diklat *Legal Drafting* (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 300

orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kapasitas ASN dalam bidang *legal drafting* penyusunan peraturan guna meningkatkan kualitas output peraturan daerah, meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan antara satu dan lainnya yang bermuara terganggunya iklim investasi serta perlambatan pembangunan di daerah; dan

e. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebanyak 252 orang (sebanyak 77 orang merupakan peserta dari Kementerian Dalam Negeri, dan 175 berasal dari Pemerintah Daerah). Kegiatan ini dilaksanakan guna peningkatan kapasitas pejabat fungsional PPUPD di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik secara anggaran maupun secara kinerja.

3. Pengembangan Kompetensi *Training of Trainer* Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebanyak 1.509 orang. Pengembangan kompetensi ini mencakup Pendidikan dan Pelatihan teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan Pendidikan dan Pelatihan dasar yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 90 orang *Training of Trainer* Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah sebanyak 1.419 orang untuk Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.
4. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dengan sasaran pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat tinggi pratama sebanyak 1.441 orang alumni yang berasal dari pejabat lingkup Kementerian diluar Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Pendidikan Latihan Dasar CPNS dan Pengembangan Kompetensi Teknis Substanstif lainnya baik itu berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar atau webinar yang dilaksanakan baik melalui pembelajaran klasikal, *blended learning*, dan Seminar/Webinar serta fasilitasi adalah sebanyak 27.737 orang. Kegiatan diklat yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kelompok diklat teknis substantif Kementerian Dalam Negeri yang mencakup substantif pemerintahan dalam negeri dalam bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi dan sertifikasi, serta lain sebagainya.

Gambar 3.14
Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi BPSDM Tahun 2023

Dapat dijelaskan bahwa infografis diatas adalah jumlah total pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35.692 orang, namun yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 32.161 orang karena pelatihan dasar CPNS sebanyak 3.531 orang tidak termasuk kedalam IKU Menteri karena belum menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Beberapa dari capaian di atas merupakan target Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan target 522 orang telah diikuti oleh 514 orang atau 98,47%;
2. Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam hal Penerapan SPM di daerah Lingkup Pusat periode tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 1.712 orang telah diikuti oleh 1.706 orang atau 99,65%;
3. Pengembangan Kompetensi *Legal Drafting* (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 600 orang telah diikuti oleh 600 orang atau 100%;
4. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 824 orang telah diikuti oleh 846 orang atau 102,67%;
5. Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 463 orang telah diikuti oleh 554 orang atau 119,65%;
6. Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 562 orang telah diikuti oleh 1.287 orang atau 229.00%; dan
7. Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional pada tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 1.920 orang telah diikuti oleh 1.916 orang atau 99,79%.

Capaian Tahun 2023 apabila disandingkan dengan tahun 2020-2022, terus mengalami kenaikan walaupun kenaikan pada tahun 2021 tidak signifikan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Kejadian tersebut mengubah cara hidup dan cara kerja baik itu lingkup birokrasi maupun swasta dan tidak terkecuali bagi BPSDM Kemendagri yang tetap dituntut untuk memberikan pelayanan pengembangan kompetensi sesuai dengan amanat Rencana Strategis meskipun dengan begitu banyak perubahan dalam metode pembelajaran yang dilakukan.

Pada rentang Tahun 2020-2023, BPSDM Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk terus berinovasi dalam hal teknologi dan metode pembelajaran sehingga kegiatan pengembangan kompetensi dapat terus dirasakan oleh seluruh tingkatan/jenjang ASN. Inisiasi inovasi tersebut terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian/Lembaga lainnya. Pekerjaan bidang pembangunan SDM memang bukan semata pekerjaan sektor tertentu namun merupakan kerja bersama antara seluruh sektor dan *stakeholder* baik penyedia layanan maupun pengguna layanan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara bersama-sama dan *massive* akan memberikan dampak yang cukup besar dalam hal peningkatan kapasitas ASN yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, dinamis, professional, dan mampu bersaing di kancah global dalam rangka mencapai Indonesia emas 2045.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu dengan melakukan Inovasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang Pengembangan Kompetensi bagi ASN untuk Peningkatan Sadar Pajak dan Kepatuhan Pajak;
3. Kementerian Dalam Negeri dengan *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan timor Leste tentang Pengembangan SDM;
4. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda;
5. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
6. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Dukungan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kemampuan ASN Terkait Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
7. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Dukungan Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
8. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Utama Perputakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda; dan
9. Penandatangan MoU BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan *Japan Council of Local Authorities for International Relations* (J.CLAIR) tentang *Capacity Development For Apparatus in The Field Of Local Governance in Indonesia and Japan.*

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Adanya penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, karena daerah masih melakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah yang baru sehingga ada diklat yang belum terpenuhi sesuai dengan target (antara lain Diklat *Probity Audit*, Diklat Pengelolaan, Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Kepamongprajaan bagi Camat yang bersumber dari PNBP). Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas terdapat beberapa layanan (antara lain penggunaan atas setoran PNBP) yang belum mendapatkan izin guna sehingga cukup berdampak negatif terhadap pelaksanaan inisiasi kegiatan baru.
2. Keterbatasan sumber daya antara lain anggaran, kebijakan dan kualitas SDM internal BPSDM Kementerian Dalam Negeri itu sendiri.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan kerjasama dan pengembangan kompetensi melalui mekanisme lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mekanisme kerja sama dan fasilitasi baik yang dilakukan antar lembaga pemerintah (pemerintah pusat dan daerah), lembaga donor, dan perguruan tinggi. Pada lingkup pemerintah pusat, BPSDM Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan 7 Kementerian dan Lembaga dalam hal penguatan SDM di daerah. Salah satu yang saat ini secara aktif dilaksanakan adalah kerja sama dengan *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste untuk fasilitasi pengembangan kompetensi dengan pusat dan daerah yang sudah terjalin dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dan telah secara efektif melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi baik untuk ASN lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun Pemda. Kegiatan fasilitasi dilakukan pada daerah yang membutuhkan pendampingan kegiatan dimana Kementerian Dalam Negeri bersama Pemda melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pada Pemda terkait. Pendampingan dilakukan pada sisi manajemen kelas saat pelaksanaan pengembangan kompetensi. Pada tahun ini dilakukan perluasan cakupan kerja sama yang pada awalnya hanya pengembangan kompetensi ditambah dengan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi.
2. Menjalin hubungan dan koordinasi yang sangat intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka penguatan SDM di daerah untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Pemda baik di tingkat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (penguatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) maupun pada tata Kelola BUMD (Pegawai BUMD).
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada melalui peran teknologi yang dikembangkan untuk mengantisipasi tuntutan pengembangan kompetensi yang tidak dapat dilakukan secara klasikal melalui *Learning Management System* (LMS), Webinar, dan lain sebagainya.
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi dilingkup kantor pusat BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan Unit Pelaksana Teknis dibawah binaan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud komitmen Inspektorat Jenderal atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan Kapabilitas dari Auditor Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu auditor pada tingkatan tersebut. Tingkat kapabilitas terkait dengan struktur tata kelola organisasi. Tingkat kapabilitas auditor yang baik dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah dalam negeri. Dengan kata lain, jika organisasi memerlukan tingkat yang lebih baik dalam praktik pengawasan intern, maka diperlukan tingkat kapabilitas pengawasan yang lebih baik.

Jabatan fungsional auditor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Tugas Jabatan Fungsional Auditor yaitu melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Peningkatan kapabilitas auditor penting untuk meningkatkan kapabilitas instansi APIP terkait. Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Auditor baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor penting untuk menjadi dasar bahwa APIP sebagai instansi yang berperan memberikan *assurance* dan *consulting* di Kementerian Dalam Negeri memiliki standar Sumber Daya Manusia yang memadai. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan tingkat pemenuhan jumlah auditor, tingkat pemenuhan jam pelatihan, persentase modul-modul pengawasan bagi auditor, dan persentase auditor Kementerian Dalam Negeri yang menjadi anggota organisasi profesi.

Meningkatnya persentase indikator ini menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas auditor yang tergabung dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor sebagaimana dimaksud diharapkan akan sejalan dengan peningkatan tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kementerian Dalam Negeri, khususnya SDM Pengawasan. Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen menjadi tanggung jawab APIP.

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, dari target Level 3 (90%), telah tercapai pada Level 3 (72,97%) yang menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas auditor dalam posisi yang baik.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%),
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%),
3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%), dan
4. Persentase Auditor Kementerian Dalam Negeri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

(1-4 x 100):4

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor Kementerian Dalam Negeri

   Berdasarkan data internal Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri jumlah pejabat fungsional auditor dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Jumlah pejabat fungsional auditor

Jenjang	Jumlah
Auditor Madya	12
Auditor Muda	37
Auditor Pertama	25
Auditor Utama	1
Jumlah Auditor	**75**
Total Kebutuhan	**160**

   Tidak terdapat perubahan jumlah auditor pada tahun 2023, namun terdapat peningkatan jenjang dari auditor pertama ke auditor muda sebanyak 4 orang. Pemenuhan terhadap seluruh jenjang ahli pada Inspektorat Jenderal khususnya jenjang Ahli Utama dan Ahli Pertama masih akan terus ditingkatkan. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas auditor mencapai persentase 47% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 11,72.

2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri

   Pada Tahun 2023 pelatihan dan pendidikan (diklat) bagi auditor difokuskan pada perjenjangan auditor ahli pertama yang diperuntukkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jabatan fungsional auditor formasi tahun 2022 yang berjumlah 21 orang. Adapun selain itu, terdapat pelaksanaan sertifikasi *Certified Government Risk Executive* (CGRE) sebanyak 1 orang. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi sebagian besar Auditor Kemendagri", mencapai persentase 95% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 23,75.

3. Persentase Modul-Modul Pengawasan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri

   Modul Pengawasan dibutuhkan oleh auditor sebagai panduan teknis dalam melakukan pengawasan. Pada Tahun 2023, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh APIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diantaranya:

   a. Modul Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
   b. Modul Pengawasan Keuangan Daerah.
   c. Modul Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
   d. Modul Pemeriksaan Investigatif dan Pelayanan Publik.
   e. Modul Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
   f. Modul Monitoring dan Evaluasi Inflasi Daerah.

   Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Beberapa modul pengawasan bagi Auditor Kemendagri telah tersusun", mencapai persentase 90% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 22,5.

4. Persentase Auditor Kementerian Dalam Negeri yang Menjadi Anggota Organisasi

   Keterlibatan Auditor dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Dengan bergabungnya Auditor dalam organisasi profesi diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit. Sampai dengan saat ini, sebagian besar Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai anggota dan akan terus diupayakan agar Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri jauh lebih aktif tergabung sebagai pengurus dalam asosiasi dimaksud.

   Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Sebagian besar auditor tergabung dalam organisasi AAIPI sebagai anggota", mencapai

persentase 60% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 15.

Sesuai parameter penghitungan capaian indikator, dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Sebagian besar auditor tergabung dalam organisasi AAIPI sebagai anggota", mencapai persentase 60% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 15. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan proyeksi atas jumlah kebutuhan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap capaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, yaitu masih rendahnya keikutsertaan Auditor Kementerian Dalam Negeri dalam organisasi profesi khususnya sebagai pengurus organisasi profesi. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi serta jam pengawasan yang diemban oleh Auditor cukup maksimal sepanjang tahun. Namun demikian, ke depan Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi Auditor Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama dalam pengembangan profesi Auditor juga terus diupayakan bersama AAIPI sebagai salah satu strategi untuk mencapai target dimaksud.

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja tingkat kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan proyeksi atas jumlah kebutuhan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap pencapaian kinerja indikator ini, yaitu masih rendahnya keikutsertaan Auditor Kementerian Dalam Negeri dalam organisasi profesi khususnya sebagai pengurus organisasi profesi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi serta jam pengawasan yang diemban oleh Auditor cukup maksimal sepanjang tahun. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal akan terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi Auditor Kementerian Dalam Negeri kedepannya. Kerjasama dalam pengembangan profesi Auditor juga terus diupayakan bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) sebagai salah satu strategi untuk mencapai target dimaksud.

Analisis Efektifitas dan Realisasi Anggaran berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri sebesar 81,08%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan Internal dan Daerah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.804.285.000,- telah terealisasi sebesar Rp1.804.086.625,- atau sebesar 99,98%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tesedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan. Realisasi anggaran terhadap kegiatan pengelolaan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal secara mayoritas diarahkan untuk menunjang pengembangan kapasitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya Auditor.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan/ menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina auditor untuk mengakomodir Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi Auditor. di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengalokasikan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penguatan substansi pengawasan/ audit yang menjadi fokus dan sasaran pengawasan setiap tahun.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung keikutsertaan Auditor dalam berbagai pelatihan sertifikasi dan pelatihan kompetensi dengan pihak eksternal.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berkomitmen untuk memenuhi tingkat kapasitas PPUPD secara nasional. Tingkat pemenuhan kapasitas PPUPD secara nasional akan mempengaruhi hasil dari pengawasan internal dari masing-masing inspektorat daerah. Pengawasan internal yang baik diperlukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik dalam pemerintahan sebagai filter untuk pengendalian internal.

Kementerian Dalam Negeri membentuk jabatan fungsional PPUPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional merupakan gambaran atas capaian pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD secara nasional. Pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya telah mengatur pedoman pembinaan kompetensi bagi PPUPD secara nasional. Pemenuhan kapasitas jabatan fungsional PPUPD merupakan salah satu fokus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai Instansi Pembina. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan tingkat pemenuhan jumlah PPUPD tingkat pemenuhan jam pelatihan, persentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD dan persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi. Meningkatnya persentase indikator ini menunjukan peningkatan kuantitas dan kualitas PPUPD secara nasional yang dinaungi oleh Inspektorat Jenderal. Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Capaian indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2023, dari target Level 3 (100%) telah tercapai pada Level 3 (71,95%) yang menunjukkan bahwa tingkat kapasitas PPUPD dalam posisi yang baik.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%),
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%),
3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%), dan
4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

(1-4 x 100):4

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

1. Nilai pemenuhan formasi PPUPD
   Berdasarkan data kebutuhan jumlah PPUPD secara Nasional, sampai saat ini total jumlah PPUPD secara nasional sebanyak 5.040 orang dengan kebutuhan sebanyak 22.109 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.28
Jumlah pejabat fungsional PPUPD

Jenjang PPUPD	Jumlah
PPUPD Madya	2118
PPUPD Muda	1909
PPUPD Pertama	999
PPUPD Utama	14
Total PPUPD	**5040**

   Pada Tahun 2023, terdapat pengisian formasi alih jabatan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah, namun pemenuhan formasi PPUPD secara nasional, secara agregat masih terdapat daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Jabatan fungsional PPUPD. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan "Formasi PPUPD per jenjang belum terpenuhi", mencapai persentase 23% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 5,7.
2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD
   Sepanjang tahun 2023, pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM daerah. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi PPUPD", mencapai persentase 90% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 22,5.
3. Persentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD
   Pada Tahun 2022, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh Jabatan fungsional PPUPD di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, diantaranya:
   a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,
   b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial,
   c. Modul Pengawasan Urusan Wajib, dan,
   d. Modul Pengawasan Urusan Teknis.

   Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Beberapa modul pengawasan bagi PPUPD di Kementerian Dalam Negeri telah tersusun", mencapai persentase 80% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 20.
4. Persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi PPUPD
   Organisasi profesi PPUPD saat ini adalah Asosiasi PPUPD atau (APPUPD) yang didirikan sebagai wadah bagi PPUPD dalam menjaga profesionalitas dan independensi dalam bekerja. Keterlibatan PPUPD dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Harapannya, dengan bergabungnya PPUPD dalam organisasi profesi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit. Sampai dengan saat ini, seluruh PPUPD tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi PPUPD (APPUPD) sebagai anggota, namun keterlibatan aktif dalam kepengurusan belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh PPUPD secara Nasional.

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Sebagian besar PPUPD tergabung dalam organisasi APPUPD sebagai anggota", mencapai persentase 95% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 23,75.

Capaian indikator kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya:

1. Pada Tahun 2023, terdapat pengisian formasi alih jabatan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah, meskipun sampai saat ini belum terlalu signifikan.
2. Terdapat perubahan metodologi pelaksanaan diklat/ pelatihan sertifikasi bagi PPUPD di daerah, dimana mayoritas pelatihan/sertifikasi dilaksanakan secara online. Hal ini berpengaruh terhadap angka partisipasi dan formasi keikutsertaan peserta PPUPD secara nasional.
3. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi PPUPD di lingkungan pemerintah daerah juga berdampak terhadap jumlah keikutsertaan PPUPD terhadap diklat substansi maupun sertifikasi yang dilaksanakan sendiri atau yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

Dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja tingkat kapasitas PPUPD secara nasional terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu masih belum optimalnya pemenuhan jumlah pejabat fungsional PPUPD di daerah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemenuhan jumlah sumber daya manusia PPUPD di daerah hanya dimungkinkan melalui alih jabatan. Harapan ke depan untuk pengisian jabatan fungsional PPUPD dapat dilakukan baik melalui jalur formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun secara penyesuaian/ *inpassing*.

Berdasarkan data capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional sebesar 79,94% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional PPUPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.446.275.000,- telah terealisasi sebesar Rp.446.269.427,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tesedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan/ menunjang keberhasilan kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir pendidikan dan pelatihan, kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi PPUPD di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.
2. Menetapkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah terkait penguatan pengawasan, dimana didalamnya mengatur prioritas penganggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah yang salah satu unsur pembiayaannya adalah pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM khususnya pejabat fungsional PPUPD di daerah.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas instansi pembina pada Inspektorat Jenderal dalam hal fasilitasi kebijakan, pengembangan profesi dan kebijakan lainnya terkait peningkatan kapasitas PPUPD secara nasional.

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni merupakan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Evaluasi kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sangat penting bagi keberhasilan instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan maupun bagi IPDN karena alumni berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan.

Survei Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk: (1) Mengukur kinerja alumni IPDN; (2) Mengetahui harapan pengguna alumni terhadap lulusan IPDN; dan (3) Memetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukan alumni IPDN. Dalam survei ini, stakeholder adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja alumni IPDN, serta masyarakat yang dilayani alumni IPDN dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada informasi tentang kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan selama tiga tahun terakhir yang telah bekerja aktif sebagai ASN yaitu lulusan IPDN Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen, maka dalam survei ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Provinsi sebagai lokus survei pada tahun 2023 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Riau dengan komposisi sebaran alumni sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.29
Data Alumni Pada 7 Provinsi Lokasi Survei

NO	PROVINSI	L	P	Jumlah
1	RIAU	863	272	1.135
2	BENGKULU	374	183	557
3	SUMATERA SELATAN	709	287	996
4	KALIMANTAN BARAT	609	301	910
5	KALIMANTAN TIMUR	530	243	773
6	SULAWESI TENGAH	479	189	668
7	MALUKU UTARA	351	139	490
Total		**3.915**	**1.614**	**5.529**

Akumulasi jumlah provinsi yang telah disurvei dari Tahun 2020 s.d. 2023 sebanyak 27 Provinsi dari 38 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Maluku, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Gorontalo, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Adapun lokasi survei dan realisasi hasil survei Tahun 2020-2023, sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 3.30
Lokasi Survei dan Realisasi Nilai Hasil Survei Tahun 2020-2023

Tahun	Lokasi Survei Penelitian	Nilai	
		Target	Realisasi
2023	7 provinsi: Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Riau	3,5	3,69
2022	10 provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua	3,3	3,68
2021	7 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku	3,2	3,48
2020	14 provinsi: Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, NTB, Gorontalo, Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Lampung	3,0	3,72

Sumber: Bagian Program Pengasuhan Dan Alumni IPDN (November, 2023)

Dari 27 provinsi yang menjadi lokasi survei Tahun 2020-2023, terdapat 10 provinsi yang telah dilakukan survei berulang. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi/pengecekan perkembangan terhadap hasil survei pada kesepuluh provinsi tersebut.

Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan GAP Analysis dan Importance Performance Analysis (IPA) atau analisa tingkat kepentingan dan kinerja.

Kesenjangani (G_i) = Rata-rata *Performance* – Rata-rata *expected Performance* $_i$

Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mencari Tingkat Kesesuaian, yaitu hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (X) dengan skor kepentingan (kebutuhan) pemerintah daerah akan kompetensi lulusan IPDN (Y), dengan rumus:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \; x \; 100\%$$

Keterangan:
Tki = Tingkat Kesesuaian
Xi = Skor nilai kinerja alumni IPDN
Yi = Skor kepentingan pelanggan (pemda)

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut:

a. Jika tingkat kesesuaian > 100%, berarti kinerja alumni telah melebihi apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemda).
b. Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh Pengguna (Pemda).
c. Jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, berarti kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lagi.

2. Membuat Diagram Cartesius, yaitu suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada Titik-titik ($\bar{X}, \bar{Y}$), dimana $\bar{X}$ merupakan rata–rata dari skor kinerja alumni, dan $\bar{Y}$ adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan Pemda). Dalam Hal ini ada 50 atribut (soal dalam angket), jadi K= 50, menurut J Supranto (2006:242) rumus selanjutnya adalah:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \bar{X}i}{K}$$

$$\bar{\bar{Y}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \bar{y}i}{K}$$

Dalam penelitian ini telah di tentukan atribut atau faktor sebagai indikator yang telah dituangkan dalam bentuk angket. Selanjutnya sumbu mendatar (x) akan diisi oleh skor tingkat kinerja Alumni IPDN Sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan), dengan gambar sebagai berikut:

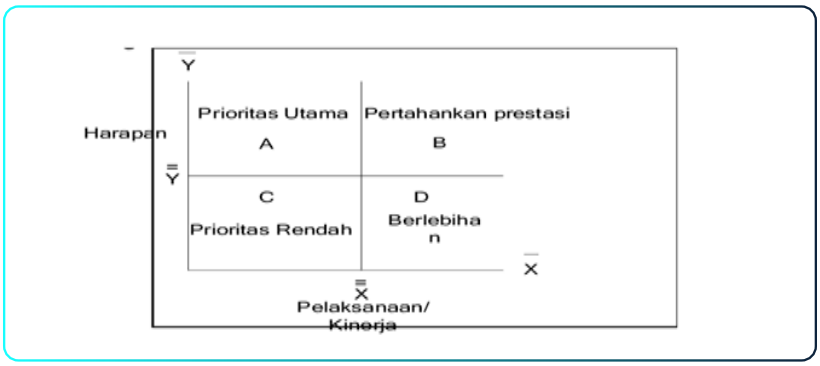

Keterangan:

a. Area yang menunjukkan Pelanggan tidak puas atas Kinerja lulusan IPDN.
b. Area ini Menunjukkan Pelanggan sangat puas atas Kinerja lulusan IPDN.
c. Area ini menunjukkan pelanggan kurang puas atas kinerja alumni IPDN.
d. Area ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kriteria penentu kualitas alumni IPDN.

Analisis data untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan layanan. Penggunaan kedua aturan tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan survei secara teoritis dengan aturan legal formal dari regulasi pemerintah. Sampai saat ini, kedua regulasi tersebut masih relevan untuk mengukur survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan layanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$Bobot\ Nilai\ Tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{8} = 0{,}125$$

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKU = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ terisi} X\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKU yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni x 25

Dimensi yang dinilai adalah *Quality of Work*, *Quantity of Work*, *Job Knowledge*, *Creativeness*, *Cooperation*, *Dependability*, *Inititative*, dan *Personal Quality* dengan 54 item pertanyaan kuesioner.

Tabel 3.31
Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai Pada Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja

No	Dimensi	Sub Dimensi
1	*Quality of Work*	1. kemampuan pengetahuan
		2. Akurasi dalam melaksakan tugas
		3. Ketelitian
		4. Efektivitas dalam bekerja
		5. Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi
		6. Mampu bekerja dalam tekanan
2	*Quantity of Work*	1. Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik
		2. Kemampuan menentukan target
		3. Kemampuan dalam mencapai target
		1. Keterampilan melaksanakan tugas
		2. Kemampuan memahami tugas
		3. Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
		4. Berpikir kritis
		5. Penguasaan bahasa asing
		6. Penguasaan Teknologi Informasi
		7. Mampu mengggunakan atribut keselamatan kerja
		8. Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan
		9. Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan
		10. Tingkat kesalahan rendah
3	*Job Knowledge*	1. Menciptakan gagasan
		2. Memiliki inovasi keterbaharuan
		3. Mampu menerima kritikan dan saran
		4. Mampu melihat peluang
4	*Creativeness*	1. Menerima perbedaan
		2. Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi
		3. Memiliki keterampilan sosial
		4. Bertanggung jawab
		5. Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas
		6. Kemampuan berkoordinasi
5	*Cooperation*	1. Kesetiaan
		2. Menginspirasi
		3. Memegang teguh prinsip
		4. Berambisi dalam menjalankan tugas
		5. Berani mengambil resiko

No	Dimensi	Sub Dimensi
6	*Quality of Work*	1. Kesetiaan
		2. Menginspirasi
		3. Memegang teguh prinsip
		4. Berambisi dalam menjalankan tugas
		5. Berani mengambil resiko
7	*Quantity of Work*	1. Berani memulai
		2. Keinginan untuk mengembangkan kompetensi
		3. Kemandirian
		4. Kemampuan manajemen diri
		5. Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan
		6. Kemampuan menyampaikan pendapat
9	*Job Knowledge Creativeness*	1. Jujur
		2. Ramah
		3. Rendah hati
		4. Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya lain
		5. Hormat dengan seluruh pegawai lainnya
		6. Percaya diri
		7. Konsisten
		8. Antusias
		9. Fleksibel
		10. Kepatuhan
		11. Tekun
		12. Dapat diandalkan
		13. Displin
		14. Keteladanan

Tabel 3.32
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43.75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	**3.26-4.00**	**81.26-100.00**	**A**	**Sangat Baik**

Hasil analisis dan evaluasi kinerja alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan pada 7 (tujuh) provinsi berdasarkan aspek *quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendability, initiative, dan personal qualities* akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.303
Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan							Nilai Rata-rata	Interpretasi
		Sumatera Selatan	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Maluku Utara	Riau		
1	*Quality of Work*	3,7533	3,3533	3,5467	3,6033	3,8867	3,9300	3,8233	3,7514	Sangat Baik
2	*Quantity of Work*	3,7933	3,4600	3,4400	3,4333	3,8667	3,8267	3,7800	3,6571	Sangat Baik
3	*Job Knowledge*	3,6940	3,4900	3,5060	3,5140	3,8460	3,6960	3,7200	3,6437	Sangat Baik
4	*Creativeness*	3,8750	3,4500	3,5700	3,5250	3,9700	3,7500	3,7800	3,7029	Sangat Baik
5	*Cooperation*	3,8700	3,4733	3,4567	3,4600	3,8833	3,7933	3,8567	3,6848	Sangat Baik
6	*Dependability*	3,5120	3,5640	3,5360	3,4960	3,7240	3,9120	3,9520	3,6709	Sangat Baik
7	*Initiative*	3,6300	3,7767	3,6267	3,6067	3,6767	3,9100	3,9833	3,7443	Sangat Baik
8	*Personal Qualities*	3,6143	3,6143	3,5914	3,5943	3,5986	3,8186	3,8214	3,6647	Sangat Baik
Rata-Rata									**3,6900**	**Sangat Baik**

Kriteria Skor: 1-1,75: Kurang; 1,76-2,5: Cukup; 2,51-3,25: Baik; 3,26-4: Sangat Baik

Tabel di atas menunjukan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,6900 (sangat baik) dan diperoleh nilai kinerja tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kinerja alumni tertinggi berdasarkan atribut kinerja:
   a. *Quality of work:* Maluku Utara (3,9300)
   b. *Quantity of work:* Kalimantan Timur (3,8667)
   c. *Job Knowledge:* Kalimantan Timur (3,8460)
   d. *Creativeness:* Kalimantan Timur (3,9700)
   e. *Cooperation:* Kalimantan Timur 3,8833
   f. *Dependability:* Riau (3,9520)
   g. *Initiative:* Riau (3,9833)
   h. *Personal Qualities:* Riau (3,8214)
2. Kinerja alumni terendah berdasarkan atribut kinerja:
   a. *Quality of work:* Sulawesi Tengah (3,3533)
   b. *Quantity of work:* Kalimantan Barat (3,4333)
   c. *Job Knowledge:* Sulawesi Tengah (3,4900)
   d. *Creativeness:* Sulawesi Tengah (3,4500)
   e. *Cooperation:* Bengkulu (3,4567)
   f. *Dependability:* Kalimantan Barat (3,4960)
   g. *Initiative:* Kalimantan Barat (3,6067)
   h. *Personal Qualities:* Sulawesi Tengah (3,5914)

Tabel 3.34
Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Tingkat Kepentingan/Harapan Responden terhadap Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan							Nilai Rata-rata	Interpretasi
		Sumatera Selatan	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Maluku Utara	Riau		
1	*Quality of Work*	3,8000	3,9867	3,8400	3,7133	3,6900	3,5900	3,7500	3,7671	Sangat Baik
2	*Quantity of Work*	3,9400	4,0000	3,7867	3,4000	3,7000	3,6333	3,9067	3,7667	Sangat Baik
3	*Job Knowledge*	3,6580	3,4900	3,6700	3,5720	3,7840	3,9420	3,7660	3,6974	Sangat Baik
4	*Creativeness*	3,6750	3,5300	3,6250	3,5650	3,8050	3,9850	3,7800	3,7093	Sangat Baik
5	*Cooperation*	3,6767	3,4933	3,6367	3,5900	3,8233	3,9700	3,9467	3,7338	Sangat Baik
6	*Dependability*	3,6760	3,5760	3,8000	3,9800	3,9400	3,8960	3,8600	3,8183	Sangat Baik
7	*Initiative*	3,6600	3,5167	3,8000	3,9633	3,8233	3,6667	3,9700	3,7714	Sangat Baik
8	*Personal Qualities*	3,9486	3,5600	3,7043	3,7571	3,6443	3,6000	3,6143	3,6898	Sangat Baik
Rata-Rata									**3,7442**	**Sangat Baik**

Kriteria Skor: 1-1,75: Kurang; 1,76-2,5: Cukup; 2,51-3,25: Baik; 3,26-4: Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan aspek Dependability merupakan aspek yang paling penting bagi Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dan aspek Personal Qualities merupakan aspek yang paling akhir dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,7442 atau sangat baik dan diperoleh nilai Tingkat kepentingan/harapan alumni tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat kepentingan/harapan alumni tertinggi berdasarkan atribut kinerja:
   a. *Quality of work:* Sulawesi Tengah (3,9867)
   b. *Quantity of work:* Sulawesi Tengah (4,0000)
   c. *Job Knowledge:* Maluku Utara (3,9420)
   d. *Creativeness:* Maluku Utara (3, 9850)
   e. *Cooperation:* Maluku Utara 3,9700
   f. *Dependability:* kalimantan Timur (3,9400)
   g. *Initiative:* Riau (3,9700)
   h. *Personal Qualities:* Sumatera Selatan (3,9486)
2. Tingkat kepentingan/harapan alumni terendah berdasarkan atribut kinerja:
   a. *Quality of work:* Maluku Utara (3,5900)
   b. *Quantity of work:* Kalimantan Barat (3,4000)
   c. *Job Knowledge:* Sulawesi Tengah (3,4900)
   d. *Creativeness:* Sulawesi Tengah (3,5300)
   e. *Cooperation:* Sulawesi Tengah (3,4933)
   f. *Dependability:* Sulawesi Tengah (3,5760)
   g. *Initiative:* Sulawesi Tengah (3,5167)
   h. *Personal Qualities:* Sulawesi Tengah (3,5600)

Temuan analisis kesenjangan yang dilakukan dengan menggunakan penilaian kinerja Alumni Perguruan Tinggi Kepegawaian dan skor tingkat kepentingan masing-masing indikator. Semakin kecil skor gap maka maknanya semakin baik, bahkan jika bernilai positif maka artinya kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan melebihi apa yang diharapkan oleh responden, Adapun gap analysis ketujuh provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.35
Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap Penilaian Kinerja dan Skor Tingkat Kepentingan													
		Sumatera Selatan		Sulawesi Tengah		Bengkulu		Kalimantan Barat		Kalimantan Timur		Maluku Utara		Riau	
		Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi
1	*Quality of Work*	-0,046	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,633	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,293	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,110	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,197	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,340	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,073	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
2	*Quantity of Work*	-0,146	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,540	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,347	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,033	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,167	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,193	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,127	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
3	*Job Knowledge*	0,036	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,000	Kinerja alumni sesuai dengan tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,164	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,058	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,062	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,246	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,0460	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
4	*Creativeness*	0,200	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,080	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,055	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,040	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,165	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,235	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,00	Kinerja alumni sama dengan tingkat pentingnya atribut/ dimensi
5	*Cooperation*	0,193	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,020	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,180	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,130	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,060	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,177	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,090	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
6	*Dependability*	-0,164	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,012	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,264	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,484	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,216	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,016	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,0920	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
7	*Initiative*	-0,030	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,260	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,173	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,357	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,147	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,243	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,013	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
8	Personal Qualities	-0,334	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,054	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,113	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,163	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,046	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,219	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,207	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi

Tabel 3.36
Rekapitulasi Gap Analysis di 7 Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis	Interpretasi
1.	*Quality of Work*	-0,0157	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2.	*Quantity of Work*	-0,1095	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3.	*Job Knowledge*	-0,0537	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4.	*Creativeness*	-0,0064	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5.	*Cooperation*	-0,0490	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6.	*Dependability*	-0,1474	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7.	*Initiative*	-0,0271	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi pentingnya atribut dimensi
8.	*Personal Qualities*	-0,0251	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya

Dari tabel di atas dapat dilihat ke delapan atribut gap analysis masih bernilai negatif. Gap terbesar pada aspek Dependability sedangkan gap terendahnya pada aspek Creativeness. Skor pada seluruh aspek ini mengartikan bahwa kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan masih lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi yaitu quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendabiliy, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna. Nilai Gap Analysis alumni tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja sebagai berikut:

1. Gap Analysis alumni tertinggi (kinerja alumni lebih tinggi dibandingkan Tingkat kepentingan/harapan berdasarkan atribut kinerja:
   a. Quality of work: Maluku Utara (0,340)
   b. Quantity of work: Maluku Utara (0,193)
   c. Job Knowledge: Kalimantan Timur (0,062)
   d. Creativeness: Sumatera Selatan (0,200)
   e. Cooperation: Sumatera Selatan (0,193)
   f. Dependability: Riau (0,0920)
   g. Initiative: Sulawesi Tengah (0,260)
   h. Personal Qualities: Maluku Utara (0,219)
2. Gap Analysis alumni tertinggi (kinerja alumni lebih rendah dibandingkan Tingkat kepentingan/harapan) terendah berdasarkan atribut kinerja:
   a. Quality of work: Sulawesi Tengah (-0,633)
   b. Quantity of work: Sulawesi Tengah (-0,540)
   c. Job Knowledge: Riau (-0,0460)
   d. Creativeness: Maluku Utara (-0,235)
   e. Cooperation: Bengkulu (-0,180)
   f. Dependability: Kalimantan Barat (-0,484)
   g. Initiative: Kalimantan Barat (-0,357)
   h. Personal Qualities: Kalimantan Barat (-0,163)

Analisa Tingkat Kesesuaian dihitung berdasarkan skor Tingkat kinerja dibagi skor Tingkat kepentingan x 100% (dilakukan pembulatan). Nilai hasil analisis lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa kinerja alumni lebih unggul dari apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh pengguna. Sedangkan jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, maka kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk memperbaikinya.

Tabel 3.37
Analisa Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)													
		Sumatera Selatan		Sulawesi Tengah		Bengkulu		Kalimantan Barat		Kalimantan Timur		Maluku Utara		Riau	
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi
1	*Quality of Work*	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	84%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	105%	Kinerja memuaskan	109%	Kinerja memuaskan	102%	Kinerja memuaskan
2	*Quantity of Work*	96%	Kinerja memuaskan	87%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	101%	Kinerja memuaskan	105%	Kinerja memuaskan	105%	Kinerja memuaskan	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3	*Job Knowledge*	101%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4	*Creativeness*	105%	Kinerja sangat memuaskan	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	104%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan
5	*Cooperation*	105%	Kinerja sangat memuaskan	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6	*Dependability*	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	88%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	102%	Kinerja memuaskan
7	*Initiative*	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	107%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	107%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan
8	*Personal Qualities*	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	106%	Kinerja memuaskan

Tabel 3.38
Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Tingkat Kesesuaian	Interpretasi
1.	*Quality of Work*	100%	Kinerja memuaskan
2.	*Quantity of Work*	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3.	*Job Knowledge*	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4.	*Creativeness*	100%	Kinerja memuaskan
5.	*Cooperation*	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6.	*Dependability*	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
7.	*Initiative*	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
8.	*Personal Qualities*	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
Rata-rata		**99%**	**Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, perbandingan skor kinerja alumni dan skor harapan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengguna di 7 provinsi ditemukan tingkat kesesuaian di bawah 100%, yaitu antara 96% - 99%. Meskipun tingkat kesesuaian belum mencapai 100%, masih terdapat ruang untuk perbaikan untuk memenuhi harapan pengguna. Nilai tingkat kesesuaian tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian tertinggi:
   a. *Quality of work:* Maluku Utara (109%)
   b. *Quantity of work:* Kalimantan Timur dan Maluku Utara (105%)
   c. *Job Knowledge:* Kalimantan Timur (102%)
   d. *Creativeness:* Sumatera Selatan (105%)
   e. *Cooperation:* Sumatera Selatan (105%)
   f. *Dependability:* Riau (102%)
   g. *Initiative:* Sulawesi Tengah dan Maluku Utara (107%)
   h. *Personal Qualities:* Maluku Utara dan Riau (106%)
2. Tingkat kesesuaian terendah:
   a. *Quality of work:* Sulawesi Tengah (84%)
   b. *Quantity of work:* Sulawesi Tengah (87%)
   c. *Job Knowledge:* Maluku Utara (94%)
   d. *Creativeness:* Maluku Utara (94%)
   e. *Cooperation:* Bengkulu (95%)
   f. *Dependability:* Kalimantan Barat (88%)
   g. *Initiative:* Kalimantan Barat (91%)
   h. *Personal Qualities:* Sumatera Selatan (92%)

Tabel 3.39
Kriteria kompetensi dan posisinya pada diagram kartesius IPA

Kode Kriteria	Kriteria	Posisi Area dalam Diagram Cartesius	Interpretasi
X1.2	Akurasi dalam melaksakan tugas	A	Kriteria tersebut dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni belum sesuai dengan harapan
X2.3	Kemampuan dalam mencapai target	A	
X3.6	Penguasaan Teknologi Informasi	A	
X5.2	Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi	A	
X8.4	Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya	A	
X8.10	Kepatuhan	A	
X1.1	kemampuan pengetahuan	B	Kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat Kinerja Alumni dianggap sangat baik. sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
X1.3	Ketelitian	B	
X1.4	Efektivitas dalam bekerja	B	
X1.5	Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi	B	
X1.6	Mampu bekerja dalam tekanan	B	
X2.1	Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik	B	
X2.2	Kemampuan menentukan target	B	
X5.1	Menerima perbedaan	B	
X5.4	Bertanggung jawab	B	
X5.6	Kemampuan berkoordinasi	B	
X6.1	Kesetiaan	B	
X6.2	Menginspirasi	B	
X6.3	Memegang teguh prinsip	B	
X6.4	Berambisi dalam menjalankan tugas	B	
X6.5	Berani mengambil resiko	B	
X7.1	Berani memulai	B	
X7.2	Keinginan untuk mengembangkan kompetensi	B	
X7.3	Kemandirian	B	
X7.4	Kemampuan manajemen diri	B	
X7.5	Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan	B	
X7.6	Kemampuan menyampaikan pendapat	B	
X8.1	Jujur	B	
X8.2	Ramah	B	

Kode Kriteria	Kriteria	Posisi Area dalam Diagram Cartesius	Interpretasi
X3.4	Berpikir kritis	C	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja alumni kurang
X3.7	Mampu mengggunakan atribut keselamatan kerja	C	
X3.8	Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan	C	
X5.5	Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas	C	
X8.5	Hormat dengan seluruh pegawai lainnya	C	
X8.7	Percaya diri	C	
X8.8	Konsisten	C	
X8.9	Fleksibel	C	
X8.11	Tekun	C	
X8.12	Dapat diandalkan	C	
X8.13	Displin	C	
X8.14	Keteladanan	C	
X3.1	Keterampilan melaksanakan tugas	D	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting bagi pengguna, namun kinerja alumni sangat baik.
X3.2	Kemampuan memahami tugas	D	
X3.3	Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku	D	
X3.5	Penguasaan bahasa asing	D	
X3.9	Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan	D	
X3.10	Tingkat kesalahan rendah	D	
X4.1	Menciptakan gagasan	D	
X4.2	Memiliki inovasi keterbaharuan	D	
X4.3	Mampu menerima kritikan dan saran	D	
X4.4	Mampu melihat peluang	D	
X5.3	Memiliki keterampilan sosial	D	
X8.3	Rendah hati	D	
X8.6	Percaya diri	D	

Berdasarkan tabel di atas, hasil pemetaan kriteria menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dari 54 kriteria pada 7 (tujuh) provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Area A terdapat 6 kriteria, yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap sangat penting namun tingkat kinerja belum sesuai dengan harapan.
2. Pada Area B terdapat 23 kriteria, area ini menunjukkan bahwa kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dianggap sangat baik, sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamogprajaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
3. Pada Area C terdapat 12 kriteria yang menunjukan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kurang.
4. Pada Area D terdapat 13 terdapat kriteria, pada area ini menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting namun kinerja alumni IPDN sangat baik.

Tabel 3.40
Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap kinerja alumni IPDN

NO	Indikator Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan		Bobot Rata- rata	Nilai Indeks Kepuasan
1.	*Quality Work (X1)*	3,75	A	0,125	0,4689
2.	*Quantity of Work (X2)*	3,66	A	0,125	0,4571
3.	*Job Knowledge (X3)*	3,64	A	0,125	0,4555
4.	*Creativeness (X4)*	3,70	A	0,125	0,4629
5.	*Cooperation (X5)*	3,68	A	0,125	0,4606
6.	*Dependability (X6)*	3,67	A	0,125	0,4589
7.	*Initiative (X7)*	3,74	A	0,125	0,4680
8.	*Personal Qualities (X8)*	3,66	A	0,125	0,4581
Nilai Indeks Kepuasan					**3,6900**
Nilai IKP Setelah Dikonversi					**92,2492**
Mutu Pelayanan					**A**
Kinerja Pelayanan					**Sangat Baik**

Tabel di atas menunjukan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,69 (sangat baik). Nilai indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan bernilai 3,69 nilai IKU setelah dikonversi 92,25 dengan mutu pelayanan A dan kinerja pelayanan Sangat Baik. Target indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni Tahun 2023 adalah nilai 3,5 dan realisasinya sebesar nilai 3,69 dengan demikian target kinerja sudah tercapai dengan capaian 105,43%.

Survei ini mengumpulkan data dari 350 responden dengan masing-masing provinsi 50 responden dengan 54 item pertanyaan kuesioner. Terdapat gap/kesenjangan antara kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dengan harapan pengguna secara keseluruhan sebesar -0,0543. Selanjutnya berdasarkan teknik Importance Performance Analysis yang telah dilakukan, dapat dipetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukan alumni IPDN. Dari 54 jenis kriteria yang dinilai, rekapitulasi dari 7 (tujuh) provinsi telah memetakan 6 kriteria dianggap sangat penting namun kinerja belum sesuai dengan harapan, 23 kriteria menunjukkan kinerja Alumni sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, 12 kriteria menunjukan dianggap kurang penting, begitu pula dengan kinerja Alumni Pendiidkan Tinggi Kepamongprajaan kurang dan 13 kriteria menunjukkan dianggap kurang begitu penting bagi pengguna namun kinerja Alumni Pendidikan Kepamongprajaan sangat baik.

$$\text{Indeks Kepuasan Stakeholder} = \frac{\sum \text{Skor Total Hasil Survei}}{\sum \text{Responden X} \sum \text{Pertanyaan}}$$

Ket:
Skor Total Hasil Survei= Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban
Jumlah Pertanyaan= Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi
Nilai Indeks:
1,00 - 1,75 = Kurang Puas
1,76 - 2,51 = Cukup Puas
2,52 - 3,27 = Puas
3,28 - 4 = Sangat Puas

Tabel 3.41
Jumlah Responden Penelitian

Profil Atribut Kinerja		Provinsi							TOTAL	%
		Sumatera Selatan	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Maluku Utara	Riau		
Gender	Laki-Laki	24	35	30	36	29	38	25	217	62%
	Perempuan	26	15	20	14	21	12	25	133	38%
Pendidikan Terakhir	D-III	3	1	4	3	0	1	3	15	4%
	S1	40	33	33	34	29	38	31	238	68%
	S2	7	15	12	13	20	10	14	91	26%
	S3	0	1	1	0	1	1	2	6	2%
Hubungan Dengan Alumni	Atasan Alumni	20	15	7	15	12	5	6	80	23%
	Bawahan Alumni	5	7	5	5	6	3	2	33	9%
	Rekan Kerja Alumni	25	28	38	30	32	42	42	237	68%

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

1. Pengguna alumni IPDN secara umum puas dengan kinerja alumni IPDN dikarenakan kinerja alumni IPDN pada kriteria Quality Of Work, Quantity Of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative dan Personal Qualities dan menilai bahwa aspek-aspek tersebut adalah bidang kompetensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.
2. Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo telah mencanangkan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2015. Kader Pelopor Revolusi Mental dan telah ditugaskan dengan distribusi: 15% di Kementerian/lembaga, 35% di Daerah Perbatasan dan Pesisir, dan 50% disebar keseluruh Pemerintah Daerah.
3. Kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada IPDN dalam mengelola rekruitmen calon praja yang dilaksanakan secara online. Proses seleksi calon praja melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Alternatif solusi yang telah dan akan terus dilakukan diantaranya:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum Pendidikan, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja terhadap teknologi informasi dengan digitalisasi sistem pembelajaran melalui penerapan smart campus di lingkungan IPDN.
3. Meningkatkan kedisiplinan Praja dan Prestasi Bidang Pengasuhan dan Ekstrakurikuler Praja.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja terhadap best practice perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terkini, Tahun 2023 IPDN menyelenggarakan Seminar Nasional dan Stadium General bagi Praja dan Sivitas Akademika IPDN, dengan manghadirkan narasumber dari:
   a. Pejabat Negara: Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilu RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri), dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
   b. Kepala Daerah: Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Maluku, dan Walikota Bukittinggi), dan
   c. Tokoh Nasional: Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dan Ketua Dewan Pengarah Perludem
2. IPDN memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan dan isu-isu terkini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan memberikan data dan solusi melalui hasil penelitian, dimana telah dilaksanakan penelitan lingkup IPDN Tahun 2023 yang bersifat strategis, yaitu:
   a. Penataan Kelembagaan Daerah Otonom Baru (DOB).
   b. Dampak Pembangunan IKN Bagi Daerah Penyangga dari Segi Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
   c. Konsep Otonomi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara.
   d. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
   e. Pengembangan Ilmu Pemerintahan Pada Tataran Aksiologis.

3. IPDN melakukan kerja nyata melalui pengabdian masyarakat dalam membantu penyelesaian permasalahan dan pengambangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat secara langsung, yaitu:
   a. Terlaksananya Bhakti Karya Praja bagi Praja Utama IPDN di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
   b. Keikutsertaan Praja Utama IPDN sebanyak 100 Praja dalam kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda (LATSITARDA) Nusantara ke-XLIII.
   c. Pelaksanaan Kegiatan Magang I di Kabupaten Majalengka, Kegiatan Magang II di Kabupaten/ Kota lokasi IPDN Kampus Daerah, dan Kegiatan Magang III di Kota Tasikmalaya.
   d. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Desa Binaan di 12 Desa Se-Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
   e. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lingkup IPDN.

4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan IPDN, yaitu:
   a. Pengembangan Tenaga Pendidik Lingkup IPDN:
      1) Sosialisasi Aplikasi Sistem Infomasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) bagi Dosen IPDN (120 Dosen).
      2) Webinar Pendampingan Penulisan Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) Bagi Dosen IPDN (80 Dosen).
      3) Kegiatan Sosialisasi Pedoman Operasional PAK Bagi Dosen IPDN (84 Dosen).
      4) Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Dosen Bagi Dosen IPDN (50 Dosen).
   b. Pengembangan Tenaga Kependidikan Lingkup IPDN:
      1) Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM. II) bagi 2 orang Pejabat Struktural di lingkungan IPDN;
      2) Fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Pejabat Fungsional di lingkungan IPDN dalam bentuk Talent Pool dan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional, Seminar/Webinar, Focus Group Discussion (FGD), dan Sosialisasi, seperti: Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Perencana, Pustakawan, Arsiparis, Kehumasan, dan lainnya; dan FGD penggunaan aplikasi SAKTI Web Full Module dan kesiapan Roll Out SAKTI Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Sumedang.
5. Meningkatkan kualitas dan mutu organisasi serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan di lingkungan IPDN, dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan PT dalam negeri dan luar negeri, serta Pembangunan Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor; Pembangunan Laboratorium Program Studi Manajemen Keuangan Publik di IPDN Kampus Jakarta; Penyelesaian Pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat; Renovasi Gedung Menza IPDN Kampus Jatinangor; Renovasi Gerbang Utama IPDN Kampus Jakarta; Renovasi Gedung Menza IPDN Kampus Papua; Renovasi Ruang Rapat dan Kelas di IPDN Kampus Jakarta dan IPDN Kampus Jatinangor.
6. Meningkatkan penerapan sistem Pengasuhan yang terintegrasi melibatkan tiga komponen yaitu kampus, keluarga dan masyarakat. Metode pengasuhan meliputi metode "among asuh" (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani melalui metode observasi, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, serta keteladanan;
7. Perbaikan Sistem Penerimaan Calon Praja IPDN dengan mengutamakan keterbukaan, menutup ruang KKN, dan membuka kesempatan yang sama bagi putra putri Indonesia tanpa membedakan status sosial, dengan rincian Tahun 2023 yaitu jumlah peminat Calon Praja IPDN sebanyak 32.696 orang dari formasi yang tersedia sejumlah 534 orang dan yang lulus sejumlah 534 orang, namun yang melakukan registrasi hanya 533 orang

Tabel 3.42
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKU	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43.75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	**3.26-4.00**	**81.26-100.00**	**A**	**Sangat Baik**

Realisasi kinerja IKU Tahun 2023 sebesar nilai 3,69 mengalami peningkatan nilai 0,01 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja IKU Tahun 2022 dengan nilai 3,68. Sedangkan jika dibandingkan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,6 dengan realisasi selama 2 tahun terakhir (Tahun 2022 dan 2023) telah melampaui target dimaksud, sehingga dalam pencapaian target IKU Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN terus berupaya meningkatkan kualitas dalam hal pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Adapun perkembangan target, realisasi, dan capaian Indikator Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.43
Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	Nilai 3,6	-	-
2023	Nilai 3,5	Nilai 3,69	105,43%
2022	Nilai 3,3	Nilai 3,68	111,52%
2021	Nilai 3,2	Nilai 3,48	108,75%
2020	Nilai 3,0	Nilai 3,72	124%

Sumber: Laporan Hasil Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun

Sasaran 6 :

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Dimana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundangundangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Langkah untuk menuju harmonisasi peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah"** diperoleh **sebesar 92,04%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Tinggi** atau **kategori Berhasil,** sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 73,63 (Tinggi)	92,04%	Tinggi/Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**92,04%**	**Tinggi/Berhasil**

Dalam rangka menjamin kepastian hukum di daerah bahwa produk hukum daerah telah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan dan asas materi muatan, maka perlu dilakukan pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama kebijakan daerah, telah menyusun Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan daerah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mengurangi obesitas regulasi yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan IKD yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggara pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3848 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. IKD sendiri terdiri atas susunan 5 (lima) Aspek, 13 (tiga belas) Variabel, dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator parametrik penilaian Indeks. Kelima Aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan Peraturan Daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya.

Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penting bagi Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pembinaan dalam kebijakan daerah untuk melakukan penilaian terhadap proses pembentukan peratruan daerah selama ini, IKD diharapkan dapat menjadi salah satu *tools* pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada penyelenggara pemerintahan di daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penghitungan IKD secara sampling dimaksudkan memberikan keyakinan terbatas dan diimplementasikan dengan memanfaatkan layanan berbasis digitalyakni Aplikasi *e-Perda*. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai obyek penghitungan secara mudah dapat mengunggah berbagai kebutuhan data dukung yang dibutuhkan. Data dukung sebagaimana dimaksud diperlukan dalam mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintahan daerah patuh terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Dalam melakukan penghitungan IKD sendiri dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asas tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Adapun penjelasan dari masing-masing definisi operasional yang digunakan dalam penghitungan IKD antara lain sebagai berikut:

1. Angka Indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif (perbandingan) nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel.
2. Angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%) terhadap yang lain.
3. Konsep yang dapat memberikan penjelasan tentang perbandingan satu lokus dengan lokus lainnya:
   a. Dalam membandingkan lokus, digunakan satu periode waktu tertentu sebagai dasar pembanding yang disebut Tahun Berkenaan.
   b. Dinyatakan dalam persentase (%), dalam penulisannya persentase tidak perlu ditulis lagi.

Selanjutnya, dalam merumuskan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, dibagi menjadi 3 (tiga) struktur turunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek merupakan satuan terbesar dalam pengukuran Indeks yang terdiri dari setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Adapun rumus yang ditetapkan dalam penjumlahan Aspek yakni:

   Aspek A + Aspek B + Aspek C + dst.....

2. Variabel merupakan satuan turunan dalam Aspek yang terdiri dari masing-masing kepatuhan dari alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus yang ditetapkan pada masing-masing aspek yakni:

   Rumus Pembobotan per Aspek

   $$\frac{\text{Total Skor Indikator}}{\text{Total Bobot Aspek}} \times \text{Bobot dalam indikator}$$

3. Indikator merupakan satuan terkecil dalam penghitungan IKD dan juga merupakan turunan dari setiap Aspek yang dinilai dalam IKD. Dalam aspek ini penghitungan diukur melalui kelengkapan dokumen yang telah diunggah melalui Aplikasi *e-Perda* .

Oleh karena itu, berdasarkan struktur, rumus serta kondisi dan pra kondisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disajikan masing-masing pembobotan baik aspek maupun indikator antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.45
pembobotan aspek, variabel, dan indikator

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
1.1.1.	Perencanaan (30%)	Kepatuhan penetapan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Propemperda (35%)	Propemperda ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD	Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenaan
1.1.2.			Jangka waktu Penetapan SK DPRD tentang Propemperda ditetapkan sebelum Perda mengenai APBD Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan	
1.1.3.			Propem Perda Disepakati Bersama melalui Keputusan DPRD disertai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD	Berita Acara Paripurna Penetapan SK Propemperda Tahun berkenaan
1.1.4.			Lampiran Dokumen SK DPRD tentang Propemperda disertai dengan tabel sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
1.2.1.		Kepatuhan dalam Pembentukan Propemperda dalam kerangka Analisa Kebutuhan Perda dan/ atau Kajian Akademik lainnya (35%)	Judul Ranperda dalam Propemperda yang tertuang dalam Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur	Dokumen Penjelasan/ Keterangan Ranperda yang terlampir dalam SK DPRD tentang Propemperda
1.2.2.			Judul Ranperda dalam Propemperda yang disertai penjelasan atau keterangan juga disertai dengan identifikasi/ kajian mengenai mengapa Ranperda dimaksud harus diprioritaskan dan harus didahulukan penetapannya	
1.2.3.			Ranperda dalam Propemperda yang direncanakan yang akan ditetapkan lebih awal merupakan Ranperda dalam skala prioritas 1-3 sesuai dengan prioritas dalam Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	Borang form checklist penentuan prioritas sesuai di AKP
1.2.4.			Ranperda yang tertuang dalam Propemperda disusun berdasarkan Metode Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
1.3.1		Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui media daring milik pemerintah daerah	Propemperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
1.3.2.			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id)	Propemperda disampaikan kepada Mendagri melalui E-perda (Screenshot)
1.3.3.			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal media dalam jaringan (online) atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/ atau luar daerah	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
1.3.4			Dilakukan program sosialisasi Propemperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
2.1.1	Penyusunan (20%)	Kepatuhan Keterlibatan Pihak terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (35%)	Pembentukan Tim Penyusunan dengan Keputusan Kepala Daerah	
2.1.2			Ranperda disusun bersama dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	
2.1.4.			Penyusunan ranperda melibatkan peneliti dan/atau tenaga ahli yang kapasitasnya berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Ranperda	
2.2.1.		Kepatuhan Pengkajian dalam Penyusunan Ranperda (35%)	Dilakukan penyusunan Ranperda antara pemrakarsa dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD	Surat Undangan dan Berita Acara Hasil Pembahasan
2.2.2.			Ranperda dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Kanwil Kemenkumham bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah	Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi dari Kementerian Hukum dan HAM

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
2.2.3.			Teknik Penyusunan Ranperda dilakukan dengan pencermatan oleh Biro Hukum bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD	Berita Acara Pencermatan
2.2.4.			Ranperda disusun berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Materi Muatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait di atasnya	
2.3.1.		Kepatuhan Penyebarluasan Ranperda (30%)	Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah	Ranperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
2.3.2.			Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/ atau luar daerah	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
2.3.3.			Dilakukan program sosialisasi Ranperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh DPRD dan/ atau Pemerintah Daerah	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
3.1.1.	Pembahasan (30%)	Kepatuhan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembahasan Ranperda (40%)	Pembahasan Ranperda dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Propemperda kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	Daftar Ranperda pada Lampiran SK Propemperda dan/ atau SK DPRD tentang Pembahasan Ranperda diluar Propemperda
3.1.2.			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda	Target Waktu pembahasan pada Lampiran SK Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
3.1.3.			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda	
3.1.4.			Ranperda yang selesai dibahas disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan	
3.2.1.		Kepatuhan terhadap Fasilitasi/ Evaluasi Ranperda (60%)	Fasilitasi ranperda dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I	
3.2.2.			Jangka Waktu tindak lanjut hasil fasilitasi yang akan dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II	
3.2.3.			Ranperda yang ditetapkan dalam Persetujuan Bersama telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi/evaluasi Kemendagri	Surat Hasil Fasilitasi dan Draft Ranperda yang sudah disetujui antara Pemda dan DPRD
3.2.4.			Ranperda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi/ Evaluasi yang dibuktikan dengan Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri	Surat Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri
4.1.1.	Penetapan (10%)	Kepatuhan terhadap Jangka Waktu Penetapan Ranperda (50%)	Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.	Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD
4.1.2.			Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling Lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah	Dokumen Perda
5.1.1.	Pengundangan dan Pelaporan (10%)	Kepatuhan terhadap Jangka Waktu Pengundangan Perda (30%)	Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan	Dokumen Perda yang telah diundangkan
5.2.1.		Kepatuhan Penyebarluasan Perda (35%)	Dokumen Perda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah	Perda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
5.2.2.			Dokumen Perda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/ atau luar daerah	Publikasi Perda dalam portal media massa (Screenshot)
5.2.3.			Dilakukan program sosialisasi Perda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
5.3.1.		Kepatuhan dalam penyampaian / pelaporan Perda yang telah diundangkan (35%)	Jangka Waktu Kepatuhan dalam penyampaian Perda yang telah diundangkan (skala 1 - 7 hari) kepada Menteri Dalam Negeri	Surat Pemda kepada Menteri Dalam Negeri terkait penyampaian Perda yang telah diundangkan (melalui e-Perda)
5.3.2.			Pelaporan Perda yang telah ditetapkan dilakukan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id)	Tanggal Penyampaian Perda kepada Mendagri menggunakan Aplikasi e-Perda (Screenshot)

Berdasarkan pembobotan tersebut, hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah berdasarkan pembobotan sebagaimana dimaksud, dapat diambil penghitungan skala dalam rangka penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.46
Skala Perhitungan

Skor Kinerja	Definisi
0% - 20%	Sangat Rendah
≥20% - 40%	Rendah
≥40% - 60%	Sedang
≥60% - 80%	Tinggi
≥80% - 100%	Sangat Tinggi

Penghitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam 1 tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala karena setiap tahapan penilaian saling keterkaitan dan dokumen-dokumen yang diperoleh memerlukan waktu sehingga hasil penilaian diperoleh melampaui tahun penilaian. Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengantisipasi kendala tersebut, yaitu dengan melakukan pembaruan *timeline* di setiap tahapan.

Berkenaan dengan gambaran penjelasan serta metode penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3848 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditargetkan bahwa pada Tahun 2023, sejumlah 30 (tiga puluh) Provinsi memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum daerah.

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023, dapat disajikan tabel peringkat Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.47
Nilai dan Kategori Indeks Kepatuhan Daerah per Provinsi terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023

No	Provinsi	Nilai	Kategori
1.	NUSA TENGGARA TIMUR	87,33	Sangat Tinggi
2.	JAWA TIMUR	86,46	Sangat Tinggi
3.	SULAWESI SELATAN	85,08	Sangat Tinggi
4.	BANTEN	84,83	Sangat Tinggi
5.	JAWA BARAT	83,08	Sangat Tinggi
6.	SUMATERA SELATAN	82,58	Sangat Tinggi
7.	BALI	81,00	Sangat Tinggi
8.	MALUKU	80,29	Sangat Tinggi
9.	ACEH	79,04	Tinggi
10.	GORONTALO	78,08	Tinggi
11.	BENGKULU	77,92	Tinggi
12.	SULAWESI TENGAH	77,58	Tinggi
13.	LAMPUNG	76,33	Tinggi
14.	KALIMANTAN SELATAN	75,46	Tinggi
15.	SUMATERA UTARA	74,67	Tinggi
16.	D.I. YOGYAKARTA	74,08	Tinggi
17.	KALIMANTAN TENGAH	73,21	Tinggi
18.	DKI JAKARTA	72,08	Tinggi
19.	SULAWESI TENGGARA	71,62	Tinggi
20.	RIAU	70,24	Tinggi
21.	KALIMANTAN TIMUR	68,62	Tinggi
22.	JAWA TENGAH	67,83	Tinggi
23.	KALIMANTAN BARAT	66,04	Tinggi
24.	BANGKA BELITUNG	65,67	Tinggi
25.	SUMATERA BARAT	63,33	Tinggi
26.	KEPULAUAN RIAU	62,12	Tinggi
27.	PAPUA BARAT	61,96	Tinggi
28.	JAMBI	61,86	Tinggi
29.	KALIMANTAN UTARA	60,46	Tinggi
30.	NUSA TENGGARA BARAT	60,29	Tinggi
31.	SULAWESI UTARA	57,88	Sedang
32.	MALUKU UTARA	-	Belum dapat dinilai
33.	SULAWESI BARAT	-	Belum dapat dinilai
34.	PAPUA	-	Belum dapat dinilai
35.	PAPUA SELATAN		
36.	PAPUA TENGAH		
37.	PAPUA PEGUNUNGAN		
38.	PAPUA BARAT DAYA		

Berkenaan dengan hasil penilaian di atas, ditemukan bahwa target berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3848 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada Tahun 2023 telah tercapai. Hal tersebut dibuktikan dari 30 (tiga puluh) Provinsi yang ditargetkan mendapatkan nilai tinggi, telah ditemukan 8 (delapan) Provinsi yang mendapatkan nilai sangat tinggi dan 22 (dua puluh dua) Provinsi yang mendapatkan nilai tinggi, sedangkan terdapat 3 (tiga) Provinsi belum dapat dilakukan penilaian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai rata-rata 73,63 (Tinggi) dan target Nilai 80 (Tinggi) telah tercapai sebesar 92,04%,

Adapun penyebab penurunan kinerja yaitu adanya hambatan dalam perolehan nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dikarenakan proses dan tahapan yang saling keterkaitan dan tidak bisa selesai hanya dalam 1 tahun anggaran, karena Penilaian IKD dilakukan dengan tahapan waktu sebagai berikut:

1. Pada Bulan November, Pemerintah Daerah melakukan pengunggahan dokumen sebagai bahan penilaian melalui Aplikasi e-Perda;
2. Pada Bulan Desember, dilakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh Pemerintah Daerah;
3. Pada Bulan Januari - Februari, dilakukan analisa pengukuran dengan menggunakan indikator;
4. Pada Bulan Maret, dilakukan finalisasi perhitungan terhadap IKD dan memberikan pengumuman hasil perhitungan IKD. Sehingga hasil perhitungan IKD sebenarnya diperoleh bulan Maret.

Jumlah daerah yang IKD nilai tinggi terdapat 30 (tiga puluh) Provinsi yang ditargetkan mendapatkan nilai tinggi, telah ditemukan 8 (delapan) Provinsi yang mendapatkan nilai sangat tinggi dan 22 (dua puluh dua) Provinsi yang mendapatkan nilai tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi bernilai tinggi berjumlah 30 Provinsi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi tetap membuat target nilai IKD 80 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena terdapat 3 Provinsi yang belum dapat dinilai karena data belum lengkap.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah **telah berupaya dalam percepatan yang didukung dengan adanya sistem aplikasi e-Perda,** yang langsung dapat mengeluarkan hasil penilaian IKD pada setiap provinsi yang telah diolah dengan rumus yang ada di sistem tersebut yang dilakukan secara elektronik sehingga dijamin objektivitasnya, sebagai langkah solusi juga yang telah diterapkan pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, **efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan yaitu melalui pemanfaatan layanan berbasis digital yakni Aplikasi e-Perda**. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai obyek penghitungan secara mudah dapat mengunggah berbagai kebutuhan data dukung yang dibutuhkan. Data dukung sebagaimana dimaksud diperlukan dalam mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintahan daerah patuhterhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Dalam melakukan penghitungan IKD sendiri dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asas tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilihat dari kinerja dengan realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 99,65% (per tanggal 31 Desember 2023) dan realisasi anggaran Direktorat Produk Hukum Daerah sebesar 99,40% (per tanggal 31 Desember 2023). Dari alokasi anggaran yang diberikan, terjadi efisiensi penggunaan anggaran Ditjen Otonomi Daerah sebesar 0,35% dan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Produk Hukum Daerah sebesar 0,60%.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menyiapkan data dukung pada setiap tahapan proses dalam penilaian IKD, yaitu:
   a. Tahapan Perencanaan Peraturan Daerah:
   b. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah:
   c. Tahapan Pembahasan Peraturan Daerah:
   d. Tahapan Penetapan Peraturan Daerah:
   e. Tahapan Pengundangan Peraturan Daerah:
2. Kemudian salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah yaitu Rapat Koordinasi Nasional Bapemperda DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Asistensi Perda dan Perkada tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Koordinasi teknis lintas K/L dalam rangka penyelesaian Perda dan Perkada Provinsi tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, Penyajian informasi e-Perda, Review Perda dan Perkada, Penyajian database peraturan daerah.

Sasaran 7 :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki Visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif"** diperoleh **sebesar 103,09%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil** Hal ini didukung oleh capaian 5 (lima) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, capaian 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil, dan capaian 2 (dua) indikator dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 3,04 (Tinggi)	89,15%	Sedang/ Cukup Berhasil
2	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	80%	83,23%	104,04%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
3	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 86,56	108,20%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
4	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%	12,23%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
5	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	Nilai 69,18	106,43%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
6	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	74,53%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
7	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 82,06	82,06%	Sedang/ Cukup Berhasil
8	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	Nilai 80,63 (B)	94,86%	Tinggi/Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**103,09%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, EPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melaksanakan EPPD berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

Pelaksanaan EPPD bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Selain itu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, maka daerah-daerah yang dinilai perlu pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemerintahannya diberikan program peningkatan kapasitas sehingga diharapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerahnya dapat meningkat pada evaluasi tahun berikutnya.

Dasar penentuan Nilai EPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran nilai EPPD menjadi alat ukur kinerja makro dan Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan menggunakan rumus penghitungan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro. Adapun capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro sebagai berikut :

KPPD = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25

Keterangan:

KPPD	**=**	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
CKM	**=**	**Capaian Kinerja Makro**
CKUP	**=**	**Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**
PKM	**=**	**Perubahan Kinerja Makro**

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.49
Klasifikasi Skor dan Status Kinerja

Skor Kinerja	Definisi
1,00 - 1,80	Sangat Rendah
1,81 - 2,60	Rendah
2,61 - 3,40	Sedang
3,41 - 4,20	Tinggi
4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

Hasil EPPD tahun 2023 terhadap LPPD tahun 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646, tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Adapun skor dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 Provinsi, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.50
skor dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 Provinsi

No.	Nama Pemerintahan Daerah	Nilai	Status
1	Provinsi Jawa Timur	3,6970	Tinggi
2	Provinsi Jawa Tengah	3,6791	Tinggi
3	DKI Jakarta	3,6560	Tinggi
4	Provinsi Jawa Barat	3,6485	Tinggi
5	DI Yogyakarta	3,5353	Tinggi
6	Provinsi Kalimantan Timur	3,5178	Tinggi
7	Provinsi Bali	3,4813	Tinggi
8	Provinsi Sumatera Selatan	3,4811	Tinggi
9	Provinsi Riau	3,4778	Tinggi
10	Provinsi Kepulauan Riau	3,4730	Tinggi
11	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4653	Tinggi
12	Provinsi Banten	3,4592	Tinggi
13	Provinsi Sulawesi Selatan	3,3531	Sedang
14	Provinsi Bengkulu	3,1670	Sedang
15	Provinsi Sulawesi Tengah	3,1145	Sedang
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,0439	Sedang
17	Provinsi Jambi	3,0239	Sedang
18	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,9920	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Utara	2,9723	Sedang
20	Provinsi Aceh	2,9618	Sedang
21	Provinsi Kalimantan Utara	2,9479	Sedang
22	Provinsi Sumatera Utara	2,9354	Sedang
23	Provinsi Gorontalo	2,8779	Sedang
24	Provinsi Kalimantan Barat	2,8559	Sedang
25	Provinsi Sumatera Barat	2,7333	Sedang
26	Provinsi Maluku	2,7298	Sedang
27	Provinsi Sulawesi Barat	2,6855	Sedang
28	Provinsi Lampung	2,6845	Sedang
29	Provinsi Maluku Utara	2,6819	Sedang
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,6140	Sedang
31	Provinsi Kalimantan Tengah	2,5979	Rendah
32	Provinsi Papua Barat	2,5929	Rendah
33	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,5793	Rendah
34	Provinsi Papua	2,2383	Rendah

Adapun penghitungan Nilai EPPD menggunakan perhitungan nilai rata-rata:

$$\frac{\text{Nilai Provinsi Tinggi 1+Nilai Provinsi Tinggi 2+Dst}}{\text{Target Jumlah Provinsi Kinerja Tinggi}}$$

$$\frac{\text{Nilai Provinsi Tinggi 1+Nilai Provinsi Tinggi 2+Dst}}{\text{Target Jumlah Provinsi Kinerja Tinggi}} = \frac{42{,}5714}{14} = 3{,}04$$

Berdasarkan perhitungan terhadap 14 Provinsi yang menjadi target nilai tinggi, diperoleh realisasi nilai EPPD rata-rata dari 12 Provinsi yang bernilai tinggi. Sehingga diperoleh Nilai EPPD Tahun 2023 adalah Nilai 3,04 dengan capaian sebesar 89,15%.

Tabel 3.51
Capaian Terhadap Realisasi Target EPPD Tahun 2023

Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,41	3,04	89,15%

Perubahan metodologi yang diakibatkan adanya peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan perubahan metodologi tersebut, terdapat juga penyesuaian terhadap interval status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengusulkan penghapusan status kinerja Sangat Tinggi, sehingga jumlah daerah yang sebelumnya masuk pada kategori kinerja Tinggi menjadi sama nilainya dengan status kinerja Sangat Tinggi dan jumlah daerah yang masuk pada status kinerja Sedang menjadi dinilai berstatus kinerja Tinggi.

Selanjutnya mencermati target pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan IKU Kemendagri yaitu: Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target nilai 3,41 (tinggi) adalah merupakan penyesuaian metode pengukuran yang diperbaharui dan penilaiannya masuk dalam interval skor 3,41 - 4,20.

Pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 menggunakan klasifikasi Status Kinerja sebagai berikut

Tabel 3.52
Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sedangkan pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 menggunakan klasifikasi Status Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.53
Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	0.00 – 0.80	Sangat Rendah
2	0.81 – 1.60	Rendah
3	1.61 – 2.40	Sedang
4	2.41 – 3.20	Tinggi
5	3.21 – 4.00	Sangat Tinggi

Terdapat penyesuaian terhadap interval status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengusulkan penghapusan status kinerja Sangat Tinggi, sehingga jumlah daerah yang sebelumnya masuk pada kategori kinerja Tinggi (nilai 3.41-4.2) menjadi sama nilainya dengan status kinerja Sangat Tinggi (nilai 3.21-4) dan jumlah daerah yang masuk pada status kinerja Sedang (2.61-3.4) menjadi dinilai berstatus kinerja Tinggi (3.21-4).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai prestasi kinerja Tinggi dikarenakan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang disebabkan oleh:

1. Belum sinkronnya perencanaan pusat dan daerah;
2. Terbatasnya alokasi anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah;
3. Sumberdaya aparatur di daerah belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah;
4. Perubahan Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

EPPD tidak tercapai sesuai target, dengan penjelasan dan tindaklanjut, sebagai berikut:

1. Bobot nilai kinerja makro sebesar 25% terlalu besar.
2. Bobot nilai kinerja urusan wajib pelayanan dasar (urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas dan sosial) terlalu rendah, dimana masing-masing urusan memiliki nilai bobot 6%.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan penyebab hasil EPPD Tahun 2023 yaitu dengan melakukan pembahasan dan penajaman terkait perubahan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 terkait penyesuaian Indikator Kinerja EPPD sesuai dengan Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, serta melakukan perubahan terhadap batang tubuh, pembobotan nilai EPPD, metodologi EPPD dan Klasifikasi Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar target kinerja bisa tercapai.

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam efisiensi penggunaaan sumber daya yaitu melalui Aplikasi SILPPD sebagai bagian dari pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan SILPPD yang termasuk dalam aplikasi nasional berbagi pakai yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Untuk itu kiranya dalam mendukung SILPPD mendapatkan legitimasi aplikasi berbagai pakai secara nasional maka dibutuhkan beberapa syarat dan kriteria yaitu Posisi Pengunaan aplikasi (end user), pengembangan (software and hardware development), pemeliharaan (maintenance) dan pengamanan (security), serta tenaga teknis pengelola (humanware); maka hal ini perlu didiskusikan secara intensif dengan Pusdatin Kemendagri sebagai Hub TIK, agar aplikasi SILPPD berdayaguna dan berhasilguna serta tidak terbengkalai/macet.

LPPD sebagai sumber informasi utama dalam pelaksanaan EPPD digunakan sebagai alat ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dan pengembangan kapasitas daerah. Data LPPD diarahkan menjadi *One Data and One Click Get Everythings*, karena saat ini didalam SILPPD sudah terintegrasi data-data tambahan lainnya seperti data asimetris yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, DIY, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan, termasuk data-data 7 (tujuh) elemen dasar penyelenggaran Pemerintahan daerah, yang dapat digunakan sebagai bahan montoring dan evaluasi, utamanya mendukung Tugas dan Fungsi Ditjen Otonomi Daerah yang berkaitan antar dan lintas Direktorat yaitu aspek penataan daerah (kemandirian), kelembagaan dan kepegawaian daerah (tataran pelaksana kebijakan), hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD (tataran pengambil kebijakan), produk hukum daerah (output/outcome fasilitasi), dan Binwas secara umum antarlintas komponen lainnya lingkup Kemendagri dan K/L terkait, dengan memanfaatkan Aplikasi SILPPD.

Diharapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kiranya mampu mempengaruhi kebijakan secara nasional dan dijadikan sebagai standar kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendorong pengembangan kapasitas daerah serta penyusunan peta kapasitas daerah sebagai upaya-upaya didalam pelaksanaan kebijakan penataan daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilihat dari kinerja dengan realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 99,65% (per tanggal 31 Desember 2023) dan realisasi anggaran Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah sebesar 99,41% (per tanggal 31 Desember 2023). Dari alokasi anggaran yang diberikan, terjadi efisiensi penggunaan anggaran Ditjen Otonomi Daerah sebesar 0,35% dan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah sebesar 0,59%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satunya di Kota Payakumbuh
2. Asistensi penyusunan LPPD Provinsi,
3. Bimtek Penyusunan dan Evaluasi LPPD Provinsi, Verifikasi Dokumen LPPD Provinsi.
4. Uji Petik EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022 yang salah satunya dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.

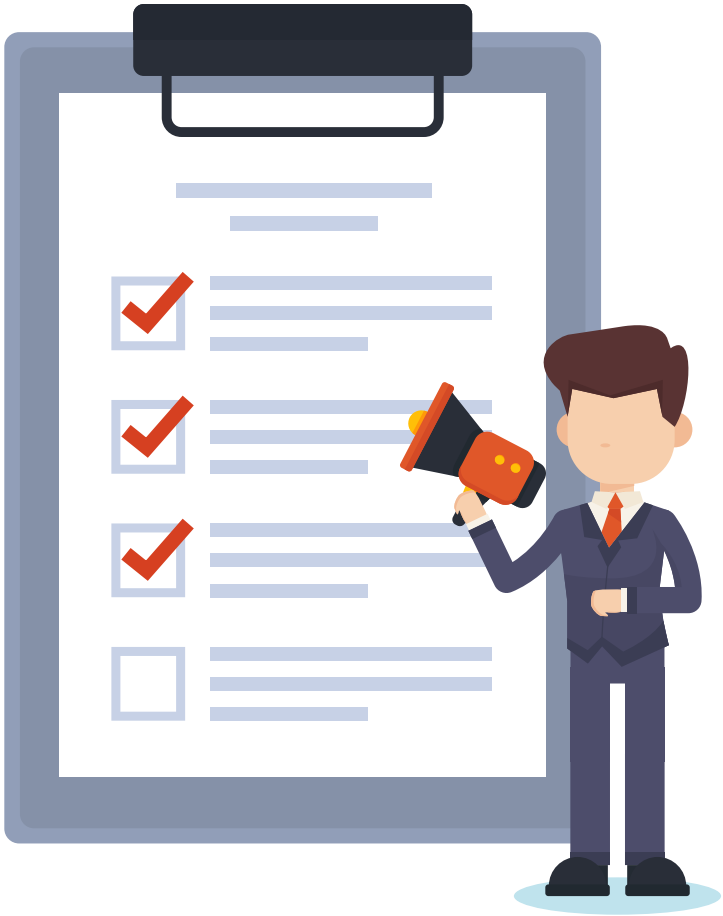

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atas implementasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri dan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap indikator "Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM" yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri disesuaikan menjadi level Indikator Kinerja Program (IKP) dan indikator "Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah" menjadi level IKU Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memperioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal, Pemerintah Daerah wajib melakukan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Melalui penerapan SPM dimaksud, Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan adanya peningkatan pemenuhan layanan dasar melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta tertuang dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM.

Pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dalam bentuk barang dan atau jasa. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran dan menjadi acuan dalam implementasi tahapan penerapan SPM khususnya pada tahapan pengumpulan data yang dituangkan pada standar teknis SPM yang bersangkutan. Keberpihakan ini ditujukan dalam rangka memberikan akses pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik.

Pada Rencana Pembangunan Jangkak Menengah (RPJMN) 2020-2024, pelayanan dasar juga telah menjadi salah satu arah kebijakan prioritas, yaitu meningkatkan tata kelola layanan dasar dengan program antara lain percepatan pencapaian SPM di daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan terhadap penerapan SPM, diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" khususnya dalam hal pemenuhan layanan dasar.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan capaian Penerima Layanan Dasar.

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:
- IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan.
- BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM
1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna
2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama
3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya
4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama
5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda
6. Nilai <60 : Belum

Berdasarkan data pada aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, persentase capaian nasional penerapan SPM tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 83,23%. Hal tersebut menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah mengalami peningkatan nilai sebesar 10,17% dibandingkan dari tahun 2022 dengan realisasi sebesar 73,06%. Capaian ini juga telah melampaui target RPJMN sebesar 70%.

Gambar 3.30
Perbandingan capaian nasional penerapan SPM Tahun 2023 dengan Target RPJMN

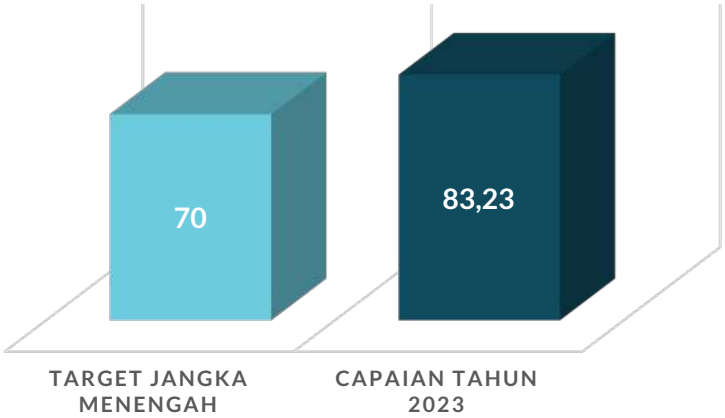

Adapun capaian nasional penerapan SPM tahun 2023 pada setiap bidang SPM antara lain:
1. Bidang Pendidikan adalah sebesar 80,55 (delapan puluh koma lima puluh lima).
2. Bidang Kesehatan adalah sebesar 84,00 (delapan puluh empat).
3. Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 83,45 (delapan puluh tiga koma empat puluh lima).
4. Bidang Perumahan Rakyat adalah sebesar 81,38 (delapan puluh satu koma tiga puluh delapan).
5. Bidang Trantibumlinmas adalah sebesar 85,47 (delapan puluh lima koma empat puluh tujuh).
6. Bidang Sosial adalah sebesar 83,14 (delapan puluh tiga koma empat belas).

Dalam pelaksanaan pembinaan urusan wajib layanan dasar, Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) yaitu melakukan asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi kepada daerah untuk mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah, bidang perumahan rakyat, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang trantibumlinmas dan bidang pendidikan dengan indikator " Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah, bidang perumahan rakyat, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang trantibumlinmas dan bidang pendidikan" dan targetnya adalah sebanyak 412 Daerah, dengan pelaksanaan RO PN dimaksud harapannya pemenuhan layanan dasar di Indonesia dapat diberikan secara optimal. Adapun realisasi Indikator RO PN Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.54
Target dan Realisasi Indikator Rincian Output Prioritas Nasional terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

No	Indikator RO	Target 2023	Realisasi 2023
1	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	412 Daerah	511 Daerah
2	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	412 Daerah	515 Daerah
3	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah	412 Daerah	509 Daerah
4	Jumlah Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan rakyat	412 Daerah	507 Daerah
5	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	412 Daerah	512 Daerah
6	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	412 Daerah	509 Daerah

Penetapan target 412 Daerah adalah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana terdapat indikator "Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II, III dan IV" dengan target total 412 Daerah.

Salah satu ukuran keberhasilan penerapan SPM di daerah adalah terintegrasinya indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina pembangunan Daerah yang melakukan pembinaan umum dari aspek perencanaan maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana amanat pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM secara nasional. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-5183 Tahun 2022 tentang Tim Sekretariat Bersama Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pusat yang menjelaskan lebih detail tentang struktur dan peran dari tim penerapan SPM di tingkat pusat yang beranggotakan Kementerian/Lembaga teknis, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada saat pembahasan penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya terkait bidang SPM. Penelaahan dokumen perencanaan daerah akan dilakukan penilaian, sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah tersebut mampu dipenuhi oleh pemerintahan daerah. Selain itu, tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu melakukan pembinaan terhadap Tim Koordinasi Penerapan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, terkait manajerial, kelembagaan serta melakukan evaluasi tingkat keterisian data laporan capaian SPM dalam aplikasi *e-SPM*.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi lintas bidang SPM dalam melakukan asistensi dan supervisi serta evaluasi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian Penerapan SPM.
2. Pelaksanaan penerapan SPM daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan peraturan teknis pelaksanaan penerapan SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait, serta pedoman penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah.
3. Terbentuknya Sekretariat Bersama tingkat pusat melalui Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050.05-5183 tanggal 23 Agustus 2022, yang beranggotakan Kementerian/Lembaga teknis, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tugas mengoordinasikan penerapan, pemantauan dan evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta penanganan isu dan permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah termasuk penyusunan kebijakan, integrasi SPM pada dokumen perencanaan daerah, monitoring dan evaluasi terpadu, asistensi penyusunan rencana aksi hingga pelaporan SPM.

4. Mendorong pembentukan Tim Penerapan SPM di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga mempermudah koordinasi antara Pusat dan Daerah.
5. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerapan SPM sesuai ketentuan, salah satunya dengan menentukan pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang menunjang penerapan SPM di daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM diantaranya teknis pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah dan Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum memahami peran dan tugas dengan baik.
2. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas dan terdapat daerah yang belum mengintegrasikan indikator SPM dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Kondisi geografis yang mempengaruhi topografi daerah yang beraneka ragam.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Melakukan asistensi dan supervisi penerapan 6 (enam) bidang SPM di daerah dengan cara sosialisasi lampiran format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
2. Melakukan sosialisasi penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah kepada Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Melakukan rapat koordinasi Sekretariat Bersama SPM Tingkat Pusat dalam rangka merumuskan kebijakan dan membahas permasalahan serta menyusun solusi alternatif pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
4. Pemberian penghargaan SPM *Awards* kepada Daerah yang melaksanakan penerapan SPM terbaik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja penerapan SPM di daerah.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja yang memerlukan sumber daya aparatur yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk mendukung pelaksaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran, setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembanguan Daerah tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

$$IP_{Pendidikan\ Kota\ Yogya} = \frac{\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Kota\ Yogya}}{Jumlah\ Indikator\ Kinerja/Layanan}$$

$$\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Kota\ Yogya} = IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini} + \dots + IP_{Layanan\ Pendidikan\ Kesehatan}$$

$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ Kota\ Yogya}$
$= (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Mutu\ Minimal\ Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ x\ BM)$
$+ (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Penerima\ Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ x\ BP)$

$$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ Kota\ Yogya} = \left(\frac{100}{100}\ x\ 20\right) + \left(\frac{100}{100}\ x\ 80\right) = 100$$

$$IP_{Pendidikan\ Kota\ Yogya} = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

$$IP_{Pendidikan\ Kab\ Lebak} = \frac{\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Kab\ Lebak}}{Jumlah\ Indikator\ Kinerja/Layanan}$$

$$\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Kab\ Lebak} = IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini} + \dots + IP_{Layanan\ Pendidikan\ Kesehatan}$$

$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ Kab\ Lebak}$
$= (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Mutu\ Minimal\ Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ x\ BM)$
$+ (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Penerima\ Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ x\ BP)$

$$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ Kota\ Yogya} = \left(\frac{28{,}14}{100}\ x\ 20\right) + \left(\frac{81{,}46}{100}\ x\ 80\right) = 70{,}80$$

$$IP_{Pendidikan\ Kab\ Lebak} = \frac{70{,}80 + 89{,}74 + 79{,}88}{3} = 80{,}14$$

$$IP_{Pendidikan\ ProvYogya} = \frac{\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Prov\ Yogya}}{Jumlah\ Indikator\ Kinerja/Layanan}$$

$$\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Prov\ Yogya} = IP_{Layanan\ Pendidikan\ Menengah} + IP_{Layanan\ Pendidikan\ Khusus}$$

$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ Prov\ Yogya}$
$= (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Mutu\ Minimal\ Layanan\ Pendidikan\ Menengah\ x\ BM)$
$+ (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Penerima\ Layanan\ Pendidikan\ Khusus\ x\ BP)$

$$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Menengah\ Prov\ Yogya} = \left(\frac{97{,}78}{100}\ x\ 20\right) + \left(\frac{99{,}28}{100}\ x\ 80\right) = 98{,}98$$

$$IP_{Pendidikan\ Prov\ Yogya} = \frac{98{,}98 + 98{,}47}{3} = 98{,}72$$

$$\sum IP_{Indikator\ Kinerja/Layanan\ Pendidikan\ Prov\ Banten} = IP_{Layanan\ Pendidikan\ Menengah} + IP_{Layanan\ Pendidikan\ Khusus}$$

$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Dasar\ Usia\ Dini\ Prov\ Banten}$
$= (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Mutu\ Minimal\ Layanan\ Pendidikan\ Menengah\ x\ BM)$
$+ (\%\ Indeks\ Pencapaian\ Penerima\ Layanan\ Pendidikan\ Khusus\ x\ BP)$

$$IP_{Layanan\ Pendidikan\ Menengah\ Prov\ Banten} = \left(\frac{84{,}37}{100}\ x\ 20\right) + \left(\frac{98{,}93}{100}\ x\ 80\right) = 96{,}02$$

$$IP_{Pendidikan\ Prov\ Banten} = \frac{96{,}02 + 98{,}88}{2} = 97{,}45$$

$$IP_{Pendidikan\ Seluruh\ Kabupaten/Kota} = \frac{\sum IP_{Pendidikan\ 514\ Kabupaten/Kota}}{514}$$

$$IP_{Pendidikan\ Seluruh\ Kabupaten/Kota} = \frac{IP_{Pendidikan\ Kota\ Yogya} + \cdots + IP_{Pendidikan\ Kab\ Lebak}}{514} = \frac{100 + \cdots + 80{,}14}{514} = 81.53$$

$$IP_{Pendidikan\ Seluruh\ Provinsi\ Nasional} = \frac{\sum IP_{Pendidikan\ 38\ Provinsi}}{38}$$

$$IP_{Pendidikan\ Seluruh\ Provinsi\ Nasional} = \frac{IP_{Pendidikan\ Prov\ Yogya} + \cdots + IP_{Pendidikan\ Prov\ Banten}}{38} = \frac{98{,}72 + \cdots + 97{,}45}{38} = 79{,}56$$

$$IP_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{IP_{Pendidikan\ Seluruh\ Kabupaten/Kota} + IP_{Pendidikan\ Seluruh\ Provinsi}}{2}$$

$$IP_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{81{,}53 + 79{,}56}{2} = 80{,}55$$

$$IP_{SPM\ Nasional\ Semua\ Bidang} = \frac{\sum SPM\ Bidang\ Nasional}{6} = \frac{80{,}55 + 84 + 83{,}45 + 81{,}38 + 85{,}47 + 83{,}14}{6} = 83{,}23$$

Grafik 3,12
Trend Capaian Standar Pelayanan Minimal se-Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023

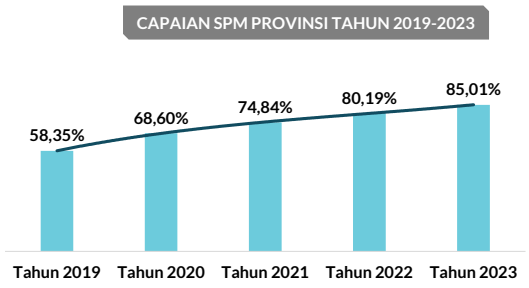

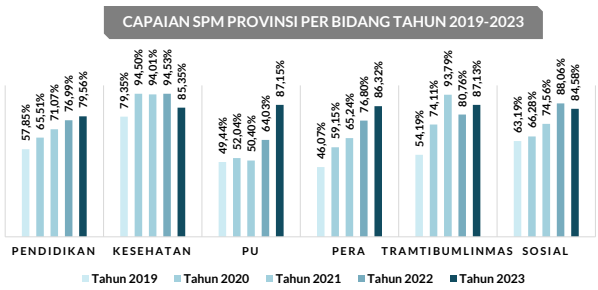

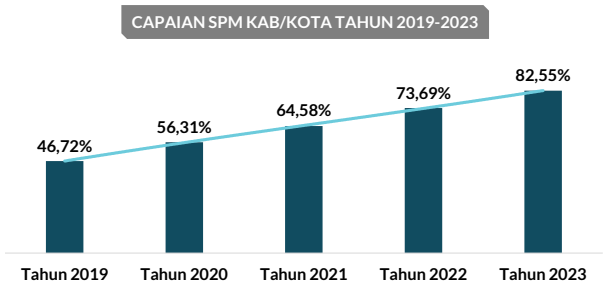

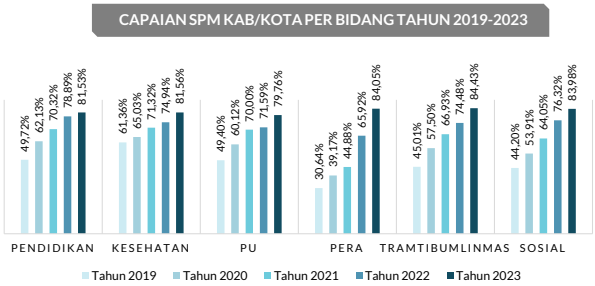

Grafik 3.13
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Provinsi Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA

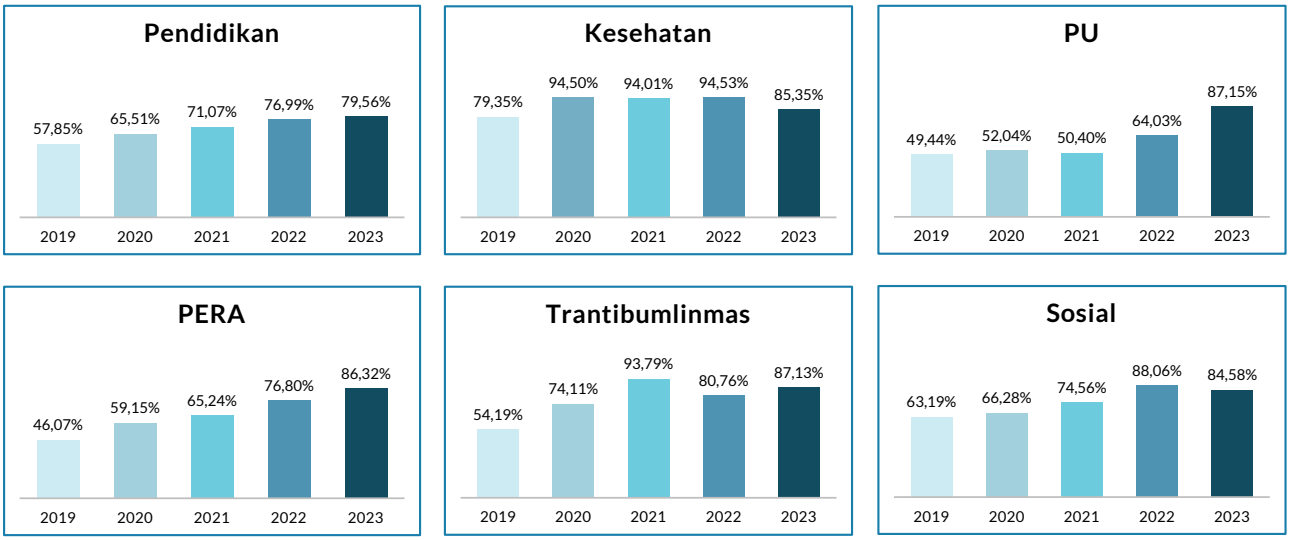

Grafik 3.14
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA

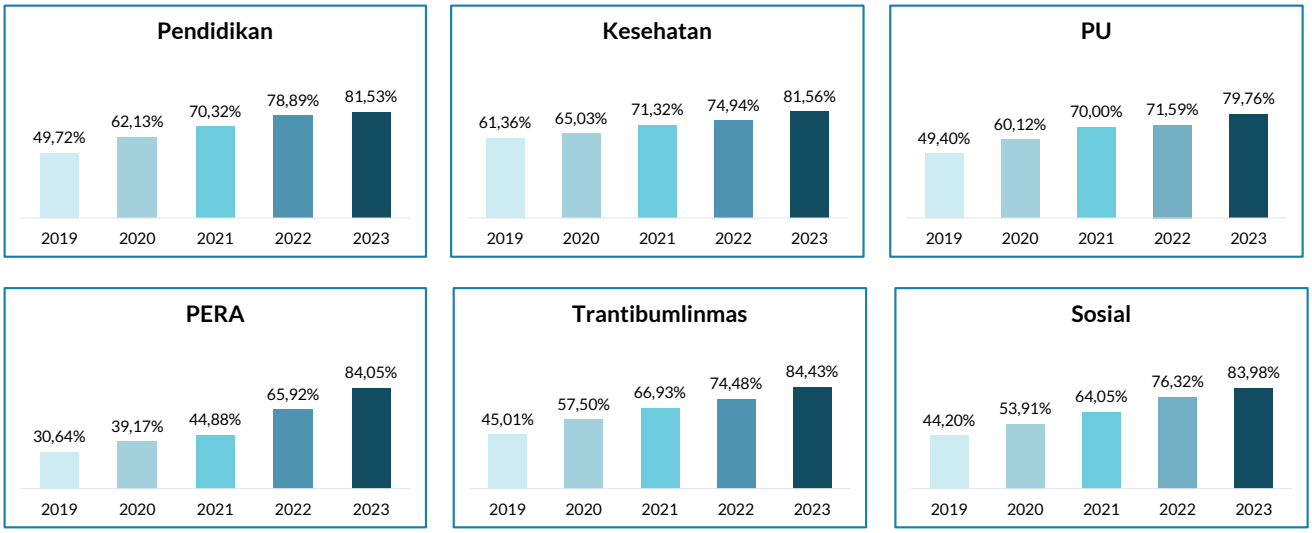

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu adanya proses sinkronisasi, yang dalam hal ini terfokus kepada sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan yang selaras termasuk dalam proses penyusunan rencana kerja serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan di daerah yang berkaitan dengan urusan dimaksud.

Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur melalui tiga aspek dengan rincian sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) dinilai berdasarkan penerbitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)/Peraturan Kepala Daerah/lainnya terkait urusan di daerah. Adapun urusan dimaksud adalah:
   a. Urusan Pendidikan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Manajemen Pendidikan.
   b. Urusan Kesehatan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
   c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Air Minum dan sub urusan Penataan Ruang.
   d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perumahan.
   e. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Bencana.
   f. Urusan Sosial (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Rehabilitasi Sosial.
   g. Urusan Tenaga Kerja (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Hubungan Industrial.
   h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (6 sub urusan), penilaian

dilakukan pada sub urusan Pemenuhan Hak Anak.

i. Urusan Pangan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
j. Urusan Pertanahan (9 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
k. Urusan Lingkungan Hidup (11 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Persampahan.
l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penataan Desa.
n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengendalian Penduduk.
o. Urusan Perhubungan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
p. Urusan Komunikasi dan Informatika (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Aplikasi Informatika.
q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (8 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
r. Urusan Penanaman Modal (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kepemudaan.
t. Urusan Statistik (2 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Statistik Sektoral.
u. Urusan Persandian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
v. Urusan Kebudayaan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kebudayaan.
w. Urusan Perpustakaan (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pembinaan Perpustakaan.
x. Urusan Kearsipan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Arsip.
y. Urusan Kelautan dan Perikanan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
z. Urusan Pariwisata (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Destinasi Pariwisata.
aa. Urusan Pertanian (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Prasarana Pertanian.
ab. Urusan Kehutanan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.
ac. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Energi Baru Terbarukan.
ad. Urusan Perdagangan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perlindungan Konsumen.
ae. Urusan Perindustrian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
af. Urusan Transmigrasi (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan) dinilai dari ketersediaan program dan anggaran pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
3. Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target) diukur melalui tagging kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)/pelaksanaan kebijakan yang di tuangkan pada program dan kegiatan di daerah/ketersediaan regulasi.

NSPK merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga merupakan pedoman bagi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyusun indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mensinkronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di daerah.

Adapun Grafik Persandingan Nilai Indeks Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Grafik 3.15
Persandingan Nilai Indeks Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan 2023
SE INDONESIA

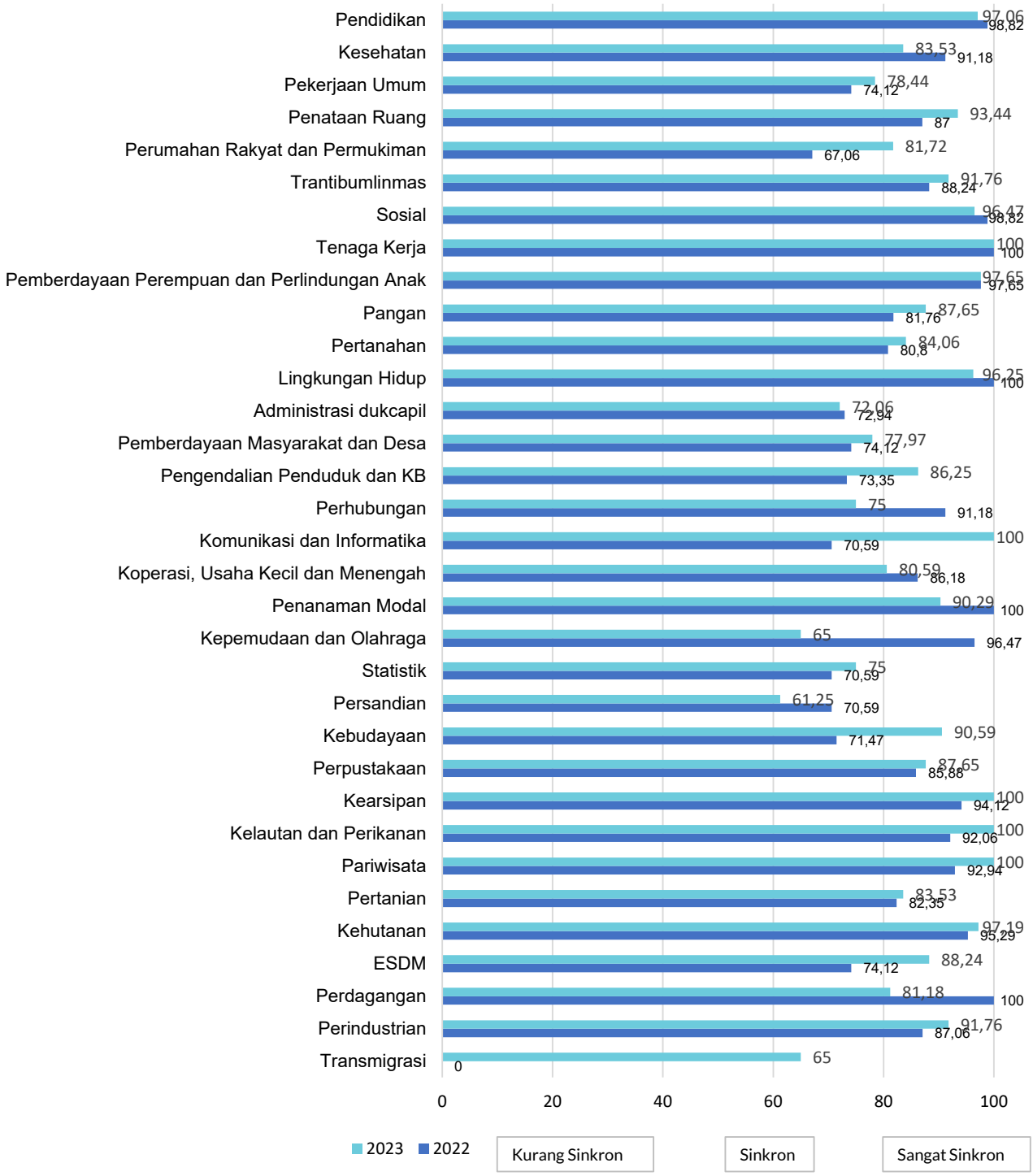

Capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 adalah sebesar 86,56 (delapan puluh enam koma lima puluh enam). Capaian sebesar 86,56 ini telah melampaui target RPJMN sebesar 60%, dan mengalami kenaikan sebesar 0,72 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah secara umum masih berjalan dengan baik.

Grafik 3.16
Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah SE INDONESIA

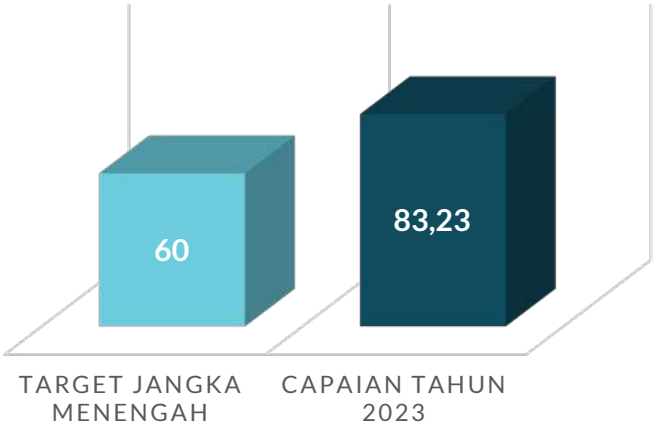

Penghitungan capaian Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

IS = (Kebijakan x BK) + (Implementasi Kebijakan x BIK) + (Kinerja Kebijakan x BKK)

Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan, capaian implementasi kebijakan dan nilai capaian implementasi kebijakan.
- Nilai capaian kebijakan (Kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui ketersediaan kebijakan di daerah yakni dengan bobot 40.
- Nilai capaian implementasi (Implementasi Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan yakni dengan bobot 30.
- Nilai capaian kinerja kebijakan (Kinerja Kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan bobot 30.
- Jumlah ketersediaan kebijakan adalah tersedianya kebijakan yang dihasilkan per urusan dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- Ketersediaan Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Daerah adalah tersedianya program dan kegiatan yang dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.
- Capaian Kinerja dan Anggaran adalah tercapainya kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokrenda dalam mendukung sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:

- Jika nilai indeks <50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron".
- jika nilai indeks ≥50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan <80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron".
- jika nilai indeks ≥80 (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".

Tabel 3.55
Pengkategorian Nilai Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kategori	Skala
Sangat Sinkron	80 – 100
Sinkron	50 – 79
Kurang Sinkron	<50

IS = (Kebijakan x BK) + (Implementasi Kebijakan x BIK) + (Kinerja Kebijakan x BKK)

Contoh penilaian urusan Pendidikan sub urusan Manajemen Pendidikan dengan tema Pembentukan TP UKSM Daerah Provinsi,
Kebijakan = dimana terdapat 1 regulasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi terkait Pembentukan TP UKSM, maka target dari penyebut kebijakan adalah 1, sedangkan pembilang diisi atas realisasi turunan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 1 jika sudah ada regulasi dan 0 jika belum menerbitkan kebijakan

Implementasi Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan harus ada program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda terkait Pembentukan TP UKSM, penyebut diisi dengan ada atau tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0)

Kinerja Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda terkait Pembentukan TP UKSM harus dilrealisasikan baik dari segi anggaran dan kinerja, penyebut diisi dengan telah direalisasikan/tidaknya tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0)

$$IS_{Pendidikan\ DKI\ Jakarta} = (\tfrac{1}{1} \times 40) + (\tfrac{1}{1} \times 30) + (\tfrac{1}{1} \times 30) = 100$$

$$IS_{Pendidikan\ \ldots} = (\tfrac{\cdots}{\cdots} \times 40) + (\tfrac{\cdots}{\cdots} \times 30) + (\tfrac{\cdots}{\cdots} \times 30) = \ldots$$

$$IS_{Pendidikan\ Kalimantan\ Utara} = (\tfrac{0}{1} \times 40) + (\tfrac{0}{1} \times 30) + (\tfrac{0}{1} \times 30) = 0$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pendidikan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{100+100+100+\cdots+0}{34} = 97{,}06$$

Contoh penilaian urusan Pangan sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan tema Pengelolaan Cadangan Pangan

$$IS_{Pangan\ DKI\ Jakarta} = (\tfrac{1}{1} \times 40) + (\tfrac{1}{1} \times 30) + (\tfrac{1}{1} \times 30) = 100$$

$$IS_{Pangan\ \ldots} = (\tfrac{\cdots}{\cdots} \times 40) + (\tfrac{\cdots}{\cdots} \times 30) + (\tfrac{\cdots}{\cdots} \times 30) = \ldots$$

$$IS_{Pangan\ Riau} = (\tfrac{1}{1} \times 40) + (\tfrac{0}{1} \times 30) + (\tfrac{0}{1} \times 30) = 40$$

artinya Riau telah menerbitkan aturan terkait Pengelolaan Cadangan Pangan namun tidak ada program dan kegiatan yang berkenaan dengan Pengelolaan Cadangan Pangan pada provinsi Riau beserta realisasinya

$$IS_{Pangan\ NTT} = (\tfrac{0}{1} \times 40) + (\tfrac{1}{1} \times 30) + (\tfrac{1}{1} \times 30) = 60$$

artinya NTT belum menerbitkan aturan terkait Pengelolaan Cadangan Pangan namun sudah ada program dan kegiatan yang berkenaan dengan Pengelolaan Cadangan Pangan pada provinsi Riau dan telah direalisasikan

$$IS_{Pangan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pangan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{Pangan\ Nasional} = \frac{100+100+40+60+\cdots+0}{34} = 87{,}67$$

Dengan demikian IS seluruh urusan dinilai dari

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{32\ Urusan\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{IS_{\ Pendidikan\ Nasional} + IS_{\ Kesehatan\ Nasional} + \cdots + IS_{\ Transmigrasi\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{\begin{array}{c}97{,}06+83{,}53+78{,}44+93{,}44+81{,}72+91{,}76+96{,}47+100+97{,}65+\\ 87{,}65+84{,}06+96{,}25+72{,}06+77{,}97+86{,}25+75+100+80{,}59+\\ 90{,}29+65+75+61{,}25+90{,}59+87{,}65+100+100+100+83{,}53+97{,}19+\\ 88{,}24+81{,}18+91{,}76+65\end{array}}{32} = 86{,}56$$

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Melakukan koordinasi dan mendorong Kementerian/Lembaga teknis untuk mensosialisasikan NSPK yang diterbitkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
3. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke seluruh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pelaksanaan asistensi dan supervisi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum adanya indikator dalam menentukan sub urusan yang harus diukur untuk dilakukan penilaian.
2. Terdapat Pemerintah Daerah yang belum menindaklanjuti NSPK serta belum memahami bagaimana cara implementasi kebijakan tersebut dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan yang dilakukan Daerah.
3. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga daerah tidak menganggarkan kegiatan dan mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan nasional dan daerah.
4. Terdapat Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif yang kurang berkomitmen dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah yang telah disusun selaras dengan Kebijakan Pusat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Melakukan pembinaan melalui asistensi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bersama Kementerian/Lembaga.
2. Melakukan asistensi dan supervisi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang melibatkan Kementerian teknis dan Pemerintah Daerah.
4. Mendukung pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) melalui pengawalan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi prioritas nasional untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Menerbitkan kebijakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sebagai acuan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja yang memerlukan sumber daya aparatur yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk mendukung pelaksaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran, setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembanguan Daerah tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengaturan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Dalam mencapai tujuan pengaturan desa tersebut sejalan dengan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 sesuai Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif.
2. Penetapan batas desa.
3. Peningkatan pelayanan dasar desa.
4. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa.
5. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.265 desa di 37 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.15
Peta sebaran desa di Indonesia

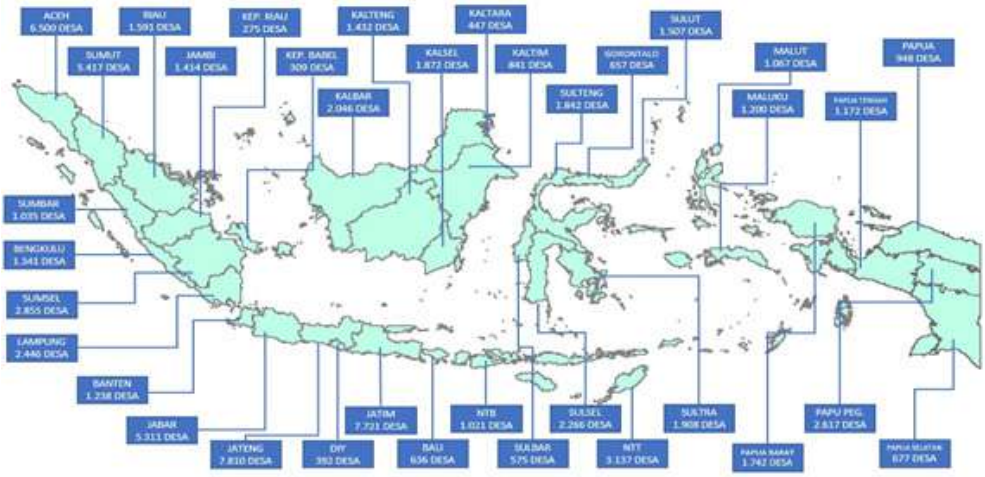

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan perbaikan dengan merubah target Indeks Penyelenggaran Pemerintahan Desa Dengan Kategori Nilai "Baik" yang semula 60% menjadi 2,5% yang disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) dengan diterbitkannya surat Bappenas Nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujuan Atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 2,5 % pada Tahun 2023 yang dicapai melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi serta penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" pengukurannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan. Desa yang mendapatkan kategori nilai "Baik" merupakan desa yang berada pada status desa swasembada.

Profil desa dan kelurahan merupakan salah satu kebijakan pendataan desa dan Kelurahan tertua di Indonesia, dimana kebijakan tersebut telah ada sejak Tahun 1996 yang pada saat itu diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa dan Kelurahan. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.317/PMD tentang Sistem Pendataan Profil Desa dan Kelurahan, hingga pada akhirnya kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Pada Tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri melakukan improvisasi pada pelaksanaan pengelolaan profil desa/kelurahan (Prodeskel) dengan mengembangan Sistem Informasi Prodeskel secara online, dengan visi yaitu tersusunnya pusat data desa/kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem Informasi Prodeskel merupakan sebuah perangkat lunak (*software*) berbasis *website* yang berfungsi sebagai gudang data (*data warehouse*) desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Pengguna (*user*) pada Sistem Informasi Prodeskel meliputi pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Untuk *user* tingkat provinsi sampai dengan kecamatan hanya dapat melihat (*read only*) serta melakukan pengawasan terdahap isian data. Namun khusus *user* tingkat desa/kelurahan memiliki *privilege* untuk melakukan penginputan, menghapus (*delete*), merubah (*edit*) dan lain sebagainya. Terdapat beberapa keunggulan dari Sistem Informasi Prodeskel, yakni menjadi satu-satunya sistem informasi yang menjangkau data dan informasi pada tingkat desa sekaligus kelurahan dan proses pengisian serta updating data dilakukan oleh perangkat desa dan kelurahan serta aparat pemerintahan daerah yang tentunya melekat tanggung jawab terhadap validitas data yang diinput sekaligus mampu mendorong efisiensi dari aspek pembiayaan akibat pelibatan pihak ketiga. Adapun updating terhadap data dan informasi dapat diakses pada https://e-database.kemendagri.go.id/

Indikator yang digunakan untuk mengukur Klasifikasi Desa adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencaharian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, dan Pemilik Aset Ekonomi Lainnya.
2. Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun, Rasio Guru dan Murid, dan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat.
3. Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan Keluarga Berencana (KB), Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, serta Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat.
4. Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, dan Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta.
5. Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) Desa/Kelurahan, Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, dan Etos Kerja Penduduk.
7. Lembaga Kemasyarakatan meliputi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Adat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes), dan Organisasi Keagamaan.
8. Kinerja Pemerintahan desa/kelurahan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta Prasarana dan Sarana Dusun / Lingkungan.
9. Pembinaan dan Pengawasan meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, serta Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan.

Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 dengan kategori sebagai berikut:

1. Nilai total skor ≥ 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada.
2. Nilai total skor 60% - 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya.
3. Nilai total skor ≤ 60% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya.

Adapun formula perhitungan untuk indeks penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" adalah:

$$\sum = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Jumlah Desa di Indonesia}} \times 100\%$$

Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan. Berdasarkan data Tahun 2023, jumlah desa swakarya lanjut sebanyak 4.232 desa dan desa swasembada sebanyak 4.971 desa, sehingga capaian indeks penyelenggaran pemerintahan desa dengan kategori nilai "baik" diperoleh nilai sebagai berikut :

$$\sum = \frac{4.232 + 4.971}{75.265} \times 100\% = 12{,}23\%$$

Indeks Penyelenggaran Pemerintahan Desa Dengan Kategori Nilai "Baik" pada Tahun 2023 dari target 2.5% diperoleh realisasi kinerja sebesar 12.23% atau terdapat sebanyak 9.203 desa yang telah meningkat profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Capaian IKU pada Tahun 2023 melampaui capaian pada tahun-tahun sebelumnya, namun capaian ini tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun 2020 – 2022 karena adanya perbedaan cara perhitungan dalam mencapai IKU pada Tahun 2023. Adapun grafik target dan realisasi capaian IKU Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" Tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 3.17
Target dan realisasi capaian IKU Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" Tahun 2020 – 2023

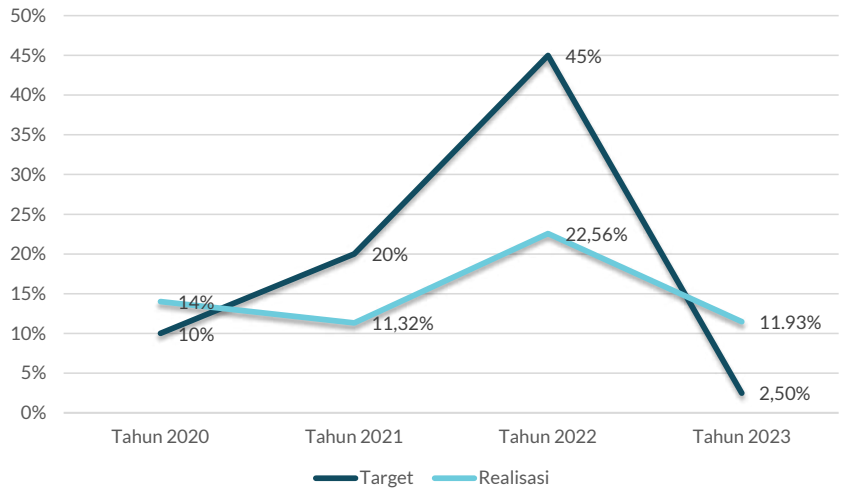

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
   Program P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa. P3PD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas Pembangunan desa di lokasi program melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparatur desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan, penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, menguji cobakan mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah desa berdasarkan matrik kinerja utama dari tata kelola yang baik, serta penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Target pelaksanaan P3PD Tahun 2023 adalah sebanyak 141.623 orang. Realisasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanakanya 124.354 aparatur dan pengurus kelembagaan desa di 32.100 desa, 140 kab/kota, dan 33 provinsi dengan rincian pelaksanaan pelatihan sebagai berikut :
   a. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan Tahun 2023 dengan target 131.610 orang dan realisasi sebanyak 122.300 orang.

b. *Refreshment* Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dan Sertifikasi Pelatih Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Tahun 2023 dengan target 320 orang.
c. Refreshment pelatih PKAD dan Sertifikasi Pelatih Aparatur Pemerintahan Desa dengan target 90 orang dan realisasi sebanyak 73 orang.
d. Pelatihan pengawasan keuangan desa bagi aparatur daerah dengan target 3.104 orang.
e. Penguatan kapasitas kelembagaan desa-PKK dengan target 3.409 orang.
f. *Training of Trainer* (ToT) Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dengan target 1.200 dan diikuti oleh 1.191 orang peserta.
g. ToT pelatihan aparatur desa dalam penetapan dan penegasan batas desa dalam rangka penataan kewenangan desa dan meningkatkan pendapatan asli desa untuk kualitas belanja desa dengan target 676 orang.
h. ToT pelatihan penguatan Posyandu dengan target 130 orang.
i. ToT pelatihan penguatan LKD/LAD dengan target 146 orang.
j. ToT pelatihan penguatan kerja sama desa dengan target 130 orang dan realisasi adalah 128 orang.
k. ToT pelatihan penguatan PKK dengan target 146 orang.
l. ToT penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa dengan target 391 orang dengan realisasi 364 orang.
m. ToT Badan Permusyawaratan Desa dengan target 140 orang dan realisasi adalah 230 orang.
n. *Training of Master Trainer* (TMoT) penerapan aplikasi pengelolana keuangan desa dengan target 50 orang.
o. TMoT pelatihan penguatan badan permusyaratan desa dan kerja sama desa dengan target 36 orang.
p. TMoT pelatihan penguatan kelembagaan, PKK dan Posyandu dengan target 45 orang dan realisasi adalah 50 orang.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P3PD adalah minimnya pendataan terhadap pelaksanaan pelatihan. Sekretariat P3PD harus melakukan pendataan terhadap seluruh pelatihan yang telah dilaksanakan sehingga hal ini akan memudahkan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, perlu segera menyusun instrument evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan. *Learning Management System* (LMS) menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan pelatihan kedepannya.

2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor Desa.

Rehabilitasi kantor desa adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa kepada desa-desa yang terkena dampak bencana yang kondisinya rusak atau desa yang berada di wilayah perbatasan yang diatur dalam petunjuk teknis. Tujuan dari Rehabilitasi kantor desa ini adalah untuk mewujudkan bangunan kantor desa yang layak khususnya desa yang terkena dampak bencana alam, desa dengan kondisi kantor desa yang rusak dan tidak layak, desa yang masuk kategori desa tertinggal, terpencil, terluar dan berada diwilayah perbatasan sehingga diharapkan terjadi perbaikan proses pelayanan kepada Masyarakat. Target rehabilitasi kantor desa Tahun 2023 adalah sebanyak 10 desa yang berada di wilayah perbatasan RI. 10 desa tersebut terealisasi di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 10 desa dimaksud adalah Desa Mengkait,

Teluk Siantan, Teluk Sunting, Air Putih, Payamaram, Langir, Piabung, Payalaman, Rewak dan Karamut. Desa yang direhabilitasi adalah desa. Namun dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kantor desa terdapat beberapa kendala, antara lain akses transportasi sulit dijangkau, lokasi desa penerima bantuan rehabiliitasi kantor desa merupakan Kawasan kepulauan, pembelian material harus dilakukan di ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada jauh dari desa sehingga memerlukan biaya yang tinggi, waktiu pelaksanaan rehabilitasi bertepatan dengan musim hujan sehingga menghambat proses pembangunan.

3. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada tahun 2023 dari target 1.000 desa yang melaksanakan pilkades serentak, terealisasi sebanyak 1.700 desa. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkades serentak adalah belum seluruh kabupaten/kota memahami regulasi dan kebijakan terkait dengan pemilihan kepala desa serta belum optimalnya proses pendataan administrasi data dan informasi kepala desa dan perangkat desa.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKK yang bertujuan untuk pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program Pokok PKK dan terwujudnya hubungan yang harmonis antar ketua Tim Penggerak (TP) PKK di setiap jenjang pemerintahan. Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Rakornas adalah persamaan persepsi terkait kebijakan pemerintah melalui Gerakan PKK secara nasional baik oleh TP. PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dihadiri oleh 1.000 orang peserta yang berasal dari TP. PKK pusat dan daerah di 32 provinsi dan 398 kab/kota.
5. Kegiatan penataan kelembagaan Posyandu.
   Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah melaksanakan rapat lintas Kementerian/Lembaga (K/L), penyampaian Surat Edaran Mendagri Nomor 224/141/SJ tanggal 8 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa/Kelurahan dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.4.4.2/7213/BPD tanggal 13 November 2023 hal Permohonan Permintaan Data Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau Lurah tentang Pengurus Posyandu. Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 2.500 lembaga Posyandu di 24 provinsi yang telah memiliki SK Kepala Desa/Lurah dari target sebanyak 2.500 lembaga posyandu (capaian 100%). SK ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun untuk selanjutnya akan dilakukan pembaharuan SK.
6. Telah dilaksanakan evaluasi perkembangan desa sebanyak 2.000 desa. Hal ini merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan keluarga guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa. Pada tahun 2023.

7. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. Sampai dengan Tahun 2023 telah terdapat 65.769 desa dari total 75.625 desa yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan terdapat 46.404 desa di 245 kabupaten yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes.
8. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) oleh Pemerintah Daerah dan desa adalah menertibkan kepemilikan desa sesuai peraturan yang berlaku, pengelolaan aset dari hulu ke hilir dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi, membantu pengelolaan aset desa dalam pengkodean aset desa dan memudahkan dalam menyusun dan menyampaikan laporan aset desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. Sampai dengan Tahun 2023 telah terdapat 42.945 desa (57,29%) di 274 kabupaten/kota yang telah mendapatkan akses Sipades.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, diantaranya:

1. Melakukan kerja sama dengan *World Bank* dan *stakeholder* lain untuk mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik melalui program P3PD.
2. Mendorong tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel melalui pemanfaatan Siskeudes secara *online*, Sipades dan konsolidasi keuangan desa.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pilkades serentak.
4. Percepatan fasilitasi penetapan batas desa sebagai bagian dari capaian prioritas melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terkait penetapan dan penegasan batas desa di daerah, pengembangan sistem informasi tata wilayah desa dan asistensi monitoring terkait percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa.
5. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa khususnya fasilitasi peningkatan kualitas Sipades, melalui *updating* fitur sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, membangun aplikasi konsolidasi aset desa untuk mendukung penyusunan *database* aset desa di tingkat nasional sebagai bagian dari upaya penyusunan program dan kebijakan berbasis dara yang handal, dan melakukan interoperabilitas antara Sipades dan Siskeudes sehingga belanja aset desa dalam Sikeudes secara otomatis akan tercatat dalam Sipades.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah dan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. penyerapan anggaran;
5. kondisi keuangan daerah; dan
6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diamanatkan untuk melakukan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2020 diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah dan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas), yang mencakup kesesuaian nomenklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), kesesuaian nomenklatur program RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh), yang mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer, dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas), yang mencakup ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan, serta keteraksesan dokumen (mudah diakses dan diunduh melalui SIPD.
4. Penyerapan anggaran APBD (Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) dengan bobot 20 (dua puluh).
5. Kondisi keuangan daerah yang meliputi antara lain kemandirian keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas).
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut dengan bobot 15 (lima belas).

Dari pembobotan di atas dikelompokkan menjadi:
1. Peringkat baik dengan nilai A, yaitu Nilai IPKD lebih besar dari nilai MEAN + (1 x standar deviasi).
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, yaitu Nilai IPKD berada diantara nilai MEAN – (1 x standar deviasi) dan MEAN + (1 x standar deviasi).
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, yaitu Nilai IPKD kurang dari MEAN – (1 x standar deviasi).

Hasil pengukuran pada Tahun n didapatkan nilai untuk masing-masing daerah. kemudian nilai-nilai tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan ukuran indikator "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah".

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan pengukuran IPKD tingkat provinsi, sedangkan pengukuran IPKD tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam laporan ini lebih banyak menyajikan data IPKD nasional dan tingkat provinsi.

Dari hasil perhitungan IPKD tahun 2023 yang dilakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Rata-rata IPKD Provinsi dari 32 Provinsi yang terindentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,69.
2. Rata-rata IPKD Kabupaten dari 366 Kabupaten yang terindentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 68,81.
3. Rata-rata IPKD Kota dari 87 Kota yang terindentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 69,09.

Dari hasil perhitungan tersebut maka rata-rata IPKD secara nasional dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$Rata - rata\ IPKD = \frac{\sum (\text{IPKD Provinsi} + \text{IPKD Kabupaten} + \text{IPKD Kota})}{\sum (Provinsi + Kabupaten + Kota)}$$

$$Rata - rata\ IPKD = \frac{(2.358{,}12 + 25.183{,}28 + 6.010{,}79)}{\sum\ (32 + 366 + 87)}$$

$$Rata - rata\ IPKD = \frac{33.552{,}19}{485}$$

$$Rata - rata\ IPKD = \mathbf{69{,}18}$$

Berdasarkan data perhitungan yang dilakukan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri yang mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan melalui aplikasi Pengukuran IPKD, sebagai berikut:
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

Tabel 3.56
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

No.	Daerah	Jumlah Daerah (yang menginput)	Rata-rata	Total Nilai
1.	Provinsi	32	73,69	2.358,12
2.	Kabupaten	366	68,81	25.183,28
3.	Kota	87	69,09	6.010,79
4.	Nasional	485	69,18	33.552,19

Sumber data pengukuran berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 diperoleh dari:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.
3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD.
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Tabel 3.57
Matrik Persandingan IPKD Tahun 2019 s.d 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi	49,75	54,68	58,79	64,65	73,69
Kabupaten	46,89	49,41	53,18	63,85	68,81
Kota	44,55	49,16	54,97	64,37	69,09
Nasional	**46,75**	**49,95**	**54,12**	**64,01**	**69,18**

Grafik 3.18
Perkembangan IPKD tahun 2019 s.d 2023

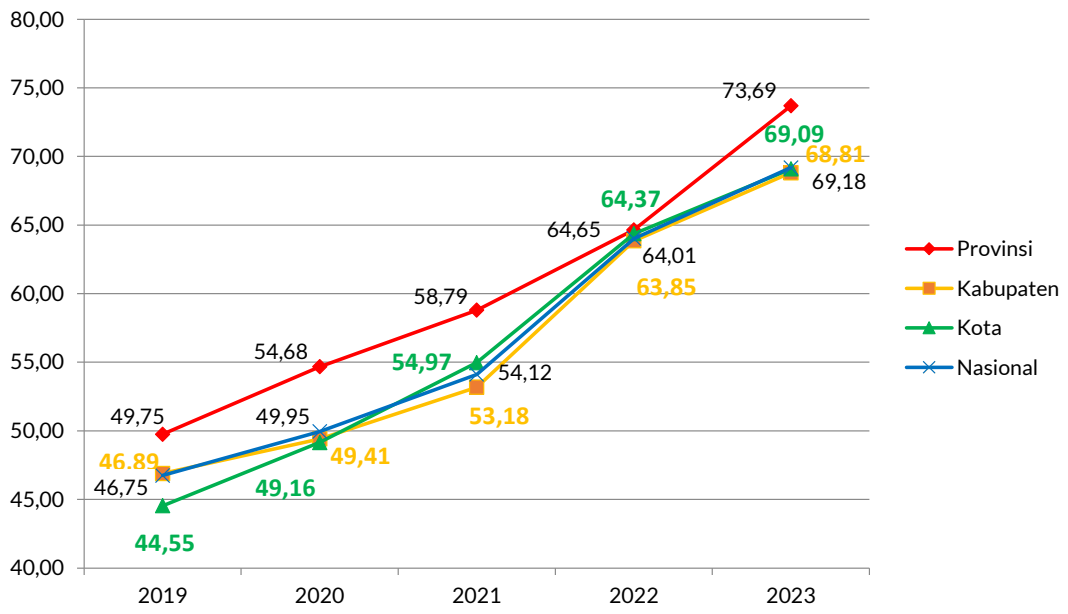

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Berdasarkan matrik dan grafik perkembangan IPKD tahun 2019 hingga 2023, maka dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun IPKD baik secara Nasional maupun Tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah berhasil.

Tabel 3.58
Grafik Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD

	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi	28	28	28	31	32
Kabupaten	179	176	184	274	366
Kota	50	49	49	72	87
Nasional	**257**	**253**	**261**	**377**	**485**

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Grafik 3.19
Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD

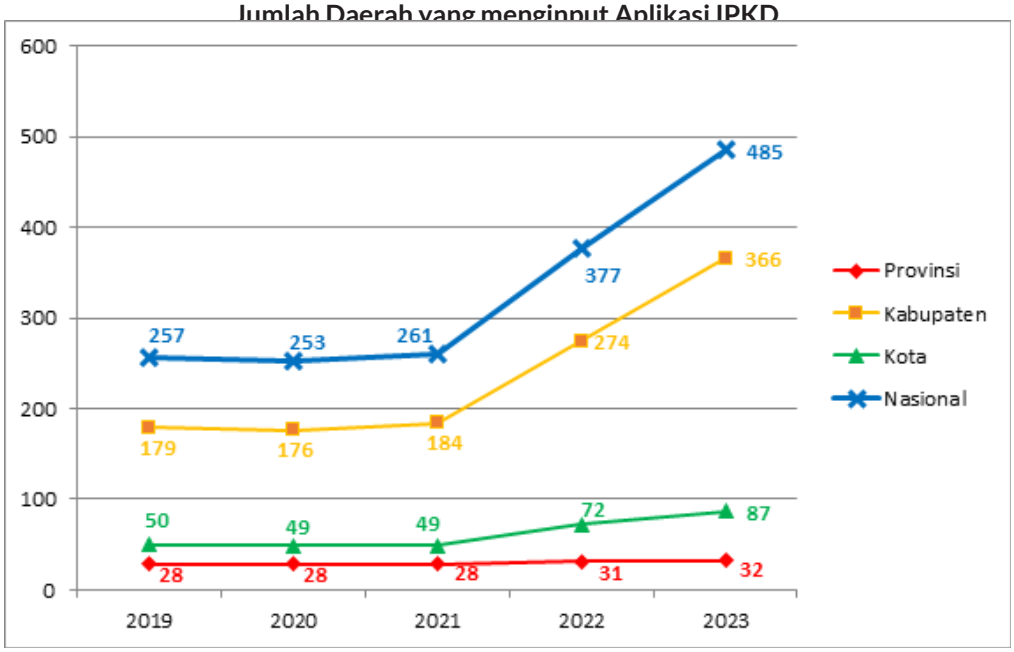

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Berdasarkan tabel dan grafik jumlah daerah yang menginput Aplikasi IPKD, terlihat bahwa jumlah daerah yang menginput aplikasi IPKD meningkat walaupun sempat terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019, yang diakibatkan oleh kurang patuhnya daerah dalam menginput aplikasi IPKD, serta adanya kesibukan daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2019.

Adapun rincian nilai IPKD masing-masing daerah berdasarkan dimensi, sebagai berikut:

Tabel 3.59
rincian nilai IPKD masing-masing daerah provinsi berdasarkan dimensi

No.	Provinsi	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	D.I.YOGYAKARTA	13,08	19,29	13,97	15,00	11,00	15,00	87,33
2	KALIMANTAN BARAT	14,08	20,00	15,00	15,00	7,52	15,00	86,60
3	JAWA TIMUR	13,02	19,64	13,97	15,00	9,56	15,00	86,20
4	LAMPUNG	12,11	20,00	14,48	15,00	7,09	15,00	83,69
5	BALI	13,53	20,00	15,00	15,00	4,45	15,00	82,98
6	JAWA BARAT	12,48	20,00	14,48	15,00	3,92	15,00	80,88
7	KEPULAUAN RIAU	9,49	20,00	13,71	15,00	5,84	15,00	79,04
8	JAMBI	9,32	18,57	13,45	15,00	6,82	15,00	78,16
9	JAWA TENGAH	10,70	20,00	7,24	15,00	9,31	15,00	77,25
10	BANTEN	9,81	20,00	13,71	15,00	3,50	15,00	77,01
11	SULAWESI BARAT	9,03	19,64	11,12	20,00	1,84	15,00	76,63
12	SUMATERA BARAT	9,41	19,64	12,16	15,00	4,92	15,00	76,13
13	SULAWESI SELATAN	11,56	20,00	15,00	15,00	4,34	10,01	75,91
14	BENGKULU	13,17	18,93	7,76	15,00	5,78	15,00	75,63
15	KALIMANTAN TIMUR	13,04	19,29	12,16	10,00	6,12	15,00	75,60
16	MALUKU	7,19	19,29	13,19	20,00	0,67	15,00	75,34
17	DKI JAKARTA	9,27	15,00	12,41	15,00	7,54	15,00	74,23
18	SUMATERA SELATAN	3,75	13,93	12,16	20,00	7,51	15,00	72,34
19	RIAU	6,30	20,00	10,60	15,00	5,38	15,00	72,28
20	GORONTALO	10,84	18,93	7,76	15,00	3,68	15,00	71,20
21	SUMATERA UTARA	7,59	20,00	14,74	10,00	3,82	15,00	71,15
22	KEP. BANGKA BELITUNG	7,70	19,64	11,12	10,00	6,92	15,00	70,39
23	SULAWESI UTARA	11,40	18,93	5,69	15,00	3,89	15,00	69,90
24	SULAWESI TENGAH	9,64	15,00	8,79	15,00	5,64	15,00	69,07

No.	Provinsi	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SULAWESI TENGGARA	6,46	18,93	8,02	15,00	5,50	15,00	68,90
26	KALIMANTAN SELATAN	3,00	20,00	10,35	15,00	4,79	15,00	68,14
27	ACEH	11,57	13,93	4,91	15,00	7,60	15,00	68,01
28	KALIMANTAN UTARA	8,36	19,64	7,76	10,00	7,25	15,00	68,01
29	NUSA TENGGARA BARAT	4,53	19,29	9,57	15,00	3,24	15,00	66,63
30	NUSA TENGGARA TIMUR	9,04	17,86	7,24	15,00	1,27	15,00	65,40
31	KALIMANTAN TENGAH	2,43	18,93	1,81	15,00	3,33	15,00	56,49
32	PAPUA	5,12	8,21	6,98	15,00	6,32	10,01	51,64

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Berdasarkan data IPKD Provinsi tersebut dapat diperoleh peringkat berdasarkan rangking dari nilai tertinggi hingga yang terendah yang kemudian dihitung nilai rata-rata/nilai Tengah (MEAN) dari nilai IPKD keseluruhan dan Standar Deviasi/Simpang Bakunya (STDEV).

Dari data tersebut didapat nilai MEAN sebesar 73,69 dan STDEV sebesar 7,89

Pengkatagorian hasil IPKD dilakukan berdasarkan karakteristis distribusi normal, kategori "Baik" bila nilai IPKD daerah tersebut lebih besar dari nilai MEAN+(1xstandar deviasi), kemudian nilai IPKD dikategorikan "Perlu Perbaikan" jika nilai IPKD daerah berada diantara nilai MEAN-(1xstandar deviasi) dan MEAN+(1xstandar deviasi), serta nilai IPKD dikategorikan "Sangat Perlu Perbaikan" bila nilai IPKD kurang dari MEAN-(1xstandar deviasi).

MEAN+(1xstandar deviasi) = 73,69 + (1x7,89) = 81,58
MEAN- (1xstandar deviasi) = 73,69 - (1x7,89) = 65,80

Berdasarkan hasil perhitungan IPKD pada 32 Provinsi tersebut,maka ditentukan kategori penilaian IPKD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.60
Nilai dan Kategori IPKD pada 32 Provinsi

No.	Provinsi	IPKD	KATEGORI
1	D.I.YOGYAKARTA	87,33	Baik
2	KALIMANTAN BARAT	86,60	
3	JAWA TIMUR	86,20	
4	LAMPUNG	83,69	
5	BALI	82,98	
6	JAWA BARAT	80,88	Perlu Perbaikan
7	KEPULAUAN RIAU	79,04	
8	JAMBI	78,16	
9	JAWA TENGAH	77,25	
10	BANTEN	77,01	
11	SULAWESI BARAT	76,63	
12	SUMATERA BARAT	76,13	
13	SULAWESI SELATAN	75,91	
14	BENGKULU	75,63	
15	KALIMANTAN TIMUR	75,60	
16	MALUKU	75,34	
17	DKI JAKARTA	74,23	
18	SUMATERA SELATAN	72,34	
19	RIAU	72,28	
20	GORONTALO	71,20	
21	SUMATERA UTARA	71,15	
22	KEP. BANGKA BELITUNG	70,39	
23	SULAWESI UTARA	69,90	
24	SULAWESI TENGAH	69,07	
25	SULAWESI TENGGARA	68,90	
26	KALIMANTAN SELATAN	68,14	
27	ACEH	68,01	
28	KALIMANTAN UTARA	68,01	
29	NUSA TENGGARA BARAT	66,63	
30	NUSA TENGGARA TIMUR	65,40	Sangat Perlu Perbaikan
31	KALIMANTAN TENGAH	56,49	
32	PAPUA	51,64	

Berdasarkan hasil pengkatagorian pada tabel tersebut, terdapat 5 Provinsi dengan Katagori "Baik", 24 Provinsi dengan Katagori "Perlu Perbaikan", dan 3 Provinsi dengan Katagori "Sangat Perlu Perbaikan".

Hal ini dapat dipetakan bahwa secara keseluruhan masih terdapat Provinsi yang memerlukan perbaikan dan sangat butuh perbaikan sesuai dengan masing-masing Dimensi dalam perhitungan IPKD sebagai berikut:

1. Dimensi 1 adalah Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
2. Dimensi 2 adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD.
3. Dimensi 3 adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Dimensi 4 adalah Penyerapan Anggaran.
5. Dimensi 5 adalah Kondisi Keuangan Daerah.
6. Dimensi 6 adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari Tabel perhitungan Nilai IPKD dapat dilihat kelebihan dan kelemahan pada dimensi tertentu dimasing-masing Provinsi, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat menentukan treatment/tindakan yang harus diambil sebagai langkah pembinaan ke seluruh Provinsi dalam rangka perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah yang akan berdampak pada meningkatnya nilai IPKD.

Pengkatagorian IPKD ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan metode Standar Deviasi bukan dengan metode penetapan secara batasan tetap nilai IPKD daerah, sehingga berapapun nilai IPKD yang dihasilkan akan selalu terdapat daerah yang berkategori perlu perbaikan dan sangat perlu perbaikan.
Namun demikian langkah-langkah Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan bidang pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
2. Digitalisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan keuangan daerah;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
8. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah; dan
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan keuangan daerah.

Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam hal mendorong daerah untuk menginput aplikasi IPKD, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan Teknis penginputan IPKD.
2. Melakukan Pendampingan dan asistensi kepada daerah dalam penginputan IPKD.
3. Menyempurnakan regulasi yang menjadi dasar hukum pengukuran IPKS.

Pengukuran IPKD secara nasional juga menjadi ukuran beberapa indikator kinerja pada sasaran prioritas RPJMN sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya kegiatan Prioritas Nasional, yang meliputi:

1. Provinsi yang mengesahkan APBD tepat Waktu.
2. Daerah Yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending.

3. Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran.
4. Daerah yang memenuhi penganggaran SPM.
5. Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen.
6. Daerah yang mengalami peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
7. Daerah yang melakukan penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
8. Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
10. Daerah yang melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara wajar.

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Adanya kesalahan penetapan target IKU (base line) di dalam dokumen Rencana Strategis yang merujuk pada simulasi yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan 4 (empat) Dimensi dikarenakan belum terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan 6 (enam) Dimensi, sehingga menyebabkan adanya selisih/gap yang signifikan antara target dengan capaian realisasi kinerja.
2. Sebagian Daerah belum menginput aplikasi pengukuran IPKD.
3. Sulit dalam memperoleh Sumber Data yang dibutuhkan dalam pengukuran dimasing-masing Dimensi.
4. Terdapat kesalahan dalam penginputan data dalam aplikasi IPKD.
5. Rendahnya pemahaman SDM aparatur daerah terkait implementasi aplikasi IPKD.

Faktor/permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain disebabkan :

1. Ketidakselarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD.
2. Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar harga satuan untuk mengukur kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai standar Pelayanan Minimal.
3. Ketidakjelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen perencanaan.
4. Kesalahan Penganggaran.
5. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih tender membengkak.
6. Jadwal penganggaran ditaati (baik oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD).
7. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan.
8. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang.
9. Banyaknya revisi/pergerseran anggaran.
10. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan tidak tepat.
11. Kelemahan penguasaan akuntansi double entry.
12. Rekonsiliasi kas daerah dengan kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak teratur.
13. Rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) tidak dilakukan.
14. Pengolahan Data belum berbasis IT.
15. Keterlambatan penyampaian LKPD.

Upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah dan Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
2. Mengusulkan pembentukan jabatan fungsional analis keuangan daerah sebagai jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 821.29/230/SJ tanggal 19 Januari 2022, hal Usulan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah).
3. Peningkatan kualitas belanja daerah melalui Fasilitasi penyusunan APBD, Fasilitasi pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending), dan Fasilitasi pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Fasilitasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, modernisasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah, serta Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi
5. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
7. Fasilitasi pemanfaatan Creative Financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.

8. Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk optimalisasi penyerapan anggaran daerah.

Pada tahun 2023 Ditjen Bina Keuangan Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam pencapaian target sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi, Ranperda perubahan APBD Provinsi, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi.
2. Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.
3. Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah.
4. Pertimbangan/Rekomendasi Pencairan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
5. Penilaian terhadap usulan pendirian BUMD.
6. Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Asistensi tata kelola keuangan daerah antara lain Penerapan system informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya di bidang Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, Penyusunan LKPD, Penerapan transaksi Non Tunai, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi kepada Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait Baik di tingkat Pusat maupun Daerah antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan K/L Lainnya serta Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Hal ini memiliki tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dihadapi, setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN", Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tusi Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Hal ini juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Namun perubahan tersebut tidak dapat diikuti dengan penyesuaian dokumen Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 karena perubahan yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 berjalannya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut berdampak terhadap adanya inkonsistensi dengan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang masih menggunakan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan. Saat ini BSKDN menjalankan kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan yang telah dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir tusi BSKDN Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya menangani inkonsistensi yang terjadi, BSKDN telah berupaya dengan melakukan usulan penyesuaian Indikator Kinerja BSKDN yang disampaikan kepada Bappenas melalui Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa BSKDN mempunyai tugas "melaksanakan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif

inovasi daerah mengamanatkan BSKDN melaksanakan penilaian inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.

Kegiatan penilaian inovasi daerah bertujuan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudunya kesejahteraan rakyat. Daerah yang berinovasi tinggi adalah daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif'.

Pada tahun 2023, proses penilaian Indeksi Inovasi Daerah melibatkan beberapa Kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
6. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Lembaga Administrasi Negara;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Ombudsman RI;
10. Universitas Indonesia;
11. Universitas Gadjah Mada;
12. Kemitraan;
13. CNN; dan
14. Kompas TV.

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Daerah yang memiliki skor 60,01 – 100 akan mendapatkan predikat "Sangat Inovatif', dan daerah yang memiliki skor 35,01 – 60 akan mendapatkan predikat "Inovatif".

Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, ditetapkan 404 daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif", dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Provinsi sebanyak 9 daerah "Sangat Inovatif' dan 19 daerah "Inovatif";
2. Kategori Kabupaten sebanyak 41 daerah "Sangat Inovatif' dan 252 daerah "Inovatif"; dan
3. Kategori Kota sebanyak 25 daerah "Sangat Inovatif' dan 58 daerah "Inovatif".

Adapun rincian seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat "Sangat Inovatif', sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat "Sangat Inovatif'

Kategori Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	Sangat Inovatif
2	Provinsi DKI Jakarta	Sangat Inovatif
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	Sangat Inovatif
5	Provinsi Sumatera Barat	Sangat Inovatif
6	Provinsi Jawa Timur	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	Sangat Inovatif
8	Provinsi Jawa Tengah	Sangat Inovatif
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sangat Inovatif

Kategori Kota

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Kota Mojokerto	Sangat Inovatif
2	Kota Mataram	Sangat Inovatif
3	Kota Bekasi	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	Sangat Inovatif
5	Kota Sawah Lunto	Sangat Inovatif
6	Kota Bandar Lampung	Sangat Inovatif
7	Kota Makassar	Sangat Inovatif
8	Kota Bengkulu	Sangat Inovatif
9	Kota Palembang	Sangat Inovatif
10	Kota Semarang	Sangat Inovatif
11	Kota Sukabumi	Sangat Inovatif
12	Kota Pariaman	Sangat Inovatif
13	Kota Probolinggo	Sangat Inovatif
14	Kota Padang Panjang	Sangat Inovatif
15	Kota Pekanbaru	Sangat Inovatif
16	Kota Jambi	Sangat Inovatif
17	Kota Surabaya	Sangat Inovatif
18	Kota Bima	Sangat Inovatif
19	Kota Surakarta	Sangat Inovatif
20	Kota Padang	Sangat Inovatif
21	Kota Banjarmasin	Sangat Inovatif
22	Kota Solok	Sangat Inovatif
23	Kota Tangerang	Sangat Inovatif
24	Kota Yogyakarta	Sangat Inovatif
25	Kota Tangerang Selatan	Sangat Inovatif

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2024

Kategori Kabupaten

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Kabupaten Wonogiri	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Banyuwangi	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Bangka	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Sragen	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Pamekasan	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Padang Pariaman	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tabalong	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Bogor	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Temanggung	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Boyolali	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Blora	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Mesuji	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Klaten	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Sampang	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Bantul	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Pesawaran	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Bondowoso	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Balangan	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Grobogan	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Indragiri Hilir	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Ngawi	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Trenggalek	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Aceh Jaya	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Sidoarjo	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Lampung Selatan	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Pringsewu	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Tangerang	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Lampung Barat	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Blitar	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Ogan Ilir	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tulangbawang	Sangat Inovatif
35	Kabupaten Tanggamus	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Klungkung	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Malang	Sangat Inovatif
38	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Pati	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Tegal	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Sumedang	Sangat Inovatif

Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542 daerah). Sebagaimana penjelasan di atas, capaian kinerja indikator ini dapat diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\textit{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi} = \frac{\textit{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\textit{Jumlah Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{404}{542} \times 100\% = 74{,}53\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{Persetase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\textit{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\%$$

$$= \frac{74{,}53\%}{30\%} \times 100\% = 247{,}83\%$$

Adapun rekapitulasi indeks inovasi daerah tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.62
Rekapitulasi Indeks Inovasi Daerah per Kategori Tahun 2023

KATEGORI	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA
SANGAT INOVATIF	9	41	25
INOVATIF	19	252	58
KURANG INOVATIF	9	104	10
TIDAK DAPAT DINILAI	1	18	0
JUMLAH	**38**	**415**	**93**

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase capaian kinerja daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi sebesar 247,83%. Hasil dan dampak positif dari tercapainya inovasi tinggi di daerah di antaranya adalah mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, penanggulangan bencana, dan pengaduan masyarakat. Inovasi pada tahun 2023 yang diterima BSKDN didominasi inovasi terkait stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi di berbagai daerah. Target indikator yang tercapai dapat diwujudkan salah satunya karena adanya kegiatan pembinaan inovasi ke daerah-daerah dengan memberikan fasilitasi terhadap daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah. Adapun penjelasan mengenai beberapa inovasi pemerintah daerah di bidang stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.63
beberapa inovasi pemerintah daerah di bidang stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi

INOVASI KESEHATAN	
Aplikasi Telekonsultasi Matur Dokter Narasi: Aplikasi Matur Dokter ini aplikasi yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dan memantau kesehatan masyarakat. Termasuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit sehingga dibutuhkan berbagai inovasi dalam bidang kesehatan yang salah satunya matur dokter. Manfaat inovasi: 1. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan dimana saja 2. Masyarakat bisa mendapat pelayanan secara gratis 3. Masyarakat bisa mendapatkan informasi dan konsultasi terkait kesehatan	Kabupaten Klaten
INOVASI PENDIDIKAN	
ADI PINTAR (Asesmen Diagnostik dan Penilaian Terpadu Hasil Belajar) Narasi: Asesmen diagnostik di UPT SMPN 5 Kota Mojokerto sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui Aplikasi Adi Pintar, guru sangat terbantu. Hal ini diperoleh dari hasil rekap data berupa grafik angka hasil asesmen yang akurat dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik dalam pengelompokan kebutuhan belajar secara langsung. Dari sini, guru akan dengan mudah menyiapkan kebutuhan belajar peserta didik dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Manfaat inovasi: 1. Memberikan kemudahan bagi guru dalam penyusuanan dan pelaksanaan asesmen diagnostik dan sumatif dalam implementasi kurikulum merdeka. 2. Merancangasesmendiagnostikyangefektifdanefisiendalammenunjangpembelajaran berdiferensiasi. 3. Memotret capaian kompetensi peserta didik di awal pembelajaran dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik sebelum masuk pembelajaran berdiferensiasi. 4. Memperoleh hasil asesmen yang akurat berupa penilaian angka dan grafik hasil asesmen.	Kora Mojokertp
INOVASI PENDIDIKAN	
JULAK WASI (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi) Pedagang sayur/sembako/ikan keliling yang beroperasi di wilayah kabupaten Tabalong kemudian di data dan diberi berbagai fasilitas. Dengan adanya inovasi JULAK WASI (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi) maka bahan baku murah/bersubsidi bisa langsung sampai kepada masyarakat secara luas sesuai dengan wilayah masing-masing. Manfaat inovasi: 1. Masyarakat yang tersebar dan jauh dari pasar dapat membeli bahan baku yang dibawa oleh para JULAK WASI 2. Para JULAK WASI dapat menekan harga barang jualannya dengan adanya subsidi silang yang diberikan pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong 3. Terjalinnya hubungan antara para JULAK WASI yang dapat saling mengenali satu sama lain dari atribut yang dipakai serta keterikatan dengan pemerintah utamanya dengan dinas pengampu yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.	Kabupaten Tabalong

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Pembinaan inovasi daerah sebagai mandat Prioritas Nasional (PN) terutama bagi daerah yang mendapatkan kriteria "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai" berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan terkait pengembangan potensi-potensi inovasi di daerah dan teknis dalam pengoperasian aplikasi Indeks Inovasi Daerah.
2. Fasilitasi sistem informasi layanan inovasi daerah di 156 daerah dalam meningkatkan kualitas SPBE;
3. Melakukan pembinaan inovasi daerah berdasarkan analisis Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah;
4. Pelaksanaan Pilot Project di 8 daerah (Kab. Aceh Besar, Kab Serdang Bedagal, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Pesisir Barat, Kab. Merauke, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Lembata, dan Kab. Sambas) berdasarkan hasil idenfitikasi dan dilakukan bimbingan teknis terkait penerapan aplikasi e-Bumdes, validasi data kemiskinan, dan aplikasi e-pendapatan asli daerah;
5. Penilaian inovasi daerah berdasarkan hasil input inovasi dari seluruh daerah sebagai basis data untuk melaksanakan pembinaan; dan
6. Adanya pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) yang menjadi dasar pengusulan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) ke Kementerian Keuangan untuk daerah pemenang.

BSKDN memperoleh kinerja Indeks Inovasi Daerah yang melebihi target melalui 4 kegiatan Prioritas Nasional (PN) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang profesional di bidangnya masing-masing.

Adapun analisis dalam efisiensi penggunaan sumber daya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam mencapai target kinerja, diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah memaksimalkan jumlah fungsional statistisi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai 'Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi'. Selain sumber daya manusia, dibutuhkan juga dukungan dari sarana dan prasarana guna menunjang seluruh kegiatan seperti ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah berupaya semaksimal mungkin dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan organisasi guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dilihat melalui efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target dengan diraihnya realisasi kinerja yang melebihi target dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,44%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Pembinaan inovasi daerah;
2. Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah; dan
3. Pelaksanaan IGA dan penyerahan DID.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah merupakan sarana dalam menilai kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengatur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal dan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pengawasan kepala daerah terhadap pemerintah daerah.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini dihitung dengan memperhatikan presentase hasil pengawasan umum, presentase hasil pengawasan teknis, presentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, dan jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun persentase pembobotan perhitungan sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%),
2. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%),
3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota) (bobot 20%),
4. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controling dalam SIPD) (bobot 10%),

Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator.
2. Menghitung Indeks Provinsi.
3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34)

Target indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah Nilai 100 dan telah tercapai nilai 82,06 atau 82,06% dari target yang telah ditetapkan.

1. Nilai hasil pengawasan umum

   Untuk menjamin pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan optimal, salah satu parameter pengukurnya adalah nilai hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka ini diukur dari tingkat kepatuhan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 38 daerah provinsi dengan hasil sebanyak 442 temuan dan 845 rekomendasi. Dari total temuan dan rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 349 rekomendasi, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 496 rekomendasi. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Sebagian Besar Hasil Pengawasan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah ditindaklanjuti", mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 40%, atau dengan hasil indeks sebesar 40.

2. Nilai hasil pengawasan teknis

   Nilai hasil pengawasan teknis dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dimana sepanjang Tahun 2023, Kementerian/Lembaga masih belum seluruhnya melakukan pengawasan teknis. Fungsi pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah pada Tahun 2023 juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

   Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Kementerian Dalam Negeri dan beberapa Kementerian/Lembaga telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah", mencapai persentase 55% dengan bobot penilaian 30%, atau dengan hasil indeks sebesar 16,50.

3. Persentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah oleh Inpektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

   Nilai hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah didapatkan dari hasil kepatuhan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun nilai pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap 34 daerah provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.64
Nilai Pengawasan APIP terhadap 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Pengawasan APIP
1	Aceh	95,24
2	Bali	93,14
3	Banten	84,67
4	Bengkulu	67,75
5	DI Yogyakarta	64,41
6	DKI Jakarta	95,68
7	Gorontalo	65,2
8	Jambi	79,37
9	Jawa Barat	95,6
10	Jawa Tengah	91,92
11	Jawa Timur	93,14
12	Kalimantan Barat	94,29
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	82,47
15	Kalimantan Timur	72,6
16	Kalimantan Utara	75,11
17	Kepulauan Bangka Belitung	97,76
18	Kepulauan Riau	97,76
19	Lampung	93,58
20	Maluku	42,26
21	Maluku Utara	19,19
22	Nusa Tenggara Barat	60,41
23	Nusa Tenggara Timur	87,54
24	Papua	91,91
25	Papua Barat	51,32
26	Riau	88,53
27	Sulawesi Barat	67,21
28	Sulawesi Selatan	74,39
29	Sulawesi Tengah	51,75
30	Sulawesi Tenggara	50,3
31	Sulawesi Utara	84,02
32	Sumatera Barat	91,49
33	Sumatera Selatan	82,18
34	Sumatera Utara	93,55
	Total	**2645,4**

Data capaian kepatuhan ini didapatkan dari sumber data Monitoring Center for Prevention (MCP), pengukuran yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada area intervensi pengawasan APIP terhadap aspek kegiatan pengawasan, dimana rata-rata kepatuhan pemerintah daerah provinsi terhadap kegiatan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebesar 77,84%. Dengan demikian bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks sebesar 15,56%.

4. Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controling dalam SIPD
   Nilai pengintegrasian e-controlling dalam SIPD tergambarkan dalam total capaian pengintegrasian seluruh pemerintah daerah provinsi dalam melakukan reviu dan pelaporan hasil pengawasan dalam Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASIAT yang secara sistem juga sudah terintegrasi dalam Aplikasi SIPD. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Hasil pengawasan seluruh pemerintah daerah provinsi terintegrasi dalam SIWASIAT dan SIPD", mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 10%, atau dengan hasil indeks sebesar 10.

Anggaran Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebesar 82,06% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.224.448.000,- telah terealisasi sebesar Rp 6.268.718.209,- atau sebesar 100%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tesedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya Tingkat kepatuhan pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang terus konsisten dilaksanakan terhadap 34 pemerintah daerah provinsi sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan fokus dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2023. Selain itu, tingkat persentase kepatuhan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah di 34 provinsi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan penurunan pada indeks pengawasan pemerintahan daerah, dimana pengukuran ini juga dilakukan dengan berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

Kegiatan/upaya yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terhadap urusan teknis sesuai dengan tanggungjawab masing-masing melalui forum sosialisasi dan koordinasi perencanaan pengawasan setiap tahun.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melakukan konsolidasi dan persamaan persepsi terkait fungsi pengawasan secara nasional, melalui Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai agenda konsolidasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah berguna dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan. Indeks ini mencerminkan tingkat kinerja yang telah dilakukan inspektorat daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik. selain itu, Indeks ini juga menjadi acuan bagi pihak pemerintah dalam menentukan tindak lanjut dan perbaikan bagi inspektorat daerah yang memiliki nilai indeks rendah serta dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja inspektorat daerah.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini dihitung dengan memperhatikan kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan, sinergi pelaksanaan pengawasan antara Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan adanya Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tatakelola yang baik.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 telah telah tercapai sebesar 80,63, dari target sebesar 85. Nilai indeks sebesar 80,63 menggambarkan kondisi kapasitas inspektorat daerah baik. Adapun formula pengukuran yang digunakan, sebagai berikut:

1. Kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan (bobot 25%),
2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara Auditor dan PPUPD (bobot 25%),
3. Capaian kapabilitas APIP (bobot 25%),
4. Rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH. (bobot 25%),
5. Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir presentase total dibagi 4 sub indikator. (1-4 x 100):4

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

1. Kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Berdasarkan data capaian pelaporan kepatuhan pengalokasian anggaran oleh Inspektorat Daerah Tahun 2023 melalui aplikasi pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) masih terdapat beberapa daerah yang perlu menjadi perhatian dalam rangka pemenuhan kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan dimaksud. Adapun Nilai Kepatuhan Anggaran Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.65
Nilai Kepatuhan Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Provinsi	Kepatuhan Anggaran
1	Aceh	91
2	Bali	99
3	Banten	100
4	Bengkulu	92
5	DI Yogyakarta	60
6	DKI Jakarta	100
7	Gorontalo	10
8	Jambi	95
9	Jawa Barat	89
10	Jawa Tengah	96
11	Jawa Timur	100
12	Kalimantan Barat	100
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	96
15	Kalimantan Timur	100
16	Kalimantan Utara	100
17	Kepulauan Bangka Belitung	100
18	Kepulauan Riau	100
19	Lampung	100
20	Maluku	51
21	Maluku Utara	44
22	Nusa Tenggara Barat	70
23	Nusa Tenggara Timur	80
24	Papua	100
25	Papua Barat	100
26	Riau	94
27	Sulawesi Barat	99
28	Sulawesi Selatan	84
29	Sulawesi Tengah	100
30	Sulawesi Tenggara	100
31	Sulawesi Utara	78
32	Sumatera Barat	100
33	Sumatera Selatan	60
34	Sumatera Utara	85
Total		**2954**
Rata-Rata		**86,88**

Berdasarkan data di atas, kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 86,88 dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 21,72.

2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD
   Nilai ini didapatkan dari tingkat kepatuhan pembagian tugas dan sinergitas inspektorat daerah dalam pelaksanaan penugasan pengawasan yang tergambarkan dalam hasil laporan terhadap penjaminan kualitas pengawasan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022, khususnya pada aspek penjaminan kualitas pengawasan dalam area intervensi kapabiltas APIP. Sebagian besar Inspektorat telah menerapkan sinergi pelaksanaan pengawasan antara Auditor dan PPUPD, maka dapat disimpulkan bahwa sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD telah memenuhi kriteria dengan capaian sebesar 85,20% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 21,3.
3. Capaian kapabilitas APIP
   Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sesuai dengan target nasional yakni tingkat kapabilitas APIP seluruh daerah mencapai Level 3. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator yang bersumber data dari MCP, kapabilitas APIP di 38 Provinsi mencapai rata-rata nilai 76,76% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 19,19. Adapun nilai kapabilitas APIP sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.66
Nilai Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah

No.	Provinsi	Nilai KAPIP
1	Aceh	80
2	Bali	80
3	Banten	80
4	Bengkulu	80
5	DI Yogyakarta	80
6	DKI Jakarta	80
7	Gorontalo	80
8	Jambi	80
9	Jawa Barat	80
10	Jawa Tengah	80
11	Jawa Timur	80
12	Kalimantan Barat	80
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	80
15	Kalimantan Timur	80
16	Kalimantan Utara	80
17	Kepulauan Bangka Belitung	80
18	Kepulauan Riau	80
19	Lampung	80
20	Maluku	80
21	Maluku Utara	0
22	Nusa Tenggara Barat	80
23	Nusa Tenggara Timur	80
24	Papua	80
25	Papua Barat	80
26	Riau	80
27	Sulawesi Barat	80
28	Sulawesi Selatan	50
29	Sulawesi Tengah	80
30	Sulawesi Tenggara	80
31	Sulawesi Utara	80
32	Sumatera Barat	80
33	Sumatera Selatan	80
34	Sumatera Utara	80
Total		**2.610**

4. Rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH.
   Nilai rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH dihasilkan dari capaian kegiatan pengawasan lainnya dalam pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menggambarkan tingkat pencapaian Kerjasama pengawasan khusus/ pengawasan investigatif berdasarkan hasil kerjasama antara APIP dan APH di daerah. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator mencapai persentase 73,67 dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 18,41.

Mayoritas sub indikator dalam indeks ini juga telah terakomodir dalam instrumen pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengawasan di daerah.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar 95%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.394.710.000,- telah terealisasi sebesar Rp.394.705.000 ,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tesedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 yaitu tingkat kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan pada inspektorat daerah Tahun 2023 yang menurun dari 22,94 ke 21,72. Selain itu nilai pelaksanaan Kerjasama APIP APH yang menurun dari 22,65 menjadi 18,41.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan kolaborasi penguatan inspektorat daerah dengan berbagai stakeholders lainnya, diantaranya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menerbitkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang merupakan salah satu agenda penguatan Inspektorat di daerah.

Sasaran 8 :

Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki tanggung jawab mendasar memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Hal ini mendorong pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya landasan operasional penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan turunannya.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan database dan pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan. Ketika setiap penduduk terdaftar secara resmi dalam sistem, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan identitas resmi, dokumen-dokumen kependudukan, serta hak-hak hukum dan perdata lainnya yang mendasar. Keberadaan layanan ini tidak hanya sekadar mencatat keberadaan individu, tetapi juga menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran bukan sekadar lembaran kertas, melainkan kunci akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, hak legal, dan layanan publik lainnya. Salah satu langkah percepatan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemanfaatan dan akses data kependudukan. Dengan ketersediaan data yang baik dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang lebih inovatif serta sesuai perkembangan teknologi, Kementerian/lembaga dapat menjangkau populasi secara luas untuk keperluan nasional, dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan"** diperoleh **sebesar 111,67%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat sangat tinggi** atau **kategori sangat berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.67
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97%	100,23%	103,33%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	4.959 Lembaga Pengguna	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**111,66%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan hal penting karena menjadi dasar identifikasi, pembuktian status, serta hak-hak warga negara. Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mencerminkan keberhasilan pemerintah atau lembaga terkait dalam melibatkan dan mendaftarkan penduduknya pada sistem administrasi penduduk.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan berbagai langkah besar dan strategis dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan menyelenggarakan peningkatan layanan administrasi kependudukan. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan terhadap Data Perseorangan dan Data Agregat yang di dalamnya terdapat 23 layanan yaitu Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Indonesia Sehat, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, namun dalam laporan ini dituangkan 6 dari 23 layanan yang menjadi layanan prioritas nasional dan sekaligus menjadi batasan pengukuran kinerja indikator yaitu Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman Kertu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Akta kelahiran, Penerbitan akta Kematian, Penerbitan akta perkawinan, dan Penerbitan akta perceraian. Adapun target dan capaiannya sebagai berikut:

1. Penerbitan KIA telah mencapai 40.095.609 keping atau 51,20% dari total jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sebesar 78.265.282 Berdasarkan target Renstra tahun 2023 sebesar 50% dari total jumlah anak, maka capaian penerbitan KIA sebesar 102,4%.
2. Perekaman KTP-el telah mencapai 201.452.793 Jiwa dengan persentase capaian sebesar 98,60% dari total wajib rekam KTP-el sebesar 204.281.006.
3. Penerbitan Akta kelahiran target 98%, telah mencapai 77.042.720 akta atau 98,40% dari total jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sebesar 78.265.282 dengan persentase capaian sebesar 100,40%. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penerbitan akta Kematian target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 2.324.193 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Penerbitan akta perkawinan non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 207.104 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Penerbitan akta perceraian non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 14.549 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.20
Presentase Perekaman KTP-el

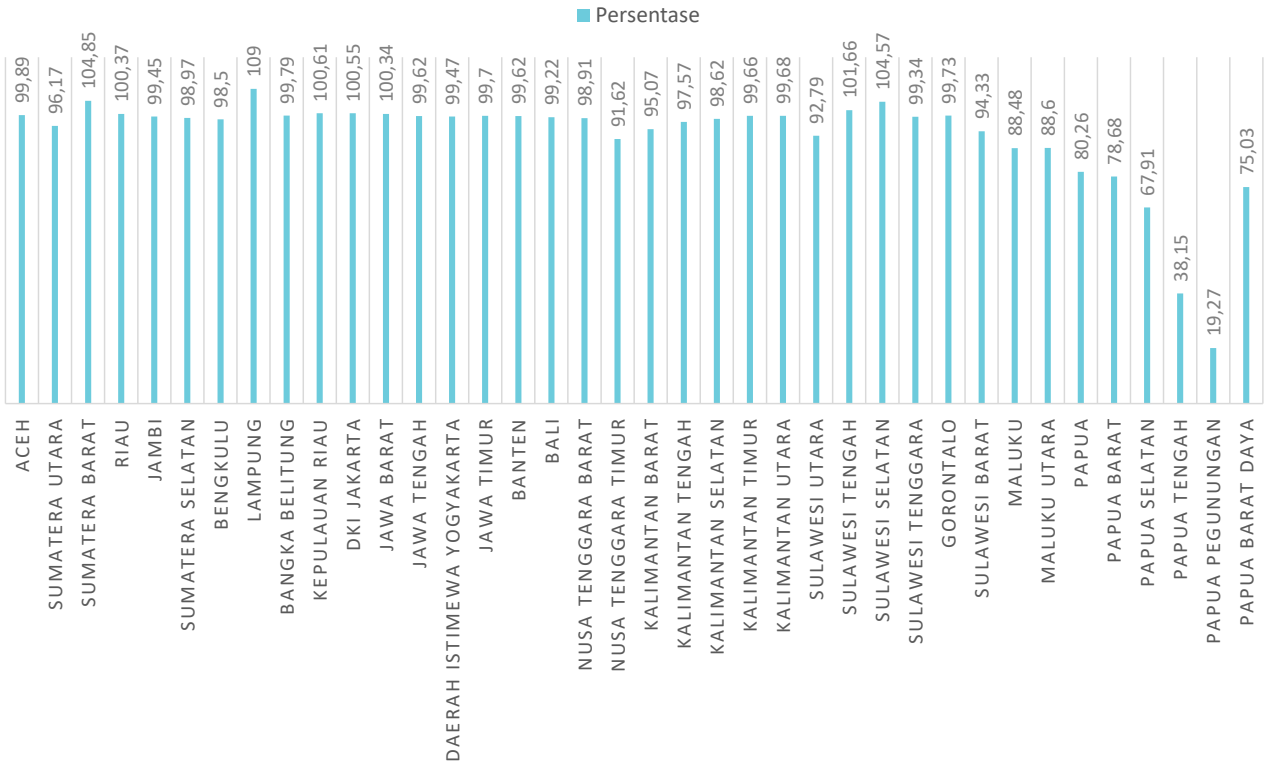

Grafik 3.21
Presentase Penerbitan Akta Kelahiran

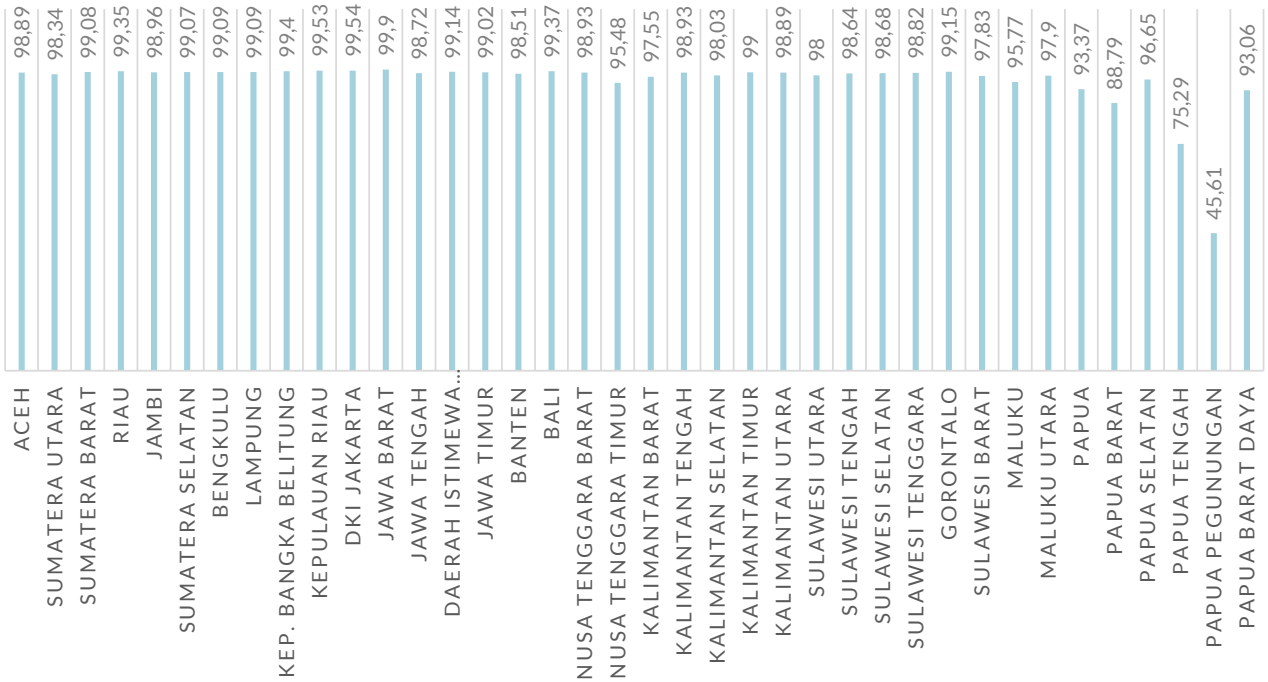

Grafik 3.22
Presentase Penerbitan KIA

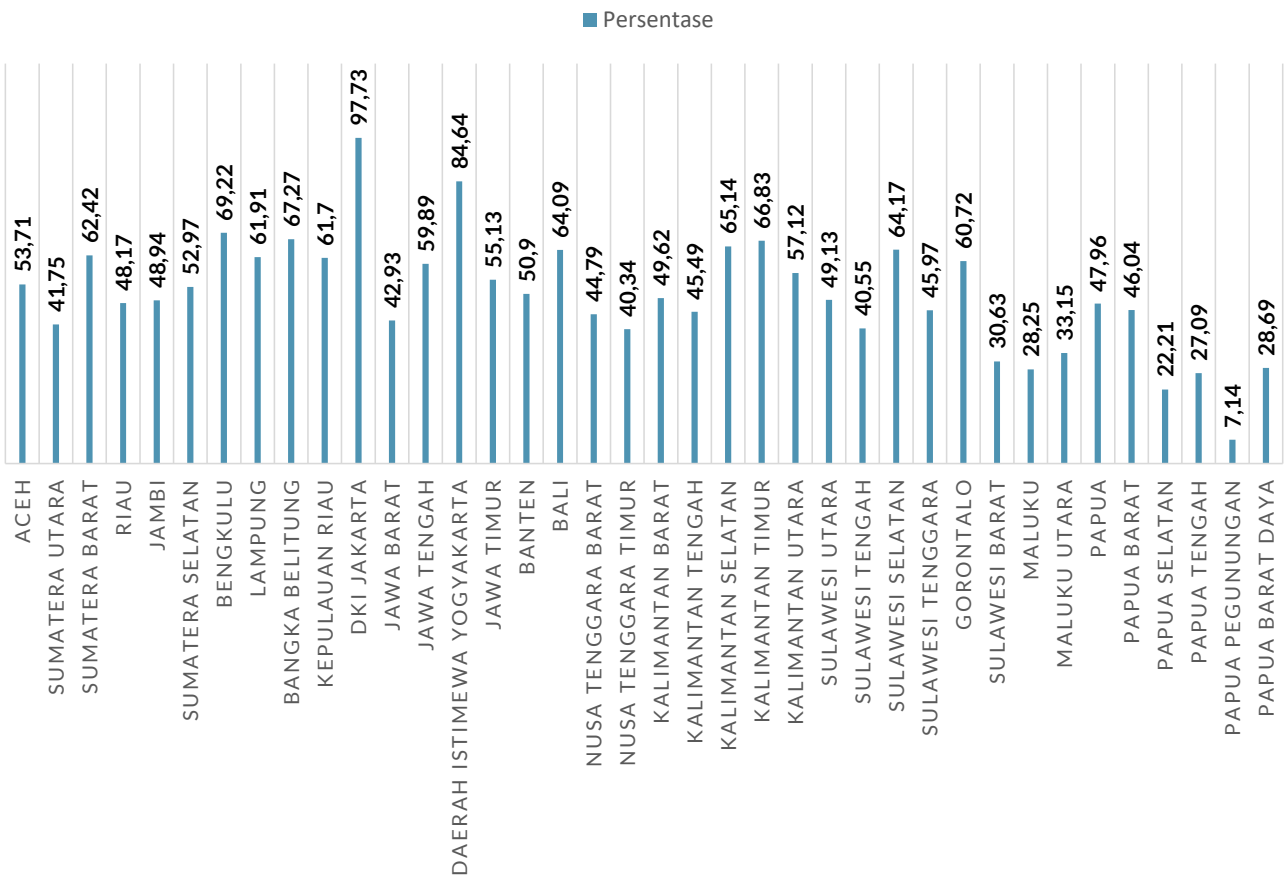

Grafik 3.23
Penerbitan Akta Kematian (jiwa)

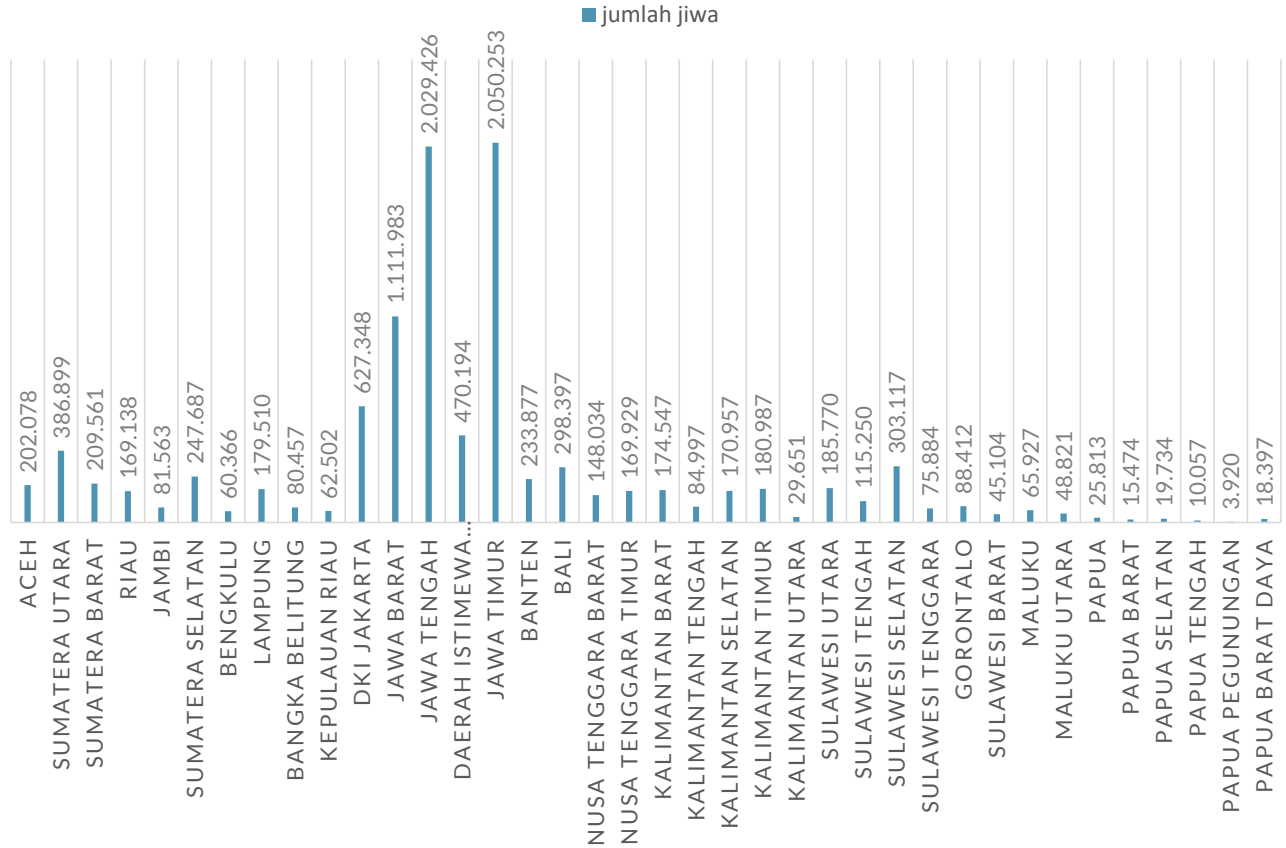

Grafik 3.24
Penerbitan Akta Kawin dan Akta Cerai

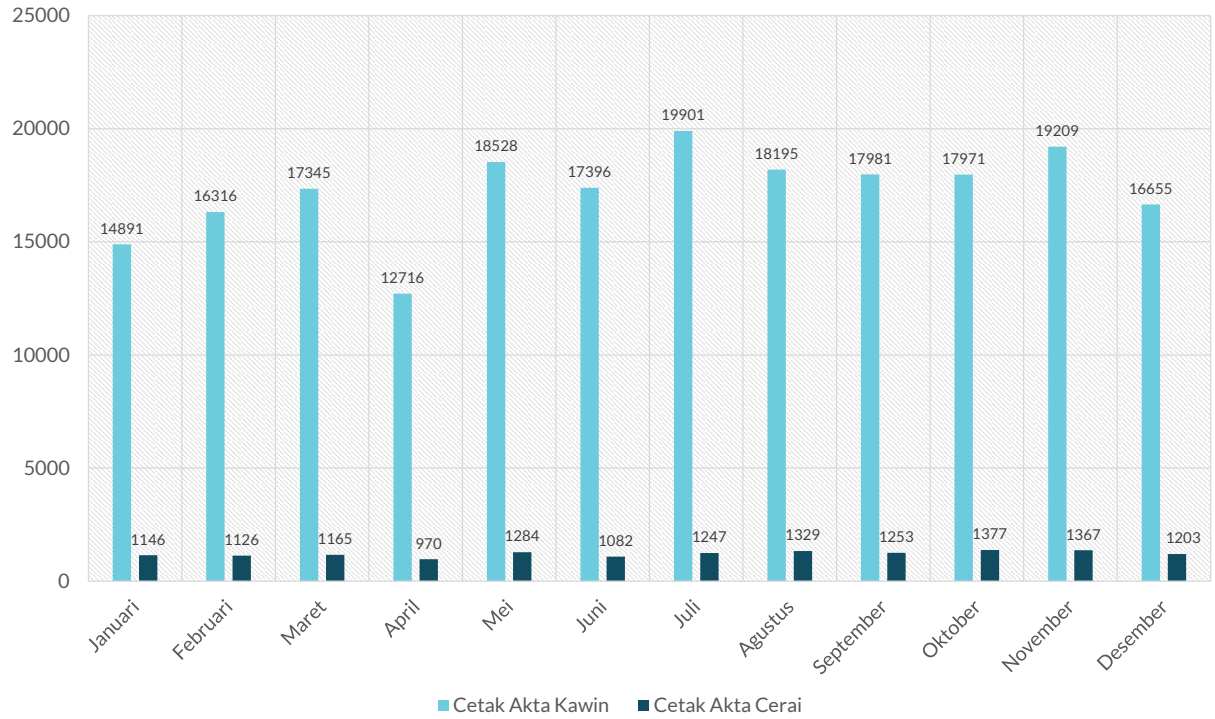

Sehingga berdasarkan data dari Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Desember 2023 di atas, persentase rata-rata realisasi cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebesar 100,23%, dengan target 97% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,33%. Realisasi sebesar 100,23% dimaksud mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 103,87%. Meskipun demikian, capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan skala ordinal capaian kinerja tersebut berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Adapun persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{Persentase Rata} - \textit{Rata Capaian}}{\textit{Persentase Target}} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{100{,}23\%}{97\%} \; x \; 100\%$$

$$= 103{,}33\%$$

Dalam mendukung keberhasilan Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan beberapa inovasi, antara lain:

1. Peningkatan layanan Adminduk melalui pelayanan Dukcapil goes to Campus, kementerian/lembaga/instansi, dll.
2. Peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas dengan bekerja sama dengan sekolah, yayasan, dinas sosial, dll
3. Inovasi layanan administrasi kependudukan antara lain tandatangan Elektronik
4. Kebijakan dan regulasi pelayanan adminduk yang memudahkan.
5. Pelayanan dokumen kependudukan yang masif khususnya bagi daerah dengan cakupan rendah, daerah 3T, daerah perbatasan, penyandang disabilitas.
6. Inovasi layanan administrasi kependudukan
7. Kebijakan penerapan buku pokok pemakaman.
8. Pelaksanaan inovasi pelayanan seperti layanan terintegrasi, layanan daring, ADM.
9. Pembinaan/pendampingan yang intensif oleh Ditjen Dukcapil.
10. Sosialisasi yang lebih masif melalui Dukcapil Belajar, Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).
11. Kebijakan kerja sama penerbitan dokumen kependudukan dengan fasilitas kesehatan/rumah sakit.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagai berikut:

1. Aspek anggaran: Dukungan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Dalam Negeri dan Hibah Luar Negeri menunjang pelaksanaan kegiatan tetap tercapai target.
2. Aspek pegawai: Dukungan SDM tidak seimbang dengan beban kerja, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.
3. Aspek teknologi: Dukungan teknologi khususnya infrastruktur tidak memadai karena sebagian besar sudah out of product, out of sale, out of date, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Beberapa daerah seperti di wilayah Papua dan perbatasan menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang terbatas, sehingga mempengaruhi kelancaran proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk secara elektronik.
2. Beberapa daerah seperti di wilayah Papua, perbatasan dan pedalaman memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, termasuk pedalaman yang terisolasi dan daerah dengan akses transportasi yang terbatas. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mendistribusikan layanan pendaftaran penduduk secara merata.
3. Masih rendahnya dukungan anggaran dari daerah untuk pelayanan administrasi kependudukan
4. Beberapa wilayah di Papua dan perbatasan menghadapi kondisi keamanan yang tidak stabil atau konflik. Hal ini dapat menghambat penyelenggaraan layanan secara optimal dan merata

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam tahun 2023. Mengundang peserta yakni seluruh Kepala Dinas Dukcapil di 38 Provinsi dan Kepala Dinas Dukcapil di 514 Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk penguatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional baik di pusat maupun di daerah dalam mengantisipasi
2. Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sebagai langkah untuk menghadapi isu Megatrend Global 2045.
3. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan Jemput Bola Layanan Adminduk yang dilaksanakan oleh Tim dari Ditjen Dukcapil. Melalui GISA dan Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah 3T di Tahun 2023 telah dilaksanakan di 15 Wilayah diantaranya Sorong, Merauke, Donggala, Palalawan, Pesisir Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara, Kupang, Lombok Utara, Manggarai Timur, Seram Bagian Timur, Manokwari Selatan, Nabire, dan Biak Numfor.
4. Penyelenggaraan Dukcapil Prima Award dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang produktif, efektif dan inovatif, perlu diberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja, dedikasi dan komitmen dalam mengemban dan menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2023. Adapun kategori dari Dukcapil Prima Award yakni Dukcapil Prima Award Skala Nasional, Dukcapil Prima Award Kolaboratif, dan Dukcapil Prima Award Provinsi dengan Persentase Identitas Kependudukan Digital Tertinggi.
5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdampak terhadap kelancaran pemberian layanan adminduk.
6. Dukcapil Belajar yang merupakan wadah peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia Dukcapil, dilaksanakan rutin setiap pekan. Pembelajaran dilaksanakan secara virtual dan bagi peserta yang mengikuti mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan dalam pemenuhan jam pelajaran pengembangan kompetensi.

Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik dengan target 1.250 Lembaga Pengguna merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri yang baru sejak Tahun 2022 (sebelumnya merupakan Indikator Kinerja Program/IKP) dan indikator Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik dengan target 2.873 Lembaga Pengguna merupakan IKP (sebelumnya merupakan IKU). Hal ini merupakan tindaklanjut atas penyesuaian level dari IKU menjadi IKP dan dari IKP menjadi IKU, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atas implementasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik menjadi parameter yang mengukur seberapa banyak instansi atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menggunakan data kependudukan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa efektif penggunaan data kependudukan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan ketersediaan data yang baik dari Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik yang lebih inovatif serta sesuai perkembangan teknologi, Kementerian/lembaga, organisasi pemerintah dan non pemerintah dapat menjangkau populasi secara luas untuk keperluan nasional, dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi Data Warehouse (DWH) Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pengguna daerah provinsi menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Provinsi dan Pengguna daerah kabupaten/kota menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota yang tercatat pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) serta tersambung dan tersimpan pada aplikasi Data Warehouse Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 3.16
Pemanfaatan Data Kependudukan

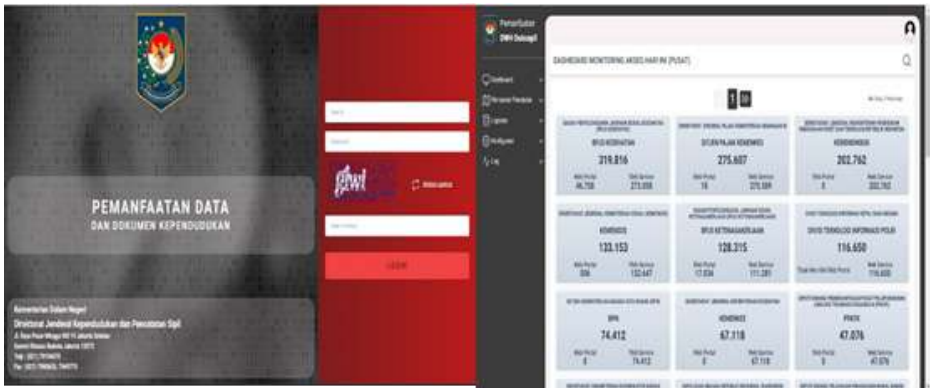

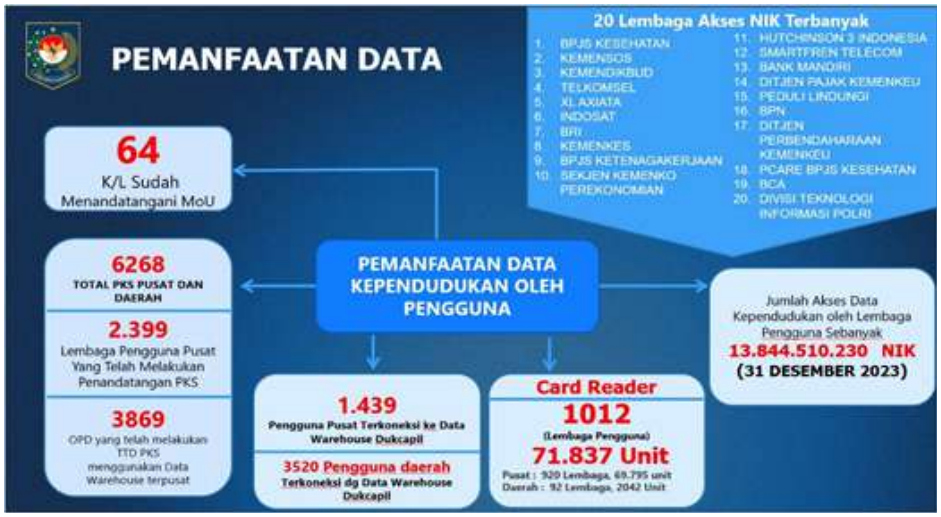

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan aplikasi DWH Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat sebanyak 4.959 lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik, maka nilai capaian indikator ini dapat dihitung dengan formula perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{Jumlah Lembaga Pengguna Pusat dan Daerah yang mengakes (kumulatif)}}{\textit{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.959}{1.250} \times 100\%$$

$$= 396{,}72\%$$

Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 4.959 lembaga pengguna dari target sebanyak 1.250 lembaga pengguna, sehingga diperoleh persentase capaian indikator sebesar 396,72%, sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil.

Pencapaian ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan PNBP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerimaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.793.818.491.500 dari jumlah sebanyak 911 Kementerian/Lembaga, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.68
Jumlah Pengguna yang menggunakan PNBP

JUMLAH PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN PNBP		
No.	Klasifikasi Pengguna	Jumlah Pengguna
1.	Asuransi	38
2.	Jasa Pembayaran	16
3.	Jasa Transportasi	2
4.	Kesehatan	1
5.	Lain-Lain	25
6.	Lembaga Non Kementerian	1
7.	Lembaga Pembiayaan	50
8.	Pasar Modal	51
9.	Perbankan	723
10.	Selular	4
TOTAL		**911**

Tabel 3.69
Pemasukan PNBP Tahun 2023

JUMLAH PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN PNBP		
No.	PERIODE BULAN	PEMASUKAN PNBP
1.	Januari	Rp0
2.	Februari	Rp0
3.	Maret	Rp79.727.006.500
4.	April	Rp63.251.285.000
5.	Mei	Rp111.979.994.500
6.	Juni	Rp62.793.943.000
7.	Juli	Rp64.766.893.000
8.	Agustus	Rp81.921.691.500
9.	September	Rp80.259.034.500
10.	Oktober	Rp72.767.506.000
11.	November	Rp100.266.309.500
12.	Desember	Rp76.084.828.000
TOTAL		**Rp793.818.491.500**

Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 4.959 lembaga pengguna dari target sebanyak 1.250 lembaga pengguna, sehingga diperoleh persentase capaian indikator sebesar 396,72%, sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil.

Pencapaian ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan PNBP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerimaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.793.818.491.500 dari jumlah sebanyak 911 Kementerian/Lembaga.

Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja ini dikarenakan beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

1. Menerbitkan kebijakan dan regulasi yang memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk.
2. Meningkatkan kehandalan data kependudukan yang mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Melakukan Inovasi layanan administrasi kependudukan
4. Adanya dukungan yang memadai dari sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diberikan.

Capaian Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik Tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa **aspek pendukung efisiensi dalam penggunaan sumber daya**, sebagai berikut:

1. Aspek anggaran: Dukungan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Dalam Negeri dan Hibah Luar Negeri menunjang pelaksanaan kegiatan tetap tercapai target.
2. Aspek pegawai: Dukungan SDM tidak seimbang dengan beban kerja, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.
3. Aspek teknologi: Dukungan teknologi khususnya infrastruktur tidak memadai karena sebagian besar sudah out of product, out of sale, out of date, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.

Sasaran 9 :

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dalam hal penyelenggaraan tata Kelola kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan pembinaan kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam peraturan teknis lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan"** diperoleh **sebesar 100%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil,** sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.70
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	Nilai 40	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**100%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Dalam mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa terhadap Pilar/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program yang menjadi komposit antara lain:

1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Kategori Baik
   Dimensi hitung dari aspek pelaksanaan dan aspek hasil, reaisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan komunikasi perangkat GWPP.
2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
   Dimensi penilaian antara lain
   a. Segmen Batas, yaitu daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
   b. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode data wilayah, dan
   c. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang membidangi informasi geospasial.
3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik,
   Bobot perhitungan berdasarkan kriteria indikator-indikator Standar Nasional Indonesia The International Organization for Standardization (SNI ISO) 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan, Indikator untuk kota cerdas serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SPM Teknis.
4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu
5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan secara simultan/agregat/komposit digunakan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$ITKK\ per\ Kabupaten = \sum_{n}^{i} W_i I_{ij}$$

ITKPK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKK)
Wi : Bobot masing-masing IKP
Iij : Indeks IKP

ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100. Untuk memudahkan intepretasi, maka dilakukan pengelompokkan wilayah menjadi 3 kategori yaitu daerah dengan ITKK kurang baik, daerah dengan ITKK baik, dan daerah dengan ITKK sangat baik.

1. ITKK kategori kurang baik: Lebih kecil dan sama dengan 50.
2. ITKK kategori baik : dengan nilai 50,01 -75.
3. ITKK kategori sangat baik: 75,01 – 100.

contoh/simulasi dalam pengukuran skor Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan yang terdiri dari 5 IKP untuk Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.71
Contoh Simulasi Pengukuran Skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kabupaten Aceh Barat

Kab/Kota	Nilai Capaian Indeks GWPP	Nilai Capaian Persentase segmen dan rupabumi	Nilai Capaian Indeks Perkotaan	Nilai Capaian Indeks Perizinan	Nilai Capaian Indeks Kecamatan	Akumulasi Nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori
Kab Aceh Barat	92,22	88,24	68,00	88,66	78,12	83,048	Kategori IKU Sangat Baik

ITKK Kabupaten Aceh Barat = (92,22×0,2) + (88,24×0,2) + (68,00×0,2) + (88,66×0,2) + (78,12×0,2) = 83,04
Maka ITKK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 sebesar 83,03 dengan kategori Sangat Baik
Tahun 2023 merupakan tahun kedua perhitungan nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan dengan penilaian dilaksanakan kepada 514 kabupaten/kota dengan hasil penialian rata-rata nilai Indeks Tata Kelola Kewilayan secara nasional berada pada angka 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. 0 daerah dengan ITKK kategori sangat baik.
2. 140 Daerah dengan ITKK kategori baik.
3. 374 Daerah dengan ITKK kategori Kurang.

Dalam mendukung pemenuhan data Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, terdapat beberapa aplikasi sebagai media sistem informasi pemenuhan data dukung pada masing-masing sub urusan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

1. 1. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama melalui media:
   a. Aplikasi SIP GWPP pada https://sipgwpp.kemendagri.go.id/,
   b. PTSP pada https://emonev-dpmptsp.kemendagri.go.id/, dan
   c. Kecamatan pada https://simpel.kemendagri.go.id/.
2. Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, melalui kegiatan Maturasi Perkotaan.
3. Direktorat Toponimi dan Batas Negara melalui media Aplikasi Legasi Kewilayahan pada https://profilpulau.kemendagri.go.id/.

Adapun daftar kabupaten/kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Kabupaten Aceh Besar	63	ITPK Baik
2	Kabupaten Aceh Selatan	58	ITPK Baik
3	Kabupaten Aceh Tengah	66	ITPK Baik
4	Kabupaten Aceh Timur	59	ITPK Baik
5	Kabupaten Gayo Lues	61	ITPK Baik
6	Kota Banda Aceh	65	ITPK Baik
7	Kota Langsa	57	ITPK Baik
8	Kota Sabang	64	ITPK Baik
9	Kabupaten Solok	58	ITPK Baik
10	Kabupaten Tanah Datar	58	ITPK Baik
11	Kabupaten Bengkalis	52	ITPK Baik
12	Kabupaten Rokan Hilir	52	ITPK Baik
13	Kota Dumai	52	ITPK Baik
14	Kota Pekanbaru	52	ITPK Baik
15	Kota Batam	51	ITPK Baik
16	Kabupaten Merangin	60	ITPK Baik
17	Kabupaten Sarolangun	61	ITPK Baik
18	Kota Jambi	64	ITPK Baik
19	Kota Sungai penuh	61	ITPK Baik
20	Kabupaten Bengkulu Selatan	51	ITPK Baik
21	Kabupaten Bengkulu Tengah	51	ITPK Baik
22	Kabupaten Bengkulu Utara	51	ITPK Baik
23	Kabupaten Kepahiang	51	ITPK Baik
24	Kabupaten Mukomuko	51	ITPK Baik
25	Kabupaten Seluma	51	ITPK Baik
26	Kota Bengkulu	51	ITPK Baik
27	Kabupaten Bangka	57	ITPK Baik
28	Kabupaten Bangka Tengah	59	ITPK Baik
29	Kabupaten Belitung	59	ITPK Baik
30	Kota Pangkal Pinang	57	ITPK Baik
31	Kabupaten Lampung Barat	61	ITPK Baik
32	Kabupaten Lampung Selatan	63	ITPK Baik
33	Kabupaten Pesisir Barat	53	ITPK Baik
34	Kabupaten Tanggamus	59	ITPK Baik
35	Kabupaten Way Kanan	62	ITPK Baik
36	Kota Metro	60	ITPK Baik
37	Kabupaten Pandeglang	58	ITPK Baik
38	Kabupaten Tangerang	60	ITPK Baik
39	Kota Cilegon	58	ITPK Baik
40	Kota Serang	59	ITPK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
41	Kota Tangerang	63	ITPK Baik
42	Kota Tangerang Selatan	58	ITPK Baik
43	Kabupaten Bandung	66	ITPK Baik
44	Kabupaten Bandung Barat	59	ITPK Baik
45	Kabupaten Bekasi	61	ITPK Baik
46	Kabupaten Bogor	65	ITPK Baik
47	Kabupaten Garut	57	ITPK Baik
48	Kabupaten Kuningan	64	ITPK Baik
49	Kabupaten Purwakarta	58	ITPK Baik
50	Kabupaten Subang	58	ITPK Baik
51	Kabupaten Sumedang	52	ITPK Baik
52	Kota Bandung	52	ITPK Baik
53	Kota Banjar	52	ITPK Baik
54	Kota Bekasi	52	ITPK Baik
55	Kota Bogor	51	ITPK Baik
56	Kota Cimahi	60	ITPK Baik
57	Kota Cirebon	61	ITPK Baik
58	Kota Depok	64	ITPK Baik
59	Kota Sukabumi	61	ITPK Baik
60	Kabupaten Banjarnegara	51	ITPK Baik
61	Kabupaten Banyumas	51	ITPK Baik
62	Kabupaten Boyolali	51	ITPK Baik
63	Kabupaten Brebes	51	ITPK Baik
64	Kabupaten Cilacap	51	ITPK Baik
65	Kabupaten Klaten	51	ITPK Baik
66	Kabupaten Magelang	51	ITPK Baik
67	Kabupaten Semarang	57	ITPK Baik
68	Kabupaten Sukoharjo	59	ITPK Baik
69	Kota Semarang	59	ITPK Baik
70	Kota Surakarta	57	ITPK Baik
71	Kota Tegal	61	ITPK Baik
72	Kabupaten Bantul	63	ITPK Baik
73	Kabupaten Gunungkidul	53	ITPK Baik
74	Kabupaten Kulon Progo	59	ITPK Baik
75	Kabupaten Sleman	62	ITPK Baik
76	Kota Yogyakarta	60	ITPK Baik
77	Kabupaten Trenggalek	58	ITPK Baik
78	Kabupaten Badung	60	ITPK Baik
79	Kabupaten Buleleng	58	ITPK Baik
80	Kabupaten Jembrana	59	ITPK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
81	Kabupaten Karangasem	67	ITPK Baik
82	Kabupaten Tabanan	63	ITPK Baik
83	Kota Denpasar	66	ITPK Baik
84	Kabupaten Lombok Timur	53	ITPK Baik
85	Kabupaten Lombok Utara	53	ITPK Baik
86	Kabupaten Sumbawa Barat	53	ITPK Baik
87	Kota Mataram	53	ITPK Baik
88	Kabupaten Belu	55	ITPK Baik
89	Kabupaten Kupang	55	ITPK Baik
90	Kabupaten Malaka	55	ITPK Baik
91	Kabupaten Manggarai		
92	Kabupaten Manggarai Barat	55	ITPK Baik
93	Kabupaten Manggarai Timur	55	ITPK Baik
94	Kabupaten Ngada	55	ITPK Baik
95	Kabupaten Sumba Timur	55	ITPK Baik
96	Kabupaten Timor Tengah Selatan	55	ITPK Baik
97	Kabupaten Timor Tengah Utara	55	ITPK Baik
98	Kota Kupang	55	ITPK Baik
99	Kabupaten Kapuas Hulu	56	ITPK Baik
100	Kabupaten Kubu Raya	56	ITPK Baik
101	Kabupaten Banjar	62	ITPK Baik
102	Kabupaten Tanah Bumbu	57	ITPK Baik
103	Kota Banjarbaru	60	ITPK Baik
104	Kota Banjarmasin	63	ITPK Baik
105	Kabupaten Katingan	54	ITPK Baik
106	Kota Palangka Raya	54	ITPK Baik
107	Kota Balikpapan	59	ITPK Baik
108	Kota Bontang	57	ITPK Baik
109	Kota Samarinda	55	ITPK Baik
110	Kota Tarakan	55	ITPK Baik
111	Kabupaten Gorontalo	52	ITPK Baik
112	Kabupaten Gorontalo Utara	52	ITPK Baik
113	Kabupaten Pohuwato	52	ITPK Baik
114	Kota Gorontalo	52	ITPK Baik
115	Kabupaten Majene	51	ITPK Baik
116	Kabupaten Mamuju	51	ITPK Baik
117	Kabupaten Kolaka	58	ITPK Baik
118	Kabupaten Wakatobi	58	ITPK Baik
119	Kota Bau-Bau	51	ITPK Baik
120	Kabupaten Banggai	52	ITPK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
121	Kabupaten Morowali	52	ITPK Baik
122	Kabupaten Morowali Utara	52	ITPK Baik
123	Kabupaten Parigi Moutong	52	ITPK Baik
124	Kabupaten Sigi	52	ITPK Baik
125	Kota Palu	52	ITPK Baik
126	Kabupaten Minahasa	56	ITPK Baik
127	Kabupaten Minahasa Selatan	56	ITPK Baik
128	Kabupaten Minahasa Utara	56	ITPK Baik
129	Kota Bitung	56	ITPK Baik
130	Kota Kotamobagu	56	ITPK Baik
131	Kota Manado	56	ITPK Baik
132	Kota Tomohon	56	ITPK Baik
133	Kabupaten Kepulauan Aru	64	ITPK Baik
134	Kabupaten Maluku Tengah	66	ITPK Baik
135	Kabupaten Maluku Tenggara	68	ITPK Baik
136	Kota Ambon	65	ITPK Baik
137	Kota Tual	65	ITPK Baik
138	Kabupaten Maybrat	51	ITPK Baik
139	Kabupaten Sorong	51	ITPK Baik
140	Kota Sorong	51	ITPK Baik

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya yaitu:
1. Penerapan Pedoman Pengukuran Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
2. Penyelesaian Segmen Batas,
3. Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi dan Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau,
4. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan,
5. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik,
6. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan
7. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan.

Adapun capaian dari masing-masing komposit Indeks Tata Kelola Kewilayahan sebagai berikut:
1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik
   Pengukuran Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan kepada 34 Provinsi, dengan hasil penilaian sebagai berikut:
   a. Sebanyak 2 Provinsi dengan predikat Istimewa (Nilai >90),
   b. Sebanyak 1 Provinsi dengan predikat Sangat Baik (Nilai 80 – 90),
   c. Sebanyak 10 Provinsi dengan predikat Baik (Nilai 70 – 80),
   d. Sebanyak 3 Provinsi dengan predikat Cukup Baik (Nilai 60 – 70),
   e. Sebanyak 8 Provinsi dengan predikat Cukup (Nilai 50 – 60),
   f. Sebanyak 7 Provinsi dengan predikat Buruk (Nilai 40 – 50), dan
   g. Sebanyak 3 Provinsi dengan predikat Sangat Buruk (0 – 30).

Tabel 3.73
Daftar Kinerja GWPP Per Provinsi

No	Provinsi	Nilai	Predikat
1	Aceh	73,70	Baik
2	Sumatera Utara	36,94	Buruk
3	Sumatera Barat	90,11	Istimewa
4	Riau	59,85	Cukup
5	Kepulauan Riau	45,96	Buruk
6	Jambi	48,82	Buruk
7	Sumatera Selatan	47.19	Buruk
8	Bengkulu	54,77	Cukup
9	Kep. Bangka Belitung	82,60	Sangat Baiik
10	Lampung	55,15	Cukup
11	DKI Jakarta	73,48	Baik
12	Banten	43,12	Buruk
13	Jawa Barat	90,02	Istimewa
14	Jawa Tengah	69,77	Cukup Baik
15	D.I Yogyakarta	71.40	Baik
16	Jawa Timur	24,44	Sangat Buruk
17	Bali	57,72	Cukup
18	NTB	62,64	Cukup Baik
19	NTT	75,35	Baik
20	Kalimantan Timur	25,24	Sangat Buruk
21	Kalimantan Selatan	27,70	Sangat Buruk
22	Kalimantan Barat	79,21	Baik
23	Kalimantan Tengah	70,03	Baik
24	Kalimantan Utara	77,23	Baik
25	Sulawesi Utara	79,40	Baik
26	Sulawesi Barat	62,91	Cukup Baik
27	Sulawesi Tengah	59,91	Cukup
28	Sulawesi Selatan	75,19	Baik
29	Sulawesi Tenggara	51,38	Cukup
30	Gorontalo	57,98	Cukup
31	Maluku	78,60	Baik
32	Maluku Utara	43,02	Buruk
33	Papua	37,42	Buruk
34	Papua Barat	55,92	Cukup

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

a. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP untuk masing-masing unit kerja perangkat GWPP pada awal tahun anggaran.
b. Sosialisasi dan pendampingan satker dalam penginputan evidence kinerja melalui Sistem Informasi Pelaporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (SIPGWPP).
c. Penyampaian surat kepada GWPP terkait dengan percepatan penyampaian evidence kinerja melalui SIPGWPP.
d. Pelibatan Unit Kerja Eselon (UKE) I pembina yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP dalam proses verifikasi dan penilaian kinerja GWPP.

2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial

   Berdasarkan hasil perhitungan 514 Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, didapati hasil penialain sebagai berikut:

   a. Sebanyak 396 daerah kabupaten/kota atau sebesar 71,79% sudah terintegrasi segmen batas (polygon) dan rupabumiya dengan Geospasial.
   b. Sebanyak 145 daerah kabupaten/kota atau sebesar 28,21% belum terintegrasi segmen batas (polygon) dan rupabumiya dengan Geospasial.

Tabel 3.74
Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
1	Aceh	23	23	-
2	Sumatera Utara	33	24	4
3	Sumatera Barat	19	15	4
4	Riau	12	6	6
5	Kepulauan Riau	7	7	-
6	Jambi	11	7	4
7	Sumatera Selatan	17	11	6
8	Bengkulu	10	10	-
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	-
10	Lampung	15	11	4
11	DKI Jakarta	6	-	6
12	Banten	8	8	-
13	Jawa Barat	27	27	-
14	Jawa Tengah	35	35	-
15	D.I Yogyakarta	5	5	-
16	Jawa Timur	38	36	2
17	Bali	9	9	-
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	2
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	-
20	Kalimantan Timur	10	3	7
21	Kalimantan Selatan	13	7	6
22	Kalimantan Barat	14	5	9
23	Kalimantan Tengah	14	4	10
24	Kalimantan Utara	5	1	4
25	Sulawesi Utara	15	15	-
26	Sulawesi Barat	6	1	5
27	Sulawesi Tengah	13	12	1
28	Sulawesi Selatan	24	1	23
29	Sulawesi Tenggara	17	6	11
30	Gorontalo	6	6	-
31	Maluku	11	11	-
32	Maluku Utara	10	10	-

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
33	Papua	9	7	2
34	Papua Barat	7	1	6
35	Papua Selatan	4	1	3
36	Papua Tengah	8	4	4
37	Papua Pegunungan	8	0	8
38	Papua Barat Daya	6	3	3
Jumlah		**514**	**396**	**145**
%			**71,79%**	**28,21%**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

a. Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
b. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Penegasan Batas Antar Daerah.
c. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan Oleh Kabupaten/Kota.
d. Fasilitasi dan identifikasi wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di wilayah perbatasan antar negara.
e. Penyusunan Rumusan Kebijakan Batas Daerah.
f. Pengintegrasian data wilayah administrasi pemerintahan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu:

a. Mendorong penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri batas daerah yang telah berproses penerbitannya sejak tahun 2021 (73 Ranpermendagri + 55 Ranpermen menunggu izin prakarsa).
b. Penyelesaian 31 segmen batas daerah yang masih belum selesai ditegaskan, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
c. Finalisasi penyelesaian segmen batas daerah di luar 31 segmen (segmen anulir kesepakatan, revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri batas daerah).
d. Penyelesaian penegasan batas kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Laut Provinsi, serta penyamaan persepsi rancangan dan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
e. Supervisi penegasan batas kecamatan dan kelurahan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
f. Penyusunan pedoman Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan, sosialisasi Pedoman dan fasilitasi supervisi Pemerintah kabupaten/kota dalam Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan sebagai tindak lanjut pasca penegasan batas daerah oleh kabupaten/kota.
g. Perlu pengkajian ulang keberadaan wilayah administrasi pulau seperti identifikasi, verifikasi, dan validasi bersama K/L terkait akibat dari pemekaran wilayah dan penyelesaian segmen batas daerah terkait dengan wilayah administrasi pulau.
h. Perlu adanya integrasi data wilayah administrasi pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama terhadap K/L terkait.
i. Percepatan integrasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan K/L terkait dan pembinaan pengelolaan pulau pulau kecil.
j. Perlu dilakukan pemutakhiran data Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dikarenakan adanya usulan dari pemerintah daerah terkait perbaikan redaksional dan usulan pemekaran.

3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik

   Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengukuran Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik kepada 31 Kabupaten/Kota dengan menggunakan indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator untuk Kota Cerdas. Berdasarkan penentuan kategori sebagaimana perhitungan Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik tersebut dapat dijelaskan capaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, sebagai berikut:

   a. Sebanyak 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Optimalisasi dengan nilai 81%-100% (M5).
   b. Sebanyak 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Kapabilitas ekosistem solusi cerdas (interoperabilitas) dengan nilai 61%-80,99% (M4).
   c. Sebanyak 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat

Kematangan Kota tahap Pengoperasian ekosistem solusi pintar dengan nilai 41%-60,99 (M3).

d. Sebanyak 3 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Pengembangan ekosistem solusi pintar dengan nilai 31%-40,99% (M2).

e. Sebanyak 28 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Perencanaan ekosistem solusi pintar dengan nilai 10%-30,99% (M1).

f. Sebanyak 0 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Desk Evaluation dengan nilai 0%-9,99% (M0).

Tabel 3.75
Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Kabupaten/Kota

No	Kab./Kota	Nilai	
1	Kab. Hulu Sungai Selatan	M1	15,66
2	Kota Yogyakarta	M1	12,42
3	Kota Batam	M1	10,87
4	Kota Surakarta	M1	11,3
5	Kota Semarang	M1	25,75
6	Kab. Labuhanbatu	M1	27,75
7	Kab. Indragiri Hulu	M1	11,08
8	Kab. Boyolali	M1	10,79
9	Kota Bukittinggi	M1	11,32
10	Kab. Belitung	M1	11,52
11	Kota Surabaya	M1	12,10
12	Kab. Bulungan	M1	20,32
13	Kota Tangerang Selatan	M1	10,49
14	Kab. Rembang	M1	13,84
15	Kab. Banyumas	M2	35,23
16	Kab. Nias Utara	M1	20,05
17	Kab. Karang Asem	M1	18,51
18	Kab. Demak	M1	13,91
19	Kab. Cilacap	M1	25,3
20	Kab. Sukoharjo	M2	40,4
21	Kab. Tanjung Jabung Barat	M1	15,85
22	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	M1	11,74
23	Kota Blitar	M1	26,57
24	Kab. Bangka Tengah	M1	13,24
25	Kab. Trenggalek	M2	31,66
26	Kota Pariaman	M1	16,5
27	Kota Madiun	M1	14,09
28	Kab. Maros	M1	10,88
29	Kab. Gresik	M1	11,37
30	Kab Probolinggo	M1	18,15
31	Kab. Banjar	M1	16,25

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan pada tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melaksanakan maturasi perkotaan sebagai pemenuhan target Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik dengan menggunakan indikator SNI ISO 37120 Perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan — Indikator-indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup, SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas, dan SNI ISO 37123 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan - Indikator kota Tangguh sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.

4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu
   Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengukuran Daerah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu kabupaten/kota di 33 Provinsi dan diperoleh sebanyak 225 Kabupaten/kota telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terpadu dan terintegrasi atau sekitar 44,29% dari 508 total kabupaten/kota.

   Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:
   a. Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik dilakukan melalui rapat koordinasi di provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Bali.
   b. Pendelegasian kewenangan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka kemudahan berusaha dan transparansi penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
   c. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dalam penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan dengan penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Perizinan dan penguatan regulasi jabatan fungsional penata perizinan.
   d. Penguatan kelembagaan dengan memangkas rentang kendali birokrasi dalam pencapaian ekpetasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi yang menghilangkan jabatan administrasi dalam dua level (jabatan administrator dan jabatan pengawas).

   Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu:
   a. Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik.
   b. Koordinasi dan Supervisi Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
   c. Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
   d. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PTSP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka pelaksanaan asas desentralisasi, berubah perannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kewilayahan. Kecamatan yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Tugas Atributif dan Tugas Delegatif. Adapun tugas delegatif diberikan oleh bupati/wali kota terhadap sebagian kewenangannya untuk dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan khususnya dalam hal pelayanan publik.

   Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah melakukan perhitungan indeks kinerja kecamatan Tahun 2023 terhadap 1.467 Kecamatan di 114 kabupaten/kota pada 10 provinsi daerah target dengan hasil sebagai berikut:
   a. Sebanyak 14 Kecamatan berkinerja sangat baik.
   b. Sebanyak 1092 Kecamatan berkinerja baik.
   c. Sebanyak 361 Kecamatan berkinerja kurang baik.

Tabel 3.76
Rekapitulasi Kecamatan sesuai kategori Indeks Kinerja Kecamatan Tahun 2023

Provinsi	Jumlah Kecamatan		
	Berkinerja Sangat Baik	Berkinerja Baik	Berkinerja Kurang Baik
Aceh	0	157	114
Jambi	0	123	21
Lampung	0	152	68
Banten	0	135	20
Bali	0	57	0
Kalimantan Selatan	7	117	22
Kalimantan Timur	0	85	20
Sulawesi Tenggara	7	125	50
Sulawesi Barat	0	53	16
Maluku	0	88	30
Total	**14**	**1.092**	**361**

Secara garis besar, total jumlah Kecamatan dengan kategori berkinerja baik pada Tahun 2022 dan 2023 adalah 1.830 kecamatan atau sebesar 25,14% dari total keseluruhan Kecamatan di Indonesia. Target Kecamatan berkinerja baik sebanyak 15% dari total 7.277 Kecamatan pada tahun 2023 berhasil tercapai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

a. Rapat Kerja Nasional Camat Tahun 2023 dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kegiatan dimaksud berfokus pada penguatan peran camat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, pemberdayaan desa, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tangkat kecamatan.
b. Rapat Sosialisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1-D Frontline Service Delivery. Rapat dimaksud mengundang 60 Bupati pada 10 Provinsi di Indonesia yang sekaligus menjadi wadah penyampaian kewajiban pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagai salah satu solusi penguatan peran Kecamatan.

Dalam proses pencapaian keberhasilan kinerja Tahun 2023, terdapat beberapa kendala, yaitu:

a. Kurangnya sumber daya manusia dalam aspek kuantitas di tingkat pemerintah pusat untuk dapat melakukan asistensi secara mendalam terhadap daerah target.
b. Sistem Informasi yang telah dibangun yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelurahan (SIMPEL) yang merupakan tools (alat) kerja mengalami peretasan, hingga akhir tahun 2023 SIMPEL belum dapat diakses. Hal ini menyebabkan terkendalanya jalur komunikasi dan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga harus dilakukan secara manual.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
   Berdasarkan rekapitulasi jumlah pegawai pada Subbag Kepegawaian Bagian Umum, total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2023 sejumlah 348 pegawai yang terdiri dari 251 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
2. Sarana dan Prasarana
   Adapun sumber daya yang dimiliki dalam mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil tahun 2023 yaitu seperti Peralatan dan Mesin sejumlah 4.140 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, aset Tetap Lainnya sebanyak 22 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, dan Aset tetap yang tidak digunakan sebanyak 138 unit buah/unit saldo per 31 Desember 2023. Setiap penjabaran sumber daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran 10 :

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 dan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu reformasi birokrasi.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/ atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Adapun tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai secara nasional dan termasuk di internal Kementerian Dalam Negeri. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang terarah dan termanajemen baik dari dalam maupun luar Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri"** diperoleh **sebesar 100%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil,** sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01	Nilai 84,19	101,42%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**101,42%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional, dan perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan
3. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintah.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai target tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 91,01 atau kategori A yang diharapkan berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%, akan tetapi dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan dilakukan perubahan komponen penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga terjadi penurunan target menjadi 83,01. Penurunan target terlampir pada Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Nomor 000.9/6/310/Ortala hal Penyampaian usulan perubahan indikator yang berkaitan dengan penilaian Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dilandasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu dilakukan penyesuaian Road Map di internal Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1341 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Beberapa penyesuaian tersebut diantaranya:

1. Penyesuaian Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB sesuai Road Map RB Nasional yang harapannya mampu menjawab isu strategis internal, nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan internal Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

Pada Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,19. Instrumen Evaluasi pada Tahun 2023 menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Birokrasi Tahun 2023. Pada komponen penilaian RB General, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 76,63 dari total bobot RB General 100,00 dan pada komponen penilaian RB Tematik, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 7,56 dari total bobot RB Tematik sebesar 10,00 sehingga Total Nilai RB Kementerian Dalam Negeri adalah 84,19. Adapun perhtungan menggunakan formula Pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.78
Komponen dan Bobot perhitungan nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023

Komponen	Bobot
RB General	76,63
RB Tematik	7,56
Total Nilai	84,19
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	76,63
Indeks RB	**84,19**

Grafik 3.25
Indeks RB Kemendagri Tahun 2021 - 2023

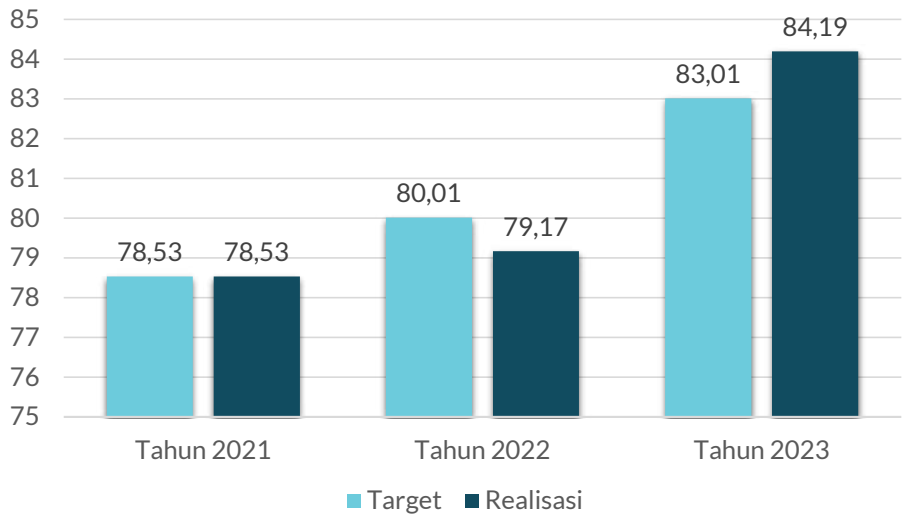

Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar nilai 5,02. Peningkatan tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan penilaian tahun sebelumnya dikarenakan menggunakan regulasi dan aspek penilaian yang berbeda. Dan jika membandingkan tahun 2022 dengan tahun 2021, terdapat peningkatan kualitas hasil antara pada seluruh hasil antara. Penilaian hasil antara pada Kementerian Dalam Negeri yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu Indeks Reformasi Hukum. Penilaian Kualitas Kebijakan tidak dilakukan penilaian pada tahun 2022. Secara keseluruhan hasil antara Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, membagi menjadi dua fokus pelaksanaan RB. Dua fokus yang dikenal dengan 'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Instrumen Evaluasi Eksternal oleh Evaluator Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Birokrasi Tahun 2023, Formula Rumusan Pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.79
Formula Rumusan Pengukuran Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023

Penilaian			Bobot	Range Nilai
RB General			100,00	
A.	Strategi Pelaksanaan RB General		10,00	
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0 -100
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0 - 100
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		40,00	
	Hard Element (Sasaran 1)		33,00	
		Kebijakan Percepatan	33,00	
	1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0 - 100
	2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0 - 5
	3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1 - 5
	4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0 - 3
	5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4,00	0 - 100
	6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0 - 100
	7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00	0 - 5
	8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0 - 100
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0 - 100
	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	0 - 100
	11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1 - 5
	12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0 - 100
	13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0 - 100
	14.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1 - 5
	15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0 - 100
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		7,00	
		Kebijakan Percepatan	7,00	
	1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0 - 400
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00	
		a. Indeks Pelayanan Publik	1,50	0 - 5
		b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0 - 100
		c. Capaian Sasaran Strategis RB	50,00	
		Hard Element (Sasaran 1)	28,00	
	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	0 - 5

Penilaian			Bobot	Range Nilai
	2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00	
		a. Capaian Prioritas Nasional	2,00	0 - 100
		b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8,00	0 - 100
	3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut
		a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP - WDP - TW - TMP
		a. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0 - 100
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		22,00	
	1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0 - 100
	2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0 - 100
	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0 - 100
	NILAI RB General Sebelum Koefisien		100,00	
	KOEFISIEN			
	TOTAL RB GENERAL			
RB Tematik			10,00	
A	Capaian RB Tematik			
	1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0 - 100
	2.	Realisasi Investasi	2,00	0 - 100
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0 - 100
	4.	Prioritas Aktual Presiden		
		a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0 - 100
		b. Pengendalian Inflasi	2,00	0 - 100
TOTAL RB TEMATIK			10,00	
TOTAL NILAI RB			110,00	

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh beberapa aspek, antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada aspek tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri mendapatkan Indeks sebesar 3,64 dengan kategori sangat baik.
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja terhadap target indikator Prioritas Nasional (PN).
   Berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor B/52/AA.05/2023, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa nilai sebesar 75,90 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan terhadap dua hal yaitu opini BPK dan tindak lanjut rekomendasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 34/S/VII/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 kembali berhasil mendapatkan opini WTP yang kesembilan kalinya.
4. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi terhadap jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan.
5. Pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai.
6. Indeks Pelayanan Publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

7. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri mendapatkan Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,354.
8. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
9. Nilai SAKIP dalam mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN.
10. Indeks Perencanaan Pembangunan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja ditandai dengan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.
11. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dalam kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE.
12. Tingkat digitalisasi arsip dalam rangka transformasi digital kearsipan yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital.
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam meningkatkan kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
14. Indikator Pengelolaan Aset dalam mewujudkan implementasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel dan produktif.
15. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan melalui SP4N-LAPOR!.
16. Indeks Kualitas Kebijakan dalam meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik.
17. Indeks Reformasi Hukum dalam meningkatkan kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi.
18. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral ditandai dengan penataan pada kebijakan statistik sektoral, tata kelola statistik sektoral, Manajemen penyelenggaraan statistik sektoral.
19. Indeks Tata Kelola Pengadaan dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa dan tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional.
20. Nilai Survei Penilaian Integritas dalam meningkatkan integritas organisasi untuk keberhasilan memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
21. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dilakukan dengan melaksanakan Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dari Eksternal.
22. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK dalam meningkatkan implementasi core values ASN BerAKHLAK.
23. Nilai Survei Employer Branding dalam mengukur tingkat ketertarikan masyarakat (Non-ASN) untuk bergabung menjadi ASN.
24. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem merit.
25. Indeks Pelayanan Publik dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan upaya implementasi agenda Reformasi Birokrasi Tematik, antara lain:

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Hilirisasi Stunting)
4. Pengendalian Tingkat Inflasi
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mengintegrasikan rencana aksi perubahan, untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan, serta mengukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkelanjutan;
2. Menetapkan Quickwins pada level Kementerian, agar fokus pencapaian Quickwins;
3. Melakukan Regulatory Impact Assessment untuk memastikan kebijakan memberi dampak kepada stakeholder, perbaikan pada proses bisnis dan layanan utama kementerian serta memastikan pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan implementasi kebijakan sistem kerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, serta mereviu penilaian individu dan integrasi dengan SKP;
5. Mendorong pemetaan dan pengintegrasian sistem aplikasi, untuk memastikan sistem aplikasi yang dibangun dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan secara berkelanjutan;
6. Melakukan reviu kinerja pegawai dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja pegawai tersebut menunjang kinerja organisasi;
7. Mendorong penyelesaian pembangunan Aplikasi SIRIKA, untuk mempermudah pemantauan capaian kinerja berkala hingga unit kerja;
8. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja; dan
9. Meningkatkan sosialisasi aplikasi SIOLA kepada pengguna layanan, terutama pemerintah daerah, agar semakin dimanfaatkan oleh pengguna layanan, serta mempercepat integrasi dengan seluruh unit kerja.

Adapun Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan , sebagai berikut:

1. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1342 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-88 tahun 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023-2024 dan diikuti dengan penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri dari 12 Satuan Kerja di Lingkungan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
2. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1-6132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-87 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
3. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.1-86 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
4. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1341 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Action Plan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 000.9.5-83 tahun 2023 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

6. Implementasi kebijakan terkait dengan sistem kerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi sudah didukung dengan penetapan pedoman internal, namun pelaksanaan penilaian dan integrasi dengan SKP masih belum berjalan dengan optimal;
7. Kementerian Dalam Negeri ikut berperan dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dengan menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3764/SJ tentang percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Bersama dengan KPK, dan seluruh Kepala Daerah Pemerintah Daerah ikut berperan terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk implementasi pengawasan dan pencegahan korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area intervensi dalam tata kelola pemerintahan daerah;
9. Membangun sistem aplikasi sebagai pembina Pemerintah Daerah meliputi perencanaan, keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pemantauan capaian SPM (Pelaporan SPM), pemantauan pelaksanaan DAK (Binwasdak), pelaporan LPPD (SILPPD), sistem informasi profil desa dan kelurahan (PRODESKEL), fasilitasi terhadap produk hukum daerah (e-PERDA) serta aplikasi terkait keuangan daerah melalui E-BUMD, E-BLUD, dan E-BMD;
10. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Aktivasi Budaya Kerja Kemendagri BerAKHLAK "Generation Of Change, Pelaksanaan kegiatan leader alignment session sebagai salah satu langkah transformasi budaya kerja BerAKHLAK ditindaklanjuti dengan workshop change leader dan change agent, serta diselenggarakannya kegiatan Kemendagri BerAKHLAK Award dan penghargaan kepada Agent Of Change;
11. Melakukan reviu kinerja pegawai dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja pegawai tersebut menunjang kinerja organisasi;
12. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap evaluasi pelayanan publik Tahun 2023;
13. Pengaduan Kementerian Dalam Negeri berbasis elektronik melalui Sarana Pengaduan masyarakat dan Pengaduan layanan melalui Website Kementerian Dalam Negeri lapor.Kemendagri.go.id dan ula.Kemendagri.go.id;

Tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjamin ketercapaian target Indeks Reformasi Birokrasi tersebut ditandai dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-88 Tahun 2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023-2024 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku pengarah dan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri terbagi atas 8 (delapan) Pokja, yaitu Manajemen Perubahan (Pokja I), Deregulasi kebijakan (Pokja II), Penataan dan Penguatan Organisasi (Pokja III), Penataan Tatalaksana (Pokja IV), Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Pokja V), Penguatan Akuntabilitas (Pokja VI), Penguatan Pengawasan (Pokja VII), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja VIII). Hal ini menggambarkan komitmen langsung dari pimpinan untuk mengawal ketercapaian target Indeks Reformasi Birokrasi baik dari lingkup kementerian hingga lingkup satuan kerja.

Sasaran 11 :

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel dan berintegritas.

Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai fungsi maupun sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas meliputi Indeks Pengawasan Internal dan Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting maka diharapkan akan terwujudnya visi yakni "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Capaian kinerja sasaran strategis **"Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas"** diperoleh **sebesar 89,90%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sedang** atau **kategori Cukup Berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil dan 1 (satu) indikator dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.80
Capaian Kinerja Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 Sangat Baik	Nilai 91,18	91,18%	Tinggi/Berhasil
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 Baik	Nilai 73,55	88,61%	Sedang/Cukup Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**89,90%**	**Sedang/Cukup Berhasil**

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri. Indeks Pengawasan Internal membantu dalam menilai kualitas dan efektivitas pengendalian intern. Indeks ini dapat membantu dalam menentukan apakah sistem dan prosedur pengendalian intern sudah berfungsi dengan baik. selain itu, Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait tingkat efektivitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal secara spesifik dalam menjalakan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Pengawasan Internal dihitung dengan memperhatikan opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Dalam Negeri, persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) APIP Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta nilai kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran terhadap indikator ini merupakan pengukuran terhadap hasil dan dampak dari pengendalian dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh APIP. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. BPK RI (Opini laporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%),
2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%),
3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%),
4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%),
5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%).

Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

Indeks Pengawasan Internal Tahun 2023 telah tercapai sebesar nilai 91,18 dengan predikat sangat baik, dari target sebesar Nilai 100.

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
   Opini Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Capaian tersebut juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan mempresentasikan posisi keuangan yang yang baik. Pencapaian ini secara tidak langsung juga merupakan andil dari Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam melakukan pengawasan intern dalam hal pemeriksaan keuangan dan kinerja, reviu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.
2. Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri
   SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian SAKIP merupakan bagian dari penilaian capaian reformasi birokrasi. Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar 75,90 (BB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai 75,90 dengan bobot penilaian 20% atau hasil indeks 15,18.
3. Nilai Maturitas SPIP Kemendagri
   Sejak Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP memiliki peran yang sangat penting bahkan terus berkembang dalam kerangka pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selaras dengan tujuan SPIP, terdapat isu strategis terkait akuntabilitas dimana berdasarkan data BPK Tahun 2023 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas. Sehingga arah kebijakan dan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Terhadap seluruh upaya yang dilakukan, sampai dengan Tahun 2023, Nilai maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencapai Level 3 atau mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau hasil indeks 20.

4. Persentase Penyelesaian TLHP APIP Kementerian Dalam Negeri dan BPK
   Capaian persentase TLHP atas Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri secara tuntas atau 100%. Namun demikian, terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pada Tahun 2022, terdapat 3 temuan dengan 6 rekomendasi yang belum terdapat tindaklanjut atas 6 rekomendasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai indeks 80 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 16.
5. Nilai Kapabilitas APIP
   Nilai Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2023, memberikan hasil Level 3 untuk kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri atau mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20.

Capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan Internal Tahun 2023 sebesar 91,18%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.085.249.000,- telah terealisasi sebesar Rp.4.085.244.000 ,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tesedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 diantaranya yaitu dipertahankannya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, komitmen unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diasistensi oleh Inspektorat Jenderal juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa pencapaian lainnya yang tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan yakni Kapabilitas APIP menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi capaian indikator Indeks Pengawasan Internal.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Internal, diantaranya:

1. Mengakomodir aktivitas pengawasan internal secara memadai dalam dokumen Perencanaan Pengawasan setiap tahun yang mencakup pengawasan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mengoptimalkan pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Reviu Laporan Kinerja serta monitoring dan evaluasi secara periodik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mamastikan akuntabilitas dan efektifitas pelaksaan program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri tetap terjaga.
2. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan Unit Kerja Eselon (UKE) I sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat Jenderal berperan sebagai APIP diharapkan mampu menjadi proteksi dini (early protection) terhadap penyimpangan dan praktek-praktek koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dalam melaksanakan perannya, Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi untuk mengakomodir pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dimaksud merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping upaya penindakan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus atau investigasi yang diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan khusus dalam penanganan pengaduan dan indikasi penyimpangan atau potensi kasus yang berhubungan dengan aparat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dihitung dengan memperhatikan persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya dan persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif; dan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 telah tercapai nilai 73,55 atau 88,61% dari target sebesar 83. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (Bobot 40%)
2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot 40%)
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%)
4. Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot.
5. Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100

Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot.

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).

1. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya.

   Salah satu kinerja penanganan pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya. Sepanjang Tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima sebanyak 564 pengaduan yang secara keseluruhan telah ditangani, dengan rincian:

   a. Dilimpahkan sebanyak 53 pengaduan.
   b. Dikoordinasikan sebanyak 18 pengaduan.

c. Dilakukan pemeriksaan klarifikasi/pemeriksaan khusus sebanyak 43 pengaduan.
d. Diarsipkan sebanyak 53 pengaduan.
e. Dalam proses analisa sebanyak 397 pengaduan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan persentase penanganan pengaduan masyarakat mencapai 100% dengan bobot penilaian 40% atau dengan hasil indeks 40.

2. Persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif.
   Sepanjang Tahun 2023, jumlah penanganan pengaduan yang telah selesai sebanyak 167 pengaduan dan yang ditangani melalui pemeriksaan klarifikasi/pemeriksaan khusus yang telah mengandung unsur sebanyak 43 pengaduan. Dengan demikian, dapat disimpulkan pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif mencapai nilai 33,87 dengan bobot penilaian 40% atau hasil indeks 13,55.
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi
   Sampai dengan Tahun 2023, data tindak lanjut atas pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigatif sejumlah 43 pengaduan yang telah seluruhnya ditindaklanjuti. Dengan demikian, dapat disimpulkan persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau degan hasil indeks 20.

Faktor yang menjadi penyebab pencapaian Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 diantaranya dengan diperbaharuinya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Disamping itu, penambahan jumlah sumber daya manusia yang menangani pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif juga berdampak secara langsung terhadap peningkatan capaian kinerja.

Analisis Efektifitas dan Realisasi Anggaran indikator Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 sebesar 88,61%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.455.676.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.459.824.134,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tesedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan Sistem Informasi penanganan pengaduan masyarakat (e-Dumas) sebagai upaya untuk memudahkan akses masyarakat dan pihak terkait dalam menyampaikan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia APIP di lingkungan Inspektorat Khusus yang secara langsung mengemban tugas penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif melalui Pendidikan dan pelatihan investigatif, pelatihan penanganan pengaduan dan lain sebagainya.

Sasaran 12 :

Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Kementerian Dalam Negeri sangat strategis dalam mewujudkan Pemerintahan Dalam Negeri khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun strategi kebijakan dengan melihat ragam permasalahan yang terjadi di daerah, memperhatikan perkembangan teknologi baik di Indonesia maupun terhadap Isu Global, atau isu-isu aktual lainnya. Hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri khususnya terkait pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi perbaikan mulai dari proses perumusan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri"** diperoleh **sebesar 120%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat **Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil,** sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.81
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	56,25%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				**120%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas BSKDN adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (Unit Kerja Eselon/ UKE I) di lingkup Kementerian Dalam Negeri, berupa disposisi Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri Dari 16 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sepanjang tahun 2023.

Indikator Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 merupakan hasil penyesuaian nomenklatur yang semula merupakan indikator Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini menyebabkan penyesuaian target yang semula dalam dokumen Rencana Strategis sebesar 60% menjadi 40%. Penyesuaian target ini telah tertuang dalam dokumen usulan revisi Rencana Strategis,

Tabel 3.82
Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)

	Policy Brief	Kajian Strategis	Lokakarya	Kirstranas
Jumlah Rekomendasi	9	4	2	1

BSKDN Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran sebagai unit kerja yang dapat memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang tepat guna. Dalam mewujudkan peran tersebut, BSKDN melakukan koordinasi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan rapat koordinasi penyusunan program dan Rapat Koordinasi Nasional BSKDN dalam rangka menjaring isu-isu strategis yang dibutuhkan masing-masing UKE I Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan rekomendasi kebijakan melewati proses strategis demi menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia terutama untuk jabatan Analis Kebijakan. Dengan tercapainya target kinerja indikator BSKDN dalam rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri melalui arahan disposisi kepada pemangku kepentingan, menunjukkan pemenuhan peran BSKDN sebagai komponen yang mendukung seluruh UKE I Kementerian Dalam Negeri.

Capaian indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil strategi kebijakan yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sepanjang tahun 2023 BSKDN telah menghasilkan 16 rekomendasi kebijakan strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. 9 rekomendasi Policy Brief/Forum Diskusi Aktual, antara lain :
   a. Policy Brief Strategi Pemerintah Daerah dalam Efisiensi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Surat Rekomendasi Nomor.200/4307/BSKDN, Tanggal 16 Agustus 2023).
   b. Policy Brief Upaya Pencegahan Politisasi Lembaga Pendidikan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Surat Rekomendasi Nomor 200.1/5935/BSKDN, Tanggal 3 November 2023).
   c. Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6332/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
   d. Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6334/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
   e. Antisipasi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 (Surat Rekomendasi Nomor 200,2/6333/BSKDN 30 November 2023)
   f. Optimalisasi Pelaksanaan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Daerah (Surat Rekomendasi Nomor 500.3/4771/BSKDN, Tanggal 11 September 2023).
   g. Penerapan Family Book sebagai dokumen Kependudukan (Surat Rekomendasi Nomor 400.8/5099/BSKDN, Tanggal 26 September 2023).
   h. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata di Daerah (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/3552/BSKDN, Tanggal 7 Juli 2023).
   i. Problematika Penyusunan Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Desa (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/3553/BSKDN, Tanggal 7 Juli 2023).
2. 4 rekomendasi Kajian Strategis, antara lain:
   a. Analisis dinamika Persoalan Kinerja Pemerintahan Desa (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/5193/BSKDN, Tanggal 3 Oktober 2023).
   b. Kajian Strategis Penentuan Indikator Penilaian Kota Bersih (Surat Rekomendasi Nomor 600/6256/BSKDN, Tanggal 24 November 2023).
   c. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6335/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
   d. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6335/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
3. 2 rekomendasi Lokakarya, antara lain :
   a. Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/2048/BSKDN, Tanggal 26 April 2022)
   b. Lokakarya Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Banjir ROB (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/2334/BSKDN, Tanggal 8 Mei 2023).
4. 1 rekomendasi Kirstranas, antara lain :
   a. Proyeksi/Perkiraan Strategik Penggunaan Fungsi Intelejen Pemerintahan Dalam Negeri dalam Penguatan Kapasitas Pusat dan Daerah (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6367/BSKDN, Tanggal 4 Desember 2023).

Penelaahan mendalam atas implementasi dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintah daerah menghasilkan 9 (sembilan) rekomendasi yang mampu memperbaiki kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Analisis Dinamika Persoalan Kinerja Pemerintahan Desa
2. Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024
4. Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024
5. Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik
6. Antisipasi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024
7. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda
8. Strategi Pencegahan Konflik Sosial untuk Menyukseskan Pemilu 2024
9. Upaya Pencegahan Politisasi Lembaga Pendidikan pada Pemilu Serentak Tahun 2024

3.83
Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)

	Policy Brief	Kajian Strategis	Lokakarya	Kirstranas
Jumlah Rekomendasi	6	1	1	1

Selanjutnya, 9 (sembilan) hasil rekomendasi kebijakan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alternatif/ dasar perumusan kebijakan untuk diterapkan UKE I Kementerian Dalam Negeri sesuai disposisi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri antara lain:

1. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah.
2. Mengoptimalkan literasi bermedia sosial pada masyarakat dan penegakan sanksi terhadap penyebaran hoax.
3. Menyediakan regulasi dan mekanisme pelibatan politik aktif generasi muda.
4. Menetapkan standardisasi biaya Pilkada.

Adapun capaian indikator ini dapat dihitung dengan formula perhitungan, sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ dimanfaatkan\ oleh\ MDN\ ke\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ disampaikan\ kepada\ Mendagri}\ x\ 100\%$$

$$\frac{9\ Disposisi\ ke\ Pemangku\ Kpentingan}{16\ Rekomendasi}\ x\ 100\% = 56{,}25\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$\frac{56{,}25\%}{40\%}\ x\ 100\% = 140{,}63\%$$

Analisis dalam efisiensi penggunaan sumber daya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam mencapai target kinerja, diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah memaksimalkan jumlah fungsional statistisi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai 'Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi'. Selain sumber daya manusia, dibutuhkan juga dukungan dari sarana dan prasarana guna menunjang seluruh kegiatan seperti ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah berupaya semaksimal mungkin dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan organisasi guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dilihat melalui efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target dengan diraihnya realisasi kinerja yang melebihi target dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,44%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penjaringan isu strategis dan koordinasi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri.
2. Rapat koordinasi penyusunan program dan rapat koordinasi nasional BSKDN.
3. Melibatkan ormas/organisasi di luar Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan rekomendasi.

Analisis penyebab keberhasilan dalam menunjang pencapaian kinerja Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, didukung dan dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Kebijakan Strategi, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang tertuang pada program kegiatan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, jumlah rekomendasi seminar/ diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, jumlah rekomendasi perkiraan strategik nasional, hasil pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah, hasil pengukuran indeks tata kelola pemerintahan daerah, dan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

Pagu & Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2023 adalah sebesar Rp.2.981.302.990.000,-. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2023, Pagu Kementerian Dalam Negeri mengalami beberapa kali penambahan dan pengurangan anggaran hingga menjadi sebesar Rp.4.385.969.126.000,- dengan pokok perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.84
Penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

	PENAMBAHAN ANGGARAN
1	Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar: a. Rp.77.471.780.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Maret 2023). b. Rp. 5.079.968.000,- (terbit DIPA pada tanggal 25 September 2023). c. Rp. 7.437.718.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Desember 2023)
2	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar: a. Rp.3.675.702.000,- (terbit DIPA pada tanggal 3 April 2023). b. Rp.941.835.000,- (terbit DIPA pada tanggal 27 April 2023). c. Rp.1.216.749.000,- (terbit DIPA pada tanggal 28 Agustus 2023). d. Rp.3.808.068.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 November 2023).
3	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk kegiatan P3PD sebesar Rp.13.069.878.000,- (terbit DIPA pada tanggal 3 April 2023).
4	Rupiah Murni (RM) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp.66.253.233.000,- (terbit DIPA pada tanggal 8 Mei 2023).
5	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Direktorat Jenderal Bina Bangda Pemerintahan Desa sebesar: a. Rp.260.037.438.000,- (terbit DIPA pada tanggal 30 Mei 2023). b. Rp.698.542.751.000,- (terbit DIPA pada tanggal 6 September 2023).
6	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) a. BPSDM Pusat sebesar Rp.3.419.540.000,- (terbit DIPA pada tanggal 4 Oktober 2023). b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung sebesar: 1) Rp.1.245.383.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 Juli 2023). 2) Rp.1.343.167.000,- (terbit DIPA pada tanggal 29 Agustus 2023). 3) Rp. 642.409.000,- (terbit DIPA pada tanggal 27 Oktober 2023). 4) Rp. 274.185.000,- (terbit DIPA pada tanggal 30 November 2023). c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar sebesar: 1) Rp.1.592.788.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 Juli 2023). 2) Rp.1.142.849.000,- (terbit DIPA pada tanggal 24 Agustus 2023). 3) Rp. 241.971.000,- (terbit DIPA pada tanggal 9 November 2023). d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sebesar: 1) Rp.1.887.954.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Juli 2023). 2) Rp.3.913.998.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 September 2023). 3) Rp. 415.082.000,- (terbit DIPA pada tanggal 16 Oktober 2023). 4) Rp. 150.000.000,- (terbit DIPA pada tanggal 1 Desember 2023). e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar sebesar Rp.82.066.000,- (terbit DIPA pada tanggal 3 Oktober 2023).
7	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp.6.000.000.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 Juli 2023).

PENAMBAHAN ANGGARAN	
9	Hibah Luar Negeri (HLN) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar: a. Rp.3.169.326.000,- (terbit DIPA pada tanggal 25 September 2023). b. Rp.3.710.805.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Desember 2023).
10	Hibah Luar Negeri (HLN) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebesar Rp.1.044.105.000,- (terbit DIPA pada tanggal 4 Oktober 2023).
11	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp.2.111.405.000,- (terbit DIPA pada tanggal 17 November 2023).
12	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.300.920.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 November 2023).
13	Penambahan Belanja Pegawai dari BA BUN sebesar Rp.17.346.258.000,- (terbit DIPA pada tanggal 7 Desember 2023)
14	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.854.736.000,- (terbit DIPA pada tanggal 27 Desember 2023).
15	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.9.363.743.000,- (terbit DIPA pada tanggal 29 Desember 2023).

Tabel 3.85
Pengurangan Anggaran Tahun 2023

PENGURANGAN ANGGARAN	
1	Pengurangan Anggaran sebesar Rp.17.532.011.000,- berupa Realokasi Blokir Belanja Pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) terbit DIPA pada tanggal 1 Agustus 2023.

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Pagu Kemendagri TA.2023 sebesar Rp.4.385.969.126.000,- realisasi anggaran (unaudited) sebesar Rp.4.265.153.052.424,- atau 97,25% (Sumber data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan Tahun 2023), dengan rincian per Unit Kerja Eselon I, sebagai berikut:

Tabel 3.86
Pagu dan Realisasi Per Unit Kerja Eselon I Kemendagri Tahun 2023

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Inspektorat Jenderal	76.271.846.000	76.243.522.904	99,96
2	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	262.470.077.000	262.366.393.841	99,96
3	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	583.253.383.000	582.638.885.139	99,89
4	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	278.801.747.000	278.002.009.197	99,71
5	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.401.004.000	849.874.155.483	99,70
6	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	97.509.565.000	97.171.537.184	99,65
7	Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia	219.977.069.000	219.168.314.965	99,63
8	Sekretariat Jenderal	475.877.457.000	473.394.651.267	99,48
9	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	52.149.718.000	51.858.416.542	99,44
10	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	81.275.352.000	80.787.812.911	99,40
11	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	217.487.568.000	215.741.300.885	99,20
12	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	91.686.384.000	84.563.725.816	92,23
13	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	1.096.807.956.000	993.342.326.290	90,57
	Kemendagri	**4.385.969.126.000**	**4.265.153.052.424**	**97,25**

BAB IV
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/52/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri TA.2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 0,98 dibandingkan tahun lalu, yaitu yang semula sebesar 74,92 (BB) pada TA.2022 menjadi 75,90 (BB) pada TA.2023. Selain itu, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan kualitas Implementasi AKIP di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.

Catatan:

1. Perencanaan Kinerja
   a. Indikator kinerja yang telah dirumuskan baik pada tingkat kementerian maupun unit kerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut terdapat pada beberapa indikator, misalnya pada indikator "Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun", "Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil" dan "Jumlah database kependudukan yang update";
   b. Penetapan target kinerja dalam berbagai dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Catatan tersebut terjadi pada beberapa indikator, antara lain "Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)", "Indeks Kewaspadaan Nasional", dan "Persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan desa kategori nilai "Baik"; dan
   c. Pohon kinerja yang disusun baik pada tingkat kementerian maupun unit kerja belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) dalam proses penyusunannya.

2. Pengukuran Kinerja
   Dari segi pengukuran kinerja, masih terdapat beberapa indikator pada dokumen Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan tingkat kinerja dan belum berorientasi hasil, sehingga kualitas pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya menjadi ukuran ketercapaian kinerja yang tepat untuk menggambarkan ketercapaian kinerja yang ditetapkan

3. Pelaporan Kinerja
   Dari segi pelaporan kinerja, laporan kinerja unit kerja sudah memberikan perbandingan capaian kinerja tahunan, menyediakan informasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja dan telah memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan. Namun belum seluruh informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat dari masih terdapat penetapan target kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a. Hasil evaluasi AKIP internal tentang perbaikan dokumen perencanaan sebagian telah ditindaklanjuti melalui upaya perbaikan indikator perjanjian kinerja tahun 2023 di unit kerja. Namun demikian, belum sepenuhnya indikator kinerja telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART dan cukup;
   b. Evaluasi AKIP internal belum menguji keselarasan kinerja pada tingkat kementerian hingga individu untuk memastikan terkawalnya kinerja organisasi; dan
   c. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Unit Kerja secara signifikan.

5. Akuntabilitas Kinerja Tematik Penanggulangan Kemiskinan
   Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan memastikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan melakukan upaya sinkronisasi terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023;
   b. Pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan melalui pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah; dan
   c. Angka kemiskinan ekstrem per Maret tahun 2022 adalah 2,04% dan menurun pada September tahun 2023 menjadi 1,74%, hal ini menunjukan bahwa program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menunjukan hasil yang positif.

Rekomendasi:

1. Melanjutkan proses perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kementerian dapat terkawal dalam rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut;
2. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah agar dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai alat pertimbangan dalam perencanaan, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi, mutasi dan rotasi pada ASN di Kementerian Dalam Negeri;
4. Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat mendorong setiap Unit Kerja untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP; dan
5. Melanjutkan koordinasi aktif lintas stakeholder dan meningkatkan peran Kementerian Dalam Negeri sesuai mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, diharapkan agar peran tersebut dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan level kinerjanya.

Sehubungan dengan hasil rekomendasi dimaksud, diminta seluruh Unit Kerja Lingkup Kemendagri untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki rumusan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan berorientasi hasil (outcome);
2. Menyusun peta strategis 5 tahunan dan memperbaiki pohon kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri pada tiap periode awal perencanaan (T-1) agar unit kerja memahami cascading/turunan kinerja serta pencapaian ouput dan outcomenya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Kementerian Dalam Negeri, terutama komponen pelaporan kinerja sebagai alat pertimbangan dalam perencanaan, penentuan strategi dan kebijakan, target kinerja kedepan, dan pola pengembangan kompetensi Lingkup Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Unit Kerja terkait yang melaksanakan mandat sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem agar mengakomodir kegiatan dimaksud dalam dokumen Renja dan RKA-K/L TA.2024.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.9-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengembangan Aplikasi SIRIKA dengan penambahan menu e-Sakip dalam rangka mempermudah Unit Kerja Eselon I dalam melakukan perencanaan program, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja serta sebagai sarana dalam mengimplementasikan SAKIP Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengendalian secara berkala baik secara langsung melalui rapat pengendalian yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja Eselon I serta pengendalian kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran (termasuk pelaksanan Rencana Aksi Penugasan Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Jaga.id KPK, Sispan KSP, Inpresp4gn).
4. Dalam penyusunan Laporan Kinerja telah disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (target dan progress triwulanan) dalam rangka mengungkapkan informasi mengenai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan umpan balik dalam rangka mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
5. Perbaikan indikator kinerja di dalam dokumen revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan telah dihasilkan draft Permendagri tentang Revisi Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 yang nantinya akan diterbitkan pada tahun ini.

Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi internal, agar ke depan indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan atau relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun beberapa evaluasi keberlanjutan indikator dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja Kemendagri Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS/ EFISIENSI/ USULAN	TINDAKLANJUT
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Tetap	Tetap
		2. Indeks Kinerja Ormas	Tetap	Tetap
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	1. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	1. Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh Kemenko PMK 2. Khusus Kemendagri menjadi koordinator Indonesia Bersatu 3. Capaian indeks diluar kendali penuh dari Kemendagri	Tidak dilakukan pengukuran pada Tahun 2024
		2.Indeks Harmoni Indonesia	Indikator baru diusulkan dan dilakukan pengukuran pada Tahun 2023	Tetap
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Tetap	Tetap
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	Tetap	Tetap
			Tetap	Tetap
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	Tetap	Tetap
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Tetap	Tetap
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Tetap	Tetap
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tetap	Tetap

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS/ EFISIENSI/ USULAN	TINDAKLANJUT
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		2. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	Tetap	Tetap
		3. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		4. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	Perlu menetapkan manual indikator atau formula pengukuran	Tetap
		5. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
		6. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	Tetap	Tetap
		7. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		8. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Tetap	Tetap
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Tetap	Tetap
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Tetap	Tetap
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Tetap	Tetap
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Tetap	Tetap
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Tetap	Tetap
			Tetap	Tetap
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	Tetap	Tetap

Implementasi Dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Dan Pengendalian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2023

Berdasarkan Pasal Pasal 13 dan 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penilaian risiko. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang menilai 3 Komponen (Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pancapaian Tujuan) dengan 5 unsur (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan). Selanjutnya, penerapan manajemen risiko mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi di internal. Pengendalian ini bersifat menyeluruh, yang menandakan seluruh unit kerja di setiap lapisan pada Kementerian Dalam Negeri berperan dalam kesuksesan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Adapun manfaat yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri dengan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko ini adalah:

1. Media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah;
2. Menjadi data dukung dalam proses monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri;
3. Memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi Kementerian Dalam Negeri;
4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh lapisan pada Kementerian Dalam Negeri mulai dari level Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT. Pada Level Kementerian, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus menjadi tolok ukur dalam Laporan Kinerja Kemendagri dimaksud.

Untuk menjamin penyelenggaraan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan manajemen risiko terimplementasi dengan baik, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. Merumuskan dan mengidentifikasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT) setelah 2 minggu DIPA ditetapkan;
3. Membentuk tim penilaian mandiri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.4.3-1152 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
4. Membentuk tim penjaminan kualitas melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 000.9.6.2-82 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
5. Membentuk tim Unit Kepatuhan Manajemen Risiko melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 000.9.5-1073 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Unit Kepatuhan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.
6. Melakukan Evaluasi atas Rencana Mitigasi yang telah diimplementasikan di setiap semester, melalui:

a. Pengisian formulir Rencana Mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT)
b. Proses evaluasi implementasi mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT); dan
c. Proses Evaluasi oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko terhadap seluruh dokumen manajemen risiko yang telah disusun di setiap level.

Salah satu keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko Kementerian Dalam terlihat dari peningkatan nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kemendagri

Nilai	2022	2023
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,297 (Level 3)	3,354 (Level 3)
Manajemen Risiko Indeks	3,009 (Level 3)	3,078 (Level 3)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,006 (Level 3)	3,000 (Level 3)

Nilai dari SPIP dan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 berada pada level 3 atau "terdefinisi" yang artinya Kementerian Dalam Negeri telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan dan menunjukkan tahapan-tahapan implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas.

Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA.2023

Total Pagu Anggaran Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri TA.2023 sebesar Rp.359.831.518.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.357.647.129.471,- atau sebesar (99,39%). Kementerian Dalam Negeri memiliki 112 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon 1 (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang mendukung pada 7 Tema Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" sebanyak 5 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,92% atau sebesar Rp.3.781.343.783 dari pagu anggaran sebesar Rp.3.784.358.000,-).
2. Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" sebanyak 61 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 98,81% atau sebesar Rp.169.758.151.274,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.171.811.185.000,-).
3. Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" sebanyak 14 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,37% atau sebesar Rp.13.086.319.268,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.13.169.799.000,-).
4. Prioritas Nasional 4 "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" sebanyak 6 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% atau sebesar Rp.5.154.350.628,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.5.155.575.000,-).
5. Prioritas Nasional 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" sebanyak 13 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,81% atau sebesar Rp.13.650.900.992,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.13.677.244.000,-).
6. Prioritas Nasional 6 "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" sebanyak sebanyak 1 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 98,96% atau sebesar Rp.1.239.784.472 dari Pagu anggaran sebesar Rp.1.252.800.000,-).
7. Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" sebanyak 12 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 100,00% atau sebesar Rp.150.976.279.054,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.150.980.557.000,-).

Gambar 4.1
Prioritas Nasional RKP 2023 Lingkup Kemendagri

Tabel 4.3
Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri Tahun Anggaran 2023

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			**3.784.358.000**	**3.781.343.783**	**99,92**				
1	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	"Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan"	660.000.000	658.958.427	99,84	18	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	26	144,44
2	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	"Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS"	831.827.000	830.924.183	99,89	27	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	27	100,00
3	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	604.000.000	602.964.295	99,83	19	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	19	100,00
4	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	947.381.000	947.380.424	100,00	30	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	113,33
5	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	741.150.000	741.116.454	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	38	111,76
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			**171.811.185.000**	**169.758.151.274**	**98,81**				
1	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	85.927.765.000	84.998.983.058	98,92	22	Rekomendasi Kebijakan	22	100,00
2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pengendalian kinerja pelaksanaaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat"	2.554.158.000	2.552.669.729	99,94	34	Laporan	34	100,00
3	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif "	1.221.662.000	1.217.798.323	99,68	80	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	80	100,00
4	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi"	2.292.336.000	2.288.018.560	99,81	68	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	68	100,00
5	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi"	967.620.000	956.922.522	98,89	46	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	46	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
6	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	801.330.000	795.697.936	99,30	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
7	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	3.500.000.000	3.492.362.004	99,78	43	Rekomendasi Kebijakan	43	100,00
8	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan"	1.028.000.000	1.007.926.557	98,05	6	Kesepakatan	6	100,00
9	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik - Pusat	1.760.000.000	1.749.146.568	99,38	14	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	14	100,00
10	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.527.078.000	1.524.909.874	99,86	468	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	468	100,00
11	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	958.878.000	951.438.122	99,22	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00
12	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.093.810.000	1.092.989.717	99,93	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00
13	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana"	880.000.000	879.052.916	99,89	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
14	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan"	513.998.000	513.660.808	99,93	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
15	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	2.000.000.000	1.997.152.165	99,86	150	Desa	150	100,00
16	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	1.000.000.000	996.969.901	99,70	105	Desa	105	100,00
17	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	10.405.796.000	10.388.871.065	99,84	3240	Orang	3240	100,00
18	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	10.904.875.000	10.027.592.967	91,96	1034	Desa	618	59,77

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
19	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah"	1.000.000.000	999.999.500	100,00	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	509	123,54
20	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat"	841.708.000	841.706.647	100,00	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	507	123,06
21	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan"	931.680.000	916.690.967	98,39	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	515	125,00
22	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial"	791.200.000	790.747.711	99,94	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	509	123,54
23	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas"	737.500.000	736.548.964	99,87	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	512	124,27
24	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan"	959.081.000	957.522.743	99,84	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	511	124,03
25	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Perkotaan)"	1.297.323.000	1.295.103.994	99,83	7	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	7	100,00
26	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Permendagri mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan, Tata Cara Seleksi, Materi Seleksi, dan Indikator Penilaian Calon Anggota Pansel Provinsi"	160.000.000	159.748.000	99,84	1	PerMen	1	100,00
27	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Permendagri mengenai Tata Cara Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Daerah Otonom hasil pemekaran di Provinsi Papua"	160.000.000	159.669.000	99,79	1	PerMen	1	100,00
28	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Revisi UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Prov. DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI	800.000.000	793.801.850	99,23	1	peraturan	1	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
29	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi kebijakan DPOD dalam penyelenggaaran pemerintahan dan keuangan daerah "	2.352.085.000	2.351.743.651	99,99	4	Rekomendasi Kebijakan	4	100,00
30	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pemantapan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua "	1.080.000.000	1.079.591.030	99,96	2	Rekomendasi Kebijakan	6	300,00
31	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi Perdais/Pergub DIY "	400.000.000	399.108.400	99,78	1	Rekomendasi Kebijakan	2	200,00
32	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi Qanun/Pergub Aceh "	480.000.000	479.340.220	99,86	1	Rekomendasi Kebijakan	2	200,00
33	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah otonom hasil pemekaran yang difasilitasi penyelesaian permasalahan"	2.744.992.000	2.739.642.376	99,81	17	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	17	100,00
34	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Provinsi yang disupervisi kinerjanya dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Keistimewaan "	2.510.170.000	2.508.551.333	99,94	5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	9	180,00
35	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Fasilitasi Pelaksanaan Program Afirmasi Pembangunan SDM di Wilayah Papua	880.000.000	875.992.553	99,54	1	Provinsi	6	600,00
36	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) "	2.858.200.000	2.850.738.668	99,74	18	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	12	66,67
37	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1.056.000.000	1.054.458.588	99,85	234	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	48	20,51
38	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah "	525.000.000	520.551.122	99,15	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100,00
39	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Database peraturan daerah	1.056.000.000	1.049.145.725	99,35	1	Data	1	100,00
40	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri "	1.424.815.000	1.420.683.307	99,71	23	Rekomendasi	23	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
41	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum "	1.387.083.000	1.380.340.002	99,51	30	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	30	100,00
42	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Perubahan kedua PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	500.000.000	499.388.700	99,88	1	RPP	1	100,00
43	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	834.280.000	833.771.780	99,94	65	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	65	100,00
44	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	785.000.000	774.248.874	98,63	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
45	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	700.000.000	698.597.721	99,80	450	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	450	100,00
46	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	800.000.000	795.699.222	99,46	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00
47	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	365.000.000	357.891.139	98,05	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
48	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah"	1.286.000.000	1.269.293.806	98,70	455	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	455	100,00
49	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	1.578.685.000	1.572.147.517	99,59	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00
50	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	1.338.664.000	1.336.574.213	99,84	225	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	225	100,00
51	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar"	1.021.680.000	1.018.296.858	99,67	478	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	478	100,00
52	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH) "	1.000.000.000	999.996.004	100,00	176	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	176	100,00
53	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas"	648.288.000	683.730.496	105,47	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
54	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	800.000.000	799.698.298	99,96	5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	5	100,00
55	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah "	1.000.000.000	998.380.898	99,84	542	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	542	100,00
56	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang Meningkat Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Pusat - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	580.760.000	579.039.122	99,70	390	Orang	420	107,69
57	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkat Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	216.920.000	216.919.844	100,00	180	Orang	188	104,44
58	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	251.920.000	251.920.000	100,00	182	Orang	913	501,65
59	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	433.840.000	433.836.886	100,00	300	Orang	300	100,00
60	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	1.032.325.000	989.446.374	95,85	272	Orang	272	100,00
61	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang Meningkat Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional"	867.680.000	855.684.379	98,62	600	Orang	600	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			**13.169.799.000**	**13.086.319.268**	**99,37**				
1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	462.500.000	457.889.450	99,00	514	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	514	100,00
2	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK"	495.972.000	495.812.808	99,97	7	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	7	100,00
3	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M"	473.947.000	472.646.111	99,73	7	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	7	100,00
4	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	576.000.000	563.215.001	97,78	60	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	60	100,00
5	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)"	554.193.000	550.737.904	99,38	28	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	28	100,00
6	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)"	429.193.000	423.446.415	98,66	26	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	26	100,00
7	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	570.924.000	568.033.752	99,49	28	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	28	100,00
8	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan"	718.654.000	717.583.603	99,85	30	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	30	100,00
9	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	4.459.660.000	4.453.614.899	99,86	1000	Lembaga	1.005	100,50
10	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Kematian yang diterbitkan	478.603.000	455.262.849	95,12	250000	Akta	2.228.368	891,35
11	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Perkawinan yang diterbitkan	372.620.000	371.270.019	99,64	30000	Akta	218.785	729,28

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
12	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Perceraian yang diterbitkan	319.100.000	314.390.892	98,52	4000	Akta	15.035	375,88
13	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Kelahiran yang diterbitkan	1.258.433.000	1.244.220.020	98,87	400000	Akta	1.144.569	286,14
14	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)"	2.000.000.000	1.998.195.545	99,91	15	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	18	120,00
04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			**5.155.575.000**	**5.154.350.628**	**99,98**				
1	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	255.575.000	255.004.218	99,78	58,5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	59,0	100,85
2	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	"Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa"	1.400.000.000	1.399.997.128	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
3	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	700.000.000	699.998.871	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
4	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	750.000.000	749.998.974	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
5	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	1.450.000.000	1.449.362.502	99,96	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
6	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	"Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)"	600.000.000	599.988.935	100,00	23	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	23	100,00
05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			**13.677.244.000**	**13.650.900.992**	**99,81**				
1	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	1.857.531.000	1.857.142.648	99,98	76	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	76	100,00
2	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan"	796.932.000	796.931.382	100,00	1	"Sistem Informasi"	1	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
3	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman"	879.083.000	878.924.218	99,98	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
4	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	607.800.000	603.216.147	99,25	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
5	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman"	651.950.000	646.867.356	99,22	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
6	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)"	1.500.000.000	1.499.992.673	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
7	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)"	680.000.000	678.505.188	99,78	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
8	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman"	1.000.000.000	999.413.028	99,94	48	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	48	100,00
9	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air"	600.000.000	600.000.000	100,00	24	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	141,67
10	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan"	890.978.000	890.513.870	99,95	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
11	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	411.250.000	410.734.136	99,87	8	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	8	100,00
12	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran"	1.339.780.000	1.330.685.678	99,32	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
13	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.461.940.000	2.457.974.668	99,84	5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	5	100,00
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			**1.252.800.000**	**1.239.784.472**	**98,96**				
1	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.252.800.000	1.239.784.472	98,96	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			**150.980.557.000**	**150.976.279.054**	**100,00**				
1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	"Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara"	3.736.429.000	3.734.103.127	99,94	5	Kesepakatan	5	100,00
2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000	798.915.000	99,86	170	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	170	100,00
3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	"Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah"	1.600.000.000	1.599.955.000	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
4	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	"Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika"	800.000.000	799.970.950	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
5	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	7.500.000.000	7.499.394.432	99,99	750	Orang	750	100,00
6	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	1.265.410.000	1.265.401.691	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
7	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00
8	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00	5000	Orang	5000	100,00
9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	1.149.900.000	1.149.900.000	100,00	400	Orang	400	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
10	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kapasitas pengurus ormas	1.052.400.000	1.052.317.724	99,99	1200	Orang	1200	100,00
11	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	126.376.418.000	126.376.418.000	100,00	9	Lembaga	9	100,00
12	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.700.000.000	1.699.903.130	99,99	15	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	15	100,00

BAB V
PENUTUP

PENUTUP

Pencapaian tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri tertuang pada visi misi Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian visi misi Kementerian Dalam Negeri tercapai dalam 5 tahun kerja, sehingga Tahun 2023 (tahun ke-4 Rencana Strategis), pencapaian visi dan misi dapat dilihat dari ketercapaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 (Adendum II).

Dalam Laporan Kinerja ini dituangkan data berdasarkan 12 Sasaran Strategis yang di dalamnya diukur berdasarkan ketercapaian 26 Indikator Kinerja Utama. Adapun rata-rata capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan 12 sasaran sebesar 103,93% dengan predikat Sangat Tinggi dan kategori Sangat Berhasil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Capaian Sasaran Strategis

No.	Nama Indikator	Capaian (%)	Predikat	Kategori
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	109,54	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	107,60	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	120	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	100	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	91,92	Tinggi	Berhasil
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	92,04	Tinggi	Berhasil
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	103,09	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	111,66	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	100	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	101,42	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	89,90	Sedang	Cukup Berhasil
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	120	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
Kinerja Kementerian Dalam Negeri		**103,93**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Berhasil**

Ketercapaian kinerja sebesar 103,93% dimaksud menggambarkan semakin berkualitasnya aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian target kinerja ke depannya yaitu dengan memperkuat pelaksanaan aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek penataan aparatur, melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 Jakarta, 29 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kepada Yth.:
Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini dapat disampaikan bahwa proses penelaahan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil telaah Bappenas, secara prinsip muatan Renstra Kementerian Dalam Negeri telah sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional

Tri Dewi Virgiyanti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PK AWAL

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,37	DITJEN POLPUM
		2. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65,0	
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,395	
		2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,4	
		3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,880	
		4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,325	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63,0	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
		2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai 40	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Nilai 3 (90%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,1 (Tinggi)	

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	80%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	60%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,75	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	40%	BSKDN
		8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	137 daerah	
		9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 91.01	SETJEN

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	60%	BSKDN

Program	**Anggaran**
Kementerian Dalam Negeri	**Rp. 2.981.302.990.000,-**
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.903.299.706.000,-
2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 357.480.121.000,-
3. Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 523.515.457.000,-
4. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 197.007.706.000,-

Jakarta,
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Muhammad Tito Karnavian

PK ADENDUM I

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,37	DITJEN POLPUM
		2. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65,0	
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	1. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,4	
		2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,880	
		3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,325	
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63,0	
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Nilai 3 (90%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		2. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM *	80%	DITJEN BINA BANGDA
		3. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		4. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%	DITJEN BINA PEMDES
		5. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	DITJEN BINA KEUDA
		6. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	BSKDN
		7. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		8. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	
9.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01	SETJEN
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83	
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri *	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri *	60%	BSKDN

*= Nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama diubah dan telah diusulkan pada revisi Renstra ke Bappenas, sehingga tidak diukur (nonaktif).

Perubahan Nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Usulan Revisi Renstra

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Pencapaian SPM di Daerah	Nilai 75	DITJEN BINA BANGDA
2.	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	BSKDN

No	Program	Anggaran
Kementerian Dalam Negeri		**Rp. 4.341.298.917.000,-**
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.937.599.483.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.458.807.982.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 747.883.746.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 197.007.706.000,-

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

PK ADENDUM II

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25 *	DITJEN POLPUM
		2. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	1. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 73,13 *	
		2. Indeks Harmoni Indonesia **	Nilai 6**	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (90%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		2. Persentase capaian penerapan SPM di daerah **	80%**	DITJEN BINA BANGDA
		3. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron) *	
		4. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%	DITJEN BINA PEMDES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	DITJEN BINA KEUDA
		6. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	BSKDN
		7. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		8. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01 *	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri *	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri *	40% *	BSKDN

*Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra
**Indikator baru dalam Usulan Revisi Renstra

No	Program	Anggaran
Kementerian Dalam Negeri		**Rp. 4.385.969.126.000,-**
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.961.839.223.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.474.298.785.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 752.847.470.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 196.983.648.000,-

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2023 *AUDITED*